Pemerintah
Kabupaten Tulungagung

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2025 - 2029







BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengaingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Pasal 2

(1) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RPJMD 2025-2029.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
    a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan

b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1) RPJMD dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan:
   a. Renstra Perangkat Daerah;
   b. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
   c. Perencanaan penganggaran.

(2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum kondisi daerah;
   c. visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
   d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
   e. penutup.

(2) Isi beserta uraian RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian terhadap :
   a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi terhadap:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
   c. hasil rencana pembangunan daerah.

(5) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
   b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
   c. sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 Nomor 26);
b. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30),

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,

GATUT SUNU WIBOWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. TRI HARIADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700906 199101 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025 Nomor 1 Seri C

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 143-3/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati Tahun 2024. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Penyusunan RPJMD 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama. Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana

pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Keempat, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunanya mau tidak mau harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah.

RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pemerintah
Kabupaten Tulungagung

Lampiran

Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 3 Tahun 2025

tentang

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-3
1.3 Hubungan antara Dokumen I-6
1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 ..... I-7
1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... I-7
1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 ..... I-8
1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Provinsi Jawa Timur 2023-2043 ..... I-9
1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043 ..... I-13
1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 ..... I-16
1.3.7 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra, RKPD, Renja, dan APBD I-16
1.3.8 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 ..... I-16
1.4 Maksud dan Tujuan I-17
1.5 Sistematika Penulisan I-18
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam II-6
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-7
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan II-13
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas II-24
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-29
2.1.7 Demografi II-35
2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat II-46
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-46
2.2.2 Kesehatan untuk Semua II-57

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata II-64
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif II-69
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-71
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-77
2.3 Aspek Daya Saing Daerah II-82
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia II-82
2.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-82
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-90
2.3.4 Transformasi Digital II-91
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-92
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-94
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro II-105
2.3.8 Kondisi Riset dan Sektor Unggulan Daerah II-108
2.3.9 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) II-110
2.3.10 Rasio Kewirausahaan II-110
2.4 Aspek Pelayanan Umum II-111
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-112
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-119
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-124
2.4.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal II-124
2.4.5 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah II-152
2.5 Gambaran Keuangan Daerah II-163
2.5.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 ..... II-163
2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030 ..... II-217
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis II-242
2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-242
2.6.2 Isu Strategis Daerah II-260
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 ..... III-1
3.2 RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Integral Pencapaian RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-3
3.3 Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2025-2029 ..... III-4
3.3.1 Visi Pembangunan Daerah III-4
3.3.2 Misi Pembangunan Daerah III-6

3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah III-13
3.5 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....III-18
3.5.1 Penahapan Pembangunan III-18
3.5.2 Pembangunan Kewilayahan.....III-40
3.5.3 Strategi.....III-60
3.5.4 Arah Kebijakan.....III-61
3.6 Program Prioritas Daerah III-70
3.6.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029.....III-70
3.6.2 Penyandingan Program Prioritas dengan Program Nomenklatur.....III-86
3.7 Program Strategis Nasional.....III-101
3.8 Dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN 2025-2029 III-101
3.9 Dukungan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 .....III-103
3.10 Dukungan Program Prioritas RPJMD Jawa Timur 2025-2029 ..III-106
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.....IV-2
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....IV-53
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-53
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-54
BAB V PENUTUP..... V-1
5.1 Kesimpulan V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-2
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah....V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikasi Program RTRW Provinsi Jawa Timur yang terkait daerah Kabupaten Tulungagung I-10
Tabel 1. 2 Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tulungagung I-13

Tabel 2. 1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung II-2
Tabel 2. 2 Kesesuaian Lahan menurut Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 ..... II-8
Tabel 2. 3 Daya Dukung Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 ..... II-9
Tabel 2. 4 Daya Dukung Pangan Kabupaten Tulungagung tahun 2024 ..... II-10
Tabel 2. 5 Daya Dukung Air Bersih Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 ..... II-11
Tabel 2. 6 Daya Dukung Air Bersih Kabupaten Tulungagung tahun 2029 ..... II-12
Tabel 2. 7 Capaian indikator Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-14
Tabel 2. 8 Jumlah Desa Rawan Pangan Kab. Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-16
Tabel 2. 9 Perkembangan Komoditas Harga Pangan (Rp) Kab Tulungagung 2020-2024 ..... II-18
Tabel 2. 10 Aliran Sungai di Setiap Kecamatan Kabupaten Tulungagung .. II-20
Tabel 2. 11 Cakupan Cekungan Air Tanah di Kabupaten Tulungagung II-22
Tabel 2. 12 Pelayanan Air Minum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – 2024 ..... II-22
Tabel 2. 13 Pelayanan Sanitasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2024 ..... II-26
Tabel 2. 14 Timbulan sampah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024 ..... II-27
Tabel 2. 15 Layanan Persampahan Kabupaten Tulungagung II-28
Tabel 2. 16 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah II-28
Tabel 2. 17 Indikator kinerja kebencanaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-29
Tabel 2. 18 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024 ..... II-36
Tabel 2. 19 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 ..... II-38
Tabel 2. 20 Proyeksi Penduduk di Kabupaten Tulungagung II-41

Tabel 2. 21 Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulungagung II-41
Tabel 2. 22 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 ..... II-46
Tabel 2. 23 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-48
Tabel 2. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 ..... II-49
Tabel 2. 25 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional II-55
Tabel 2. 26 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional II-55
Tabel 2. 27 Kesehatan Ibu dan Bayi Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-59
Tabel 2. 28 Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-61
Tabel 2. 29 Jumlah fasilitas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-62
Tabel 2. 30 SDM Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .. II-63
Tabel 2. 31 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-63
Tabel 2. 32 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024 ..... II-66
Tabel 2. 33 Kondisi Koperasi dan UKM di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2. 34 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024 ..... II-88
Tabel 2. 35 PDRB Non Pertambangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-90
Tabel 2. 36 Tabel Ruas Jalan Menurut Fungsinya Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 ..... II-95
Tabel 2. 37 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2. 38 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2. 39 Jumlah desa berdasarkan IDM Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur II-97
Tabel 2. 40 Indeks Desa Membangun Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2. 41 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-99

Tabel 2. 42 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tulungagung 2020-2024 ..II-101
Tabel 2. 43 Jumlah Bus dan jumlah penumpang di terminal Gayatri 2020-2024 .....II-102
Tabel 2. 44 Strategi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 .....II-109
Tabel 2. 45 Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024.....II-114
Tabel 2. 46 Capaian indikator urusan kearsipan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024.....II-115
Tabel 2. 47 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-117
Tabel 2. 48 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-119
Tabel 2. 49 Capaian Standar Pelayanan Minimal 6 Urusan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.....II-125
Tabel 2. 50 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024.....II-152
Tabel 2. 51 Realisasi APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .II-165
Tabel 2. 52 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-168
Tabel 2. 53 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024.....II-175
Tabel 2. 54 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-182
Tabel 2. 55 Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-187
Tabel 2. 56 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-190
Tabel 2. 57 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-204
Tabel 2. 58 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-208
Tabel 2. 59 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 .....II-218
Tabel 2. 60 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 .....II-223
Tabel 2. 61 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 .....II-231
Tabel 2. 62 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 .....II-237

Tabel 2. 63 Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 ..... II-240
Tabel 2. 64 Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor II-243
Tabel 2. 65 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 ..... II-247
Tabel 2. 66 Telaah Isu Strategis Internasional RPJPN 2025-2045 ..... II-261
Tabel 2. 67 Alternatif skenario dan rekomendasi dalam KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung 2024-2029 ..... II-277
Tabel 2. 68 Perumusan Isu Strategis Daerah II-282

Tabel 3. 1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 ..... III-2
Tabel 3. 2 Arah Kebijakan Tahap I RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 ..... III-2
Tabel 3. 3 Asta Cita RPJM Nasional Tahun 2025-2029 ..... III-3
Tabel 3. 4 Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/ Quick Wins RPJM Nasional Tahun 2025-2029 ..... III-4
Tabel 3. 5 Keselarasan Visi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD III-6
Tabel 3. 6 Keselarasan Misi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD III-11
Tabel 3. 7 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029 ..... III-16
Tabel 3. 8 Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Tulungagung III-22
Tabel 3. 9 Penahapan Program Prioritas Pembangunan Setiap Tahun RPJMD Kabupaten Tulungagung III-31
Tabel 3. 10 Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-40
Tabel 3. 11 Penekanan Indikasi Intervensi di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur III-44
Tabel 3. 12 Strategi Pembangunan Kewilayahan III-47
Tabel 3. 13 Perumusan Strategi Berbasis Respon Atas Isu Strategis III-61
Tabel 3. 14 Keselarasan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 ..... III-62
Tabel 3. 15 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 ..... III-71
Tabel 3. 16 Penyandingan Program Prioritas Daerah dengan Program Nomenklatur III-87
Tabel 3. 17 Dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN 2025-2029 ..... III-101
Tabel 3. 18 Dukungan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 ..... III-103
Tabel 3. 19 Dukungan Program Program Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 ..... III-107

Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 .....IV-2
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tulungagung 2025-2029 .....IV-53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-7

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung.....II-2
Gambar 2. 2 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tulungagung.....II-3
Gambar 2. 3 Peta Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian II-6
Gambar 2. 4 Peta pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Perikanan.....II-7
Gambar 2. 5 Peta Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2029 .....II-11
Gambar 2. 6 Peta Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Tulungagung 2029 .....II-13
Gambar 2. 7 Diagram Luas Panen Dan Volume Produksi Padi II-14
Gambar 2. 8 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung II-17
Gambar 2. 9 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tulungagung.....II-18
Gambar 2. 10 Persentase penduduk terlayani air minum layak dan aman Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024 .....II-24
Gambar 2. 11 Grafik Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2020-2024 ..II-25
Gambar 2. 12 Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-30
Gambar 2. 13 Grafik Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024 .....II-31
Gambar 2. 14 Grafik Capaian Luas Lahan yang Mengalami Penurunan emisi II-34
Gambar 2. 15 Penurunan Emisi GRK Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 II-34
Gambar 2. 16 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024.....II-36
Gambar 2. 17 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung 2020-2024 .....II-38
Gambar 2. 18 Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.....II-40
Gambar 2. 19 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 .....II-42
Gambar 2. 20 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 .....II-43
Gambar 2. 21 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2029 .....II-44
Gambar 2. 22 Proyeksi Penduduk Lanjut Usai Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 .....II-45
Gambar 2. 23 Grafik Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-47
Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Dengan Rata-rata Pertumbuhan Tertinggi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-50
Gambar 2. 25 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-51

Gambar 2. 26 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-52
Gambar 2. 27 Grafik Tingkat kemiskinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024 .....II-53
Gambar 2. 28 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.....II-54
Gambar 2. 29 Grafik Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2020-2024.....II-56
Gambar 2. 30 PDRB Per Kapita Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-57
Gambar 2. 31 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.....II-58
Gambar 2. 32 Grafik Prevalensi Stunting Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-60
Gambar 2. 33 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-64
Gambar 2. 34 Grafik Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Tulungagung 2020 - 2024 .....II-65
Gambar 2. 35 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019-2023 .....II-65
Gambar 2. 36 Angka Partisipasi Kasar Kab. Tulungagung Tahun 2020 – 2024.....II-67
Gambar 2. 37 Angka Partisipasi Murni Kab. Tulungagung Tahun 2020 – 2024 .....II-67
Gambar 2. 38 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Tulungagung Tahun 2019 – 2023 ..II-68
Gambar 2. 39 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2024 .....II-69
Gambar 2. 40 Persentase Peningkatan Pekerja yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.....II-70
Gambar 2. 41 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023 .....II-72
Gambar 2. 42 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023 .....II-73
Gambar 2. 43 Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Lestari Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2023 .....II-74
Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024 .....II-74
Gambar 2. 45 Indeks Gotong Royong dalam IPMas Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024 .....II-75
Gambar 2. 46 Indeks Toleransi dalam IPMas Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024 .....II-76
Gambar 2. 47 Indeks Rasa Aman dalam IPMas Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024 .....II-76
Gambar 2. 48 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 dan 2023 .....II-78
Gambar 2. 49 Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023 .....II-79

Gambar 2. 50 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-80
Gambar 2. 51 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023 .....II-81
Gambar 2. 52 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .II-82
Gambar 2. 53 Grafik Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-83
Gambar 2. 54 Grafik Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024.....II-85
Gambar 2. 55 Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-87
Gambar 2. 56 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-88
Gambar 2. 57 Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024.II-89
Gambar 2. 58 Grafik Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Tulungagung 2020-2024 .....II-92
Gambar 2. 59 Pembentukan Modal Tetap Bruto 2019-2024 .....II-92
Gambar 2. 60 Grafik Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Tulungagung 2019-2024 .....II-94
Gambar 2. 61 Persentase Panjang Jalan Mantap dan Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-95
Gambar 2. 62 Grafik Persentase Desa Mandiri Kabupaten Tulungagung 2020-2024 .....II-98
Gambar 2. 63 Persentase angkutan yang melayani Masyarakat.....II-102
Gambar 2. 64 Indeks Infrastruktur Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .II-104
Gambar 2. 65 Rata-rata luas baku sawah yang mendapat air irigasi setiap musim tanam Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.....II-105
Gambar 2. 66 Grafik Tingkat Inflasi Year – on – year (Y-on-Y) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional II-106
Gambar 2. 67 Grafik Inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Tulungagung 2024 .....II-107
Gambar 2. 68 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung 2020-2024 .....II-108
Gambar 2. 69 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-110
Gambar 2. 70 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-111
Gambar 2. 71 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....II-112
Gambar 2. 72 Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ...II-113
Gambar 2. 73 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024 .....II-118
Gambar 2. 74 Indeks Demokrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 .....II-121
Gambar 2. 75 Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 .....II-123

Gambar 2. 76 Skor Indeks Daya Saing Daerah II-124
Gambar 2. 77 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-166
Gambar 2. 78 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (%) II-169
Gambar 2. 79 Pertumbuhan Masing-masing Komponen Pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-170
Gambar 2. 80 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-172
Gambar 2. 81 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 ..... II-173
Gambar 2. 82 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Aslli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-177
Gambar 2. 83 Proporsi Komponen PAD Terhadap Terhadap PAD (%), Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-179
Gambar 2. 84 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-184
Gambar 2. 85 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-191
Gambar 2. 86 Pertumbuhan Realisasi Belanja Operasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-194
Gambar 2. 87 Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-196
Gambar 2. 88 Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Terduga, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-199
Gambar 2. 89 Pertumbuhan Realisasi Belanja Transfer, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-201
Gambar 2. 90 Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Neto dan SILPA, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-205
Gambar 2. 91 Rasio Likuiditas Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-212
Gambar 2. 92 Rasio Solvabilitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-214
Gambar 2. 93 Rasio Aktivitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen) II-216
Gambar 2. 94 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar) II-224
Gambar 2. 95 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar) II-227
Gambar 2. 96 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar) II-232

Gambar 2. 97 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar) II-234

Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 .....III-11
Gambar 3. 2 Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tulungagung.....III-14
Gambar 3. 3 Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 .....III-19

BAB I
PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat informasi terkait latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang relevan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD, RPJMN, RTRW, KLHS, serta rencana sektoral lainnya), maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, serta sistematika penulisan dalam dokumen.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencanan pembangunan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan serta tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, serta menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, serta sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017, maka Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru tahun 2025-2029. Disisi lain, RPJMD Kabupaten Tulungagung periode 2025-2029 juga merupakan perwujudan tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Pengertian tersebut menempatkan perencanaan pembangunan dalam posisi strategis untuk menentukan efektivitas pengelolaan kewenangan daerah

yang besar di era otonomi daerah. Perencanaan pembangunan sekaligus menjadi ruang interaksi antar pemangku kepentingan dalam konteks *good governance*.

RPJMD merupakan dokumen strategis untuk merealisasikan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selain itu, RPJMD sebagai instrumen untuk menilai kinerja Kepala Daerah sampai akhir periode kepemimpinannya. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui visi dan misi yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

RPJMD Kabupaten Tulungagung disajikan dalam lima bab, yang meliputi bab Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; serta Penutup. Dalam penyusunan dokumen RPJMD digunakan beberapa pendekatan perencanaan dan berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RTRW, RPJMN, serta dokumen sektoral terkait. Selain dokumen sektoral, penyusunan dokumen RPJMD turut mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh sebab itu, dalam pembangunan 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus mempertimbangkan skenario dan rekomendasi yang telah dijabarkan dalam dokumen KLHS RPJMD tahun 2025-2029.

Pendekatan perencanaan yang digunakan berorientasi pada proses dan hasil. Pendekatan perencanaan berorientasi proses terdiri dari 4 empat pendekatan yakni (1) Pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah; (2) pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (3) pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama DPRD; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Pendekatan perencanaan yang berorientasi hasil terdiri dari tiga pendekatan yaitu pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif yaitu pendekatan yang menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan

yang efektif merupakan salah satu faktor utama untuk mengatasi berbagai permasalahan, memaksimalkan potensi yang tersedia, dan menanggapi isu-isu strategis daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

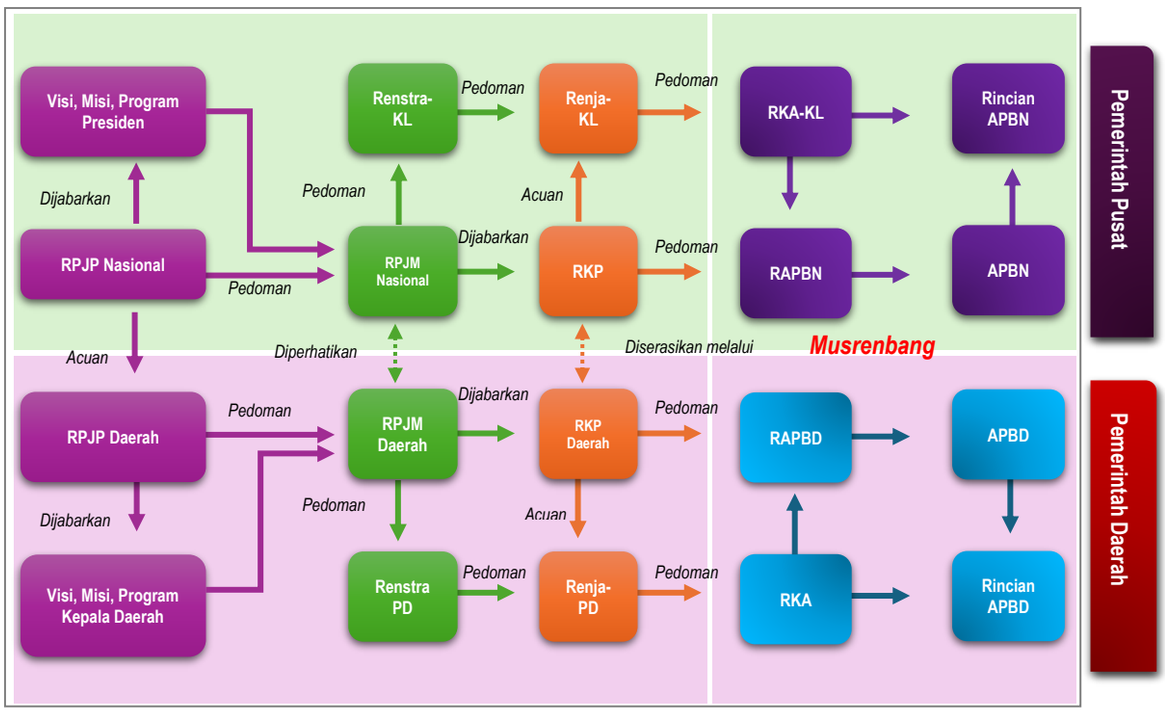
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor l9 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan antara Dokumen

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya, dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan lainnya dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya (nasional) ataupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kabupaten. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029 berpedoman pada beberapa dokumen seperti RPJPD Tulungagung, RPJMN, RPJMD Jawa Timur, RTRW Jawa Timur, RTRW Tulungagung, KLHS RPJMD Tulungagung, Renstra, Renja, APBD, RIPJPID, dan dokumen sektoral lainnya.



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Dokumen RPJMD dengan demikian harus memiliki keterkaitan untuk membangun sinergi antar perencanaan berjangka maupun dengan perencanaan pemerintah pusat dan provinsi. Secara detail berikut hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2025-2029 merupakan pelaksanaan periode pertama RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045. Adapun muatan yang diacu dari dokumen RPJPD diantaranya keselarasan visi, misi, isu strategis, dan arah kebijakan RPJPD. RPJPD Kabupaten Tulungagung telah merumuskan visi pembangunan jangka panjang, yaitu **"Tulungagung maju, sejahtera, berkarakter dan berkelanjutan".** Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tulungagung dicapai melalui lima misi yaitu mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif; transformasi sosial untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan; transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi berkualitas; stabilitas keamanan serta ketahanan sosial budaya; serta mewujudkan infrastruktur berkualitas, ketahanan ekologi dan bencana. Adapun arah kebijakan periode pertama RPJPD Kabupaten Tulungagung memiliki tema "**penguatan landasan-landasan pembangunan pondasi".** Pada tahap pertama tersebut perencanaan pembangunan difokuskan pada hal-hal yang bersifat fundamental diantaranya pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar lainnya untuk menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung berkesesuaian waktu dengan RPJMN. Penyesuaian ini merupakan modal penting untuk

membangun sinergi antara pembangunan jangka menengah daerah dengan nasional. RPJMN tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPN yang memiliki tema periode berupa “penguatan fondasi transformasi”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jangka menengah daerah juga memiliki agenda besar berupa penguatan fondasi transformasi daerah. Adapun muatan yang diacu pada dokumen RPJMN diantaranya keselarasan visi, misi, isu strategis, kegiatan prioritas utama RPJMN, proyek strategis nasional (PSN), serta arah kebijakan kewilayahan Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD harus membangun keterkaitan dengan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur. Rancangan kinerja dan agenda pembangunan yang akan dijalankan oleh Provinsi Jawa Timur akan ditopang oleh Kabupaten Tulungagung. Beberapa substansi RPJMD Provinsi Jawa Timur yang ditelaah dan diacu, yaitu identifikasi kondisi Kabupaten Tulungagung di dalam konteks pembangunan provinsi, isu strategis, visi, misi, program prioritas, dan arah kebijakan. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan dengan 9 misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu:

1. **Jatim Sejahtera**, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu.
2. **Jatim Kerja**, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.
3. **Jatim Akses**, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
4. **Jatim Agro**, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.
5. **Jatim Cerdas**, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (*Education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
6. **Jatim Sehat**, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC).

7. **Jatim Berkah Amanah**, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
8. **Jatim Harmoni**, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga.
9. **Jatim Lestari**, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 menempatkan Kabupaten Tulungagung pada beberapa posisi strategis. Beberapa arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Tulungagung diantaranya Pengembangan Geopark Tulungagung; Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas; serta Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pacitan–Trenggalek– Tulungagung.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Provinsi Jawa Timur 2023-2043

Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jawa Timur tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2023-2043. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, meliputi:

1. Penguatan peran Kawasan Metropolitan terintegrasi dengan hierarki sistem pusat Permukiman yang nyaman hingga wilayah pembangunan terkecil agropolitan dan/atau gugusan kawasan pegunungan (*Smart Valley Development*);
2. pengintegrasian antar koridor pertumbuhan wilayah daratan yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP-3-K bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas wilayah;
3. peningkatan keterpaduan dan interkonektivitas jaringan infrastruktur dengan sistem permukiman (*Transit Oriented Development*) sebagai upaya mengurangi dampak aglomerasi (*backwash effect*) dan meningkatkan pemerataan pengembangan wilayah (*spread effect*);
4. pemantapan penyediaan infrastruktur wilayah dasar dan pengelolaan ekoregion dalam optimalnya variasi pengembangan satuan wilayah sungai, danau, dan laut;
5. peningkatan upaya preservasi dan konservasi pada Kawasan Lindung dengan prinsip penguatan biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan;

6. optimalisasi Kawasan Budi Daya guna menjadikannya Ruang yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
7. perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
8. pemaduserasian Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui pengaturan pengembangan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan terhadap kerawanan bencana dan rencana kontinjensi; dan
9. perwujudan KSP yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Sembilan poin di atas merupakan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur tahun 2023-2043 sehingga kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menentukan program prioritas untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Berdasarkan Indikasi Program RTRW Provinsi Jawa Timur, beberapa program yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Tulungagung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Indikasi Program RTRW Provinsi Jawa Timur yang terkait daerah Kabupaten Tulungagung

No	Program Utama	Arah Program Dan Lokasi
1	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Penguatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai pusat kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota sekitarnya, salah satunya berlokasi di Perkotaan Tulungagung
	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	
2	Perwujudan Jalan Arteri	Pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol di: ● Prigi – Bts. Kab. Tulungagung ● BTS. Kab. Tulungagung – Bululawang
3	Perwujudan Terminal Penumpang Tipe A	Pengembangan dan pemantapan prasarana terminal penumpang tipe A di Terminal Gayatri di Kabupaten Tulungagung ;
4	Perwujudan Jembatan Timbang	Pemantapan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) di JT Pojok (Kabupaten Tulungagung)
5	Perwujudan Jembatan	Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemantapan jalur/jembatan/flyover/underpass pada jalan perpotongan di : • Perlintasan Kereta Api Jalan Bts. Kab. Tulungagung - Bts. Kota Blitar I-VI • Perlintasan Kereta Api Jalan Bts. Kota Kediri – Bts. Kab. Tulungagung • Perlintasan Kereta Api Jalan Ir. Ngurah Rai (Tulungagung

No	Program Utama	Arah Program Dan Lokasi
6	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api	Pemantapan elabu jaringan kereta api melalui elabuhan double track di Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) Sidoarjo – Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi – Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung – Kediri – Kertosono – Surabaya
7	Perwujudan Stasiun Kereta Api	Pemantapan dan pengembangan prasarana stasiun kereta api
8	Perwujudan Pelabuhan Perikanan	• Pengembangan dan penguatan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai di Pelabuhan Perikanan Pantai di Popoh Kabupaten Tulungagung ;
		• Pengembangan dan penguatan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Pangkalan Pendaratan Ikan di Sine Kabupaten Tulungagung;
	Perwujudan Sistem Jaringan Energi	
9	Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Pengembangan dan pemantapan infrastruktur pembangkitan tenaga elabuh dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di • PLTA Tulungagung (Neyama) di Kabupaten Tulungagung ; • PLTA Wonorejo Kabupaten Tulungagung;
10	Perwujudan Pembangkit Listrik Lainnya	Pengembangan dan pemantapan infrastruktur pembangkitan tenaga elabuh dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
11	Perwujudan Jaringan seluler	Pengembangan jaringan elabuhan tower yang menggunakan elabu nirkabel atau BTS (*Base Transceiver Station*) terpadu
12	Perwujudan Jaringan satelit	Pengembangan jaringan satelit, dapat menggunakan tower maupun non tower
13	Perwujudan Sistem Jaringan irigasi	Pengembanggan dan pemantapan jaringan sumber daya air berupa elabu jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan pusat dan provinsi di : • D.I. Kaliboto di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung • D.I. Paingan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung
	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	
13	Perwujudan Sistem pengendalian banjir	Pengelolaan dan pengembangan elabu jaringan sumber daya air berupa bangunan pengendalian banjir di Bendungan Wonorejo, Bendungan Betak, Bendungan Ngipeng, Bendungan Boyolangu, Bendungan Karangtalun, dan Bendungan Pacar Kabupaten Tulungagung
14	Perwujudan Bangunan sumber daya air	Pengelolaan dan pengembangan elabu jaringan sumber daya air berupa bangunan sumber daya air di Bendungan Wonorejo, Bendungan Betak, Bendungan Ngipeng, Bendungan Boyolangu, Bendungan Karangtalun, dan Bendungan Pacar di Kabupaten Tulungagung ;

No	Program Utama	Arah Program Dan Lokasi
15	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Selatan yang melayani Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung
16	Perwujudan Kawasan Lindung badan Air	Pengendalian pemanfaatan ruang pada elabuh sekitar badan air sesuai nilai ekologi
	Perwujudan Pola Ruang	
17	Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap elabuh bawahannya	Pengawasan dan pemantauan untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap elabuh bawahannya berupa pelestarian elabuh konservasi dan elabuh hutan lindung
18	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove	• Rehabilitasi elabuh ekosistem mangrove yang buruk, • Penanaman kembali vegetasi mangrove pada wilayah yang mengalami kerusakan
	Perwujudan Rencana Kawasan Budi Daya	
19	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	Pengusahaan hutan produksi dengan menerapkan elabu silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
20	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat	Penetapan dan pengelolaan elabuh elabuhan rakyat
21	Perwujudan Kawasan Pertanian	Pengembangan dan penetapan elabuh pertanian, Pencegahan terjadinya alih fungsi lahan produktif pertanian, Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air
22	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan elabuh peruntukan elabuha yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, Pengendalian tata ruang pada elabuh peruntukan industri
23	Perwujudan Kawasan Pariwisata	Pengembangan Geopark berbasis keunggulan Kawasan di Aspiring Geopark Nasional Tulungagung
	Kawasan strategis provinsi	
24	Perwujudan Sistem Agropolitan Wilis (Lawu – Wilis)	Peningkatan produktivitas dan pertahankan luas lahan pertanian untuk sentra produksi agro, Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan dan diversifikasi produk olahan agro
25	Perwujudan Sistem Agropolitan Wilis (Lawu – Wilis)	Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan minapolitan dari penangkapan tradisional/modern hingga distribusi hasil produk, Peningkatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) melalui optimalisasi elabu elabuhan dan konektivitas elabuhan perikanan dll di Minapolitan Trenggalek – Pacitan – Tulungagung
26	Perwujudan Sistem Minapolitan Trenggalek – Pacitan – Tulungagung	Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan minapolitan dari penangkapan tradisional/modern hingga distribusi hasil produk
27	Perwujudan Aspiring Geopark Nasional Tulungagung	Peningkatan akses dan infrastruktur pendukung Kawasan Geopark di Jawa Timur sesuai dll di Aspiring Geopark Nasional Tulungagung

Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043

Dalam konteks pembangunan keruangan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung khususnya wilayah perkotaannya ditempatkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW merupakan kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di sekitarnya. Selain itu, Kabupaten Tulungagung juga ditempatkan sebagai daerah yang memiliki Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), khususnya WUP Batubara, Logam, dan Non Logam. Disisi lain, Kabupaten Tulungagung juga memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi diantaranya rawan bencana banjir, tsunami, gelombang ekstrim, kebakaran hutan lahan, kekeringan, gempa bumi dan gerakan tanah. Untuk itu, di samping memiliki potensi sumber daya alam yang cukup tinggi, pemerintah perlu antisipasi berbagai kemungkinan kebencanaan daerah.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung yaitu "Mewujudkan wilayah kabupaten yang berdaya saing melalui pengembangan agropolitan, industri, pariwisata, dan berbasis pada potensi lokal berkelanjutan". Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tulungagung, disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas:

1. Pemantapan kawasan agropolitan mandiri dan ramah lingkungan;
2. Pengembangan industri berdaya saing tinggi dalam menarik investasi berdasarkan potensi lokal;
3. Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan;
4. Pemantapan struktur pusat pelayanan yang sinegris;
5. Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah terpadu;
6. Pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung;
7. Pengembangan kawasan budi daya sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan;
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis; dan
9. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

RPJMD Kabupaten Tulungagung diselarasakan dengan Strategi Penataan Rencana Tata Ruang Kabupaten Tulungagung. Detail Strategi Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tulungagung

No	Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kab. Tulungagung
1	**Pemantapan kawasan agropolitan mandiri dan ramah lingkungan**
	❖ menetapkan kawasan pengembangan agropolitan;
	❖ menetapkan sektor unggulan pengembangan agropolitan; dan
	❖ mengembangkan infrastruktur pendukung agropolitan.

No	Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kab. Tulungagung
2	**Pengembangan industri berdaya saing tinggi dalam menarik investasi berdasarkan potensi lokal**
	❖ menetapkan kawasan peruntukan industri;
	❖ mengembangkan industri berwawasan lingkungan; dan
	❖ mengembangkan infrastruktur pendukung industri besar, menengah, serta sentra industri kecil.
3	**Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan**
	❖ mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata dan potensi lokal;
	❖ mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan
	❖ mengembangkan kawasan pariwisata unggulan.
4	**Pemantapan struktur pusat pelayanan bersinergi**
	❖ meningkatkan dan menetapkan sistem pusat perkotaan Kabupaten secara berjenjang;
	❖ meningkatkan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan;
	❖ meningkatkan fungsi kawasan perdesaan sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan minapolitan; dan
	❖ meningkatkan interaksi desa-kota melalui pengembangan sarana dan prasarana sesuai hierarki dan jangkauan pelayananannya
5	**Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah terpadu**
	❖ mengembangkan sistem transportasi intermoda;
	❖ meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi;
	❖ mengembangkan jaringan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan pertanian;
	❖ meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan komunikasi; dan
	❖ mengembangkan sarana prasarana lingkungan permukiman.

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

1.3.5.1 Pengendalian Pemanfataan Ruang

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. ketentuan umum zonasi;
b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

a. Berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
b. Mempertimbangkan kawasan strategis kabupaten;

c. Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
d. Terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
e. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam penetapannya;
f. Melindungi kepentingan umum; dan
g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi dari PK RTRW Kabupaten Tulungagung, arahan terkait ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Tulungagung berupa perubahan terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan dilarang pada tiap substansi RTRW sesuai dengan kebijakan dan dinamika perkembangan. Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten;

Insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang. Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:

a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
b. menindaklanjuti implikasi kebojakan atau rencana strategis nasional.

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap orang,kelompok dan badan hukum berhak (dan wajib) berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan peran serta masyarakat pada prinsipnya hanya dapat diwujudkan melalui terciptanya kondisi yang mendorong tumbuhnya kemauan masyarakat untuk terlibat, yang pada gilirannya akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Pengkondisian tersebut harus mengarah kepada timbulnya peran serta bebas dan mengeliminir sebanyak mungkin peranserta ‘terpaksa'. Peran serta ‘bebas’ terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang, berupa:

a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

Pengertian KLHS RPJMD di dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 yaitu analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Muatan hasil analisis KLHS antara lain berupa capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung, rumusan isu-isu strategis dan skenario pembangunan akan ditelaah dan diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD. Integrasi ini untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

Berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 terdapat delapan isu strategis yakni: kurang optimalnya pengelolaan dan pengembangan terhadap air minum layak, aman, dan sanitasi yang aman bagi masyarakat; upaya dalam peningkatan kapasitas kebencanaan yang masih rendah; pemeliharaan lingkungan yang kurang optimal dan ditemukan alih fungsi lahan; sistem pengolahan persampahan yang belum optimal; upaya dalam pengentasan kemiskinan yang belum merata dan optimal; akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan uang masih terbatas; peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan; serta belum optimalnya pengelolaan potensi sektor unggulan daerah.

1.3.7 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra, RKPD, Renja, dan APBD

Salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJMD memiliki peran penting dalam menyinergikan antara perencanaan jangka panjang dengan perencanaan tahunan dan penganggaran. Dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra). Berikutnya, ketika telah ditetapkan, RPJMD dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan. Proses penjabaran yang selaras antara RPJMD dengan RKPD dan Renja menjadi modal penting bagi keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan penganggaran, sehingga terwujud penganggaran yang berorientasi kinerja.

1.3.8 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman

kegiatan riset dan inovasi, serta program prioritas penelitian selama lima tahun kedepan. Dokumen RIPJPID sebagai dokumen pendukung yang menjadi acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam hal penyusunan dokumen RPJMD. Adapun substansi yang diacu dalam dokumen RIPJPID yaitu strategi dan rekomendasi pengembangan riset dan inovasi dengan menitikberatkan pada penguatan sektor-sektor unggulan, serta sasaran strategis dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil analisis potensi unggulan Kabupaten Tulungagung, terdapat 3 sektor yang akan dikembangkan yakni sektor pariwisata dan kebudayaan, sektor pertanian terpadu, dan sektor industri perdagangan.

Adapun strategi untuk pengembangan pariwisata dan budaya yakni penguatan kelembagaan di objek wisata, penguatan promosi objek wisata, penguatan kompetensi SDM objek wisata, dan penguatan sarana prasarana objek wisata. Strategi untuk pengembangan pertanian terpadu yakni penguatan kewilayahan pengembangan pertanian terpadu, penguatan potensi pertanian terpadu, penguatan SDM dalam sektor pertanian terpadu, dan distribusi hasil pertanian terpadu. Strategi untuk pengembangan industri dan perdagangan yakni penguatan SDM pengembangan industri dan perdagangan, dukungan infrastruktur sektor industri dan perdagangan, penguatan klaster industri dan perdagangan, dan digitalisasi pengembangan industri dan perdagangan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029, yaitu untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan serta untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tulungagung. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tersedianya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan kondisi keuangan daerah yang aktual;
2. Tersedianya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
3. Sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Tulungagung selama lima tahun kedepan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar, serta perencanaan sectoral;

6. Menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2025-2029;
7. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
8. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tulungagung; dan
9. Menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I	**PENDAHULUAN** Bab pendahuluan memuat informasi terkait latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang relevan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD, RPJMN, RTRW, KLHS, serta rencana sektoral lainnya), maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, dan sistematika penulisan.
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH** Gambaran umum daerah menyajikan data-data dan informasi hasil capaian pembangunan daerah lima tahun terakhir. Penyajian pada bab ini memuat enam aspek antara lain aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing daerah; aspek pelayanan umum; gambaran keuangan daerah; serta permasalahan dan isu strategis. Aspek geografi dan demografi memuat terkait posisi dan peran strategis daerah; potensi sumber daya alam; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; lingkungan hidup berkualitas; resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim; serta demografi. Aspek kesejahteraan memuat terkait kesejahteraan ekonomi; kesehatan untuk semua; pendidikan berkualitas yang merata; perlindungan sosial yang adaptif; beragama

	maslahat dan berkebudayaan maju; serta keluarga berkualitas; kesetaraan gender; dan masyarakat inklusif. Aspek daya saing memuat terkait daya saing sumber daya manusia; iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau dan biru; transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; integrasi ekonomi domestik dan global; perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; serta stabilitas ekonomi makro. Aspek pelayanan umum memuat terkait regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif; hukum berkadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial; ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar Kawasan; kinerja setiap urusan pemerintahan daerah. Gambaran keuangan daerah memuat terkait realisasi APBD tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2026-2030. Permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan yang bersifat dominan serta identifikasi isu strategis daerah sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) yang mempengaruhi daerah secara langsung maupun tidak langsung.
BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas daerah. Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil visi misi kepala daerah terpilih. Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya

	berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus, dan penentuan program prioritas. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam bab VI Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat indikasi kerangka pendanaan yang berasal dari hasil analisis pada BAB III perihal gambaran keuangan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi. Sedangkan IKD merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025-2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.
BAB XI	**PENUTUP** Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum daerah menyajikan data-data dan informasi hasil capaian pembangunan daerah lima tahun terakhir. Penyajian pada bab ini memuat enam aspek antara lain aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Subbab ini menguraikan gambaran umum terkait kondisi Kabupaten Tulungagung dari aspek geografi dan demografi. Kedua aspek tersebut dijelaskan secara rinci dan sistematis secara komprehensif. Gambaran aspek geografi dan demografi di Kabupaten Tulungagung dijabarkan sebagai berikut.

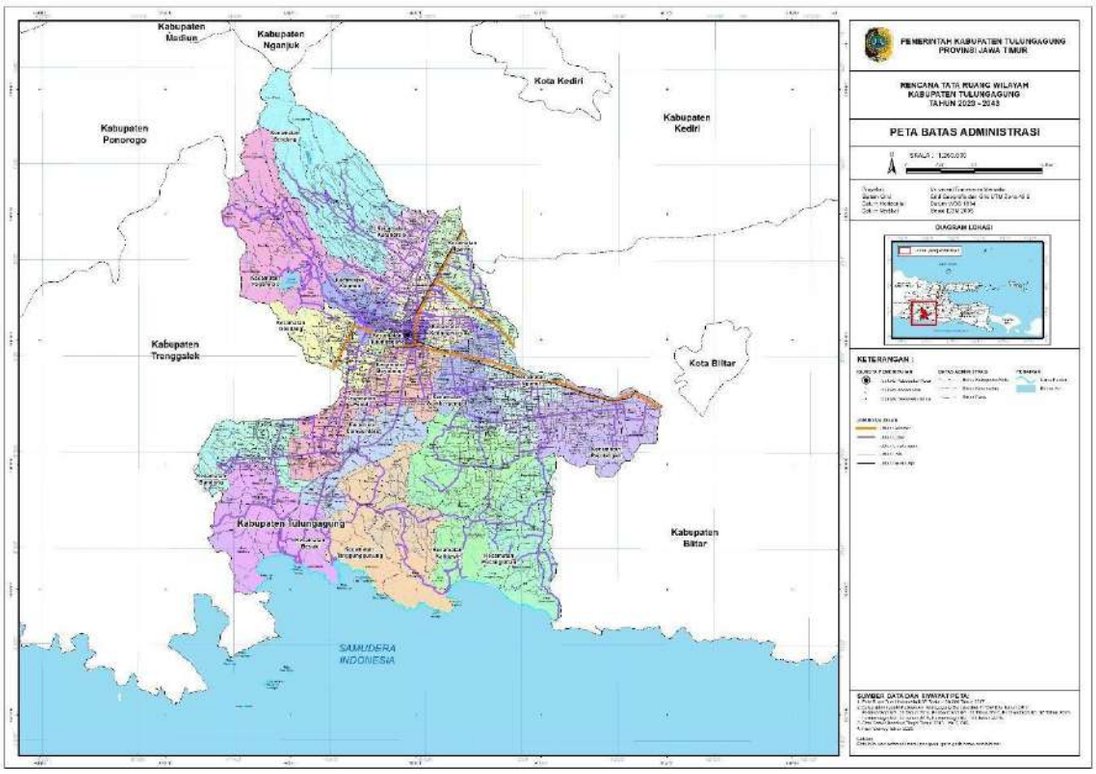
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung secara astronomis terletak antara 111°43'– 112°07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan, sedangkan berdasarkan posisi geografinya, Kabupaten Tulungagung memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Jarak dari Ibu kota Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya) kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan yaitu seluas 114.453 Ha, dengan Kecamatan terluas yakni Kecamatan Sendang (12.152,27 Ha), 10,62% dari total keseluruhan luasan Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah, sedang, dan tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan pegunungan. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut. Daerah ini hampir di semua wilayah Kabupaten Tulungagung, kecuali di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang dataran rendahnya hanya 4 desa. Dataran sedang dengan ketinggian 500-700m dari permukaan laut meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 5 desa. Dataran tinggi dengan ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut terdiri dari 1 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang.



Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043

Secara administratif Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 (sembilan belas) Kecamatan, 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Desa dan 14 (empat belas) Kelurahan. Jumlah Desa dan Kelurahan di tersebut tidak mengalami perubahan hingga 2025. Seluruh wilayah administratif kelurahan berada di Kecamatan Tulungagung yang berada di pusat Kabupaten. Sedangkan yang berada di Kecamatan lainnya merupakan wilayah administratif desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu Kecamatan Gondang, sedangkan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung. Berdasarkan luas wilayah kecamatannya, kecamatan yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang, dan Kecamatan Pagerwojo.

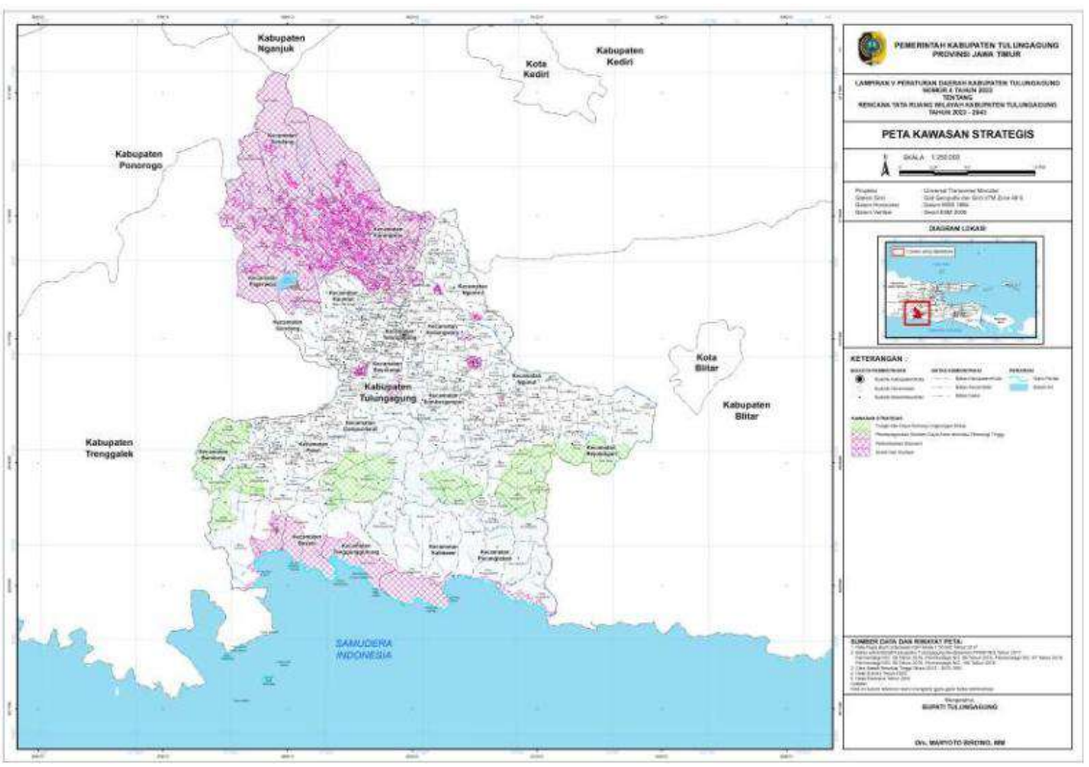
Tabel 2. 1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Besuki	10	-	22	44	225
2.	Bandung	18	-	43	187	206
3.	Pakel	19	-	44	93	317
4.	Campurdarat	9	-	29	67	292
5.	Tanggunggunung	7	-	37	70	169
6.	Kalidawir	17	-	56	134	443
7.	Pucanglaban	9	-	24	46	170
8.	Rejotangan	16	-	51	133	480
9.	Ngunut	18	-	41	148	442
10.	Sumbergempol	17	-	44	121	370

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	Jumlah RW	Jumlah RT
11.	Boyolangu	17	-	45	109	463
12.	Tulungagung	-	14	0	93	331
13.	Kedungwaru	19	-	49	127	480
14.	Ngantru	13	-	43	116	369
15.	Karangrejo	13	-	39	72	266
16.	Kauman	13	-	34	304	90
17.	Gondang	20	-	51	100	383
18.	Pagerwojo	11	-	37	64	220
19.	Sendang	11	-	49	97	283
Kabupaten Tulungagung		257	14	738	2.125	5.999

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Lebih lanjut lagi, Kabupaten Tulungagung juga memiliki wilayah atau Kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Kawasan tersebut berpeluang untuk mendukung pengembangan dan eksistensi wilayah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya di masa yang akan datang. Adapun peta rencana kawasan strategis Kabupaten Tulungagung disajikan pada gambar berikut[1] ini.



Gambar 2. 2 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tulungagung
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Kawasan strategis merupakan Kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan, di mana perencanaan Kawasan strategis ini diharapkan mampu untuk mendukung eksistensi dan

[1] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043

kemajuan Kabupaten Tulungagung. Kawasan strategis di Kabupaten Tulungagung terdiri atas[2]:

1. Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi

Kawasan-kawasan yang memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain:

- Kawasan sekitar Jalan Pantai
  Pengembangan Kawasan sekitar Jalan Pantai yaitu berada di wilayah sekitar jalan Pantai Selatan sebagai Kawasan pendukung ekonomi di wilayah Selatan Kabupaten Tulungagung melalui sektor pariwisata dan potensi lokal yang berkelanjutan. Kawasan sekitar jalan pantai ini terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, dan Kecamatan Pucanglaban.
- Kawasan Agropolitan
  Pengembangan Kawasan Agropolitan yaitu mewujudkan Kawasan Agropolitan yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Arahan pengembangan Kawasan Agropolitan untuk mewujudkan pengembangan hortikultura, peternakan, pariwisata serta potensi sumber daya alam lokal. Kawasan ini terdiri atas: Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Sendang, Kecamatan Pagerwojo, dan Kecamatan Karangrejo.
- Kawasan Minapolitan
  Pengembangan kawasan minapolitan yaitu mewujudkan Kawasan minapolitan sebagai sentra perikanan yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Arahan pengembangan kawasan minapolitan untuk mewujudkan pengembangan perikanan air tawar beserta sektor pendukung lainnya. Adapun wilayah minapolitan ini terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Gondang, Kecamatan Sumbergempol, dan Kecamatan Boyolangu.
- Kawasan industri
  Arah pengembangan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan pengembangan industri pengolahan yang berbasis pada industri agro, industri mineral logam serta industri lainnya. Tujuan pengembangan Kawasan peruntukan industri yaitu mewujudkan kawasan peruntukan industri berwawasan lingkungan dengan memaksimalkan sumber daya lokal. Kawasan ini terdiri dari, Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Pakel, dan Kecamatan Sumbergempol.

[2] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

Kabupaten Tulungagung juga memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan wisata budaya.

a. Candi Ampel terdapat di Kecamatan Kalidawir;
b. Candi Boyolangu terdapat di Kecamatan Boyolangu;
c. Candi Dadi terdapat di Kecamatan Boyolangu;
d. Candi Miri Gambar terdapat di Kecamatan Sumbergempol;
e. Candi Penampihan terdapat di Kecamatan Sendang;
f. Candi Sanggrahan terdapat di Kecamatan Boyolangu;
g. Situs Goa Pasir terdapat di Kecamatan Sumbergempol;
h. Situs Goa Selomangleng terdapat di Kecamatan Boyolangu;
i. Situs Goa Tritis terdapat di Kecamatan Campurdarat;
j. Goa Tan Tik Sue di Kecamatan Rejotangan.

Tujuan pengembangan kawasan sosial dan budaya adalah untuk pengembangan pariwisata budaya yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana, promosi, atraksi wisata serta pengembangan dan penguatan kelompok sadar wisata. Arah pengembangan kawasan ini adalah untuk mewujudkan revitalisasi dan perlindungan kawasan serta mendukung optimalisasi wisata budaya.

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam hal pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi Kabupaten Tulungagung meliputi:

a. PLTA Tulungagung (Neyama) di Kecamatan Besuki; dan
b. PLTA Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo.

Arah pengembangan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah untuk mewujudkan jaringan ketenagalistrikan yang tangguh yang didukung dengan pengembangan wisata dan konservasi. Tujuan dari pengembangan kawasan strategis ini adalah untuk mewujudkan PLTA di Kabupaten Tulungaung sebagai penunjang penyediaan jaringan listrik dan pemenuhan energi di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya.

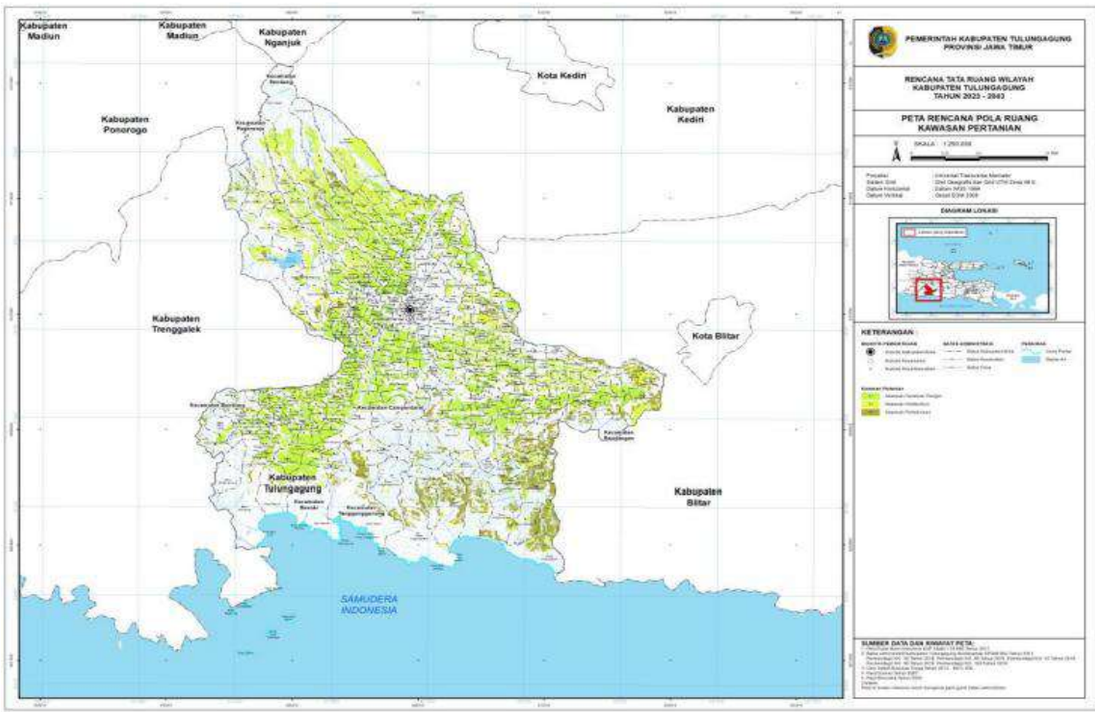
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Tujuan pengembangan kawasan strategis berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan kawasan *geopark* sebagai salah satu Kawasan konservasi yang mengedepankan aspek edukasi. Arah pengembangan Kawasan ini adalah untuk mewujudkan kawasan *geopark* dengan tema tema kepariwisataan yang mendorong dan mengedepankan aspek konservasi dan edukasi. Kawasan ini terdiri dari beberapa kecamatan, diantaranya yaitu Kecamatan Sendang, Kecamatan rejotangan, Kecamatan pagerwojo, Kecamatan Besuki, Kecamatan

Bandung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Campurdarta, Kecamatan Pucanglaban, dam Kecamatan Tanggunggunung.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

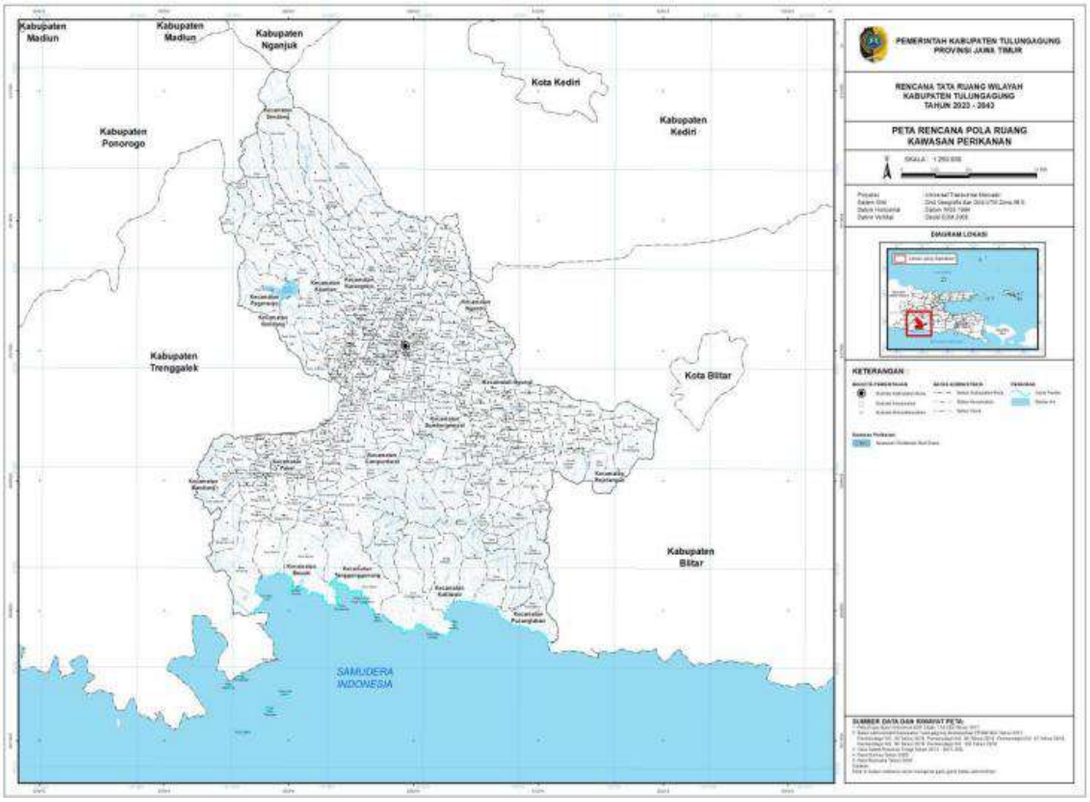
Sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda dan bergantung pada kondisi geografis dan iklim regionalnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.



Gambar 2. 3 Peta Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap mempertahankan sektor unggulan pertanian. Kawasan pertanian di Kabupaten Tulungagung terdiri dari Kawasan tanaman pangan, Kawasan tanaman hortikultura, dan Kawasan perkebunan. Kawasan tanaman pangan kurang lebih seluas 22.709 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan) hektar, Kawasan hortikultura kurang lebih seluas 7.978 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektar, dan Kawasan perkebunan kurang lebih seluas 8.371 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar.

Selain potensi pertanian, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung tahun 2023–2043, Kabupaten Tulungagung juga memiliki Kawasan budidaya perikanan berupa perikanan budi daya. Kawasan perikanan budi daya tersebut kurang lebih seluas 59 hektar yang meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Besuki, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Kauman.



Gambar 2. 4 Peta pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Perikanan
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Komoditas utama yang banyak dikembangkan oleh Masyarakat di Kabupaten Tulungagung adalah ikan dengan komoditas utama ikan hias, sedangkan ikan konsumsi, dengan komoditas unggulan diantaranya: Ikan Lele, Gurami, Patin, Nila. Selain perikanan budi daya atau air tawar, Kabupaten Tulungagung juga memiliki kawasan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berada di wilayah pesisir di Kabupaten Tulungagung yang meliputi Pantai Molang, Dlodo, Sine, Ngelo, Ngalur, Sanggar, Sioro, Gerangan, Brumbun, Popoh, Sidem, Tangkilan, Bayem, Gemah, Klatak dan Nglarap, Dari wilayah pesisir tersebut, Sidem, Sine, Klatak, Nggerangan dan Brumbun merupakan pemukiman nelayan yang ditata dengan baik. Potensi panjang pantai di Kabupaten Tulungagung adalah 61,470 km.

Potensi sumber daya alam berupa keindahan alamnya juga dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki potensi pariwisata yang layak untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata ini menjadi alternatif tujuan wisata unggulan di Jawa Timur dikarenakan keanekaragaman objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pengembangan wisata alam di Kabupaten Tulungagung terdiri dari wisata pantai yang tersebar di sepanjang wilayah selatan Kabupaten Tulungagung serta beragam air terjun, goa dan telaga.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Penentuan daya dukung lingkungan dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang di ruang yang

bersangkutan yang akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Selain definisi tersebut, daya dukung juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Hal ini menjadi penting karena *supply* umumnya terbatas, sedangkan *demand* tidak terbatas.

Daya Dukung Lahan di Kabupaten Tulungagung didasarkan pada tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan berkaitan dengan daya dukung lingkungan karena ketika suatu lahan digunakan untuk pemanfaatan lahan tertentu maka perlu diketahui apakah daya dukung lingkungan sekitar dapat mendukung pemanfaatan lahan tersebut. Lahan dikatakan sesuai atau tidak ketika akan dilakukan pemanfaatan lebih lanjut, maka digunakan mutu baku lingkungan untuk menilai bahwa apakah lingkungan telah rusak atau tercemar.

Tabel 2. 2 Kesesuaian Lahan menurut Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Kecamatan	Hutan Produksi Tetap, Konversi dan Tanaman Tahunan	Kawasan Lindung	Kawasan Penyangga, Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Semusim dan Permukiman	Total
Kecamatan Bandung	422,56	198,80	1.314,66	2.684,39	4.620,41
Kecamatan Besuki	861,96	547,98	5.335,24	2.452,98	9.198,17
Kecamatan Boyolangu		70,99	256,27	3.438,13	3.765,39
Kecamatan Campurdarat	39,57	293,98	1.089,20	3.047,87	4.470,62
Kecamatan Gondang	47,70	535,42	1.023,55	2.739,71	4.346,38
Kecamatan Kalidawir	394,05	350,17	6.391,14	4.227,11	11.362,47
Kecamatan Karangrejo	34,91		1.129,47	2.634,98	3.799,35
Kecamatan Kauman	39,21		905,68	1.955,87	2.900,76
Kecamatan Kedungwaru				3.392,90	3.392,90
Kecamatan Ngantru				4.126,83	4.126,83
Kecamatan Ngunut	5,09		22,37	3.887,96	3.915,43
Kecamatan Pagerwojo	1.059,74	169,52	9.096,06	273,32	10.598,64
Kecamatan Pakel				3.788,66	3.788,66
Kecamatan Pucanglaban	2,06	116,14	5.845,55	1.857,22	7.820,97
Kecamatan Rejotangan	526,30	22,78	1.058,89	5.903,40	7.511,37
Kecamatan Sendang	1.264,22		10.295,87	592,18	12.152,27
Kecamatan Sumbergempol	15,60	68,25	88,50	4.009,05	4.181,39
Kecamatan Tanggunggunung		487,77	10.529,26	397,68	11.414,72
Kecamatan Tulungagung				1.085,79	1.085,79
Total	**4.712,97**	**2.861,80**	**54.381,71**	**52.496,03**	**114.452,52**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan diketahui bahwa di Kabupaten Tulungagung terdapat empat arahan yang merupakan turunan dari analisis kemampuan lahan. Empat arahan tersebut adalah: (1) arahan hutan produksi tetap, konversi dan tanaman tahunan; (2) arahan kawasan lindung; (3) arahan kawasan penyangga, hutan produksi terbatas; dan (4) arahan tanaman semusim dan permukiman. Arahan untuk kawasan penyangga, hutan produksi terbatas menjadi arahan dengan luasan terbesar yaitu seluas 54.381,72 Ha yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Hal ini menunjukkan bahwa penting sekali untuk selalu menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar wilayah inti, serta agar dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana dan berkelanjutan. Sedangkan untuk arahan yang memiliki luasan terkecil adalah arahan untuk kawasan lindung yaitu seluas 2.861,81 Ha.

Secara operasional daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditentukan dengan pendekatan jasa ekosistem, dengan asumsi bahwa semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia. Asumsi berikutnya, yakni semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tulungagung, status daya dukung lingkungan dapat diketahui dengan memeriksa proporsi jumlah penduduk suatu wilayah terhadap ambang batas sumber daya eksisting yang tersedia saat ini. Representasi kondisi tersebut di antaranya dapat dilakukan dengan menghitung dan menganalisis kapasitas daya dukung pangan dan air di Kabupaten Tulungagung. Kedua komponen tersebut digunakan sebagai pendekatan dengan pertimbangan peranan atas keduanya yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan, khususnya bagi keberlanjutan kehidupan manusia.

Tabel 2. 3 Daya Dukung Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Kecamatan	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Bandung	1.706,32	2.859,74	4.620,41
Kecamatan Besuki	1.398,00	7.698,27	9.198,17
Kecamatan Boyolangu	2.194,99	1.569,40	3.765,39
Kecamatan Campurdarat	1.799,09	2.640,89	4.470,62
Kecamatan Gondang	1.504,06	2.847,72	4.346,38
Kecamatan Kalidawir	3.199,82	8.377,18	11.362,47
Kecamatan Karangrejo	1.530,34	2.244,05	3.799,35
Kecamatan Kauman	1.187,27	1.696,12	2.900,76
Kecamatan Kedungwaru	2.468,29	907,73	3.392,90
Kecamatan Ngantru	1.628,86	2.533,00	4.126,83
Kecamatan Ngunut	1.861,20	2.028,55	3.915,43
Kecamatan Pagerwojo	1.227,57	9.530,23	10.598,64
Kecamatan Pakel	2.089,69	1.703,76	3.788,66
Kecamatan Pucanglaban	874,55	6.667,57	7.820,97

Kecamatan	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Rejotangan	2.126,82	5.347,72	7.511,37
Kecamatan Sendang	1.879,21	10.097,48	12.152,27
Kecamatan Sumbergempol	2.438,61	1.732,80	4.181,39
Kecamatan Tanggunggunung	764,60	10.646,59	11.414,72
Kecamatan Tulungagung	937,71	1.479,90	1.085,79
Total	**32.817,00**	**82.608,70**	**114.452,52**

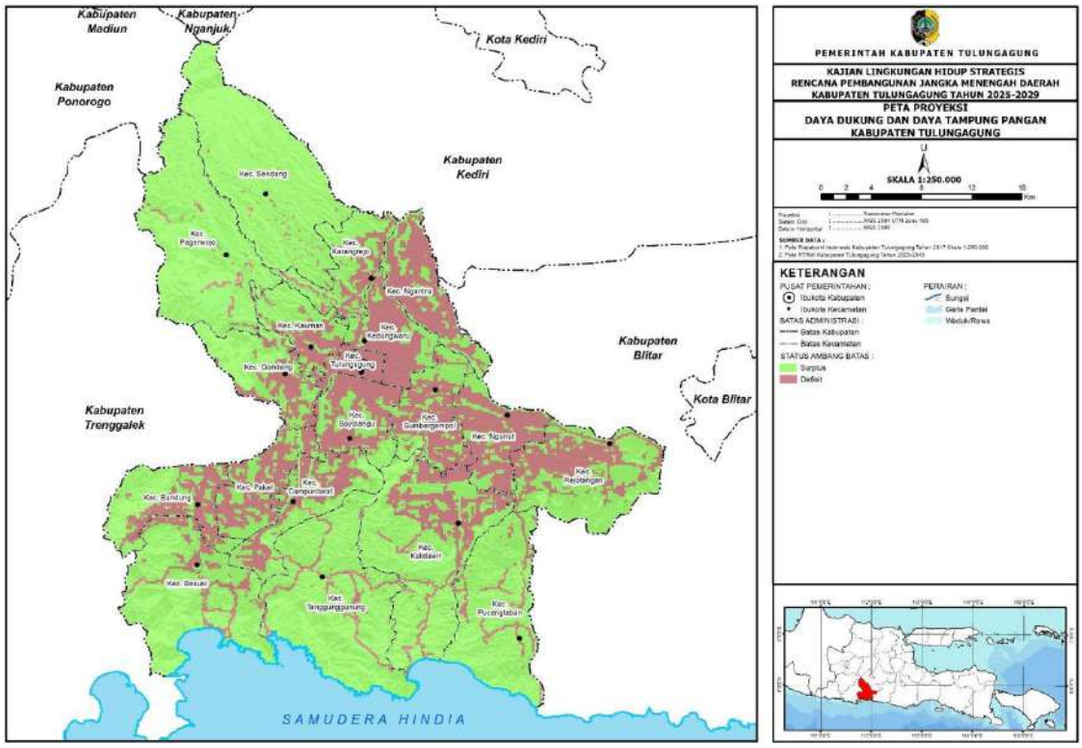
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029

Tabel 2. 4 Daya Dukung Pangan Kabupaten Tulungagung tahun 2024

Kecamatan	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Bandung	1.805,97	2.760,11	4.620,41
Kecamatan Besuki	1.297,95	7.798,27	9.198,17
Kecamatan Boyolangu	2.183,52	1.580,73	3.765,39
Kecamatan Campurdarat	1.925,36	2.511,23	4.470,62
Kecamatan Gondang	1.403,64	2.948,65	4.346,38
Kecamatan Kalidawir	3.042,35	8.534,53	11.362,47
Kecamatan Karangrejo	1.141,35	2.627,93	3.799,35
Kecamatan Kauman	1.065,44	1.811,89	2.900,76
Kecamatan Kedungwaru	2.428,26	944,32	3.392,90
Kecamatan Ngantru	2.806,81	1.364,16	4.126,83
Kecamatan Ngunut	2.794,23	1.094,12	3.915,43
Kecamatan Pagerwojo	351,35	10.405,91	10.598,64
Kecamatan Pakel	2.323,04	1.473,41	3.788,66
Kecamatan Pucanglaban	774,77	6.767,24	7.820,97
Kecamatan Rejotangan	2.768,56	4.705,76	7.511,37
Kecamatan Sendang	154,84	11.822,52	12.152,27
Kecamatan Sumbergempol	2.464,61	1.705,71	4.181,39
Kecamatan Tanggunggunung	852,39	10.558,85	11.414,72
Kecamatan Tulungagung	1.012,29	77,88	1.085,79
Total	**32.596,73**	**81.493,22**	**114.452,52**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029

Hasil analisis di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa kondisi eksisting daya dukung daya tampung untuk daya dukungan memiliki kategori Swasembada atau memiliki hasil >1. Hal ini berarti Kabupaten Tulungagung mampu melaksanakan swasembada pangan. Namun demikian, terjadi degradasi penggunaan lahan pertanian yang diakibatkan oleh berbagai sebab salah satunya adalah perubahan dari lahan pertanian produktif menjadi lahan tidak produktif atau berubah fungsi menjadi perumahan. Meskipun terdapat tantangan dalam produksi pangan, Kabupaten Tulungagung berhasil meningkatkan produksi hasil pertanian dan memastikan ketersediaan pangan bagi penduduknya.



Gambar 2. 5 Peta Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2029
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029

Berdasarkan hasil proyeksi, status Daya Dukung Lingkungan untuk pangan di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh kategori surplus dengan nilai 81.493,22 atau sebesar 71,5%. Status surplus menunjukkan bahwa produksi pangan yang dihasilkan hingga tahun 2029 di Kabupaten Tulungagung masih memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan penduduknya. Di samping itu, masih adanya nilai pada status defisit yaitu 32.596,74 atau sebesar 28,5%. Hal ini berarti hingga tahun 2029 ketersediaan pangan di Kabupaten Tulungagung masih belum terpenuhi secara maksimal dan merata.

Tabel 2. 5 Daya Dukung Air Bersih Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Kecamatan	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Bandung	2.026,66	2.593,75	4.620,41
Kecamatan Besuki	1.382,89	7.815,28	9.198,17
Kecamatan Boyolangu	2.633,22	1.132,17	3.765,39
Kecamatan Campurdarat	2.219,07	2.251,55	4.470,62
Kecamatan Gondang	1.975,48	2.370,91	4.346,38
Kecamatan Kalidawir	2.927,40	8.435,07	11.362,47
Kecamatan Karangrejo	1.745,01	2.054,34	3.799,35
Kecamatan Kauman	1.377,42	1.523,34	2.900,76
Kecamatan Kedungwaru	2.339,18	1.053,72	3.392,90
Kecamatan Ngantru	2.336,46	1.790,36	4.126,83
Kecamatan Ngunut	1.739,82	2.175,61	3.915,43
Kecamatan Pagerwojo	347,08	10.251,55	10.598,64
Kecamatan Pakel	3.039,68	748,97	3.788,66
Kecamatan Pucanglaban	137,69	7.683,28	7.820,97
Kecamatan Rejotangan	1.323,10	6.188,27	7.511,37
Kecamatan Sendang	2.112,58	10.039,69	12.152,27
Kecamatan Sumbergempol	2.434,63	1.746,77	4.181,39

Kecamatan	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Tanggunggunung	47,63	11.367,09	11.414,72
Kecamatan Tulungagung	455,71	630,09	1.085,79
Total	32.600,71	81.851,81	114.452,52

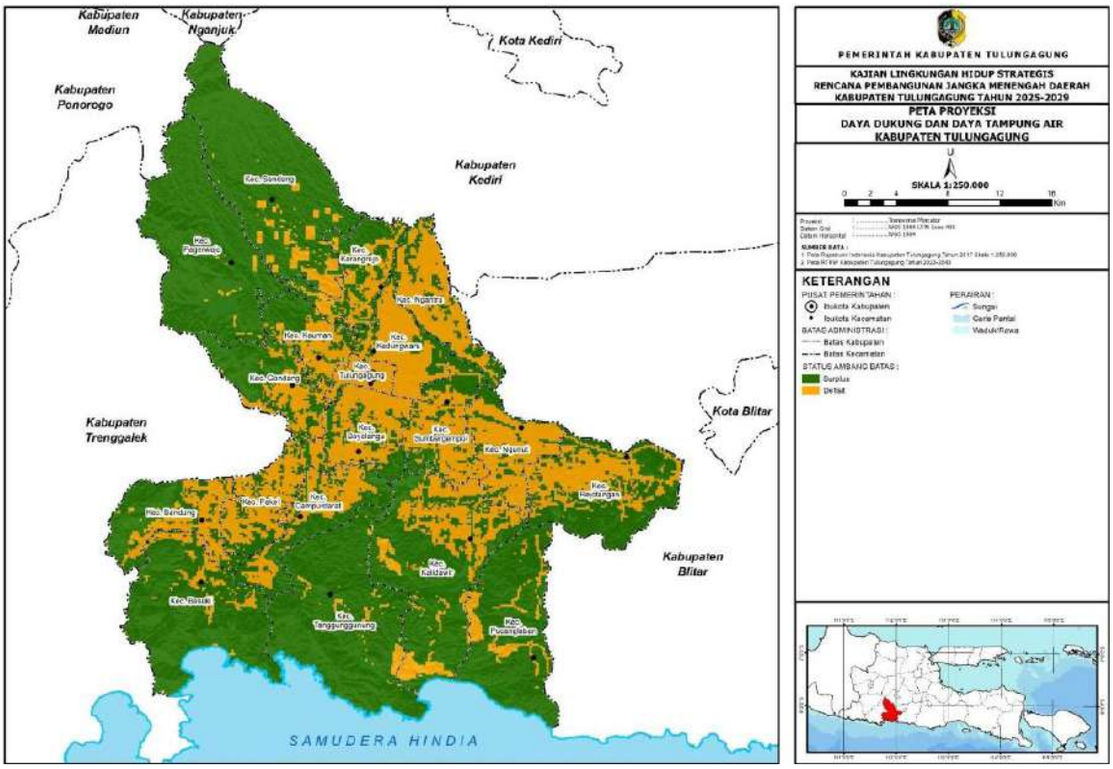
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029

Tabel 2. 6 Daya Dukung Air Bersih Kabupaten Tulungagung tahun 2029

Kecamatan	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Bandung	1.882,65	2.737,76	4.620,41
Kecamatan Besuki	926,22	8.271,95	9.198,17
Kecamatan Boyolangu	2.441,25	1.324,14	3.765,39
Kecamatan Campurdarat	2.013,22	2.457,41	4.470,62
Kecamatan Gondang	1.565,44	2.780,95	4.346,38
Kecamatan Kalidawir	3.689,39	7.673,08	11.362,47
Kecamatan Karangrejo	1.560,63	2.238,72	3.799,35
Kecamatan Kauman	1.321,66	1.579,11	2.900,76
Kecamatan Kedungwaru	2.552,43	840,47	3.392,90
Kecamatan Ngantru	2.954,17	1.172,66	4.126,83
Kecamatan Ngunut	2.978,32	937,11	3.915,43
Kecamatan Pagerwojo	140,79	10.457,85	10.598,64
Kecamatan Pakel	2.631,28	1.157,38	3.788,66
Kecamatan Pucanglaban	988,29	6.832,67	7.820,97
Kecamatan Rejotangan	3.112,73	4.398,64	7.511,37
Kecamatan Sendang	1.239,90	10.912,37	12.152,27
Kecamatan Sumbergempol	2.607,85	1.573,54	4.181,39
Kecamatan Tanggunggunung	421,18	10.993,54	11.414,72
Kecamatan Tulungagung	1.019,26	66,54	1.085,79
Total	36.046,66	78.405,89	114.452,52

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029

Daya dukung lingkungan untuk air bersih menunjukkan bahwa secara eksisting, status daya dukung lingkungan untuk air bersih di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh status surplus yaitu sebesar 71,5 persen. Sedangkan untuk daya dukung lingkungan untuk air bersih dengan status defisit sebesar 28,5%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih di Kabupaten Tulungagung pada sebagian besar wilayahnya masih dapat memenuhi kebutuhan air bersih.



Gambar 2. 6 Peta Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Tulungagung 2029
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029

Berdasarkan hasil proyeksi, status Daya Dukung Lingkungan untuk air bersih di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh kategori surplus dengan presentase sebesar 68 persen. Di samping itu terdapat daya dukung dengan status defisit sebanyak 32 persen. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat penurunan persentase wilayah yang memiliki kategori surplus air, sementera wilayah dengan status defisit mengalami peningkatan. Meskipun demikian, status daya dukung lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Tulungagung sebagian besar masih terpenuhi hingga tahun 2029.

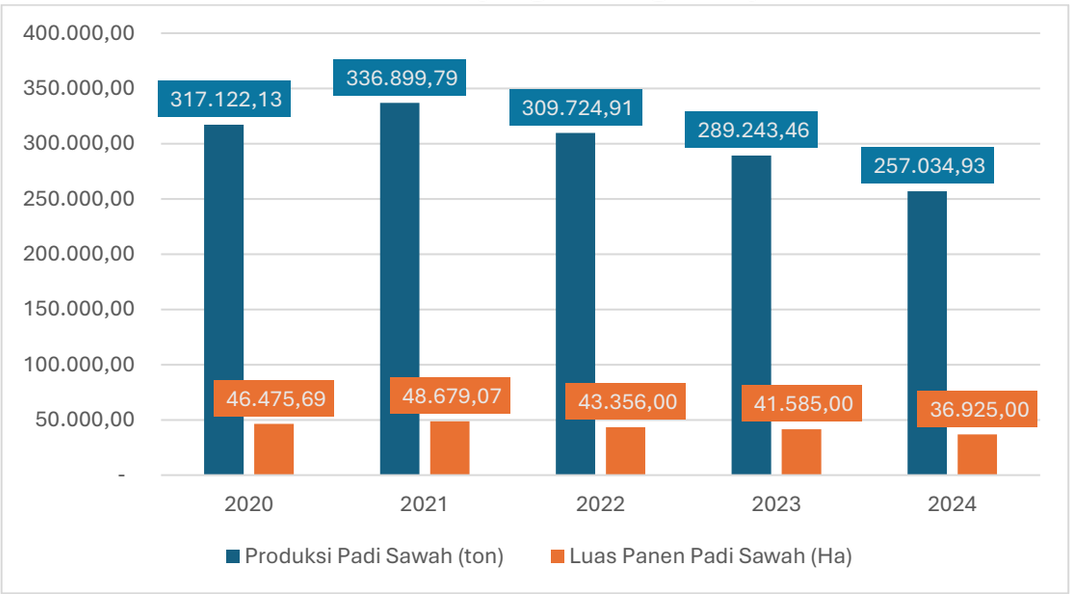
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Subbagian ini menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, serta Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum.

2.1.4.1 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi kunci strategis dalam mencapai Pembangunan berkelanjutan, ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan fondasi utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Kerawanan pangan terjadi karena tidak tercapainya target ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Hal ini tidak selaras dengan kondisi lahan di Indonesia yang luas dan subur. Pembangunan ketahanan pangan ditargetkan dapat mencapai kondisi

terpenuhinya pangan bagi setiap individu/rumah tangga dari produksi pangan nasional yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau bagi masyarakat.



Gambar 2. 7 Diagram Luas Panen Dan Volume Produksi Padi
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2025

Luas panen padi di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga 2024. Hal tersebut selaras dengan kenaikan produksi padi pada tahun 2021, namun mengalami penurunan seiring dengan penurunan luas panen padi pada tahun 2022 hingga 2024. Adanya penurunan luas panen serta produksi padi disebabkan dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun, permukiman maupun perdagangan.

Tabel 2. 7 Capaian indikator Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Skor PPH	Skor	90,3	90,5	93,88	93,40	94,53
AKE	(Kkal/Kap/Hari)	2066	2.029	2.100	2.222	2.222
Persentase pemanfaatan infrastruktur dan sarpras pendukung kemandirian pangan	%	100	100	100	100	100
Jumlah Infrastruktur Pangan	Angka	51	53	54	56	57
Jumlah kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan	Lembaga	55	64	64	64	65

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Intervensi Wilayah Rawan Pangan	%	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah	%	25,7	20,5	52,6	12,32	20,44
Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman dari Bahan Kimia	%	-	54	33	33,5	58

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2024

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat yang diukur berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan kenaikan. Nilai PPH Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan selama tahun 2020 sampai 2024 sehingga mencapai skor 94,53 poin.

Meskipun mengalami tren positif dalam konteks pencapaian skor pola pangan harapan, namun Kabupaten Tulungagung masih menghadapi permasalahan krusial dalam urusan pangan yang perlu segera dilakukan intervensi. Pertama, terjadi penurunan cadangan pangan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan. Dengan adanya peningkatan penduduk, kebutuhan pangan semakin besar, dan hal ini memerlukan strategi peningkatan produksi pangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, meskipun terdapat surplus beras, terutama dari produksi pangan lokal, permasalahan muncul dalam distribusi dan penyimpanan. Jumlah lumbung atau gudang penyimpanan yang ada tidak sebanding dengan produksi padi yang dapat berdampak pada pemborosan dan risiko kerugian pangan. Perluasan dan peningkatan kapasitas lumbung menjadi krusial untuk mengelola surplus pangan lokal secara efisien, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, masalah lahan pangan yang semakin berkurang akibat perubahan iklim dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mendorong diversifikasi ragam pangan dengan prinsip lahan pangan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan pengenalan dan promosi berbagai jenis tanaman pangan, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, dan peningkatan ketahanan pangan melalui pendekatan yang beragam.

Kelembagaan kelompok pangan yang merupakan kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang ikut serta dalam program Lumbung Pangan Masyrakat (LPM), Lembaga Usaha Pangan Masyarakat

(LUPM) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Lembaga ini dirasa masih belum memberikan pengaruh nyata dalam menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan. Hal ini dikarenakan peran serta dan jumlah SDM yang terbatas sangat berpengaruh pada aktivitas kelompok. Di samping itu, sebagian besar pengurus berusia lanjut sehingga bila yang bersangkutan meninggal dunia sehingga regenerasinya terhambat. Ketercapaian intervensi wilayah rawan pangan pada tahun 2023 menurun menjadi 40 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 100 persen.

Tabel 2. 8 Jumlah Desa Rawan Pangan Kab. Tulungagung Tahun 2020-2024

Tahun	Desa Rawan Pangan	Capaian (%)
2020	5 Desa	100%
2021	8 Desa	100%
2022	5 Desa	100%
2023	5 Desa	40%
2024	8 Desa	100%

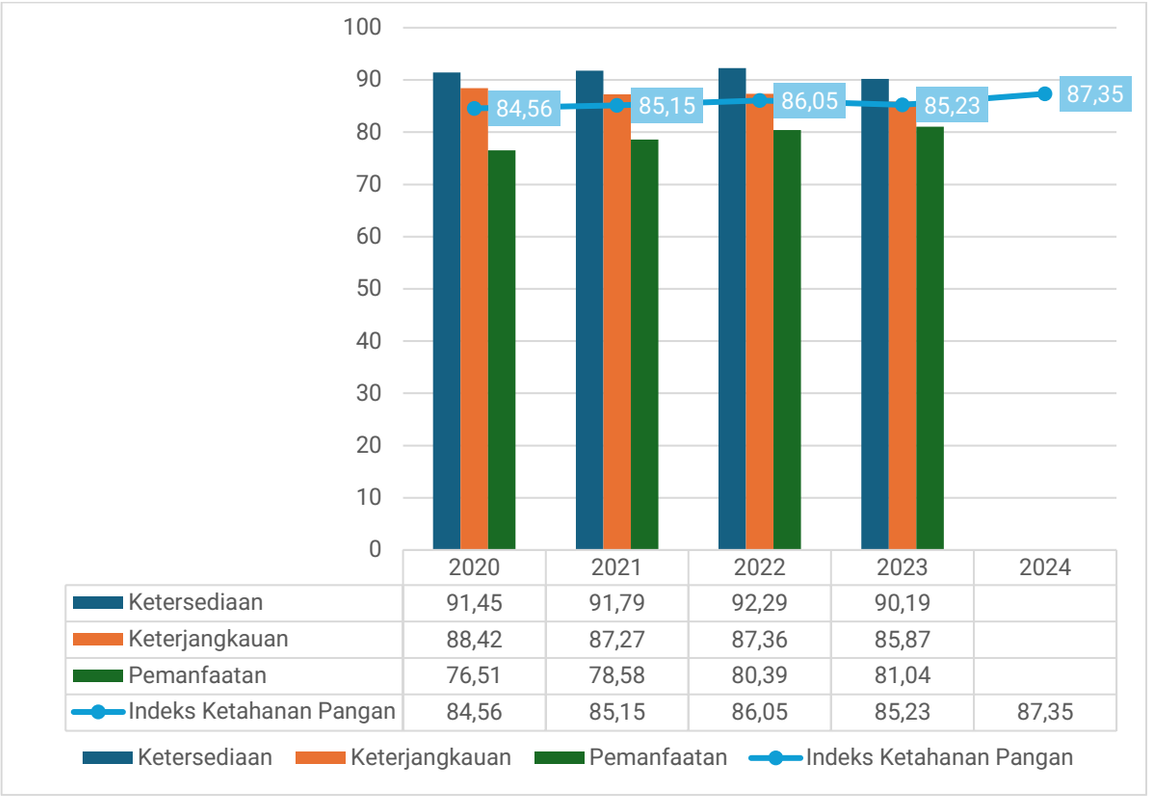
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2025

Kerawanan pangan di Kabupaten Tulungagung tidak hanya dipicu oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kompleksitas masalah yang saling berkaitan, baik dari segi geografis, ekonomi, distribusi, maupun aspek sosial dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah berupaya menanggulangi berbagai persoalan ini melalui sejumlah program, seperti penyaluran bantuan pangan, gerakan pangan murah, serta program intervensi gizi untuk balita. Meskipun demikian, tantangan yang ada tidak bisa diselesaikan secara sepihak, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Pihak yang terlibat mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, hingga partisipasi aktif dari masyarakat sendiri. Kawasan atau desa rawan pangan ditentukan dengan beberapa indikator, di antaranya:

1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk;
2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga;
3) Rasio penduduk dengan kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk;
4) Desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai;
5) Rasio jumlah rumah tangga tanpa air bersih terhadap jumlah rumah tangga;
6) Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk;
7) Dari indikator-indikator tersebut apabila tidak berjalan secara bersamaan maka kerawanan pangan akan tetap ada.

Pengurangan peningkatan kerentanan pangan dilakukan dengan menyediakan cadangan pangan pemerintah. Persentase peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah pada tahun 2024 dari target 20 persen terealisasi 20,44 persen. Stok cadangan pangan pemerintah kabupaten meningkat dari 39,62 ton menjadi 47,72 ton belum mencapai 119,52 Ton sesuai Keputusan Bupati Tulungagung Nomor:

100.3.3.2/73/20.01.03/2024 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.



	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan	91,45	91,79	92,29	90,19	
Keterjangkauan	88,42	87,27	87,36	85,87	
Pemanfaatan	76,51	78,58	80,39	81,04	
Indeks Ketahanan Pangan	84,56	85,15	86,05	85,23	87,35

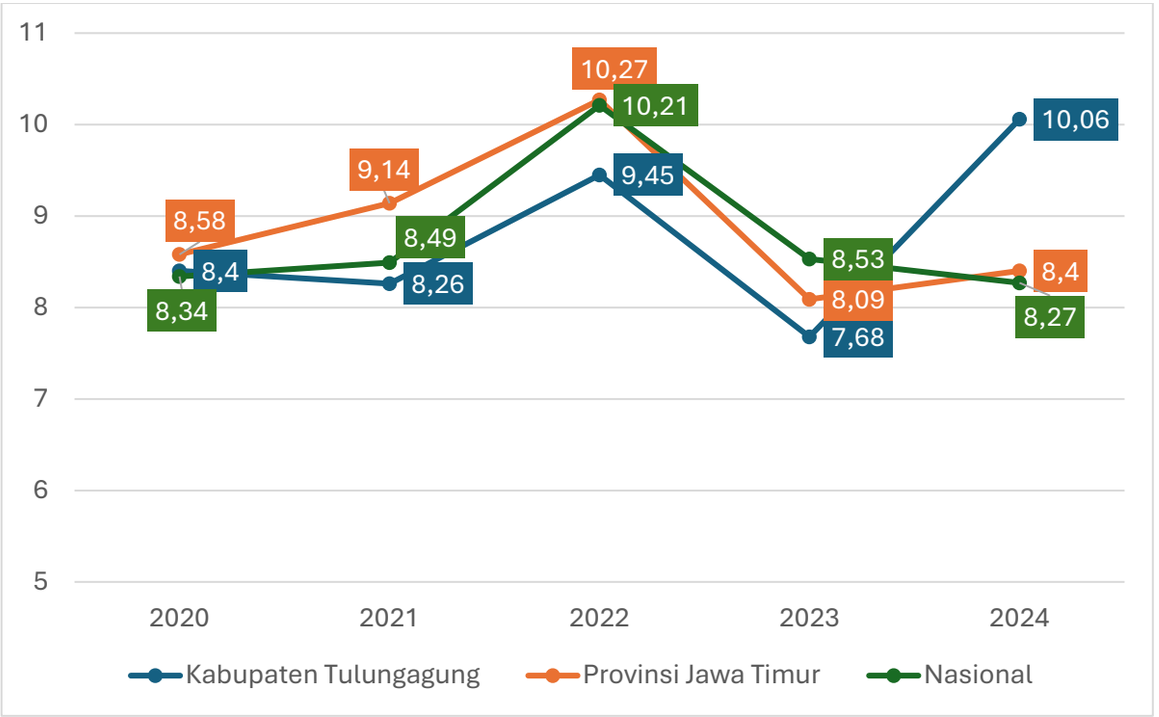
Gambar 2. 8 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2024

Nilai IKP menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah di Kabupaten Tulungagung. IKP Kabupaten Tulungagung mengalami tren meningkat pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Peningkatan ini dipicu oleh peningkatan pada seluruh aspek, baik keterjangkauan, ketersediaan, dan pemanfaatan yang mengalami tren meningkat. Capaian IKP di Kabupaten Tulungagung termasuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga tidak tercatat sebagai wilayah yang rawan pangan.

Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman dari bahan kimia pada tahun 2021 sebesar 54 persen kemudian tahun 2022 turun menjadi 33 persen. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2021 ditemukan 2 produk pangan yang tidak aman, kemudian pada tahun 2022 ditemukan 5 produk pangan tidak aman. Kemudian persentase PSAT di tahun 2023 pangan aman sebesar 33.5 persen. Peningkatan ini dikarenakan dari hasil pengujian produk didapatkan hanya 1 produk yang dinyatakan tidak aman.

Isu lain yang mendukung optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan adalah ketidakseimbangan antara pola konsumsi pangan dengan penyediaan produksi/ketersediaan pangan di masyarakat, di mana produksi berbagai jenis pangan tidak dapat dihasilkan di semua wilayah dan tidak dapat tersedia ketika dibutuhkan. Hal ini akan memengaruhi biaya distribusi pangan akan naik dan berakibat harga bahan pangan itu sendiri.



Gambar 2. 9 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tulungagung
Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tulungagung selama periode 2020 sampai dengan 2024 mengalami tren fluktuatif, karena mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2024. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang tidak baik untuk kecukupan pangan masyarakat Tulungagung. Pada tahun 2024, nilai prevalensi ketidakcukupan pangan bahkan meningkat cukup signifikan melampaui nilai provinsi dan nasional. Padahal pada tahun 2020-2023, nilai prevalensi tersebut selalu berada di bawahnya.

Komoditas beras medium di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan harga beras medium merupakan dampak fenomena el nino yang berimbas pada musim tanam yang tertunda. Tertundanya musim tanam tentu saja juga menyebabkan musim panen mengalami kemunduran dari waktu yang diperkirakan. Musim panen yang mundur berakibat pada stok beras medium yang kurang sehingga terjadi kenaikan harga dalam memenuhi permintaan pasar. Untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga beras ini pemerintah telah melaksanakan program bantuan sosial beras dan program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Tabel 2. 9 Perkembangan Komoditas Harga Pangan (Rp) Kab Tulungagung 2020-2024

Komoditas	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Beras Premium	Kg	11.443	10.738	11.253	13.213	14.943

Komoditas	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Beras Medium	Kg	10.111	9.368	9.633	11.734	12.438
Kedelai Biji Kering	Kg	8.902	11.302	13.629	13.776	10933
Bawang Merah	Kg	30.967	23.606	31.976	29.188	38.767
Bawang Putih (bonggol)	Kg	23.485	22.714	20.154	29.971	37.833
Cabai Merah Keriting	Kg	27.443	29.083	38.742	31.840	36.133
Cabai Rawit Merah	Kg	27.845	48.030	46.175	45.468	57.067
Daging Sapi Murni	Kg	109.936	112.636	114.500	119.609	120.000
Daging Ayam Ras	Kg	29.179	30.789	31.963	31.822	31.767
Telur Ayam ras	Kg	22.189	21.580	25.032	26.760	29.500
Gula Pasir Lokal	Kg	13.632	11.969	13.222	13.919	16.267
Minyak Goreng	Liter	11.814	14.376	19.127	16.581	16.983
Tepung Terigu	Kg	7.660	7.785	8.870	10.936	8.800

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2024

Sebagai salah satu upaya mengatasi krisis pangan di Kabupaten Tulungagung, langkah yang ditempuh dengan memperbanyak pembangunan lumbung pangan di lingkup desa. Keberadaan lumbung pangan diharapkan menjadi wadah untuk persediaan pangan masyarakat, terutama di saat musim paceklik atau sulit pangan. Lumbung pangan juga dapat dimanfaatkan para petani untuk menampung hasil panennya yang tidak langsung dilakukan pendistribusian. Dengan demikian petani bisa memanfaatkan lumbung dengan segala fasilitasnya, seperti tempat jemur dan selep, sehingga hasil panennya tidak hanya bisa dijual dalam bentuk gabah namun dalam bentuk beras sehingga memiliki nilai jual yang lebih menguntungkan. Sampai dengan tahun 2024 lumbung pangan yang sudah terbangun sebanyak 56 dari target 271 desa yang ada di Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan pembangunan lumbung pangan baru memerlukan lahan dari tanah kas desa, selain itu ditemukan kendala tidak semua kelompok tani memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan inovasi dan mengelola lumbung pangan.

2.1.4.2 Ketenagalistrikan

Pembangunan sumber daya ketenagalistrikan di Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam Indikasi Program RTRW Provinsi Jawa Timur di antaranya perwujudan pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tulungagung (Neyama) dan PLTA Wonorejo. Selain itu juga direncanakan pengembangan dan pemantapan infrastruktur pembangkitan tenaga elabuh dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Tulungagung.

Arah pengembangan kawasan strategis dalam perencanaan jangka Panjang di Kabupaten Tulungagung tentang ketenagalistrikan yakni pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi untuk mewujudkan jaringan ketenagalistrikan yang tangguh dan didukung dengan pengembangan wisata dan konservasi. Tujuan dari pengembangan kawasan strategis ini adalah untuk mewujudkan PLTA di Kabupaten Tulungaung sebagai penunjang penyediaan jaringan listrik dan pemenuhan energi di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya.

2.1.4.3 Pelayanan Air Bersih dan Air Minum

Penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan dengan mengolah sumber air baku sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan. Air yang telah melalui proses pengolahan kemudian didistribusikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan. Sumber daya air di Kabupaten Tulungagung cukup melimpah, terbukti dengan aliran sungai yang mengaliri hampir seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tanggunggunung dan Kecamatan Pucanglaban. Terdapat 23 aliran sungai di Kabupaten Tulungagung yang mengalir sepanjang tahun dan memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Tulungagung termasuk dalam DAS Brantas di mana terdapat beberapa sungai yang bermuara di Kali Brantas. Secara garis besar, DAS di Kabupaten Tulungagung yaitu DAS Brantas yang dapat dibedakan menjadi Sub DAS Ngrowo – Ngasinan, Sub DAS Lahar, serta Sub DAS Dlodo – Gedangan.

Tabel 2. 10 Aliran Sungai di Setiap Kecamatan Kabupaten Tulungagung

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
Besuki	Keboireng	10
	Karangtuwo (Batas Wilayah)	-
	Parit Raya	3
	Parit Agung	1,8
Bandung	Parit Agung	3,3
	Karangtuwo	18
	Parit Raya	7
Pakel	Parit Agung	4,4
	Ngasinan Lama	5,5
Campurdarat	Tlogo Buret	5,5
	Parit Agung	7,5
Kalidawir	Kali Dawir	20,5
Rejotangan	Rowo Remang	15,7
	Kali Brantas	8,5
	Kali Kandung	6,15
Ngunut	Kali Brantas	7,15
Sumbergempol	Kali Brantas	2,75
	Kali Dawir	7,1

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
Boyolangu	Kali Dawir	9,4
	Parit Agung	6,8
Tulungagung	Parit Agung	7
	Kali Jenes	3,5
	Song	1,5
Kedungwaru	Kali Brantas (Batas Wilayah)	-
	Ngrowo	6
	Parit Agung	2
	Wudu	2,5
	Kali Jenes	2,5
Ngantru	Kali Brantas	18,85
	Boto	33
Karangrejo	Kali Brantas (Batas Wilayah)	-
	Catut	6
	Wantur	1,5
	Babaan	56
	Bajal Picisan	7,25
	Wudu (Batas Wilayah)	-
Kauman	Song	10,7
	Wudu	10,9
Gondang	Ngasinan Kanal	4,25
	Blendis	14
	Sengon	12,55
	Gondang	11,4
Pagerwojo	Song	30,3
	Gondang/Bodeng	18,6
Sendang	Babaan	17,4
	Bajal Picisan	7,25
	Klantur	10,5
	Catut	6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2025

Selain sungai, sumber air baku di Kabupaten Tulungagung juga berasal dari air tanah pada CAT (Cekungan Air Tanah). CAT di Kabupaten Tulungagung terdiri dari CAT Brantas dan CAT Bulukawang yang keduanya merupakan CAT lintas kabupaten. Penjelasan lebih rinci terkait CAT di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Cakupan Cekungan Air Tanah di Kabupaten Tulungagung

No	CAT	Cakupan Kabupaten	Jumlah Air Tanah (Juta m3/th)		Cakupan Kecamatan di Kab. Tulungagung
			AT Bebas	AT Tertekan	
1	Brantas	Kab. Nganjuk, Kab/Kota Kediri, Kab. Madiun, **Kab. Tulungagung**, Kab/Kota Blitar, Kab/Kota Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jombang, Kab/Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Surabaya	3.674	175	Sendang, Pagerwojo, karangrejo, Ngantru, Kauman, Kedungwaru, Tulungagung, Gondang, Boyolangu, Sumbergempol, Ngunut, Rejotangan, Campurdarat, Pakel, Bandung, Besuki, Kalidawir
2	Bulukawang	**Kab. Tulungagung** dan Blitar	163	-	Besuki, Kalidawir, Tanggunggunung, Pucanglaban

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2025

Di Kabupaten Tulungagung memiliki 8 (delapan) kecamatan dengan kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang relatif baik (secara kualitas dan kuantitas) yaitu di Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Gondang. Sedangkan Kecamatan Campurdarat dan Rejotangan memiliki kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang relatif tidak baik. Meskipun menunjukan variasi secara umum kondisi air tanah dalam di Kabupaten Tulungagung relatif baik.

Di Kabupaten Tulungagung penyediaan air bersih diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bidang cipta karya bekerja sama dengan PDAM yang bertanggung jawab dalam penyediaan air minum di pedesaan dan perkotaan. Penyediaan air minum pedesaan dilakukan melalui kolaborasi antara Pamsimas, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten.

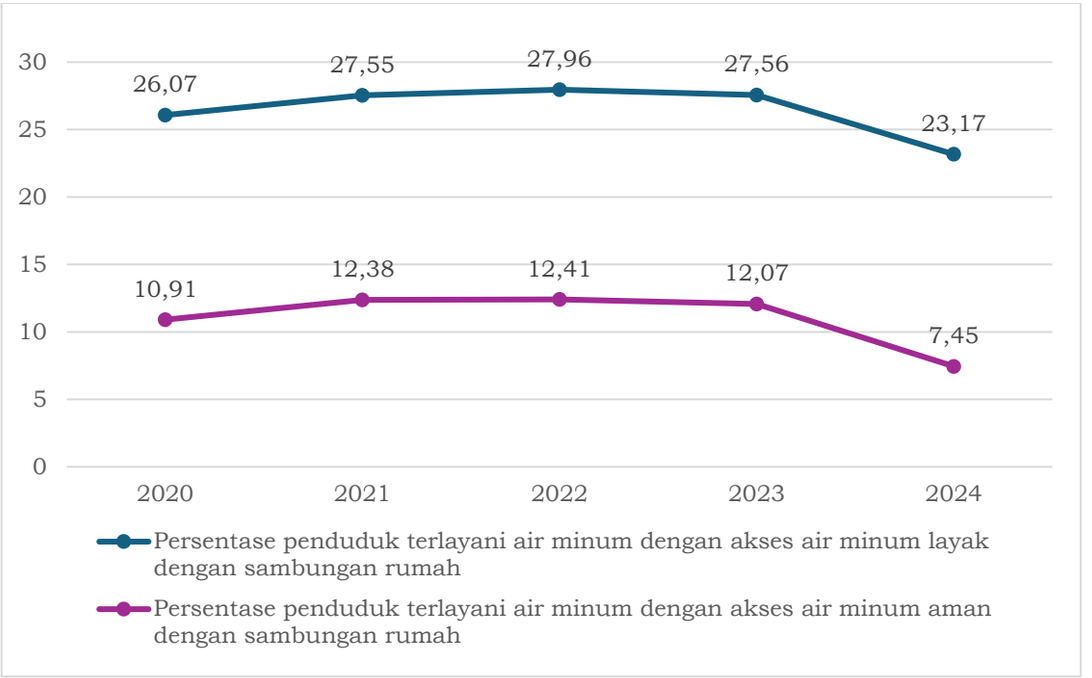
Tabel 2. 12 Pelayanan Air Minum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – 2024

Indikator	Definisi Operasional	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sumber daya air yang terpelihara		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio tingkat pelayanan air minum	jumlah sambungan rumah baik melalui perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan dibagi dengan jumlah total rumah tangga (KK)	Rasio	0,9063	0,9663	0,9694	0,9761	0,9808
Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum layak	sumber air yang layak digunakan meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air	%	26,07	27,55	27,96	27,56	23,17

Indikator	Definisi Operasional	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
dengan sambungan rumah	berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan. (Jumlah rumah tangga menggunakan sumber air minum layak tahun n / Jumlah rumah tangga pada Kabupaten/Kota tahun n) x 100%)						
Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum aman dengan sambungan rumah	sumber air minum aman adalah yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan). Kualitas, sudah memenuhi Permenkes Permenkes No. 492/ Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Jumlah rumah tangga menggunakan sumber air minum aman tahun n / Jumlah rumah tangga pada Kabupaten/Kota tahun n) x 100%	%	10,91	12,38	12,41	12,07	7,45

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan SDA, 2024

Rasio pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung menunjukkan jumlah sambungan rumah baik melalui perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan dibagi dengan jumlah total rumah tangga (KK). Rasio pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.



Gambar 2. 10 Persentase penduduk terlayani air minum layak dan aman Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024
Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan SDA, 2024

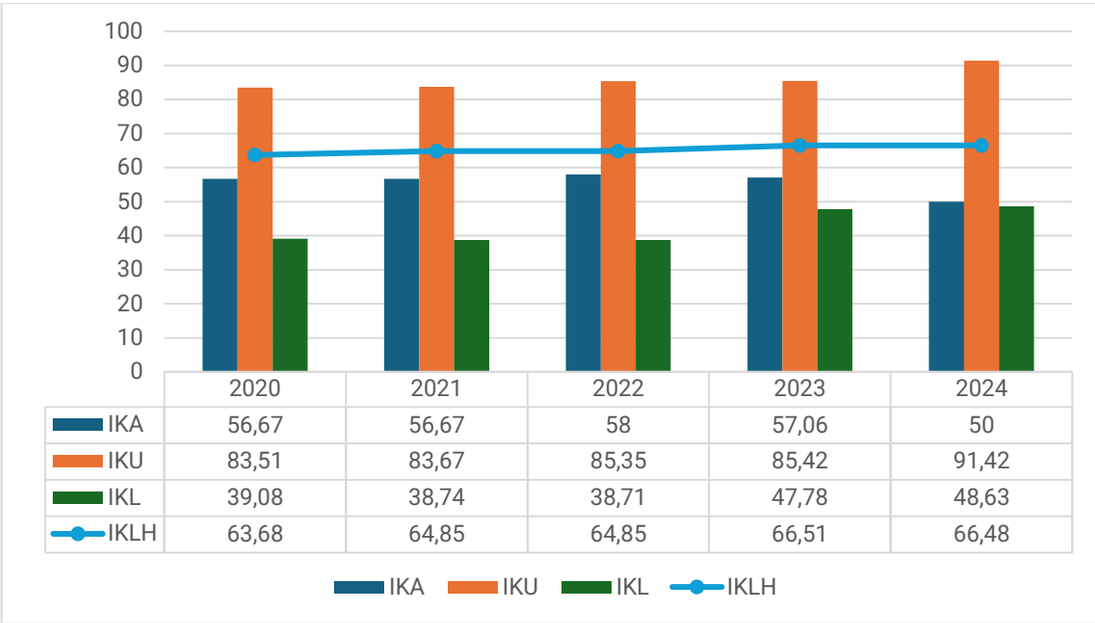
Penyediaan air bersih tidak hanya mencukupi kebutuhan secara kuantitas, namun perlu meningkatkan kualitas air minum yang didistribusikan. Sementara itu, keterbatasan sumber air baku yang layak di Kabupaten Tulungagung menjadi hambatan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih, sehingga perlu adanya pembangunan jaringan instalasi air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Subbagian ini menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, serta Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.

2.1.5.1 Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.



	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	56,67	56,67	58	57,06	50
IKU	83,51	83,67	85,35	85,42	91,42
IKL	39,08	38,74	38,71	47,78	48,63
IKLH	63,68	64,85	64,85	66,51	66,48

Gambar 2. 11 Grafik Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2020-2024
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

IKLH di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada rentang waktu 2020 sampai dengan 2023, namun sedikit mengalami penurunan 0,3 poin pada tahun 2024. Indikator dan parameter pengukuran IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (Air), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Peningkatan skor IKA dan IKL pada tahun 2020 sampai 2023 dikarenakan adanya implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil. Selain itu, peningkatan IKU pada tahun 2021 sampai 2023 tidak terlepas dari upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengendalikan pencemaran udara seperti penerapan rendah emisi (program *Car Free Day*), pembangunan pedestrian serta jalur sepeda, dan Ruang Terbuka Hijau.

Penurunan IKLH terjadi di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 disebabkan oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) yang menurun sebesar 7,06 poin. Kegiatan pemantauan kualitas Air Badan Air di Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk mengetahui kondisi (kuantitas dan kualitas) air sungai saat dipantau dan kecenderungan dari kondisi tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, kualitas air dapat dinilai berdasarkan kandungan sedimen tersuspensi dan bahan kimia atau bahan-bahan pencemar yang ada di dalam air tersebut. Masalah sanitasi merupakan salah satu penyumbang sumber pencemar dari limbah domestik. Salah satu permasalahan sanitasi adalah kebiasaan masyarakat dalam buang air besar. Di Kabupaten Tulungagung sendiri permasalahan kebiasaan masyarakat buang air besar di sungai masih menjadi masalah yang harus segera ditangani karena dapat menyumbang pencemaran *e-coli* ke sungai.

Kabupaten Tulungagung menghadapi tantangan serius terkait perubahan tutupan lahan. Meskipun muncul fenomena alih fungsi lahan yang memengaruhi ekosistem dan keberlanjutan lingkungan, namun tren capaian IKL Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan hingga tahun 2024. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah salah satunya

melalui Geoportal Kabupaten Tulungagung, data dan informasi geospasial disediakan dalam bentuk layanan web GIS memungkinkan pemantauan dan analisis perubahan tutupan lahan secara lebih efisien. Upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Tulungagung.

Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Tulungagung erat kaitannya dengan kondisi alih fungsi lahan serta keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sudah ada inisiatif penanaman tanaman namun belum melakukan inisiatif revitalisasi taman kota untuk mengurangi risiko bencana. Kabupaten Tulungagung belum memiliki taman nasional, Luas Kawasan Hutan masih relatif sedikit Hutan Suaka Alam-Kawasan Pelestarian Alam (KSA-KPA) sebesar 37 Ha berada di Kecamatan Campurdarat dan Tanggunggunung, Luas hutan lindung sebesar 5.947,15 Ha, HPT seluas 34.320,18 Ha yang tersebar di 9 Kecamatan.

2.1.5.2 Pelayanan Sanitasi Rumah Tangga

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni. Ketidaklayakan hunian tersebut dapat diketahui dengan ciri-ciri tidak teraturnya bangunan, jaringan jalan tidak diperkeras, sanitasi umum, drainase tidak berfungsi, pembuangan air limbah masih buruk, persampahan belum dikelola dengan baik, kurangnya proteksi kebakaran serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kondisi sanitasi permukiman merupakan hal yang sangat krusial untuk diintervensi untuk memperkecil luasan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.

Sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki spetik (KemenPU, 2020). Akses sanitasi layak diidentifikasi jika sebuah rumah tangga memiliki toilet kedap air yang terhubung dengan tangki septik. Sedangkan akses sanitasi aman diidentifikasi jika suatu rumah tangga memiliki toilet sendiri dengan sekat air yang terhubung dengan tangki septik yang dikuras secara teratur. Kondisi tangki septik dan lokasi pembuangan limbah (lumpur tinja) tidak dipertimbangkan dalam identifikasi akses sanitasi aman (UNICEF, 2024).

Tabel 2. 13 Pelayanan Sanitasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman	%	39,45	39,63	39,91	40,28	40,34
Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik aman	%	5,02	5,25	5,52	5,90	5,91

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	%	89,45	85,37	83,60	87,85	87,76

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik, 2024

Rumah Tangga yang telah mengakses sanitasi layak di Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 87,85 persen, Namun kondisi tersebut belum diikuti dengan layanan sanitasi permukiman aman yang masih berada di bawah 50 persen, walaupun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa layanan sanitasi aman di Kabupaten Tulungagung masih harus ditingkatkan.

2.1.5.3 Pengelolaan Persampahan

Penanganan sampah masih menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Penanganan sampah di Kabupaten Tulungagung secara umum dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan sampah dan pengurangan sampah. Kegiatan penanganan sampah dilaksanakan dalam bentuk pengangkutan sampah dari TPS dan penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe.

Tabel 2. 14 Timbulan sampah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024

Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2021	548,3	200.127,68
2022	553,83	202.148,86
2023	558,98	204.028,80
2024	450,4	164.395,27

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025

Timbulan sampah di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan hingga tahun 2024. Terdapat penurunan sebesar 0,17% dibandingkan tahun 2021. Artinya, terdapat peningkatan penanganan pengurangan timbulan sampah di Kabupaten Tulungagung. Apabila diidentifikasi lebih lanjut, kontribusi persampahan dominan berasal dari rumah tangga. Dengan demikian, intervensi perlu untuk difokuskan pada peningkatan pengurangan sampah skala rumah tangga.

Jakstrada merupakan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lingkup Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan kebijakan dimaksud seluruh kabupaten/kota di Indonesia ditargetkan mampu mengelola 100 persen sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dengan perincian 30 persen sampah terkurangi dan 70 persen sampah tertangani. Pada tahun 2019, persentase sampah terkelola terhadap target Jakstrada sebesar 17 persen. Di tahun 2020 meningkat sebesar 19 persen, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 21 persen, di tahun 2022 meningkat menjadi 23 persen sedangkan di tahun 2023

terjadi peningkatan sebesar 25 persen, serta di tahun 2024 meningkat menjadi 50,42 persen dengan koefisien estimasi timbulan sampah 0,5/Orang/Hari dirubah menjadi 0,4 Kg/Orang/Hari mulai tahun 2024 sesuai dengan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 15 Layanan Persampahan Kabupaten Tulungagung

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sampah yang terkelola terhadap target Jakstrada Persampahan	%	19,00	21,00	23,00	25,00	27,76
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	14,50	15,00	15,50	16.00	15,30
Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	1,53	1,77	2,19	2,57	2,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2025

Penanganan sampah perkotaan Kabupaten Tulungagung tiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya-upaya penanganan sampah di Kabupaten Tulungagung terus dilakukan, meskipun volume timbunan sampah terus meningkat. Volume sampah yang terus meningkat menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung, sehingga capaian sampah yang terkelola relatif masih kecil, yakni hanya 27,76 persen sampai dengan tahun 2024, masih belum mencapai target Jakstrada yang menargetkan sebesar 50,42 persen pada tahun 2024 hal tersebut disebabkan karena kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah juga masih belum optimal, yakni hanya mencapai 15,30 persen sedangkan rumah tangga yang memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah hanya 2,79.

Tabel 2. 16 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Tahunan	Ton/Tahun	200.127,68	202.148,86	204.028,80	164.395,27
Pengurangan Sampah Tahunan	Ton/Tahun	33.345,42	35.146,74	36.594,00	37.305,99
Persentase Pengurangan Sampah	%	16,66	17,39	17,94	22,69
Penanganan Sampah Tahunan	Ton/Tahun	51.100	54.677	53.983,50	54.726,53
Persentase Penanganan Sampah	%	25,53	27,05	26,46	33,29
Sampah Terkelola Tahunan	Ton/Tahun	84.445,42	89.823,74	90.577,50	92.032,52

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase Sampah Terkelola	%	42,20	44,43	44,39	55,98
Daur Ulang Sampah Tahunan	Ton/Tahun	32.972,22	34.743,54	36.165,60	36.749,79

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

Capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung yang dilaporkan pada SIPSN menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2024 telah berhasil mengurangi timbulan sampah sebesar 22,69 persen, angka tersebut terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang hanya sebesar 16,66 persen. Selain itu, capaian sampah yang terkelola telah mencapai 55, 98 persen yang terus meningkat selama tahun 2021-2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah sudah menunjukkan tren yang baik, namun masih harus terus ditingkatkan, agar timbulan sampah bisa berkurang dan terkelola dengan baik.

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Subbab ini menjelaskan perihal kapasitas daerah yang meliputi kemampuan masyarakat dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem seperti bencana dan perubahan iklim. Bencana dimaknai sebagai suatu peristiwa baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian materiil, maupun kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat digambarkan melalui beberapa indikator, antara lain Indeks Ketahanan Daerah yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi kapasitas suatu wilayah terhadap bencana.

Tabel 2. 17 Indikator kinerja kebencanaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

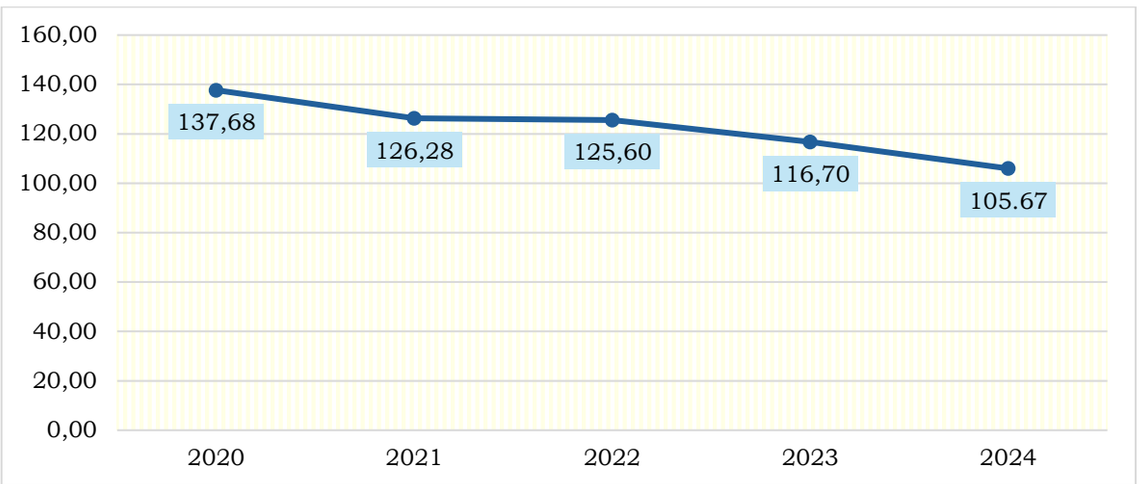
Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Menit	14,48	14,30	13,45	13,35	11,29
Persentase desa tangguh bencana	%	2,21	2,95	3,69	4,79	6,27
Persentase penanganan kasus kebakaran	%	100,00	100,00	97,00	98,70	100,00
Indeks Risiko Bencana	Angka	137,68	126,28	125,6	116,70	105,98
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,65	0,64	0,65	0,66

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran dilakukan melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Berdasarkan nilai persentase Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari tahun 2020 sampai 2024 maka dapat dijelaskan bahwa capaian menurun. *Response Time* Penanganan Kebakaran serta

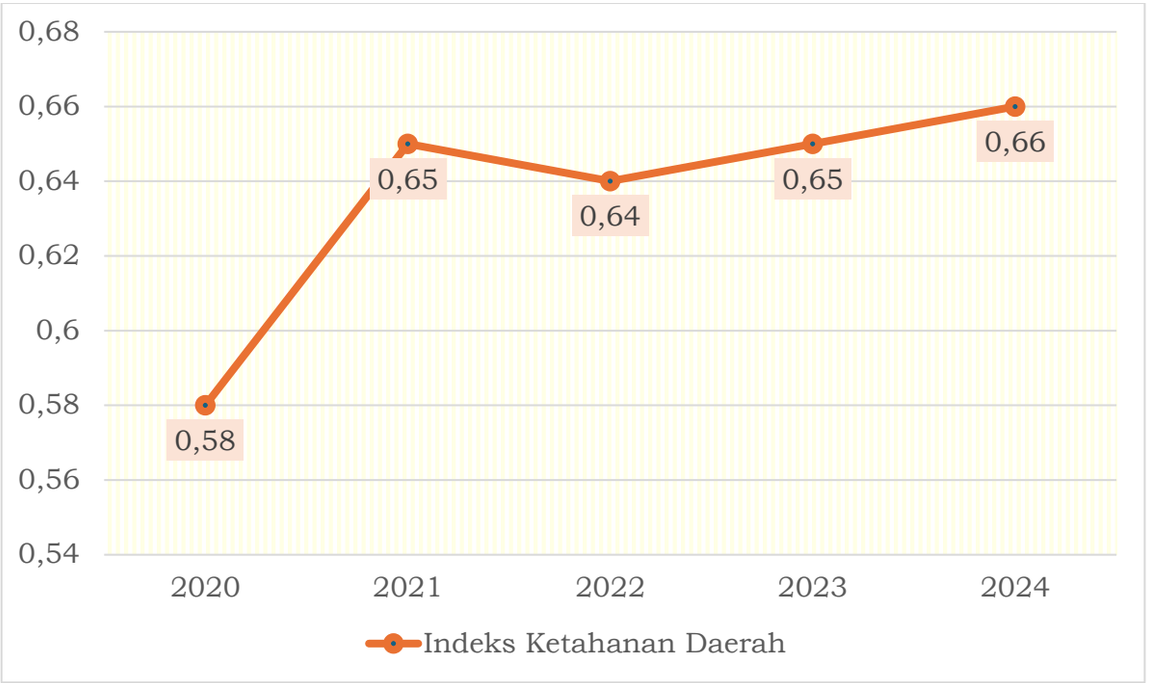
Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bahaya kebakaran dengan indikator Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih di bawah target yaitu lebih dari 15 Menit. *Response Time* yang belum mencapai target dikarenakan lokasi pos Pemadam kebakaran (PMK) hanya ada di pusat kota Kabupaten Tulungagung dan belum tersebar di beberapa lokasi. Akibatnya, waktu tanggap *responsetTime* untuk wilayah pinggiran belum dapat ditingkatkan.

Untuk indikator persentase penanganan kasus kebakaran yang memenuhi standar *response time* menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 dan 2022 mencapai 70 persen lalu meningkat pada tahun 2022 mencapai 71,50 persen serta pada tahun 2024 mencapai 80,19 persen. Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sampai dengan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 100 persen atau seluruh kejadian kebakaran semua dapat teratasi. Upaya lainnya untuk meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi adalah dengan langkah-langkah penanggulangan bencana berupa sosialisasi, gladi lapang, gladi posko serta penyediaan dukungan logistik dan pemberian bantuan kebutuhan dasar.



Gambar 2. 12 Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: BPBD Kab. Tulungagung 2025

Indikator indeks risiko bencana menunjukkan tren penurunan selama tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini menandakan jika kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana semakin baik. Semakin kecil nilai indeks risiko bencana maka menandakan risiko bencana di Kabupaten Tulungagung semakin kecil. Salah satu upayanya adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), yaitu desa yang dibekali kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi bencana sekaligus pemulihan diri dari dampak bencana. Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Tulungagung terus diupayakan untuk ditingkatkan. Upaya pertumbuhan Desa Tangguh Bencana ini masih bergantung pada kemampuan pembiayaan dari Kabupaten Tulungagung sehingga masih diperlukan dukungan pembentukan dari pemerintah provinsi.



Gambar 2. 13 Grafik Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Kab. Tulungagung 2025

Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,01 lalu mengalami tren kenaikan pada tahun 2023 hingga 2024. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tulungagung mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko dari kerentanan dan ancaman bencana.

Berdasarkan Peta Bahaya Banjir Kabupaten Tulungagung diketahui bahwa total wilayah terancam bencana Banjir di Kabupaten Tulungagung adalah seluas 40,928.65 Ha atau 38.77 % dari total luas wilayah yang meliputi wilayah 19 Kecamatan di Kabupaten Tulungagung tersebar di 265 desa terkena bahaya banjir di seluruh Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan Peta Bahaya Banjir Bandang Tulungagung diketahui bahwa total wilayah terancam bencana banjir bandang di Kabupaten Tulungagung adalah seluas 2,202.04 Ha atau 2.09 % dari total luas wilayah yang meliputi seluruh 11 Kecamatan dan 70 Desa di Kabupaten Tulungagung, dengan luas bahaya terbanyak tersebar di kecamatan Boyolangu, Kauman, Karangrejo, Sendang dan Pagerwojo.

Berdasarkan Peta Bahaya Gempa bumi Kabupaten Tulungagung diketahui bahwa total wilayah terancam bencana Gempa bumi di Kabupaten Tulungagung adalah seluas 100 % (105,565.00 Ha) yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Kelas bahaya gempa bumi yang terdapat di Kabupaten Tulungagung diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Secara keseluruhan Kabupaten Tulungagung memiliki kategori kelas bahaya gempa bumi yang tinggi. Di samping itu terdapat sebanyak 3 kecamatan yang memiliki kelas bahaya gempa bumi dengan kategori sedang yaitu Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Sendang, dan Kecamatan Tanggunggunung. Selain itu, Kecamatan Pagerwojo merupakan satu-satunya wilayah dengan kelas bahaya gempa bumi kategori rendah.

Berdasarkan Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Tulungagung diketahui bahwa total wilayah terancam bencana Tsunami di Kabupaten Tulungagung adalah seluas 379,36 Ha atau 0.37 % dari luas total wilayah yang meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Besuki, Kalidawir, Pucanglaban dan Tanggunggunung dengan jumlah desa yang terkena tsunami 9 Desa. Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tulungagung. Kajian mengenai bahaya tanah longsor dilakukan untuk mengetahui potensi sebaran dan tingkat ancaman bencana tersebut. Kajian ini melibatkan berbagai parameter yang dianggap mempengaruhi terjadinya longsor. Dengan demikian, dapat ditentukan luas dan kelas bahaya berdasarkan wilayah administrasi yang berpotensi terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023 wilayah di Kabupaten Tulungagung yang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah Kecamatan Besuki, Kalidawir, Pucanglaban, dan Tanggunggunung dan mencakup 9 desa yang terkena bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Pengendalian pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan rawan bencana gelombang ekstrim adalah pengembangan hutan dan ekosistem mangrove, pengembangan sistem peringatan dini, pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana gelombang ekstrim, dan pembangunan zona peredam gelombang air laut.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah sejumlah gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Terdapat 6 jenis gas yang digolongkan sebagai GRK yaitu CO2 (karbon dioksida), CH4 (metana). N2O (dinitrogen oksida, HFC (hidro fluoro karbon), PFC (per fluoro karbon) dan SF6 (sulfur heksa florida). Pertumbuhan penduduk secara signifikan memengaruhi tingkat emisi GRK. Semakin banyak penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan sumber daya alam, pangan, energi, dan barang konsumsi lainnya. Peningkatan permintaan ini mendorong aktivitas produksi yang pada gilirannya melepaskan sejumlah besar GRK ke atmosfer.

Secara umum terdapat beberapa kaitan sektoral yang menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca antara lain:

1. **Pertanian:**

   Peningkatan produksi pangan: Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus bertambah, perluasan lahan pertanian seringkali dilakukan dengan cara deforestasi, yang melepaskan karbon tersimpan dalam hutan.

   Peternakan: Aktivitas peternakan menghasilkan metana, salah satu gas rumah kaca yang potensinya lebih tinggi daripada karbon dioksida. Semakin banyak populasi, semakin besar pula permintaan produk peternakan.

   Penggunaan pupuk sintetis: Penggunaan pupuk sintetis dalam pertanian melepaskan nitrous oksida, gas rumah kaca lainnya.

2. **Kehutanan:**

Deforestasi: Pembukaan lahan hutan untuk pertanian, perkebunan, atau permukiman mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon dioksida.

Degradasi hutan: Penebangan hutan secara ilegal dan tidak berkelanjutan juga berkontribusi pada peningkatan emisi GRK.

3. **Industri:**

   Peningkatan produksi: Pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan produksi barang industri, yang membutuhkan energi dan bahan baku dalam jumlah besar. Proses produksi ini seringkali menghasilkan emisi GRK.

   Limbah industri: Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat melepaskan gas metana dan karbon dioksida ke atmosfer.

4. **Energi**:

   Peningkatan konsumsi energi: Semakin banyak penduduk, semakin tinggi pula konsumsi energi untuk pembangkit listrik, transportasi, dan kegiatan rumah tangga. Pembangkit listrik berbasis fosil merupakan penyumbang emisi karbon dioksida terbesar.

   Eksploitasi sumber daya fosil: Eksploitasi batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk memenuhi kebutuhan energi juga melepaskan sejumlah besar GRK.

5. **Transportasi:**

   Peningkatan penggunaan kendaraan: Pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor, yang menghasilkan emisi karbon dioksida dan polutan udara lainnya.

   Infrastruktur transportasi: Pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan raya dan bandara juga berkontribusi pada emisi GRK.

6. **Limbah:**

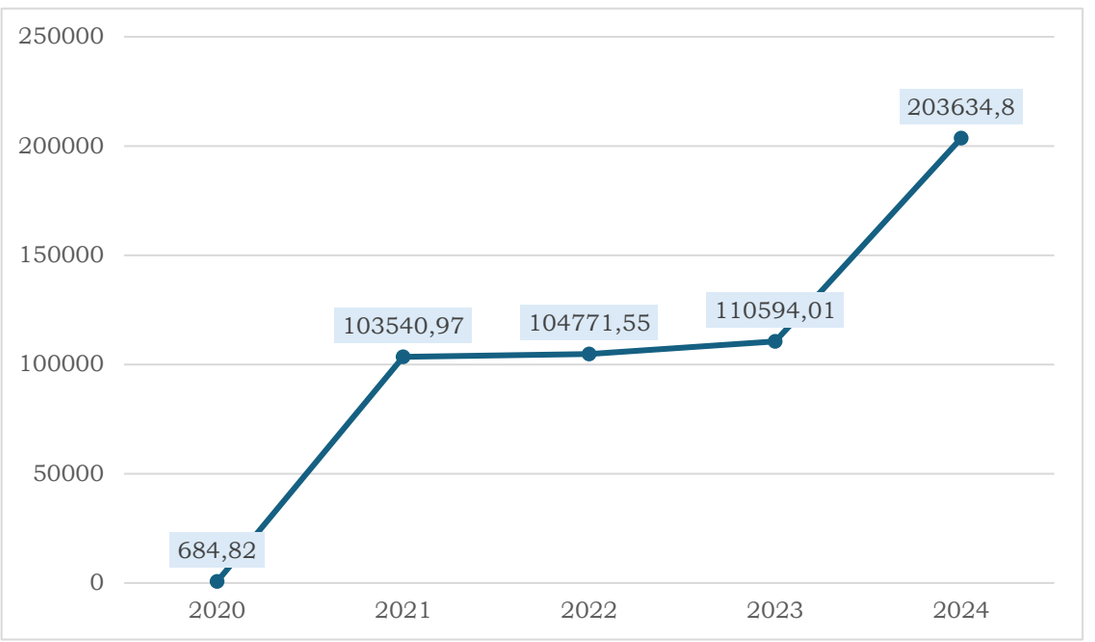
   Peningkatan produksi sampah: Semakin banyak penduduk, semakin besar pula jumlah sampah yang dihasilkan. Pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana.

Berdasarkan data AKSARA (Aplikasi Perencanaan – Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional) untuk rekapitulasi capaian pembangunan rendah karbon di Kabupaten Tulungagung telah terdapat 30 total kegiatan aksi PRK, dan 110344.69 Ton CO^2eq yang telah mengalami penurunan. Angka tersebut juga berkontribusi sebanyak 0.24% terhadap capaian provinsi.



Gambar 2. 14 Grafik Capaian Luas Lahan yang Mengalami Penurunan emisi
Sumber: Aksara Bappenas, 2024

Grafik di atas menunjukkan total luas lahan di Kabupaten Tulungagung yang telah mengalami penurunan emisi dan intensitas emisi. Dapat diketahui bahwa pada trend tiga tahun terakhir sangat berkembang pesat, dimana pada tahun 2023 mengalami kenaikan lahan yang mengalami penurunan emisi pada capaian 109.779 Ton CO^2eq. Hal ini tentunya sejalan usaha serta kontribusi pemerintah daerah dan masyarakat setempat dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan. Selain itu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ketahanan terhadap perubahan iklim adalah penurunan intensitas emisi GRK. Berikut disajikan data penurunan emisi GRK Kabupaten Tulungagung.



Gambar 2. 15 Penurunan Emisi GRK Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: DLH Kabupaten Tulungagung, 2025

Grafik menunjukkan tren penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Tulungagung selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, emisi GRK tercatat sebesar 684,82 ton CO_2e per miliar

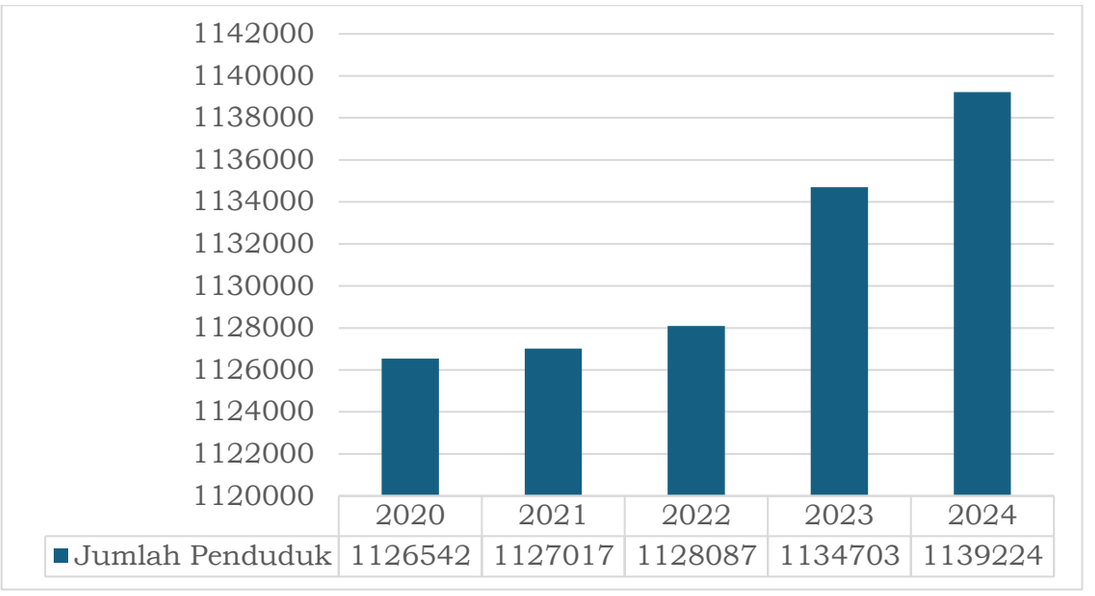
rupiah, dan mengalami lonjakan tajam pada tahun 2021 menjadi 103.540,97. Namun, dalam tiga tahun berikutnya, terjadi perlambatan laju peningkatan, bahkan menunjukkan upaya stabilisasi hingga tahun 2023 dengan angka 110.594,01. Tahun 2024 memperlihatkan lonjakan kembali ke angka 203.634,8. Meski belum sepenuhnya menunjukkan penurunan absolut, tren ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tulungagung menghadapi tantangan besar dalam menurunkan emisi. Hal ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih tegas dalam pengendalian emisi, melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan perbaikan tata kelola sektor-sektor penyumbang emisi terbesar.

2.1.7 Demografi

Kondisi demografi merujuk pada karakteristik populasi dalam suatu wilayah tertentu yang mencakup berbagai aspek seperti jumlah, struktur, distribusi, dan dinamika penduduk. Data kependudukan memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan mengingat masyarakat merupakan aktor sekaligus penerima manfaat pembangunan. Berikut data demografi Kabupaten Tulungagung.

2.1.7.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam analisis demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk mencerminkan besaran populasi yang menetap di suatu daerah pada periode tertentu. Analisis terhadap aspek ini penting untuk memahami perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur serta layanan publik di suatu wilayah. Dengan mengetahui tren pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Selama periode 2020-2024, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung memiliki tren yang meningkat. Selama periode tersebut jumlah penduduk bertambah 12.682 jiwa atau naik sebanyak 1,12 persen. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023-2024 yakni dari 1.134.703 jiwa menjadi 1.139.224 jiwa.



Gambar 2. 16 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.126.542 jiwa, kemudian bertambah menjadi 1.127.017 jiwa pada tahun 2021 dan 1.128.087 jiwa pada tahun 2022. Pertumbuhan jumlah penduduk mulai terlihat signifikan pada tahun 2023 dengan jumlah 1.134.703 jiwa, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 1.139.224 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh faktor alami berupa angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian, serta didukung oleh meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang berdampak pada penurunan mortalitas. Selain itu, faktor pandemi juga turut berpengaruh dalam proses pencatatan jumlah penduduk ini.

Tren pertumbuhan penduduk tersebut memiliki implikasi penting bagi arah pembangunan daerah. Pertambahan jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur. Di sisi lain, bertambahnya jumlah penduduk usia produktif dapat menjadi potensi penggerak pembangunan ekonomi daerah jika mampu dioptimalkan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan. Oleh karena itu, pengelolaan kependudukan yang selaras dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun tidak hanya menunjukkan peningkatan secara agregat, tetapi juga menggambarkan dinamika penyebarannya di setiap wilayah kecamatan. Jumlah penduduk secara keseluruhan yang terus bertambah tidak menjamin bahwa distribusinya merata karena dipengaruhi oleh perbedaan potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur, serta pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik. Kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi maupun pendidikan cenderung menampung penduduk lebih banyak dibandingkan kecamatan dengan karakter wilayah pertanian atau perdesaan. Oleh karena itu, analisis mengenai persebaran penduduk per kecamatan menjadi penting untuk melihat beban dan potensi pembangunan yang berbeda di tiap wilayah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan merata sesuai arah RPJMD Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan persebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024

Tabel 2. 18 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

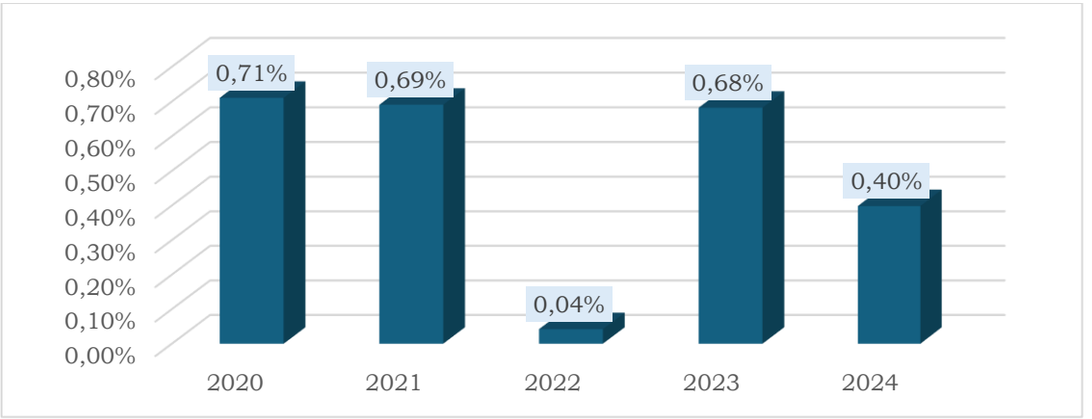
No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa
1	Tulungagung	71.201	67.742	66.786	66.864	66.711
2	Boyolangu	88.224	85.840	86.222	86.827	87.165
3	Kedungwaru	96.31 7	95.030	95.335	95.807	96.370
4	Ngantru	58.596	59.278	59.421	59.798	60.097
5	Kauman	53.428	53.435	53.112	53.288	53.315
6	Pagerwojo	32.504	32.813	33.109	33.360	33.601
7	Sendang	48.531	49.277	49 .353	49.724	50.036
8	Karangrejo	44.896	45.244	45.257	45.403	45.458
9	Gondang	60.127	60.464	60.527	60.822	60.939
10	Sumbergempol	73.168	74.166	74.630	75.299	75.768
11	Ngunut	84.170	84.722	84.674	85.166	85.302
12	Pucanglaban	26.811	27.027	27.032	27.173	27.321
13	Rejotangan	82.738	83.504	83.469	83.803	84.221
14	Kalidawir	76.871	77.505	77.758	78.251	78.601
15	Besuki	39.580	39.837	39,799	40.026	40.181
16	Campurdarat	59.204	59.672	59.740	60.123	60.315
17	Bandung	49.070	49.475	49.534	49.921	50.200
18	Pakel	54.796	55.337	55.539	56.049	56.415
19	Tanggunggunung	26.310	26.649	26.790	26.999	27.208
Jumlah		**1.118.814**	**1.126.542**	**1.127.017**	**1.134.703**	**1.139.224**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2024

Jika dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2024 sebanyak 1.139.224 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak pada Kecamatan Kedungwarung sebanyak 96.370 jiwa, sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit yakni Kecamatan Pucanglaban sebanyak 27.208 jiwa.

2.1.7.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena mencerminkan dinamika demografi yang berdampak langsung terhadap kebutuhan layanan dasar, penyediaan infrastruktur, serta ketersediaan lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan kapasitas pelayanan publik, sementara pertumbuhan yang terlalu rendah dapat mengurangi potensi bonus demografi. Oleh karena itu, pemantauan laju pertumbuhan penduduk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan. Berikut disajikan data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024.



Gambar 2. 17 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulungagung cenderung fluktuatif dengan tren menurun, dan masih berada dibawah satu persen sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Fluktuasi ini menggambarkan bahwa dinamika pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran, kematian, serta mobilitas penduduk. Perubahan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2022 karena adanya mutasi dan angka kematian yang cukup tinggi selama pandemi Covid-19. Akan tetapi, data tersebut baru tercatat pada tahun 2022, sedangkan data pada tahun 2020 masih menggunakan basis data proyeksi sensus 2010. Kecenderungan tren penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tulungagung sejalan dengan data *Total Fertility Rate* (TFR) yang berada pada angka 1,97 pada tahun 2022. Angka tersebut berada di bawah TFR ideal yang diusung oleh BKKBN untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang (PTS), yakni sebesar 2,1. Oleh karena itu, penting untuk Kabupaten Tulungagung memastikan bahwa capaian TFR tersebut bisa dipertahankan agar laju pertumbuhan penduduknya tidak terus mengalami penurunan.

2.1.7.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk digunakan untuk menunjukkan distribusi penduduk. Hal ini berguna untuk melihat kecenderungan pemusatan dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Daerah dengan jumlah penduduk lebih tinggi umumnya membutuhkan layanan dasar yang lebih bervariasi karena heterogenitas latar belakang masyarakatnya. Data distribusi penduduk berguna untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 2. 19 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km²
1	Besuki	3,53	232,15
2	Bandung	4,41	1064,91
3	Pakel	4,95	1474,13
4	Campurdarat	5,29	1316,63
5	Tanggunggunung	2,39	420,00

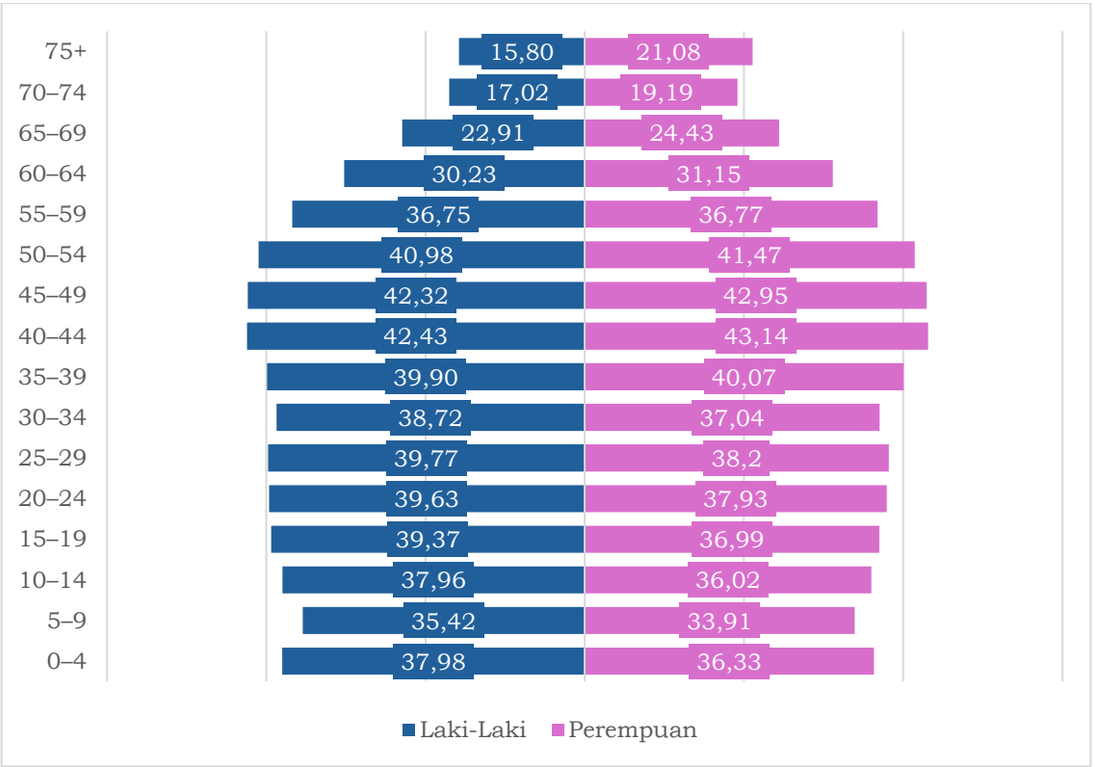
No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km²
6	Kalidawir	6,90	659,96
7	Pucanglaban	2,40	352,67
8	Rejotangan	7,39	1089,68
9	Ngunut	7,49	2104,14
10	Sumbergempol	6,65	1853,42
11	Boyolangu	7,65	2319,45
12	Tulungagung	5,86	4547,44
13	Kedungwaru	8,46	2986,37
14	Ngantru	5,28	1432,59
15	Karangrejo	3,99	1177,36
16	Kauman	4,68	1794,51
17	Gondang	5,35	1373,43
18	Pagerwojo	2,95	301,90
19	Sendang	4,39	404,17
Kabupaten Tulungagung		**100,00**	**995,36**

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2025

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah terhadap luas wilayah tersebut. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk Kabupaten Tulungagung sebesar 995,36 jiwa. Hal ini berarti bahwa dalam 1 km² terdapat rata-rata 995,36 jiwa penduduk. Selain itu, data kepadatan penduduk juga menunjukkan tingkat sebaran penduduk di setiap kecamatan. Belum meratanya sebaran jumlah penduduk di masing-masing wilayah kecamatan menunjukkan masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Kecamatan Tulungagung yang menjadi wilayah kecamatan terpadat.

2.1.7.4 Komposisi Penduduk

Piramida penduduk Kabupaten Tulungagung menunjukkan bentuk yang menyerupai *batu nisan* atau *bentuk stasioner*. Hal ini terlihat dari lebar populasi di kelompok usia produktif (15–59 tahun) yang relatif seimbang dan cukup besar, sementara proporsi anak-anak (0–14 tahun) lebih mengecil dan lansia (60 tahun ke atas) menunjukkan penyempitan.



Gambar 2. 18 Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2025

Kelompok usia 20–44 tahun memiliki populasi terbanyak baik pada laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa Tulungagung memiliki struktur penduduk yang didominasi usia produktif yang berpotensi besar untuk menopang pembangunan ekonomi daerah melalui tenaga kerja aktif. Jumlah penduduk usia 0–4 dan 5–9 tahun lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia di atasnya. Kelompok usia 60 tahun ke atas (terutama 60–64, 65–69, dan 70–74) menunjukkan jumlah yang cukup signifikan menandakan peningkatan harapan hidup. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan layanan kesehatan dan kesejahteraan lansia.

Secara umum, jumlah laki-laki dan perempuan terlihat hampir seimbang pada hampir semua kelompok umur, meskipun pada usia lansia, jumlah perempuan sedikit lebih tinggi, yang merupakan tren umum akibat harapan hidup perempuan yang lebih panjang. Kabupaten Tulungagung saat ini berada pada fase bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. Namun, tren penurunan kelahiran dan peningkatan penduduk lansia perlu diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi usia lanjut.

Jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung dari 2020-2022 memiliki trend meningkat, dari 1.089.780 jiwa pada tahun 2020, dan terus meningkat hingga menjadi 1.105.340 jiwa pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.93%. mengacu pada data jumlah penduduk hingga tahun 2022 dapat diproyeksikan jumlah penduduk hingga 20 tahun ke depan yaitu sampai dengan tahun 2045. Selama rentang waktu tersebut, jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung diperkirakan akan berjumlah 1.160.760 juta penduduk

yang terdiri dari 576.522 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 584.238 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, maka dapat diketahui sex rasio pada tahun 2045 yaitu sebesar 98,67 atau dapat diinterpretasikan bahwa setiap 100 laki-laki terdapat 98 sampai dengan 99 perempuan.

Tabel 2. 20 Proyeksi Penduduk di Kabupaten Tulungagung

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.107.803	1.119.588	1.143.474	1.158.776	1.164.488	1.160.760

Sumber: RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, dapat diketahui bahwa pada akhir periode RPJPD, struktur kependudukan tidak menunjukkan gambaran perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2040. Pada periode ini postur piramida kependudukan masih didominasi oleh penduduk dengan usia diatas 40 tahun. Namun demikian pada periode ini, jumlah penduduk dengan usia produktif masih relatif banyak, sehingga pada periode ini Kabupaten Tulungagung dapat terhindar dari kondisi Aging Population. Namun demikian, jika terjadi fenomena tertentu yang mengakibatkan generasi muda atau usia produktif berpindah domisili, Kabupaten Tulungagung sangat berisiko menghadapi tantangan kondisi kependudukan berupa aging population dikarenakan pada tahun tersebut jumlah per masing-masing kelompok umur telah didominasi oleh usia di atas 40 tahun. Jika pada periode ini didominasi oleh lansia, maka arah kebijakan pemerintah daerah harus diarahkan untuk mememberikan dukungan kesejahteraan untuk lansia seperti posyandu lansia, dan infrastruktur penunjang kesehatan lainnya.

Tabel 2. 21 Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulungagung

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	554.216	559.968	571.171	57.773	579.406	576.522
Perempuan	553.587	559.620	572.303	581.046	585.082	584.238
Total	1.107.803	1.119.588	1.143.474	638.819	1.164.488	1.160.760

Sumber: RPJPD Kab. Tulungagung 2025-2045

Pertumbuhan penduduk secara umum memang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, namun jika dilihat secara lebih detail berdasarkan kelompok umur dapat diketahui bahwa tidak semua kelompok umur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Setidaknya terdapat 10 kelompok umur yang mengalami penurunan jumlah penduduk setiap tahunnya yaitu usia 0-4 tahun sampai dengan 45-49 tahun. Sedangkan kelompok usia yang mengalami peningkatan adalah pada kelompok umur 50-54 tahun sampai dengan diatas 75 tahun. Namun demikian, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah pada jumlah penduduk yang memiliki trend yang signifikan baik

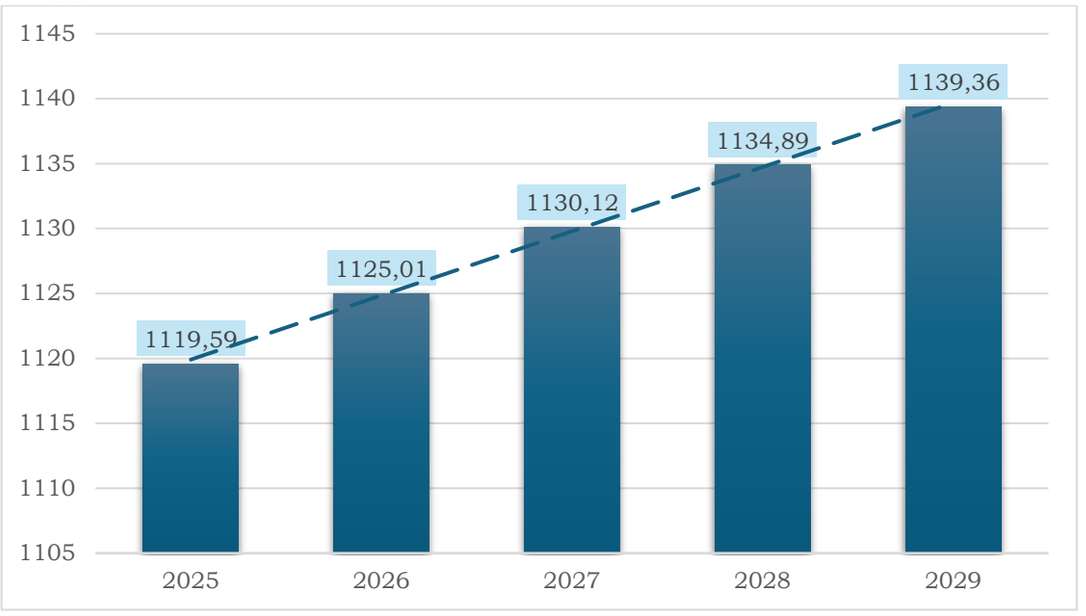
menurun maupun meningkat. Kelompok usia yang mengalami trend menurun cukup signifikan adalah pada kelompok usia 40-44 tahun. Sedangkan kelompok umur yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah kelompok umur diatas 75 tahun.

2.1.7.5 Proyeksi Demografi

Proyeksi demografi Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan mengacu pada hasil proyeksi penduduk Kabupaten/Kota untuk tahun 2020-2035 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS didasarkan pada hasil kuesioner sensus penduduk yang lebih rinci yang selanjutnya disebut sebagai *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Proyeksi demografi Kabupaten Tulungagung difokuskan untuk menganalisis perkembangan jumlah penduduk serta melakukan analisis penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur. Adapun hasil proyeksi kependudukan Kabupaten Tulungagung dijabarkan sebagai berikut:

1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah jumlah penduduk. Indikator tersebut memberikan gambaran kondisi kependudukan yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Proyeksi demografi Kabupaten Tulungagung memanfaatkan data kependudukan tahun 2020 sebagai data dasar. Berikut merupakan hasil proyeksi demografi Kabupaten Tulungagung pada aspek jumlah penduduk pada tahun 2025 hingga 2029.



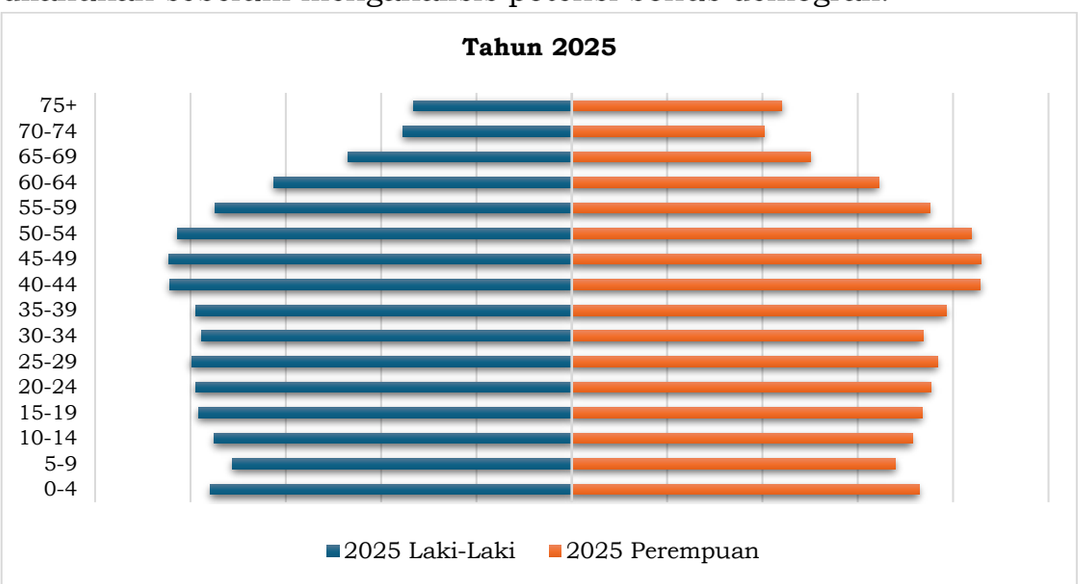
Gambar 2. 19 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029
Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Proyeksi kependudukan Kabupaten Tulungagung yang termuat dalam publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2029. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat dapat

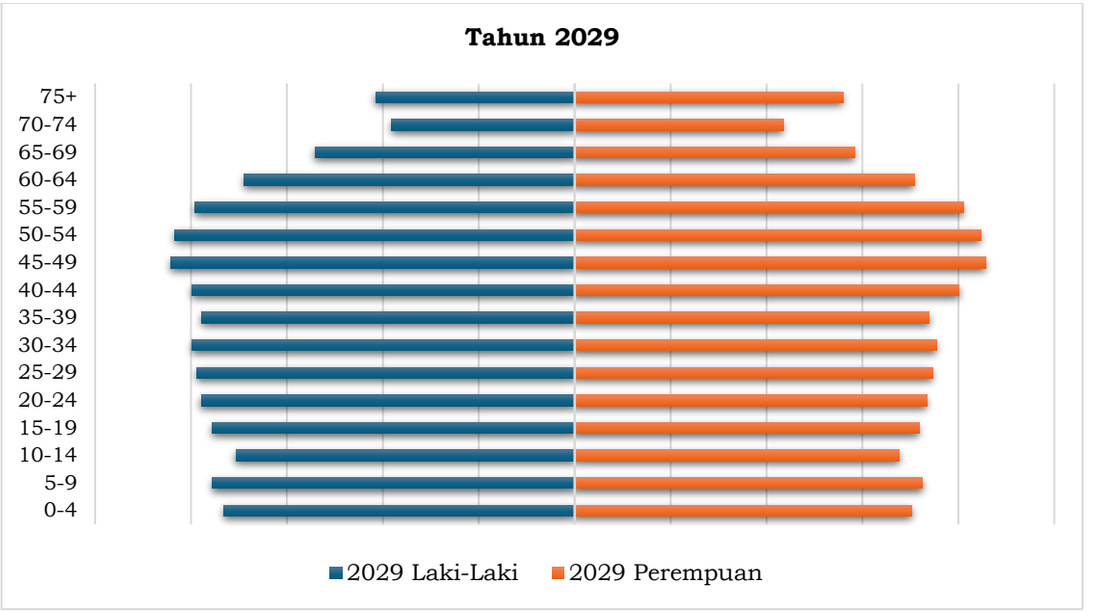
memengaruhi berbagai sektor, seperti kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, dan potensi pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu menyusun dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi dinamika ini, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk membuka peluang seperti peningkatan konsumsi serta ketersediaan tenaga kerja yang lebih melimpah. Namun di sisi lain, hal ini juga memunculkan tantangan baru seperti meningkatnya kepadatan penduduk, tingginya permintaan layanan, serta tekanan terhadap sumber daya alam.

2. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur penting karena dapat memberikan informasi seperti potensi bonus demografi dan tingkat ketergantungan penduduk. Bonus demografi merupakan kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Kategori usia produktif adalah penduduk berumur 15 hingga 64 tahun, sedangkan usia belum produktif adalah 0 hingga 14 tahun, dan usia tidak produktif adalah 65 tahun ke atas. Oleh karena itu, Kabupaten Tulungagung perlu menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi kependudukan yang ada. Analisis terhadap jumlah penduduk berdasarkan umur sebagai dasar pengambilan keputusan perlu dilakukan sebelum menganalisis potensi bonus demografi.



Gambar 2. 20 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2025
Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020



Gambar 2. 21 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2029

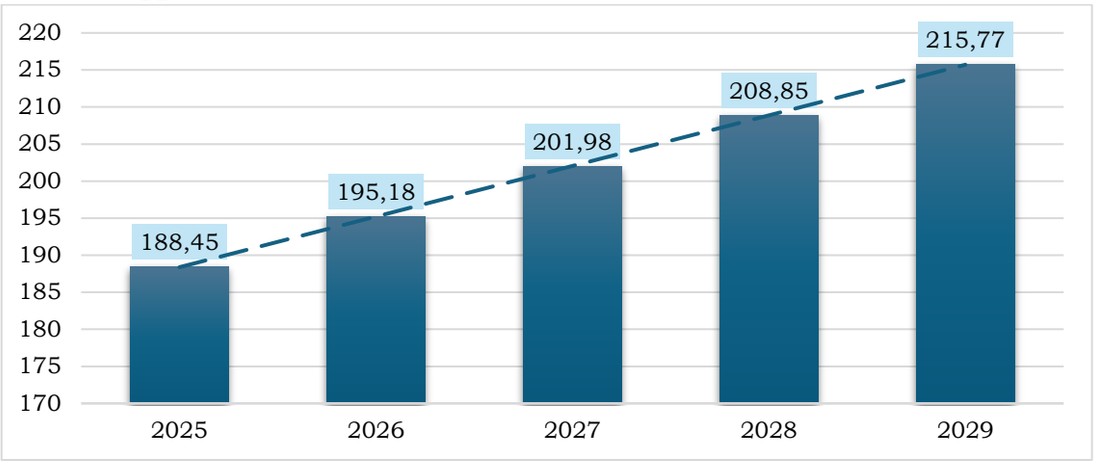
Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Proyeksi penduduk umur mengalami tren yang meningkat hingga tahun 2026 dan kemudian menurun hingga tahun 2029 menjadi 214,95 ribu jiwa meskipun terjadi peningkatan pada jumlah penduduk secara keseluruhan. Saat ini proporsi penduduk usia 0-14 tahun mewakili 19,38 persen dari total populasi pada tahun 2025. Namun, pada tahun 2029, diproyeksikan proporsi penduduk usia tersebut mengalami sedikit penurunan dari total populasi. Pada tahun 2029 memiliki proporsi dari total populasi yaitu sebesar 18,86 persen. Penduduk umur 15-64 tahun yang merupakan penduduk usia kerja diproyeksi mengalami penambahan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 777,54 ribu jiwa, meningkat menjadi 778,5 ribu jiwa pada tahun 2029. Saat ini proporsi penduduk usia 15-64 tahun mewakili lebih dari setengah populasi Kabupaten Tulungagung yaitu 69,44 persen. Tidak jauh berbeda, pada tahun 2029 proporsi umur 15-64 tahun memiliki proporsi dari total populasi yaitu sebesar 68,32 persen. Kondisi ini menandakan adanya bonus demografi yang juga bisa memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Penduduk umur 65 tahun ke atas merupakan penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Dari sisi proporsi terhadap total populasi, jumlah penduduk dengan usia tersebut paling kecil dibandingkan dengan penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 15-64 tahun. Meskipun demikian, proporsinya mengalami pertumbuhan dari 11,16 persen pada tahun 2025 menjadi 12,80 persen pada tahun 2029. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kabupaten Tulungagung ke depannya semakin baik. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan mereka.

3. Proyeksi Penduduk Lanjut Usia

Penduduk lanjut usia merupakan kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Proyeksi jumlah penduduk lanjut usia di Kabupaten Tulungagung dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan jumlah lansia sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang mungkin timbul akibat perubahan struktur demografi. Peningkatan populasi lansia ini umumnya disebabkan oleh membaiknya angka harapan hidup serta menurunnya angka kelahiran. Berikut ini disajikan proyeksi jumlah penduduk lanjut usia di Kabupaten Tulungagung untuk periode tahun 2025 hingga 2029.



Gambar 2. 22 Proyeksi Penduduk Lanjut Usai Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Proyeksi penduduk umur 60 tahun keatas pada tahun 2025 sebanyak 188,45 ribu jiwa dan mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 215,77 ribu jiwa pada tahun 2029. Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia yang signifikan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Di satu sisi, pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang layak serta sesuai dengan kebutuhan para lansia. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk mendorong pemberdayaan lansia agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan tetap berkontribusi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

4. Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif dengan penduduk usia produktif. Rasio ini diperoleh dari jumlah penduduk berusia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk berusia 15–64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk menggambarkan seberapa besar beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup kelompok usia belum dan tidak lagi produktif. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin besar pula beban ekonomi yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif, dan sebaliknya. Berikut proyeksi rasio ketergantungan Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 22 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029
Umur 0-14	217,08	216,54	215,97	215,42	214,95
Umur 15-64	777,54	778,62	779,14	779,1	778,5
Umur 65+	124,97	129,86	135,01	140,39	145,89
Dependency Ratio	**43,99**	**44,49**	**45,05**	**45,67**	**46,35**

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Proyeksi rasio ketergantungan Kabupaten Tulungagung tahun 2025 menunjukan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan sebesar 43,99 dan meningkat hingga mencapai 46,35 pada tahun 2029. Kenaikan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk non-produktif (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terus bertambah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Jumlah penduduk usia 0–14 tahun mengalami sedikit penurunan dari 217,08 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 214,95 ribu jiwa pada tahun 2029. Sementara itu, jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas meningkat cukup signifikan dari 124,97 ribu jiwa menjadi 145,89 ribu jiwa pada periode yang sama. Di sisi lain, jumlah penduduk usia produktif relatif stabil, dengan kisaran sekitar 777–779 ribu jiwa setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan penduduk lanjut usia menjadi faktor utama meningkatnya rasio ketergantungan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam memenuhi kebutuhan kelompok usia non-produktif. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu menyiapkan kebijakan yang adaptif, seperti penguatan jaminan sosial, peningkatan layanan kesehatan lansia, serta pemberdayaan ekonomi penduduk usia produktif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi daerah.

2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini akan mengulas dua aspek utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Aspek kesejahteraan ekonomi mencakup data ekonomi makro yang menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut, sementara aspek kesejahteraan sosial budaya berisi berbagai data makro yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial dan budaya.

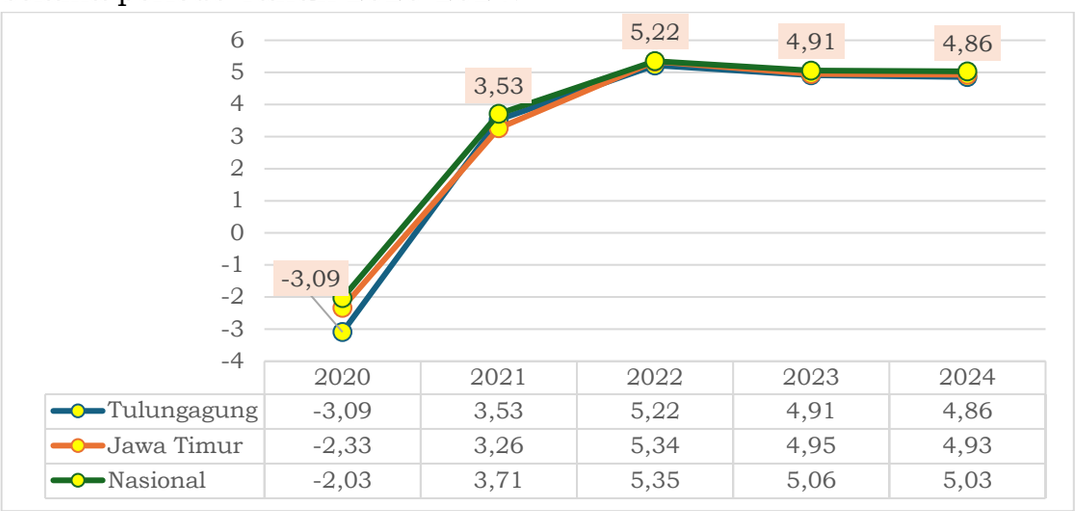
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dari aspek kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, maupun papan. Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten Tulungagung di antaranya dapat digambarkan melalui beberapa indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, dan Laju Inflasi. Berikut penjabaran

berbagai data tersebut yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Tulungagung.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan sebuah indikator makro pada rumpun perekonomian yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini juga dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Berikut adalah gambaran perbandingan LPE Kabupaten Tulungagung dengan Provinsi Jawa Timur selama periode Tahun 2020-2024.



	2020	2021	2022	2023	2024
Tulungagung	-3,09	3,53	5,22	4,91	4,86
Jawa Timur	-2,33	3,26	5,34	4,95	4,93
Nasional	-2,03	3,71	5,35	5,06	5,03

Gambar 2. 23 Grafik Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Berdasarkan tingkat harga, PDRB dibedakan menjadi 2, yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama periode 2020 hingga 2024 mengalami tren yang fluktuatif. Kabupaten Tulungagung sempat mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, yakni mencapai 5,22 persen, namun kembali melemah pada dua tahun berikutnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti melemahnya kemampuan daya beli masyarakat dan adanya perlambatan pada sektor indiustri pengolahan yang mana merupakan salah satu kontributor terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Tulungagung.

Dalam aspek lainnya, struktur ekonomi akan menjelaskan perihal sektor-sektor perekonomian daerah Kabupaten Tulungagung baik dari aspek distribusi maupun laju pertumbuhannya. Data mengenai struktur ekonomi bertujuan untuk melihat sektor-sektor potensial dan unggulan yang ada di Kabupaten Tulungagung melihat dari produktivitas ekonomi masing-masing sektor. Produktivitas masing-masing sektor ini dinilai dari angka Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan lapangan usaha yang sudah mengklasifikasi masing-masing sektor ke dalam suatu lapangan usaha tertentu. Berikut merupakan distribusi

perekonomian Kabupaten Tulungagung menurut lapangan usaha dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2. 23 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

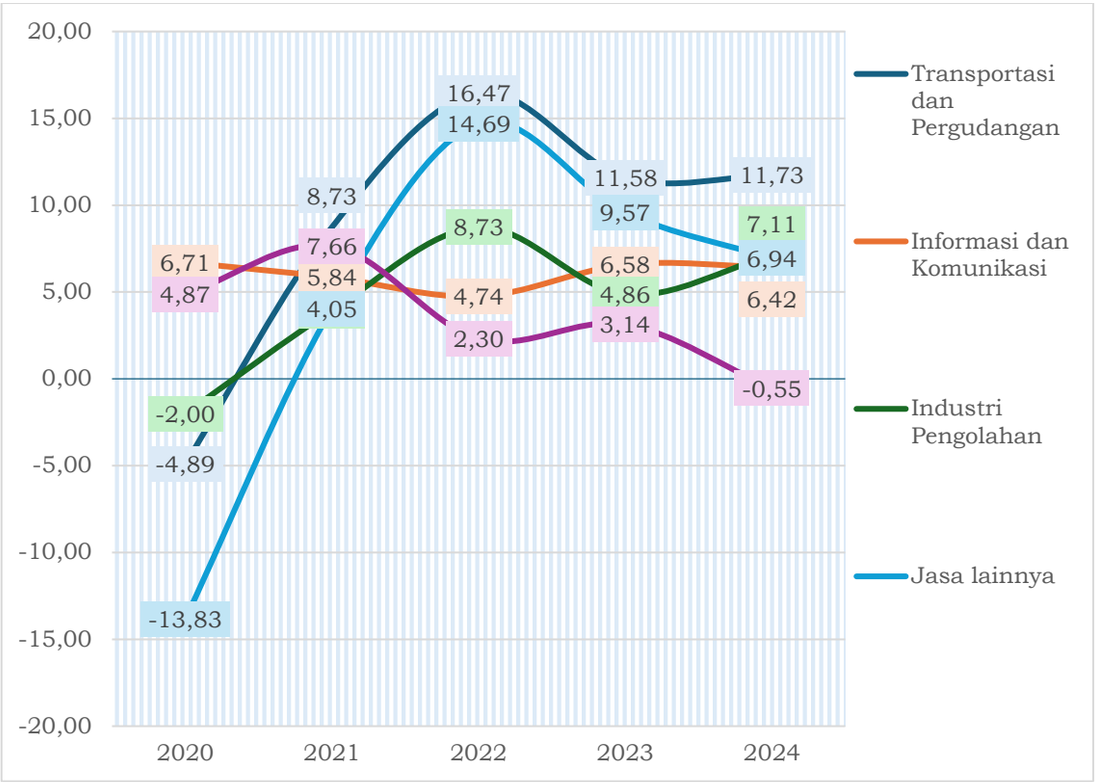
Uraian	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHB (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,51	19,26	18,62	18,47	17,44
Pertambangan dan Penggalian	3,5	3,42	3,37	3,36	3,28
Industri Pengolahan	22,33	22,81	23,44	23,44	24,16
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
Konstruksi	9,32	9,07	9,3	9,33	9,38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,74	20,26	20,72	20,86	20,84
Transportasi dan Pergudangan	2,24	2,32	2,6	2,9	3,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,96	1,99	2,08	2,13	2,18
Informasi dan Komunikasi	5,96	6,04	5,8	5,75	5,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,25	2,19	2,13	2,05
Real Estate	2,21	2,16	2,11	2,02	1,98
Jasa Perusahaan	0,37	0,36	0,35	0,36	0,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,5	3,29	3,06	2,9	3,06
Jasa Pendidikan	4,6	4,39	3,97	3,94	3,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19	1,11	1,04	1,02	1,03
Jasa lainnya	1,12	1,14	1,22	1,28	1,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2025

Distribusi PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tulungagung menunjukkan beberapa sektor yang memiliki rata-rata distribusi tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, di antaranya adalah: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan pertanian, kehutanan dan perikanan. Lapangan usaha industri pengolahan menjadi sektor dominan di Kabupaten Tulungagung dengan rata-rata distribusi sebesar 23,24 persen per tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi lapangan usaha terbesar kedua dengan rata-rata distribusi sebesar 20,48 persen yang disusul dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata distribusi sebesar 18,66 persen per tahunnya.

Tabel 2. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,82	1,51	-0,63	2,33	-1,95
Pertambangan dan Penggalian	-6,42	0,89	4,04	4,2	4,38
Industri Pengolahan	-2,00	3,94	8,73	4,86	7,11
Pengadaan Listrik dan Gas	0,2	1,9	7,43	4,42	2,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,87	7,66	2,3	3,14	-0,55
Konstruksi	-6,05	1,06	6,39	5,54	6,32
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,5	6,87	6,69	5,63	4,77
Transportasi dan Pergudangan	-4,89	8,73	16,47	11,58	11,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,31	2,23	9,56	8,61	6,32
Informasi dan Komunikasi	6,71	5,84	4,74	6,58	6,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,03	0,56	2,06	3,36	1,42
Real Estate	2,95	2,16	5,07	3,07	3,67
Jasa Perusahaan	-6,33	1,57	2,17	8,89	5,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,88	-0,77	0,42	0,01	8,39
Jasa Pendidikan	2,63	1,73	-2,19	5,12	6,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,14	-3,3	2,07	3,4	6,47
Jasa lainnya	-13,83	4,05	14,69	9,57	6,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**-3,09**	**3,53**	**5,22**	**4,91**	**4,86**



Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Dengan Rata-rata Pertumbuhan Tertinggi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

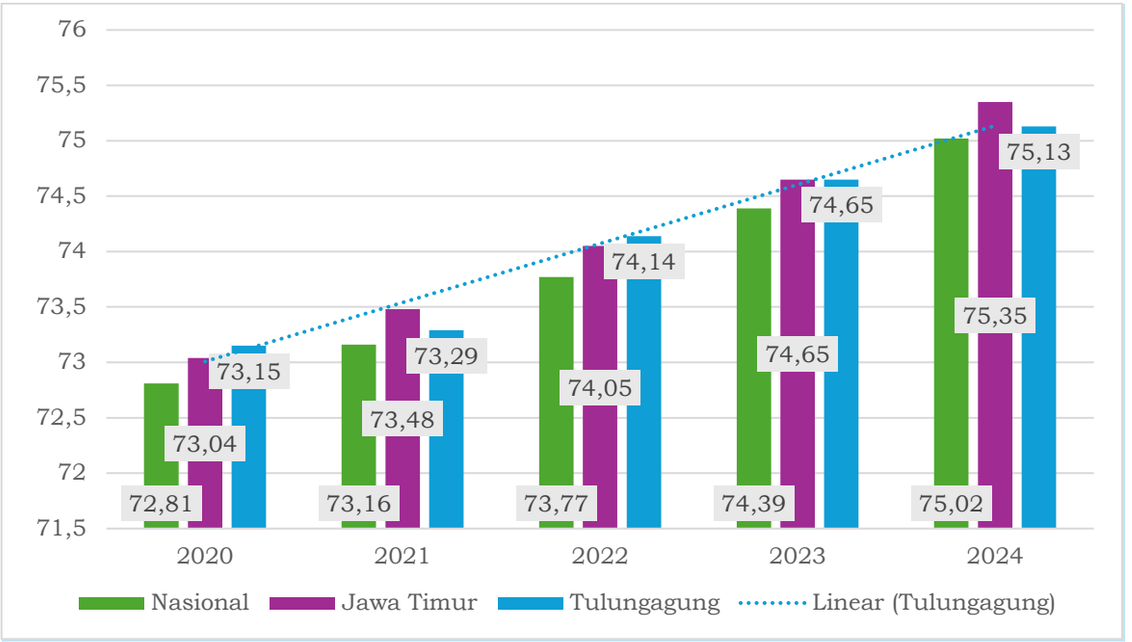
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2025

Dari aspek laju pertumbuhan masing-masing sektor, tercatat terdapat tiga sektor dengan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, di antaranya adalah: transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; industri pengolahan; jasa lainnya; dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 8,72 persen per tahunnya. Angka ini disusul oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,06 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 4,53 persen. Lapangan usaha jasa lainnya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,28 persen setiap tahunnya disusul dengan lapagan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,48 persen setiap tahunnya. Secara umum, dengan pertumbuhan yang cukup tinggi dan distribusi ekonomi terbesar, sektor industri pengolahan menjadi sektor yang dominan bagi perekonomian daerah Kabupaten Tulungagung.

2.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. IPM dihitung berdasarkan pada tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dikonversi menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran perkapita. AHH didasarkan pada umur panjang merupakan sesuatu yang dapat terwujud jika manusia mendapatkan nutrisi dan kesehatan yang baik. Sedangkan RLS dan HLS

merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal, serta pengeluaran perkapita mencerminkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah capaian IPM Kabupaten Tulungagung selama periode 2020-2024.

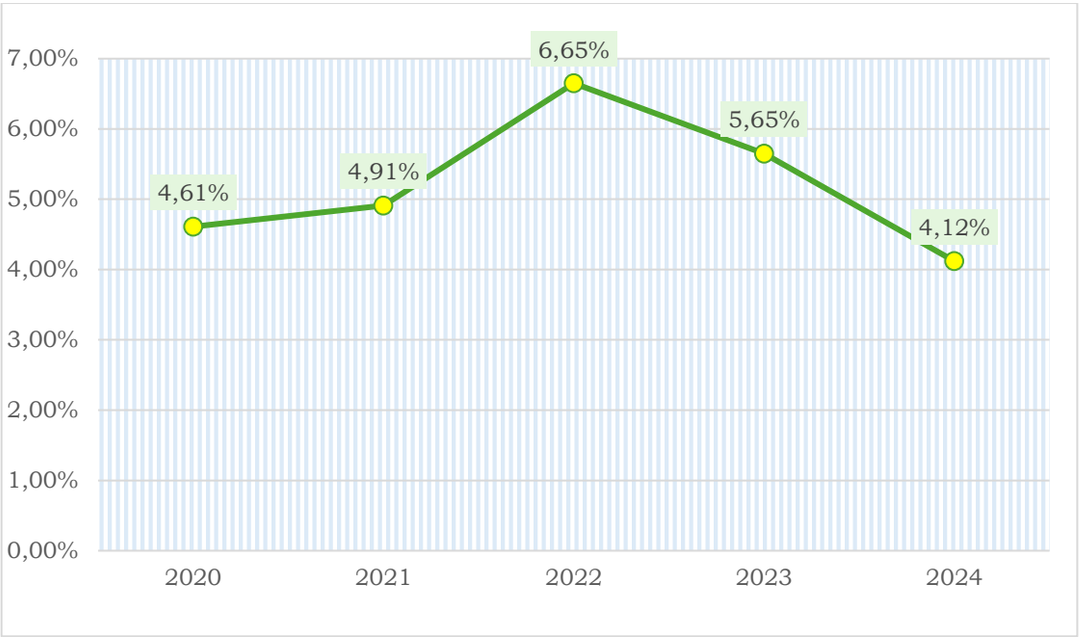


Gambar 2. 25 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung mengalami tren yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan sebesar 1,98 poin. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada aspek layanan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Tulungagung sudah berada di atas rata-rata IPM Nasional, walaupun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa timur. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan IPM, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dasar di Kabupaten Tulungagung masih perlu untuk terus dilakukan.

2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu faktor penting dalam rangka pembangunan daerah adalah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi lapangan kerja. Kondisi tenaga kerja di suatu wilayah dapat dilihat diantaranya melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Walaupun demikian, secara konseptual konseptual Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya dapat mengukur persentase individu yang aktif mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai, sehingga TPT tidak serta merta dapat memberikan gambaran lengkap tentang tingkat pengangguran di suatu daerah.

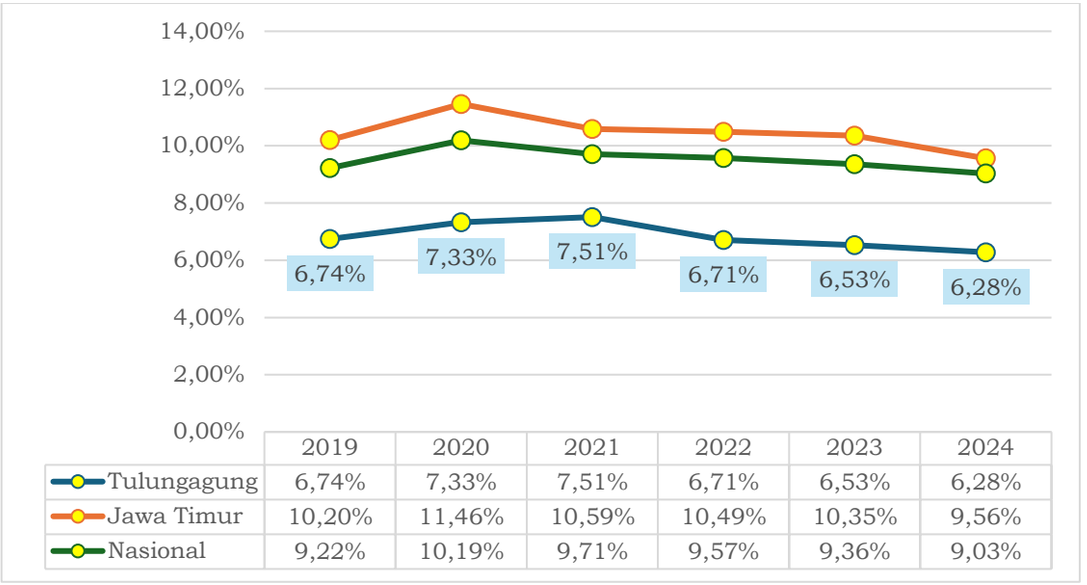


Gambar 2. 26 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tulungagung mengalami tren yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, TPT di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan sebesar 0,12 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kabupaten Tulungagung relatif mengalami perbaikan. Hal ini sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang semakin baik pasca adanya pandemi covid 19 beberapa tahun sebelumnya.

2.2.1.4 Angka Kemiskinan

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tulungagung	6,74%	7,33%	7,51%	6,71%	6,53%	6,28%
Jawa Timur	10,20%	11,46%	10,59%	10,49%	10,35%	9,56%
Nasional	9,22%	10,19%	9,71%	9,57%	9,36%	9,03%

Gambar 2. 27 Grafik Tingkat kemiskinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungaung mengalami tren yang cukup positif selama periode 2019 hingga 2020. Tren positif konsisten terjadi sejak 2021. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kemiskinan di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan sebesar 1,23 persen. Pada tahun 2024, Tingkat kemiskinan Kabupaten Tulungagung terpaut 3,51 persen lebih rendah dari tingkat kemiskinan di Jawa Timur dan 2,75 persen lebih rendah dari tingkat kemiskinan di level Nasional. Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung berada pada posisi 2 terendah di Provinsi Jawa Timur.

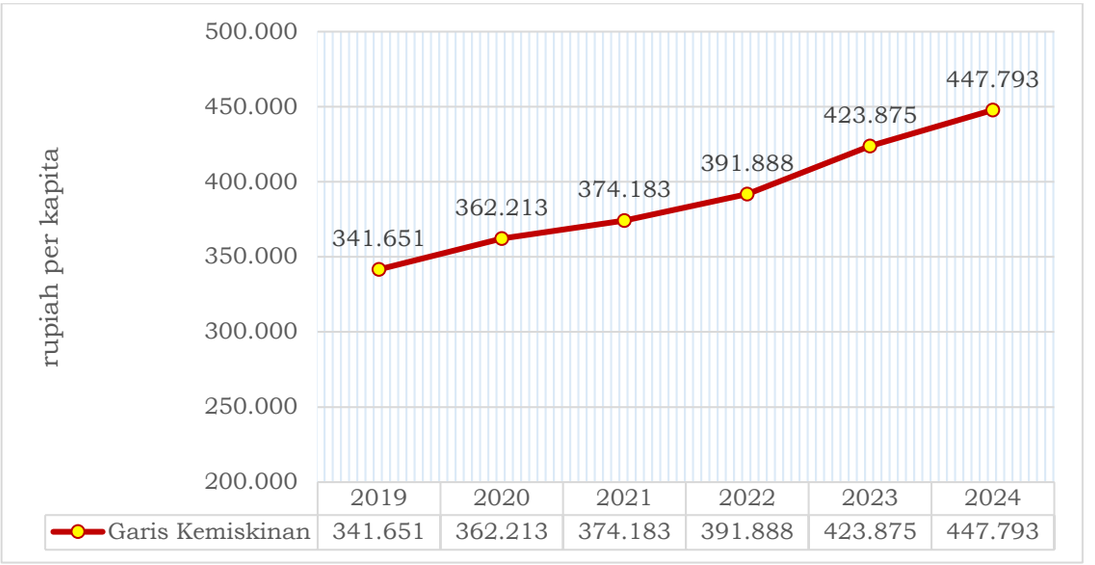
Secara umum, fenomena tingkat kemiskinan yang terus turun selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas dalam kebijakan arah pembangunan pemerintah. Fokus pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya pada persentase penduduk miskin saja. Informasi kemiskinan makro perlu diperkaya dengan beberapa indikator lainnya seperti garis kemiskinan, mengukur kedalaman dari kemiskinan (P1) dan seberapa bervariasi atau seberapa parah kesenjangan di antara penduduk miskin (P2)

Garis kemiskinan adalah batasan ambang bawah pendapatan atau konsumsi yang digunakan untuk mengidentifikasi individu atau keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan salah satu ukuran yang cukup penting di dalam penghitungan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Pengukuran garis kemiskinan berfungsi sebagai determinan atau penentu apakah seseorang dikatakan sebagai penduduk miskin atau tidak.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Tulungagung pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 423.875,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp.

49.692,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 13,28 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2021 yang sebesar 374.183,00.

Jika rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kabupaten Tulungagung adalah 3,38 orang (biasanya terdiri dari ayah, ibu dan 1 anak), maka garis kemiskinan rumah tangga di kisaran Rp 1.432.698,00. Jadi, rumah tangga tersebut dapat dikategorikan penduduk miskin apabila berpenghasilan di bawah Rp1.432.698,00. Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.



Gambar 2. 28 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Masalah kemiskinan sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, sehingga diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*/P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2. 25 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional

	Uraian	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tulungagung	0,84	0,72	0,94	0,66	0,94	0,60
2	Jawa Timur	1,80	1,82	1,84	1,62	1,63	1,48
3	Nasional	1,50	1,61	1,71	1,59	1,53	1,46

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2. 26 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional

No	Uraian	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tulungagung	0,17	0,11	0,18	0,09	0,17	0,10
2	Jawa Timur	0,45	0,43	0,43	0,38	0,37	0,31
3	Nasional	0,36	0,38	0,42	0,38	0,38	0,35

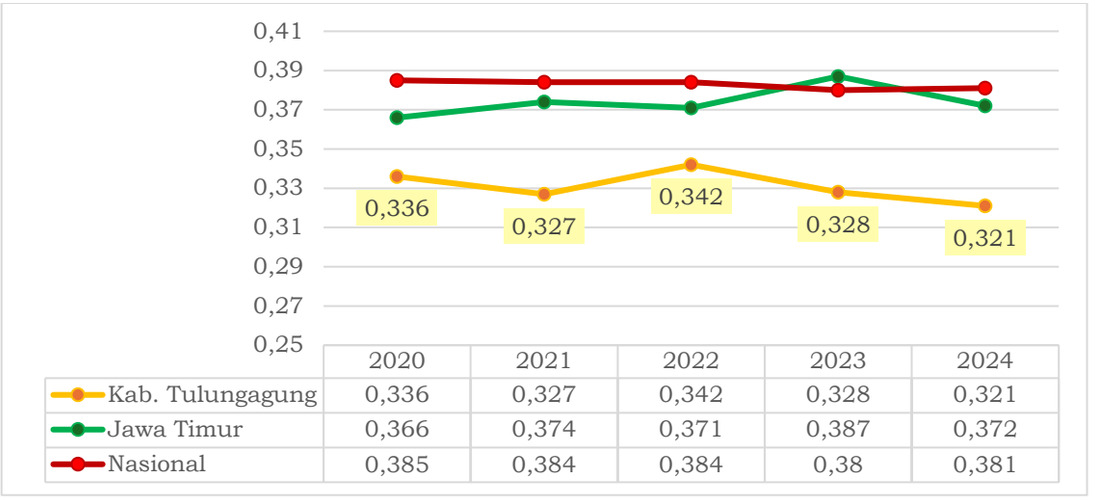
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada periode 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan sebesar 0.28 poin menjadi 0,94 pada tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0.34 poin menjadi 0,60. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Tulungagung semakin menjauhi Garis Kemiskinan.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin. Hal ini menunjukkan kondisi yang negatif yaitu perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Tulungagung cukup besar. Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,07 poin menjadi 0,10 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Tulungagung bertambah kecil.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Indeks Gini sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan dikuasai oleh satu individu atau kelompok. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga Indeks Gini agar mendekati 0 yang mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia pada periode 2019-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



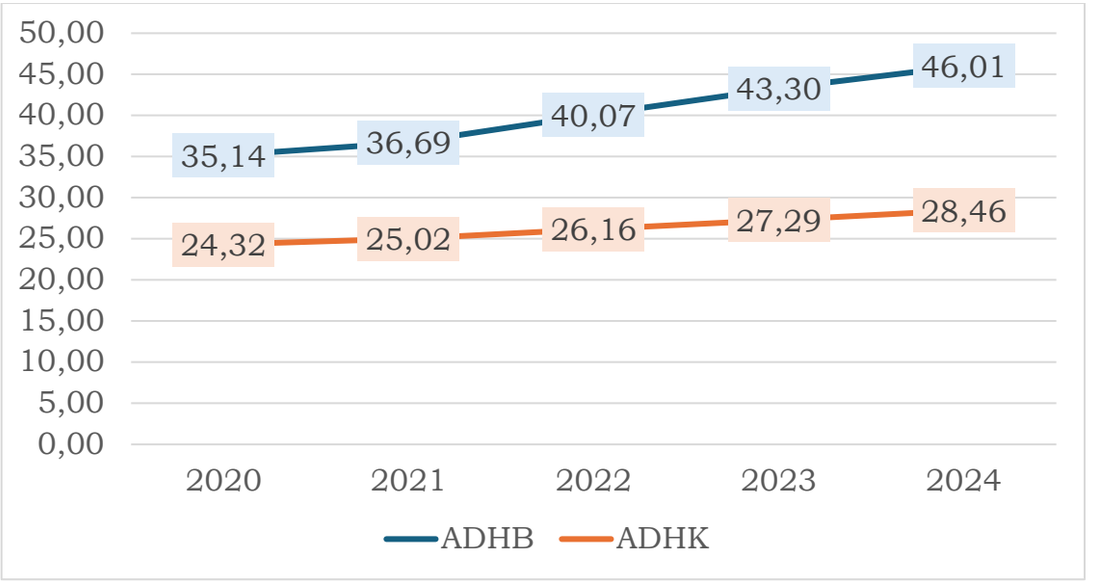
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Tulungagung	0,336	0,327	0,342	0,328	0,321
Jawa Timur	0,366	0,374	0,371	0,387	0,372
Nasional	0,385	0,384	0,384	0,38	0,381

Gambar 2. 29 Grafik Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020-2024 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung menunjukan tren yang fluktuatif. Indeks Gini tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,342 dan terendah pada tahun 2019 sebesar 0,304. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi, maka Indeks Gini Kabupaten Tulungagung selalu paling rendah. Pada tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Tulungagung berada pada angka 0,321, Provinsi Jawa Timur 0,372, dan Nasional 0,381. Meskipun memiliki capaian lebih rendah, upaya untuk mengurangi kesenjangan tetap perlu dilakukan.

2.2.1.6 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makro yang dihitung dengan membagi total pendapatan ekonomi suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Di tingkat daerah di Indonesia, pendapatan per kapita biasanya direpresentasikan melalui proksi PDRB per kapita, yaitu hasil pembagian antara nilai PDRB dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung berdasarkan data makro yang mencerminkan nilai tambah ekonomi daerah dalam periode tertentu, yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Adapun data mengenai PDRB per kapita Kabupaten Tulungagung untuk periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 30 PDRB Per Kapita Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Tulungagung, 2025

PDRB per kapita Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat baik dari aspek ADHB maupun ADHK. Secara umum, pertumbuhan PDRB per kapita menurut ADHB memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,87 juta rupiah dengan persentase peningkatan sebesar 30,93 persen, sedangkan PDRB per kapita menurut ADHK mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dengan pertumbuhan sebesar 4,14 juta rupiah dengan persentase pertumbuhan sebesar 17,02 persen. Hal ini merupakan kondisi atau keadaan yang cukup normal mengingat pertumbuhan angka ADHK sudah mengeluarhkan dampak dari inflasi dalam perhitungannya. Secara umum, data ini menunjukkan semakin produktifnya masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun terakhir yang mengindikasikan meningkatnya produktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan. Meskipun demikian, angka PDRB per kapita perlu dilihat dengan indikator-indikator yang menggambarkan distribusi ekonomi daerah.

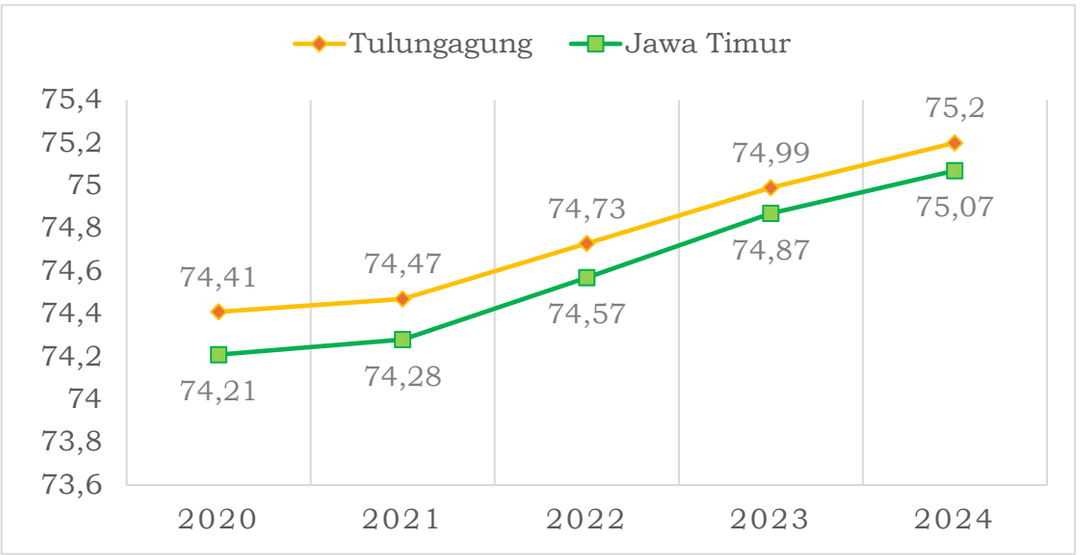
2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta peningkatan askes dan kualitas layanan kesehatan. Adapun hasil pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa capaian indikator seperti usia harapan hidup (UHH), prevalensi stunting, perkembangan penyakit menular dan tidak menular, dan sebagainya. Berikut capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Tulungagung.

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia harapan hidup (UHH) merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir pada tahun suatu tahun tertentu. UHH menjadi salah satu indikator pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi UHH mengindikasikan

semakin baik derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2. 31 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tulungagung menunjukan tren yang meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Tulungagung berjalan cukup baik, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian tersebut bahkan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Tulungagung 0,13 poin lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur dengan nilai masing-masing 75,20 dan 75,07. Artinya, bayi yang baru lahir di tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung memiliki kesempatan rata-rata usia hingga 75,20 tahun, sedangkan Provinsi Jawa Timur 75,07 tahun.

Meskipun capaian UHH di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, namun tingkat kenaikan UHH di Kabupaten Tulungagung masih lebih rendah. Selama lima tahun terakhir, UHH Provinsi Jawa Timur naik 0,86 poin dengan rata-rata kenaikan 0,29 persen. Sedangkan UHH Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan 0,79 poin dengan rata-rata kenaikan 0,26 persen. Selain itu, cakupan *universal health coverage (UHC)* Kabupaten Tulungagung tahun 2024 sebesar 82,20 persen, (Dinas Kesehatan Tulungagung, 2024). Dengan demikian, upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Tulungagung masih perlu ditingkatkan. Adapun strategi yang bisa dilakukan di antaranya penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, pengembangan SDM kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan gizi masyarakat, perbaikan lingkungan dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS).

2.2.2.2 Kesehatan Ibu dan Bayi

Pembangunan kesehatan dilakukan dengan pendekatan siklus hidup yakni mulai dari ibu hamil, ibu melahirkan, usia bayi, anak,

remaja, dewasa, hingga lansia. Salah satu indikator dalam melihat kulitas kesehatan ibu dan bayi yakni dengan melihat angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), cakupan komplikasi kebidanan, cakupan balita gizi buruk, dan sebagainya. Secara lebih rinci, berikut capaian kinerja pembangunan kualitas kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 27 Kesehatan Ibu dan Bayi Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
A.	**Kesehatan Anak**						
1	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	146	115	108	99	79
2	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	10,20	8,4	8,22	7,1	6,34
3	Balita Gizi Buruk	kasus	54	38	59	24	43
4	Cakupan kunjungan bayi	%	87,06	93,45	95,6	98,6	87,05
5	Cakupan Balita Gizi buruk yang mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization*	%	91,51	78,6	90,04	86,7	84,1
B.	**Kesehatan Ibu**						
1	Jumlah kematian Ibu	Jiwa	15	57	16	9	17
2	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	104,75	417,5	106,85	64,52	136,43
3	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	89,5	83	82,8	82,7	80,79
4	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	%	91,76	92,1	89,3	93,1	79,94

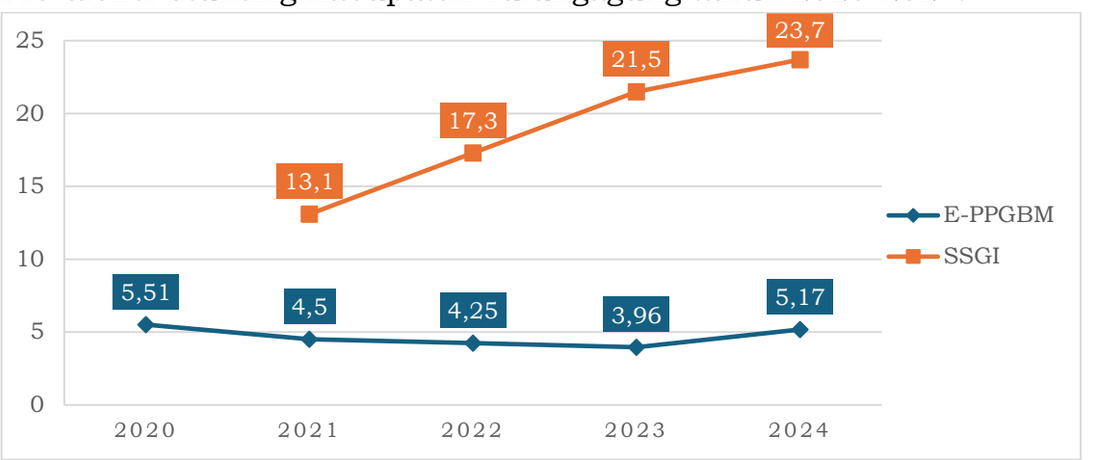
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Kualitas kesehatan bayi dapat dilihat dari capaian angka kematian bayi (AKB). Selama periode 2020-2024, AKB Kabupaten Tulungagung menunjukan tren yang menurun. Selama periode tersebut AKB turun 45,89 persen. Pada tahun 2024, jumlah kematian bayi di Kabupaten Tulungagung 79 jiwa dengan angka kematian bayi 6,34/1.000 Kelahiran Hidup. Meskipun AKB mengalami penurunan, indikator kesehatan bayi lainnya menunjukan tren yang fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian balita gizi buruk, cakupan kunjungan bayi, dan cakupan desa/kelurahan yang menyelenggarakan imunisasi dasar lengkap. Untuk itu, peningkatan kualitas kesehatan bayi perlu didukung dengan upaya yang terintegrasi mulai dari pencegahan penyakit melalui imuniasi dasar lengkap, pemenuhan gizi seimbang, hingga pemantauan tumbuh kembang bayi melalui kunjungan posyandu balita.

Kualitas kesehatan ibu dapat dilihat dari capaian angka kematian ibu (AKI). Selama periode 2020-2024, AKI Kabubupaten Tulungagung memiliki tren fluktuatif dan cenderung tinggi. Pada tahun 2024, jumlah kematian ibu di Kabupaten Tulungagung 17 jiwa dengan angka kematian ibu 136,43/100.000 Kelahiran Hidup. Jumlah tersebut perlu mendapat perhatian lebih pada pembangunan berikutnya. Dilihat dari cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani masih pada angka 80,79 persen dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 79,94 persen. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas kesehatan ibu melalui *safe motherhood* untuk memastikan kehamilan dan persalinan berlangsung aman, nyaman, dan melahirkan bayi yang sehat.

2.2.2.3 Prevalensi Stunting

Permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama disebut stunting. Sedangkan Prevalensi Stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah. Stunting merupakan isu yang menjadi prioritas nasional karena berdampak pada daya tahan tubuh dan tingkat kecerdasan anak di masa mendatang. Berikut capaian Prevalensi Stunting Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.



Gambar 2. 32 Prevalensi Stunting Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2025

Selama periode 2020-2024, prevalensi stunting Kabupaten Tulungagung berdasarkan data E-PPGBM dan data SSGI menunjukan perbedaan cukup signifikan. Menurut data E-PPGBM, capaian stunting Kabupaten Tulungagung cenderung rendah dengan rata-rata 4,7 persen. Sedangkan berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Tulungagung cukup tinggi dengan rata-rata 18,9 persen. Perbedaan hasil pengukuran antara kedua sumber data ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan metodologi, cakupan populasi, serta periode pelaksanaan survei. E-PPGBM umumnya menggunakan data berbasis pelayanan rutin di fasilitas kesehatan, sedangkan SSGI memperoleh hasil melalui survei populasi yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun data E-PPGBM menunjukkan angka yang lebih rendah, hasil SSGI cenderung lebih representatif terhadap kondisi riil stunting di masyarakat.

Berdasarkan tren data SSGI, capaian stunting Tulungagung secara konsisten menunjukan peningkatan setiap tahun. Prevalensi

stunting pada tahun 2020 tercatat 13,1 persen, kemudian meningkat menjadi 17,3 persen pada 2021, 21,5 persen pada 2022, hingga mencapai 23,7 persen pada 2024. Tren yang meningkat menunjukkan bahwa penanganan penurunan stunting belum berjalan optimal. Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga Tulungagung, stunting di Kabupaten Tulungagung terjadi pada keluarga mampu maunpun kurang mampu. Hal tersebut karena pola asuh utamanya dalam pemenuhan gizi yang belum optimal. Selain itu, berdasarkan hasil rembuk stunting Tulungagung, kunjungan balita ke posyandu untuk dilakukan pengukuran dan penimbangan masih belum optimal. Untuk itu, upaya percepatan penurunan masih perlu ditingkatkan melalui intervensi spesifik dan intevensi sensitif. Intervensi spesifik berkaitan langsung dengan aspek kesehatan seperti perbaikan asupan gizi dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Sedangkan intervensi sensitif berkaitan dengan aspek lintas sektor di luar kesehatan seperti kualitas lingkungan, pemenuhan sanitasi layak, air bersih, pendidikan, dan kemiskinan.

2.2.2.4 Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pengendalian penyakit menular dan tidak menular merupakan upaya yang penting untuk memastikan kesehatan masyarakat. Berikut data terkait penyakit menular dan tidak menular Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 28 Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Jenis Penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
A.	**Penyakit Menular (ditemukan)**					
1	HIV dan AIDS	283	211	267	368	394
2	Kusta	10	11	18	29	37
3	TB	818	855	1.357	1.575	1.608
B.	**Penyakit Tidak Menular**					
1	Jantung	3.230	1.003	5.209	15.510	23.549
2	Diabetes	2.703	16.088	19.785	16.286	17.228
3	Hipertensi	1.547	14.596	183.477	300.349	279.369
4	Kanker	1.574	283	760	122	186

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Selama periode 2020-2024, penyakit menular seperti HIV/AIDS, Kusta, dan TB di Kabupaten Tulungagung mengalami tren yang meningkat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang lebih optimal. Pada tahun 2024, jumlah penyakit HIV/AIDS sebanyak 394, Kusta sebanyak 37, dan TB sebanyak 1.608. Sedangkan pada penyakit tidak menular memiliki tren fluktuatif, kecuali Penyakit Jantung. Penyakit Jantung mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebesar 23.549. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih melalui upaya pencegahan dan pengobatan yang lebih optimal. Selain itu, Penyakit Hipertensi juga perlu mendapatkan perhatian. Pada tahun 2024, jumlah penderita Hipertensi 279.369 orang. Penyakit tertinggi berikutnya yaitu Diabetes sebanyak 17.228 dan Kanker 186 orang.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan baik penyakit menular dan tidak menular perlu terus ditingkatkan. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaring penderita hipertensi melalui *home visit* dan inovasi PosBINI (Pos Pembinaan Terpadu Instansi) serta keterlibatan organisasi masyarakat Muslimat melalui inovasi Muslimat Bawa Koper Si P'truk (Muslimat Berbakti Dan Berdakwah Kontrol Hipertensi Mengatasi Penyakit Stroke). Selain itu upaya menurunkan Prevalensi Penyakit Hipertensi di masyarakat dilaksanakan dengan terus mendorong dan memperkuat Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat melalui pelaksanaan Posbindu PTM serta edukasi kepada masyarakat dalam upaya menurunkan risiko tekanan darah tinggi melalui pencegahan dan pengendalian faktor risikonya seperti merokok, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik dan obesitas.

2.2.2.5 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Berikut data fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 29 Jumlah fasilitas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Unsur Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	RSUD	1	2	2	2	2
2	Rumah Sakit TNI/Polisi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	7	7	7	7	7
4	Rumah Sakit Khusus Swasta	3	3	3	3	3
5	Puskesmas	32	32	32	32	32
6	Puskesmas Pembantu	66	66	66	66	65
7	Puskesmas Keliling	37	37	72	32	32
8	Posyandu Balita	1.239	1.239	1.242	1.242	1.241
9	Posyandu *Center of Excellence (CoE)*	0	0	0	32	32
10	Balai Pengobatan/Klinik	31	33	38	46	57
11	Polindes	167	167	31	31	40

Sumber: Dinas Kesehatan 2024

Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Tulungagung cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan dari segi kualitas layanan. Selama periode 2020-2024, jumlah rumah sakit dan puskesmas relatif sama. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan posyandu balita memiliki tren fluktuatif. Berbeda dengan jumlah klinik yang mengalami peningkatan dari 31 menjadi 57. Selain itu, pada tahun 2023-2024 Kabupaten Tulungagung memiliki posyandu *center of excellence* (CoE) yaitu posyandu yang menerapkan pelayanan kesehatan terpadu untuk semua siklus hidup mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Dari 11 fasilitas kesehatan, hanya fasilitas Polindes yang mengalami penurunan yakni dari 167 menjadi 40.

2.2.2.6 SDM Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, ketersediaan SDM kesehatan juga perlu mendapat perhatian agar pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai prosedur kesehatan. Berikut data jumlah SDM kesehatan di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 30 SDM Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	SDM Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter	366	277	451	460	514
2	Perawat	1.140	2.107	2.158	2.285	2.473
3	Bidan	794	999	1.027	1.040	1.227

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Selama periode 2020-2024, jumlah SDM kesehatan (Dokter, Perawat, Bidan) Kabupaten Tulungagung terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memperkuat ketersediaan jumlah tenaga medis. Meskipun demikian, jumlah, jenis, dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan masih terus ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.

2.2.2.7 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu wilayah. Di Kabupaten Tulungagung, IPKM menjadi salah satu acuan dalam melakukan evaluasi terhadap aspek kesehatan masyarakat, seperti status gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, akses terhadap layanan kesehatan, serta penanganan penyakit menular dan tidak menular. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, pemantauan terhadap IPKM sangat penting untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. Berikut adalah capaian IPKM di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 31 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

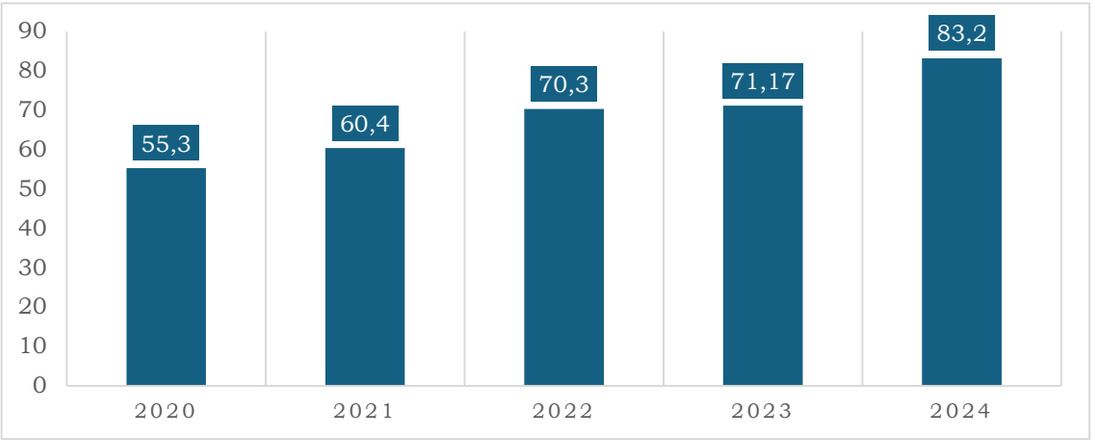
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
IPKM	Nilai	-	0,6289	0,6790	0,6840	0,6885

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2025

IPKM di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Capaian tersebut menjadi salah satu hasil dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat program-program kesehatan seperti peningkatan akses pelayanan, penyuluhan kesehatan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Capaian positif ini perlu untuk terus dijaga, guna mencapai target kesehatan nasional maupun tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

2.2.2.8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program asuransi kesehatan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan oleh seluruh penduduk. Berikut cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tulungagung.



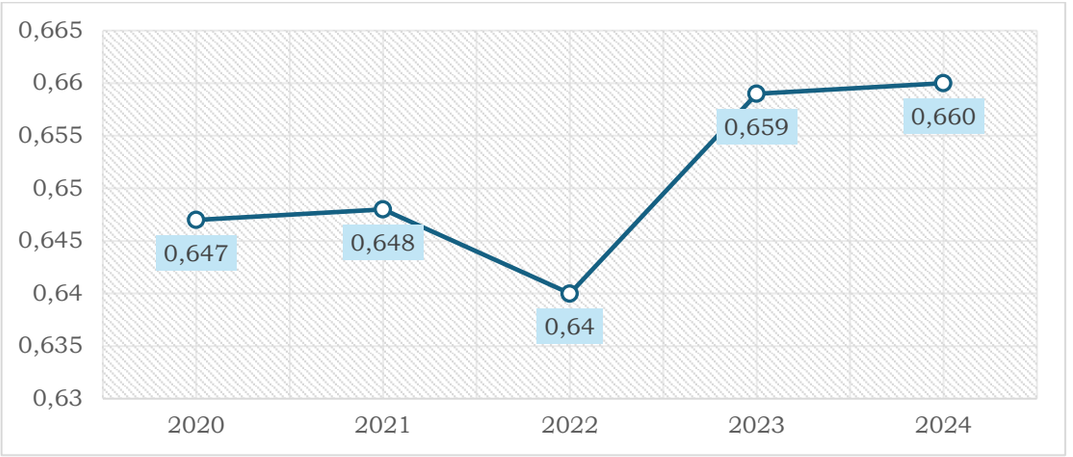
Gambar 2. 33 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Selama periode 2020-2024, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Kabupaten Tulungagung menunjukan tren meningkat. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2024 yakni lebih dari 10 persen. Selama periode tersebut cakupan JKN meningkat 27,9 persen dari 55,3 persen menjadi 83,2 persen. Kondisi tersebut menunjukan komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memperluas akses layanan kesehatan melalui JKN. Namun demikian, capaian tersebut belum memenuhi target target Universal Health Coverage (UHC) ≥95%. Dengan demikian, strategi untuk meningkatkan cakupan JKN masih perlu ditingkatkan.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Adapun hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa capaian indikator seperti indeks pendidikan, rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan sebagainya. Secara lebih detail berikut capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Tulungagung.

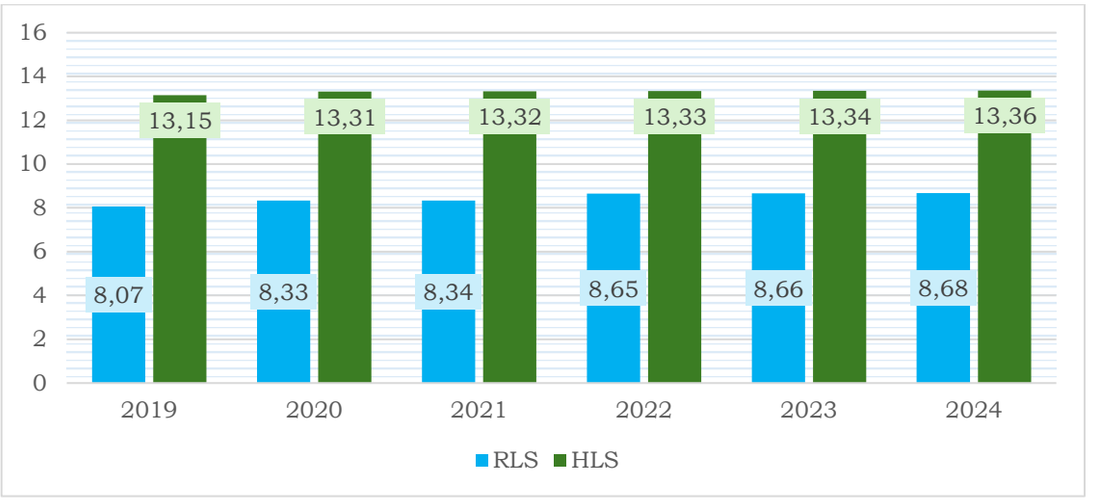
2.2.3.1 Indeks Pendidikan



Gambar 2. 34 Grafik Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Tulungagung 2020 - 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar di atas indeks pendidikan di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan mulai dari 0,647 menjadi 0,660 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan tren yang positif perkembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung. Selain indeks Pendidikan, terdapat beberapa indikator untuk mengukur kinerja urusan Pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

2.2.3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)



Gambar 2. 35 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019-2023
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, 2024

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tulungagung selama periode 2019 hingga 2024 mengalami tren yang meningkat. Capaian RLS Kabupaten Tulungagung meningkat dari 8,07 pada tahun 2019 menjadi 8,68 pada tahun 2024. Kondisi Ini menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal di Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya relatif moderat. Hal ini

mencerminkan keberhasilan program pemerintah dalam mendorong warga untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sementara itu, HLS juga mengalami tren yang meningkat dari 13,15 pada tahun 2019 menjadi 13,36 pada tahun 2024. Capaian HLS yang tinggi mencerminkan optimisme atau peluang yang dimiliki anak-anak di usia sekolah untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi di masa depan. Gap antara RLS dan HLS yang relatif konsisten menunjukkan adanya tantangan dalam mengonversi harapan menjadi kenyataan, terutama di jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Oleh karena itu, meskipun mengalami tren yang meningkat, upaya pemerintahuntuk meningkatkan partisipasi sekolah masih perlu untuk dilakukan, terutama dalam hal untuk menurunkan angka putus sekolah, memperbaiki distribusi tenaga pengajar, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna memastikan bahwa harapan terhadap pendidikan dapat tercapai secara nyata.

2.2.3.3 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

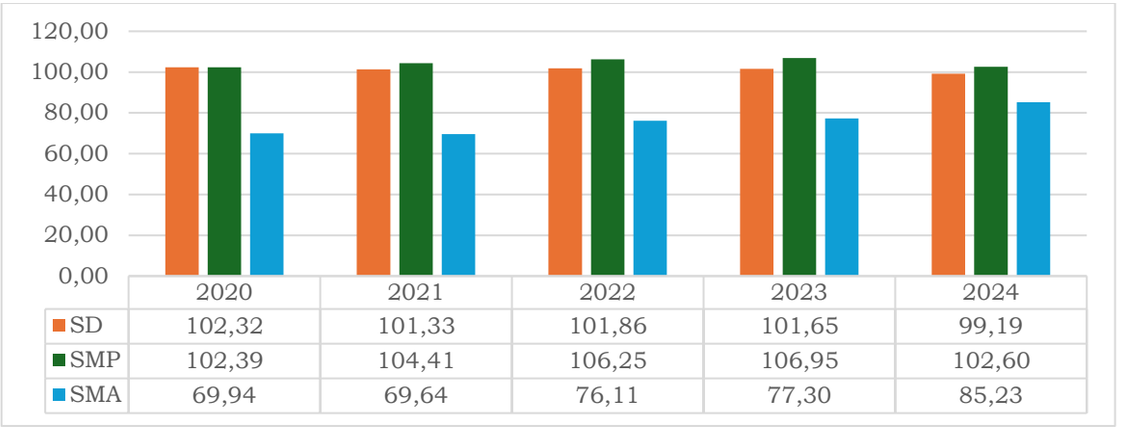
Secara umum, indikator kinerja urusan pendidikan menggambarkan berbagai capaian di bidang pendidikan mulai dari level mikro hingga makro. Secara lebih rinci capaian kinerja pendidikan Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 32 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	102,32	101,33	101,86	101,65	99,19
Angka Partisipasi Kasar SMP/Mts (%)	102,39	104,41	106,25	106,95	102,6
Angka Partisipasi Murni SD/MI (%)	97,43	97,16	99,79	99,36	99,19
Angka Partisipasi Murni SMP/Mts (%)	86,98	86,28	85,65	89,18	102,6
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	0,10	0,003	0,03	0,065	0,45
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B (%)	0,10	0,16	0,04	0,013	0,71
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah Atas (%)	69,94	69,64	76,11	77,3	85,23
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6,00	7,19	7,39	8,21	8,97

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, 2024

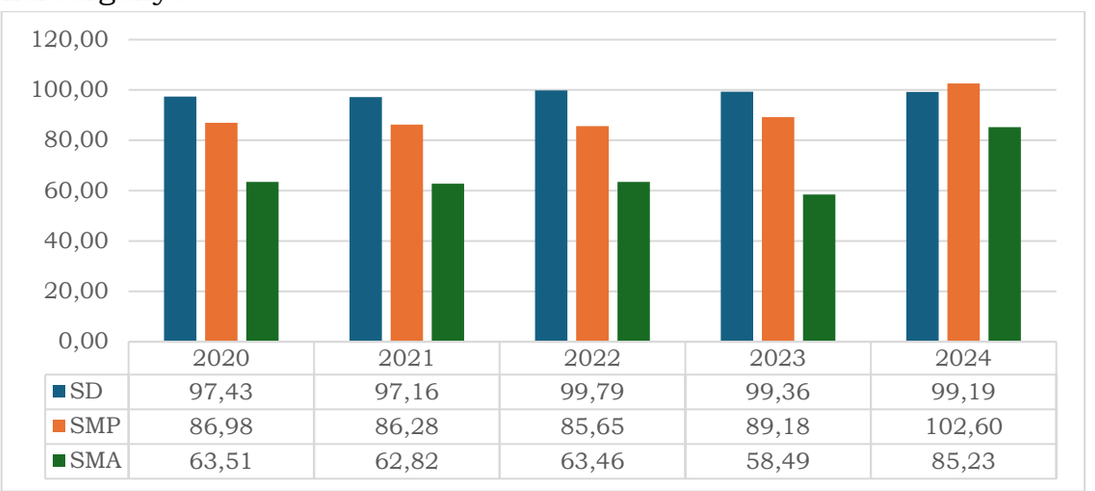
Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pedidikan adalah menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.



	2020	2021	2022	2023	2024
SD	102,32	101,33	101,86	101,65	99,19
SMP	102,39	104,41	106,25	106,95	102,60
SMA	69,94	69,64	76,11	77,30	85,23

Gambar 2. 36 Angka Partisipasi Kasar Kab. Tulungagung Tahun 2020 – 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa angka partisipasi kasar di Kabupaten Tulungagung semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat telah sadar akan pentingnya jenjang Pendidikan. Angka Partisipasi Kasar tertinggi ada pada jenjang SMP, di mana setiap tahunnya secara konsisten meningkat. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar terendah terdapat pada jenjang SMA. Meskipun APK untuk jenjang SMA rendah jika dibandingkan dengan SD dan SMA, namun setiap tahunnya secara konsisten meningkat. Faktor yang menyebabkan rendahnya APK untuk jenjang SMA yaitu tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga sebagian masyarakat memiliki bekerja atau merantau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.



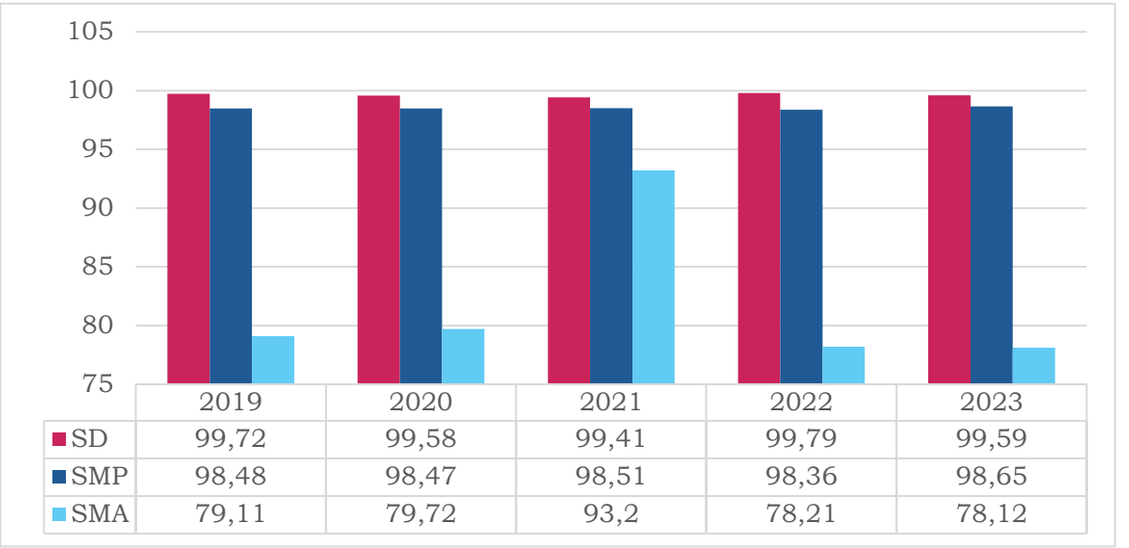
	2020	2021	2022	2023	2024
SD	97,43	97,16	99,79	99,36	99,19
SMP	86,98	86,28	85,65	89,18	102,60
SMA	63,51	62,82	63,46	58,49	85,23

Gambar 2. 37 Angka Partisipasi Murni Kab. Tulungagung Tahun 2020 – 2024
Sumber : BPS, 2024

Untuk mengetahui indikator presentasi angka partisipasi sekolah dengan kelompok anak sekolah pada waktu yang sesuai atau tepat waktu digunakan Angka Partisipasi Murni. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

APM untuk jenjang SD secara garis besar mengalami peningkatan dari 97,43 pada tahun 2020 menjadi 99,19 di tahun 2024. Sedangkan untuk APM jenjang SMP mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 86,98 menjadi 102,60 pada tahun 2024. Untuk APM jenjang SMA mengalami fluktuasi dari 63,51 di tahun 2020 menjadi 85,23 pada

tahun 2024. Beberapa faktor yang menyebabkan capaian Pendidikan ini antara lain (1) kemiskinan penduduk, (2) kapasitas fiskal pemda, (3) faktor geografi atau jarak sekolah yang jauh, (4) rasio jumlah anak terhadap ruang kelas, dan (5) tingkat pendidikan penduduk[3].



	2019	2020	2021	2022	2023
SD	99,72	99,58	99,41	99,79	99,59
SMP	98,48	98,47	98,51	98,36	98,65
SMA	79,11	79,72	93,2	78,21	78,12

Gambar 2. 38 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Tulungagung Tahun 2019 – 2023
Sumber : Dinas Pendidikan, 2024

Angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD mengalami penurunan dan kenaikan selama 5 tahun terakhir. Penurunan terjadi pada tahun 2019 sampai tahun 2021, yaitu dari 99,72 menjadi 99,42. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 yaitu 99,79 dan sedikit turun di tahun 2023 menjadi 99,58. Sedangkan untuk jenjang SMP secara umum mengalami peningkatan yaitu 98,48 pada tahun 2019 menjadi 98,65 pada tahun 2023. Untuk jenjang SMA, APS tertinggi terjadi pada tahun 2021yaitu sebesar 93,2. Kemudian turun menjadi 78,21 pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 78,12 pada tahun 2023.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Menurut Neagu (2014)[4] faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi penduduk dalam pendidikkan berkaian dengan faktor sosial ekonomi, budaya, individu, maupun sistem pendidikan dan pelatihan. Secara umum, faktor yang memengaruhi partisipasi sekolah penduduk yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Faktor pendorong (*push factor*) merupakan faktor yang berasal dari dalam siswa itu sendiri. Faktor pendorong biasa disebut faktor internal dimana siswa sendiri memutuskan untuk memilih meninggalkan pendidikan lebih awal atau menuntaskan pendidikannya. Sedangkan faktor penarik (*pull factor*)

[3] Balitbang Kemdiknas, 2011

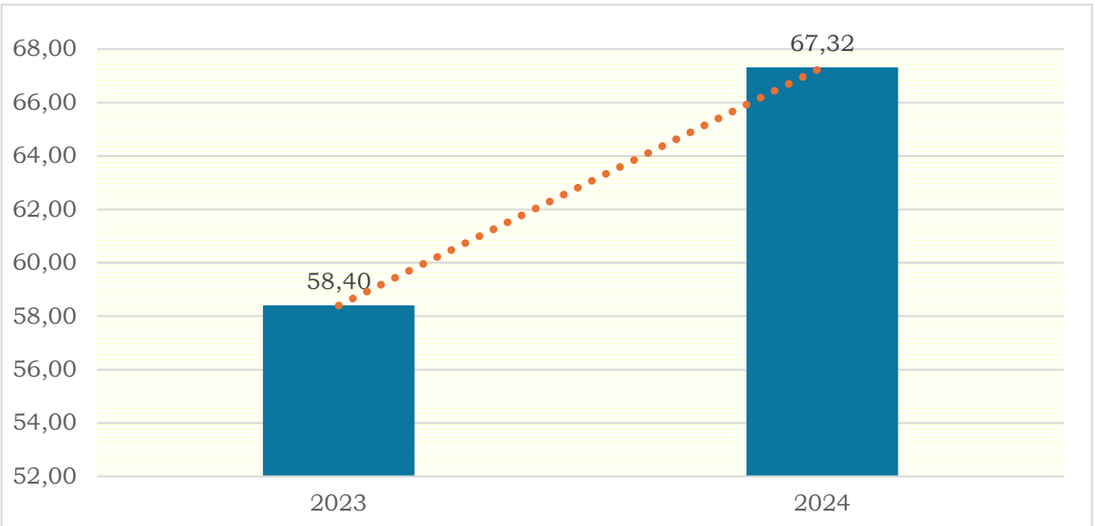
[4] Neagu, G. Determinants Factors of Adult Participation in Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014

merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar individu seperti keluarga, lingkungan, teman sebaya, organisasi Masyarakat

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh perpustakaan nasional guna mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi

masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut adalah capaian IPLM Kabupaten Tulungagung tahun 2023 dan 2024.



Gambar 2. 39 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2024
Sumber: Perpustakaan Nasional, 2025

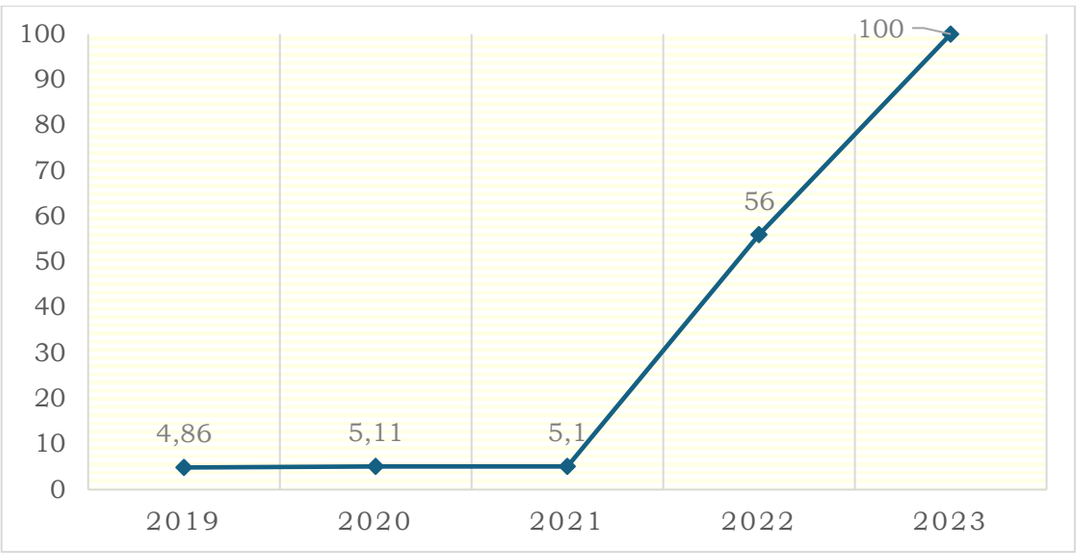
IPLM Kabupaten Tulungagung mengalami tren yang meningkat selama periode 2023 hingga 2024. Pada tahun 2023 IPLM Kabupaten Tulungagung berada pada angka 56,40 dan meningkat sebesar 8,92 poin pada tahun 2024. Kondisi ini menyebabkan capaian IPLM Kabupaten Tulungagung berada pada kategori sedang. Walaupun mengalami tren yang meningkat, upaya dan perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hal ini menjadi salah satu modal penting yang harus dipenuhi guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Tulungagung. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, di antaranya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan yang berkualitas disertai dengan koleksi buku dan tenaga pustakawan yang berkompeten.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan pendekatan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko sosial, ekonomi, dan bencana. Pendekatan ini mengintegrasikan sistem perlindungan sosial dengan strategi kesiapsiagaan dan respons terhadap perubahan, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, atau bencana alam, sehingga mampu melindungi kelompok rentan secara lebih efektif.

Perlindungan sosial adaptif juga proaktif dalam mengantisipasi berbagai macam risiko, sehingga tidak hanya memberikan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara reaktif. Hal ini mencakup fleksibilitas dalam penyesuaian kebijakan, pemanfaatan data yang akurat, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan. Perlindungan sosial yang adaptif berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian, mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi tersebut salah satunya dapat dilihat melalui capaian Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Data cakupan kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat melalui indikator persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Berikut merupakan capaian indikator persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 2. 40 Persentase Peningkatan Pekerja yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 hingga 2023. Upaya masif sejak 2022 berhasil meningkatkan partisipasi pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara signifikan di Kabupaten Tulungagung hingga mencapai seratus persen pada tahun 2023. Capaian ini masuk dalam kategori sangat baik bahkan lebih baik

daripada capaian Provinsi Jawa Timur yang baru mencapai 29,32 persen pada tahun 2023. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya intervensi kebijakan dan strategi yang tepat sasaran. Untuk menjaga keberlanjutan capaian ini, perlu ada strategi penguatan monitoring, edukasi berkelanjutan, serta pendekatan khusus kepada sektor informal. Hal-hal yang mungkin memengaruhi capaian indikator tersebut meliputi adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung, peningkatan informasi tentang manfaat dan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, adanya digitalisasi program, kerjasama multisektor, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial adaptif pasca pandemi. Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga perlu memperhatikan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial juga meliputi sektor informal.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan keseimbangan antara kehidupan beragama yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat serta perkembangan budaya yang tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal sekaligus menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Beragama maslahat merujuk pada praktik keagamaan yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Kehidupan beragama yang demikian mendorong sikap toleransi, kepedulian, dan keharmonisan antar individu serta kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, berkebudayaan maju menggambarkan budaya yang terus berkembang tanpa kehilangan identitas dan akar tradisinya. Kemajuan budaya mencakup inovasi dalam seni, pendidikan, teknologi, serta kehidupan sosial yang tetap menghargai warisan leluhur namun mampu beradaptasi dengan perubahan global. Sinergi antara nilai-nilai agama yang membawa maslahat dan budaya yang dinamis menciptakan masyarakat yang harmonis, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Kondisi ini dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Upaya keberlanjutan dibutuhkan untuk membangun, memelihara, dan menguatkan toleransi serta kerja sama antarumat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) hadir sebagai instrumen untuk mengukur tingkat harmoni antar pemeluk agama di suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya menggambarkan kondisi aktual kerukunan, tetapi juga memberikan pemetaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat kohesi sosial. Berikut merupakan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tulungagung.



Gambar 2. 41 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023

Sumber: Indeks Kerukunan Umat Beragama, Kemenag, 2024

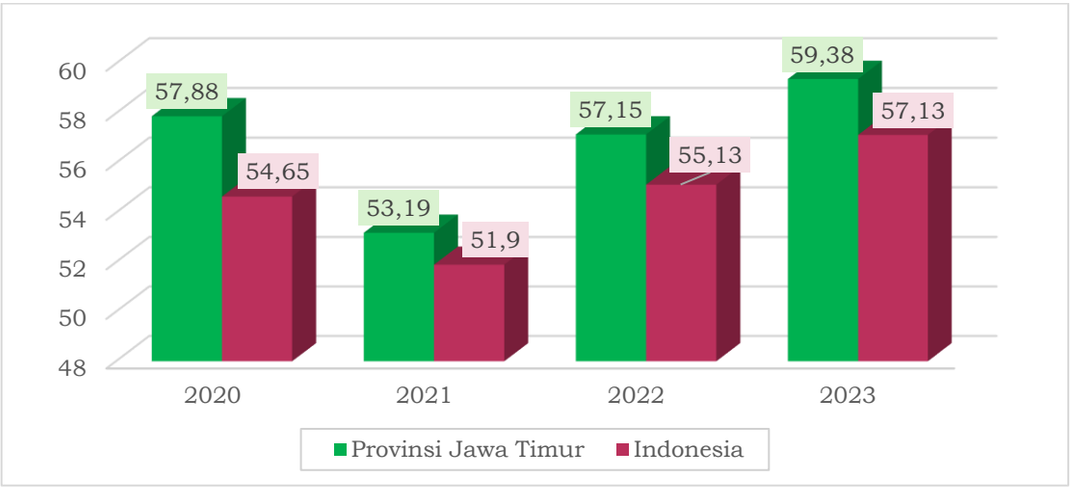
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) didasarkan pada tiga dimensi utama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi mengacu pada sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan. Kesetaraan menegaskan hak-hak yang sama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Sementara itu, kerja sama mencerminkan bagaimana komunitas lintas agama dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan.

Grafik IKUB di atas merupakan data paling baru yang dapat diakses karena data IKUB Provinsi belum rilis. IKUB di Kabupaten Tulungagung menggunakan proksi Provinsi Jawa Timur karena pengukuran IKUB hanya dilakukan sampai level provinsi. IKUB Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2021 hingga 2023, berbeda dengan nasional yang secara konsisten mengalami peningkatan. Fluktuasi yang terjadi tidak memengaruhi capaian Provinsi Jawa Timur yang tetap berada di atas capaian Nasional. Peningkatan IKUB dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kebijakan pemerintah, peran tokoh agama, program interaksi lintas agama, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap toleransi dan keberagaman. Meskipun begitu, penurunan capaian IKUB pada tahun 2023 sebesar 0,25 poin mengindikasikan adanya kemungkinan tantangan baru maupun dinamika sosial tertentu yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan fondasi utama dalam membangun identitas, karakter, dan daya saing suatu bangsa. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai warisan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan alat ukur yang dapat menggambarkan sejauh mana kebudayaan berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) hadir sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan secara komprehensif. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi kebudayaan

suatu negara atau daerah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. IPK mencakup beberapa dimensi utama, seperti ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekpresi budaya, budaya literasi, dan gender. IPK Kabupaten Tulungagung menggunakan data proksi dari Provinsi Jawa Timur karena pengukuran IPK hanya dilakukan hingga level provinsi.

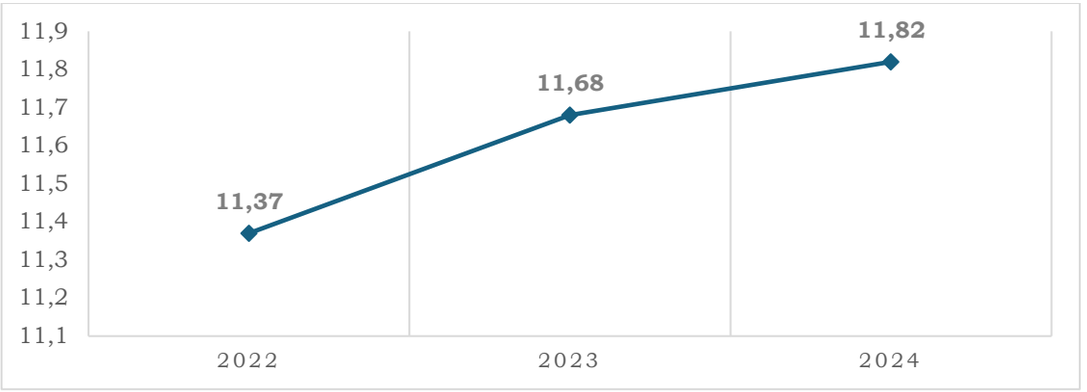


Gambar 2. 42 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023

Sumber: Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendikbud, 2024

Dinamika Indeks Pembangunan Kebudayaan di Jawa Timur dan nasional pada rentang tahun 2020 hingga 2023 secara umum mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Penurunan data IPK yang cukup signifikan baik di tingkat provinsi maupun nasional terjadi pada tahun 2021 sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas kebudayaan, seperti pagelaran seni, kegiatan komunitas budaya, dan pelestarian warisan budaya yang membutuhkan interaksi sosial. Sedangkan peningkatan capaian IPK yang terjadi pada tahun 2022 menandakan adanya upaya dan kebijakan dari pemerintah dalam menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal.

Fluktuasi data capaian IPK yang mengarah pada tren peningkatan di Provinsi Jawa Timur dapat dipengaruhi oleh banyak hal meliputi revitalisasi warisan budaya lokal, seperti seni tradisional, rumah adat, dan bahasa daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, dukungan kebijakan pemerintah daerah termasuk bantuan bagi pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi budaya lokal dan menarik generasi muda dalam pelestarian budaya. Selain itu, mengacu pada hasil evaluasi dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2025, peningkatan kebudayaan di Kabupaten Tulungagung dapat melalui pelestarian warisan budaya, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas kebudayaan serta penguatan tata kola kebudayaan.

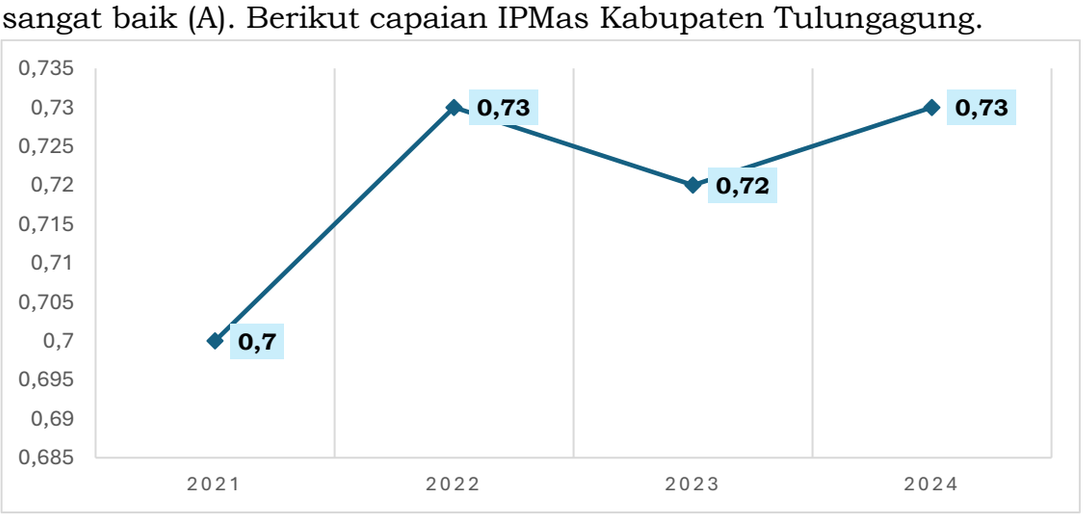


Gambar 2. 43 Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Lestari Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2023
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2025

Selama periode 2022-2024, persentase budaya benda dan tak benda yang lestari di Kabupaten Tulungagung menunjukkan peningkatan sebesar 0,45 persen. Meskipun meningkat, capaian tersebut masih tergolong rendah karena masih berada pada angka sebelas persen. Artinya, masih cukup banyak budaya benda maupun tak benda yang belum dilestarikan secara optimal. Budaya benda di Kabupaten Tulungagung diantaranya Candi Gayatri, Candi Dadi, bangunan bersejarah, dan sebagainya. Sedangkan budaya tak benda diantaranya kesenian jaranan pegon, tradisi upacara adat ulur-ulur, tradisi bersih desa, dan sebagainya.

2.2.5.3 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

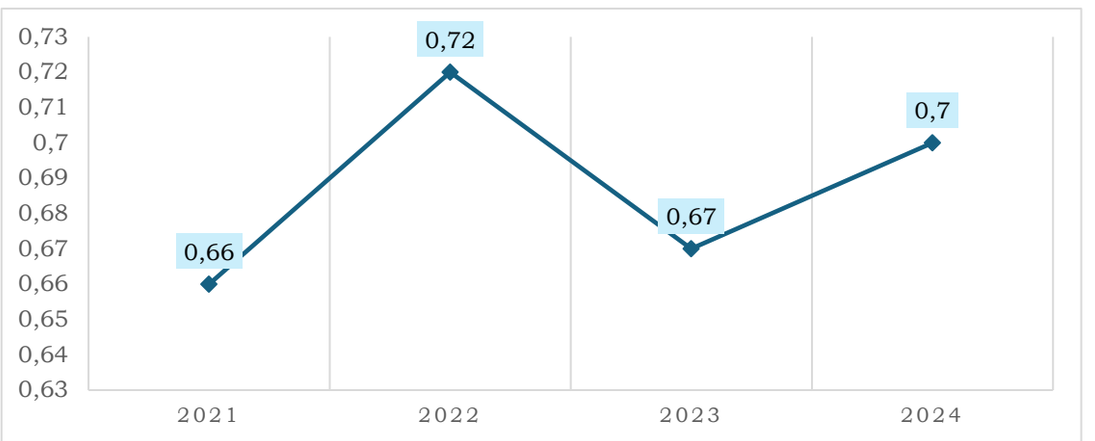
Indeks pembangunan masyarakat (IPMas) merupakan indikator yang menggambarkan progres pembangunan sosial pada suatu masyarakat. IPMas menunjukkan seberapa jauh kohesivitas, rasa saling percaya, gotong-royong, tolong-menolong, dan inklusi sosial dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, IPMas merupakan wujud keberhasilan dari program pembangunan SMD dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat pada suatu daerah. Nilai IPMas mulai dari 0 hingga 1 dengan kategori sebagai berikut: 0,25-0,43 kategori tidak baik (D), 0,44-0,61 kategori kurang baik (C), 0,62-0,81 kategori baik (B), dan 0,82-1 kategori sangat baik (A). Berikut capaian IPMas Kabupaten Tulungagung.



Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024
Sumber: Laporan IPMas 2024, Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Selama periode 2021-2024, capaian IPMas Kabupaten Tulungagung cukup fluktuatif. Capaian terendah pada tahun 2021 sebesar 0,7, kemudian naik pada tahun 2022 dan 2024 dengan nilai yang sama yakni 0,73. Meskipun fluktuatif, semua capaian tersebut masuk dalam kategori baik (0,62-0,81). Dengan demikian, meskipun sempat mengalami penurunan saat pandemi, kondisi tersebut berhasil pulih dengan mengembalikan kepercayaan, partisipasi sosial, dan rasa kebersamaan warga. IPMas mencerminkan "kesehatan sosial" masyarakat: semakin tinggi, semakin solid, harmonis, dan aman kehidupan bermasyarakat.

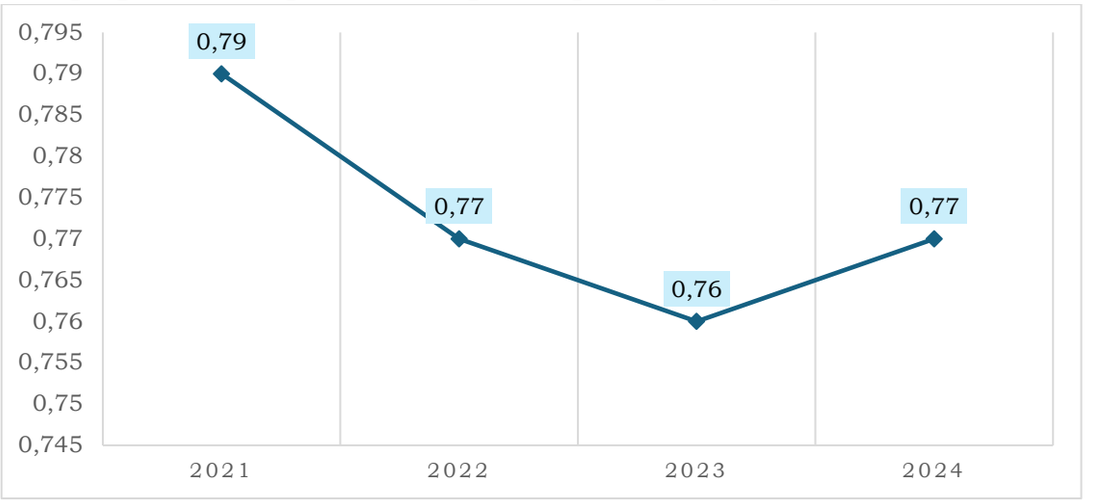
Pada tahun 2024, capaian tertinggi pada dimensi toleransi dengan (inklusi sosial) dengan skor 0,77, kemudian disusul dimensi rasa aman (Pengembangan kapasitas masyarakat sipil) sebesar 0,71 dan dimensi gotong-royong (kohesi sosial) sebesar 0,70. Dimensi toleransi diukur dari aspek penerimaan terhadap perbedaan sosial budaya, inklusi terhadap minoritas, kesetaraan gender, dan dukungan sosial terhadap minoritas. Dimensi rasa aman diukur dari aspek kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial, dan penyelesaian sengketa secara beradab. Sedangkan dimensi gotong royong diukut melalui aspek kerasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif, dan kepercayaan sosial. Untuk menjaga kualitas pembangunan masyarakat, maka aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan pada pembangunan periode berikutnya. Secara detail berikut capaian pada masing-masing dimensi pembentuk indeks pembangunan masyarakat (IPMas) Kabupaten Tulungagung.



Gambar 2. 45 Indeks Gotong Royong (Kohesi Sosial) dalam IPMas Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024
Sumber: Laporan IPMas 2024, Pemerintah Kabupaten Tulungagung

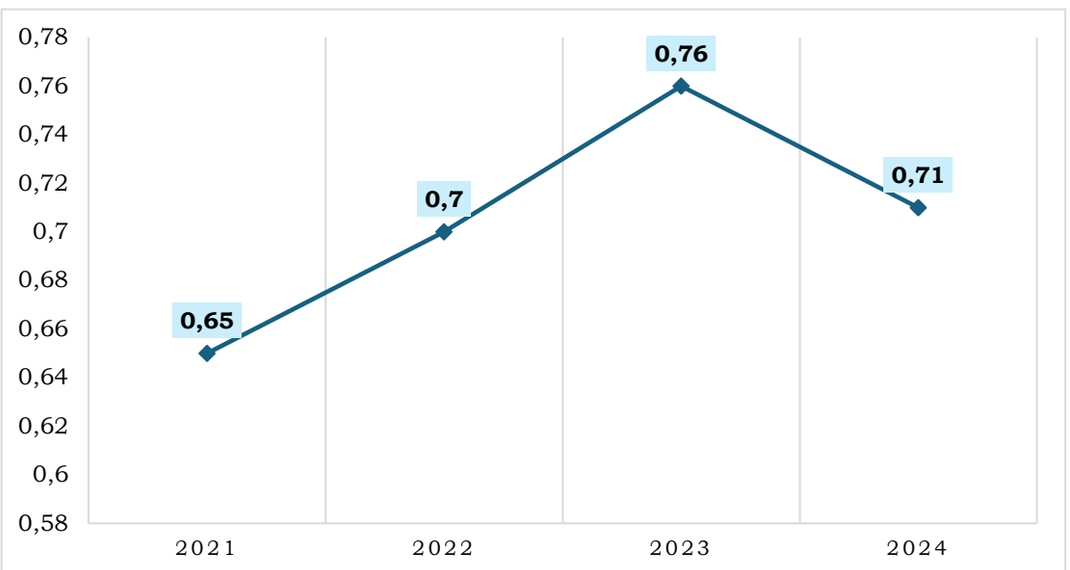
Selama periode 2021-2024, capaian indeks gotong royong Kabupaten Tulungagung cukup fluktuatif. Capaian terendah pada tahun 2021 sebesar 0,66 dan tertinggi tahun 2022 sebesar 0,72.Meskipun fluktuatif, capaian tersebut masuk dalam kategori baik baik (0,62-0,81). Pada tahun 2021, indeks gotong royong cenderung rendah karena adanya kebijakan PPKM yang membatasi interaksi antar masyarakat. Sedangkan pada tahun 2023 disebabkan belum semua kecamatan menggelar aktivitas gotong royong rutin seperti kerja bakti, perbaikan lingkungan, dan pertemuan RT/RW. Disisi lain meningkatnya mobilitas dan kesibukan masyarakat, minat partisipasi fisik dalam kegiatan

bersama menurun. Masyarakat lebih memilih menyumbang secara finansial daripada turun tangan langsung ke lapangan. Untuk itu, dibutuhkan dorongan dari tokoh masyarakat (RT, RW, kepala desa, tokoh agama/adat, pemuda, PKK) untuk proaktif mengajak dan mengorganisir warga dalam kegiatan gotong-royong.



Gambar 2. 46 Indeks Toleransi (Inklusi Sosial) dalam IPMas Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024
Sumber: Laporan IPMas 2024, Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Selama periode 2021-2023, capaian indeks toleransi Kabupaten Tulungagung menurun. Capaian tersebut kemudian naik pada tahun 2024 menjadi 0,77. Capaian tersebut masuk dalam kategori baik baik (0,62-0,81). Menurunnya indeks toleransi disebabkan masih minimnya program keberagaman yang diselenggarakan. Pada tahun 2024, terdapat peningkatan program keberagaman seperti kegiatan deklarasi dan dialog komunitas, dialog antar umat, dan kampanye keberagaman. Program-program tersebut kemudian berhasil menaikan indeks toleransi sebanyak 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 2. 47 Indeks Rasa Aman (Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil) dalam IPMas Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024
Sumber: Laporan IPMas 2024, Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Selama periode 2021-2023, capaian indeks rasa aman Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan. Capaian tersebut kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 sebanyak 0,71. Capaian

tersebut masuk dalam kategori baik (0,62-0,81). Meningkatnya indeks rasa aman didukung dengan tren menurunnya angka kriminalitas yang terjadi. Penurunan kasus kriminalitas menambah rasa aman bagi masyarakat. Sedangkan menurunnya indeks rasa aman disebabnya mulai meningkatnya kasus kriminal dan non kriminal, meningkatnya peredaran narkoba dan perjudian. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi persepsi terhadap rasa aman warg.

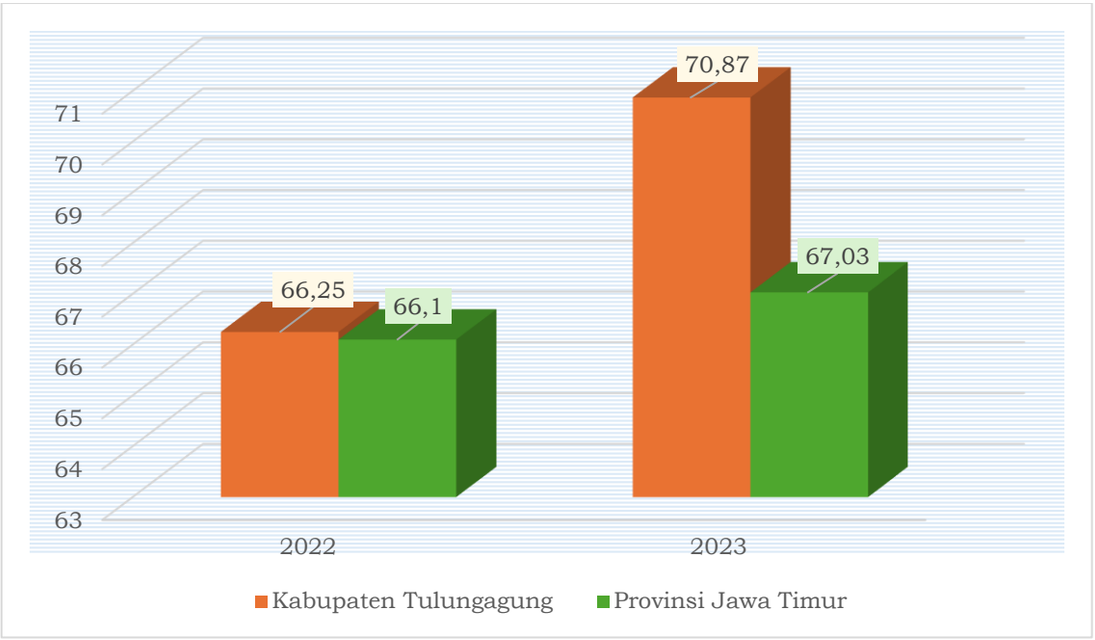
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Keluarga yang berkualitas berperan sebagai lingkungan pertama dalam membentuk individu yang tangguh, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang baik. Sementara itu, kesetaraan gender memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial. Pada sisi lain masyarakat inklusif mencerminkan lingkungan sosial yang terbuka dan menerima keberagaman sekaligus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Penguatan pada ketiga aspek ini akan membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing yang akan menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor.

Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, serta Indeks Pembangunan Pemuda, yang disesuaikan dengan konteks masing-masing daerah.

2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang optimal, serta menjamin hak-hak anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Perlindungan anak menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Dengan adanya sistem perlindungan yang kuat, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Berikut merupakan capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 hingga 2023.

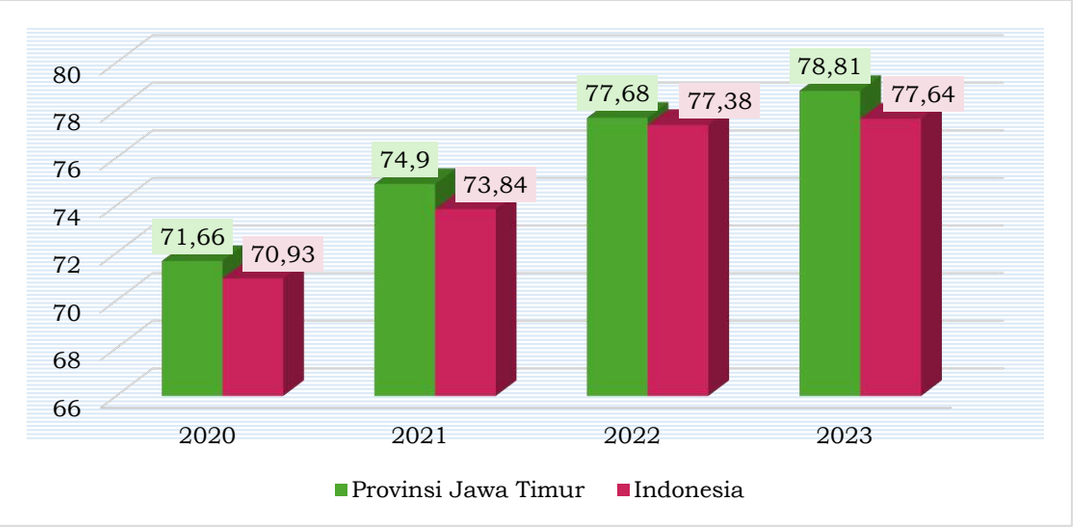


Gambar 2. 48 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 dan 2023
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Data yang ditampilkan di atas merupakan data paling baru yang dapat diakses karena data Indeks Perlindungan Anak kabupaten/kota belum rilis. Selama periode 2022 hingga 2023, capaian indeks perlindungan anak (IPA) Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan hingga 4,62 poin. Pada tahun 2022, capaian IPA Kabupaten Tulungagung hanya berada di kepala enam, kemudian berhasil menjadi kepala tujuh pada tahun berikutnya. Selain itu capaian Kabupaten Tulungagung juga berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Tulungagung 70,87, sedangkan Provinsi Jawa Timur 67.03. Dengan demikian, upaya perlindungan anak baik di Kabupaten Tulungagung maupun Provinsi Jawa Timur masih perlu ditingkatkan.

2.2.6.2 Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Kualitas keluarga yang baik berkontribusi pada terbentuknya individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter yang pada akhirnya menjadi motor penggerak pembangunan. Indeks Kualitas Keluarga mengukur dan memahami kondisi serta dinamika keluarga di suatu wilayah. Indeks Kualitas Keluarga mencakup dimensi keharmonisan, pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan ekonomi, serta pola asuh yang berkualitas. Berikut merupakan Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 dan 2023 sebagai data terbaru yang dapat diakses saat ini.



Gambar 2. 49 Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

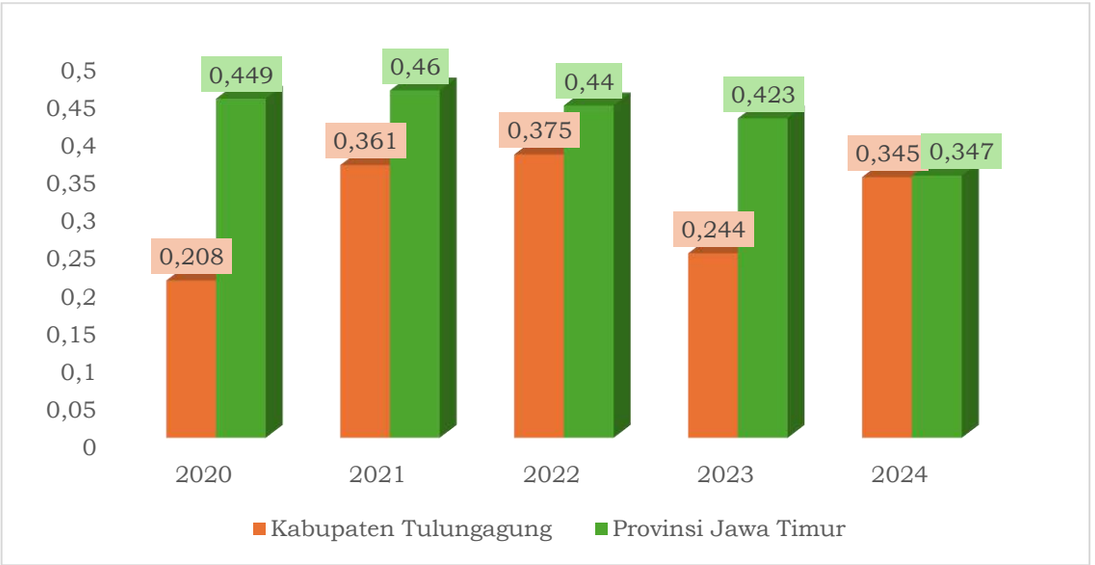
Perhitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dilakukan oleh BPS bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2020 hingga 2023 meliputi berbagai macam dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Namun, perhitungan IKK baru sampai pada level provinsi. Oleh karena itu, capaian rata-rata kualitas keluarga Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu proksi yang digunakan untuk melihat gambaran kualitas keluarga di Kabupaten Tulungagung.

Capaian Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 hingga 2023 sudah berada di atas rata-rata nasional. Capaian Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 selisih 1,17 poin dengan rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata kualitas keluarga di Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam hal ini Kabupaten Tulungagung, sudah berada pada kondisi yang relatif baik. Namun demikian, arus pembangunan dan perubahan sosial berlangsung cukup cepat, oleh karena itu, perlu dilakukan langkah antisipatif dalam rangka merespons perubahan tersebut. Salah satunya melalui unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu diintegrasikan dalam pembangunan. Pemerintah bisa fokus pada pemenuhan dimensi-dimensi yang ada dalam indeks kualitas keluarga secara terpadu, terintegrasi, dan holistik.

2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender masih menjadi tantangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk di Tulungagung. Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk mengukur sejauh mana kesenjangan gender terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perbedaan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Indeks ini mencakup berbagai dimensi utama, seperti partisipasi dalam dunia kerja, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta tingkat kesejahteraan ekonomi. Semakin rendah angka ketimpangan gender, semakin setara kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki

dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Berikut merupakan capaian Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024 sebagai data terbaru yang dapat diakses saat ini.



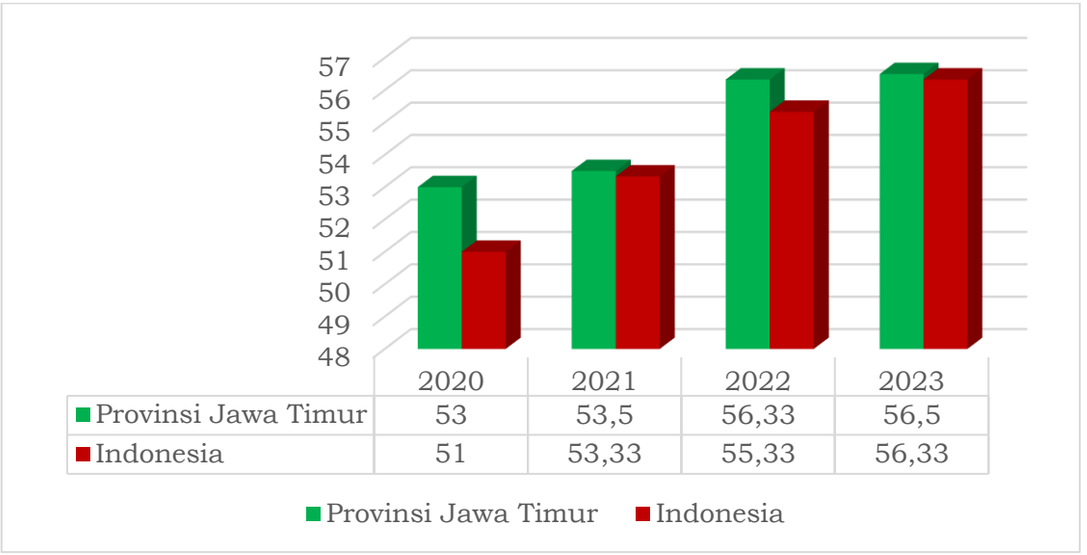
Gambar 2. 50 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Indonesia, 2025

Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa keduanya mengalami tren fluktuatif pada rentang tahun 2020 hingga 2024. IKG Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi pada periode tersebut, peningkatan sempat terjadi pada tahun 2021 dan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,167 poin dibandingkan dengan tahun 2022. Hal itu mengindikasikan adanya peningkatan kesenjangan gender. Capaian IKG pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung berhasil melakukan perbaikan terhadap kesetaraan gender, meskipun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024. Peningkatan IKG Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 dan 2022 dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti pandemi yang turut serta memengaruhi partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Peningkatan IKG pada tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan kualitas pada dimensi ketimpangan gender, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan pasar tenaga kerja. Peningkatan angka kematian ibu sebesar 64,29 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 turut serta dalam peningkatan ketimpangan gender melalui dimensi kesehatan reproduksi. Fluktuasi capaian IKG Kabupaten Tulungagung menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut, meskipun begitu selisih yang mengecil sebesar 0,002 poin pada tahun 2024 dibandingkan provinsi harus menjadi perhatian karena menunjukkan kinerja provinsi lebih konsisten dalam menurunkan ketimpangan gender. Hal-hal yang dapat mempengaruhi capaian IKG meliputi peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, perbaikan dalam akses kesehatan, peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik

dan pengambilan keputusan, dan adanya kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang pro-gender.

2.2.6.4 Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda merupakan agen perubahan dan aset penting dalam pembangunan suatu daerah. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) digunakan untuk mengukur sejauh mana pemuda memiliki akses dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tingkat kesejahteraan, partisipasi, dan kualitas hidup pemuda dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Pemuda mencakup berbagai dimensi utama, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Semakin tinggi skor IPP, semakin baik kondisi yang mendukung perkembangan dan pemberdayaan pemuda sebagai individu yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Berikut merupakan capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023.



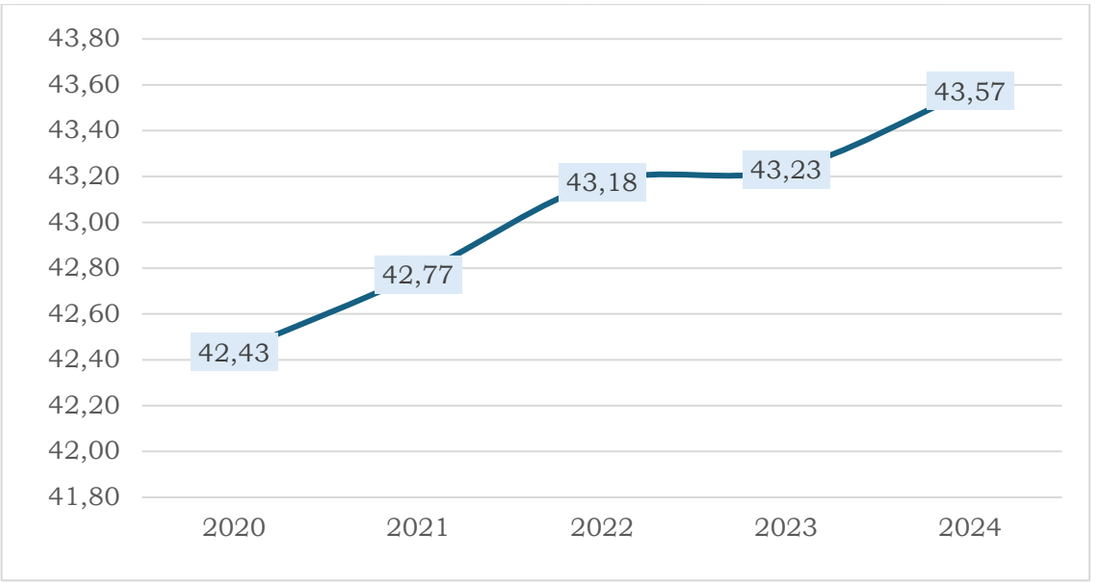
Gambar 2. 51 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023
Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2024

Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 berada pada angka 54,33. Secara tren kondisi ini dapat dilihat menggunakan proksi capaian Provinsi Jawa Timur. Grafik IPP di atas menunjukkan bahwa terdapat tren positif pada capaian provinsi maupun nasional pada tahun 2020 hingga 2023. Secara umum, capaian IPP Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan nasional. IPP Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2022. Hal itu dikarenakan adanya pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19 yang turut memengaruhi capaian dimensi penyusun IPP di daerah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi capaian IPP Provinsi Jawa Timur meliputi peningkatan akses pendidikan bagi pemuda, termasuk program beasiswa, pelatihan vokasi, dan digitalisasi pendidikan, adanya peluang ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih baik, partisipasi pemuda dalam politik dan organisasi sosial maupun kewirausahaan, serta adanya dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan pemuda.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang unggul merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan proses pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, suatu wilayah memiliki modal yang kuat untuk menjalankan proses-proses pembangunan yang akan dilakukan. Dalam bagian ini akan disampaikan kondisi daya saing sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tulungagung yang akan digambarkan melalui angka ketergantungan daerah. Angka ketergantungan bermanfaat untuk mengetahui komposisi penduduk produktif suatu daerah relatif terhadap jumlah penduduk non-produktif.



Gambar 2. 52 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Tulungagung, 2021-2025

Rasio ketergantungan Kabupaten Tulungagung menunjukkan adanya tren yang meningkat dalam beban tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk non-produktif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan tercatat sebesar 42,43 yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43 penduduk non-produktif. Angka ini semakin meningkat hingga pada tahun 2024 tercatat rasio ketergantungan sebesar 43,57. Peningkatan rasio ketergantungan ini mengindikasikan semakin besarnya jumlah penduduk usia non-produktif yang perlu ditanggung oleh masyarakat usia produktif. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat dalam usia produktif mampu menanggung jumlah penduduk usia non-produktif melalui berbagai upaya peningkatan sumber penghidupan yang layak untuk semua.

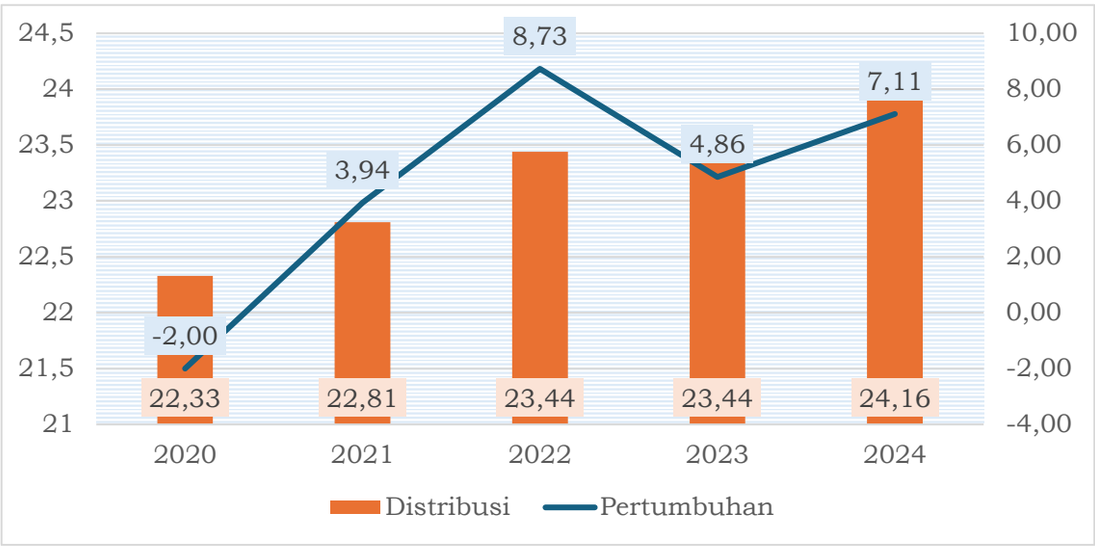
2.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh kemajuan teknologi serta ekosistem inovasi daerah yang kondusif. Perkembangan teknologi dan informasi di suatu wilayah dapat tercermin dari pertumbuhan sektor-sektor yang bergantung pada penerapan teknologi dalam operasionalnya, seperti sektor industri. Selain itu,

sektor ekonomi kreatif juga dapat menjadi indikator penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah, mengingat sektor ini sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi digital yang canggih. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi tersebut, antara lain rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB sektor akomodasi, makanan, dan minuman, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta indeks inovasi daerah di Kabupaten Tulungagung. Analisis terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana perkembangan teknologi dan inovasi telah berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan indikator ekonomi makro yang mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total produksi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan sektor industri menjadi salah satu faktor kunci dalam pembangunan ekonomi karena dapat menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Sektor industri berperan dalam meningkatkan nilai produk daerah dengan mengolah bahan mentah menjadi barang konsumsi akhir. Perhitungan Rasio PDRB Industri Pengolahan dilakukan dengan membandingkan nilai PDRB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu daerah. Berikut adalah data mengenai Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Tulungagung untuk periode 2020-2024.



Gambar 2. 53 Grafik Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Jawa Timur, 2025

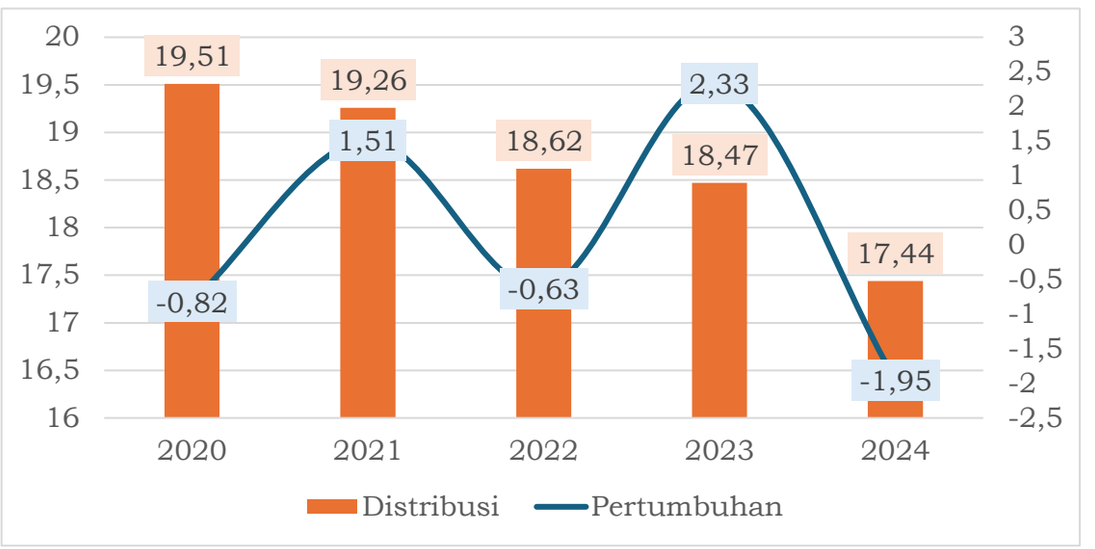
Data PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, distribusi PDRB Industri Pengolahan berada di angka 22,33 persen dengan tingkat pertumbuhan negatif sebesar -2,00 persen akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, sektor ini mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,94 persen dan distribusi meningkat menjadi 22,81 persen. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan yang signifikan sebesar 8,73 persen

menjadikan distribusi PDRB Industri Pengolahan mencapai 23,44 persen.

Meskipun pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan sedikit melambat menjadi 4,86 persen, distribusi tetap stabil di angka 23,44 persen. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan Kabupaten Tulungagung kembali mengalami akselerasi dengan pertumbuhan sebesar 7,11 persen dan distribusi mencapai 24,16 persen. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki peran yang semakin besar dalam perekonomian daerah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Tulungagung, perlu adanya dukungan kebijakan yang mendorong investasi, inovasi teknologi, serta peningkatan daya saing industri pengolahan di daerah.

2.3.2.2 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sebagai daerah yang didominasi wilayah rural dan pedesaan, salah satu sektor yang penting di Kabupaten Tulungagung dalam menentukan kesejahteraan masyarakat adalah sektor pertanian. Meskipun memiliki kontribusi ekonomi yang tidak sesignifikan sektor industri, sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat Kabupaten Tulungagung. Oleh karenanya, pemerintah perlu mendorong sektor pertanian yang kompetitif dan stabil untuk memastikan masyarakat dengan bermata pencaharian pertanian dapat meningkat kesejahteraannya. Berikut merupakan pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Tulungagung untuk menggambarkan perkembangan sektor pertanian daerah secara umum:



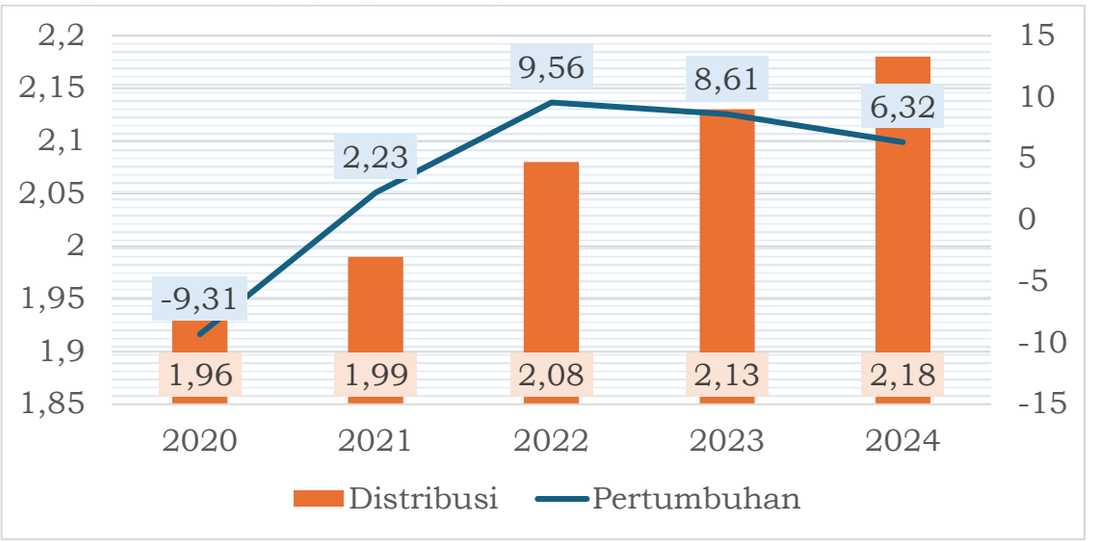
Gambar 2. 54 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2025

Secara umum pertumbuhan sektor pertanian yang digambarkan melalui PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki tren yang cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2024 sendiri tercatat pertumbuhan sektor ini mengalami pertumbuhan yang minus, dalam artian bahwa sektor ini pada tahun sebelumnya memiliki

produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan produktivitas pertanian daerah yang masih volatil, yang menggambarkan produksi setiap tahunnya tidak menentu dan stabil. Pemerintah perlu mendorong produksi pertanian melalui berbagai intervensi dalam penyediaan sarpras pertanian yang memadai, peningkatan kapasitas petani, dan pengawasan penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukannya dalam rangka menahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2.3.2.3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB sektor akomodasi, makanan, dan minuman merupakan salah satu komponen dalam perhitungan total PDRB suatu daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan nilai produksi dari lapangan usaha akomodasi, makanan, dan minuman terhadap total PDRB. Rasio PDRB dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam kaitannya dengan industri pariwisata dan jasa kuliner. Berikut adalah data PDRB lapangan usaha akomodasi, makanan, dan minuman di Kabupaten Tulungagung untuk periode 2020-2024.



Gambar 2. 55 Grafik Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Jawa Timur, 2025

PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tulungagung mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, lapangan usaha ini mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif sebesar -9,31 persen yang menyebabkan distribusi PDRB berada di angka 1,96 persen. Kondisi ini merupakan akibat dampak pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi industri pariwisata dan kuliner. Namun, pada tahun 2021 lapangan usaha ini mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 2,23 persen meningkatkan distribusi menjadi 1,99 persen. Pemulihan ini semakin kuat pada tahun 2022 dengan lonjakan pertumbuhan sebesar 9,56 persen membawa distribusi ke angka 2,08 persen.

Pada tahun 2023, pertumbuhan lapangan usaha ini masih cukup tinggi di angka 8,61 persen dengan distribusi mencapai 2,13 persen.

Namun, pada tahun 2024, meskipun distribusi meningkat menjadi 2,18 persen, laju pertumbuhan sedikit melambat ke angka 6,32 persen. Secara keseluruhan, lapangan usaha akomodasi makan minum menunjukkan pemulihan yang konsisten dan semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan strategi penguatan sektor pariwisata, pengembangan usaha kuliner lokal, serta kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat dan investasi di industri ini.

2.3.2.4 Usaha Mikro Daerah

Pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan menjadi salah satu aspek yang penting dalam menentukan daya saing daerah. Perekonomian kerakyatan daerah salah satunya dapat digambarkan melalui kondisi koperasi dan usaha mikro daerah. Keberadaan dua lembaga ekonomi ini menjadi penting dalam proses redistribusi ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif. Berikut merupakan beberapa data mengenai kondisi UKM daerah di Kabupaten Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 2. 33 Kondisi Koperasi dan UKM di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

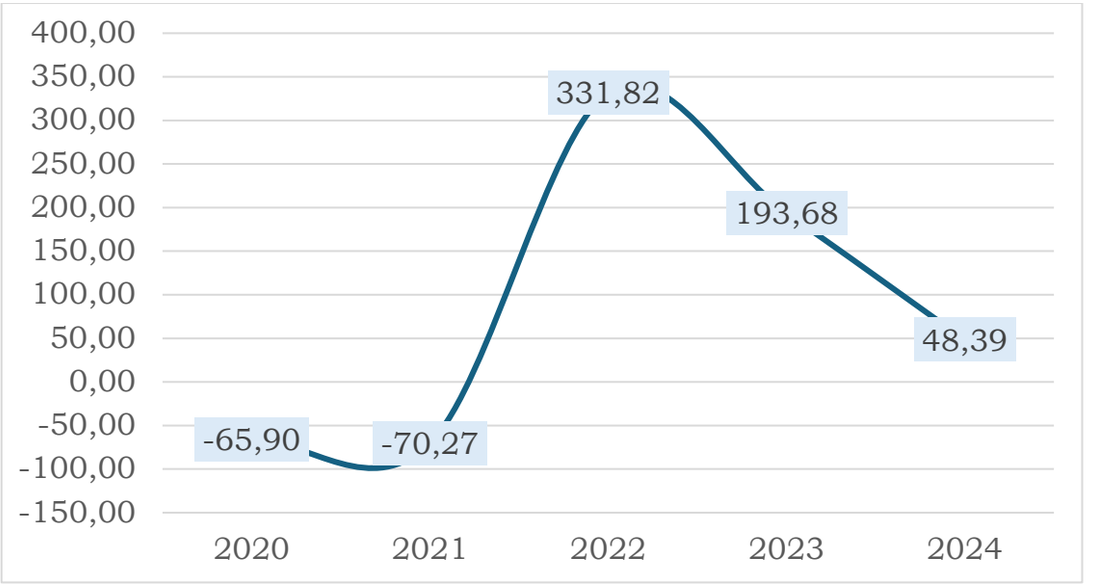
Data	2020	2021	2022	2023	2024
Volume usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	0,54	2,84	5,32	8,75	4,88
Pertumbuhan wirausaha	409,91	406,26	105,48	98,55	-48,06

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2025

Secara umum, volume usaha mikro daerah memiliki tren yang meningkat dengan pertumbuhan wirausaha daerah yang menurun. Volume usaha mikro yang bertransformasi meningkat sebesar 4,34 poin, sedangkan pertumbuhan wirausaha mengalami penurunan cukup signifikan dengan penurunan sebesar 457,97 poin. Hal ini dapat disebabkan oleh menurunnya jumlah usaha mikro daerah yang dibarengi dengan meningkatnya konsentrasi usaha di beberapa usaha mikro yang berhasil untuk meningkatkan skala usahanya. Beberapa indikasi penyebab yang dapat diidentifikasi adalah terkonsentrasinya usaha mikro, terbatasnya akses modal bagi pelaku UKM, belum luasnya pasar bagi produk-produk UKM, dan masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pemasaran daerah.

2.3.2.5 Pariwisata Daerah

Pariwisata daerah menjadi salah satu sektor yang menjadi potensi bagi daya saing ekonomi daerah secara umum. Keberadaan berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung menjadi potensi yang besar bagi perekonomian daerah secara umum. Salah satu ukuran dalam melihat aspek daya saing sektor pariwisata daerah adalah dengan melihat pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara di daerah. Berikut merupakan persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara di Kabupaten Tulungagung selama lima tahun terakhir:

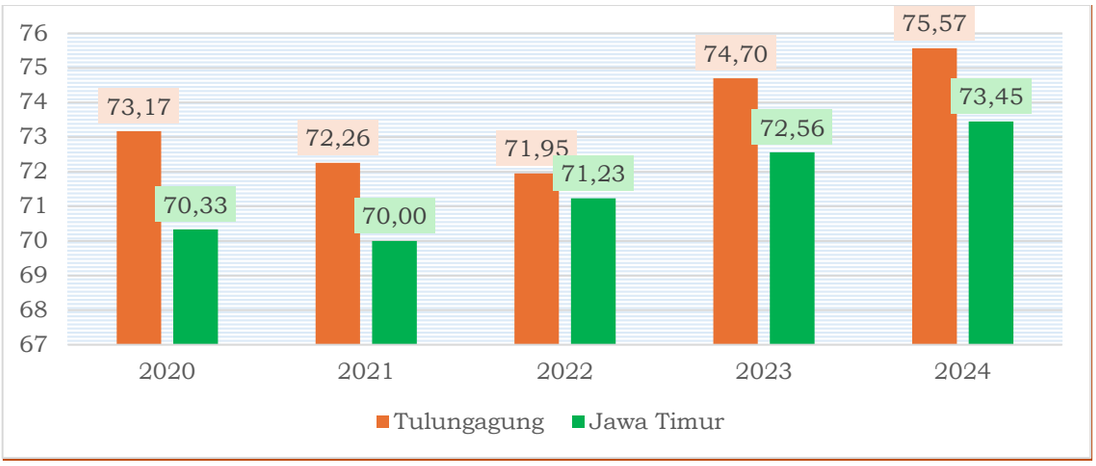


Gambar 2. 56 Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025

Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan wisatawan mancanegara di Kabupaten Tulungagung memiliki tren yang meningkat meskipun cukup fluktuatif dalam perjalannnya. Pertumbuhan rata-rata dari wisatawan mancanegara di Kabupaten Tulungagung tercatat sebesar 87,54 persen setiap tahunnya. Meskipun demikian rata-rata ini secara umum tidak menggambarkan kondisi setiap tahunnya mengingat angka yang cukup fluktuatif. Menurunnya wisatawan pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh pembatasan sosial saat masa Pandemi Covid-19, sedangkan peningkatan pada tahun 2022 yang cukup signifikan disebabkan oleh berakhirnya kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Kabupaten Tulungagung memiliki potensi destinasi yang dapat menarik wisatawan mancanegara, dimana destinasi tersebut dapat dikatakan sudah memiliki eksposur internasional yang menjadi potensi sangat besar bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan sektor pariwisata lebih lanjut.

2.3.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar pula jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung proses produksi barang dan jasa. Berikut merupakan capaian TPAK Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.



Gambar 2. 57 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Jawa Timur, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tulungagung menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPAK Tulungagung mencapai 73,17 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 70,33 persen. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, TPAK mengalami sedikit penurunan menjadi 72,26 persen dan 71,95 persen. Meskipun terjadi penurunan, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi yang berada di angka 70,00 persen pada 2021 dan 71,23 persen pada 2022. TPAK Kabupaten Tulungagung kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024, mencapai 74,70 persen dan 75,57 persen, dan melampaui rata-rata provinsi yang juga mengalami kenaikan menjadi 72,56 persen dan 73,45 persen. Peningkatan ini mencerminkan bahwa kondisi ketenagakerjaan membaik serta semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam pasar kerja. Untuk mempertahankan tren positif ini diperlukan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Tulungagung.

2.3.2.7 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah menerapkan inovasi dalam berbagai aspek pembangunan. Inovasi sendiri merupakan upaya mencari solusi atas suatu permasalahan dengan pendekatan baru atau metode yang lebih efektif dan efisien. Keberadaan inovasi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Berikut merupakan data mengenai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung selama tahun 2021-2024.

Tabel 2. 34 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Skor	33,91	49,27	42,26	59,14
Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

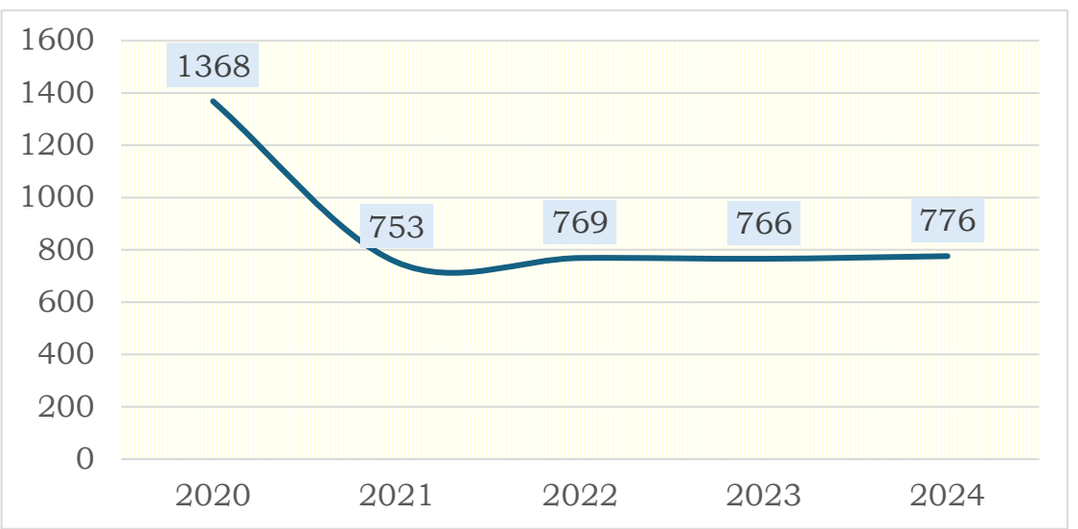
Sumber: Kemendagri Ri, 2025

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 2021-2024 berjalan secara fluktuatif dengan tren yang cenderung

meningkat. Pada tahun 2021, skor yang dicapai adalah 33,91, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 49,27 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 skor mengalami sedikit penurunan menjadi 42,26 sebelum akhirnya melonjak tajam pada tahun 2024 hingga mencapai 59,14. Meskipun terjadi fluktuasi, secara umum Kabupaten Tulungagung tetap berada dalam kategori Inovatif selama periode tersebut. Peningkatan skor Indeks Inovasi Daerah ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan dalam mendorong pengembangan dan penerapan inovasi di berbagai sektor, baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pengembangan ekonomi daerah. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 sisi pemerintah maupun masyarakat. Kedepannya diperlukan konsistensi dalam pengembangan kebijakan inovasi daerah agar peningkatan skor ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Dengan demikian, Kabupaten Tulungagung dapat menjadi daerah yang lebih kompetitif dalam pembangunan berbasis inovasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai terobosan yang lebih efektif dan efisien.

2.3.2.5. Koperasi Daerah

Koperasi merupakan lembaga perekonomian yang memiliki tujuan untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat luas dengan mekanisme yang cukup berbeda dengan institusi keuangan konvensional seperti bank. Penekanannya kepada keuntungan anggota, akses keuangan yang mudah, dan tipikalnya mendukung aktivitas perekonomian kecil dan menengah menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi daerah yang penting dalam memastikan ekonomi daerah yang lebih inklusif untuk semua. Kondisi koperasi daerah dapat dilihat baik melalui data koperasi aktif daerah. Berikut merupakan data mengenai jumlah koperasi aktif Kabupaten Tulungagung selama tahun 2020-2024:



Gambar 2. 58 Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2025

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum mengalami penurunan. Selama lima tahun, penurunan terjadi sebesar 592 koperasi aktif atau hampir separuh dari kondisi awal dengan persentase penurunan sebesar 43,27

persen. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian secara umum yang mengalami disrupsi dalam kondisi pandemi Covid-19, dimana banyak aktivitas perekonomian tidak dapat dilakukan atau dilakukan dengan sangat terbatas. Hal ini memengaruhi kinerja koperasi secara umum yang mengakibatkan menurunnya jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tulungagung secara cukup signifikan pada tahun 2021. Meskipun demikian, setelah penurunan signifikan tersebut jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tulungangung secara cukup konsisten meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa ekonomi daerah secara umum mengalami pemulihan dan aktivitas perekonomian daerah kembali berjalan secara normal.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari proses produksi ekonomi suatu wilayah. Perspektif lingkungan telah mendorong pembangunan ekonomi yang memerhatikan kelangsungan daya dukung dan daya tampung dari lingkungan sekitarnya. Dari hal ini muncul perhatian terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui penerapan baik ekonomi hijau (*green economy*) maupun ekonomi hijau (*blue economy*). Kedua pendekatan pembangunan ekonomi ini pada umumnya menekankan pentingnya aspek lain seperti sosial dan lingkungan dalam melakukan proses pembangunan ekonomi. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana penerapan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung selama ini melalui distribusi PDRB Non Pertambangan.

2.3.3.1 PDRB Non Pertambangan

PDRB Non Pertambangan merupakan nilai produksi ekonomi suatu daerah yang tidak terkait dengan aktivitas pertambangan. PDRB Non Pertambangan dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap aktivitas ekonomi tidak berkelanjutan seperti pertambangan. Semakin tinggi angkanya mengindikasikan bawah perekonomian daerah tersebut sangat bergantung pada tambang sehingga belum berkelanjutan. Sebaliknya, semakin rendah kontribusi aktivitas pertambangan suatu daerah mengindikasikan daerah tersebut tidak bergantung kepada pertambangan dan penggalian dalam ekonominya.

Tabel 2. 35 PDRB Non Pertambangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
Non-Pertambangan	96,49	96,58	96,63	96,64	96,73
Pertambangan	3,50	3,42	3,37	3,36	3,28

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2025

Struktur PDRB Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun terakhir didominasi oleh sektor non-pertambangan yang terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2020, sektor non-pertambangan menyumbang 96,49 persen dari total PDRB, dan angka ini terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 96,73 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan

semakin kuatnya peran sektor-sektor ekonomi lain seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan jasa dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

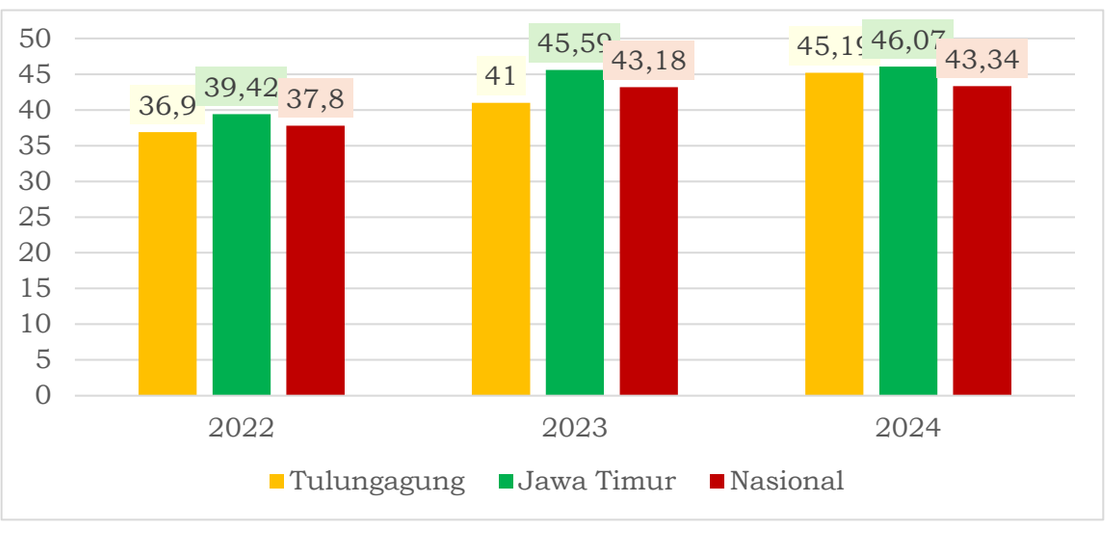
Sebaliknya, sektor pertambangan mengalami tren penurunan dalam kontribusinya terhadap PDRB Tulungagung. Dari 3,50 persen pada tahun 2020, angka ini terus menurun hingga mencapai 3,28 persen pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berkurangnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam, kebijakan pembatasan tambang, atau pergeseran ekonomi daerah ke sektor yang lebih berkelanjutan. Dengan dominasi sektor non-pertambangan yang semakin kuat, Kabupaten Tulungagung perlu terus memperkuat sektor unggulan yang berkelanjutan, meningkatkan investasi di industri kreatif dan manufaktur, serta mengembangkan sektor jasa untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah salah satu inisiatif untuk mendukung pelaksanaan transformasi ekonomi dengan cara mengembangkan super platform, meningkatkan kualitas talenta digital, dan mempercepat proses transformasi digital. Percepatan transformasi digital dilakukan dengan membangun ekosistem digital yang memungkinkan perusahaan untuk saling berkolaborasi yang didukung oleh peta jalan yang komprehensif dari pemerintah. Transformasi digital di Kabupaten Tulungagung dapat digambarkan dengan beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Indeks Literasi Digital.

2.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah sebuah indikator yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat digital di suatu wilayah. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun yaitu keterampilan digital, pemberdayaan, pekerjan, serta infrastruktur dan ekosistem. Keempat pilar ini menjadi komponen kunci dalam mendukung terbentuknya masyarakat digital di Indonesia. Berikut ini adalah gambaran kondisi masyarakat digital di Kabupaten Tulungagung berdasarkan pengukuran IMDI.



Gambar 2. 59 Grafik Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Tulungagung 2020-2024
Sumber: Buku IMDI 2024

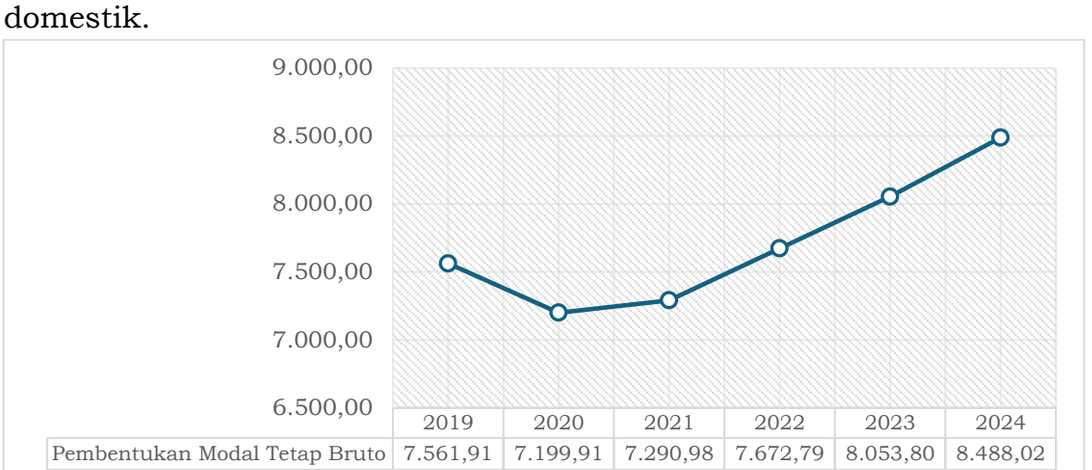
Indeks Masyarakat Digital Indonesia di Kabupaten Tulungagung memunjukkan tren meningkat selama tahun 2022-2024. Capaian IMDI Kabupaten Tulungagung masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2022-2024. Akan tetapi, capaian IMDI Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Peningkatan capaian ini mencerminkan adanya adopsi teknologi digital yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan akses internet, program literasi digital, infrastruktur digital, serta adanya program literasi digital yang mendorong masyarakat Kabupaten Tulungagung agar lebih aktif menggunakan layanan berbasis teknologi.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global merujuk pada proses penggabungan dan penyelarasan antara ekonomi suatu negara dengan sistem ekonomi internasional. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global. Dalam konteks integrasi ini, negara-negara berupaya menghapus hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota, serta menyelaraskan kebijakan ekonomi dan regulasi untuk memfasilitasi arus barang, jasa, dan investasi. Integrasi ekonomi domestik dan global dapat dinilai dari indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Ekspor Barang dan Jasa.

2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen penting dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan total pengeluaran untuk investasi dalam barang modal yang memiliki umur pakai lebih dari satu tahun. PMTB meliputi investasi dalam berbagai aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan, yang berkontribusi pada kapasitas produksi suatu ekonomi. Dalam konteks PDRB, PMTB berfungsi sebagai indikator utama dari aktivitas investasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.561,91	7.199,91	7.290,98	7.672,79	8.053,80	8.488,02

Gambar 2. 60 Pembentukan Modal Tetap Bruto 2019-2024
Sumber: BPS Tulungagung, 2025

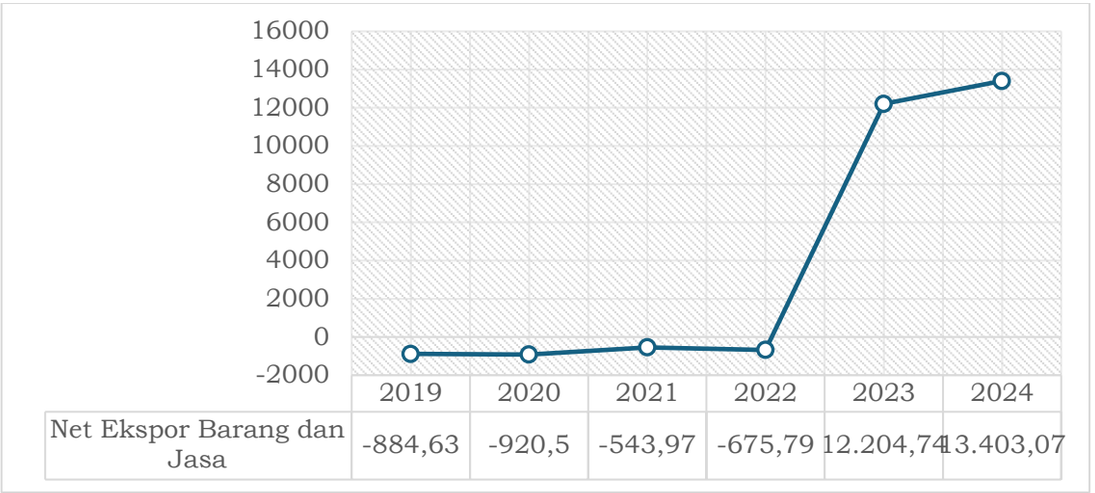
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PTMB) Kabupaten Tulungagung memiliki tren positif dengan adanya kenaikan dari 2020-2024.

Penurunan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari tahun 2019 ke 2020 disebabkan oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19. Salah satu penyebab utama adalah adanya pembatasan sosial dan aktivitas ekonomi yang diberlakukan untuk menanggulangi penyebaran virus. Kebijakan ini mengakibatkan banyak sektor ekonomi terpaksa menghentikan atau mengurangi operasional mereka, sehingga menghambat investasi baru dalam barang modal. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global yang ditimbulkan oleh pandemi juga memengaruhi keputusan investasi baik dari dalam negeri maupun asing.

Dari sisi ekonomi domestik, PMTB yang tinggi menunjukkan adanya kepercayaan investor dan potensi pertumbuhan yang baik. Investasi dalam modal tetap dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Hal ini penting untuk memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing di pasar global. Sebaliknya, rendahnya PMTB dapat mengindikasikan stagnasi dalam investasi yang dapat membatasi pertumbuhan ekonomi dan memperlambat perkembangan infrastruktur. Di tingkat global, PMTB juga berperan dalam integrasi ekonomi. Negara dengan tingkat PMTB yang tinggi cenderung lebih mampu bersaing di pasar internasional karena memiliki infrastruktur dan kapasitas produksi yang lebih baik. Selain itu, peningkatan PMTB dapat menarik investasi asing langsung yang selanjutnya dapat memperkuat hubungan ekonomi antarnegara. Dengan demikian, PMTB tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik tetapi juga memengaruhi posisi suatu negara dalam konteks ekonomi global.

2.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memainkan peran krusial dalam integrasi ekonomi domestik dan global berfungsi sebagai jembatan antara pasar lokal dan internasional. Negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif melalui ekspor, yaitu kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya lebih rendah atau kualitas yang lebih baik dibandingkan negara lain. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri domestik. Dalam konteks integrasi ekonomi global, ekspor membantu negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional yang memungkinkan mereka untuk memperluas pasar bagi produk-produk domestik.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	-884,63	-920,5	-543,97	-675,79	12.204,74	13.403,07

Gambar 2. 61 Grafik Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Tulungagung 2019-2024

Sumber: BPS Tulungagung, 2025

Ekspor barang dan jasa Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2024 memiliki nilai negatif dengan nilai terendah sebesar minus Rp920,5 miliar pada tahun 2020. Net Ekspor Barang dan Jasa sering kali mencatat nilai negatif dalam Produk Domestik Bruto (PDB) karena nilai impor barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya permintaan domestik terhadap barang dan jasa asing yang sering kali lebih beragam dan berkualitas tinggi dibandingkan produk lokal. Selain itu, ketergantungan Kabupaten Tulungagung pada impor bahan baku untuk industri dan barang konsumsi juga berkontribusi terhadap defisit net ekspor. Defisit net ekspor mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi domestik dalam mencapai keseimbangan perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.

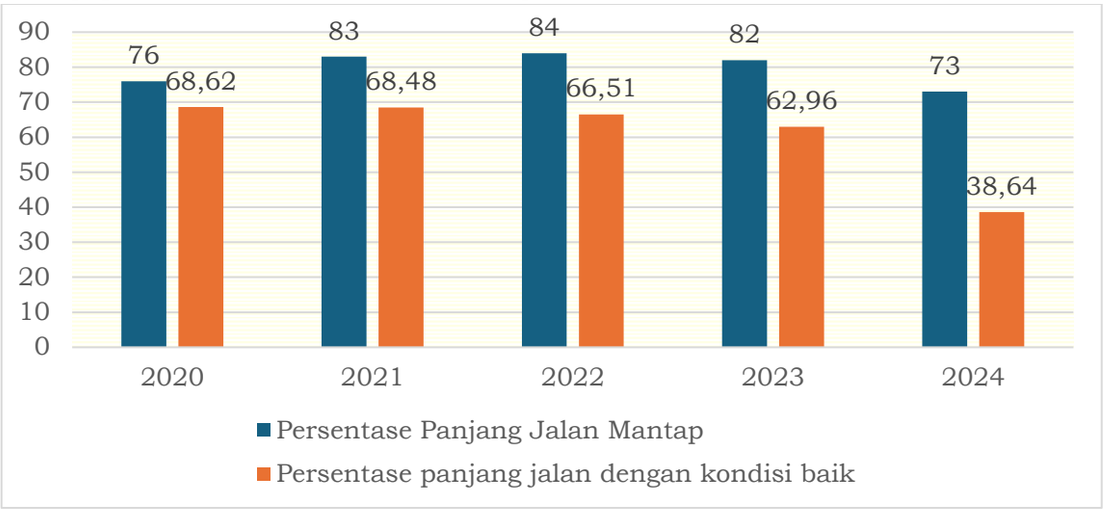
Kabupaten Tulungagung memiliki kondisi PMTB positif dengan net ekspor negatif menunjukkan bahwa meskipun ada investasi yang baik dan potensi pertumbuhan, Kabupaten Tulungagung perlu memperhatikan keseimbangan antara produksi domestik dan ketergantungan pada impor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada barang impor akan menjadi kunci untuk memperbaiki posisi net ekspor di masa depan.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan antara perkotaan dan perdesaan sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya, hasil produksi dari perdesaan dapat dipasarkan ke kota-kota, sementara investasi dari perkotaan dapat membantu meningkatkan produktivitas di perdesaan. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang holistik harus mempertimbangkan kedua wilayah ini untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dengan indikator Jalan Kondisi Mantap, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, dan Indeks Desa Membangun.

2.3.6.1 Jalan Kondisi Mantap

Guna melayani masyarakat dan mendukung kelancaran pertumbuhan ekonomi serta sosial, dibutuhkan infrastruktur yang meliputi berbagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan merupakan kebutuhan mendasar untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global daerah. Realisasi infrastruktur ini dapat dipercepat melalui langkah-langkah holistik yang mampu menarik investasi, sehingga sektor swasta terdorong untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur dan layanan dengan prinsip bisnis yang sehat. Proses penyediaan infrastruktur mencakup pembangunan atau peningkatan kapasitas, pengelolaan, serta pemeliharaan untuk mengoptimalkan manfaat dan fungsi infrastruktur.



Gambar 2. 62 Persentase Panjang Jalan Mantap dan Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Persentase panjang jalan mantap Kabupaten Tulungagung selama tahun 2020-2024 menunjukan fluktuasi yang cenderung menurun dari tahun 2023 dan 2024. Persentase jalan mantap dan jalan dengan kondisi baik pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa masih perlu penanganan dalam pembangunan jalan.

Tabel 2. 36 Tabel Ruas Jalan Menurut Fungsinya Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah				Sistem Primer					Sistem Sekunder			
	Ruas		Panjang (KM)		Panjang (KM)					Panjang (KM)			
	Prov.	Kab/ Kota	Prov.	Kab/ Kota	JKP 2	JKP 3	JKP 4	JLP	J.Ling. P	JAS	JKS	JLS	J.Ling.P
Tulungagung	1	939	9,561	1.621 ,667	9,5 61	-	58,3 07	1.06 9,70 1	407,35 1	-	19,77 6	8,5 05	58,026

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Timur, 2025

Berdasarkan data jaringan jalan di Kabupaten Tulungagung, tercatat total panjang jalan mencapai 1.621,667 km yang terdiri dari sistem jalan primer dan sekunder. Jalan primer didominasi oleh jalan lokal primer (JLP) sepanjang 1.069,701 km, sedangkan jalan sekunder didominasi oleh jalan kolektor sekunder (JKS) sepanjang 19,776 km. Panjang jalan ini mencerminkan cakupan konektivitas wilayah yang cukup luas dan menjadi dasar untuk menghitung rasio panjang jalan terhadap luas wilayah maupun jumlah penduduk. Rasio ini penting untuk mengukur ketersediaan infrastruktur jalan dalam mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 37 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Rasio Panjang Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi Baik	0,6862	0,6848	0,6651	0,6296	0,3864
Kondisi Sedang	0,0956	0,1457	0,1562	0,1682	0,3461
Kondisi Rusak Ringan	0,1222	0,105	0,1044	0,1412	0,1635
Kondisi Rusak Berat	0,96	0,645	0,743	0,61	0,103

Sumber: *Dinas PUPR Kab. Tulungagung 2024, Dokumen RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025*

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik memiliki tren penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,6862 hingga 2024 sebesar 0,3864. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi jalan yang awalnya dalam kondisi baik semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Rasio panjang jalan kondisi sedang menjelaskan bahwa semakin banyak proporsi jalan yang beralih ke kondisi sedang. Ini bisa jadi merupakan transisi dari kondisi baik yang mulai mengalami kerusakan, atau dari kondisi rusak yang diperbaiki namun belum mencapai kondisi baik. Proporsi jalan dengan kerusakan ringan cenderung stabil dengan sedikit peningkatan di tahun 2024. Ada perbaikan yang signifikan pada proporsi jalan yang sebelumnya rusak berat. Hal ini merupakan hasil dari upaya perbaikan atau pembangunan kembali jalan yang rusak parah.

2.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses hunian layak merupakan konsep penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hunian yang layak di Indonesia diartikan sebagai tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu, baik dari segi fisik maupun aksesibilitas terhadap layanan dasar.

Tabel 2. 38 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	n.a	n.a	66.75	66.76	69.12

Sumber : Dinas Perkim, 2025

Capaian indikator rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren positif sejak data tersedia pada tahun 2022. Pada

tahun tersebut, sebesar 66,75% rumah tangga telah memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi kriteria kelayakan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Persentase ini mengalami peningkatan kecil menjadi 66,76% pada tahun 2023, dan melonjak lebih signifikan menjadi 69,12% pada tahun 2024. Meskipun tidak tersedia data untuk tahun 2020 dan 2021, tren yang muncul menunjukkan adanya komitmen dan perbaikan bertahap dalam penyediaan perumahan yang layak di Kabupaten Tulungagung, mencerminkan hasil dari kebijakan pembangunan perumahan dan peningkatan akses infrastruktur dasar yang berkelanjutan.

Akan tetapi, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi termasuk keberadaan rumah-rumah yang belum memenuhi kriteria layak huni, seperti yang ditunjukkan oleh data yang menyebutkan adanya rumah dengan dinding bambu dan lantai tanah. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan program perumahan dan infrastruktur untuk memastikan bahwa lebih banyak rumah tangga dapat menikmati hunian yang layak dan sehat.

2.3.6.3 Indeks Desa Membangun

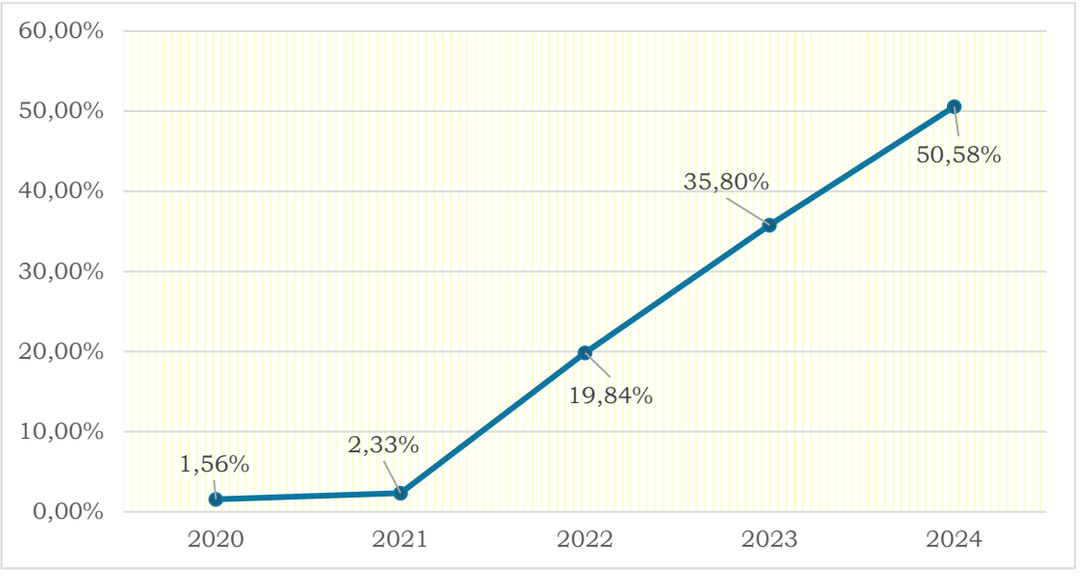
Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan tinggi dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Status ini diberikan berdasarkan penilaian IDM yang mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Kemudian, persentase desa mandiri adalah perbandingan jumlah desa yang telah mencapai status mandiri dengan total jumlah desa di suatu wilayah yang dinyatakan dalam bentuk persen. Persentase ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan desa dalam suatu wilayah tertentu. Berikut data terkait IDM di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2. 39 Jumlah desa berdasarkan IDM Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Desa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pacitan	1	2	4	23	47	81
Ponorogo	0	0	4	14	60	76
Trenggalek	3	7	15	32	62	89
Tulungagung	4	4	6	51	92	130
Blitar	7	9	10	42	64	111
Kediri	0	1	7	31	50	88
Malang	26	40	56	91	302	378
Lumajang	0	0	10	37	60	69
Jember	9	14	19	94	145	179
Banyuwangi	38	52	89	138	162	179
Bondowoso	0	1	6	17	25	38
Situbondo	0	0	6	16	35	62
Probolinggo	5	7	16	23	44	105
Pasuruan	2	4	11	34	85	134
Sidoarjo	2	2	33	73	152	215
Mojokerto	12	22	45	69	219	299
Jombang	6	14	23	47	91	184
Nganjuk	3	5	16	23	38	78
Madiun	1	4	19	44	94	135

Desa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Magetan	6	11	22	47	78	113
Ngawi	4	7	8	16	27	52
Bojonegoro	3	38	103	155	262	340
Tuban	6	7	24	73	125	186
Lamongan	11	16	34	97	166	237
Gresik	7	47	86	153	222	290
Bangkalan	0	0	0	4	6	13
Sampang	0	0	0	3	8	14
Pamekasan	1	3	5	17	21	24
Sumenep	0	0	1	7	39	101
Kota Kediri	0	0	0	0	0	0
Kota Blitar	0	0	0	0	0	0
Kota Malang	0	0	0	0	0	0
Kota Probolinggo	0	0	0	0	0	0
Kota Pasuruan	0	0	0	0	0	0
Kota Mojokerto	0	0	0	0	0	0
Kota Madiun	0	0	0	0	0	0
Kota Surabaya	0	0	0	0	0	0
Kota Batu	9	15	19	19	19	19
Jawa Timur	166	332	697	1490	2800	4019

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2024



Gambar 2. 63 Grafik Persentase Desa Mandiri Kabupaten Tulungagung 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2024, diolah

Persentase desa mandiri di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil evaluasi Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 mencapai sekitar 50,58 persen dengan total 51 desa dari 257 desa yang masuk dalam kategori ini. Berikut Indeks Desa Membangun Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.

Tabel 2. 40 Indeks Desa Membangun Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Tulungagung	**0,696**	**0,7099**	**0,7647**	**0,7894**	**0,8055**
Status IDM	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju

Jawa Timur	**0,7026**	**0,7217**	**0,7517**	**0,7807**	**0,8014**
Status IDM	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju

Sumber: Buku Indeks Desa Membangun 2020-2024

Peningkatan IDM Kabupaten Tulungagung selama tahun 2020-2024 mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang menilai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di masing-masing desa. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang lebih baik, akses terhadap pelayanan dasar, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan diharapkan tren positif ini akan berlanjut dan lebih banyak desa dapat mencapai status mandiri di masa mendatang. Perhitungan Indeks Desa Membangun berhenti pada tahun 2024 dan diganti dengan Indeks Desa pada tahun 2025.

2.3.6.4 Perhubungan

Masalah di wilayah perkotaan dalam sektor perhubungan umumnya lebih banyak berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ). Selain itu, terdapat berbagai masalah lain dalam bidang perhubungan yang tidak hanya terkait dengan lalu lintas. Pemerintah daerah berupaya mengidentifikasi permasalahan perhubungan dengan menggunakan beberapa indikator tambahan. Indikator-indikator tersebut beserta kondisi pencapaian kinerja dalam pelaksanaan urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 41 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat pelayanan jalan	Indeks	0,47	0,49	0,44	0,36	0,44
Tingkat pelayanan fasilitas perlengkapan jalan	Indeks	0,293	0,293	0,391	0,439	-
Tingkat pelayanan prasarana perhubungan	Indeks	0,952	0,952	0,564	0,578	-
Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	%	70,00	75,00	80,78	87,5	88,81
Persentase angkutan sungai yang aman/ berkeselamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah kendaraan lulus uji kendaraan bermotor	Unit	24.826	25.932	24.735	20.700	20,077
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	Kasus	1066	925	1217	1470	999

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kendaraan lulus uji laik jalan	%	92	91	93	94	94,70
Persentase jaringan jalan yang dilengkapi ATCS	%	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
Rasio keterisian ruang parkir	Rasio	n.a	n.a	n.a	10,93	12,40
Persentase kendaraan yang melaksanakan uji kelaikan	%	88	90	91	92	98,75
Insidensi pelanggaran operasi keselamatan dan ketertiban angkutan barang	%	19,60	20,51	7,69	6,89	8,95

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung 2024

Tingkat pelayanan jalan merupakan salah satu ukuran untuk mengevaluasi kinerja lalu lintas pada suatu ruas jalan yang dihitung dengan membandingkan volume kendaraan terhadap kapasitas jalan tersebut. Nilai tingkat pelayanan jalan sebesar 1 menunjukkan adanya antrean kendaraan yang panjang atau kemacetan, sementara nilai yang lebih rendah dari 1 menandakan kondisi pelayanan jalan yang lebih baik. Pada tahun 2019, tingkat pelayanan jalan tercatat sebesar 0,37, yang berarti berada pada kelas B, di mana arus lalu lintas relatif stabil dan pengemudi memiliki kebebasan yang cukup dalam menentukan kecepatan berkendara. Peningkatan kualitas pelayanan jalan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh kondisi jalan yang lebih lengang akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tulungagung.

Pada tahun 2020, tingkat pelayanan jalan naik menjadi 0,47 dan pada tahun 2021 menjadi 0,49, yang menunjukkan kelas C, di mana arus lalu lintas tetap stabil tetapi pengemudi memiliki keterbatasan dalam memilih kecepatan. Penurunan kualitas pelayanan jalan pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan tahun 2019 terjadi karena survei dilakukan pada ruas jalan yang berbeda dengan volume lalu lintas lebih tinggi, seiring dengan masyarakat yang mulai beradaptasi dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Covid-19.

Pada tahun 2022, tingkat pelayanan jalan kembali membaik dengan nilai 0,44, kembali ke kelas B, menandakan arus lalu lintas yang stabil dan kebebasan pengemudi dalam memilih kecepatan. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan lebih lanjut dengan nilai 0,36, tetap di kelas B yang dipengaruhi oleh lokasi survei yang berbeda. Sedangkan pada tahun 2024, tingkat pelayanan jalan tercatat 0,44, masih berada di kelas B dengan kondisi arus lalu lintas yang stabil dan kebebasan pengemudi dalam memilih kecepatan. Meskipun nilai mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya karena lokasi survei yang sama, tingkat pelayanan jalan tidak berubah dan tetap berada pada kelas B.

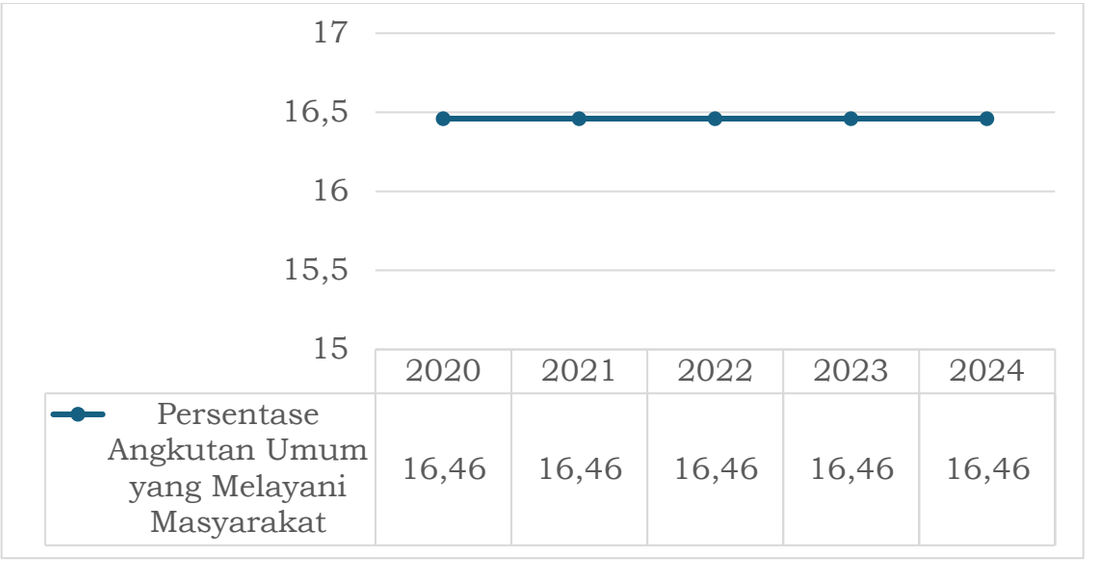
Tabel 2. 42 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tulungagung 2020-2024

No	Jenis Angkutan	Jumlah (unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Moda Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)	24	24	24	20	19
2	Mobil Penumpang Umum	40	43	69	40	30
3	Mobil Penumpang Bukan Umum	577.467	579.820	584.213	51.811	539.560
4	Mobil Bis Umum	884	935	956	879	1.003
5	Mobil Bis Bukan Umum	753	745	729	619	532
6	Mobil Pick Up Umum	71	66	107	67	79
7	Mobil Pick Up Bukan Umum	14.079	14.647	13.764	10.830	9.989
8	Mobil Truk Umum	3.888	4.131	3.892	2.747	2.539
9	Mobil Truk Bukan Umum	4.073	4.305	4.150	3.195	3.354
10	Truk Tandum Umum	554	506	519	422	560
11	Truk Tandum Bukan Umum	62	62	84	43	39
12	Kereta Gandengan Umum	55	2	0	1	5
Jumlah		**601.950**	**605.286**	**608.507**	**70.674**	**557.709**

Sumber: Satu Data Tulungagung, 2025

Jumlah kendaraan di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh kendaraan bukan umum atau kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi paling banyak pada tahun 2022 adalah mobil penumpang bukan umum dengan jumlah 584.213 unit, kemudian mobil pribadi berupa *pick up* dengan jumlah 13.764 unit. Secara umum, jumlah kendaraan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan jumlah total kendaraan adalah 608.507 unit kemudian mengalami penurunan menjadi 70.674 unit pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 557.709 di tahun 2024.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perhubungan tidak lepas dari ketersediaan angkutan umum sebagai moda transportasi. Persentase angkutan yang melayani masyarakat Kabupaten Tulungagung selama 4 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan atau stagnan di angka 16,46 persen sehingga kedepannya dikhawatirkan tidak dapat mengakomodir kebutuhan akan moda transportasi masyarakat terlebih akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.



Gambar 2. 64 Persentase angkutan yang melayani Masyarakat

Sumber: Satu Data Tulungagung, 2025

Kabupaten Tulungagung memiliki 1 (satu) unit terminal tipa A yaitu Terminal Gayatri Tulungagung. Terminal ini melayani moda transportasi umum berupa Mobil Penumpang Umum (MPU) dan angkutan antar kota.

Tabel 2. 43 Jumlah Bus dan jumlah penumpang di terminal Gayatri 2020-2024

No	Uraian	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penumpang Berangkat pada Terminal	607.804	552.607	933.423	940.120	958.416
2	Jumlah Penumpang Datang pada Terminal	456.904	422.404	686.861	756.520	772.445
3	Jumlah Bus Berangkat pada Terminal	62.905	64.596	87.226	96.454	95.651
4	Jumlah Bus Datang pada Terminal	74.620	87.960	81.701	89.014	86.823

Sumber: Satu Data Tulungagung, 2025

Secara umum, jumlah penumpang yang datang dan berangkat pada terminal dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus meningkat. Peningkatan ini juga beriringan dengan jumlah bus yang datang dan berangkat dari terminal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa lalu lintas penumpang dan angkutan umum di Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Perlu adanya kemudahan akses dan integrasi antar moda transportasi untuk mengurangi resiko kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi.

Bidang perhubungan yang juga memerlukan perhatian adalah sarana prasarana perlintasan kereta api, khususnya yang masuk kategori perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang di Kabupaten Tulungagung yang memiliki palang pintu perlintasan dengan penjagaan

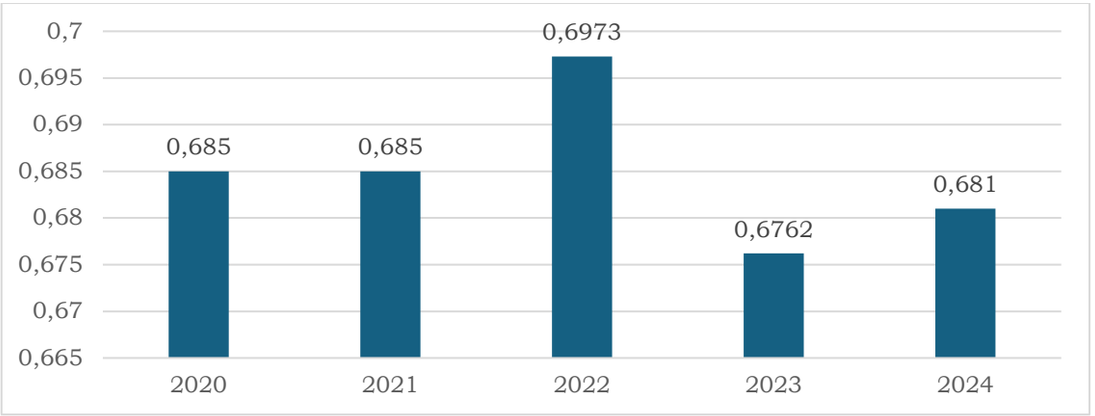
memerlukan peningkatan karena masih cukup banyak perlintasan sebidang yang tidak memiliki palang pintu dan atau penjagaan khusus.

Dukungan konektivitas di Kabupaten Tulungagung dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur di antaranya pembanguan JLS/Pansela sepanjang sekitar 50,97 km dengan kondisi sudah terbangun sepanjang 23,62 km, dalam proses pembangunan (2022) sepanjang 14,09 km, dan belum terbangun sepanjang 13,26 km. Pada tahun 2022 dilaksanakan pembangunan Pansela di Kabupaten Tulungagung Ruas Pantai Sine-Molang sepanjang 14,09 km (Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Pucanglaban). Pembangunan Ruas Pantai Sine-Molang dibagi menjadi 2 (dua) yakni Lot 6A sepanjang ± 6,5 km dimulai di Pantai Sine-Pantai Dlodo yang dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan Lot 6B sepanjang ± 7,5 km dimulai di Pantai Dlodo-Pantai Molang yang dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya. Pembangunan Pansela Lot 6 A dan 6 B ditargetkan selesai pada bulan November 2023. Pada pertengahan tahun 2023 direncanakan akan dilanjutkan pembangunan Pansela Ruas Brumbun-Pantai Sine (Lot 1A dan 1B) sepanjang 13,26 km (Kecamatan Tanggunggunung) sehingga diharapkan pada tahun 2024 JLS/Pansela di Kabupaten Tulungagung terbangun secara keseluruhan.

Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung dengan skema KPBU Unsolicited dengan pemrakarsa PT Gudang Garam, Tbk. Untuk Kabupaten Tulungagung rencana ruas jalan Tol Kediri-Tulungagung seluas 1.072.428,78 m^2 meliputi 4 (empat) kecamatan dan 14 (empat belas) desa/ kelurahan. Ruas Utama Jalan Tol Kediri-Tulungagung yang melintasi Kabupaten Tulungagung sepanjang 13,212 km dengan rencana exit tol yang berada di Desa Balerejo Kecamatan Kauman. Perencanaan Ruas Jalan Tol Kediri-Tulungagung wilayah Provinsi Jawa Timur telah dimulai sejak tahun 2020, dan telah melalui penyesuaian-penyesuaian *basic design* sesuai kebutuhan. Pada tanggal 30 Desember 2022 Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur. Saat ini telah dilaksanakan pengukuran lahan dan bangunan oleh satgas tim pengadaan tanah di beberapa desa di Kabupaten Tulungagung. Sesuai arahan dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung ditarget selesai pada akhir tahun 2023 dengan tujuan untuk mendukung konektivitas dari atau pun menuju Bandar Udara Doho di Kabupaten Kediri.

2.3.6.5 Indeks Inrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas berbagai fasilitas infrastruktur dasar di suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti jaringan jalan, transportasi umum, akses listrik, air bersih, sanitasi, hingga infrastruktur digital dan telekomunikasi. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik kondisi infrastruktur di daerah tersebut dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Berikut Indeks infrastruktur Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.

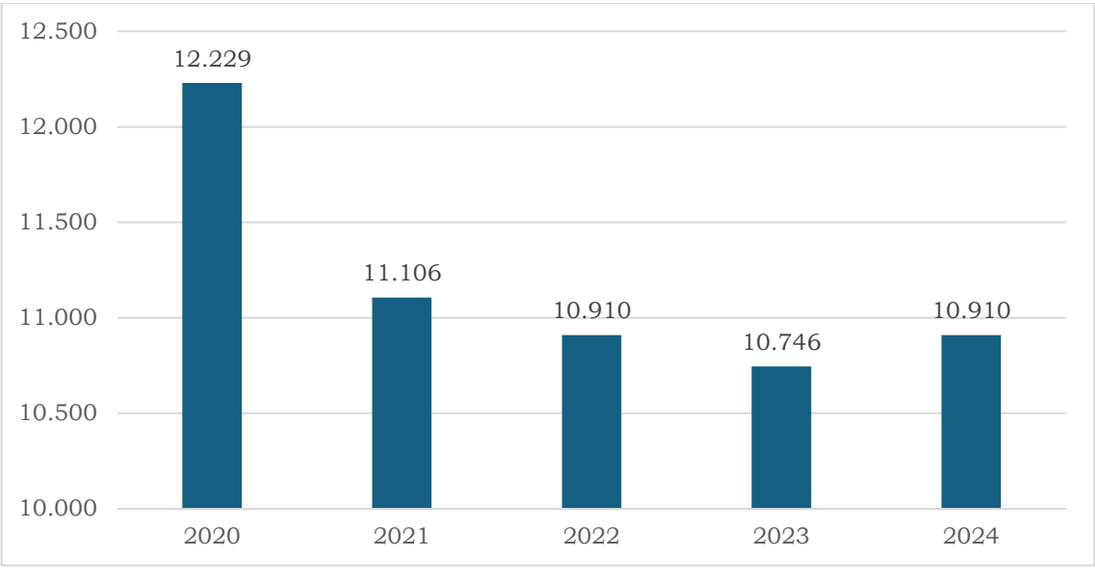


Gambar 2. 65 Indeks Infrastruktur Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: RKPD Tulungagung 2026

Indeks Infrastruktur Kabupaten Tulungagung tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, indeks infrastruktur tercatat stabil di angka 0,685. Selanjutnya, terjadi peningkatan menjadi 0,6973 pada tahun 2022 yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2023 indeks infrastruktur menurun cukup signifikan menjadi 0,6762, sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 0,681. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan infrastruktur, konsistensi dalam pencapaian kualitas dan pemerataan infrastruktur masih perlu diperkuat. Pada tahun 2023 terjadi penurunan sehingga diperlukan strategi yang lebih berkelanjutan dan terarah agar peningkatan indeks infrastruktur ke depan dapat berlangsung secara stabil dan progresif.

2.3.6.6 Rata-Rata Luas Baku Sawah yang Mendapat Air Irigasi Setiap Musim Tanam

Rata-rata luas baku sawah yang mendapat air irigasi setiap musim tanam merupakan indikator penting dalam menggambarkan kapasitas dan efisiensi sistem irigasi suatu daerah dalam mendukung ketahanan pangan. Luas sawah yang terairi secara konsisten mencerminkan keberhasilan pengelolaan sumber daya air serta infrastruktur irigasi yang andal. Semakin besar proporsi sawah yang mendapat pengairan, maka semakin tinggi pula potensi peningkatan produktivitas pertanian, khususnya pada komoditas padi. Berikut Rata-rata luas baku sawah yang mendapat air irigasi setiap musim tanam Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.



Gambar 2. 66 Rata-rata luas baku sawah yang mendapat air irigasi setiap musim tanam Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024
Sumber: RKPD Kabupaten Tulungagung 2026

Berdasarkan data rata-rata luas baku sawah yang mendapat air irigasi setiap musim tanam di Kabupaten Tulungagung selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan secara bertahap. Pada tahun 2020, luas sawah yang terairi tercatat sebesar 12.229 Ha, kemudian menurun menjadi 11.106 Ha di tahun 2021, dan kembali turun ke 10.910 Ha pada tahun 2022. Penurunan ini terus berlanjut dengan capaian 10.746 Ha di tahun 2023, meskipun pada tahun 2024 kembali naik sedikit ke angka 10.910 Ha. Jika dirata-ratakan selama lima tahun, luas sawah yang mendapat air irigasi setiap musim tanam adalah sekitar 11.180 Ha. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam ketersediaan dan distribusi air irigasi, yang dapat disebabkan oleh faktor seperti penurunan kapasitas jaringan irigasi, kondisi cuaca yang ekstrem, atau alih fungsi lahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem irigasi, pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, serta perlindungan terhadap lahan pertanian untuk menjaga produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Tulungagung.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

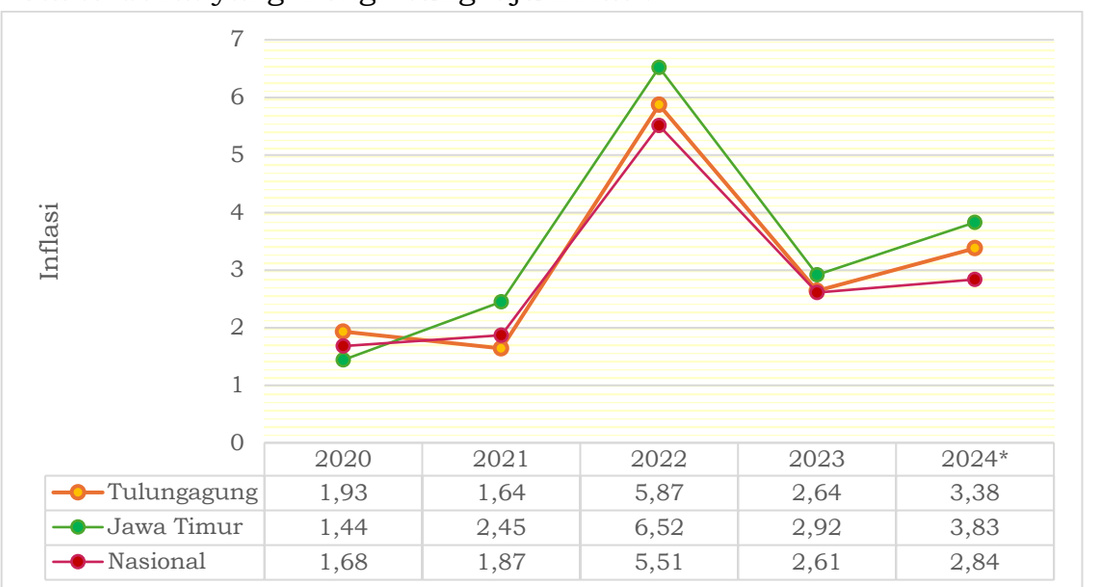
Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi di mana perekonomian suatu daerah beroperasi tanpa fluktuasi yang signifikan mencakup pengendalian inflasi, tingkat pengangguran yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari stabilitas ekonomi makro adalah untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, menjaga stabilitas moneter, serta mendukung sektor keuangan. Kebijakan fiskal berperan penting dalam mencapai tujuan ini dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, yang pada gilirannya dapat memengaruhi inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.3.7.1 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan indikator penting yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Menurut Bank Indonesia, inflasi didefinisikan sebagai

kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum, terutama yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat atau penurunan daya beli mata uang suatu negara. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas dan berdampak pada harga barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup berbagai komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kenaikan inflasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat, yang dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti kenaikan biaya produksi, perubahan permintaan pasar, atau kebijakan pemerintah terkait harga barang dan jasa. Pengendalian inflasi menjadi penting karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi. Pertama, inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan pendapatan riil masyarakat, sehingga menurunkan standar hidup dan daya beli. Kedua, inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung mengacu pada Kota Kediri sebagai kota terdekat yang menghitung laju inflasi.



	2020	2021	2022	2023	2024*
Tulungagung	1,93	1,64	5,87	2,64	3,38
Jawa Timur	1,44	2,45	6,52	2,92	3,83
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	2,84

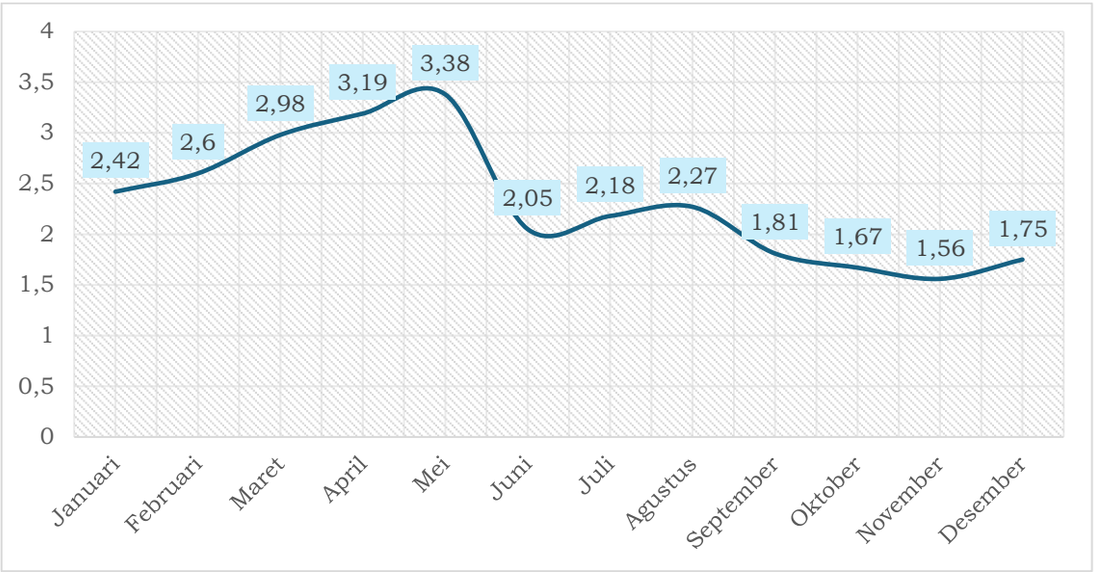
**Data Bulan Mei 2024*

Gambar 2. 67 Grafik Tingkat Inflasi Year – on – year (Y-on-Y) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik

Laju inflasi tahunan Kabupaten Tulungagung relatif berada di bawah inflasi Jawa Timur namun berada di atas laju inflasi nasional. Kecuali pada tahun 2020, laju inflasi di Kabupaten Tulungagung berada di atas laju inflasi Jawa Timur dan Nasional. Laju inflasi terendah di Kabupaten Tulungagung terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 1,64 di mana angka tersebut berada di bawah angka inflasi Jawa Timur dan nasional sekaligus. Hal ini merupakan capaian pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjaga stabilitas harga di masyarakat. Pemerintah

Kabupaten Tulungagung selama ini terus berupaya menjaga stabilitas harga untuk mendorong konsumsi masyarakat tinggi melalui koordinasi intensif antar instansi terkait maupun pengawasan dan survei perkembangan harga di pasaran.

Kenaikan atau peningkatan laju inflasi pada tahun 2022 dipicu oleh faktor konflik geopolitik internasional sehingga terjadi tekanan harga global, gangguan supply pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi. Beberapa komoditas yang dominan mendorong inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan udara. Kenaikan inflasi tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Tulungagung, namun juga terjadi di Jawa Timur dan Nasional.

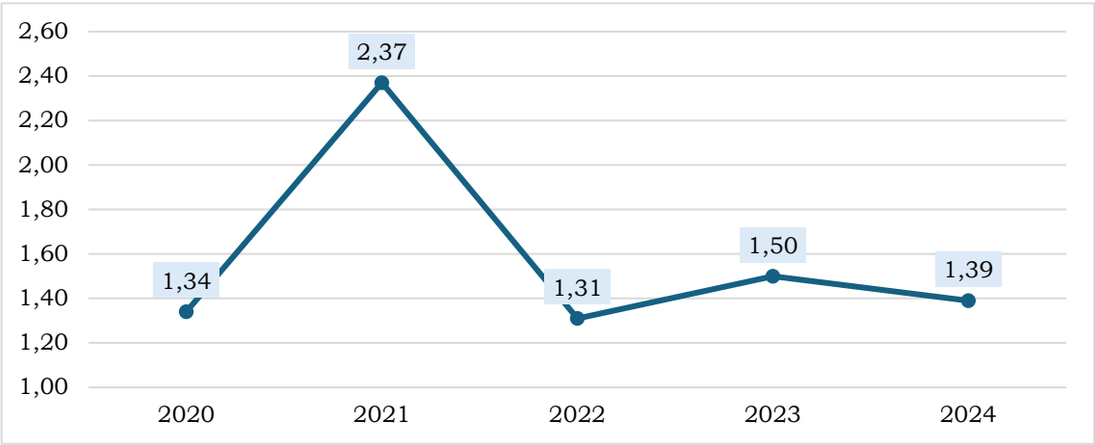


Gambar 2. 68 Grafik Inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Tulungagung 2024
Sumber: BPS Tulungagung, 2024

Perhitungan inflasi di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara bulanan hingga bulan Desember selama tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2024. Inflasi Kabupaten Tulungagung pada bulan Januari sebesar 2,42 persen kemudian terus meningkat hingga puncak inflasi pada bulan Mei dan kemudian menurun hingga bulan Desember menjadi 1,75 persen. Penyebab utama inflasi dapat berasal dari berbagai faktor seperti perubahan harga bahan pokok dan biaya transportasi. Selain itu, tantangan seperti kenaikan harga beras akibat dari gagal panen juga memengaruhi tingkat inflasi di Kabupaten Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya mengendalikan inflasi melalui berbagai langkah, termasuk menggelar program pangan murah dan bekerja sama dengan daerah penghasil komoditas seperti Kabupaten Kediri dan Blitar. Pemantauan dan upaya awal inflasi ini penting untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat dalam mengatasi inflasi di Kabupaten Tulungagung.

2.3.7.2 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kontribusi penerimaan pajak asli daerah terhadap total nilai tambah bruto wilayah. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal dan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.



Gambar 2. 69 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung 2020-2024
Sumber: Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2025

Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 1,34 persen dan mengalami lonjakan tajam pada tahun 2021 menjadi 2,37 persen yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, rasio ini kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 1,31 persen, kemudian naik sedikit pada tahun 2023 sebesar 1,50 persen dan kembali turun menjadi 1,39 persen di tahun 2024. Pola ini mencerminkan pentingnya upaya yang lebih konsisten dan terukur dalam optimalisasi pendapatan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Tulungagung.

2.3.8 Kondisi Riset dan Sektor Unggulan Daerah

Kondisi riset dan pengembangan sektor unggulan daerah merupakan kondisi yang penting dalam proses pembangunan daerah secara umum. Dalam prosesnya, perencanaan pembangunan daerah perlu memerhatikan berbagai hasil identifikasi mengenai kondisi riset dan produk unggulan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029. Dokumen RIPJPID telah memetakan beberapa permasalahan pembangunan daerah, diantaranya:

1. Lemahnya peningkatan SDM di semua sektor dalam meningkatkan daya saing;
2. Belum optimalnya regulasi/kebijakan di semua sektor;
3. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah dalam mencapai kemandirian fiskal;
4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya potensial;

5. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang aksesibilitas;
6. Belum terintegrasinya ketersediaan data dan pemanfaatannya;
7. Belum optimalnya riset dan inovasi di sektor-sektor unggulan daerah;
8. Lemahnya perlindungan terhadap alih fungsi lahan dan ancaman kerusakan lingkungan; dan
9. Belum optimalnya sistem manajemen teknologi informasi.

Dari berbagai permasalahan pembangunan daerah tersebut dirumuskan tiga sektor unggulan yang menjadi fokus pengembangan selama lima tahun mendatang dalam pengembangan riset dan inovasi daerah, yaitu:

1. **Sektor pariwisata dan budaya** dengan pengembangan berfokus kepada pengembangan potensi wisata daerah dan budaya daerah;
2. **Sektor pertanian terpadu** dengan fokus pengembangan terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
3. **Sektor perindustrian dan perdagangan** dengan fokus pengembangan terhadap sektor perindustrian dan perdagangan daerah.

Intervensi terhadap tiga fokus tema riset ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut dalam proses perencanaan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Identifikasi sektor unggulan ini dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor unggulan daerah tersebut. Dari hasil penelaahan atas kesenjangan kondisi ideal dengan eksisting dalam iklim riset dan inovasi daerah dirumuskan beberapa strategi riset dan inovasi daerah, di antaranya:

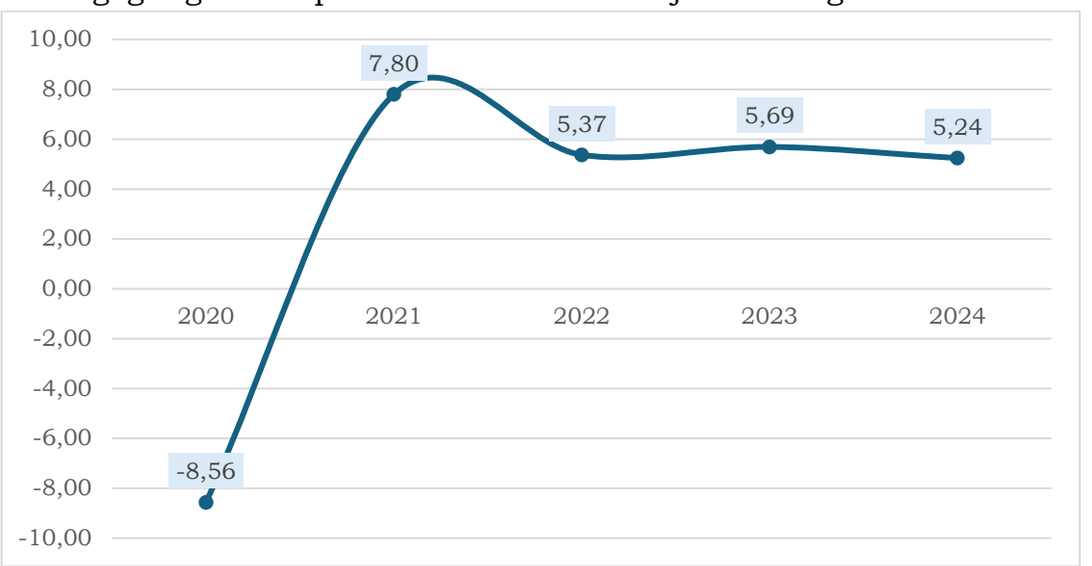
Tabel 2. 44 Strategi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

Aspek	Strategi
Strategi Pengembangan Pariwisata dan Budaya	• Strategi Penguatan Kelembagaan (Pengelolaan) di Obyek Wisata • Strategi Penguatan *Branding* Obyek Wisata • Strategi Penguatan Kompetensi SDM Obyek Wisata • Strategi Penguatan Sarana Prasarana Obyek Wisata
Strategi Pengembangan Pertanian Terpadu	• Strategi Penguatan Kewilayahan Pengembangan Pertanian Terpadu • Strategi Penguatan Potensi Pertanian Terpadu • Strategi Penguatan SDM dalam Sektor Pertanian Terpadu • Strategi Distribusi Hasil Pertanian Terpadu
Strategi Pengembangan Industri dan Perdagangan	• Strategi Penguatan Kompetensi SDM Pengembangan Industri Dan Perdagangan • Strategi Dukungan Infrastruktur Sektor Industri Dan Perdagangan • Strategi Penguatan Klaster Industri Dan Perdagangan • Strategi Penguatan Digitalisasi Pengembangan Industri Dan Perdagangan

Sumber: RIPJPID Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

2.3.9 *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

Nilai ICOR memiliki peran penting dalam investasi daerah karena menjadi indikator efisiensi investasi daerah. Melalui ICOR, pemerintah daerah dapat menilai seberapa efektif investasi yang digelontorkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR yang rendah mencerminkan investasi yang produktif dan efisien, sementara nilai yang tinggi menunjukkan perlunya perbaikan strategi pembangunan agar modal yang ditanamkan menghasilkan output ekonomi yang optimal. Oleh karena itu, ICOR digunakan dalam RPJMD tidak hanya sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai dasar proyeksi kebutuhan investasi dan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah lima tahun ke depan. Adapun data mengenai Nilai ICOR Kabupaten Tulungagung untuk periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut:



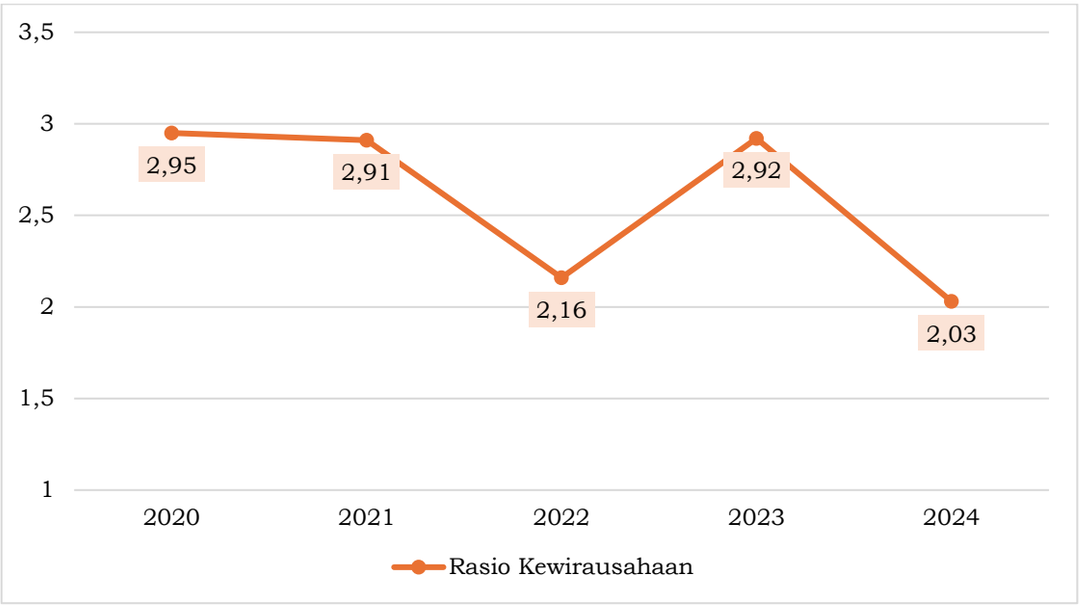
Gambar 2. 70 *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Bappeda Tulungagung, 2025

Kinerja investasi daerah Kabupaten Tulungagung periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2020, ICOR bernilai negatif (-8,56) yang mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah, di mana tambahan modal tidak mampu menghasilkan output yang sepadan bahkan justru terjadi kontraksi. Kondisi ini berangsur membaik pada tahun 2021, meskipun ICOR masih tinggi (7,80) yang menandakan belum efisiennya pemanfaatan investasi. Pada periode 2022–2024, nilai ICOR relatif stabil di kisaran 5,2–5,7, menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dibanding tahun sebelumnya, meskipun masih lebih tinggi dari standar efisiensi nasional (3–4). Hal ini memberikan pesan penting bahwa ke depan, strategi pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas investasi, penguatan sektor-sektor unggulan daerah, serta perbaikan iklim usaha agar investasi yang masuk mampu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

2.3.10 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena mencerminkan sejauh mana

penduduk berperan aktif sebagai pencipta lapangan kerja dan motor penggerak perekonomian. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin besar potensi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, rasio kewirausahaan juga menjadi ukuran daya saing dan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika global. Pencapaian rasio kewirausahaan di Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu fokus utama RPJMD untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan memperluas kesempatan kerja berbasis potensi lokal. Adapun data mengenai rasio kewirausahaan Kabupaten Tulungagung untuk periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 71 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Bappeda Tulungagung, 2025

Rasio kewirausahaan Kabupaten Tulungagung selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang masih memerlukan fokus pengembangan, yakni berkisar antara 2,03–2,95 persen. Angka ini di bawah nasional sebesar 3,35 persen (tahun 2024), yang berarti jumlah wirausaha di Tulungagung masih terbatas dan belum mampu menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja. Tren penurunan rasio kewirausahaan pada tahun 2022 dan 2024 mengindikasikan lemahnya ekosistem usaha dan terbatasnya dukungan terhadap UMKM. Selanjutnya, kebijakan pembangunan perlu diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan UMKM berbasis potensi lokal agar rasio kewirausahaan dapat meningkat signifikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum dalam RPJMD menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan dasar kepada masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh layanan publik diselenggarakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan standar

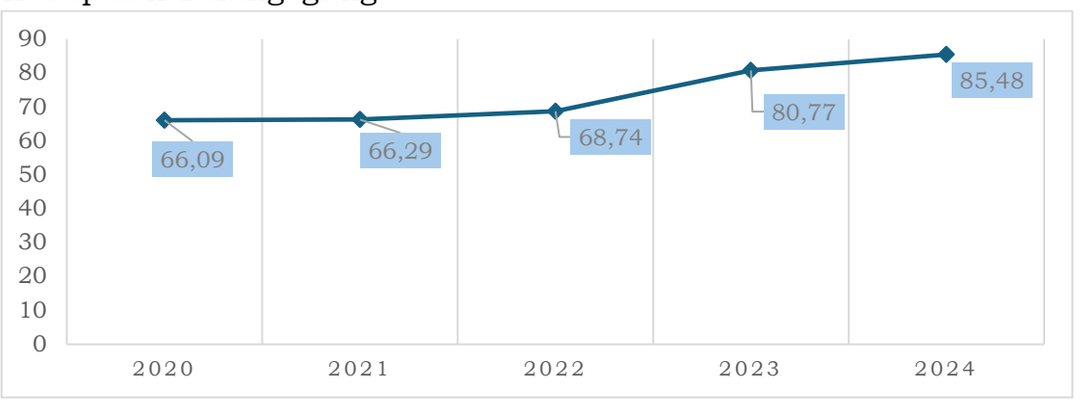
pelayanan minimal yang ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal selama periode perencanaan.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai pendukung manajemen pelayanan publik yang memiliki peran dalam mengontrol dan memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan baik. Berhasil tidaknya pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja tata kelola pemerintahan. Kinerja tersebut dinilai dari sejauh mana penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas dan berdampak. Secara umum kinerja tata Kelola pemerintahan Kabupaten Tulungagung dapat dinilai dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), sebagai berikut.

2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks reformasi birokrasi (IRB) merupakan sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah. IRB bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai IRB, semakin baik kualitas reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan. Berikut capaian IRB Kabupaten Tulungagung



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IRB	B (66,09)	B (66,29)	B (68,74)	A(80,77)	A (85,48)

Gambar 2. 72 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Tulungagung, 2024

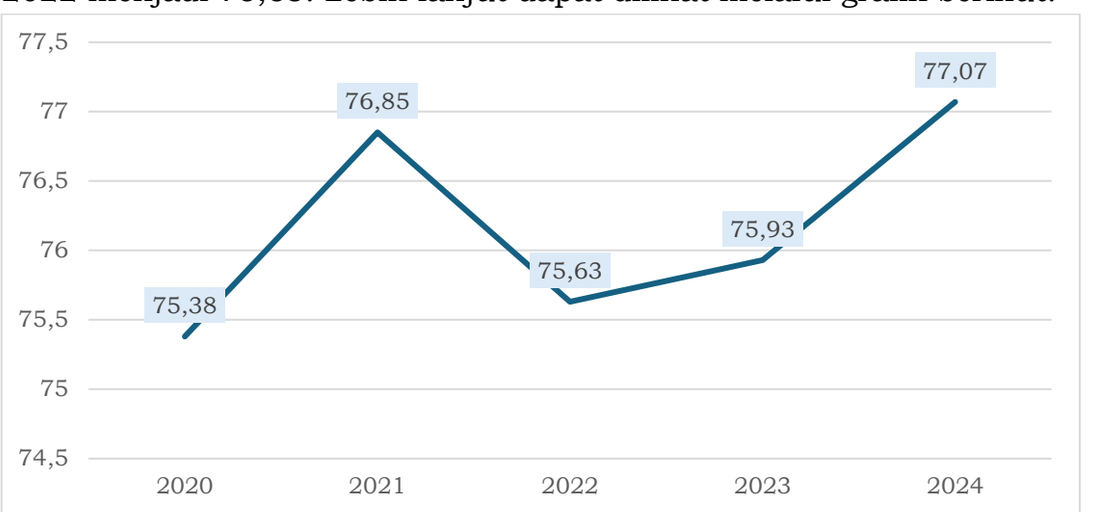
Selama periode 2020-2024, capaian IRB Kabupaten Tulungagung menunjukkan trend meningkat yang cukup signifikan. Selama periode tersebut, capaian IRB naik sebesar 19,39 poin, sehingga berhasil mengubah kategori IRB dari B menjadi A. Kenaikan nilai IRB menandakan bahwa penerapan reformasi birokrasi semakin baik. Faktor yang memengaruhi kinerja IRB Kabupaten Tulungagung yaitu melalui upaya strategis berikut:

- Melakukan pengawalan hasil antara dan menyusun rencana perbaikan melalui koordinasi dengan instansi *leading sector* hasil antara.

- Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan RB berdasarkan rencana aksi *road map.*
- Menerapkan pejabata administrator sebagai agen perubahan sebagai wujud *one agency one innovation*.
- Membangun aplikasi Ber-AKHLAK yang dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi *core values* ASN dan penilaian terhadap implementasi unit kerja dala menerapkan nilai-nilai organisasi tersebut.
- Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapabilitas APIP.
- Melakukan pendampingan pembangunan zona integritas terhadap 14 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas implementasi standar pelayanan publik dan melakukan pembinaan ke unit pelayanan publik.

2.4.1.2 SAKIP

Sementara itu, nilai SAKIP Kabupaten Tulungagung dari tahun 2019 sampai tahun 2021 konsisten naik dari angka 72,83 menjadi 76,85 pada tahun 2021. Kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 75,63. Lebih lanjut dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 2. 73 Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Tulungagung, 2025

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai sakip Kabupaten Tulungagung pada rentang tahun 2020-2024 masih berada pada predikat BB yaitu dengan nilai absolut pada rentang 70-80. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 atau koordinator.

Nilai sakip Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 77,07 setelah sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 1,22 namun terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024.

Reformasi birokrasi dinilai dari penerapan digitalisasi di sektor pemerintahan menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan pada 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

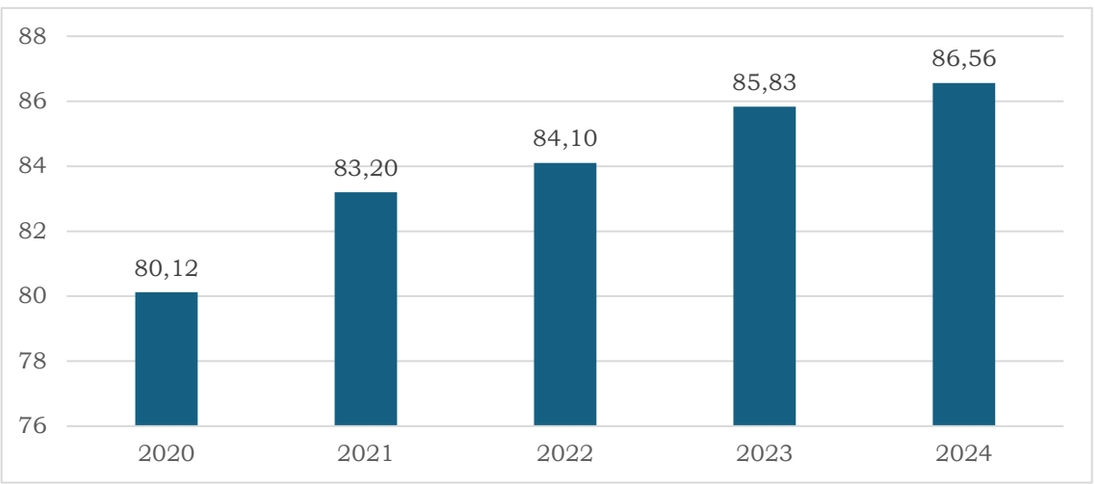
Tabel 2. 45 Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,64	2,96	2,39	2,38	3,09	3,78
Indeks Pelayanan Publik	3,93	3,94	3,91	4,35	4,25	4,29

Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sektor pemerintahan di Kabupaten Tulungagung sudah optimal. Untuk meningkatkan kinerja SPBE perlu diperhatikan beberapa kondisi, yaitu beberapa wilayahnya masih *blank spot* dan infrastruktur TIK belum memadai. Dari sisi pelayanan publik menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung berjalan optimal. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan tajam pada tahun 2022 dari sebelumnya sebesar 3,91 menjadi 4,35. Namun, pada tahun 2023 indeks pelayanan publik Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan menjadi 4,25 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 dengan nilai indeks pelayanan publik sebesar 4,29.

2.4.1.3 Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. IKM mengukur seberapa jauh harapan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi oleh pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Berikut merupakan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.



Gambar 2. 50 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Tulungagung, 2025

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tulungagung selama lima tahun terakhir memiliki nilai yang meningkat. Pada tahun 2020, nilai IKM tercatat sebesar 80,12, kemudian meningkat cukup signifikan pada 2021 menjadi 83,20. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan publik. Tren positif terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan nilai 84,10 pada 2022 dan kembali naik menjadi 85,83 pada 2023. Peningkatan berkesinambungan ini mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan nilai 86,56, yang menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung semakin meningkat. Secara umum, tren kenaikan tersebut mencerminkan adanya konsistensi pemerintah daerah dalam memperbaiki standar pelayanan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperkuat sarana dan prasarana pelayanan.

2.4.1.4 Kearsipan

Kearsipan merupakan proses pengelolaan dokumen atau catatan yang merekam berbagai aktivitas dan memuat informasi bernilai guna yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Baik arsip yang diciptakan maupun yang diterima, seluruhnya dikelola agar dapat dengan mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Kearsipan tidak hanya mendukung kelancaran administrasi, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai pusat ingatan organisasi dan alat pengawasan yang esensial. Peran ini sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan organisasi, termasuk perencanaan, analisis, pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, penyusunan laporan, pertanggungjawaban, serta evaluasi dan pengendalian, baik pada tingkat lembaga pemerintahan, organisasi, badan usaha, maupun individu.

Di Kabupaten Tulungagung, implementasi sistem kearsipan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebanyak 12 Perangkat Daerah telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang memfasilitasi korespondensi elektronik serta digitalisasi arsip. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi biaya administrasi. Pemerintah daerah juga telah mengesahkan sejumlah regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan arsip, seperti Peraturan Bupati Nomor 21 dan 23 Tahun 2021. Berikut ini merupakan capaian indikator urusan kearsipan di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 46 Capaian indikator urusan kearsipan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Arsip	35	37	41	43	45
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	10	12	15	17	18

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	88,88 (Memuaskan)	56,21 (Cukup)	80,25 (Memuaskan)	81,69 (Memuaskan)	A
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Audit Internal Kearsipan kategori Baik	16,60	20,00	25,00	32,00	35,00
Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Digitalisasi Arsip (Aplikasi SRIKANDI)	n/a	n/a	n/a	10	30
Jumlah Arsiparis	5	9	11	11	11

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, 2024

Pencapaian indikator dalam bidang kearsipan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2020 hingga 2024. Salah satu indikator yang mencerminkan kemajuan tersebut adalah peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola arsip. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Perangkat Daerah. Tercatat jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola arsip meningkat dari 35 unit pada tahun 2019 menjadi 45 unit pada tahun 2024.

Sementara itu, persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara standar masih relatif rendah. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta minimnya jumlah tenaga arsiparis dan pemahaman teknis di lingkungan Perangkat Daerah. Meski demikian, capaian ini menunjukkan peningkatan, dari 10 persen pada tahun 2019 menjadi 17 persen pada tahun 2024. Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal mengalami fluktuasi akibat perubahan indikator penilaian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai yang diperoleh mencapai 81,69 dan dikategorikan sebagai “memuaskan”. Capaian ini turut didorong oleh sejumlah inovasi, antara lain program LAYAR JEBOL (Layanan Arsip Jemput Bola), alih media arsip C Desa, serta peningkatan pengelolaan arsip statis. Di sisi lain, implementasi digitalisasi kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI diadopsi oleh 30 Perangkat Daerah pada tahun 2024. Rendahnya angka ini disebabkan oleh masih digunakannya sistem aplikasi internal oleh masing-masing Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan integrasi melalui pemanfaatan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Adapun jumlah arsiparis juga mengalami peningkatan dari 4 orang pada tahun 2019 menjadi 11 orang pada tahun 2024 sebagai refleksi dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran arsiparis dalam pengelolaan kearsipan. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal di seluruh Perangkat Daerah.

2.4.1.5 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN memiliki 4 dimensi, yaitu kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja. Dimensi ini diharapkan mampu menilai kepemimpinan dalam penyusunan rencana pengembangan SDM

agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Adapun indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 47 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Tulungagung Tahun 2020-2024

Indikator/Dimensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	**55,40**	**53,84**	**70,36**	**85,17**	
Dimensi Kualifikasi	12,08	13,10	21,24	21,40	
Dimensi Kompetensi	20,19	10,93	19,29	33,03	
Dimensi Kinerja	24,99	24,82	24,84	25,73	
Dimensi Disiplin	5,00	5,00	4,99	5	

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tulungagung, 2024

**angka capaian sementara Februari 2024*

Indeks profesionalisme ASN di Kabupaten Tulungagung cenderung fluktuatif dan mengalami peningkatan. Penurunan terjadi pada tahun 2021, kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2023. Kenaikan signifikan ini disebabkan oleh meningkatnya capaian pada dimensi kompetensi yang disebabkan oleh meningkatnya partisipasi ASN pada kegiatan pelatihan baik yang berbasis daring maupun luring sehingga yang mengungkit peningkatan capaian dimensi kompetensi. Sedangkan pada dimensi kualifikasi mengalami peningkatan dengan adanya pengadaan ASN baru dan program peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan melalui ijin belajar.

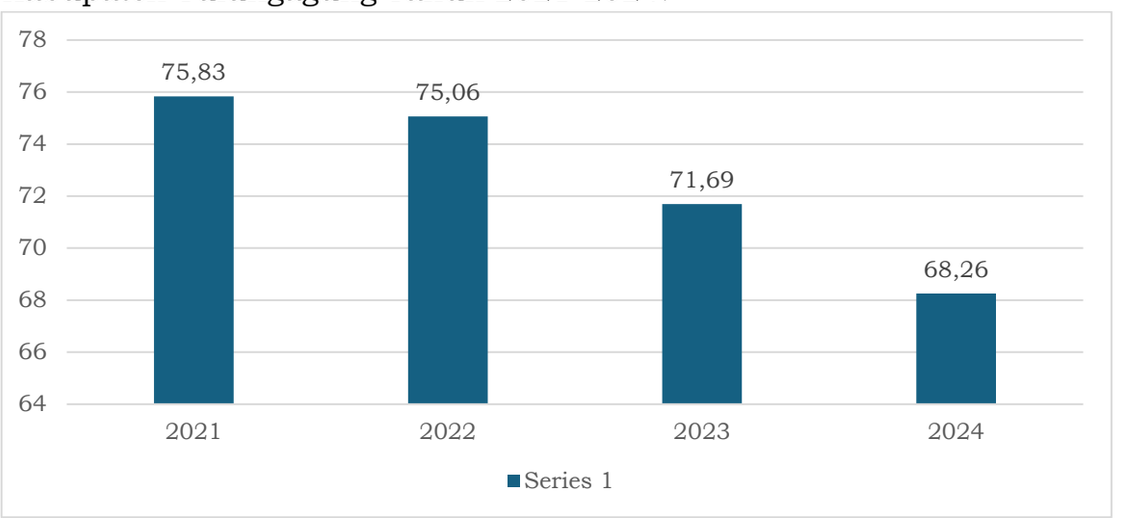
2.4.1.5 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan salah satu instrumen yang dikembangkan untuk menilai tingkat integritas sektor publik, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun perilaku aparatur negara. Dalam konteks pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Tulungagung, integritas menjadi elemen mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029, peningkatan skor Indeks Integritas Nasional menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa seluruh agenda pembangunan dilaksanakan secara etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Integritas tidak hanya berkaitan dengan pencegahan korupsi, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan, efektivitas pengawasan internal, serta komitmen terhadap nilai-nilai moral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Melalui Indeks Integritas Nasional, pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat memperoleh gambaran menyeluruh terhadap area rawan penyimpangan, mendorong pembenahan sistem pengendalian internal, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan reformasi birokrasi sebagai pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Secara politis, integritas menjadi modal sosial yang sangat penting bagi kepemimpinan di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan integritas aparatur dan lembaga akan memperkuat legitimasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung di mata masyarakat, serta menjadi pondasi bagi terwujudnya kepemimpinan yang bersih dan berwibawa. Komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menjadikan integritas sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah menunjukkan tekad kuat dalam membangun daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga unggul dalam kualitas tata kelola dan nilai-nilai pemerintahan yang beretika.

Pengarusutamaan Indeks Integritas Nasional dalam RPJMD 2025–2029 diharapkan mampu menjadi landasan evaluatif dan normatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta memperkuat sistem pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024.



Gambar 2. 74 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2024

Grafik di atas menunjukkan tren Indeks Integritas Nasional Kabupaten Tulungagung selama empat tahun terakhir, yakni dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, terdapat penurunan dalam capaian indeks dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 75,83 yang menandakan tingkat integritas institusi pemerintah daerah yang relatif tinggi. Angka ini kemudian sedikit menurun di tahun 2022 menjadi 75,06, namun masih berada dalam kategori baik. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023,dengan capaian indeks turun ke angka 71,69, dan terus terjadi di tahun 2024, yaitu hanya mencapai 68,26. Penurunan total sebesar 7,57 poin dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung. Tren ini dapat menjadi indikasi menurunnya efektivitas pengawasan internal, lemahnya implementasi sistem pencegahan korupsi, rendahnya budaya kepatuhan terhadap

etika birokrasi, atau menurunnya partisipasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029, tren penurunan ini perlu menjadi perhatian khusus. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang komprehensif untuk memperbaiki capaian ini, antara lain melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis transparansi, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta pembinaan integritas bagi seluruh aparatur sipil negara. Upaya peningkatan Indeks Integritas Nasional juga sejalan dengan reformasi birokrasi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi merupakan aspek yang menggambarkan kondusivitas daerah. Aspek ini dinilai dari Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Indeks Demokrasi Daerah. Adapun kinerja masing-masing indikator sebagai berikut.

2.4.2.1 Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) merupakan indikator untuk mengukur tingkat keamanan dan ketertiban di suatu wilayah. Indikator ini untuk mengukur efektivitas dari tugas penegakan Perda dan Perkada. IPKKU adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Indeks ini menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan tindak kriminal. Berikut tabel indikator ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tabel 2. 48 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	%	100	97	94	95	97,8
Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	85	85	90	95	96
Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	-	75	76	77	79

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kegiatan Pencegahan Konflik	-	0	0	3	4	0
Indeks Risiko Bencana	Indeks	137,68	126,28	125,6	116,70	105,98
Persentase Desa Tangguh Bencana	%	2,21	2,95	3,69	4,79	6,27
Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	%	0,00	25,00	20,00	23,07	25,53
Capaian SPM Kebencanaan	%	84,33	85,66	84,98	95,83	100
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase penanganan kasus kebakaran	%	100,00	100,00	97,00	98,70	100,00
Persentase penanganan kasus kebakaran yang memenuhi standar respon time	%	70,00	70,00	70,80	71,50	80,19
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,58	0,65	0,64	0,65	0,66
Indeks Penanggulangan kebakaran	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Menit	14,48	14,30	13,45	10,07	11,29
Persentase penurunan kejadian kebakaran	%	1,20	2,43	3,45	3,97	6,061
Persentase sumber daya yang sesuai standar kesiapsiagaan penanganan pemadaman kebakaran dan non kebakaran	%	n.a	n.a	n.a	72,00	72,00

Sumber: BPBD, Satpol PP, Bakesbangpol, Damkar Kab.Tulungagung, 2024

Realisasi kinerja di atas menggambarkan upaya menciptakan kondisi tentram, tertib, dan teratur melalui kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan data realisasi kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan realisasi kinerja per tahunnya yang diperoleh dari realisasi di setiap indikator kinerja program secara keseluruhan telah melampaui target dan terjadi peningkatan dari sisi kuantitas pelaksanaan kegiatan.

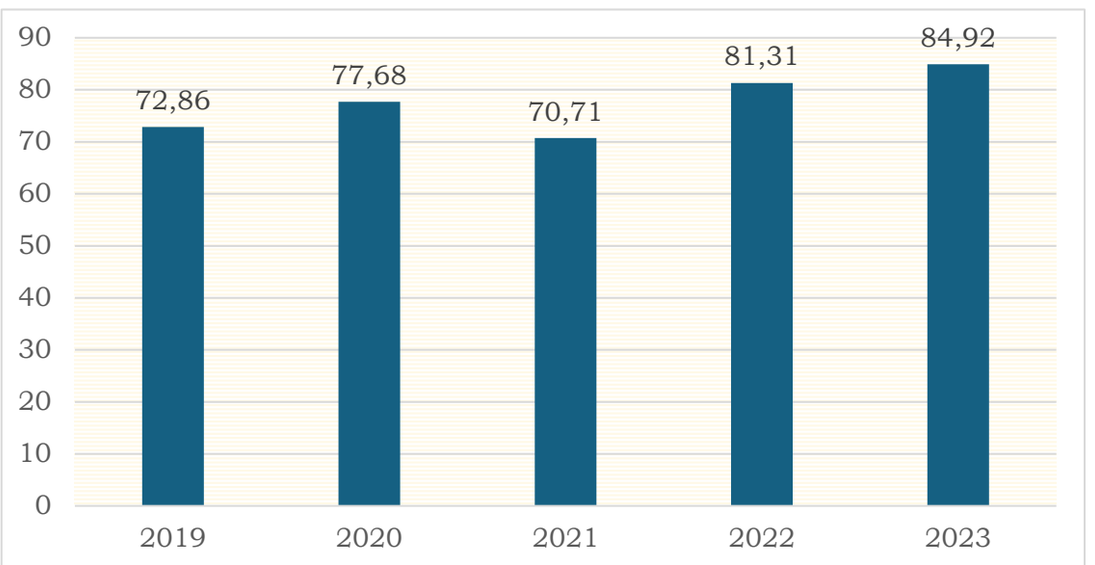
Berdasarkan data capaian indikator kinerja, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten

Tulungagung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu indikator kinerjanya, yaitu persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan pada tahun 2024, yakni dari 95 persen pada tahun 2022 menjadi 97,8 persen, atau naik sebesar 2,8 persen. Tren ini juga sejalan dengan peningkatan indikator kinerja lainnya, yaitu persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahun.

Pada tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menindaklanjuti berbagai jenis pelanggaran Perda dan Perkada, termasuk pelaksanaan operasi cipta kondisi di tempat indekos, pengawasan terhadap pemasangan baliho, pengelolaan limbah B3, penurunan banner, serta pemantauan terhadap infrastruktur seperti menara telekomunikasi dan jaringan *fiber optic*. Selain itu, dilakukan pula pemantauan atas sengketa lahan, destinasi wisata, serta pelaksanaan operasi terkait cukai dan minuman beralkohol, penanganan fenomena manusia silver, dan pengawasan kandang ayam. Kegiatan penertiban banner dan baliho juga meningkat, terutama selama masa kampanye. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menjalin koordinasi dengan berbagai pihak seperti Bawaslu, Dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI, serta aparat kecamatan dan desa guna meminimalkan potensi konflik di lapangan.

2.4.2.2 Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauhmana nilai-nilai demokrasi diantaranya kebebasan politik, partisipasi politik, dan supremasi hukum telah diterapkan di Kabupaten Tulungagung. Berikut indeks demokrasi Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023.



Gambar 2. 75 Indeks Demokrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Kesbangpol prov Jawa Timur, 2023 dalam RPJPD Kab.Tulungagung 2025-2045

Indeks demokrasi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2023 secara keseluruhan memiliki tren fluktuatif. Penurunan Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Timur terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 70,71. Sedangkan Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Timur tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 84,92 meningkat 3,61 poin persentase jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.4.2.3 Capaian Aksi HAM

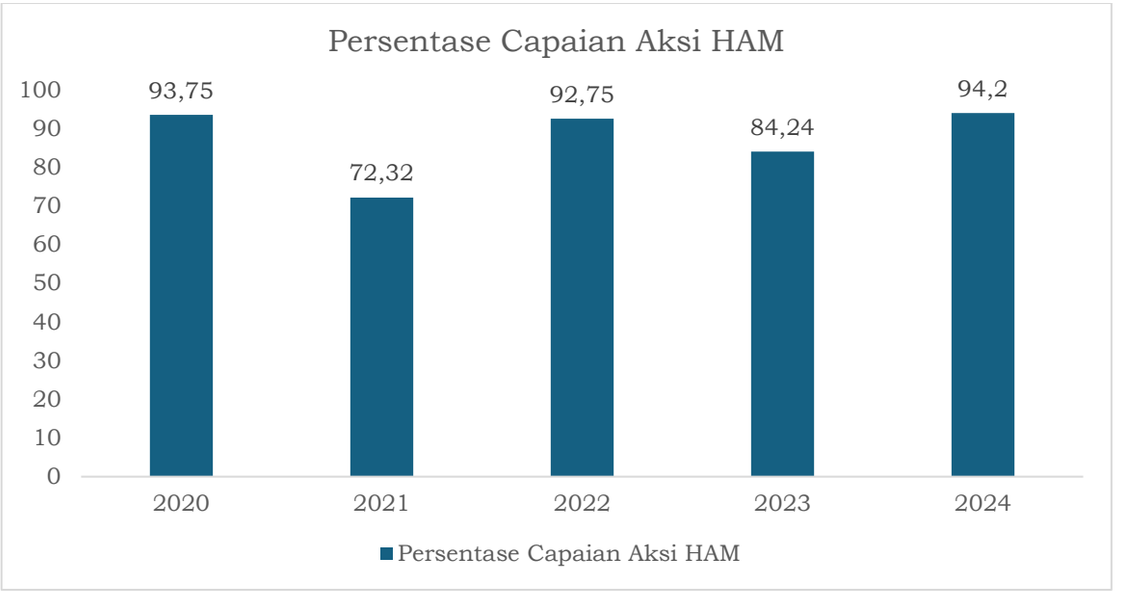
Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025–2029, pelaksanaan Aksi HAM menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Aksi HAM meliputi serangkaian langkah konkret yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pedoman nasional, mencakup penguatan regulasi dan kelembagaan, penyusunan rencana aksi daerah, penyediaan layanan publik berbasis HAM, serta pelibatan masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Persentase capaian Aksi HAM menjadi instrumen ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan aksi tersebut, sekaligus sebagai refleksi dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas lainnya.

Dalam perspektif teknokratik, indikator ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar evaluatif dalam menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu memastikan bahwa pelaksanaan Aksi HAM tidak bersifat seremonial, melainkan menjadi bagian substansial dari perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lintas sektor, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.

Secara politis, pencapaian tinggi terhadap Aksi HAM menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki sensitivitas sosial dan keberpihakan terhadap keadilan sosial, serta mampu membangun legitimasi moral di mata masyarakat. Keberhasilan ini juga menjadi cerminan dari kepemimpinan daerah yang humanis, progresif, dan inklusif, dimana hak setiap individu diakui dan dilindungi oleh kebijakan publik.

Melalui peningkatan capaian Aksi HAM, RPJMD Kabupaten Tulungagung 2025–2029 diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat posisi daerah dalam mendukung Agenda Nasional Pembangunan HAM dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.



Gambar 2. 76 Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

Grafik di atas menggambarkan perkembangan Persentase Capaian Aksi HAM selama lima tahun terakhir di Kabupaten Tulungagung. Secara umum, data menunjukkan capaian yang cukup tinggi, meskipun terdapat fluktuasi signifikan pada tahun-tahun tertentu.

Pada tahun 2020, capaian Aksi HAM berada pada angka 93,75 persen yang menunjukkan komitmen dan kinerja pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sangat baik dalam menjalankan program dan kebijakan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan tajam ke angka 72,32 persen, yang mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan aksi HAM, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, atau gangguan akibat pandemi COVID-19.

Memasuki tahun 2022, capaian persentase aksi HAM Kabupaten Tulungagung kembali meningkat secara signifikan ke angka 92,75 persen yang menunjukkan adanya perbaikan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan langkah-langkah strategis yang lebih efektif. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2023 dengan capaian 84,24 persen, angkanya masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa pelaksanaan Aksi HAM tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Pada tahun 2024, capaian meningkat kembali dan mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 94,20 persen yang mencerminkan penguatan implementasi kebijakan HAM secara konsisten dan berkesinambungan, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi HAM di daerah.

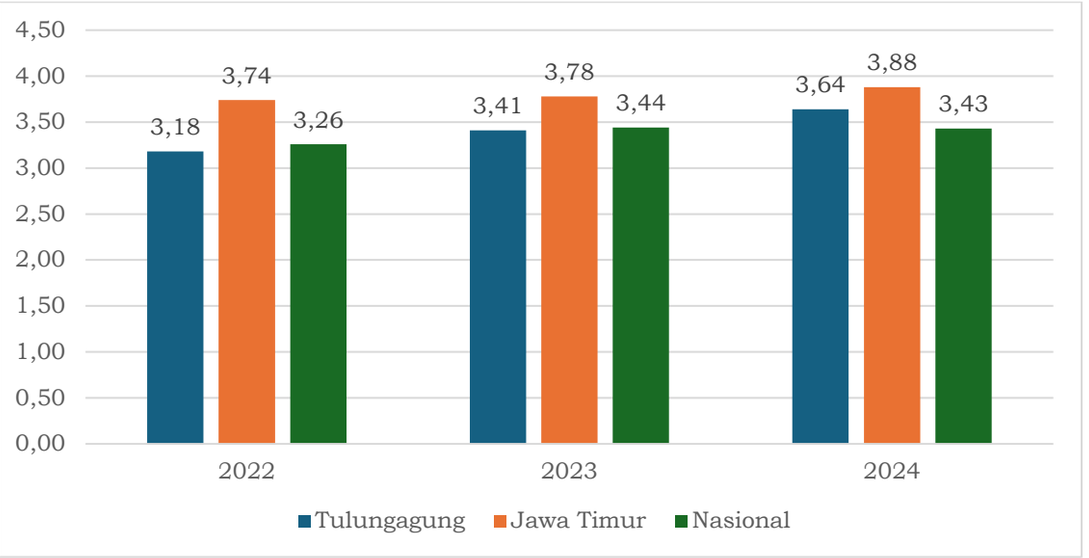
Tren ini secara keseluruhan mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Capaian yang fluktuatif namun cenderung meningkat ini menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pada periode RPJMD 2025–2029, khususnya dalam upaya memastikan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan menghormati martabat setiap individu.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dicerminkan melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan Pembangunan daerah. Daya saing dikaitkan dengan masalah produktivitas. Dalam konteks ini, daya saing sangat menentukan ketangguhan daerah maupun negara.

2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Faktor penentu daya saing kemudian diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Berikut capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2024.



Gambar 2. 77 Skor Indeks Daya Saing Daerah
Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2024

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, skor IDSD Kabupaten Tulungagung berada di bawah meskipun masih sedikit berada di atas nilai nasional. Namun pada beberapa aspek pilar yaitu pilar adopsi TIK, kesehatan, dan ukuran pasar Kabupaten Tulungagung memiliki skor yang lebih besar dibandingkan dengan skor pada tingkat nasional dan skor Provinsi Jawa Timur. Daya saing Kebupaten Tulungagung menunjukkan adanya perubahan semain baik. Hal ini ditandai dengan kenaikan nilai pada IDSD dari skor 3,41 pada tahun 2023 menjadi 3,64 pada tahun 2024. Meskipun Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tulungagung lebih tinggi dibandingkan dengan skor level Nasional, tetapi skor tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan skopr IDSD pada level Provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Tulungagung masih belum optimal.

2.4.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, pemerintah daerah

wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Penyusunan RPJMD ini mengintegrasikan SPM sebagai bagian penting dari arah kebijakan pembangunan daerah dengan memastikan bahwa setiap perangkat daerah yang memiliki urusan wajib pelayanan dasar dapat menyusun strategi pencapaian SPM secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemenuhan SPM tidak hanya menjadi indikator kinerja pelayanan publik, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan pada 6 Bidang Urusan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Berikut merupakan program pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024.

Tabel 2. 49 Capaian Standar Pelayanan Minimal 6 Urusan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
Urusan Pendidikan					
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun	27.358	27.190	99,38
		Buku Gambar			
		Alat Mewarnai			
		Penyediaan biaya personil peserta didik	-	-	-
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1.967	1.763	89,62
		Kualitas tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV	80	17	21,25
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun	138.353	136.461	98,63
		Buku teks pelajaran			
		Perlengkapan belajar			
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1.374	402	29,25
		Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	1.374	687	50

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	5303	5303	100
		Penyediaan biaya personil peserta didik	138.353	38.478	27,9
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	9.116	9.042	99,18
		Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	735	706	96,05
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun	7.008	1.763	25,15
		Modul belajar			
		Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	36	36	100
		Penyediaan biaya personil peserta didik	-	-	-
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	90	90	100
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	29	9	31
		Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	29	20	69
		Perlengkapan belajar			
		PKBM Terakreditasi minimal C	21	12	57,14
Urusan Kesehatan					
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	13.174	13.174	100
		1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	12.505	13.750	109.96
		2. Tablet Tambah Darah	13.174	12.075	91,66
		3. Alat deteksi riisko Ibu Hamil : Test Kehamilan	13.174	13.174	100
		4. Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	13.174	13.174	100
		5. Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	13.174	13.174	100
		6. Alat deteksi risiko Ibu Hamil :	2.345	5.478	233,6

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Pemeriksaan Glukoprotein Urin			
		7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B, Sifilis, dan HIV	13.174	10.951	83,13
		8. Kartu Ibu / Rekam Medis Ibu	13.174	13.969	106,03
		9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.174	13.969	106,03
		10. Media KIE	13.174	13.967	106,02
		11. Gel USG	659	659	100
		12. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	343	343	100
		13. Tenaga kesehatan : Perawat	522	522	100
		14. Tenaga kesehatan : Bidan	522	522	100
		15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	32	32	100
		16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	32	64	100
		17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	15.631	12.745	81,54
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	12.471	12.471	100
		1. Formulir Partograf	12.471	7.812	62,64
		2. Kartu Ibu (rekam medis)	12.471	12.471	100
		3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.471	12.471	100
		4. Media KIE	12.471	10.428	
		5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan	343	343	100
		6. Tenaga kesehatan : Bidan	522	522	100
		7. Tenaga kesehatan : Perawat	522	522	100
		8. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	32	32	100
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	32	64	200

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	12.407	12.407	100
		1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	12.407	12.407	100
		2. Vitamin K1 injeksi	12.407	12.407	100
		3. Salep/tetes mata antibiotik	12.407	12.407	100
		4. Formulir bayi baru lahir	12.407	12.407	100
		5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	12.407	12.407	100
		6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.407	12.407	100
		7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12.407	10.401	83,83
		8. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	343	343	100
		9. Tenaga kesehatan : Bidan	522	522	100
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	522	522	100
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	32	32	100
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	32	32	100
		13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	32	64	200
		14. Kader Kesehatan	6.210	6.210	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58.555	61.668	105,321.
		1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	58.555	61.668	105,32

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	58.555	61.668	105,32
		3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	58.555	61.668	105,32
		4. Vitamin A biru	5.364	10.382	193,55
		5. Vitamin A merah	46.991	91.193	194,06
		6. Vaksin imunisasi dasar : BCG	3.125	3.125	100
		7. Vaksin imunisasi dasar : Polio Tetes	5.581	5.581	100
		8. Vaksin imunisasi dasar : IPV	3.975	3.975	100,009.
		9. Vaksin imunisasi dasar : DPT -HB -Hib	7.230	7.230	100
		10. Vaksin imunisasi dasar : Campak-Rubella	4.529	4.740	104,66
		11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	4.095	7.230	176,56
		12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak-Rubella	4.095	4.347	106,15
		13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	297.334	297.334	100
		14. Peralatan Anafilaktik	271	271	100
		15. Formula Terapi Gizi Buruk	37	37	100
		16. Tenaga kesehatan : Dokter	343	343	100
		17. Tenaga kesehatan : Bidan	522	522	100
		18. Tenaga kesehatan : Perawat	522	522	100
		19. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	64	200
		20. Guru PAUD	616	616	100
		21. Kader Kesehatan	6.210	6.210	100
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	85.589	86.396	100,94
		1. Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	85.589	35.532	41,51
		2. Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	85.589	35.532	41,51
		3. Kuesioner skrining kesehatan	85.589	86.396	100,94
		4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan	85.589	86.396	100,94

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		remaja di dalam sekolah			
		5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	85.589	86.396	100,94
		6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	51.750	52.721	101,88
		7. Alat Pemeriksaan Hb	32	32	100
		8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	19.908	19.908	100
		9. Media promosi kesehatan	32	32	100
		10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	14.398	14.018	97,36
		11. Tenaga medis : Dokter/Dokter Gigi	32	32	100
		12. Tenaga kesehatan : Bidan	271	271	100
		13. Tenaga kesehatan : Perawat	271	271	100
		14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	32	32	100
		15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian			
		16. Tenaga kesehatan : Masyarakat	32	32	100
		17. Tenaga kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	6.686	6.686	100
		18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor	874	874	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	714.420	701.338	98,17
		1. Pedoman dan media komunikasi,	64	64	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Informasi, Edukasi (KIE)			
		2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	303	303	100
		3. Alat : Tensimeter	303	303	100
		4. Alat : Glukometer	303	303	100
		5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	32	32	100
		6. Alat : Tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol	714.420	701.338	98,17
		7. Alat : KIT IVA Tes	32	32	100
		8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	714.420	701.338	98,17
		9. Kit Opthalmologi Komunitas	303	303	100
		10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	32	32	100
		11. Alat Pelayanan KB			
		a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	32	32	100
		b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	32	32	100
		c. Vasectomi Set	1	1	100
		12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	32	32	100
		13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	32	32	100
		14. Tenaga kesehatan : Dokter	522	522	100
		15. Tenaga kesehatan : Bidan	522	522	100
		16. Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100
		17. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	100
		18. Tenaga Kesehatan Masyarakat	1090	1090	100
		19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	714.420	701.338	98,17
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	181.806	178.450	98.15

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	303	303	100
		2. Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	303	303	100
		3. Alat pemeriksaan kolestrol	303	303	100
		4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	181.806	181.806	100
		5. Instrumen Geriatic Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	181.806	181.806	100
		6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	32	32	100
		7. Media KIE	32	32	100
		8. Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	100
		9. Tenaga kesehatan : Bidan	271	271	100
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	271	271	100
		11. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	32	32	100
		12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100
		13. Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	1.224	1.224	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	319.056	280.138	87.80
		1. Pedoman Pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	64	64	100
		2. Obat Hipertensi			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		3. Tensimeter	280	280	100
		4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	280	280	100
		5. Media promosi kesehatan	32	32	100
		6. Tenaga kesehatan : Dokter	343	343	100
		7. Tenaga kesehatan : Bidan	522	522	100
		8. Tenaga kesehatan : Perawat	522	522	100
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	32	32	100
		10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	32	32	100
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	32	32	100
		12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.297	17.308	100,06
		1. Obat Diabetes Melitus	271	271	100
		2. Alat : Glukometer	17.297	17.308	100,06
		3. Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	32	32	100
		4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM	64	64	100
		5. Pedoman dan media KIE	343	343	100
		6. Tenaga kesehatan : Dokter	522	522	100
		7. Tenaga kesehatan : Bidan	522	522	100
		8. Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	32	32	100
		10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100
		11. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	32	32	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		12. Tenaga Kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	17.297	17.308	100,06
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.116	2.116	100
		1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	32	32	100
		2. Penyediaan Psikofarmaka	15	15	100
		3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	32	32	100
		4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	32	32	100
		5. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	32	32	100
		6. Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	100
		7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	32	32	100
		8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	271	271	100
		9. Tenaga profesional lainnya	271	271	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	13.941	14.950	107,24
		1. Media KIE (leaflet,lembar balik,poster,banner)	13.941	13.941	100
		2. Reagen Zn TB	2.582	2.582	100
		3. Masker jenis rumah tangga dan masker N95	2.582	2.582	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		4. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, ether alcohol lampu spiritus/Bunsen, ose/lidi), rak pengering	13.941	13.941	100
		5. Catridge tes cepat molekuler	13.941	13.941	100
		6. Formulir pencatatan dan pelaporan	32	32	100
		7. Pedoman/standar operasional prosedur (SOP)	13.941	13.941	100
		8. Tuberkulin	32	32	100
		9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	32	32	100
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	32	32	100
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	32	32	
		12. Tenaga kesehatan masyarakat	32	32	
		13. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	32	32	100
		14. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	271	271	100
		15. Kader kesehatan	13.941	14.950	107,24
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	18.709	19.342	103,38
		1. Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster , banner	18.709	19.342	103,38
		2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	18.709	19.342	103,38
		3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai	18.709	19.342	103,38
		4. Alat tulis, Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18.709	19.342	103,38

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Pelaksana, Nomor KTP/NIK			
		5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	45	45	100
		6. Tenaga kesehatan : Bidan	45	45	100
		7. Tenaga kesehatan : Perawat	45	45	100
		8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	45	45	100
		9. Tenaga Kesehatan Masyarakat	45	45	100
		10. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	45	45	100
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	12468	12468	100%
		Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60/liter/ orang/hari)	12468	12468	100%
		Kualitas air (keruh,berwarna, beras, berbusa, berbau)	12468	12468	100%
		Jaringan Perpipaan	12468	12468	100%
		Jaringan bukan perpipaan	-	-	-
2.	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air domestik	4052	4052	100%
		Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	4052	4052	100%
		Kualitas pelayanan air limbah domestik	4052	4052	100%
		Sub-sistem pengolahan setempat	4052	4052	100%
		Sub-sistem pengangkutan	-	-	-
		Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	-	-	-
		Pengolahan lumpur	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		tinja (IPAL)			
Urusan Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	0	0	0
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2	2	2
		Pembangunan Kembali Rumah bagi Korban Bencana	0	0	0
		Pembangunan Baru di Lokasi Baru / Relokasi bagi Korban Bencana	0	0	0
		Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Korban Bencana	0	0	0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyatakat yang Terkena Relokasi Program	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0	0	0
		Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0
		Subsidi Uang Sewa	0	0	0
		Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Standar operasional prosedur Satpol PP	17	17	100%
		Standar sarana prasarana Satpol PP	26	26	100%
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	131	117	89,31%
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2.810	2.810	100%
		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya	101	81	81

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		informasi/laporan sampai tiba di lokasi			
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi			2
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi			
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia			43
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	11	9	81,83%
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.127	1.127	100%
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	1.127	1.127	100%
		Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1.163	376	32,33%
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN	Sarana prasarana penanggulangan bencana	141	137	97,16%
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	48	32	66,67%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	2	100%
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1.127	1.127	100%
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	2	2	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	100%
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1.127	1.127	100%
Urusan Sosial					
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1	100.00%
		Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	1	1	100.00%
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	1	1	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	127	127	100.00%
		Penyediaan alat bantu kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	291	291	100.00%
		Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100.00%
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	126	126	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	3	3	100.00%
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	3	3	100.00%
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	3	3	100.00%
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	3	3	100.00%
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	5	5	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	5	5	100.00%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1	100.00%
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	1	1	100.00%
		Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	256	256	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	1	100.00%
		Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100.00%
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	1	1	100.00%
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)			
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	1	100.00%
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	100.00%
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	1	1	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	100.00%
		Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	1	1	100.00%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa	1	1	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial			
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	1	1	100.00%
		Penyediaan permakanan layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari	50	50	100.00%
		Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	1	100.00%
		5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai	35	35	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		dengan kebutuhan penerima disabilitas)			
		Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100.00%
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis	1	1	100.00%
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan	1	1	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		keluarga/masyarakat)			
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	1	100.00%
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	100.00%
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	1	1	100.00%
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	100.00%
		Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	2	2	100.00%
4.					100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	1	1	100.00%
		Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	60	60	100.00%
		Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami	1	1	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)			
		Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100.00%
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	1	1	100.00%
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di	1	1	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		lingkungan keluarga/masyarakat)			
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100.00%
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	1	100.00%
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	1	1	100.00%
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	100.00%
		Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	1	1	100.00%
5.	Perlindungan dan Jaminan	Penyediaan permakanan secara	265	265	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
	Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan			
		Penyediaan sandang pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan	1	1	100.00%
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan	1	1	100.00%
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	1	1	100.00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	265	265	100.00%

2.4.5 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian indikator kinerja kunci (IKK) selama lima tahun terakhir. Berikut capaian kinerja indikator kinerja kunci (IKK) Kabupaten Tulungagung tahun 2020–2024.

Tabel 2. 50 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
ASPEK PELAYANAN UMUM							
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	107,3	100	95.828	98,74	99,10
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	96.865	98,13	98,01
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	101,3	100	131.364	97,99	98,55
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18	%	80,56	100	68.518	77,40	24,39

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,111	0,13	0,1375	0,141	1,26
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	91,70	41,67	84.615	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	89,9	91,26	89.269	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	91,80	92,07	89.301	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	94,30	96,06	91.964	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	75,20	96,73	96.339	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60,10	80,54	86.154	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	53	56,06	90.777	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	70,10	75,51	96.668	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	73,80	18,28	61.426	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	122.250	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	0	0	96.194	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	57	33,98	100.558	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi	%	83,70	59,70	82.067	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	71,10	71,96	71.967	71,96	100
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	100	100	100
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	56,30	100	13.344	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	87,90	93,93	96.938	97,61	98,07
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	96	106,46	5.522	98,65	7,74
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100	100	100
7	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	75,70	100	84.460	74,80	73,30
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	7,42	191,76	33.143	41,71	35,18
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	100	100	100
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	0	100	100	100	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak	%	0	0	0	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	relokasi program pemerintah kabupaten/kota						
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	39.324	20,14	5.734	34,43	97,25
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	1,79	1,66	1.514	1,47	0,255
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,395	89,29	5	86,43	73,01
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT**						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	97,87
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Angka	1.089.780	1.096.590	1.105.340	1.132.144	1.139.224
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Angka	24.084	32.349	40.787	54.230	71.429
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0	976	100	100	1.127
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	36.207	72,88	69.355	81,82	80,19
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	22	11,95	20	10,07	11,29
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	2,24	11,81	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	bencana daerah kabupaten/kota						
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**						
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3,5	0,57	45.492	37,31	0,133
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	1,2	47,77	0,7973 Ket. D	4,54	4.874
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	1,31	1,17	4.297	100	10,45
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	6,6	69,99	90.474	91,36	86,11
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,606	100	1.044	4.245	0,79
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,01	0,03	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%	0,0035	0,71	0,0052	1.589	3,52
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	105,80	502,78	74,89	66,03	39,92
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	9,75	-	100	92,69	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	2,9	-	127.018	132,37	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	-	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	-	100	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0	-	0	0	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	88,5	-	112,5	25	0
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	63,68	63,68	64,88	66,51	66,48
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	29,2	28,47	78.409	99,98	50,42
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	94	13,51	25	10	100
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
1	Perekaman KTP elektronik	%	98,60	96,11	95.813	99,21	98,19
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,27	39,89	48.510	59,07	57,50
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	95,12	94,92	97.247	98,35	98,86
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	16,9	4	8	14,28	100
G	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	-	100	100	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,69	1,36	24.757	100	72,72
H	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,02	2,15	2,03	1,97	1,93
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	75	75,14	56.074	71,12	71,44
3	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,47	10,47	8.257	11,12	7,29
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	100	100	100	1	1
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	70,40	0,49	0,44	0,36	0,44
J	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	0	100	100	0
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	22,95	100	85.714	85,71	85,71
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	0,0015	87,48	78.263	81,59	21,99
K	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	31,14	22,96	34.630	36,02	13,14
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	5,79	3,54	8.828	17,53	9,10
L	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						
1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	%	-31,1	-40,48	15,57	1,54	-6,21
M	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,02	0,053	0,0532	0,18	5,68
2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,127	0,053	20,8211	28,68	4,95
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	8 Perak dan 5 Perunggu	3 Medali	37 Medali	0 Medali	8
N	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
O	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
P	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Nilai	100	100	90,6054	100	100
Q	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	66,47	67,33	67,41	67,7	68,1
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin		62,77	62,46	64,33	67,32
R	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab an nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	1942,75	506,5	689,25	100	100
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	129,17	146,5	961,333	100	100
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN**						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	42200690,29	4465998	130,76%	120,01%	101,43%
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						
1	persentase Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-98,6	633,3	331,8182	193,68	48,38
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota	%	-17,9	-57,18	223,9905	30,63	-21,23
3	Tingkat hunian akomodasi	%	115,72	100	100	100	100
4	Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	428974,176	1,1355	1,1355	3,1	3,2
5	Konstribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	11348883887	1,35	3,6168	3,69	4,78
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	1,13	795,72	785,3836	695,55	751,47

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular persentase kasus zoonosis kab/kota	%	2,01	186,02	-1,4167	-29,45	-28,91
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0	-	100	100	0
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan	%	100	92,16	93,6508	93,89	100
2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	%	54,7	61,74	22,6313	97,58	75,18
3	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	87,28	94,14	42,1815	128,53	100
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	0,76	5,35	0,9939	1,01	4,71
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	50	50	50	50
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang	%	0	-	0	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dikeluarkan oleh instansi terkait						
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	%	0	-	0	0	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	-	-	100	100	95
IV	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
A	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	9,743	11,96	10,2913	11,05	10,47
2	Rasio PAD	%	20,87	22,43	20,9786	22,37	23,46
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1	3	3,206	3,118	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	2	2,26	2,61	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum expenditures	%	85,481	71,129	65,67	72,12	78,88
6	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
B	**PENGADAAN**						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yangdilakukan dengan metode kompetitif	%	26,6	41,45	34,466	14,95	56,35
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	17,565	20	54,4896	35,82	39,92
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan	%			41,1449	21,69	78,97

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah						
C	**KEPEGAWAIAN**						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	145,1	181,51	64,4957	65,35	70,53
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	4,9	15,01	18,2463	19,11	19,97
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	13,68	82,83
D	**MANAJEMEN KEUANGAN**						
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	95,66	9,88	9,2577	5,31	2,78
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	114,32	118,76	15,8033	27,49	19,85
	Manajemen Aset 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Nilai	Ya	Ya	Ya	Ya	4
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	17,142	26,45	15,638	19,14	10,356
E	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	0	103,54	96,145	98,55	97,36

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	(Information on resources available to frontline service delivery units)						
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	8,33	100	72,73	72,73	100

Sumber: Data Diolah, 2025

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis gambaran keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang akurat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan serta menyelesaikan permasalahan strategis secara tepat, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

Analisis gambaran keuangan daerah ini dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu: (i) realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan (ii) proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026–2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan terbaru, serta kondisi lingkungan yang dinamis. Penjelasan masing-masing bagian akan diuraikan secara rinci pada bagian berikutnya.

2.5.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Tulungagung periode 2020-2024 digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan ketiga komponen tersebut dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Analisis ini diperlukan sebagai dasar untuk proyeksi keuangan daerah. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu yang sedang berjalan, maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

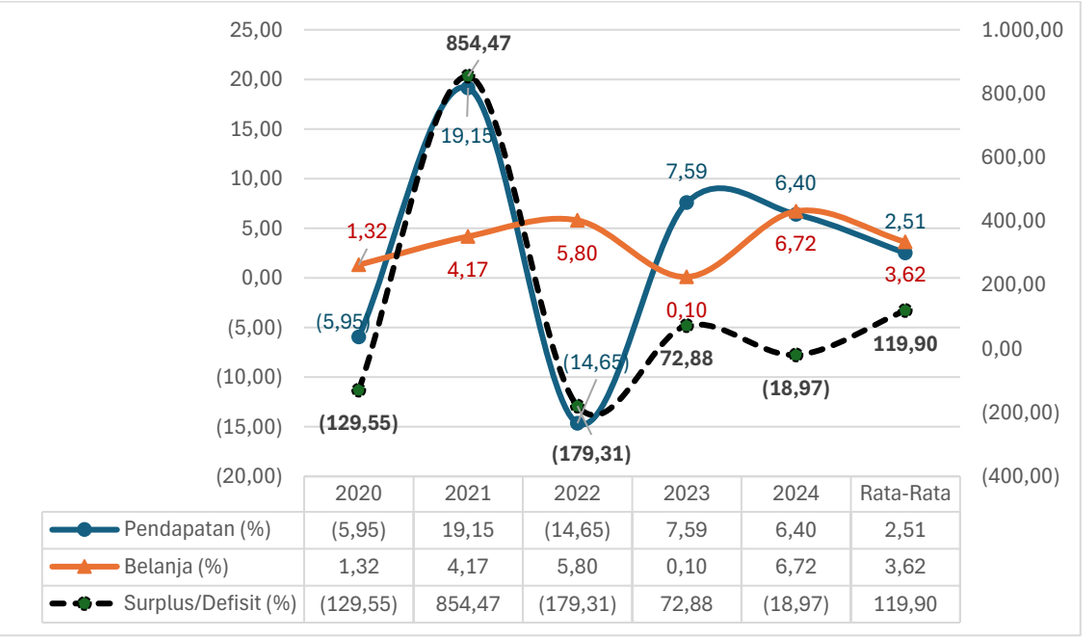
Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung selama periode 2020–2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 51 Realisasi APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**PENDAPATAN**					
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	510.549.330.895,00	953.892.026.424,00	577.544.166.625,00	719.585.859.367,36	709.807.139.657,06
1.2	Pendapatan Transfer	1.993.289.537.476,00	2.051.224.047.043,00	2.064.526.415.823,00	2.123.406.273.812,00	2.315.188.672.023,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94.483.185.810,00	90.859.246.900,00	408.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.598.322.054.181,00**	**3.095.975.320.367,00**	**2.642.478.582.448,00**	**2.842.992.133.179,36**	**3.024.995.811.680,06**
2.	**BELANJA**					
2.1	Belanja Operasi	1.881.525.437.967,32	2.064.101.812.477,69	2.141.914.216.517,53	2.244.987.468.837,54	2.457.379.110.248,38
2.2	Belanja Modal	246.376.998.498,80	288.291.855.548,78	352.048.362.950,98	254.914.441.674,65	236.264.000.863,03
2.3	Belanja Tak Terduga	131.911.563.936,00	17.151.113.610,00	1.228.684.101,00	990.984.500,00	1.159.058.237,00
2.4	Belanja Transfer	383.835.522.800,00	384.447.586.791,00	418.497.246.772,00	415.661.883.162,00	417.711.766.325,00
	JUMLAH BELANJA	**2.643.649.523.202,12**	**2.753.992.368.427,47**	**2.913.688.510.341,51**	**2.916.554.778.174,19**	**3.112.513.935.673,41**
	Surplus/(Defisit)	**(45.327.469.021,12)**	**341.982.951.939,53**	**(271.209.927.893,51)**	**(73.562.644.994,83)**	**(87.518.123.993,35)**
3.	**PEMBIAYAAN**					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	505.544.089.424,85	447.279.780.403,41	782.262.732.342,38	477.597.953.760,37	424.028.501.916,56
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.936.840.000,00	7.000.000.000,00	33.454.850.688,40	30.000.000.000,00	15.400.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**492.607.249.424,85**	**440.279.780.403,41**	**748.807.881.653,98**	**447.597.953.760,37**	**408.628.501.916,56**
	SILPA	**447.279.780.403,73**	**782.262.732.342,94**	**477.597.953.760,47**	**374.035.308.765,54**	**321.110.377.923,21**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Tulungagung 2020-2024

Dalam kurun waktu 2020-2024, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah mencapai 2,51 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah sebesar 3,62 persen. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan, yang dapat berdampak pada defisit anggaran.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Pendapatan (%)	(5,95)	19,15	(14,65)	7,59	6,40	2,51
Belanja (%)	1,32	4,17	5,80	0,10	6,72	3,62
Surplus/Defisit (%)	(129,55)	854,47	(179,31)	72,88	(18,97)	119,90

Gambar 2. 78 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp2.598,32 miliar pada 2020 menjadi Rp3.095,98 miliar pada 2021 dengan pertumbuhan 19,15 persen. Namun, pada 2022, pendapatan menurun cukup tajam menjadi Rp2.642,48 miliar atau turun 14,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, terjadi kenaikan kembali menjadi Rp2.842,99 miliar dengan pertumbuhan 7,59 persen, dan pada 2024 naik menjadi Rp3.025,00 miliar dengan pertumbuhan 6,40 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan relatif tidak stabil dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan per tahun hanya 2,51 persen.

Belanja daerah mengalami kenaikan setiap tahun, dari Rp2.643,65 miliar pada 2020 menjadi Rp3.112,51 miliar pada 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja per tahun sebesar 3,62 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan. Lonjakan belanja yang cukup besar terjadi pada 2022 sebesar 5,80 persen dan 2024 sebesar 6,72 persen yang menunjukkan adanya peningkatan belanja program prioritas atau peningkatan belanja wajib.

Pada 2020, terdapat defisit sebesar Rp45,33 miliar yang kemudian berbalik menjadi surplus Rp341,98 miliar pada 2021 dengan peningkatan 854,47 persen. Namun, pada 2022 terjadi defisit besar sebesar Rp271,25 miliar, turun 179,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, defisit mengecil menjadi Rp73,56 miliar, tetapi

kembali meningkat pada 2024 menjadi Rp87,52 miliar. Rata-rata defisit sebesar 119,90 persen menunjukkan volatilitas tinggi dalam keseimbangan keuangan daerah yang berarti surplus dan defisit anggaran mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah maupun persentasenya.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa fluktuasi pendapatan mengindikasikan ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak stabil akibat adanya faktor eksternal, seperti kebijakan transfer dana pusat dan realisasi PAD yang tidak konsisten. Belanja yang terus meningkat tanpa pertumbuhan pendapatan yang seimbang dapat menyebabkan tekanan fiskal. Defisit yang berulang pada 2022, 2023, dan 2024 menunjukkan bahwa belanja lebih besar daripada pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan lain, terutama melalui optimalisasi PAD, serta menerapkan strategi efisiensi belanja agar tidak semakin membebani keuangan daerah.

2.5.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

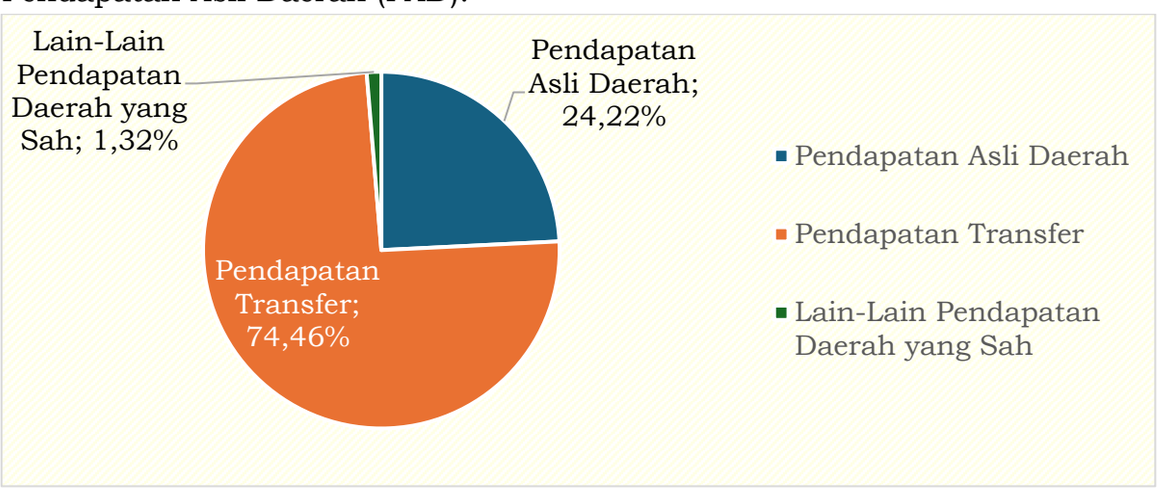
Tabel 2. 52 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**PENDAPATAN**					
1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**510.549.330.895,00**	**953.892.026.424,00**	**577.544.166.625,00**	**719.585.859.367,36**	**709.807.139.657,06**
1.1.1	Pajak Daerah	93.357.599.038,00	112.058.312.343,00	133.576.824.382,00	138.720.787.462,00	167.248.859.979,00
1.1.2	Retribusi Daerah	22.413.998.868,00	20.602.266.523,00	18.081.749.300,00	19.012.194.023,00	520.953.024.576,87
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.745.450.183,00	6.400.865.515,00	6.460.163.498,00	6.953.571.109,50	7.247.861.023,38
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	388.032.282.806,00	814.830.582.043,00	419.425.429.445,00	554.899.306.772,86	14.357.394.077,81
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.993.289.537.476,00**	**2.051.224.047.043,00**	**2.064.526.415.823,00**	**2.123.406.273.812,00**	**2.315.188.672.023,00**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.826.518.296.334,00	1.830.131.194.880,00	1.853.764.717.475,00	1.874.400.107.491,00	2.059.955.245.348,00
1.2.2	Transfer antar – daerah	166.771.241.142,00	221.092.852.163,00	210.761.698.348,00	249.006.166.321,00	255.233.426.675,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**94.483.185.810,00**	**90.859.246.900,00**	**408.000.000,00**	**-**	**-**
1.3.1	Pendapatan Hibah	94.483.185.810,00	90.859.246.900,00	408.000.000,00	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.598.322.054.181,00**	**3.095.975.320.367,00**	**2.642.478.582.448,00**	**2.842.992.133.179,36**	**3.024.995.811.680,06**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Tulungagung 2020-2024

Berdasarkan data capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam periode 2020-2024, terlihat bahwa pendapatan daerah secara umum mengalami pertumbuhan positif, meskipun terdapat fluktuasi dalam perkembangannya. Kenaikan terbesar terjadi pada 2021 dengan pertumbuhan 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, atau dari Rp2.598,32 miliar pada 2020 naik menjadi Rp3.095,98 miliar pada 2021. Kondisi ini menandakan adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penurunan drastis pada 2022 sebesar 14,65 persen menunjukkan bahwa pertumbuhan sebelumnya tidak sepenuhnya berkelanjutan dan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Meskipun demikian, tren pemulihan pada 2023 dan 2024 dengan kenaikan masing-masing 7,59 persen dan 6,40 persen menunjukkan adanya upaya perbaikan dan stabilisasi pendapatan daerah.

Dari sisi struktur pendapatan, Pendapatan Transfer tetap menjadi sumber utama penerimaan daerah dengan rata-rata kontribusi 74,46 persen terhadap total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer masih sangat tinggi, sehingga daerah perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui penguatan PAD. Kontribusi tertinggi pada 2022 sebesar 78,14 persen mencerminkan besarnya peran kebijakan fiskal nasional dalam mendukung keuangan daerah. Namun, kontribusi Pendapatan Transfer sempat menurun pada 2021 menjadi 66,24 persen yang disebabkan oleh lonjakan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 2. 79 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

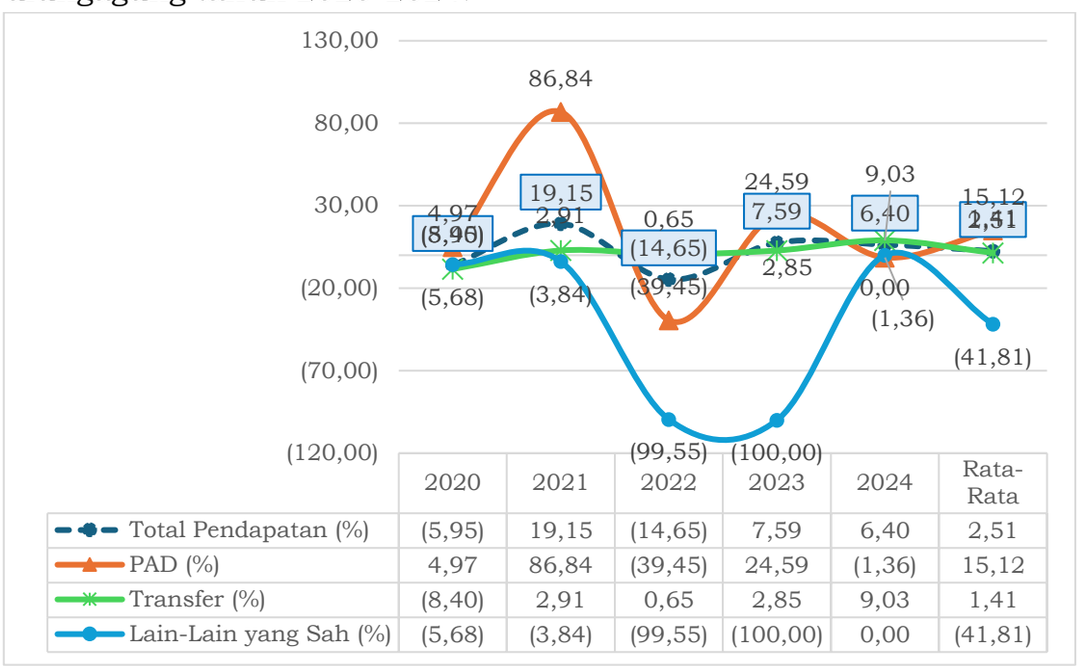
Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi sekitar 24,22 persen. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah meningkat signifikan pada 2021 (dari 19,65 persen pada 2020 menjadi 30,80 persen). Namun, kontribusi Pendapatan Asli Daerah kembali turun pada 2022 (21,86 persen) dan cenderung stagnan pada 2023–2024. Fluktuasi dalam PAD menunjukkan ketidakstabilan sumber pendapatan, sehingga perlu ada

optimalisasi sumber pendapatan daerah, seperti *updating* data potensi pajak, penguatan sektor retribusi dan pengelolaan aset daerah.

Di sisi lain, kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami tren penurunan signifikan dari 3,64 persen pada 2020 menjadi 0 persen pada 2023-2024. Hilangnya sumber pendapatan ini mencerminkan keterbatasan fleksibilitas daerah dalam mencari sumber pendapatan alternatif, sehingga keuangan daerah masih bergantung pada Pendapatan Transfer dan PAD. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa daerah perlu lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan alternatif, misalnya melalui kerja sama dengan sektor swasta, optimalisasi pemanfaatan aset daerah atau inovasi kebijakan pendapatan lainnya

Secara keseluruhan, meskipun pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan dalam jangka panjang, fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa stabilitas fiskal masih menjadi tantangan utama bagi Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan inovatif dalam pengelolaan pendapatan daerah, guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika pendapatan daerah, berikut ini disajikan data perkembangan realisasi pertumbuhan dari masing-masing komponen pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Total Pendapatan (%)	(5,95)	19,15	(14,65)	7,59	6,40	2,51
PAD (%)	4,97	86,84	(39,45)	24,59	(1,36)	15,12
Transfer (%)	(8,40)	2,91	0,65	2,85	9,03	1,41
Lain-Lain yang Sah (%)	(5,68)	(3,84)	(99,55)	(100,00)	0,00	(41,81)

Gambar 2. 80 Pertumbuhan Masing-masing Komponen Pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung dalam periode 2020-2024, terlihat bahwa PAD mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Lonjakan signifikan pada 2021 sebesar 86,84 persen menunjukkan adanya dorongan besar dari sektor-sektor pendapatan daerah. Namun, penurunan drastis pada 2022 sebesar 39,45 persen mengindikasikan bahwa kenaikan PAD sebelumnya tidak bersifat berkelanjutan. Meskipun pada 2023 kembali

meningkat sebesar 24,59 persen, tren negatif pada 2024 dengan penurunan 1,36 persen menunjukkan bahwa PAD masih rentan terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal. Fluktuasi ini menegaskan bahwa sumber PAD masih belum stabil, terutama karena pengaruh faktor eksternal, termasuk komponen Lain-lain PAD yang Sah.

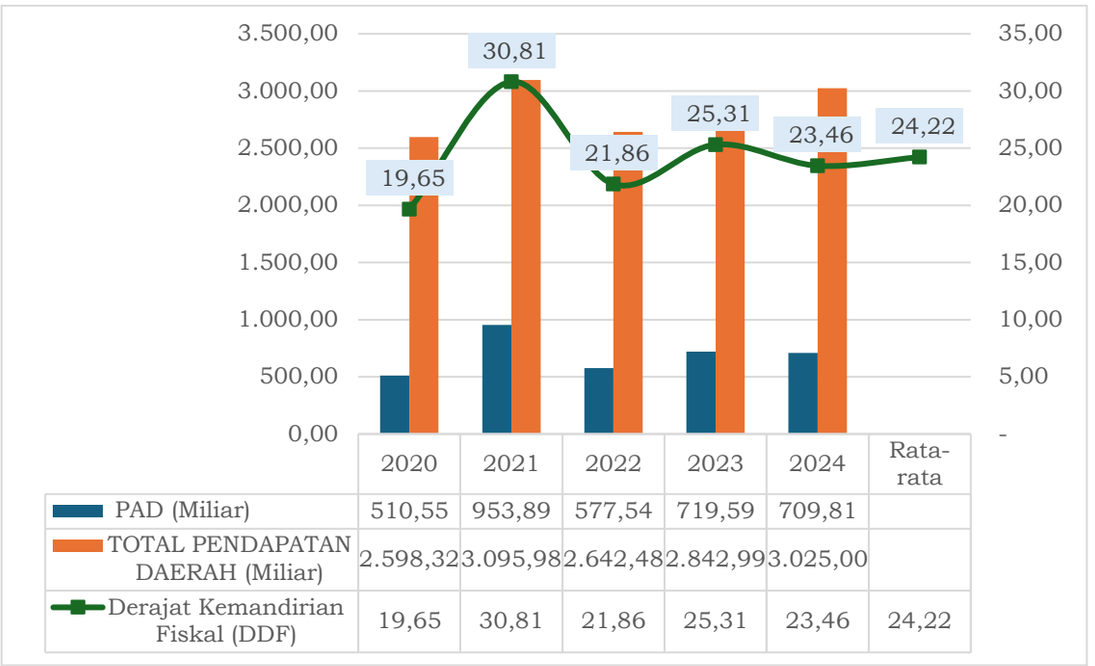
Di sisi lain, Pendapatan Transfer menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan PAD dengan rata-rata kenaikan 1,41 persen per tahun. Kenaikan tertinggi pada 2024 sebesar 9,03 persen mengindikasikan peningkatan dukungan fiskal dari pemerintah pusat yang dapat disebabkan oleh kebijakan alokasi dana transfer yang lebih besar. Sebaliknya, pertumbuhan terendah pada 2022 sebesar 0,65 persen kemungkinan besar terkait dengan penyesuaian kebijakan fiskal nasional atau perubahan dalam APBN.

Sementara itu, pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan drastis dari Rp94,48 miliar pada 2020 menjadi Rp0 miliar pada 2023 dan 2024. Hilangnya sumber pendapatan ini menunjukkan berkurangnya alternatif pendapatan daerah yang sebelumnya diperoleh dari hibah dan dana bagi hasil tertentu. Penurunan ini juga menandakan bahwa Tulungagung semakin bergantung pada Pendapatan Transfer, sekaligus memperlihatkan keterbatasan daerah dalam mengembangkan sumber pendapatan lain.

Secara keseluruhan, meskipun Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan, pola fluktuatif dalam PAD dan hilangnya sumber pendapatan lain-lain menunjukkan tantangan dalam kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, perlu strategi penguatan PAD yang lebih berkelanjutan, misalnya dengan diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi retribusi daerah, dan peningkatan kapasitas fiskal agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat.

Untuk melihat tingkat kemandirian atau derajat desentralisasi fiskal (DDF) dan tingkat ketergantungan Kabupaten Tulungagung dalam menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan. Analisis derajat desentralisasi fiskal (DDF) dan rasio ketergantungan (RK) menggambarkan tingkat kemandirian dan ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain.

Untuk derajat kemandirian fiskal (DDF) daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi: (1) Sangat Kurang (DDF ≤ 10,00); (2) Kurang (10,00 < DDF ≤ 20,00); (3) Sedang (20,00 < DDF ≤ 30,00); (4) Cukup Baik (30,00 < RK ≤ 40,00); (5) Baik (40,00 < DDF ≤ 50,00); dan (6) Sangat Baik (DDF > 50,00). Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka kemandirian daerah semakin besar. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah Kabupaten Tulungagung 2020-2024.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
PAD (Miliar)	510,55	953,89	577,54	719,59	709,81	
TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Miliar)	2.598,32	3.095,98	2.642,48	2.842,99	3.025,00	
Derajat Kemandirian Fiskal (DDF)	19,65	30,81	21,86	25,31	23,46	24,22

Gambar 2. 81 Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Olah Data 2025

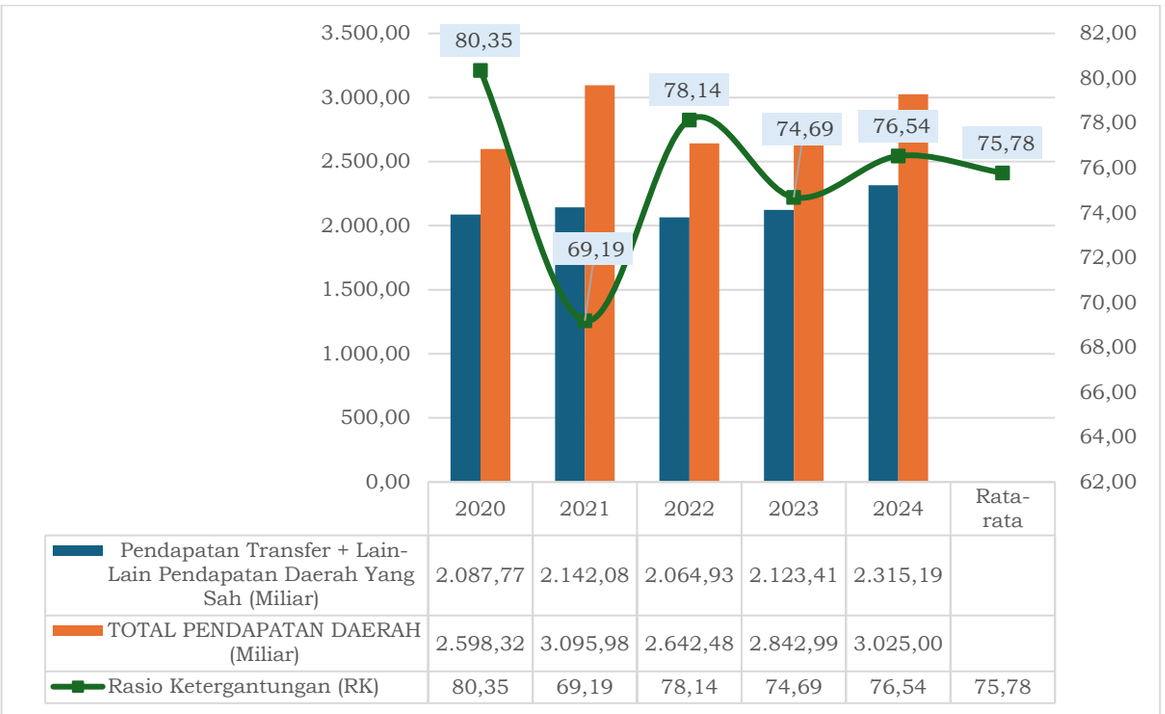
Berdasarkan data Derajat Kemandirian Fiskal (DDF) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, DDF tercatat sebesar 19,65 persen yang termasuk dalam kategori Kurang (10,00 < DDF ≤ 20,00). Selanjutnya, pada tahun 2021, DDF meningkat signifikan menjadi 30,81 persen, sehingga masuk dalam kategori Sedang (20,00 < DDF ≤ 30,00). Namun, pada tahun 2022, DDF kembali mengalami penurunan menjadi 21,86 persen, masih dalam kategori Sedang. Pada tahun 2023, DDF sedikit meningkat menjadi 25,31 persen, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 23,46 persen, yang juga berada dalam kategori Sedang.

Rata-rata DDF selama lima tahun tersebut adalah 24,22 persen yang menunjukkan bahwa secara umum, tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Tulungagung berada dalam kategori Sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah cukup meningkat pada beberapa tahun tertentu, Kabupaten Tulungagung masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, diversifikasi sumber pendapatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui strategi yang tepat diharapkan DDF dapat meningkat ke kategori Cukup Baik atau lebih tinggi di masa mendatang, sehingga ketergantungan

terhadap dana transfer semakin berkurang dan kapasitas fiskal daerah semakin kuat.

Rasio Ketergantungan (RK) Fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan proporsi dana transfer ditambah dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: (1) Sangat Rendah (RK ≤ 10,00); (2) Rendah (10,00 < RK ≤ 20,00); (3) Sedang (20,00 < RK ≤ 30,00); (4) Cukup Tinggi (30,00 < RK ≤ 40,00); (5) Tinggi (40,00 < RK ≤ 50,00); dan (6) Sangat Tinggi (RK > 50,00). Semakin tinggi angka RK, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Berikut adalah grafik rasio ketergantungan daerah Kabupaten Tulungagung 2020-2024.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Pendapatan Transfer + Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Miliar)	2.087,77	2.142,08	2.064,93	2.123,41	2.315,19	
TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Miliar)	2.598,32	3.095,98	2.642,48	2.842,99	3.025,00	
Rasio Ketergantungan (RK)	80,35	69,19	78,14	74,69	76,54	75,78

Gambar 2. 82 Rasio Ketergantungan (RK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan data Rasio Ketergantungan (RK) Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama periode 2020 hingga 2024 dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal daerah ini tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh RK yang selalu berada di atas 50,00 persen, dengan rata-rata RK sebesar 75,78 persen.

Pada tahun 2020, RK tercatat sebesar 80,35 persen, yang mencerminkan dominasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam struktur pendapatan daerah. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan RK menjadi 69,19 persen, angka ini masih menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2024, RK mengalami fluktuasi, yaitu 78,14 persen pada 2022, 74,69 persen pada 2023, dan 76,54 persen pada 2024.

Secara umum, dengan RK yang berkisar antara 69,19 persen hingga 80,35 persen, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tulungagung masih sangat bergantung pada dana transfer dan pendapatan lain-lain yang sah untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Ketergantungan fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas PAD, seperti optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta pengembangan potensi ekonomi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung yang meningkat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Untuk memahami realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah, berikut disajikan data realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.

Tabel 2. 53 Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pajak Daerah	93.357.599.038,00	112.058.312.343,00	133.576.824.382,00	138.720.787.462,00	167.248.859.979,00
2.	Retribusi Daerah	22.413.998.868,00	20.602.266.523,00	18.081.749.300,00	19.012.194.023,00	520.953.024.576,87
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.745.450.183,00	6.400.865.515,00	6.460.163.498,00	6.953.571.109,50	7.247.861.023,38
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	388.032.282.806,00	814.830.582.043,00	419.425.429.445,00	554.899.306.772,86	14.357.394.077,81
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**510.549.330.895,00**	**953.892.026.424,00**	**577.544.166.625,00**	**719.585.859.367,36**	**709.807.139.657,06**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Tulungagung 2020-2024

Dalam periode 2020 hingga 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan tren yang beragam di setiap komponennya. Pajak Daerah mengalami pertumbuhan yang cukup stabil dari Rp93,36 miliar pada 2020 menjadi Rp167,25 miliar pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas dalam pemungutan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta kemungkinan adanya perluasan basis pajak. Sebagai sumber pendapatan yang cenderung stabil, Pajak Daerah menjadi salah satu komponen utama dalam struktur PAD yang dapat diandalkan untuk menopang keuangan daerah.

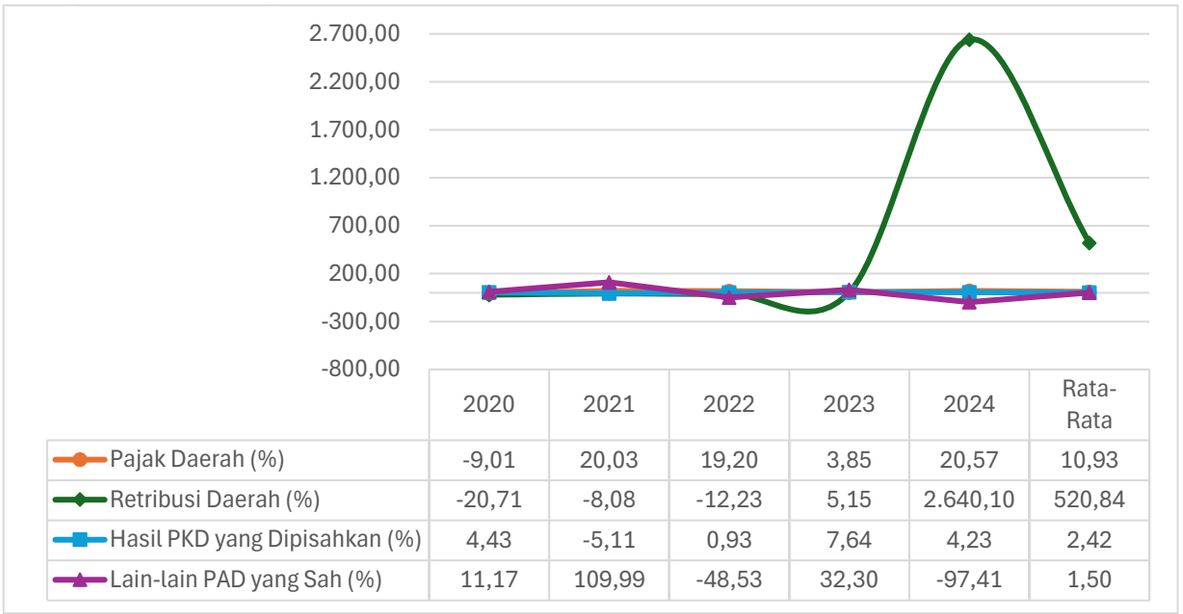
Di sisi lain, Retribusi Daerah mengalami tren yang berfluktuasi. Dalam rentang 2020 hingga 2022, pendapatan dari retribusi terus mengalami penurunan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti, penurunan layanan publik yang dikenai retribusi sebagai dampak COVID-19, atau kondisi ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Namun, pada tahun 2024, Retribusi Daerah mengalami lonjakan tajam hingga mencapai Rp520,96 miliar. Kenaikan drastis ini kemungkinan besar merupakan dampak dari perubahan kebijakan yang mengalihkan pos pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari Lain-lain PAD yang Sah menjadi bagian dari Retribusi Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) No. 1 Tahun 2020. Meskipun kenaikan ini sangat signifikan, perlu adanya evaluasi lebih lanjut agar penerimaan dari retribusi dapat lebih stabil dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan pertumbuhan kecil dari Rp6,45 miliar pada 2020 menjadi Rp7,65 miliar pada 2024. Meskipun tidak mengalami fluktuasi besar, kontribusinya terhadap total PAD masih tergolong kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masih belum optimal dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan profitabilitas aset daerah, baik melalui optimalisasi manajemen BUMD maupun pemanfaatan aset daerah melalui kerja sama yang menguntungkan pemerintah daerah.

Salah satu komponen PAD yang mengalami fluktuasi paling tajam adalah Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2021, pendapatan dari sumber ini mencapai puncaknya di angka Rp814,83 miliar, namun kemudian mengalami penurunan drastis hingga hanya mencapai Rp14,35 miliar pada 2024 sebagai dampak perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Lonjakan yang terjadi pada 2021 kemungkinan besar berasal dari pendapatan insidental, seperti hibah, denda, atau penerimaan dari kerja sama yang bersifat sementara. Namun, turunnya pendapatan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan tersebut tidak dapat diandalkan secara konsisten untuk mendukung keuangan daerah. Ketergantungan pada penerimaan yang

tidak stabil ini dapat menjadi risiko bagi keberlanjutan fiskal daerah, sehingga pemerintah perlu mencari strategi alternatif untuk menyeimbangkan struktur PAD.

Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika penerimaan daerah, berikut disajikan data pertumbuhan dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah tahun 2020-2024.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Pajak Daerah (%)	-9,01	20,03	19,20	3,85	20,57	10,93
Retribusi Daerah (%)	-20,71	-8,08	-12,23	5,15	2.640,10	520,84
Hasil PKD yang Dipisahkan (%)	4,43	-5,11	0,93	7,64	4,23	2,42
Lain-lain PAD yang Sah (%)	11,17	109,99	-48,53	32,30	-97,41	1,50

Gambar 2. 83 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Aslli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Dalam lima tahun terakhir, Pajak Daerah menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Kontribusinya terhadap PAD mengalami peningkatan yang konsisten, dari Rp93,36 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp167,25 miliar pada tahun 2024. Setelah mengalami kontraksi sebesar minus 9,01 persen pada tahun 2020, Pajak Daerah mengalami pemulihan dengan pertumbuhan signifikan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar 20,03 persen dan 19,20 persen. Namun, pada tahun 2023, laju pertumbuhan sempat melambat menjadi 3,85 persen sebelum kembali meningkat menjadi 20,57 persen pada tahun 2024. Stabilitas ini mencerminkan pentingnya Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang.

Berbeda dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah mengalami fluktuasi yang sangat ekstrem dalam lima tahun terakhir. Dari tahun 2020 hingga 2022, penerimaan dari retribusi mengalami tren negatif berturut-turut sebesar minus 20,71 persen, minus 8,08 persen, dan minus 12,23 persen, yang mencerminkan adanya penurunan dalam pemungutan retribusi atau penurunan layanan yang dikenai retribusi. Namun, pada tahun 2023, Retribusi Daerah mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 5,15 persen. Lonjakan luar biasa terjadi pada tahun 2024 dengan pertumbuhan mencapai 2.640,10 persen, sehingga kontribusinya terhadap total PAD meningkat drastis

menjadi 73,39 persen. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan yang mengalihkan pos pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari Lain-lain PAD yang Sah menjadi bagian dari Retribusi Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Nomor 1 Tahun 2020.

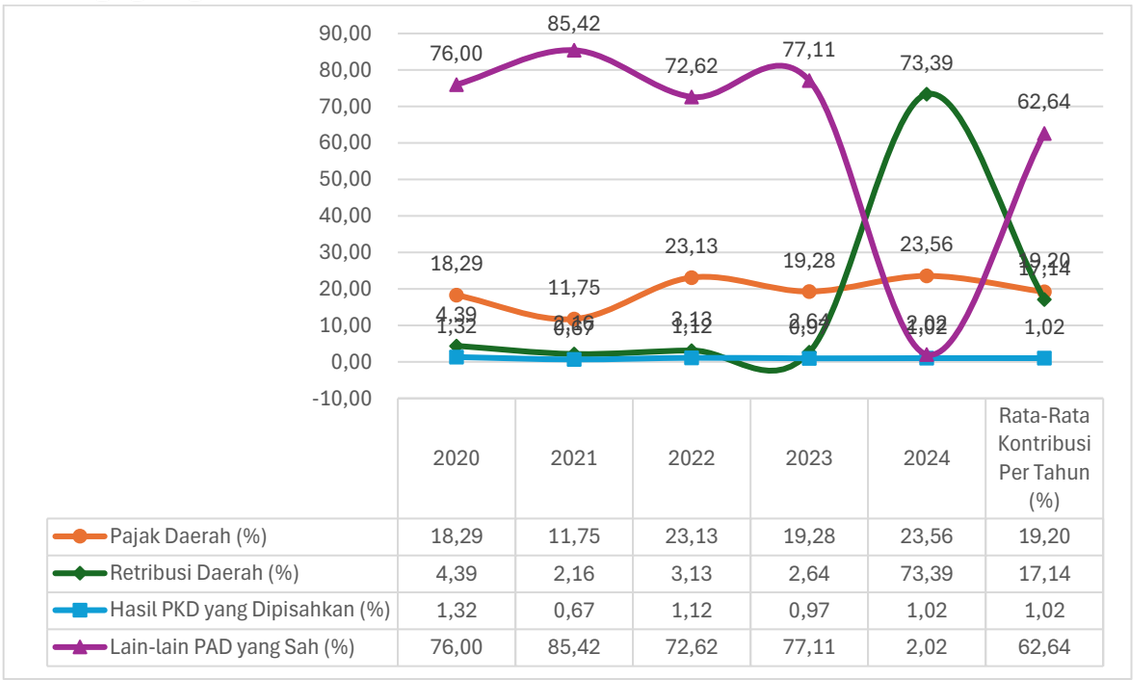
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan tren yang relatif stabil meskipun pertumbuhannya kecil. Dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,42 persen dalam lima tahun terakhir, komponen ini sempat mengalami kontraksi sebesar minus 5,11 persen pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022, pertumbuhannya kembali positif dengan angka 0,93 persen pada tahun 2022, 7,64 persen pada tahun 2023, dan 4,23 persen pada tahun 2024. Meskipun kontribusinya terhadap total PAD masih kecil, stabilitasnya menjadikannya salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan dalam jangka panjang. Namun, mengingat potensi pertumbuhannya yang terbatas, pemerintah daerah perlu mencari cara untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.

Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen yang mengalami fluktuasi paling tajam. Meskipun rata-rata pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir hanya sebesar 1,50 persen, perubahan dari tahun ke tahun sangat ekstrem. Pada tahun 2021, pendapatan dari komponen ini mencapai puncaknya dengan pertumbuhan 109,99 persen, menghasilkan penerimaan sebesar Rp814,83 miliar. Namun, pada tahun 2022 penerimaannya mengalami kontraksi tajam sebesar minus 48,53 persen, meskipun sempat kembali tumbuh pada tahun 2023 dengan kenaikan 32,30 persen. Pada tahun 2024 Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan yang sangat drastis hingga minus 97,41 persen, dengan penerimaan hanya mencapai Rp14,35 miliar. Akibat fluktuasi ini, kontribusi komponen ini terhadap PAD menurun drastis dari 85,43 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 2,02 persen pada tahun 2024. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan tersebut sangat bergantung pada penerimaan insidental, seperti hibah atau pendapatan yang tidak berulang, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah yang stabil.

Secara keseluruhan, meskipun PAD menunjukkan tren pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, ketidakstabilan pada beberapa komponennya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Pajak Daerah tetap menjadi sumber pendapatan yang paling stabil dan perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi Daerah mengalami lonjakan luar biasa pada tahun 2024 akibat perubahan kebijakan, tetapi perlu dievaluasi lebih lanjut agar penerimaannya dapat lebih stabil dan tidak bergantung pada perubahan kebijakan semata. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki potensi untuk ditingkatkan, mengingat pertumbuhannya yang stabil tetapi masih kecil. Terakhir,

Lain-lain PAD yang Sah sangat fluktuatif dan belum dapat dijadikan sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengadopsi strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam mengelola PAD guna memastikan stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.

Untuk memahami kontribusi masing-masing komponen terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD), berikut disajikan grafik proporsi komponen PAD terhadap PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Kontribusi Per Tahun (%)
Pajak Daerah (%)	18,29	11,75	23,13	19,28	23,56	19,20
Retribusi Daerah (%)	4,39	2,16	3,13	2,64	73,39	17,14
Hasil PKD yang Dipisahkan (%)	1,32	0,67	1,12	0,97	1,02	1,02
Lain-lain PAD yang Sah (%)	76,00	85,42	72,62	77,11	2,02	62,64

Gambar 2. 84 Proporsi Komponen PAD Terhadap Terhadap PAD (%), Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Dalam lima tahun terakhir, proporsi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pajak Daerah berkontribusi secara relatif stabil terhadap total PAD, dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 19,20 persen. Meskipun sempat mengalami penurunan hingga 11,75 persen pada 2021, proporsi Pajak Daerah kembali meningkat hingga mencapai 23,56 persen pada 2024.

Di sisi lain, Retribusi Daerah mengalami perubahan yang sangat drastis. Hingga 2023, kontribusinya terhadap total PAD cenderung rendah dan fluktuatif, berkisar antara 2,16 persen hingga 4,39 persen. Namun, pada 2024, proporsi Retribusi Daerah melonjak drastis menjadi 73,39 persen, yang didorong oleh perubahan kebijakan yang mengalihkan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke dalam kategori Retribusi Daerah. Hal ini menyebabkan lonjakan signifikan dalam struktur kontribusi PAD secara keseluruhan.

Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap menjadi komponen dengan kontribusi paling kecil terhadap total PAD, dengan rata-rata tahunan sebesar 1,02 persen. Proporsi komponen ini tidak mengalami perubahan yang signifikan

sepanjang periode 2020-2024, yang menunjukkan bahwa kontribusinya relatif stabil meskipun dengan potensi pertumbuhan yang terbatas.

Lain-lain PAD yang Sah menjadi komponen yang mengalami penurunan proporsi paling tajam. Pada 2020, komponen ini memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD, yaitu 76,00 persen, dan bahkan meningkat menjadi 85,42 persen pada 2021. Namun, sejak 2022, proporsinya mulai mengalami penurunan, dan pada 2024 anjlok drastis menjadi hanya 2,02 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan terkait klasifikasi pendapatan BLUD yang sebelumnya termasuk dalam kategori ini.

Secara keseluruhan, struktur PAD Kabupaten Tulungagung mengalami perubahan signifikan, terutama akibat kebijakan yang mempengaruhi pengklasifikasian sumber pendapatan daerah. Pajak Daerah tetap menjadi komponen yang stabil, sementara Retribusi Daerah mengalami lonjakan tajam pada 2024. Di sisi lain, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih memiliki kontribusi yang terbatas, dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan drastis akibat kebijakan perubahan klasifikasi pendapatan. Perubahan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkelanjutan.

b. Pendapatan Transfer

Dalam sistem keuangan daerah, pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama penerimaan yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat mencakup dana perimbangan, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Sementara itu, transfer antar-daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan penerimaan yang dibagikan antar-pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan bantuan keuangan adalah alokasi dana yang diberikan oleh satu pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu. Secara keseluruhan, pendapatan transfer berperan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar-daerah serta memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tingginya proporsi transfer dari pemerintah pusat dalam struktur pendapatan daerah mencerminkan rendahnya kapasitas fiskal daerah, yang menunjukkan bahwa daerah belum mampu membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Rendahnya kapasitas fiskal ini umumnya disebabkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih

sangat terbatas terhadap total pembiayaan pembangunan. Selain itu, disparitas jumlah penduduk, kondisi geografis yang menimbulkan biaya operasional tinggi, serta keterbatasan daya beli masyarakat turut menjadi faktor yang memperlemah kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, dominasi transfer pusat dalam pendapatan daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong sektor-sektor produktif, meningkatkan iklim investasi, dan memperluas layanan publik. Dengan strategi tersebut, diharapkan kontribusi PAD akan meningkat secara bertahap, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi dan kemandirian fiskal daerah dapat terwujud secara berkelanjutan.

Berdasarkan data pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Tulungagung dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat tren peningkatan dalam total pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun transfer antar-daerah. Total pendapatan transfer mengalami peningkatan dari Rp1,99 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,32 triliun pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan.

Tabel 2. 54 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.826.518.296.334,00**	**1.830.131.194.880,00**	**1.853.764.717.475,00**	**1.874.400.107.491,00**	**2.059.955.245.348,00**
1.1	Dana Bagi Hasil	96.103.031.686,00	125.380.248.303,00	144.293.649.101,00	109.949.894.948,00	110.517.768.000,00
1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.079.847.029.000,00	1.062.757.430.000,00	1.058.151.665.715,00	1.115.282.347.655,00	1.191.221.124.852,00
1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	98.245.734.884,00	91.828.282.995,00	83.249.262.253,00	50.053.940.239,00	119.746.011.966,00
1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	283.765.949.465,00	272.835.834.582,00	322.967.943.406,00	341.154.407.649,00	356.354.450.530,00
1.5	Dana Insentif Daerah	33.669.985.000,00	39.722.914.000,00		6.225.400.000,00	28.486.189.000,00
1.6	Dana Desa	234.886.566.299,00	237.606.485.000,00	245.102.197.000,00	251.734.117.000,00	253.629.701.000,00
2.	**Transfer antar – daerah**	**166.771.241.142,00**	**221.092.852.163,00**	**210.761.698.348,00**	**249.006.166.321,00**	**255.233.426.675,00**
2.1	Pendapatan Bagi Hasil	144.255.914.742,00	210.705.776.663,00	199.946.976.348,00	238.504.076.100,00	244.386.570.175,00
2.2	Bantuan Keuangan	22.515.326.400,00	10.387.075.500,00	10.814.722.000,00	10.502.090.221,00	10.846.856.500,00
	Total Pendapatan Transfer	**1.993.289.537.476,00**	**2.051.224.047.043,00**	**2.064.526.415.823,00**	**2.123.406.273.812,00**	**2.315.188.672.023,00**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Tulungagung 2020-2024

Komponen transfer dari pemerintah pusat, yang mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa, juga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dana Bagi Hasil cenderung meningkat dari Rp96,10 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp110,52 miliar pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023. DAU yang merupakan salah satu sumber pendanaan utama mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali meningkat hingga mencapai Rp1,19 triliun pada tahun 2024.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan tren yang bervariasi. DAK Fisik mengalami penurunan pada tahun 2023, namun meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp119,75 miliar. Sementara itu, DAK Non-Fisik terus mengalami peningkatan dari Rp283,76 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp356,35 miliar pada tahun 2024.

Dana Insentif Daerah (DID), yang bersifat selektif dan berbasis kinerja, mengalami pola yang tidak konsisten. Setelah sempat meningkat dari Rp33,67 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp39,72 miliar pada tahun 2021, alokasi ini justru tidak tercatat pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, dana ini kembali dicairkan masing-masing sebesar Rp6,22 miliar dan Rp28,49 miliar. Ketidakteraturan ini kemungkinan mencerminkan evaluasi kinerja daerah dalam memenuhi indikator yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sementara itu, Dana Desa menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif sepanjang periode 2020 hingga 2024. Nilainya meningkat dari Rp234,89 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp253,63 miliar pada tahun 2024, atau tumbuh sebesar Rp18,74 miliar dalam lima tahun. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan secara berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Transfer antar daerah juga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020, realisasi transfer ini sebesar Rp166,77 miliar dan terus meningkat hingga mencapai Rp255,23 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan terjalinnya sinergi antar-pemerintah daerah yang semakin baik serta optimalisasi pengelolaan dana perimbangan dalam mendukung layanan publik lintas wilayah.

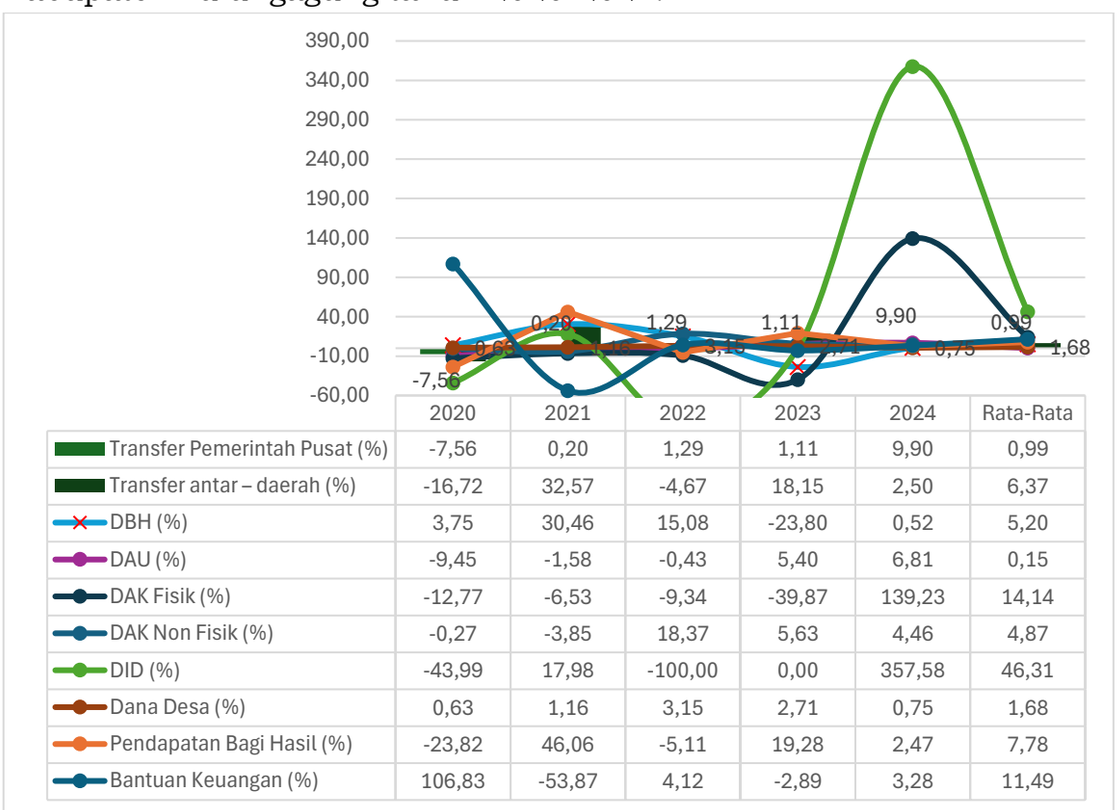
Komponen Pendapatan Bagi Hasil juga menunjukkan tren positif meskipun fluktuatif. Dari Rp144,26 miliar pada tahun 2020 meningkat tajam ke Rp210,71 miliar pada tahun 2021, sempat turun di tahun 2022, namun kembali naik hingga mencapai Rp244,39 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kinerja positif dalam sektor-sektor penghasil pendapatan seperti pajak dan sumber daya alam, serta perbaikan sistem bagi hasil antar pemerintah.

Sebaliknya, realisasi Bantuan Keuangan justru menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, bantuan ini mencapai Rp22,52 miliar, namun menurun drastis menjadi sekitar Rp10,38 miliar pada tahun

2021 dan stabil pada kisaran Rp10,5 miliar hingga 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya penyesuaian prioritas alokasi anggaran atau efektivitas program bantuan yang lebih selektif.

Secara keseluruhan, peningkatan total pendapatan transfer menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Namun, fluktuasi dalam beberapa komponen pendapatan transfer, seperti Dana Desa dan Dana Insentif Daerah, mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pola alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan strategi perencanaan keuangan yang adaptif agar pendapatan transfer dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan daerah.

Untuk memahami pertumbuhan masing-masing komponen terhadap total Pendapatan Transfer, berikut disajikan grafik pertumbuhan komponen total Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2024.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Transfer Pemerintah Pusat (%)	-7,56	0,20	1,29	1,11	9,90	0,99
Transfer antar – daerah (%)	-16,72	32,57	-4,67	18,15	2,50	6,37
DBH (%)	3,75	30,46	15,08	-23,80	0,52	5,20
DAU (%)	-9,45	-1,58	-0,43	5,40	6,81	0,15
DAK Fisik (%)	-12,77	-6,53	-9,34	-39,87	139,23	14,14
DAK Non Fisik (%)	-0,27	-3,85	18,37	5,63	4,46	4,87
DID (%)	-43,99	17,98	-100,00	0,00	357,58	46,31
Dana Desa (%)	0,63	1,16	3,15	2,71	0,75	1,68
Pendapatan Bagi Hasil (%)	-23,82	46,06	-5,11	19,28	2,47	7,78
Bantuan Keuangan (%)	106,83	-53,87	4,12	-2,89	3,28	11,49

Gambar 2. 85 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Analisis pertumbuhan pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan fiskal dan efektivitas pengelolaan dana transfer dari berbagai sumber. Secara umum, rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 1,41 persen, yang merefleksikan tren pertumbuhan yang relatif moderat, meskipun disertai fluktuasi cukup tajam pada komponen-komponen tertentu.

Analisis terhadap pertumbuhan pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya dinamika fiskal yang mencerminkan tantangan dalam pengelolaan dana transfer dari berbagai sumber. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer tercatat sebesar 1,41 persen per tahun. Meskipun angka ini menunjukkan tren yang moderat, fluktuasi yang cukup tajam masih terjadi pada beberapa komponen transfer tertentu, yang mengindikasikan perlunya strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan alokasi dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Pada kategori Transfer Pemerintah Pusat, rata-rata pertumbuhan hanya mencapai 0,99 persen, menandakan adanya ketidakstabilan distribusi dana pusat ke daerah. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami pertumbuhan tahunan yang sangat variatif, dengan puncaknya pada tahun 2021 sebesar 30,46 persen, namun mengalami kontraksi tajam hingga -23,80 persen pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan DBH selama lima tahun mencapai 5,20 persen, yang menunjukkan adanya potensi fiskal dari bagi hasil, meskipun sangat tergantung pada fluktuasi sektor penghasil.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan daerah, menunjukkan stabilitas relatif dengan rata-rata pertumbuhan yang nyaris stagnan sebesar 0,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa DAU bersifat tetap dan tidak banyak mengalami perubahan, sejalan dengan peran DAU sebagai dana yang bersifat block grant untuk mendukung belanja daerah secara umum.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencatat pertumbuhan paling fluktuatif dengan rata-rata tertinggi mencapai 14,14 persen. Hal ini dipicu oleh lonjakan drastis sebesar 139,23 persen pada tahun 2024, yang kemungkinan besar berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur atau program nasional tertentu yang dibiayai oleh DAK. Sebaliknya, DAK Fisik sempat mengalami kontraksi signifikan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2022. Di sisi lain, DAK Nonfisik mencatat pertumbuhan yang lebih stabil dengan rata-rata 4,87 persen, dan tidak mengalami penurunan tajam seperti DAK Fisik.

Komponen Dana Insentif Daerah (DID) menunjukkan pola yang sangat ekstrem, dengan pertumbuhan tahunan yang negatif drastis hingga -100 persen pada tahun 2022, namun melonjak hingga 357,58 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menjelaskan bahwa DID sangat tergantung pada penilaian kinerja daerah oleh pemerintah pusat, yang bersifat kompetitif. Rata-rata pertumbuhan DID mencapai 46,31 persen, namun nilai ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati karena volatilitasnya sangat tinggi.

Sementara itu, Dana Desa menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata 1,68 persen per tahun, menandakan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan desa.

Komponen ini tidak mengalami penurunan tajam dan mencerminkan kebijakan yang konsisten dalam pembangunan berbasis desa.

Untuk Transfer Antar Daerah, pertumbuhannya cukup fluktuatif, dengan rata-rata sebesar 6,37 persen. Tahun 2021 menjadi tahun dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 32,57 persen, yang kemungkinan berkaitan dengan kerja sama antardaerah dalam pembiayaan layanan publik atau proyek lintas wilayah.

Pendapatan Bagi Hasil dari antar daerah juga menunjukkan tren serupa, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,78 persen, yang menandakan potensi sinergi fiskal antardaerah dalam meningkatkan pendapatan. Sedangkan Bantuan Keuangan mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 11,49 persen, dengan anomali pertumbuhan tinggi pada tahun 2020 sebesar 106,83 persen, diikuti penurunan tajam pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya program prioritas bersifat khusus atau dukungan penanganan pandemi pada awal periode tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa komponen yang menunjukkan pertumbuhan tinggi, seperti DAK Fisik dan DID, namun kestabilan dan keberlanjutan pertumbuhan pendapatan transfer masih menjadi tantangan utama. Ketidakstabilan ini dapat berdampak langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program pelayanan publik, terutama pada sektor yang sangat bergantung pada sumber pendanaan tersebut, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat strategi perencanaan fiskal jangka menengah yang lebih adaptif dan berbasis data, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna menjamin kesinambungan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup seluruh pendapatan daerah kecuali PAD dan pendapatan transfer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: hibah; dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data realisasi pendapatan lain-lain Pemerintah Kabupaten Tulungagung dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada komponen Pendapatan Hibah. Pada tahun 2020, pendapatan hibah tercatat sebesar Rp94,48 miliar, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp90,86 miliar. Namun, pada tahun 2022, jumlah pendapatan hibah mengalami penurunan drastis hingga Rp408 juta. Pada tahun 2023 dan 2024, tidak terdapat realisasi pendapatan hibah.

Tabel 2. 55 Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendapatan Hibah	94.483.185.810,00	90.859.246.900,00	408.000.000,00		
2.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**94.483.185.810,00**	**90.859.246.900,00**	**408.000.000,00**		

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Tulungagung 2020-2024

Sementara itu, Dana Darurat tidak menunjukkan adanya realisasi dari tahun 2020 hingga 2024. Begitu pula dengan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang juga tidak mencatatkan penerimaan selama periode yang dianalisis.

Secara keseluruhan, kategori Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang mencakup pendapatan hibah dan komponen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp94,48 miliar, kemudian menurun menjadi Rp90,86 miliar pada tahun 2021. Penurunan ini berlanjut secara drastis pada tahun 2022, di mana pendapatan hanya mencapai sekitar Rp408 juta, dan tidak lagi terealisasi pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan signifikan ini mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan kebijakan terkait mekanisme pemberian hibah atau penghentian skema pendanaan serupa dari pemerintah pusat maupun pihak lain. Selain itu, pergeseran prioritas penganggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi menurunnya penerimaan dari pos pendapatan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan guna menjaga stabilitas fiskal dan mendukung kesinambungan program pembangunan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penurunan drastis dalam kategori pendapatan lain-lain ini perlu diantisipasi dengan strategi keuangan yang lebih adaptif. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif atau mengoptimalkan penerimaan daerah lainnya guna menjaga stabilitas fiskal dan kesinambungan pembiayaan program pembangunan.

2.5.1.2 Belanja Daerah

Amanat Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Belanja Daerah harus diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, belanja ini harus berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Belanja Daerah juga harus mengacu pada Analisis Standar Belanja (ASB) serta standar harga satuan regional agar lebih efektif dan efisien.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan peran Belanja Daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan bagi masyarakat.

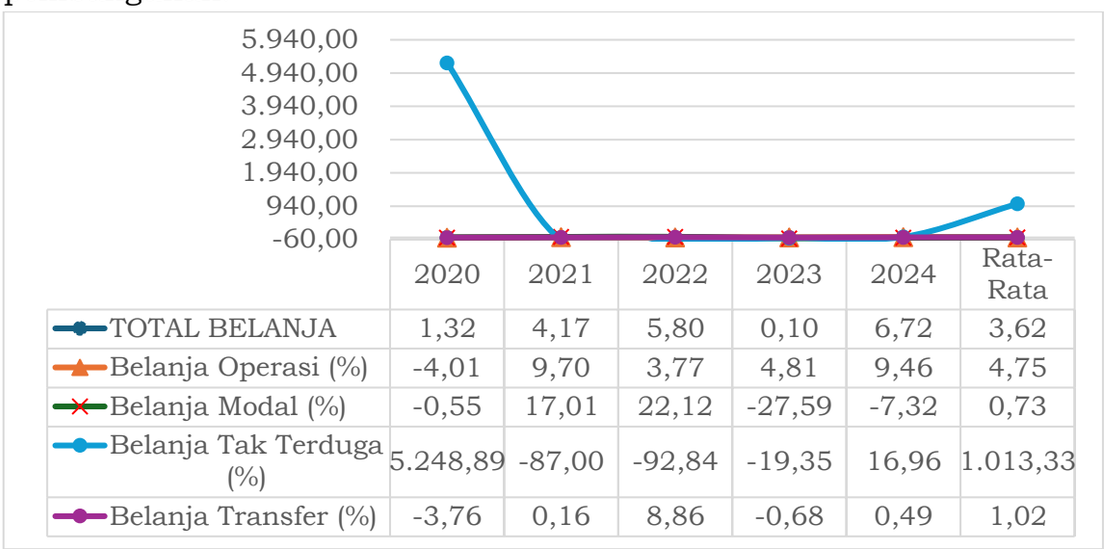
Untuk memahami lebih lanjut dinamika pengeluaran daerah, berikut disajikan gambaran mengenai perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama periode 2020–2024.

Tabel 2. 56 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	**BELANJA**					
2.1	**Belanja Operasi**	**1.881.525.437.967,32**	**2.064.101.812.477,69**	**2.141.914.216.517,53**	**2.244.987.468.837,54**	**2.457.379.110.248,38**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.087.178.725.221,42	1.177.487.042.959,42	1.105.948.316.423,49	1.106.050.111.001,22	1.251.356.648.941,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	704.286.791.456,84	773.538.004.507,16	899.004.702.666,56	995.322.230.754,32	1.020.570.952.319,38
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	82.570.119.592,00	91.303.782.511,11	102.827.446.326,49	117.530.399.335,00	168.587.358.058,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.489.801.697,06	21.772.982.500,00	34.133.751.100,99	26.084.727.747,00	16.864.150.930,00
2.2	**Belanja Modal**	**246.376.998.498,80**	**288.291.855.548,78**	**352.048.362.950,98**	**254.914.441.674,65**	**236.264.000.863,03**
2.2.1	Tanah	665.827.177,95	5.430.000.000,00	13.388.794.832,00	10.956.042.050,00	60.016.000,00
2.2.2	Peralatan dan Mesin	44.018.209.581,54	148.480.353.467,60	132.382.446.981,63	79.908.004.600,00	73.227.542.722,00
2.2.3	Gedung dan Bangunan	74.381.004.716,43	69.246.688.066,80	94.083.313.985,28	62.183.103.358,65	54.138.982.064,03
2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.942.578.981,05	59.715.735.094,38	104.920.363.082,07	92.134.743.897,00	100.213.850.262,00
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	69.663.077.841,83	5.419.078.920,00	7.273.444.070,00	9.732.547.769,00	4.888.185.815,00
2.2.6	Aset Lainnya	706.300.200,00	-	-	-	3.735.424.000,00
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**131.911.563.936,00**	**17.151.113.610,00**	**1.228.684.101,00**	**990.984.500,00**	**1.159.058.237,00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	131.911.563.936,00	17.151.113.610,00	1.228.684.101,00	990.984.500,00	1.159.058.237,00
2.4	**Belanja Transfer**	**383.835.522.800,00**	**384.447.586.791,00**	**418.497.246.772,00**	**415.661.883.162,00**	**417.711.766.325,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.125.517.801,00	9.786.824.291,00	10.870.929.772,00	10.961.991.162,00	12.920.445.325,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	376.710.004.999,00	374.660.762.500,00	407.626.317.000,00	404.699.892.000,00	404.791.321.000,00
	JUMLAH BELANJA	**2.643.649.523.202,12**	**2.753.992.368.427,47**	**2.913.688.510.341,51**	**2.916.554.778.174,19**	**3.112.513.935.673,41**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Tulungagung 2020-2024

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, total belanja daerah tercatat sebesar Rp2,64 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp3,11 triliun pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah dalam lima tahun terakhir sebesar 3,62 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 6,72 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 dengan hanya 0,10 persen. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, dan prioritas pembangunan.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
TOTAL BELANJA	1,32	4,17	5,80	0,10	6,72	3,62
Belanja Operasi (%)	-4,01	9,70	3,77	4,81	9,46	4,75
Belanja Modal (%)	-0,55	17,01	22,12	-27,59	-7,32	0,73
Belanja Tak Terduga (%)	5.248,89	-87,00	-92,84	-19,35	16,96	1.013,33
Belanja Transfer (%)	-3,76	0,16	8,86	-0,68	0,49	1,02

Gambar 2. 86 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Komponen belanja daerah terbesar adalah Belanja Operasi, yang mencakup pengeluaran rutin pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan. Pada tahun 2020, belanja operasi tercatat sebesar Rp1,88 triliun dan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp2,46 triliun pada tahun 2024. Secara rata-rata, belanja operasi mengalami pertumbuhan sebesar 4,75 persen per tahun. Pada tahun 2020, belanja operasi mengalami kontraksi sebesar 4,01 persen, sebelum kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2021 dan 2024 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,70 persen dan 9,46 persen. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pemerintahan, termasuk belanja pegawai serta pengadaan barang dan jasa guna mendukung pelayanan publik.

Belanja Modal, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah, menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah meningkat dari Rp246,37 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp352,05 miliar pada tahun 2022, belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing menjadi Rp254,91 miliar dan Rp236,26 miliar. Pada tahun 2021 dan 2022, belanja modal mengalami lonjakan pertumbuhan masing-masing sebesar 17,01 persen

dan 22,12 persen, yang kemungkinan besar mencerminkan peningkatan investasi dalam infrastruktur dan aset produktif daerah. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, belanja modal mengalami penurunan tajam dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 27,59 persen dan 7,32 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh perubahan prioritas anggaran atau penyelesaian proyek-proyek strategis yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Secara rata-rata, belanja modal hanya tumbuh sebesar 0,73 persen per tahun, menunjukkan belum adanya konsistensi dalam alokasi investasi jangka panjang.

Belanja Tak Terduga, yang dialokasikan untuk kondisi darurat atau kejadian tidak terduga, mengalami penurunan drastis dari Rp131,91 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp1,15 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya kebutuhan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Belanja tak terduga mengalami perubahan yang sangat ekstrem dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, belanja tak terduga melonjak hingga 5.248,89 persen, kemungkinan besar disebabkan oleh alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, belanja tak terduga mengalami kontraksi besar dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 87,00 persen dan 92,84 persen, mencerminkan berkurangnya kebutuhan dana darurat.

Pada tahun 2023, meskipun masih mengalami kontraksi sebesar 19,35 persen, belanja tak terduga kembali menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2024 sebesar 16,96 persen. Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga dalam lima tahun terakhir mencapai 1.013,33 persen, menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi, yang kemungkinan besar terkait dengan kondisi darurat dan kejadian luar biasa yang membutuhkan alokasi anggaran khusus.

Sementara itu, Belanja Transfer, yang mencakup dana yang disalurkan kepada pemerintah desa dan pihak lain, menunjukkan tren yang relatif stabil. Pada tahun 2020, belanja transfer sebesar Rp383,83 miliar dan meningkat menjadi Rp417,71 miliar pada tahun 2024. Dibandingkan dengan komponen belanja lainnya, belanja transfer mengalami pertumbuhan yang lebih stabil dengan rata-rata 1,02 persen per tahun. Setelah mengalami kontraksi sebesar 3,76 persen pada tahun 2020, belanja transfer mulai meningkat pada 2022, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,86 persen. Namun, pada tahun 2023, belanja transfer kembali mengalami sedikit penurunan sebesar 0,68 persen, sebelum kembali tumbuh positif pada 2024 sebesar 0,49 persen. Fluktuasi ini dapat mencerminkan perubahan dalam alokasi dana transfer ke desa atau pemerintah tingkat bawah sesuai dengan kebijakan fiskal yang berlaku.

Secara keseluruhan, tren belanja daerah Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama pada belanja modal dan belanja tak terduga yang mengalami fluktuasi tajam. Peningkatan belanja operasi yang relatif stabil mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung

keberlanjutan pelayanan publik. Namun, ketidakstabilan dalam belanja modal dapat menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kesinambungan pembangunan infrastruktur jangka panjang. Selain itu, lonjakan belanja tak terduga pada tahun 2020 menunjukkan dampak besar dari kondisi darurat seperti pandemi, sementara fluktuasi belanja transfer mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan dalam distribusi anggaran ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

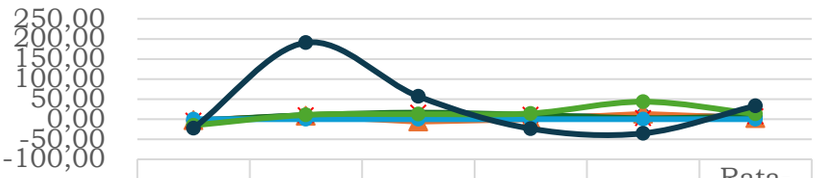
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu memperhatikan konsistensi alokasi belanja modal guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta memastikan belanja operasional tetap berada dalam batas yang optimal. Selain itu, evaluasi terhadap belanja tak terduga dan belanja transfer perlu dilakukan agar penggunaannya lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah

Untuk memahami lebih lanjut kontribusi dari masing-masing komponen belanja daerah, berikut adalah analisis terhadap: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan bagian terbesar dalam struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga, belanja subsidi, serta belanja bantuan sosial. Tren Belanja Operasi dalam lima tahun terakhir dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik serta efektivitas pengelolaan anggaran. Peningkatan atau penurunan pada belanja ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan operasional pemerintahan, kebijakan efisiensi anggaran, serta kondisi ekonomi daerah.

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalami tren peningkatan selama periode 2020–2024. Total Belanja Operasi meningkat dari Rp1,88 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,46 triliun pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan belanja daerah dalam mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan. Secara keseluruhan, belanja operasi mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 4,75 persen selama periode 2020-2024. Tahun 2021 dan 2024 menunjukkan peningkatan tertinggi, masing-masing sebesar 9,70 persen dan 9,46 persen.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
BELANJA OPERASI (%)	-4,01	9,70	3,77	4,81	9,46	4,75
Belanja Pegawai (%)	-2,91	8,31	-6,08	0,01	13,14	2,49
Belanja Barang dan Jasa (%)	-3,96	9,83	16,22	10,71	2,54	7,07
Belanja Bunga (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah (%)	-15,35	10,58	12,62	14,30	43,44	13,12
Belanja Bantuan Sosial (%)	-22,38	190,70	56,77	-23,58	-35,35	33,23

Gambar 2. 87 Pertumbuhan Realisasi Belanja Operasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam Belanja Operasi, dengan kontribusi lebih dari 50 persen setiap tahunnya. Meskipun mengalami peningkatan dari Rp1,08 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,25 triliun pada tahun 2024, terjadi fluktuasi pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan belanja pegawai pada tahun 2022 sebesar 6,08 persen menunjukkan kemungkinan adanya efisiensi atau perubahan kebijakan terkait pegawai, sebelum akhirnya meningkat kembali sebesar 13,14 persen pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan selama periode ini mencapai 2,49 persen, mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan belanja pegawai yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi atau perubahan struktur pegawai.

Belanja Barang dan Jasa menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari Rp704,29 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,02 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan operasional pemerintah daerah, termasuk pengadaan barang untuk pelayanan masyarakat serta pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik. Rata-rata pertumbuhan belanja barang dan jasa mencapai 7,07 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan kebutuhan operasional yang signifikan dalam penyediaan barang dan jasa.

Belanja Hibah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2024, yang mencapai Rp168,59 miliar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara Rp80 miliar hingga Rp120 miliar. Peningkatan ini dapat mencerminkan adanya kebijakan peningkatan alokasi hibah kepada pihak ketiga, seperti lembaga pendidikan, keagamaan, atau organisasi masyarakat. Rata-rata pertumbuhan belanja hibah mencapai 13,12 persen per tahun, dengan lonjakan tertinggi sebesar 43,44 persen pada tahun 2024. Hal

ini mengindikasikan adanya peningkatan alokasi hibah yang berpotensi mendukung berbagai program sosial dan pembangunan daerah.

Belanja Bantuan Sosial mengalami fluktuasi, dengan peningkatan tajam pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing mencapai Rp21,77 miliar dan Rp34,13 miliar, sebelum akhirnya menurun pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan alokasi menjadi Rp16,86 miliar pada tahun 2024 dapat mencerminkan perubahan prioritas anggaran atau membaiknya kondisi sosial ekonomi pascapandemi. Rata-rata pertumbuhan belanja bantuan sosial selama periode ini mencapai 33,23 persen per tahun. Pada tahun 2021, terjadi lonjakan sebesar 190,70 persen, yang kemungkinan besar berkaitan dengan program bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, belanja bantuan sosial mengalami kontraksi masing-masing sebesar 23,58 persen dan 35,35 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah terhadap program bantuan sosial.

Dalam periode 2020–2024, tidak terdapat alokasi untuk Belanja Bunga maupun Belanja Subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman dan tidak mengalokasikan anggaran untuk subsidi dalam belanja operasionalnya.

Secara keseluruhan, tren peningkatan Belanja Operasi mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, fluktuasi dalam beberapa komponen, seperti Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial, perlu dicermati untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, peningkatan signifikan dalam Belanja Hibah memerlukan evaluasi lebih lanjut guna memastikan bahwa alokasi tersebut memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

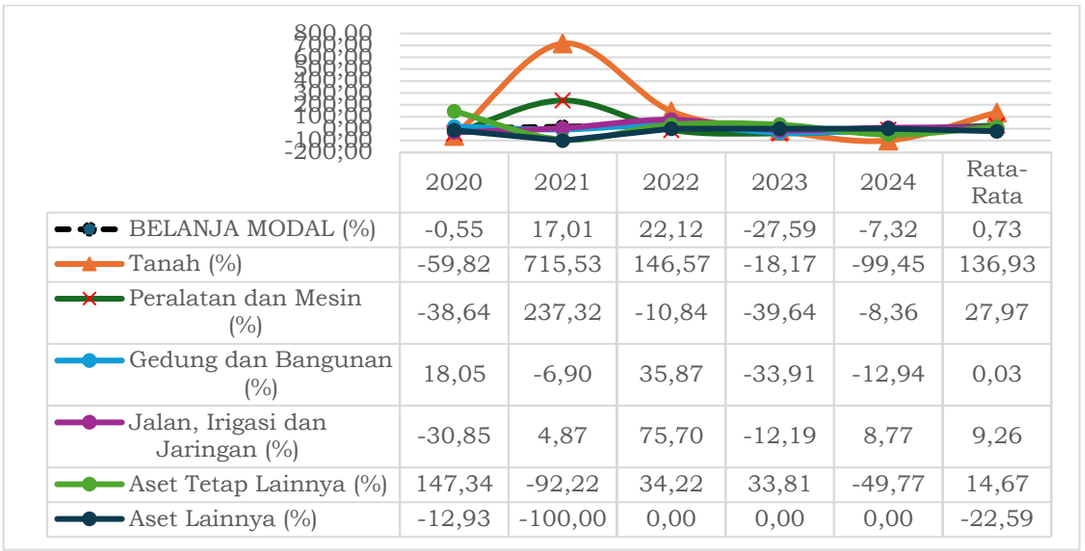
b. Belanja Modal

Belanja Modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur, sarana dan prasarana publik, serta pengadaan peralatan. Besaran dan pola perubahan Belanja Modal setiap tahun menunjukkan prioritas pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah serta efisiensi dalam pengelolaan investasi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; belanja modal aset tetap lainnya; dan belanja modal aset Lainnya

Fluktuasi dalam alokasi Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pembangunan, kapasitas fiskal daerah, serta realisasi proyek-proyek strategis. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan

infrastruktur, sehingga analisis terhadap Belanja Modal akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan dan implementasi belanja daerah.

Belanja modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Secara keseluruhan, total belanja modal mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dari Rp246,38 miliar pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya sebesar Rp352,06 miliar pada tahun 2022. Namun, setelah itu terjadi penurunan berturut-turut hingga Rp236,26 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja modal selama lima tahun terakhir hanya sebesar 0,73 persen, yang mencerminkan kecenderungan stagnan akibat fluktuasi yang tidak konsisten setiap tahunnya.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
BELANJA MODAL (%)	-0,55	17,01	22,12	-27,59	-7,32	0,73
Tanah (%)	-59,82	715,53	146,57	-18,17	-99,45	136,93
Peralatan dan Mesin (%)	-38,64	237,32	-10,84	-39,64	-8,36	27,97
Gedung dan Bangunan (%)	18,05	-6,90	35,87	-33,91	-12,94	0,03
Jalan, Irigasi dan Jaringan (%)	-30,85	4,87	75,70	-12,19	8,77	9,26
Aset Tetap Lainnya (%)	147,34	-92,22	34,22	33,81	-49,77	14,67
Aset Lainnya (%)	-12,93	-100,00	0,00	0,00	0,00	-22,59

Gambar 2. 88 Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja modal tanah mengalami lonjakan drastis pada tahun 2021, yaitu Rp5,43 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp665,83 juta (naik 715,53 persen). Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan alokasi sebesar Rp13,39 miliar, tetapi mengalami penurunan menjadi Rp10,96 miliar pada tahun 2023, sebelum turun drastis hingga Rp60,02 juta pada tahun 2024 (minus 99,45 persen). Rata-rata pertumbuhan belanja modal tanah selama lima tahun mencapai 136,93 persen, namun angka ini lebih mencerminkan volatilitas tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang stabil. Penurunan drastis pada tahun 2024 dapat mengindikasikan adanya perubahan kebijakan dalam pengadaan tanah atau telah terpenuhinya kebutuhan strategis pemerintah daerah terkait aset tanah.

Komponen belanja modal peralatan dan mesin mengalami lonjakan tajam pada tahun 2021, mencapai Rp148,48 miliar dari Rp44,02 miliar pada tahun 2020 (naik 237,32 persen). Setelah itu, terjadi penurunan bertahap menjadi Rp132,38 miliar pada tahun 2022, Rp79,91 miliar pada tahun 2023, dan Rp73,23 miliar pada tahun 2024. Kontraksi belanja ini terjadi berturut-turut sebesar minus 10,84 persen

pada tahun 2022, minus 39,64 persen pada tahun 2023, dan minus 8,36 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 27,97 persen menunjukkan tren yang masih positif, meskipun mengalami ketidakstabilan dalam alokasinya.

Belanja modal untuk gedung dan bangunan juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, alokasi anggaran untuk komponen ini sebesar Rp74,38 miliar, kemudian turun menjadi Rp69,25 miliar pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan menjadi Rp94,08 miliar (naik 35,87 persen), sebelum kembali menurun menjadi Rp62,18 miliar pada tahun 2023 (minus 33,91 persen) dan Rp54,14 miliar pada tahun 2024 (minus 12,94 persen). Rata-rata pertumbuhan belanja modal gedung dan bangunan selama lima tahun terakhir hanya 0,03 persen, mencerminkan tren yang relatif stagnan.

Belanja modal pada sektor jalan, irigasi, dan jaringan menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan komponen lainnya. Pada tahun 2020, alokasi anggaran untuk sektor ini sebesar Rp56,94 miliar, meningkat menjadi Rp59,72 miliar pada tahun 2021, dan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 dengan alokasi mencapai Rp104,92 miliar (naik 75,70 persen). Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp92,13 miliar (minus 12,19 persen), sebelum kembali meningkat menjadi Rp100,21 miliar pada tahun 2024 (8,77 persen). Rata-rata pertumbuhan belanja modal di sektor ini sebesar 9,26 persen, menunjukkan adanya prioritas yang relatif konsisten dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan daerah.

Belanja modal aset tetap lainnya mengalami penurunan tajam dari Rp69,66 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5,42 miliar pada tahun 2021 (minus 92,22 persen). Setelah itu, terjadi sedikit peningkatan menjadi Rp7,27 miliar pada tahun 2022 (naik 34,22 persen) dan Rp9,73 miliar pada tahun 2023 (naik 33,81 persen), sebelum kembali turun menjadi Rp4,89 miliar pada tahun 2024 (minus 49,77 persen). Rata-rata pertumbuhan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 14,67 persen, tetapi dengan fluktuasi yang cukup tinggi dalam alokasinya, yang dapat mencerminkan adanya perubahan strategi dalam pengelolaan aset tetap yang tidak termasuk dalam kategori utama belanja modal.

Alokasi untuk aset lainnya hanya tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp706,30 juta, kemudian tidak ada alokasi pada tahun 2021 hingga 2023. Namun, pada tahun 2024, terdapat alokasi kembali sebesar Rp3,74 miliar. Penurunan yang sangat tajam (minus 100 persen) sejak tahun 2021 menunjukkan bahwa kategori ini sudah tidak menjadi prioritas dalam penganggaran belanja modal pemerintah daerah. Rata-rata pertumbuhan belanja modal aset lainnya dalam lima tahun terakhir berada di angka minus 22,59 persen, yang mengindikasikan alokasi yang sangat minim dalam beberapa tahun terakhir.

Secara umum, belanja modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalami tren fluktuatif, dengan puncak realisasi pada tahun 2022

sebelum mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Beberapa komponen utama, seperti belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan, mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, yang kemungkinan mencerminkan dinamika prioritas pembangunan daerah.

Penurunan belanja modal dalam dua tahun terakhir dapat menjadi indikasi adanya kebijakan efisiensi anggaran atau perubahan strategi pengelolaan belanja modal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa alokasi belanja modal tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

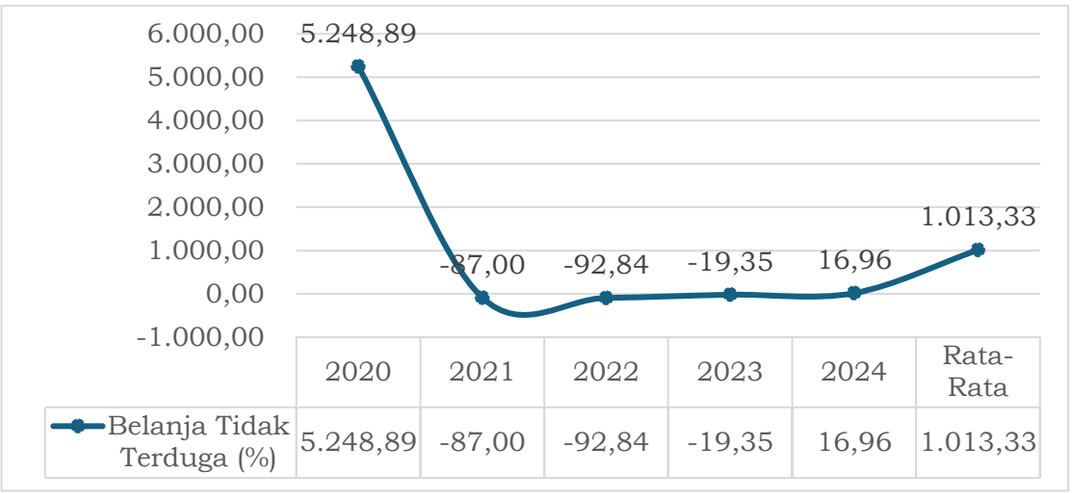
Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu meninjau kembali pola penganggaran belanja modal agar lebih konsisten dan efektif, khususnya dalam menjaga stabilitas investasi pada sektor infrastruktur serta aset strategis lainnya. Fluktuasi tajam dalam beberapa komponen belanja modal dapat menjadi indikator perlunya perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan anggaran belanja daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan anggaran, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah. Pos ini memiliki karakteristik yang unik karena jumlah dan realisasinya sangat bergantung pada kondisi yang terjadi dalam suatu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi dan realisasi Belanja Tak Terduga mengalami fluktuasi, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan penanggulangan bencana, dinamika kondisi ekonomi dan sosial, serta perubahan regulasi yang mengatur penggunaan dana darurat. Analisis terhadap komponen ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi situasi yang tidak terduga serta efektivitas penggunaan anggaran dalam keadaan darurat.

Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi Belanja Tidak Terduga mencapai Rp131,91 miliar. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis menjadi Rp17,15 miliar, yang mencerminkan penurunan sebesar 87,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 2. 89 Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Terduga, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan kontraksi yang lebih dalam, mencapai 92,84 persen, di mana Belanja Tidak Terduga hanya sebesar Rp1,23 miliar. Hal ini menunjukkan penurunan yang sangat tajam dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023, alokasi belanja ini semakin menyusut menjadi Rp0,99 miliar dengan tingkat kontraksi sebesar 19,35 persen, menunjukkan pengeluaran yang relatif kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024 terdapat sedikit peningkatan sebesar 16,96 persen menjadi Rp1,16 miliar, meskipun angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.

Penurunan signifikan dalam Belanja Tidak Terduga dari tahun 2020 hingga 2024 dapat mengindikasikan beberapa kemungkinan. Salah satu faktor utama adalah perbedaan kondisi darurat yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam periode tersebut. Pada tahun 2020, tingginya Belanja Tidak Terduga kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang memerlukan alokasi dana dalam jumlah besar untuk mendukung sektor kesehatan, bantuan sosial, dan langkah-langkah mitigasi lainnya. Seiring dengan meredanya pandemi dan berkurangnya kebutuhan dana darurat, alokasi anggaran untuk pos ini mengalami penyesuaian secara signifikan.

Selain itu, penurunan ini juga dapat mencerminkan perbaikan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah. Alokasi Belanja Tidak Terduga yang lebih kecil pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa kebutuhan untuk pengeluaran mendadak semakin minim, yang kemungkinan disebabkan oleh perencanaan yang lebih matang serta penguatan mekanisme tanggap darurat melalui pos anggaran lainnya.

Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2024, nominal yang relatif kecil menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap mempertahankan kebijakan pengeluaran yang lebih terkendali untuk Belanja Tidak Terduga. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa penurunan ini tidak berdampak pada kemampuan

pemerintah daerah dalam merespons keadaan darurat yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, tren penurunan dalam Belanja Tidak Terduga mencerminkan adanya perubahan kebijakan fiskal yang lebih terarah dan efisien. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran tetap mempertimbangkan aspek fleksibilitas dalam menghadapi potensi risiko atau kejadian tak terduga yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan belanja yang dialokasikan kepada pemerintah desa dan entitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Transfer dana ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta memperkuat layanan publik di tingkat lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pos belanja ini mencakup pengeluaran untuk belanja belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

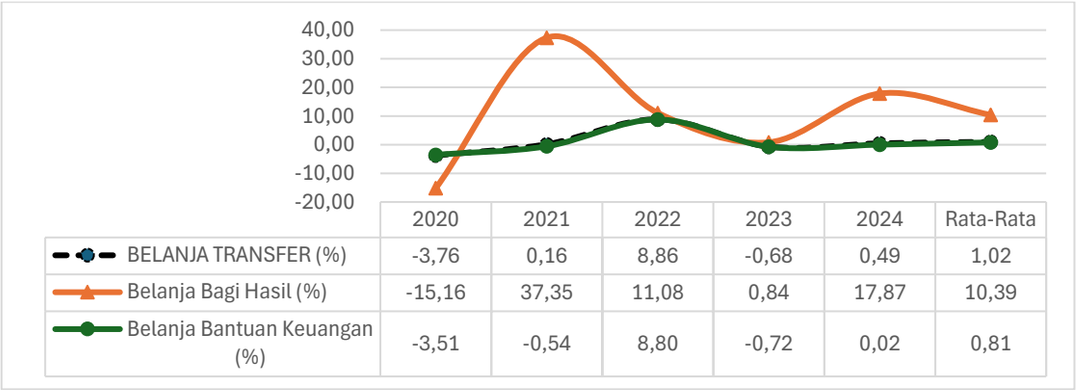
Tren belanja transfer Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam periode 2020 hingga 2024 menggambarkan dinamika alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan desa dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal. Belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan mengalami fluktuasi yang mencerminkan respons terhadap perubahan kebijakan fiskal, kondisi ekonomi daerah, serta kebutuhan pembangunan di tingkat lokal.

Pada tahun 2020, realisasi belanja transfer tercatat sebesar Rp383,83 miliar dan mengalami peningkatan marginal menjadi Rp384,44 miliar pada tahun 2021. Lonjakan lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan nilai mencapai Rp418,49 miliar, atau naik sebesar Rp34,05 miliar (setara 8,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2023 belanja transfer menurun tipis menjadi Rp415,66 miliar, sebelum kembali meningkat menjadi Rp417,71 miliar pada tahun 2024.

Secara persentase, belanja transfer mengalami kontraksi sebesar 3,76 persen pada tahun 2020, kemudian tumbuh sebesar 0,16 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 8,86 persen, namun kembali menurun sebesar 0,68 persen di tahun 2023, dan naik lagi sebesar 0,49 persen pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja transfer selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 1,02 persen per tahun.

Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran belanja transfer, mengingat peran strategisnya dalam mendukung pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan antardaerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis data

untuk memastikan efektivitas pemanfaatan dana transfer serta peningkatan kualitas belanja daerah secara keseluruhan.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
BELANJA TRANSFER (%)	-3,76	0,16	8,86	-0,68	0,49	1,02
Belanja Bagi Hasil (%)	-15,16	37,35	11,08	0,84	17,87	10,39
Belanja Bantuan Keuangan (%)	-3,51	-0,54	8,80	-0,72	0,02	0,81

Gambar 2. 90 Pertumbuhan Realisasi Belanja Transfer, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Belanja bagi hasil menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, meskipun tetap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi belanja bagi hasil sebesar Rp7,12 miliar dan meningkat menjadi Rp9,78 miliar pada tahun 2021. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2022 dengan realisasi Rp10,87 miliar dan Rp10,96 miliar pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih besar terjadi pada tahun 2024, dengan alokasi belanja bagi hasil mencapai Rp12,92 miliar.

Dari sisi pertumbuhan, belanja bagi hasil mengalami kontraksi signifikan sebesar 15,16 persen pada tahun 2020. Namun, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 37,35 persen pada tahun 2021 yang kemudian melambat menjadi 11,08 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan terus menurun hingga 0,84 persen pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat sebesar 17,87 persen pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja bagi hasil selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 10,39 persen.

Belanja bantuan keuangan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi belanja ini mencapai Rp376,71 miliar dan mengalami sedikit penurunan menjadi Rp374,66 miliar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, belanja bantuan keuangan meningkat signifikan menjadi Rp407,62 miliar, sebelum kembali menurun menjadi Rp404,69 miliar pada tahun 2023. Pada tahun 2024, belanja ini relatif stabil di angka Rp404,79 miliar.

Secara persentase, belanja bantuan keuangan mengalami kontraksi sebesar 3,51 persen pada tahun 2020 dan kembali menurun sebesar 0,54 persen pada tahun 2021. Peningkatan terjadi pada tahun 2022 sebesar 8,8 persen, namun kembali mengalami kontraksi sebesar 0,72 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan kecil sebesar 0,02 persen. Rata-rata pertumbuhan belanja bantuan keuangan selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 0,81 persen.

Secara umum, belanja transfer dan belanja bagi hasil cenderung mengalami peningkatan dengan tren yang relatif stabil, sedangkan belanja bantuan keuangan mengalami fluktuasi meskipun tetap berada dalam kisaran yang cukup tinggi. Kenaikan belanja bagi hasil

menunjukkan peningkatan distribusi pendapatan daerah kepada penerima manfaat, sementara stabilitas belanja transfer dan bantuan keuangan mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan alokasi anggaran.

Fluktuasi dalam ketiga komponen belanja ini dapat mencerminkan perubahan kebijakan fiskal, prioritas pembangunan daerah, serta kondisi ekonomi makro. Peningkatan belanja pada tahun-tahun tertentu dapat disebabkan oleh kebutuhan alokasi tambahan untuk program prioritas, sedangkan kontraksi mencerminkan efisiensi anggaran atau perubahan kebijakan dalam mekanisme distribusi keuangan daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu terus mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran agar belanja transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, stabilitas dalam belanja transfer dan peningkatan belanja bagi hasil mengindikasikan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, sementara fluktuasi belanja bantuan keuangan dapat menjadi indikator adanya penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan daerah setiap tahunnya.

2.5.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan mencakup seluruh transaksi keuangan pemerintah yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran daerah, yang harus dibayar atau akan diterima kembali dalam sistem penganggaran pemerintah. Tujuan utama pembiayaan adalah menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, investasi daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (3) mengatur bahwa terdapat enam sumber penerimaan pembiayaan, yaitu: (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA); (2) pencairan dana cadangan; (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) penerimaan pinjaman daerah; (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan (6) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, sistematika APBD terdiri dari pendapatan dikurangi belanja, yang menghasilkan surplus atau defisit. Jika terjadi defisit, maka pembiayaan menjadi instrumen untuk menutup kekurangan tersebut, sementara jika terjadi surplus, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran strategis yang mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam pembiayaan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Berikut disajikan gambaran mengenai perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama periode 2020–2024.

Tabel 2. 57 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**505.544.089.424,85**	**447.279.780.403,41**	**782.262.732.342,38**	**477.597.953.760,37**	**424.028.501.916,56**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	505.544.089.424,85	447.279.780.403,41	782.262.732.342,38	477.597.953.760,37	374.028.501.916,56
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	50.000.000.000,00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**12.936.840.000,00**	**7.000.000.000,00**	**33.454.850.688,40**	**30.000.000.000,00**	**15.400.000.000,00**
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.936.840.000,00	7.000.000.000,00	13.454.850.688,40	-	400.000.000,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**492.607.249.424,85**	**440.279.780.403,41**	**748.807.881.653,98**	**447.597.953.760,37**	**408.628.501.916,56**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**447.279.780.403,73**	**782.262.732.342,94**	**477.597.953.760,47**	**374.035.308.765,54**	**321.110.377.923,21**

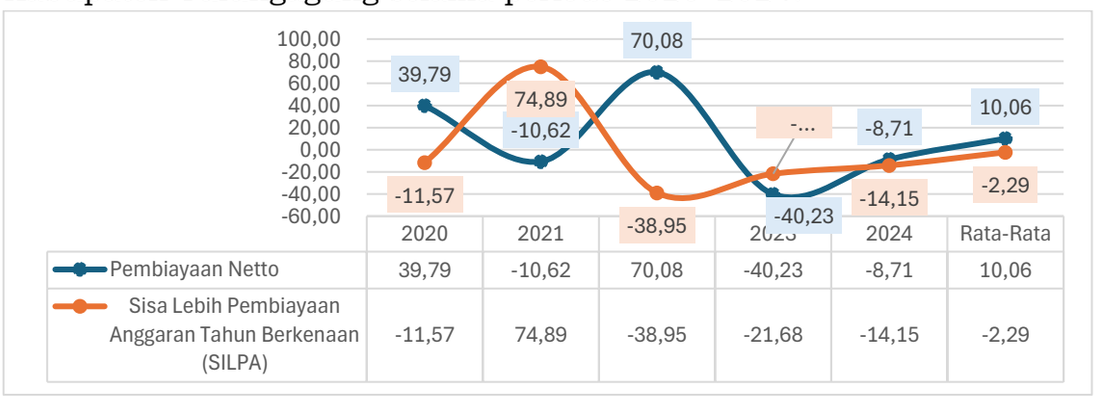
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Tulungagung 2020-2024

Penerimaan pembiayaan secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada 2023 dan 2024 yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022 mencatat penerimaan tertinggi sebesar Rp782,26 miliar, yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Namun, pada 2024 penerimaan turun menjadi Rp424,03 miliar, meskipun terdapat pencairan dana cadangan sebesar Rp50 miliar yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah, yang sebelumnya tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, alokasi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp33,45 miliar, yang terdiri atas penyertaan modal sebesar Rp13,45 miliar dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp20 miliar. Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024, pengeluaran pembiayaan lebih didominasi oleh pembentukan dana cadangan, masing-masing sebesar Rp30 miliar dan Rp15 miliar, yang menunjukkan arah kebijakan fiskal daerah yang lebih hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka menengah.

Pembiayaan netto menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada 2022, nilai pembiayaan netto mencapai titik tertinggi sebesar Rp748,80 miliar, kemudian menurun menjadi Rp447,59 miliar pada 2023 dan Rp408,62 miliar pada 2024. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mengalami perubahan signifikan setiap tahunnya. Pada 2021, SiLPA melonjak drastis hingga Rp782,26 miliar, tetapi menurun pada tahun-tahun berikutnya, mencapai Rp374,03 miliar pada 2023 dan Rp321,11 miliar pada 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya optimalisasi penggunaan anggaran atau peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan data laju pertumbuhan pembiayaan netto Kabupaten Tulungagung dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Berikut disajikan gambaran mengenai pertumbuhan realisasi Pembiayaan netto dan SILPA Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama periode 2020–2024.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Pembiayaan Netto	39,79	-10,62	70,08	-40,23	-8,71	10,06
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-11,57	74,89	-38,95	-21,68	-14,15	-2,29

Gambar 2. 91 Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Neto dan SILPA, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Dari sisi laju pertumbuhan pembiayaan netto, terjadi fluktuasi yang cukup tajam selama lima tahun terakhir. Pada 2020, pertumbuhan tercatat sebesar 39,79 persen, kemudian turun drastis menjadi minus

10,62 persen pada 2021. Pada 2022, pertumbuhan kembali melonjak hingga 70,08 persen, sebelum menurun menjadi minus 40,23 persen pada 2023 dan minus 8,71 persen pada 2024. Secara rata-rata, laju pertumbuhan pembiayaan netto selama lima tahun terakhir mencapai 10,06 persen, mencerminkan pola pembiayaan yang tidak stabil.

Sementara itu, laju pertumbuhan SiLPA juga menunjukkan ketidakstabilan. Pada 2020, SiLPA mengalami pertumbuhan negatif minus 11,57 persen, mencerminkan defisit anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada 2021, terjadi lonjakan signifikan hingga 74,89 persen, mengindikasikan surplus yang tinggi. Tren ini kembali berubah pada 2022 dengan kontraksi minus 38,95 persen, kemudian menurun lebih lanjut menjadi minus 21,68 persen pada 2023 dan minus 14,15 persen pada 2024. Rata-rata laju pertumbuhan SiLPA selama lima tahun terakhir tercatat minus 2,29 persen, menunjukkan tren negatif dalam periode tersebut.

Secara keseluruhan, pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Fluktuasi dalam penerimaan pembiayaan terutama berasal dari SiLPA, yang menunjukkan pola perubahan signifikan setiap tahunnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan menunjukkan alokasi yang lebih bervariasi, dengan fokus utama pada penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Penurunan nilai SiLPA dalam dua tahun terakhir dapat menjadi indikasi peningkatan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengoptimalkan strategi pengelolaan pembiayaan guna memastikan keberlanjutan fiskal dan efisiensi anggaran dalam jangka panjang.

2.5.1.4 Neraca Daerah

Menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah atau disebut Laporan Keuangan Pemerintaha Daerah (LKPD). Peran penting komponen LKPD dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah sebagai keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah provinsi dalam hal aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca daerah akan memberikan informasi berharga kepada pejabat pemerintah daerah, legislatif daerah, kreditur/debitur daerah, dan masyarakat umum tentang keadaan kekayaan dan kewajiban daerah, termasuk masalah ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca Daerah menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut diterbitkan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban (utang) dimana ini adalah utang yang timbul melalui keadaan masa lampau yang peneyelesaiannya melibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dapat dijelaskan yakni adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Keberadaan Neraca Daerah pada dokumen perencanaan ini dinilai sangat berperan penting untuk pemerintahan Kabupaten Tulungagung dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas. Sehingga untuk mengetahui sebuah posisi keuangan daerah Kabupaten Tulungagung, telah disajikan perkembangan data Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung pada beberapa tahun (2020-2024).

Tabel 2. 58 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**ASET**	**3.996.357.932.651,92**	**4.519.315.298.797,94**	**4.393.120.892.237,25**	**4.361.471.056.408,25**	**4.235.677.302.207,42**
1.1	**ASET LANCAR**	**524.273.418.359,86**	**856.565.542.989,26**	**570.828.404.435,78**	**460.314.633.661,66**	**393.993.305.273,68**
1.1.1	Kas	448.973.947.636,21	782.288.867.149,38	477.624.194.616,80	374.036.860.334,54	321.112.075.599,21
1.1.2	Piutang	26.110.129.600,92	17.764.836.524,46	37.700.579.198,92	44.700.156.506,32	30.431.900.562,17
1.1.6	Persediaan	49.006.553.615,31	56.412.732.619,48	55.395.408.820,06	41.135.917.520,80	42.399.880.592,30
1.1.7	Beban Dibayar Dimuka	182.787.507,42	99.106.695,94	108.221.800,00	441.699.300,00	49.448.520,00
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**138.128.917.968,58**	**149.732.595.636,91**	**162.872.877.310,11**	**162.017.920.658,38**	**162.305.759.238,00**
1.2.1	Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Permanen	138.128.917.968,58	149.732.595.636,91	162.872.877.310,11	162.017.920.658,38	162.305.759.238,00
1.3	**ASET TETAP**	**3.238.909.454.347,43**	**3.415.133.696.678,31**	**3.528.328.458.392,57**	**3.575.576.923.044,49**	**3.574.939.779.984,29**
1.3.1	Tanah	1.010.625.043.131,50	1.111.938.931.410,50	1.138.270.063.511,50	1.149.704.256.946,50	1.152.467.725.066,50
1.3.2	Peralatan dan Mesin	770.812.311.972,03	934.025.533.074,68	1.032.202.768.898,47	1.096.174.401.694,63	1.148.089.969.980,65
1.3.3	Gedung dan Bangunan	920.721.136.897,34	995.632.300.854,91	1.060.414.146.971,41	1.159.149.198.342,75	1.221.303.790.245,65
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.245.711.326.641,97	2.365.612.150.503,26	2.428.275.773.714,46	2.570.489.776.099,35	2.694.732.824.996,24
1.3.5	Aset tetap Lainnya	113.143.655.156,81	117.249.497.003,81	127.396.438.712,34	133.794.105.881,34	138.598.782.996,34
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	30.614.104.053,00	7.445.729.040,00	48.770.062.210,00	21.578.580.740,00	6.945.878.714,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.852.718.123.505,22	-2.116.770.445.208,85	-2.307.000.795.625,61	-2.555.313.396.660,08	-2.787.199.192.015,09
1.4	**ASET LAINNYA**	**95.046.141.976,05**	**97.883.463.493,46**	**111.091.152.098,79**	**113.561.579.043,72**	**25.629.560.511,45**
1.4.1	Kemitraan dengan pihak ketiga	69.228.059.427,00	70.370.099.415,00	70.369.599.415,00	70.369.099.415,00	7.101.308.095,00
1.4.2	Aset tak berwujud	1.256.678.900,00	2.910.811.200,00	3.542.840.567,50	2.865.218.550,00	1.909.548.270,00
1.4.3	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	319.866.216,40	348.897.396,81	689.439.136,05	808.757.455,04	76.275.000,00
1.4.4	Aset Lain-lain	24.241.537.432,65	24.253.655.481,65	22.861.676.032,24	18.691.803.623,68	16.153.195.146,45

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.4.5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility			13.627.596.948,00	20.826.700.000,00	389.234.000,00
1.5	**DANA CADANGAN**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**
1.5.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00	15.000.000.000,00
1.6.	**PROPERTI INVESTASI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.808.897.200,00**
1.6.1	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	63.808.897.200,00
2	**KEWAJIBAN**	**52.381.973.789,40**	**34.754.159.603,69**	**45.623.419.836,61**	**78.392.857.010,73**	**109.384.697.006,16**
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	**52.381.973.789,40**	**34.754.159.603,69**	**45.623.419.836,61**	**78.392.857.010,73**	**109.384.697.006,16**
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	2.011.736.603,80	24.504.367,00	22.915.856,43	300.000,00	175.676,00
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	224.499.061,67	237.418.065,00	274.876.110,00	162.566.083,33	84.995.000,00
2.1.4	Utang belanja	46.206.484.492,93	33.721.647.784,69	41.684.650.927,18	70.427.990.939,40	105.160.083.910,16
2.1.5	Utang jangka pendek lainnya	3.939.253.631,00	770.589.387,00	3.640.976.943,00	7.801.999.988,00	4.139.442.420,00
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank					
3	**EKUITAS**	**3.943.975.958.862,52**	**4.484.561.139.194,25**	**4.347.497.472.400,64**	**4.283.078.199.397,51**	**4.126.292.605.201,26**
3.1	Ekuitas	3.943.975.958.862,52	4.484.561.139.194,25	4.347.497.472.400,64	4.283.078.199.397,51	4.126.292.605.201,26
4	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**3.996.357.932.651,92**	**4.519.315.298.797,94**	**4.393.120.892.237,25**	**4.361.471.056.408,24**	**4.235.677.302.207,42**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Tulungagung 2020-2024

Berdasarkan data neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, total aset mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, total aset tercatat sebesar Rp3,99 triliun dan meningkat hingga mencapai Rp4,52 triliun pada tahun 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan bertahap hingga Rp4,23 triliun pada tahun 2024.

Aset lancar mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, aset lancar sebesar Rp524,27 miliar, meningkat tajam menjadi Rp856,57 miliar pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, 2023, dan 2024 aset lancar mengalami penurunan berturut-turut menjadi Rp570,83 miliar, Rp460,31 miliar dan Rp393,99 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo kas yang merupakan komponen utama dalam aset lancar.

Aset tetap menjadi komponen dominan dalam struktur aset Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dengan nilai yang terus meningkat dari Rp3,23 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,57 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, jaringan, gedung, dan peralatan. Namun demikian, akumulasi penyusutan yang juga terus meningkat hingga mencapai Rp2,78 triliun pada tahun 2024 mencerminkan perlunya pemeliharaan dan peremajaan aset agar nilai ekonomis dan fungsional aset tetap terjaga.

Aset lainnya menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp25,63 miliar dibandingkan dengan Rp113,56 miliar pada tahun 2023. Penurunan signifikan ini dipengaruhi dengan adanya komponen Properti Investasi yang mulai dicatat pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp63,81 miliar. Kehadiran properti investasi ini menjadi indikasi positif adanya diversifikasi aset pemerintah daerah ke dalam bentuk properti yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang di luar sumber-sumber pendapatan tradisional.

Properti investasi, yang dalam hal ini berupa tanah, mencerminkan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Investasi dalam properti tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan nilai aset, tetapi juga dapat berperan sebagai sumber pendapatan pasif melalui penyewaan atau pemanfaatan komersial di masa mendatang. Kehadiran properti investasi juga menunjukkan pergeseran pola pengelolaan aset yang lebih modern dan produktif, selaras dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Namun demikian, mengingat properti investasi ini baru mulai muncul dalam neraca tahun 2024, dibutuhkan upaya lanjutan agar aset tersebut dapat dikelola secara optimal, baik dari sisi peraturan, pemanfaatan, maupun transparansi pelaporan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa properti investasi tersebut tidak menjadi aset

menganggur, melainkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dana cadangan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai dicatat sejak tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp20 miliar. Selanjutnya, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp50 miliar. Namun, pada tahun 2024, dana cadangan mengalami penurunan drastis menjadi Rp15 miliar. Keberadaan dana cadangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama dalam menghadapi kebutuhan belanja yang tidak terduga atau program prioritas yang membutuhkan pendanaan tambahan. Peningkatan dana cadangan pada tahun 2023 menunjukkan kebijakan fiskal yang lebih berhati-hati dalam mengantisipasi kebutuhan masa depan. Namun, penurunan dana cadangan pada tahun 2024 mengindikasikan kemungkinan penggunaan dana tersebut untuk keperluan tertentu, seperti belanja modal atau pembiayaan program pembangunan daerah.

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana cadangan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan strategis daerah. Evaluasi yang lebih mendalam terhadap penyebab fluktuasi nilai dana cadangan juga diperlukan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalami tren peningkatan, terutama setelah tahun 2021. Total kewajiban naik dari Rp34,75 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp109,38 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh utang belanja yang meningkat secara signifikan dari Rp33,72 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp105,16 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan beban kewajiban yang perlu dikelola dengan baik agar tidak membebani anggaran daerah di masa mendatang.

Di sisi lain, ekuitas mengalami penurunan dari Rp4,48 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp4,13 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya penggunaan aset atau penurunan surplus yang perlu dievaluasi lebih lanjut terkait efektivitas pengelolaan dana dan investasi daerah.

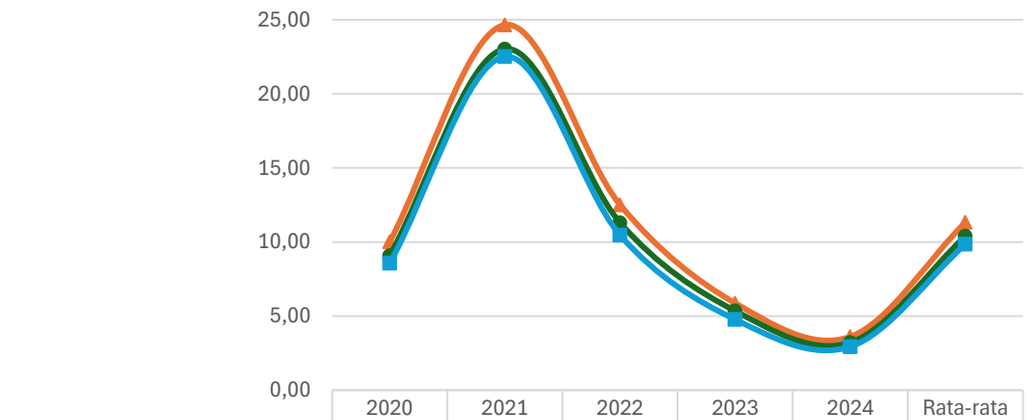
Secara keseluruhan, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalami dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Meskipun aset tetap mengalami pertumbuhan, penurunan aset lancar dan peningkatan kewajiban menjadi perhatian utama dalam analisis ini. Peningkatan utang belanja yang cukup besar pada tahun 2024 dapat menunjukkan adanya kebutuhan dana yang lebih tinggi untuk belanja operasional atau pembangunan daerah. Selain itu, dana cadangan yang mulai dialokasikan sejak tahun 2022 menunjukkan adanya upaya mitigasi risiko keuangan di masa mendatang. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas pengelolaan aset dan pengendalian kewajiban agar keseimbangan keuangan daerah dapat

terjaga. Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga perlu memastikan bahwa peningkatan utang belanja diimbangi dengan optimalisasi pendapatan daerah serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

1. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Rasio Lancar (Current Ratio)	10,01	24,65	12,51	5,87	3,60	11,33
Rasio Cepat (Quick Ratio)	9,07	23,02	11,30	5,35	3,21	10,39
Rasio Kas (Cash Ratio)	8,57	22,51	10,47	4,77	2,94	9,85

Gambar 2. 92 Rasio Likuiditas Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*), dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah

memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Pada tahun 2021, rasio lancar mencapai puncaknya di angka 24,65, menunjukkan kelebihan aset lancar yang cukup signifikan dibandingkan kewajiban jangka pendek. Namun, tren selanjutnya menunjukkan penurunan drastis hingga 3,60 pada tahun 2024, yang mengindikasikan berkurangnya cadangan aset lancar atau meningkatnya kewajiban jangka pendek. Sementara itu, untuk rata-rata rasio lancar selama periode ini adalah 11,33, menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nilai 11,33 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki aset lancar 11,33 kali lebih besar dari kewajiban jangka pendeknya, yang berarti likuiditasnya sangat baik.

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan.

Pola pergerakan rasio ini mirip dengan rasio lancar, dengan puncak tertinggi di tahun 2021 (23,02) dan penurunan bertahap hingga 3,21 pada tahun 2024. Hal ini dapat menandakan bahwa sumber daya likuid yang tersedia semakin terbatas untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, rata-rata rasio cepat selama lima tahun adalah 10,39, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki aset likuid yang cukup tanpa harus mengandalkan persediaan.

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung.

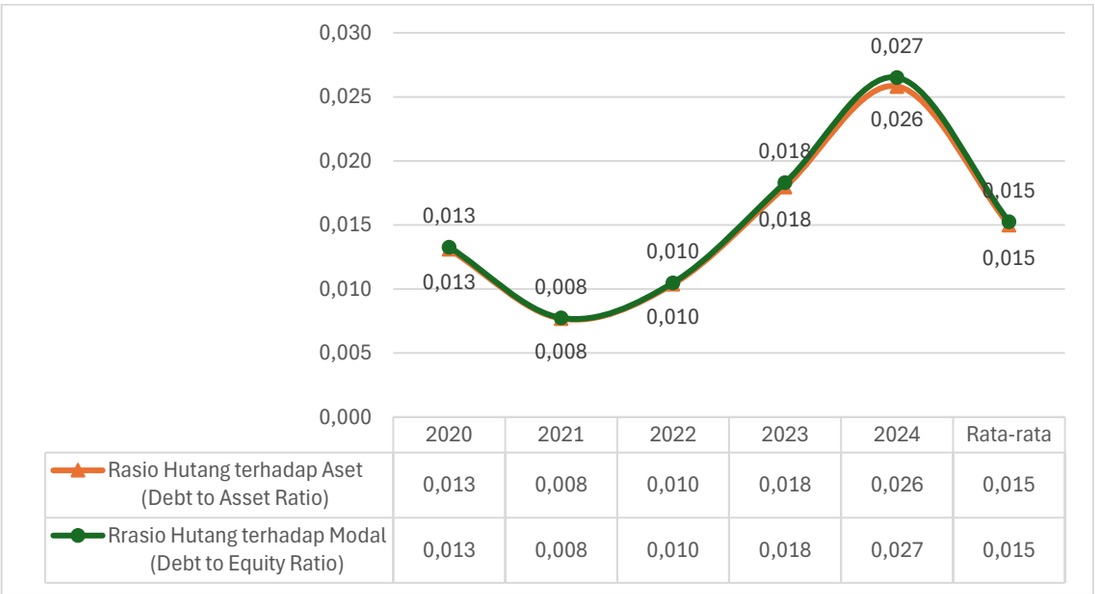
Pada tahun 2021, rasio ini mencapai 22,51, menunjukkan posisi kas yang sangat kuat. Namun, penurunan tajam menjadi 2,94 pada tahun 2024 mencerminkan semakin terbatasnya saldo kas yang dapat digunakan untuk memenuhi

kewajiban jangka pendek. Sementara itu, rata-rata rasio kas selama lima tahun adalah 9,85, ini berarti pemerintah memiliki kas 9,85 kali lipat lebih besar daripada kewajiban jangka pendeknya, yang mengindikasikan keuangan daerah sangat likuid.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih cukup tinggi, dengan current ratio 11,33, quick ratio 10,39, dan cash ratio 9,85. Namun, tren penurunan sejak tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya potensi risiko likuiditas. Penurunan ini bisa disebabkan oleh peningkatan kewajiban jangka pendek, penurunan penerimaan daerah, atau alokasi aset lancar ke investasi jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kas dan aset lancar untuk memastikan keberlanjutan fiskal yang sehat dan stabil di masa mendatang.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Rasio Hutang terhadap Aset (Debt to Asset Ratio)	0,013	0,008	0,010	0,018	0,026	0,015
Rrasio Hutang terhadap Modal (Debt to Equity Ratio)	0,013	0,008	0,010	0,018	0,027	0,015

Gambar 2. 93 Rasio Solvabilitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Solvabilitas Kabupaten Tulungagung sangat kuat, ditunjukkan dengan rendahnya beban utang terhadap aset dan modal dengan kecenderungan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Tren peningkatan utang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang berhati-hati dan tidak bergantung pada pinjaman untuk operasional atau investasi.

a. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang.

Rasio Hutang terhadap Aset dalam lima tahun terakhir berada di angka 0,015, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki struktur keuangan yang cukup sehat dengan tingkat kewajiban yang relatif rendah dibandingkan dengan total asetnya. Nilai 0,015 (atau 1,5 persen) menunjukkan bahwa hanya 1,5 persen dari total aset yang berasal dari utang, yang berarti beban utang daerah relatif sangat kecil. Namun, tren peningkatan dalam dua tahun terakhir perlu dicermati untuk menghindari potensi risiko keuangan di masa depan.

b. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari utang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya.

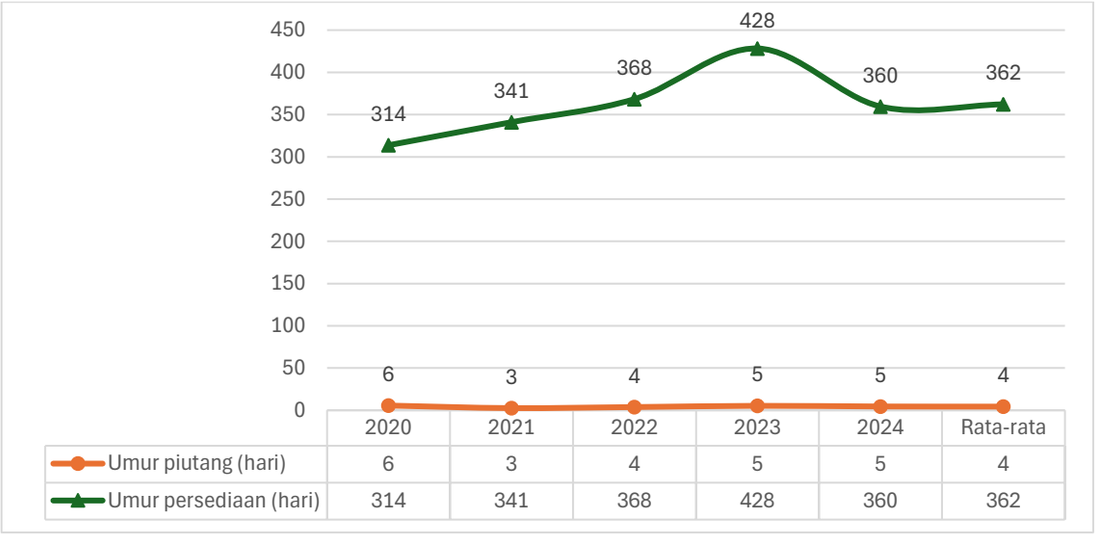
Rasio Hutang terhadap Modal menunjukkan pola yang hampir serupa dengan Rasio Hutang terhadap Aset, dengan angka terendah pada tahun 2021 (0,008) dan meningkat hingga 0,027 pada tahun 2024. Kenaikan rasio ini menandakan bahwa ketergantungan terhadap utang dalam struktur pendanaan mengalami peningkatan. Nilai rata-rata 0,015 atau 1,5 persen, ini berarti kabupaten memiliki modal yang sangat dominan dibandingkan dengan utangnya, menunjukkan solvabilitas yang sangat baik.

Secara umum, Rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Debt to Asset Ratio pada tahun 2020 sebesar 0,013, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,008 pada tahun 2021. Namun, angka ini kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 0,026 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pemerintah daerah terhadap total aset sempat menurun, dalam dua tahun terakhir terdapat peningkatan proporsi utang terhadap aset, yang dapat mencerminkan peningkatan kewajiban atau penurunan aset.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam

mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan.



	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Umur piutang (hari)	6	3	4	5	5	4
Umur persediaan (hari)	314	341	368	428	360	362

Gambar 2. 94 Rasio Aktivitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 (Persen)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

a. Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengonversi piutang menjadi kas. Umur piutang yang tinggi dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah. Nilai ini cenderung stabil dalam kisaran 3–6 hari selama lima tahun terakhir, dengan rata-rata 4 hari. Sementara itu, dalam lima tahun terakhir berada di angka rata-rata 5 hari, hal ini menunjukkan tingkat likuiditas piutang yang cukup baik, di mana penerimaan kas dari piutang dapat direalisasikan dalam waktu yang relatif singkat.

b. Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif.

Nilai ini mengalami peningkatan dari 314 hari pada tahun 2020 menjadi 428 hari pada tahun 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 360 hari pada tahun 2024. Rata-rata umur persediaan selama periode tersebut adalah 362 hari. Peningkatan umur persediaan menunjukkan adanya penumpukan barang yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan aset. Manajemen persediaan perlu dievaluasi,

mengingat angka 362 hari tergolong tinggi, yang bisa menyebabkan inefisiensi operasional atau biaya penyimpanan berlebih. Umur persediaan yang tinggi berpotensi menyebabkan inefisiensi, terutama jika menyangkut barang yang cepat usang atau memiliki biaya penyimpanan tinggi.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan piutang oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung cukup efektif, dengan waktu penagihan yang relatif singkat. Namun, pengelolaan persediaan menunjukkan kecenderungan peningkatan umur persediaan, yang dapat mengindikasikan kurang optimalnya distribusi atau penggunaan barang dalam operasional pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa persediaan yang ada dapat dikelola dengan lebih efisien, guna menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan efektivitas belanja daerah.

2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2026-2030. Analisis bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah periode 2026-2030.

Tabel 2. 59 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030

No	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	709.807.139.657,06	819.403.951.288,88	843.725.585.599,78	871.571.184.530,62	900.070.002.391,93	929.072.126.242,73
1.2	Pendapatan Transfer	2.315.188.672.023,00	2.069.700.965.771,00	2.093.500.532.942,73	2.102.221.209.020,88	2.111.010.778.440,04	2.119.869.785.457,61
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.024.995.811.680,06**	**2.889.104.917.059,87**	**2.937.226.118.542,51**	**2.973.792.393.551,49**	**3.011.080.780.831,97**	**3.048.941.911.700,34**
2.	**BELANJA**						
2.1	Belanja Operasi	2.457.379.110.248,38	2.398.014.374.277,57	2.332.008.193.949,25	2.330.254.407.243,99	2.328.583.082.671,68	2.326.995.044.853,64
2.2	Belanja Modal	236.264.000.863,03	189.880.997.142,30	274.054.856.212,47	306.991.524.887,32	340.449.969.027,17	374.292.690.747,82
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.159.058.237,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	417.711.766.325,00	431.209.545.640,00	444.163.068.380,79	449.546.461.420,19	455.047.729.133,12	460.654.176.098,88
	JUMLAH BELANJA	**3.112.513.935.673,41**	**3.039.104.917.059,87**	**3.070.226.118.542,51**	**3.106.792.393.551,50**	**3.144.080.780.831,97**	**3.181.941.911.700,34**
	SURPLUS/DEFISIT	**(87.518.123.993,35)**	**(150.000.000.000,00)**	**(133.000.000.000,00)**	**(133.000.000.000,00)**	**(133.000.000.000,00)**	**(133.000.000.000,00)**
3.	**PEMBIAYAAN**						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	424.028.501.916,56	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.400.000.000,00	0,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00

No	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
	PEMBIAYAAN NETTO	**408.628.501.916,56**	**150.000.000.000,00**	**133.000.000.000,00**	**133.000.000.000,00**	**133.000.000.000,00**	**133.000.000.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**321.110.377.923,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: diolah dari data BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2025

Proyeksi kerangka pendanaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2026 hingga 2030 mencerminkan perencanaan fiskal yang realistis dan terukur, dengan komposisi pendapatan yang masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat serta pertumbuhan moderat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2024, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3,02 triliun. Namun, pada tahun 2026 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp2,90 triliun, meskipun kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai Rp3,04 triliun pada tahun 2030. Tren ini mencerminkan adanya pertumbuhan pendapatan yang moderat dan terukur, yang dapat diasumsikan sebagai hasil dari upaya optimalisasi potensi pendapatan daerah serta penyesuaian terhadap dinamika ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional.

Dari sisi belanja daerah, total belanja juga menunjukkan pola serupa, yakni meningkat secara bertahap dari Rp3,05 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,18 triliun pada tahun 2030. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk menjaga kesinambungan program pembangunan dan pelayanan publik dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Meski demikian, terdapat defisit anggaran pada setiap tahun proyeksi, dengan nilai defisit yang konsisten sebesar Rp133 miliar mulai tahun 2027 hingga 2030, setelah sebelumnya mencapai Rp150 miliar pada tahun 2026. Defisit ini menunjukkan adanya selisih antara pendapatan dan belanja daerah, yang perlu diantisipasi secara strategis melalui kebijakan pembiayaan yang sehat.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan netto yang seimbang, dengan besaran yang identik dengan nilai defisit tiap tahunnya. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan fiskal agar tidak terjadi tekanan berlebih pada kas daerah. Sebagai konsekuensi dari pembiayaan tersebut, tidak terdapat proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2026 hingga 2030, yang berarti bahwa anggaran direncanakan secara efisien dan seluruh sumber pembiayaan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung realisasi belanja daerah.

2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran tahunan. Dengan mengetahui estimasi pendapatan yang akan diterima, pemerintah dapat merencanakan pengeluaran dengan lebih baik dan memastikan bahwa anggaran yang dibuat realistis dan dapat dilaksanakan. Data proyeksi pendapatan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya, prioritas pembangunan, dan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dengan proyeksi pendapatan yang akurat, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas fiskal dan menghindari defisit anggaran. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah keuangan di masa depan dan mengambil langkah-langkah preventif. Pemerintah daerah memiliki

berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

a. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah yang mencakup pajak hotel dan restoran serta pajak reklame. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh hotel dan restoran yang beroperasi terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemungutan pajak reklame perlu dioptimalkan melalui pendataan yang akurat terhadap seluruh reklame yang ada serta penegakan kepatuhan terhadap pembayaran pajak.
b. Peningkatan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, seperti sektor pariwisata, pasar, parkir, dan terminal, sehingga masyarakat lebih tertib dalam membayar retribusi. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dapat ditingkatkan dengan mempermudah proses perizinan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan {PBG) sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi tata ruang.
c. Pemanfaatan Aset Daerah. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan menginventarisasi aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal, serta mempertimbangkan opsi penyewaan atau penjualan aset yang tidak produktif. Selain itu, optimalisasi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) perlu dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan daerah. Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa BUMD beroperasi secara efisien dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.
d. Inovasi dan Digitalisasi. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi pajak berbasis teknologi untuk mempermudah pemungutan pajak dan retribusi secara lebih transparan dan efisien. Penerapan sistem *e-government* juga perlu ditingkatkan guna mempercepat administrasi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
e. Kerja sama dengan Pihak Swasta. Melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP), pemerintah daerah dapat menggandeng sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Selain itu, optimalisasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur untuk

meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola pendapatan daerah secara profesional dan efisien. Selain itu, peran inspektorat daerah harus diperkuat guna memastikan adanya pengawasan dan audit yang ketat terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah, sehingga tercipta tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pendapatan secara signifikan. Peningkatan ini pada akhirnya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

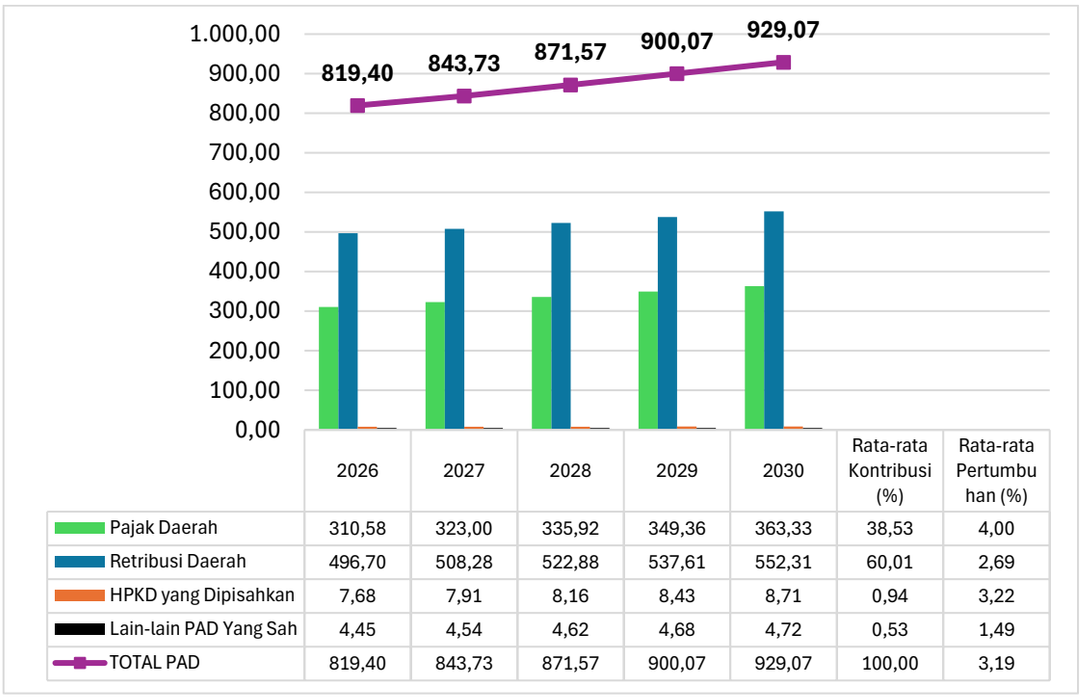
Berikut disajikan rincian mengenai proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama periode 2026–2030.

Tabel 2. 60 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030

No	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**709.807.139.657,06**	**819.403.951.288,87**	**843.725.585.599,78**	**871.571.184.530,62**	**900.070.002.391,93**	**929.072.126.242,73**
1.1.1	Pajak Daerah	167.248.859.979,00	310.576.322.399,89	322.999.375.295,89	335.919.350.307,73	349.356.124.320,04	363.330.369.292,84
1.1.2	Retribusi Daerah	520.953.024.576,87	496.704.142.037,09	508.276.104.672,00	522.876.906.747,00	537.608.130.860,00	552.311.414.025,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.247.861.023,38	7.677.384.453,25	7.908.935.733,25	8.157.689.577,25	8.425.441.113,25	8.713.968.226,25
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	14.357.394.077,81	4.446.102.398,64	4.541.169.898,64	4.617.237.898,64	4.680.306.098,64	4.716.374.698,64
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2.315.188.672.023,00**	**2.069.700.965.771,00**	**2.093.500.532.942,73**	**2.102.221.209.020,88**	**2.111.010.778.440,04**	**2.119.869.785.457,61**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.059.955.245.348,00	1.942.876.976.000,00	1.948.067.673.942,73	1.956.788.350.020,88	1.965.577.919.440,04	1.974.436.926.457,61
1.2.2	Transfer antar – daerah	255.233.426.675,00	126.823.989.771,00	145.432.859.000,00	145.432.859.000,00	145.432.859.000,00	145.432.859.000,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	-		-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-		-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-		-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.024.995.811.680,06**	**2.889.104.917.059,87**	**2.937.226.118.542,51**	**2.973.792.393.551,49**	**3.011.080.780.831,97**	**3.048.941.911.700,34**

Sumber: diolah dari data BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2025

Proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk periode 2026 hingga 2030 menunjukkan postur fiskal yang dirancang secara hati-hati dengan pendekatan yang cukup realistis dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Total pendapatan daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan bertahap dari Rp2,89 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,04 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata sebesar 3,19 persen per tahun, meningkat dari Rp819,40 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp929,07 miliar pada tahun 2030. Kontribusi terbesar terhadap PAD secara konsisten disumbangkan oleh komponen Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Retribusi Daerah diproyeksikan menyumbang rata-rata 60,01 persen terhadap total PAD, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,69 persen per tahun. Relatif rendahnya pertumbuhan ini perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan publik agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap pendapatan. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030.



	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pajak Daerah	310,58	323,00	335,92	349,36	363,33	38,53	4,00
Retribusi Daerah	496,70	508,28	522,88	537,61	552,31	60,01	2,69
HPKD yang Dipisahkan	7,68	7,91	8,16	8,43	8,71	0,94	3,22
Lain-lain PAD Yang Sah	4,45	4,54	4,62	4,68	4,72	0,53	1,49
TOTAL PAD	819,40	843,73	871,57	900,07	929,07	100,00	3,19

Gambar 2. 95 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Pajak Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 38,53 persen, dengan laju pertumbuhan tahunan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 4,00 persen. Peningkatan ini mencerminkan potensi yang kuat dari sektor perpajakan daerah sebagai sumber pendapatan yang relatif andal dan berkelanjutan. Kontribusi yang signifikan dari Pajak Daerah mengindikasikan bahwa sektor-sektor ekonomi lokal yang menjadi basis pemungutan pajak—seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan pajak bumi dan bangunan—diperkirakan akan terus berkembang seiring

dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan mobilitas masyarakat di Tulungagung. Namun demikian, dominasi kontribusi yang tinggi juga membawa tantangan, terutama dalam hal efektivitas pemungutan, kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi basis pajak. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem administrasi perpajakan, meningkatkan digitalisasi layanan pajak, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran dan partisipasi dalam pembayaran pajak semakin meningkat. Selain itu, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, misalnya dengan menggali potensi pajak baru yang sesuai dengan karakteristik wilayah, juga menjadi langkah strategis untuk menjaga tren positif pertumbuhan ini.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,94 persen terhadap total PAD selama periode proyeksi tahun 2026 hingga 2030. Meskipun kontribusinya tergolong kecil dibandingkan dengan komponen utama seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, HPKD menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup positif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,22 persen per tahun. Nilai HPKD diperkirakan meningkat dari Rp7,68 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp8,71 miliar pada tahun 2030. HPKD pada dasarnya mencerminkan hasil atau dividen yang diperoleh pemerintah daerah dari penyertaan modal atau kepemilikan atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun bentuk-bentuk investasi lainnya. Pertumbuhan positif komponen ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan kinerja BUMD atau unit usaha yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Namun demikian, kontribusi yang masih sangat kecil terhadap total PAD menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat peran dan kinerja BUMD melalui strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan tata kelola, inovasi bisnis, dan perluasan sektor usaha yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas penyertaan modal serta transparansi laporan keuangan BUMD menjadi kunci dalam memastikan bahwa kontribusi HPKD dapat ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pengembangan HPKD yang lebih optimal tidak hanya akan memperbesar kontribusi terhadap PAD, tetapi juga dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi lokal, dan peningkatan daya saing ekonomi Kabupaten Tulungagung.

Komponen Lain-lain PAD yang Sah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,53 persen terhadap total PAD selama

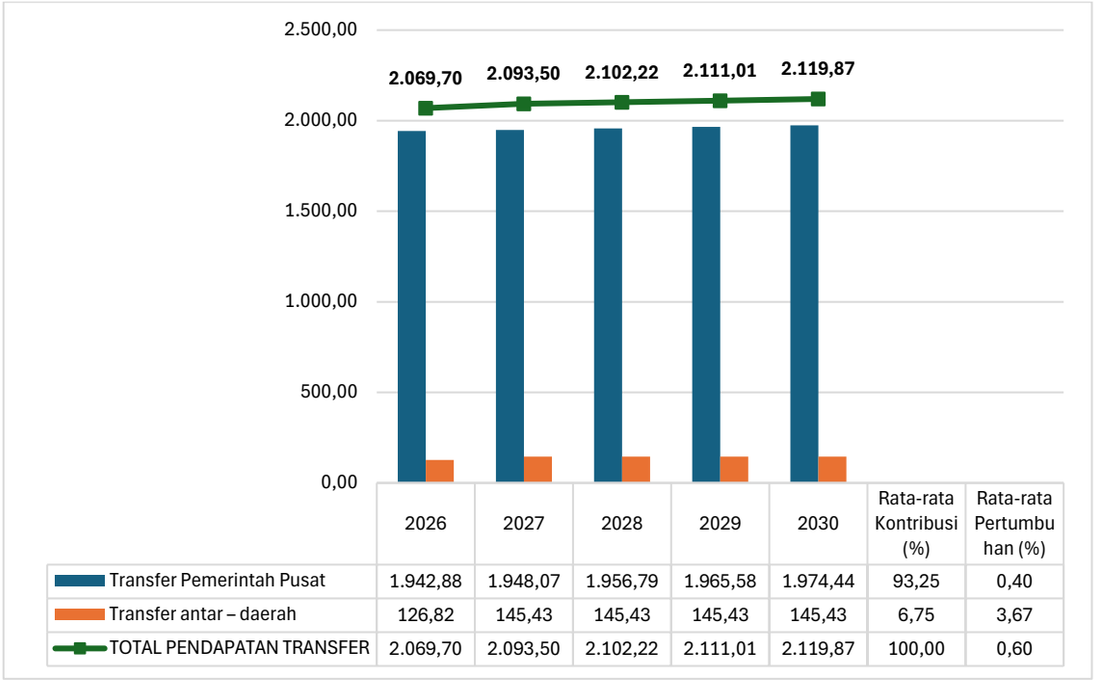
periode 2026 hingga 2030. Dari sisi nominal, nilai Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan meningkat secara bertahap dari Rp4,45 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp4,72 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan rata-rata tahunannya tercatat sebesar 1,49 persen, yang menunjukkan tren positif meskipun laju pertumbuhannya masih tergolong rendah dibandingkan komponen PAD lainnya.

Lain-lain PAD yang Sah mencakup berbagai jenis pendapatan yang bersifat residual dan tidak termasuk dalam kategori Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Beberapa sumber yang umum dalam komponen ini antara lain hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan denda, pendapatan bunga, dan penerimaan dari hasil pemanfaatan aset daerah lainnya. Kontribusi yang relatif kecil serta tingkat pertumbuhan yang moderat menandakan bahwa potensi sumber pendapatan dari komponen ini masih belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan identifikasi potensi pendapatan baru yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta peningkatan pengelolaan aset secara profesional dan transparan dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kontribusi komponen ini di masa mendatang. Peningkatan Lain-lain PAD yang Sah, meskipun nilainya kecil, tetap penting dalam menciptakan struktur PAD yang lebih seimbang dan beragam. Hal ini dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersifat dominan namun rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Secara keseluruhan, proyeksi ini menunjukkan optimisme terhadap kinerja PAD Kabupaten Tulungagung yang terus meningkat sejalan dengan upaya penguatan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi menjadi indikator penting bahwa perekonomian lokal serta sistem administrasi pemungutan telah berjalan ke arah yang lebih baik. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan inovasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan agar ketergantungan terhadap dua komponen utama dapat diminimalkan, sehingga struktur PAD menjadi lebih seimbang, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi di masa depan.

Sementara itu, Pendapatan Transfer merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung dan menjadi penopang signifikan bagi pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan data proyeksi untuk periode 2026 hingga 2030, total pendapatan transfer menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan moderat, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,60 persen. Komponen pendapatan transfer ini terbagi atas dua sumber utama, yaitu transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Berikut grafik

Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030.



	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Transfer Pemerintah Pusat	1.942,88	1.948,07	1.956,79	1.965,58	1.974,44	93,25	0,40
Transfer antar – daerah	126,82	145,43	145,43	145,43	145,43	6,75	3,67
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2.069,70	2.093,50	2.102,22	2.111,01	2.119,87	100,00	0,60

Gambar 2. 96 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Kontribusi terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat, yang secara konsisten memberikan porsi sekitar 93,25 persen dari total pendapatan transfer daerah. Nilai transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan meningkat secara bertahap dari Rp1,942 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,974 triliun pada tahun 2030. Rata-rata pertumbuhan tahunan komponen ini tercatat sebesar 0,40 persen. Walaupun pertumbuhan ini tergolong rendah, namun stabilitas alokasi dana dari pemerintah pusat mencerminkan adanya keberlanjutan dukungan fiskal nasional terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Transfer Antar Daerah Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan pada tahun 2026 sebesar Rp126,82 miliar menjadi Rp145,43 miliar pada tahun 2027. Namun setelah itu, nilainya cenderung stagnan pada angka yang sama hingga tahun 2030. Stagnasi ini menunjukkan adanya keterbatasan ruang pertumbuhan dari sumber pendapatan tersebut, yang kemungkinan dipengaruhi oleh skema alokasi yang relatif tetap dari pemerintah provinsi maupun mekanisme distribusi antar daerah. Meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan transfer hanya sekitar 6,75 persen, tren stagnan ini penting untuk dicermati karena dapat menjadi sinyal bahwa ketergantungan terhadap Transfer Antar Daerah tidak dapat diandalkan sebagai motor pertumbuhan fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu memperkuat strategi diversifikasi sumber pendapatan, sekaligus memanfaatkan potensi kerjasama antar daerah secara lebih produktif, misalnya melalui integrasi perencanaan

pembangunan lintas wilayah atau penguatan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya bersama, agar Transfer Antar Daerah dapat memberi nilai tambah yang lebih nyata bagi pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan transfer Kabupaten Tulungagung menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap alokasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung diharapkan terus mendorong inovasi dalam pengelolaan PAD serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan antar-daerah untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal yang menuntut daerah tidak hanya sebagai pelaksana anggaran, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing.

Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak menunjukkan kontribusi dalam proyeksi ini, yang berarti tidak ada estimasi tambahan dari pendapatan hibah atau Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mencari alternatif sumber pendapatan yang lebih beragam untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Secara umum, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang konservatif namun stabil. Upaya penguatan PAD secara berkelanjutan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. Untuk itu, diperlukan kebijakan fiskal yang inovatif, penguatan kapasitas aparatur pemungut pajak dan retribusi, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai bagian dari strategi jangka menengah pembangunan keuangan daerah.

2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk berbagai tujuan yang esensial dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi belanja membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran tahunan dengan mengestimasi kebutuhan pengeluaran. Ini memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan secara efektif dan efisien. Dengan proyeksi belanja yang akurat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Proyeksi belanja memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran, mencegah pemborosan, dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan.

Sementara itu, efisiensi belanja daerah sangat penting untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara optimal demi meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi dalam belanja daerah:

a. Perencanaan Anggaran yang Tepat Sasaran. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) perlu diterapkan agar setiap alokasi belanja menghasilkan output yang jelas dan terukur. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki dampak nyata serta signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
b. Reformasi Birokrasi yang efektif. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dengan mengoptimalkan struktur organisasi serta meningkatkan kinerja aparatur.
c. Pengawasan dan Pengendalian Anggaran. Penguatan fungsi pengawasan internal melalui peningkatan peran inspektorat daerah perlu dilakukan guna mencegah penyalahgunaan anggaran dan inefisiensi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus diterapkan dengan cara memublikasikan laporan keuangan secara berkala agar dapat diakses oleh masyarakat.
d. Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa. Penggunaan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Evaluasi dan penyesuaian kontrak juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian harga serta kualitas barang dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah daerah.
e. Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif. Inventarisasi dan penataan aset secara berkala dapat membantu mengidentifikasi aset yang kurang produktif atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset, seperti bangunan, lahan, dan fasilitas lainnya, untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
f. Pengurangan Pemborosan dan Efisiensi Operasional. Pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan hemat energi dan sumber daya dalam operasional pemerintahan, seperti pengelolaan listrik, air, dan bahan bakar secara lebih efisien. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses administrasi serta mengurangi biaya operasional yang tidak perlu.
g. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah daerah perlu dilakukan guna meningkatkan keterampilan dan efektivitas dalam menjalankan tugas. Selain itu, penerapan sistem manajemen kinerja yang objektif dapat mendorong peningkatan produktivitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah.
h. Partisipasi Masyarakat. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar program dan kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi mereka. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan oleh

masyarakat juga diperlukan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal dan transparan.

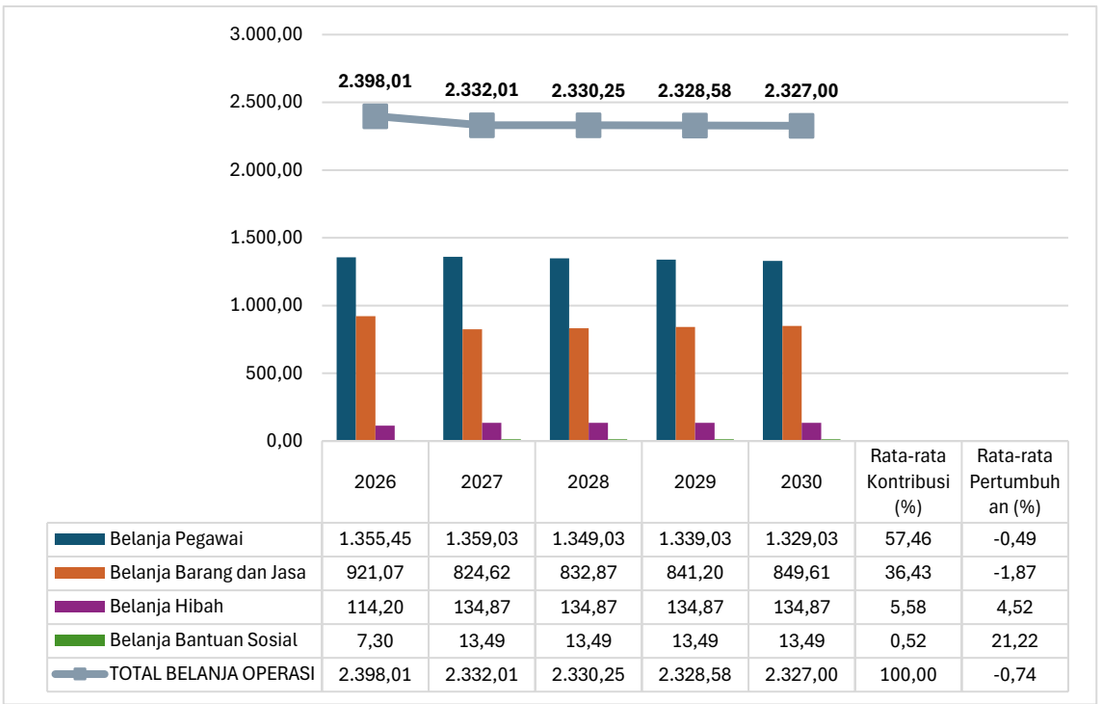
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat membelanjakan anggaran secara efektif dan efesien, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Tabel 2. 61 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030

No	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**	**2.457.379.110.248,38**	**2.398.014.374.277,57**	**2.332.008.193.949,25**	**2.330.254.407.243,99**	**2.328.583.082.671,68**	**2.326.995.044.853,64**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.251.356.648.941,00	1.355.446.575.747,90	1.359.025.657.284,79	1.349.025.657.284,79	1.339.025.657.284,79	1.329.025.657.284,79
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.020.570.952.319,38	921.070.648.529,67	824.621.329.474,06	832.867.542.768,80	841.196.218.196,49	849.608.180.378,45
2.1.3	Belanja Bunga	-		-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-		-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	168.587.358.058,00	114.200.212.800,00	134.869.886.446,40	134.869.886.446,40	134.869.886.446,40	134.869.886.446,40
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.864.150.930,00	7.296.937.200,00	13.491.320.744,00	13.491.320.744,00	13.491.320.744,00	13.491.320.744,00
2.2	**Belanja Modal**	**236.264.000.863,03**	**189.880.997.142,30**	**274.054.856.212,47**	**306.991.524.887,32**	**340.449.969.027,17**	**374.292.690.747,82**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	60.016.000,00		2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.227.542.722,00	40.093.345.314,00	50.803.889.581,36	57.123.893.445,29	64.230.105.789,88	72.220.330.950,14
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.138.982.064,03	20.619.420.748,30	44.659.817.391,07	49.125.799.130,18	54.038.379.043,19	59.442.216.947,51
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.213.850.262,00	121.184.691.580,00	172.927.238.140,91	193.827.513.102,82	213.997.515.214,16	233.155.648.229,73
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.888.185.815,00	7.473.539.500,00	1.344.251.099,13	1.478.676.209,04	1.626.543.829,94	1.789.198.212,94
2.2.6	Aset Lainnya	3.735.424.000,00	510.000.000,00	2.319.660.000,00	2.435.643.000,00	2.557.425.150,00	2.685.296.407,50
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.159.058.237,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.159.058.237,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
2.4	**Belanja Transfer**	**417.711.766.325,00**	**431.209.545.640,00**	**444.163.068.380,79**	**449.546.461.420,19**	**455.047.729.133,12**	**460.654.176.098,88**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	12.920.445.325,00	31.689.167.640,00	43.127.547.996,79	45.879.625.705,47	48.696.425.518,00	51.564.178.331,78
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	404.791.321.000,00	399.520.378.000,00	401.035.520.384,00	403.666.835.714,72	406.351.303.615,11	409.089.997.767,10
	JUMLAH BELANJA	**3.112.513.935.673,41**	**3.039.104.917.059,87**	**3.070.226.118.542,51**	**3.106.792.393.551,50**	**3.144.080.780.831,97**	**3.181.941.911.700,34**

Sumber: diolah dari data BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2025

Berdasarkan proyeksi komponen Belanja Operasi Kabupaten Tulungagung untuk periode tahun 2026 hingga 2030, total belanja operasi diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan tipis dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,74 persen per tahun. Nilai belanja operasi turun secara perlahan dari Rp2,398 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,327 triliun pada tahun 2030. Meskipun penurunannya relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengefisienkan belanja rutin. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen belanja operasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030.



	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Belanja Pegawai	1.355,45	1.359,03	1.349,03	1.339,03	1.329,03	57,46	-0,49
Belanja Barang dan Jasa	921,07	824,62	832,87	841,20	849,61	36,43	-1,87
Belanja Hibah	114,20	134,87	134,87	134,87	134,87	5,58	4,52
Belanja Bantuan Sosial	7,30	13,49	13,49	13,49	13,49	0,52	21,22
TOTAL BELANJA OPERASI	2.398,01	2.332,01	2.330,25	2.328,58	2.327,00	100,00	-0,74

Gambar 2. 97 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

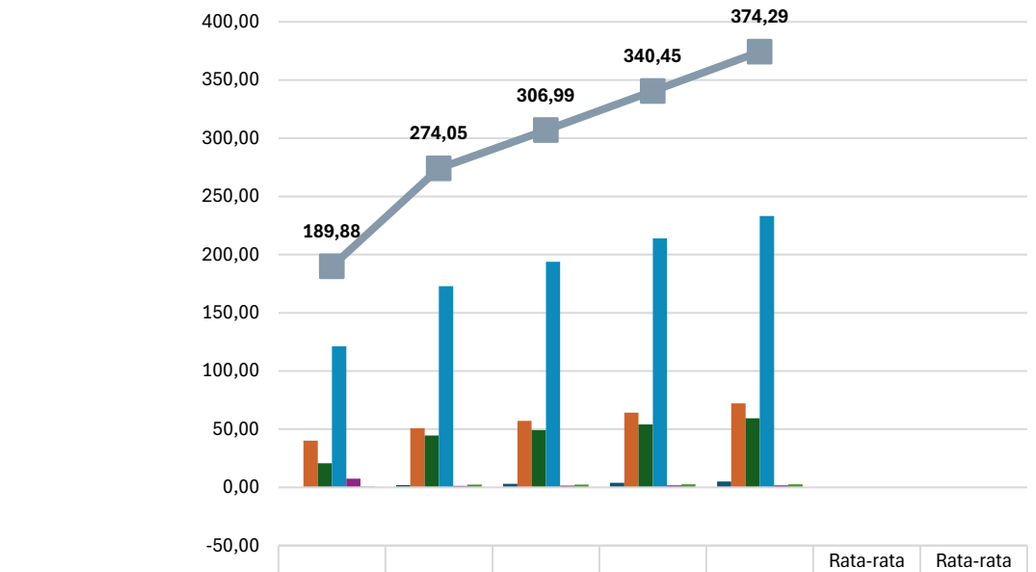
Komponen terbesar dalam struktur belanja operasi tetap didominasi oleh Belanja Pegawai, yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 57,46 persen. Meskipun nilainya menurun perlahan dari Rp1,355 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,329 triliun pada tahun 2030, belanja pegawai tetap menjadi beban terbesar dalam komponen belanja operasi. Penurunan ini mencerminkan adanya kebijakan pengendalian belanja pegawai namun tetap perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas layanan publik agar efisiensi ini berdampak positif bagi masyarakat.

Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan mengalami tren penurunan moderat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 1,87 persen per tahun, turun dari Rp921,07 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp849,61 miliar pada tahun 2030. Penurunan ini sejalan dengan efesiensi dan rasionalisasi belanja daerah untuk menjaga kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga alokasi yang cukup terhadap komponen ini tetap menjadi prioritas.

Di sisi lain, belanja hibah memiliki kontribusi lebih kecil yaitu 5,58 persen, tetapi justru mencatat pertumbuhan positif dengan rata-rata 4,52 persen per tahun, yang menandakan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap dukungan kolaboratif dengan masyarakat maupun lembaga sosial. Sementara itu, belanja bantuan sosial meskipun kontribusinya hanya 0,52 persen, mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 21,22 persen per tahun, yang dapat dipahami sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat rentan..

Secara keseluruhan, total belanja operasi Kabupaten Tulungagung diproyeksikan menurun tipis dengan rata-rata pertumbuhan minus 0,74 persen per tahun. Hal ini menandakan adanya pergeseran orientasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih menekankan pada efisiensi belanja rutin, sembari membuka ruang fiskal bagi penguatan belanja pembangunan. Selain itu, Penguatan akuntabilitas, inovasi birokrasi, dan perbaikan tata kelola keuangan juga menjadi kunci agar pengendalian belanja ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi Belanja Modal, Kabupaten Tulungagung diproyeksikan mengalami tren peningkatan yang positif, yaitu dari Rp189,88 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp374,29 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat investasi pembangunan, khususnya pada infrastruktur dan aset tetap yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama periode tersebut, belanja modal tumbuh rata-rata sebesar 19,30 persen per tahun, menunjukkan arah kebijakan fiskal yang pro-pembangunan. Komponen belanja modal yang memberikan kontribusi terbesar adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang mencerminkan fokus pemerintah terhadap perbaikan dan pengembangan infrastruktur dasar yang strategis bagi peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan produktivitas wilayah. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen belanja modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030.



	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Tanah	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	0,84	0,00
Peralatan dan Mesin	40,09	50,80	57,12	64,23	72,22	19,28	16,01
Gedung dan Bangunan	20,62	44,66	49,13	54,04	59,44	14,98	36,65
Jalan, Irigasi dan Jaringan	121,18	172,93	193,83	214,00	233,16	63,04	18,54
Aset Tetap Lainnya	7,47	1,34	1,48	1,63	1,79	1,17	-13,00
Aset Lainnya	0,51	2,32	2,44	2,56	2,69	0,68	92,46
TOTAL BELANJA MODAL	189,88	274,05	306,99	340,45	374,29	100,00	19,30

Gambar 2. 98 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)
Sumber: Hasil Olah Data 2025

Komponen belanja modal terbesar berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan kontribusi rata-rata sebesar 63,04 persen. Alokasi yang signifikan ini menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, dan jaringan, menjadi prioritas utama dalam mendukung konektivitas, peningkatan produktivitas, serta pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pertumbuhan rata-rata sebesar18,54 persen pada komponen ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga memberikan kontribusi yang cukup besar, masing-masing sebesar 19,28 persen dan 14,98 persen terhadap total belanja modal. Keduanya menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 16,01 persen dan 36,65 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan peralatan, sarana, dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Komponen Belanja Modal Tanah, meskipun kontribusinya masih kecil sekitar 0,84 persen, mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 36,11 persen. Hal ini mengindikasikan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan atas pengadaan lahan baru yang dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas publik maupun infrastruktur lainnya. Sementara itu, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Aset

Lainnya juga tumbuh stabil, meskipun kontribusinya terhadap total belanja modal relatif kecil.

Secara umum, proyeksi belanja modal Kabupaten Tulungagung memperlihatkan orientasi pembangunan yang berimbang antara peningkatan infrastruktur dasar, penguatan sarana-prasarana pemerintahan, dan pemenuhan kebutuhan aset penunjang lainnya. Kenaikan belanja modal yang konsisten diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Untuk itu, perencanaan dan pelaksanaan belanja modal perlu terus didukung dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dua komponen belanja lainnya adalah Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan tetap konstan sebesar Rp20 miliar per tahun sepanjang periode 2026 hingga 2030, mencerminkan kesiapsiagaan fiskal pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi risiko atau keadaan darurat. Sementara itu, Belanja Transfer, yang meliputi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, diperkirakan meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp460,65 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal hingga ke tingkat desa.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja Pemerintah Kabupaten Tulungagung menunjukkan keseimbangan antara upaya efisiensi pengeluaran rutin dan peningkatan investasi publik melalui belanja modal. Pemerintah daerah perlu terus memastikan bahwa belanja yang dialokasikan benar-benar mampu mendorong peningkatan pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui strategi pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, diharapkan belanja daerah dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung secara berkelanjutan.

2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah digunakan untuk berbagai tujuan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pembiayaan membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran tahunan dengan memperhitungkan kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk membiayai proyek-proyek strategis. Dengan proyeksi pembiayaan, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola utang secara lebih efektif, termasuk menentukan jumlah pinjaman yang dibutuhkan dan jadwal pelunasan utang. Proyeksi pembiayaan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang mungkin timbul dari kegiatan pembiayaan, seperti risiko likuiditas dan risiko bunga. Dengan proyeksi pembiayaan yang akurat, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa sumber-sumber

pembiayaan yang digunakan tidak menimbulkan beban berlebihan pada anggaran di masa depan.

Pemerintah daerah dapat menyusun berbagai kebijakan pembiayaan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kebijakan-kebijakan ini harus mempertimbangkan kebutuhan daerah, potensi pendapatan, dan keberlanjutan fiskal. Berikut adalah beberapa kebijakan pembiayaan yang dapat disusun oleh pemerintah daerah:

a. Diversifikasi Sumber Pembiayaan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan pinjaman dari lembaga keuangan, untuk membiayai proyek-proyek strategis, dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan kemampuan bayar. Selain itu, penerbitan obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai dan mengelola proyek-proyek infrastruktur serta pelayanan publik secara lebih efisien.
b. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah. Inventarisasi dan penilaian aset daerah secara berkala menjadi langkah penting dalam mengetahui nilai dan potensi aset yang dimiliki. Pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui skema penyewaan, kerja sama pengelolaan, atau penjualan aset yang tidak produktif agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan daerah.
c. Efisiensi dan Pengendalian Pengeluaran. Pemerintah daerah harus menerapkan disiplin anggaran dan pengendalian belanja guna memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan. Selain itu, praktik penghematan energi dan sumber daya perlu diterapkan untuk mengurangi biaya operasional pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
d. Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan daerah, penerapan kebijakan fiskal yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Penyusunan Perencanaan Fiskal Jangka Menengah (PFJM) dapat membantu memastikan keberlanjutan fiskal dengan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membangun cadangan dana darurat guna menghadapi situasi krisis atau keadaan darurat yang memerlukan pembiayaan mendesak.

Penerapkan kebijakan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2. 62 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030

No	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**424.028.501.916,56**	**150.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	374.028.501.916,56	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	-	-	-	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**15.400.000.000,00**	**0,00**	**17.000.000.000,00**	**17.000.000.000,00**	**17.000.000.000,00**	**17.000.000.000,00**
3.1.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	400.000.000,00	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3.1.2	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**408.628.501.916,56**	**150.000.000.000,00**	**133.000.000.000,00**	**133.000.000.000,00**	**133.000.000.000,00**	**133.000.000.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**321.110.377.923,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: diolah dari data BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2025

Berdasarkan data proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2026 hingga 2030, terdapat kecenderungan stabilitas yang cukup konsisten pada komponen penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan setiap tahun diproyeksikan sebesar Rp150 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Angka ini menunjukkan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengandalkan SiLPA sebagai sumber utama pembiayaan untuk menyeimbangkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa mendatang. Jika dibandingkan dengan baseline tahun 2024, terjadi penurunan signifikan dari sisi penerimaan pembiayaan, yang sebelumnya tercatat sebesar Rp424,03 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya pencairan dana cadangan pada tahun-tahun proyeksi, berbeda dengan tahun 2024 yang mencatat pencairan dana cadangan sebesar Rp50 miliar.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, meskipun tidak ada alokasi pada tahun 2026, mulai tahun 2027 hingga 2030 direncanakan belanja pembiayaan sebesar Rp17 miliar per tahun. Komponen pengeluaran ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu penyertaan modal daerah sebesar Rp2 miliar dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp15 miliar per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki komitmen untuk memperkuat ketahanan fiskal jangka menengah melalui alokasi dana cadangan, sekaligus menjaga keberlanjutan investasi daerah melalui penyertaan modal.

Pembiayaan netto yang dihitung sebagai selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menunjukkan angka yang cukup konsisten sebesar Rp133 miliar per tahun selama periode 2027–2030, dengan pengecualian tahun 2026 yang seluruh penerimaannya digunakan secara utuh tanpa pengeluaran pembiayaan. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang pada tahun 2024 masih tercatat sebesar Rp321,11 miliar, diproyeksikan menjadi nol pada seluruh tahun proyeksi. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang mengarah pada efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan dana pembiayaan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung menggambarkan arah kebijakan fiskal yang konservatif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal. Fokus utama pemerintah daerah tampaknya diarahkan pada pemanfaatan sisa anggaran tahun sebelumnya secara efisien dan penguatan kapasitas fiskal melalui pengeluaran yang strategis, seperti dana cadangan dan penyertaan modal. Keberhasilan implementasi dari proyeksi ini tentu sangat bergantung pada disiplin anggaran, efektivitas pengelolaan

keuangan daerah, serta dinamika ekonomi yang dapat memengaruhi realisasi SiLPA di masa mendatang.

2.5.2.4 Proyeksi Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program selama tahun 2026-2030.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 63 Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030

No	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	3.024.995.811.680,06	2.889.104.917.059,87	2.937.226.118.542,51	2.973.792.393.551,49	3.011.080.780.831,97	3.048.941.911.700,34
2	Penerimaan Pembiayaan	424.028.501.916,56	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
	Total Penerimaan	**3.449.024.313.596,62**	**3.039.104.917.059,87**	**3.087.226.118.542,51**	**3.123.792.393.551,50**	**3.161.080.780.831,97**	**3.198.941.911.700,34**
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	**3.449.024.313.596,62**	**3.039.104.917.059,87**	**3.087.226.118.542,51**	**3.123.792.393.551,50**	**3.161.080.780.831,97**	**3.198.941.911.700,34**
3	**PRIORITAS I (70 %)**		**2.127.373.441.941,91**	**2.161.058.282.979,76**	**2.186.654.675.486,05**	**2.212.756.546.582,38**	**2.239.259.338.190,24**
	a. Belanja pegawai		1.355.446.575.747,90	1.359.025.657.284,79	1.349.025.657.284,79	1.339.025.657.284,79	1.329.025.657.284,79
	b. Pengeluaran Pembiayaan		0,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
	c. Belanja wajib dan mengikat lainnya		771.926.866.194,01	785.032.625.694,97	820.629.018.201,26	856.730.889.297,59	893.233.680.905,45
4	**PRIORITAS II (20 %)**		**607.820.983.411,97**	**617.445.223.708,50**	**624.758.478.710,30**	**632.216.156.166,39**	**639.788.382.340,07**
5	**PRIORITAS III (10 %)**		**303.910.491.705,99**	**308.722.611.854,25**	**312.379.239.355,15**	**316.108.078.083,20**	**319.894.191.170,03**

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung selama periode 2026 hingga 2030 menunjukkan arah kebijakan fiskal yang relatif stabil dan realistis dalam merespons dinamika keuangan daerah. Total kapasitas riil, yang dihitung dari penjumlahan antara pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, diproyeksikan mengalami pertumbuhan moderat dari Rp3,04 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,20 triliun pada tahun 2030. Meskipun angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan baseline tahun 2024 yang mencapai Rp3,45 triliun, tren proyeksi mencerminkan pendekatan konservatif dan kehati-hatian fiskal dalam pengelolaan anggaran.

Dari keseluruhan kapasitas tersebut, pembagian proporsi berdasarkan tiga prioritas kebijakan menunjukkan pendekatan yang rasional dan sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan. Prioritas ini memperoleh porsi terbesar, yakni 70 persen dari total kapasitas riil, atau sekitar Rp2,127 triliun hingga Rp2,239 triliun per tahun. Alokasi belanja pegawai secara konsisten menurun setiap tahun, dari Rp1,37 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,33 triliun pada tahun 2030. Penurunan ini menunjukkan upaya pengendalian belanja aparatur yang berorientasi pada efisiensi birokrasi dan penguatan belanja publik yang produktif. Di sisi lain, belanja wajib dan mengikat lainnya mengalami peningkatan progresif, mencapai Rp893,23 miliar pada tahun 2030, yang mengindikasikan perhatian pemerintah daerah terhadap kewajiban yang mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat..

b. Prioritas II, yang dialokasikan sebesar 20 persen dari kapasitas riil atau sekitar Rp607,82 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp639,79 miliar pada tahun 2030. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati mancakup:
    1) Pembangunan agro terintegrasi
    2) Peningkatan daya saing pariwisata
    3) Peningkatan iklim investasi
    4) Pemberdayaan desa
    5) Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur perekonomian
    6) Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana

7) Pendidikan merata, berkualitas dan berkarakter
8) Kesehatan untuk semua masyarakat
9) Pelestarian kebudayaan
10) Penguatan harmoni sosial
11) Perlindungan dan jaminan sosial
12) Peningkatan akses rumah layak huni
13) Peningkatan serapan tenaga kerja
14) Pemberdayaan wirausaha dan UMKM
15) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
16) Pengembangan *smart city* dan inovasi daerah

Program-program prioritas tersebut pada dasarnya beririsan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar dan belanja wajib (*mandatory spending*) yang dialokasikan dalam kelompok Prioritas I (70 persen dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah)

c. Prioritas III, dialokasikan sebesar 10 persen atau sekitar dari Rp303,9 miliar menjadi Rp319,89 miliar selama periode yang sama untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Secara keseluruhan, proyeksi ini menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun mendatang cenderung stabil, meskipun terdapat tekanan pada sisi penerimaan pembiayaan. Pemerintah daerah perlu memperkuat upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Di sisi lain, peningkatan pada belanja wajib dan mengikat perlu diimbangi dengan inovasi kebijakan agar tidak mengurangi porsi belanja yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan perencanaan keuangan berbasis prioritas dan pengelolaan risiko fiskal menjadi kunci untuk memastikan anggaran daerah tetap sehat dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan jangka menengah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Bagian ini menyajikan analisis atas permasalahan pembangunan daerah yang dihasilkan dari penelahan atas data-data yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah merupakan titik pangkal dari proses perencanaan yang akan dirumuskan. Bab ini secara umum akan menyajikan dua hal, yaitu permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kedua hal ini merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk merumuskan intervensi-intervensi yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan/kondisi ideal (*das sein*) dengan kenyataan/realitas (*das sollen*). Permasalahan yang menjadi bahan analisis dalam dokumen RPJMD ini adalah

permasalahan pembangunan daerah, yakni kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Sub bab ini membahas 2 (dua) hal, yaitu permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tulungagung dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berikut ini adalah hasil analisis terhadap permasalahan pokok pembangunan dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.6.1.1 Permasalahan lintas sektor

Permasalahan pembangunan daerah lintas sektor Kabupaten Tulungagung diidentifikasi melalui analisis berbasis landasan transformasi, yang secara umum dikategorikan berdasarkan dimensi pembangunan berkelanjutan dan landasan transformasi dalam perencanaan jangka panjang. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan meninjau capaian kinerja serta melalui diskusi kelompok terfokus bersama organisasi perangkat daerah. Selanjutnya, permasalahan dipetakan menggunakan pendekatan pohon masalah yang mencakup masalah utama, masalah pendukung, dan akar permasalahan. Hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Tulungagung dirinci sebagai berikut.

Tabel 2. 64 Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Transformasi Ekonomi	1.1. Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah	1.1.1. Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1.1.1.1. Manajemen pengelolaan wisata dari aspek legalitas, SDM, platform digital informasi wisata, pemesanan tiket, peta interaktif, aspek operasional, keamanan, dan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan
			1.1.1.2. Investasi pada pengelolaan wisata potensial dan strategis, maupun berbagai fasilitas pendukung seperti Kawasan agro technopark, Hotel/ Resort, olahraga, permainan wahana masih perlu ditingkatkan
			1.1.1.3. Dukungan infrastruktur jalan dan sarana prasarana menuju lokasi wisata masih kurang
		1.1.2. Belum optimalnya pengembangan industri daerah	1.1.2.1. Kawasan industri strategis dan potensial seperti kecamatan Ngunut dan Besuki belum mendapatkan prioritas sebagai Kawasan industri khusus
			1.1.2.2. Masih rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM)
			1.1.2.3. Belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
			1.1.2.4. Belum optimalnya cakupan Jumlah Industri Kecil dan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Menengah (IKM) yang dibina
			1.1.2.5. Belum adanya IKM yang terfasilitasi kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
			1.1.2.6. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
			1.1.2.7. Masih rendahnya mutu dan daya saing produk olahan hasil perikanan
			1.1.2.8. Belum optimalnya pengembangan inovasi pertanian
		1.1.3. Belum optimalnya pengeolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	1.1.3.1. Penegakan aturan dan penataan usaha pertambangan baik dari aspek legalitas, tata ruang, lingkungan, serta keberlanjutan masih peru ditingkatkan
			1.1.3.2. Belum optimalnya fasilitasi ekspor terhadap potensi pertambangan di Kawasan selatan dengan produk unggulan marmer
			1.1.3.3. Masih adanya permasalahan pertambangan illegal
			1.1.3.4. Penyiapan potensi peningkatan ekonomi dari peluang insentif perdagangan karbon
	1.2. Meningkatnya penganggura n terbuka	1.2.1. Belum optimalnya layanan balai tenaga kerja daerah	1.2.1.1. Sistem pelatihan kerja yang masih bertumpu pada metode konvensional
			1.2.1.2. Masih lemahnya kualitas SDM Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim
			1.2.1.3. Kurangnya Pemberdayaan bagi TKI dalam menunjang kemandirian ekonomi saat kembali ke tanah air
	1.3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur daerah	1.3.1. Masih terbatasnya konektivitas dari/menuju pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis kabupaten	1.3.1.1. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat khususnya pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) masih terbatas
			1.3.1.2. Sarana prasarana perlintasan kereta api, khususnya yang masuk kategori perlintasan sebidang masih kurang
			1.3.1.3. Belum optimalnya pengawasan terhadap layanan penyeberangan sungai brantas yang dilakukan oleh masyarakat
		1.3.2. Kesiapan perencanaan proyek strategis nasional kawasan selingkar wilis dan jalur lintas	1.3.2.1. Akses pembiayaan baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun pembiayan kreatif lainnya seperti skema KPBU, maupun dari investasi swasta masih perlu ditingkatkan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		selatan masih perlu ditingkatkan	1.3.2.2. kolaborasi dan integrasi pembangunan di selingkar wilis dan jalur lintas selatan antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pelaku usaha lokal, maupun investor sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masih perlu ditingkatkan
			1.3.2.3. Upaya percepatan realisasi pengembangan kebutuhan bendungan maupun taman geopark perlu ditingkatkan
2. Transformasi Sosial	2.1. Belum optimalnya keberlanjutan upaya penurunan kemiskinan	2.1.1. Belum optimalnya layanan perlindungan sosial	2.1.1.1. Belum Optimalnya Integrasi Data kemiskinan baik melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSen), P3KE, Regsosek, maupun yang dimiliki pemerintah desa.
			2.1.1.2. Kurangnya kolaborasi Stakeholder dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	2.2. Belum optimalnya penguatan daya saing SDM	2.2.1. Akses dan kualitas layanan dasar kesehatan belum optimal	2.2.1.1. Belum optimalnya layanan kesehatan ibu dan anak
			2.2.1.2. Belum optimalnya upaya perbaikan gizi masyarakat dan penanganan stunting
			2.2.1.3. Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang ditunjukkan dengan meningkatnya kasus Penyakit menular HIV dan AIDS
			2.2.1.4. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Tulungagung yang belum mencapai standar
			2.2.1.5. Belum optimalnya sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dan non kesehatan sesuai dengan standar
			2.2.1.6. Rasio ketersediaan puskesmas dibanding jumlah penduduk masih kurang
			2.2.1.7. Belum optimalnya integrasi sistem informasi kesehatan antar fasilitas kesehatan baik yang dimiliki pemerintah daerah maupun swasta untuk mengantisipasi kejadian luar biasa seperti covid maupun DBD
		2.2.2. Akses dan kualitas layanan dasar pendidikan masih perlu ditingkatkan	2.2.2.1. Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang ditunjukkan dengan rendahnya Persentase Guru Bersertifikat Pendidik
			2.2.2.2. Belum optimalnya Fasilitas dan sarana dan prasarana di beberapa sekolah secara memadai

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2.2.2.3. Masih ditemukan kasus anak putus sekolah
			2.2.2.4. Tren penurunan jumlah murid di beberapa Sekolah Dasar Negeri sehingga jumlah rombongan belajar tidak memenuhi target atau pagu yang ditetapkan
			2.2.2.5. Belum optimalnya upaya eksplorasi kreativitas dan prestasi siswa
3. Transformasi Tata Kelola	3.1. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang berkualitas	3.1.1. Akuntabilitas kinerja masih menghadapi tantangan karena adanya penurunan nilai	3.1.1.1. Perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja masih perlu ditingkatkan
			3.1.1.2. Penerapan inovasi dalam akuntabilitas kinerja masih menghadapi tantangan
			3.1.1.3. Belum optimalnya pengembangan Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan karir berbasis merit sistem
			3.1.1.4. Belum optimalnya integrasi dan konektivitas pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (Implementasi SPBE);
4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	4.1. Ketahanan sosial budaya masih perlu ditingkatkan	4.1.1. Penguatan harmoni sosial masyarakat	4.1.1.1. Pengembangan potensi dan kerja sama antar perguruan bela diri masih perlu ditingkatkan
			4.1.1.2. Peningkatan toleransi dan kerjasama antar umat beragama perlu terus dijaga
			4.1.1.3. Pelestarian budaya daerah masih perlu ditingkatkan
		4.1.2. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4.1.2.1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
			4.1.2.2. Belum optimalnya upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan
			4.1.2.3. Rendahnya partisipasi perempuan dalam posisi eksekutif dan manajerial
	4.2. Belum optimalnya resiliensi terhadap bencana dan ketahanan lingkungan	4.2.1. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan keselamatan	4.2.1.1. Sistem mitigasi dan kesadaran terhadap bencana baik alam, pangan, kesehatan, maupun sosial dan budaya masih perlu ditingkatkan
			4.2.1.2. Belum optimalnya antisipasi kebencanaan akibat perubahan musim/iklim
		4.2.2. Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya	4.2.2.1. Belum optimalnya Pengawasan dan pengendalian terhadap sumber pencemaran Air dan udara
			4.2.2.2. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi lingkungan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		alam dengan optimal	4.2.2.3. Belum optimalnya pengelolaan akses air minum layak dan aman bagi masyarakat
			4.2.2.4. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang masih belum optimal

2.6.1.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini disajikan permasalahan tiap urusan berdasarkan telaah capaian kinerja dan identifikasi permasalahan pada *focus group discussion*. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 65 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan	• Masih adanya kasus putus sekolah • Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan • Ketimpangan distribusi peserta didik sebagai dampak dari kebijakan zonasi • Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan • Masih adanya guru yang belium memiliki sertifikasi pendidik
2	Kesehatan	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	• Belum optimalnya kualitas kesehatan ibu dan anak • Belum optimalnya upaya perbaikan gizi masyarakat • Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular • Cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Tulungagung belum 100% • Belum optimalnya sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dan non kesehatan dibanding jumlah penduduk

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			• Belum optimalnya integrasi sistem informasi kesehatan antar fasilitas Kesehatan • Ketersediaan puskesmas masih kurang jika dibandingkan dengan rasio ideal 1:16.000
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur jalan	• Tingkat kemantapan jalan masih di bawah 80,00% (saat ini 73,29%) • Tidak optimalnya fungsi koordinasi perbaikan jalan karena keterbatasan kewenangan • Masih kurangnya konektivitas dari/menuju pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis kabupaten • Masih adanya lebar jalan yang belum memenuhi standar geometrik jalan kabupaten • Cuaca ekstrem yang membuat kerusakan jalan lebih cepat terjadi • Adanya pelanggaran kendaraan bertonase melebihi kapasitas maksimal jalan
		Belum optimalnya pelayanan sumber daya air, sanitasi, dan air limbah	• Tingginya kerusakan jaringan irigasi, sungai atau sumber daya air lainnya • Banyaknya kehilangan air pada jaringan irigasi yang masih berupa tanah ataupun pengamlan liar • Konservasi sumber air masih belum optimal sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah sumber air dan kuantitas air • Belum meratanya akses air minum (baru 23,17% rumah tangga yang memiliki akses air minum layak perpipaan, dan hanya 7,45% yang memiliki akses air minum aman di tahun 2024, angka ini masih jauh dari target RPJMN di tahun 2025 sebesar 39,20%) • Masih sangat rendahnya akses sanitasi aman (hanya

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			0,004% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman di tahun 2024, dan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan target RPJMN di tahun 2025 sebesar 12,50%)
		Belum optimalnya penataan bangunan gedung dan lingkungan	• Masih banyaknya bangunan gedung pemerintahan / publik yang memerlukan pemeliharaan • Belum optimalnya penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan • Kerusakan gedung pemerintahan karena faktor usia bangunan
		Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang	• Belum tersusunnya dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi dengan OSS RBA
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Akses terhadap rumah dan pemukiman layak huni belum optimal	• Masih terdapat kawasan kumuh seluas 94,23 Ha yang perlu segera dituntaskan • Masih adanya rumah tidak layak huni, data menunjukkan sampai dengan bulan April 2025 masih terdapat 1370 unit RTLH • Masih adanya PSU perumahan yang perlu ditingkatkan kualitasnya (26,98% PSU yang perlu ditingkatkan kualitasnya) • Backlog cukup tinggi dan fasilitasi pembiayaan perumahan yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat (termasuk MBR non bankable).
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya pelayanan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat	• Masih tingginya angka kriminalitas • Masih terjadinya konflik sosial antara lain terkait perkumpulan seni bela diri maupun pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan areal wisata

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi bencana	• Terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana dalam rangka mitigasi maupun *recovery* terhadap bencana • Kurangnya pembentukan Desa Tangguh Bencana • Penurunan tingkat waktu tanggap response time (lokasi pos PMK yang hanya ada di pusat kota belum tersebar ke wilayah pinggiran)
6	Sosial	Belum optimalnya layanan kesejahteraan sosial	• Belum optimalnya pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSen) • Kolaborasi stakeholder dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kurang optimal • Munculnya PMKS atau masyarakat miskin baru • Kerjasama dan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan • Pendataan dan layanan publik ramah disabilitas kurang optimal
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja	Belum optimalnya penyerapan dan pengelolaan tenaga kerja	• Sistem pelatihan kerja yang masih bertumpu pada metode konvensional • Masih lemahnya kualitas SDM Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim • Penerapan UMK di perusahaan yang masih kurang sesuai • Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum merata pada kalangan pekerja • Naiknya angka sengketa pengusaha-buruh
		Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi	• Lokasi transmigrasi dari Pemerintah Pusat belum sepenuhnya *clear and clean*, sehingga menghambat pemberangkatan dan

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			penempatan para transmigran
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya perlindungan perempuan	• Upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan belum optimal • Layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan belum optimal
		Belum optimalnya keberdayaan perempuan	• Jumlah perempuan di parlemen dan jajaran tinggi birokrasi masih rendah • Penerapan anggaran responsif gender belum optimal • Peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi belum optimal
		Belum optimalnya perlindungan anak	• Upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan anak belum optimal • Layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan pada anak belum optimal • Partisipasi anak dalam proses pembangunan masih minim • Masih adanya kasus pernikahan dini
9	Pangan	Ketahanan pangan belum optimal	• Stabilitas cadangan pangan yang belum optimal • Distribusi dan penyimpanan beras belum optimal • Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan
10	Pertanahan	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	• Masih terjadinya kasus sengketa lahan • Masih banyaknya lahan masyarakat yang belum tersertifikasi

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	• Alih fungsi tutupan lahan • Kurang optimalnya penghijauan • Kurang optimalnya pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan • Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemaran air dan udara • Belum optimalnya upaya dukungan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	• Kesadaran Masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan masih kurang • Belum optimalnya system manajemen keamanan data kependudukan • Belum optimalnya pelayanan kependudukan
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat desa belum optimal	• Pengembangan ekonomi Kawasan perdesaan belum optimal, seperti • Kurangnya sinergitas pembangunan antar desa dalam kawasan dan antar kawasaan • Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan perdesaan • BUMDes, unit usaha ekonomi masyarakat desa dan pengembangan kerja sama antar desa belum optimal • Belum optimalnya Pemanfaatan data Indikator penilaian dalam IDM untuk perencanaan pembangunan Desa • Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa • Masih Minimnya inovasi desa

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya pengendalian penduduk dan keluarga yang berkualitas	• Masih terbatasnya alat kontrasepsi • Terbatasnya penyuluh KB dan kader kesehatan • Belum optimalnya Kelompok Tribina dengan klasifikasi Paripurna • Pendampingan pada keluarga untuk pola asuh yang baik belum optimal
15	Perhubungan	Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan darat dan sungai	• Belum tersedianya pelayanan angkutan umum yang disediakan pemerintah • Kurangnya jumlah perlengkapan jalan • Belum optimalnya pemeliharaan perlengkapan jalan • Perparkiran on street yang tidak sesuai dengan peruntukannya • Kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan belum maksimal • Belum tersedianya terminal Tipe C • Belum tersedianya fasilitas bongkar muat barang
16	Komunikasi dan Informatika	Sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	• Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas website maupun media publikasi yang dimiliki Perangkat Daerah • Layanan satu data masih berfungsi sebagai data base belum dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi untuk membantu pengambilan keputusan • Kepemilikan sistem maupun aplikasi di hampir semua perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung kurang optimal, serta berjalan secara parsial • Belum optimalnya pemanfaatan pengaduan melalui kanal PPID dan SP4NLAPOR
17		Belum optimalnya	• masih rendahnya status koperasi berkualitas

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	pengelolaan koperasi	• masih rendahnya kompetensi SDM pengurus koperasi • masih rendahnya kesadaran koperasi • belum adanya koperasi modern
		Belum optimalnya peran UMKM	• Masih rendahnya pelaku UMKM berizin usaha • Belum optimalnya pasar tradisonal • Masih sedikitnya usaha mikro yang mengakses permodalan • Belum optimalnya pemasaran produk usaha mikro • Rendahnya UMKM yang berorientasi eksport • Belum tersedianya data UMKM yang akurat
18	Penanaman Modal	Belum optimalnya Pengembangan iklim penanaman modal	• Belum optimalnya promosi potensi unggulan daerah • Belum optimalnya integrasi kerjasama pengelolaan data antara DPMPTSP dengan BPS dan OPD Teknis • Belum terupdatenya data profil peluang investasi di Kabupaten Tulungagung
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya peran pemuda dalam Pembangunan daerah	• Belum optimalnya upaya eksplorasi kreatifitas dan eksistensi pemuda • Belum optimalnya pembinaan atlit • Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas olahraga dan kepemudaan • Masih rendahnya pemuda pelopor • Masih terbatasnya kegiatan kepemudaan dan event olahraga • Masih rendahnya jumlah wirausaha muda
20	Statistik	Belum optimalnya data statistik daerah	• Pengumpulan dan pengolahan data statistik yang belum maksimal • Perbedaan data publikasi antara BPS, satu data, dan data milik OPD

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			• Updating data rilis sektoral belum optimal • Belum lengkapnya penyajian data secara update dan komprehensif pada satu data Tulungagung maupun BPS Tulungagung sebagai referensi basis data perencanaan
21	Persandian	Belum optimalnya sistem keamanan informasi	Belum optimalnya pemenuhan sarana pendukung keamanan informasi
22	Kebudayaan	Implementasi urusan kebudayaan belum optimal	• Minimnya sarana dan prasarana kebudayaan • Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan • Pengembangan sanggar seni budaya masih minim • Belum optimalnya pengembangan wisata budaya dan sejarah
23	Perpustakaan	Belum optimalnya layanan perpustakaan	• Belum Optimalnya layanan digitalisasi perpustakaan daerah. • Belum meratanya pembentukan perpustakaan desa, • Belum adanya integrasi layanan perpustakaan daerah dengan • perpustakaan di sekolah dan di Desa • Masih rendahnya minat baca masyarakat
24	Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan	• Masih rendahnya pemahaman dan pengelolaan Kearsipan secara baku sesuai standar arsip nasional di lingkungan OPD Tulungagung
Urusan Pemerintahaan Pilihan			
25	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	• Masih rendahnya mutu dan daya saing produk olahan hasil perikanan • Menurunnya tingkat daya saing dan kesejahteraan petani ikan

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			• Terbatasnya benih untuk produksi budidaya • Belum optimalnya pengelolaan lingkungan budidaya perikanan • Kurangnya sarana prasarana perikanan berkualitas (Tempat Pelelangan Ikan, Unit Pengolahan Ikan, kolam, dll.) • Masih banyaknya nelayan yang belum tergabung dalam kelompok usaha bersama / pokmaswas • Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) di Perairan Umum Daratan (PUD)
26	Pariwisata	Belum optimalnya kunjungan wisatawan	• Tata kelola kelembagaan pariwisata belum optimal • Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas destinasi pariwisata • Terbatasnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia lokal di bidang pariwisata • Diversifikasi produk wisata masih minim • Sinergi antar stakeholder pada pengembangan pariwisata belum optimal
27	Pertanian	Belum optimalnya produktivitas pertanian daerah	• Keterbatasan akses permodalan • Keterbatasan alat mesin perkebunan • Keterbatasan dalam peningkatan nilai tambah pasca panen • Produksi peternakan berbasis rumah tangga relatif stagnan • Manajeman resiko penyakit pada ternak yang masih belum optimal • Belum optimalnya produksi hasil ternak besar, kecil dan unggas • Belum optimalnya perkembangan populasi ternak

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			• Belum optimalnya kualitas produk hasil peternakan • Menurunnya konsumsi hasil ternak • Fluktuasi harga hasil pertanian • Rendahnya kapasitas SDM peternak dan petani • Keterbatasan dalam pengolahan pasca panen dan penanganan limbah peternakan. • Turunnya jumlah petani dan rendahnya jumlah petani milenial • Ketersediaan dan pemanfaatan sarana pertanian belum optimal. • Adanya kasus serangan hama dan penyakit tumbuhan • Risiko bencana pertanian • Belum tercukupinya air irigasi untuk lahan pertanian • Kurang optimalnya penanganan bencana pertanian maupun kepesertaan jaminan kegagalan panen akibat bencana. • Kinerja penyuluh pertanian perlu ditingkatkan
28	Perdagangan	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan daerah	• Revitalisasi pasar belum memadai. • Belum optimalnya pengawasan peredaran barang. • Belum optimalnya pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL). • Belum optimalnya perdagangan berbasis digital (*e-commers*) • Kurangnya pemahaman masyarakat atas tera ulang. • Belum stabilnya harga barang pokok dan penting. • Produk IKM lokal belum luas pasarnya • Belum terfasilitasinya IKM dalam program P3DN

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			• Banyak pelaku IKM belum memahami proses ekspor. • Belum maksimalnya sosialisasi perizinan • Ketaatan pelaku usaha perdagangan masih rendah
29	Perindustrian	Belum optimalnya industrialisasi daerah	• Kawasan industri strategis dan potensial belum mendapatkan prioritas sebagai Kawasan Industri Khusus • Masih rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) • Belum optimalnya fasilitas rumah kemasan • Belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) • Rendahnya kualitas sumber daya manusia IKM • Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) • Belum optimalnya cakupan pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dibina • Para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum memahami tentang pentingnya perijinan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
30	Sekretariat Daerah	Belum optimalnya sinergi antar perangkat daerah	• Masih diperlukan evaluasi, reviu, penyesuaian kebijakan/ peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan kondisi faktual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Kurangnya penataan koordinasi kelembagaan pada perangkat daerah khususnya yang sedang melaksanakan transisi tempat kerja (kantor) • Kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) khususnya Perumda Aneka Usaha

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			Tulungagung dan Perumda Tirta Cahya Agung Tulungagung masih perlu ditingkatkan
31	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	• Belum optimalnya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD • Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan pemanfaatan sarana dan prasarana pimpinan dan anggota DPRD • Belum optimalnya kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat yang dilakukan oleh DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
32	Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi sistem perencanaan dan pengendalian antar perangkat daerah	• Belum optimalnya Persentase Ketercapaian Sasaran RPJMD dengan capaian 68,75% • Belum optimalnya ketercapaian Program RPJMD dengan capaian 91,52% • Belum optimalnya kasesuaian program pada dokumen penganggaran (KUAPPAS) dengan dokumen perencanaan (RKPD) dengan capaian 95,03% • Belum optimalnya pelaksanaan replikasi sistem inovasi daerah (SIDa)
33	Keuangan	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	• Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi • Belum efektifnya detail penggunaan keuangan yang berdampak serta efektif untuk menghasilkan output maupun outcame pembangunan Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber PAD
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya manajemen kepegawaian	• Belum optimalnya pengembangan karir berbasis merit sistem

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			• Belum optimalnya pemenuhan pendidikan dan pelatihan kepegawaian
35	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah	• Pemanfaatan hasil kajin sektoral dalam perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan • Kapasitas tim litbang daerah masih perlu ditingkatkan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
36	Inspektorat Daerah	Belum optimalnya sistem pengawasan daerah	• Belum tersedianya sistem teknologi informasi untuk mempermudah pengendalian kemajuan pelaksanaan pembangunan
Unsur Kewilayahan			
37	Kecamatan	Belum optimalnya pembangunan kewilayahan	• Belum optimalnya keberdayaan desa di wilayah kecamatan • Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran di kecamatan
Unsur Pemerintahaan Umum			
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Masih adanya potensi konflik sosial	• Masih adanya kejadian konflik antar elemen masyarakat • Belum optimalnya pendidikan politik

2.6.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis Kabupaten Tulungagung dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tulungagung serta berbagai isu pada level internasional, nasional, dan regional. Oleh karena itu, selain menelaah gambaran umum kondisi daerah dan identifikasi permasalahan pembangunan, perumusan isu strategis juga perlu didahului dengan menelaah berbagai dokumen yang memuat tentang berbagai isu strategis baik di level internasional, nasional dan regional serta isu-isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan.

2.6.1.1 Isu Internasional

Integrasi isu strategis internasional ini memberikan wawasan jangka panjang mengenai peluang dan tantangan baru yang akan membentuk kerangka kehidupan masyarakat di suatu daerah. Dengan mempertimbangkan isu stategis internasional ini, rencana pembangunan akan mendorong inovasi dalam mengembangkan daya saing di tengah-tengah lingkungan global yang terus berubah untuk memenuhi perubahan tuntutan yang diprediksi hadir di masa depan.

Secara mendetail, tabel di bawah ini akan menjelaskan mengenai sepuluh isu strategis internasional yang diadopsi dari RPJPN 2025-2045.

Tabel 2. 66 Telaah Isu Strategis Internasional RPJPN 2025-2045

Isu Strategis Internasional	Deskripsi
Demografi Global	• Peningkatan pesat populasi dunia yang mencapai 9,45 miliar jiwa. • Peningkatan pesat populasi lansia
Perkembangan Teknologi	• Ancaman hilangnya hampir 40 persen pekerjaan yang digantikan oleh teknologi • Urgensi peningkatan kualitas tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih
Konstelasi Perdagangan Global	• Perdagangan global bertumbuh secara stabil di angka 3,4 persen per tahun • Urgensi pemanfaatan peluang melalui pembangunan ekonomi, penyebaran inovasi, hingga kerja sama tingkat regional
Urbanisasi Dunia	• Proyeksi lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari populasi global • Perkotaan akan menjadi pusat perekonomian dan kehidupan • Kontribusi perkotaan hingga 70 persen dari PDB global
Luar Angkasa	• Peluang inovasi teknologi luar angkasa yang memberikan nilai tambah perekonomian • Limbah luar angkasa yang mengancam operasional satelit
Tata Kelola Keuangan Global	• Kemajuan teknologi keuangan dan perubahan kebijakan fiskal • Potensi kerentanan infrastruktur keuangan dan keamanan siber
Perubahan Iklim	• Peningkatan suhu global • Kejadian cuaca ekstrim • Bencana alam
Persaingan Sumber Daya Alam	• Meningkatnya komoditas penting akibat urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia. • Potensi penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas kelangkaan.
Pertumbuhan Kelas Menengah	• Pertumbuhan kelas menengah hingga 90 persen dari seluruh populasi global. • Fenomena generasi *sandwich*, peran ganda dalam memenuhi kebutuhan sebagai bentuk ketergantungan.
Geopolitik dan Geoekonomi	• Persaingan antar negara yang menegang • Munculnya poros kekuatan baru • Pengaruh signifikan pada investasi dan perdagangan.

2.6.1.2 Isu Nasional RPJMN 2025-2029

Isu nasional dalam RPJMN 2025–2029 merupakan persoalan-persoalan strategis tingkat nasional yang menjadi fokus penanganan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Isu tersebut disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sebelumnya, peluang dan tantangan dalam pembangunan, serta visi menuju *Indonesia Emas 2045*.

Secara garis besar, berikut peluang dan tantangan dalam pembangunan di Indonesia.

A. Peluang Pembangunan

1. Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif

   Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menjadi salah satu contoh negara di Asia yang memiliki resiliensi positif dalam perekonomian. Kondisi tersebut didukung dengan pengelolaan fiskal yang baik, kinerja sektor eksternal yang kuat, serta permintaan konsumen yang stabil. Pertumbuhan ekonomi juga cenderung stabil pada kisaran 5,0-6,0 persen selama periode 2005-2019, dan kembali berkinerja positif pasca Covid-19 dengan pertumbuhan 5,05 persen (yoy) pada 2023. Tren inflasi dalam kurun 2012 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata 0,32 persen per tahun. Inflasi yang stabil menciptakan ruang kebijakan untuk fokus pada ekspansif kebijakan fiskal guna mendorong pertumbuhan sektor riil.

2. Keanekaragaman hayati dan potensi lingkungan

   Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi ditingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Terdapat 22 tipe ekosistem alami, ternasuk tutupan lahan berhutan seluas 95,56 juta hektar dan perairan laut seluas 325,74 juta hektar yang tersebar dalam tujuh ekoregion. Keanekaragaman hayati Indonesia memiliki beberapa berperan penting, diantaranya sebagai penyedia jasa lingkungan, sumber penghidupan masyarakat, edukasi dan pelestarian budaya, dan penyimpangan karbon, terutama vegetasi gambut dan mangrove. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi EBT dan mineral. Potensi EBT mencapai 3.687 GW meliputi energi surya, hidro, panas bumi, bioenergy, bayu, dan energi laut. Sementara potensi mineral terdiri dari komoditas nikel, tembaga, bauksit, dan timah.

3. Potensi sumber daya manusia dan modal sosial

   Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat dunia. Populasi besar memberikan peluang untuk meraih bonus demografi dan meningkatkan daya saing nasional. membuka peluang menjadi penyedia sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui dukungan pendidikan dan ketrampilan yang memadai serta pembentukan lingkungan pendukung ramah perempuan dan keluarga. Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang menjadi instrumen mencegah konflik dan memperkuat kerukunan dan persatuan.

4. Pengembangan teknologi

   Teknologi digital berperan sebagai enabler yang mendorong kemajuan di berbagai sektor termasuk

pengembangan dan perluasan infrastruktur digital yang kokoh. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui revolusi 4.0 (otomatisasi, kecerdasan buatan, dan *internet of things*) yang akan semakin matang, industri 5.0 (kolaborasi manusia dan mesin membuka peluang efisiensi tinggi diberbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan), dan pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dalam memprediksi dan mengelola risiko teknologi, serta memprediksi potensi bencana alam.

5. Sumber-sumber pertumbuhan inovatif

   Untuk mencapai target pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah, dibutuhkan sumber-sumber pertumbuhan produktif. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan ekonomi digital (*e-commerce, financial technology*).

B. Tantangan Pembangunan

1. Rendahnya produktivitas

   Tingkat produktivitas masih rendah ditengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *total factor productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin. Rendahnya produktivitas disebabkan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang (terlebih perempuan); produktivitas sektor ekonomi yang rendah; kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal; serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau

2. Rendahnya kualitas SDM

   Rendahnya kualitas SDM dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *programme for international student assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 (2022). Selain itu, rendahnya daya saing tenaga kerja ditunjukan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Tahun 2024, angkatan kerja lulusan SMP kebawah sebesar 52,32 persen, lulusan SMA sebesar 34,82 persen, dan lulusan pendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah

berdampak pada tingkat serapan tenaga kerja dipasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.

3. Pergeseran struktur kelas masyarakat

   Risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan daya beli masyarakat yang turun. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif

   Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. Krisis lingkungan

   Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diprakirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024). Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler akan meningkat.

6. Geopolitik dan geoekonomi

   Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global,

serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat. Nilai strategis Kawasan IndoPasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional.

7. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah

   Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.6.1.3 Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029 yang berfokus pada transformasi struktural dan peningkatan kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh. Sejumlah isu strategis telah teridentifikasi sebagai prioritas dalam mengakselerasi capaian pembangunan lima tahunan, antara lain: pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif; penanggulangan kemiskinan dan kesejahteran social; pengembangan sumber daya manusia berkualitas, peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip Pembangunan

berkelanjutan; dan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Isu strategis pertama terkait penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, yang difokuskan pada optimalisasi potensi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Upaya ini bertujuan mendorong nilai tambah dari sumber daya lokal, meningkatkan produktivitas daerah, serta memperkuat struktur perekonomian regional. Namun demikian, pembangunan ekonomi masih menghadapi tantangan berupa ketidakstabilan sosial-politik, lemahnya iklim investasi, dan belum adanya peta jalan teknis yang mengintegrasikan fungsi kawasan antarwilayah. Ketimpangan antara wilayah utara-selatan serta wilayah kepulauan juga masih mencolok akibat terbatasnya infrastruktur dasar dan belum optimalnya konsep pembangunan kawasan seperti agropolitan dan minapolitan.

Isu strategis kedua mencakup persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang bersifat multidimensi. Kemiskinan masih didorong oleh rendahnya kontribusi sektor produktif terhadap PDRB, tingginya tingkat pengangguran terbuka, serta ketidakpastian ekonomi global yang melemahkan daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor informal dan primer. Meskipun investasi meningkat, penciptaan lapangan kerja formal masih rendah. Oleh karena itu, strategi perlu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja yang layak, peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal dan kewirausahaan.

Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia menjadi isu yang tidak terpisahkan. Ketimpangan layanan pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, menjadi penghambat utama dalam mencetak SDM yang kompetitif. Pertumbuhan jumlah penduduk dan arus migrasi menyebabkan peningkatan kebutuhan layanan dasar, yang apabila tidak ditangani secara memadai dapat menimbulkan tekanan sosial, marginalisasi kelompok rentan, serta meningkatnya pengangguran terselubung. Oleh karenanya, dibutuhkan intervensi kebijakan yang fokus pada pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan kapasitas SDM lokal.

Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan menjadi isu strategis berikutnya. Untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan terpercaya, dibutuhkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan publik. Penyederhanaan prosedur administratif dan peningkatan kapasitas ASN melalui pengembangan kompetensi menjadi prioritas. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga diperlukan dalam menjaga ketentraman sosial dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Kepemimpinan daerah yang memiliki orientasi global namun berpijak pada nilai-nilai

lokal sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan.

Di bidang lingkungan hidup, degradasi ekosistem dan meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim menjadi perhatian utama. Penurunan daya dukung lingkungan disebabkan oleh konversi lahan, pelanggaran tata ruang, serta kurangnya infrastruktur penanggulangan bencana. Untuk itu, pengelolaan lingkungan hidup perlu diarahkan pada penguatan sistem perlindungan berbasis mitigasi risiko dan adaptasi iklim. Pemanfaatan kearifan lokal dalam konservasi dan sistem peringatan dini berbasis komunitas dapat menjadi solusi inovatif dalam membangun ketahanan sosial-ekologis daerah.

Sementara itu, dalam sektor pangan, Jawa Timur yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Produksi komoditas pertanian dan perikanan yang tinggi perlu diimbangi dengan sistem logistik dan distribusi yang efisien agar tidak terjadi kelangkaan pangan di wilayah tertentu. Selain itu, keberhasilan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan konsistensi pasokan dari daerah. Untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil dan berkelanjutan, perlu dilakukan transformasi pada tata kelola distribusi pangan serta peningkatan kesejahteraan petani melalui efisiensi produksi, stabilisasi harga, dan hilirisasi komoditas pertanian. Secara keseluruhan, isu-isu strategis ini menjadi fondasi utama dalam merancang arah kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Seluruh aspek pembangunan diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah, mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi, dan membangun ketahanan terhadap tantangan masa depan dalam rangka mewujudkan Jawa Timur yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

2.6.1.4 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Tulungagung

Isu strategis jangka panjang diperoleh melalui pengelompokan permasalahan pembangunan daerah, berdasarkan kedekatan urusannya serta pemilahan dengan mempertimbangkan cakupan dan rentang waktu 20 tahun ke depan. Selain itu, dalam rangka menentukan prioritas permasalahan pembangunan untuk dapat ditetapkan menjadi isu strategis jangka panjang, seluruh cluster isu pembangunan diberikan bobot dengan mempertimbangkan pengaruh dan linearitas dengan RPJPN, Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, dampak yang ditimbulkan, tingkat kesulitan penanganan dan ketidakpastian setiap isu sektoral. Berikut merupakan isu strategis jangka panjang Kabupaten Tulungagung:

1. Menjaga Kondusivitas Masyarakat Menuju Masyarakat Madani

Salah satu gambaran keberhasilan atau perwujudan masyarakat yang maju dan beradab terwujudnya konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu konsep

yang mengacu pada sebuah masyarakat yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang mempunyai norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Semakin berkembangnya peradaban membawa berbagai dampak terhadap masyarakat tidak terkecuali pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Dalam rentang waktu 20 tahun ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diwaspadai diantaranya adalah mulai terkikisnya nilai-nilai budaya lokal yang jika tidak diberikan perhatian secara khusus dapat berdampak pada hilangnya identitas wilayah. Selain itu, beberapa dampak yang dapat muncul adalah terkikisnya moral masyarakat yang nantinya dapat berimbas pada munculnya berbagai tindakan penyimpangan di masyarakat, baik dalam bentuk tindakan kriminal maupun tindakan yang tidak sesuai norma-norma sosial. jika hal tersebut terjadi maka tingkat stabilitas wilayah akan semakin menurun dan dapat berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Mengingat potensi permasalahan yang mulai muncul tersebut, maka perlu kiranya untuk lebih menjaga kekondusifan masyarakat dalam kegiatan sosial budaya dan ekonomi supaya kondisi masyarakat madani dapat diwujudkan.

2. Mewujudkan SDM Kabupaten Tulungagung Berdaya Saing

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah mengingat perannya yang sangat fundamental dalam proses pembangunan. Namun demikian, daya saing sumberdaya manusia di Kabupaten Tulungagung jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di dalam satu regional Provinsi Jawa Timur dirasa masih belum dapat bersaing atau masih kurang. Dalam konteks pembangunan jangka panjang atau 20 tahun ke depan, jika daya saing SDM tidak diperhatikan dengan baik, maka berbagai sendi ekonomi dapat didominasi oleh masyarakat pendatang sedangkan penduduk lokal hanya mendapat peran yang relatif kecil dalam aktivitas ekonomi atau bahkan hanya sebagai konsumen. Selain itu, jika kondisi tersebut terus berlangsung maka akan berakibat kepada semakin cepatnya pergeseran struktur sosial di masyarakat yang nantinya akan berdampak pada hilangnya nilai-nilai budaya lokal.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menjadi salah satu pemicu kompetisi antar pelaku ekonomi baik pada tingkat regional, nasional maupun global yang pada akhirnya berdampak pada permintaan kualitas SDM yang lebih baik. Meskipun demikian, dampak dari kemudahan cara berkomunikasi dan mendapatkan informasi membawa peluang tersendiri bagi

masyarakat untuk mengembangkan diri. Dengan kondisi tersebut maka kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan sangat menentukan kualitas SDM pada 20 tahun mendatang. Hingga saat ini beberapa sektor telah terdampak cukup serius yang diakibatkan oleh kurangnya daya saing masyarakat secara khusus pada sektor ekonomi. Keterlambatan proses regenerasi profesi petani dan lambatnya penguasaan teknologi pertanian menjadikan sektor tersebut semakin lemah. Selain itu kualitas SDM yang rendah pada sektor UMKM dan industri juga menyebabkan sebagian besar produk UMKM tidak dapat menembus pasar ekspor keluar wilayah dan luar negeri. Dengan kualitas SDM yang baik, diharapkan bahan baku produksi dapat diproduksi di dalam daerah sehingga biaya produksi dapat lebih rendah dan daya saing produk lebih kompetitif.

3. Daya Dukung Lingkungan untuk Menopang Kehidupan Berkelanjutan

Lingkungan sebagai media tempat berlangsungnya seluruh aktivitas sosial ekonomi masyarakat tentunya memiliki batasan maksimal atau yang lebih dikenal dengan daya dukung dan daya tampung. Pembangunan yang melebihi daya dukung dan daya tampung akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, bahkan dapat memicu permasalahan sosial di masyarakat seperti perebutan sumber daya alam khususnya sumber daya alam yang melekat dalam komponen kebutuhan dasar seperti air. Namun demikian, tidak berarti bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan, melainkan harus dikelola dengan baik selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Afirmasi kebijakan pemerintah terhadap lingkungan harus diberlakukan secara tegas sehingga proses pemanfaatan lingkungan khususnya dalam hal ini adalah lahan dapat dikendalikan. Baik yang digunakan sebagai usaha, permukiman maupun ruang publik. Keseimbangan dalam pemanfaatan daya dukung dan daya tampung nantinya dapat memberikan keuntungan komparatif karena potensi kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dapat diminimalisir, sehingga dapat meningkatkan daya saing wilayah baik pada level desa maupun pada level kabupaten. Keuntungan komparatif yang dimaksud diantaranya adalah daya tarik wisata daerah dan keputusan calon investor dalam hal penanaman modal. Jika kedua hal tersebut dapat diwujudkan, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan tersedianya lapangan pekerjaan yang layak.

4. Kabupaten Tulungagung sebagai Tempat Tinggal Hidup dengan Lingkungan yang Sehat

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tentunya akan membawa berbagai dampak baik secara sosial maupun lingkungan. Dari perspektif sosial, semakin tumbuhnya ekonomi

maka akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk bekerja di kawasan tersebut atau yang secara umum disebut sebagai proses urbanisasi. Bahkan perpindahan penduduk juga dapat terjadi lintas kabupaten yang dikenal dengan migrasi masuk. Dengan kondisi tersebut, maka pertumbuhan penduduk akan semakin cepat dan jika tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup serius dimana pertumbuhan hunian akan semakin tidak terkendali, permasalahan kemacetan, dan tingginya biaya pengelolaan kawasan yang membuat proses pembangunan menjadi tidak efisien. Selain itu, permasalahan lingkungan khususnya dalam hal ini adalah berkenaan dengan pengelolaan persampahan akan mendapatkan tantangan yang cukup serius, baik dari segi budaya pengelolaan sampah di masyarakat maupun dari segi manajemen persampahan kota atau wilayah. Jika pelayanan kawasan tidak dapat terkelola dengan baik, kawasan-kawasan kumuh akan tumbuh dengan pesat yang dipicu oleh peningkatan rumah tidak layak huni dan fasum perumahan atau permukiman yang tidak memadai. Lingkungan yang kumuh tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kesehatan masyarakat baik dalam jagka pendek maupun jangka panjang seperti tumbuh kembang anak.

5. Investasi sebagai Motor Daya Saing Sektor Strategis Kabupaten Tulungagung

Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Realisasi investasi hingga kini masih dirasa belum optimal, ditunjukkan dengan belum semua sektor dapat tergarap secara optimal. Masih terdapat berbagai sektor yang masih memiliki peluang yang besar namun terhambat karena investasi di sektor tersebut masih relatif rendah. Sebagai contoh pada sektor pariwisata, perikanan, peternakan dan industri pengolahan yang masih didominasi oleh usaha dengan modal yang menengah kecil. Beberapa permasalahan seperti regulasi penanaman modal yang menurut masyarakat dirasa masih berbelit-belit dan ketersediaan SDM lokal yang dirasa masih kurang kompetitif merupakan beberapa faktor penghambat tumbuhnya investasi. Daya saing SDM di bidang usaha, tidak terlepas dari kapasitas SDM dalam rangka memanfaatkan infrastruktur dan teknologi informasi yang tersedia. Keterbelakangan atau telatnya kemampuan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi baik dari segi pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau produk jadi serta pemasaran sangat memengaruhi usaha di Tulungagung.

6. Infrastruktur Penghubung Jaringan Strategis dengan Mempertimbangkan Risiko Bencana

Infrastruktur memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah, baik yang masuk dalam infrastruktur dasar dan non dasar. Dari perspektif

kebutuhan dasar maka infrastruktur dasar yang andal sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti Jalan, jembatan, drainase, dan air. Sedangkan infrastruktur non dasar adalah infrastruktur lainnya seperti jaringan internet, transportasi umum dan lainnya yang tidak berkenaan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan infrastruktur tersebut harus dapat diandalkan dari waktu ke waktu atau dengan kata lain terbebas dari gangguan seperti gangguan yang diakibatkan karena bencana alam, maupun kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia.

7. Tata Kelola Birokrasi yang Efektif, Kredibel, Akuntabel berorientasi layanan

Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan membawa dampak yang baik pula kepada masyarakat. Namun demikian, pemerintahan yang baik saja masih dirasa belum cukup melainkan harus diselenggarakan secara efektif, akuntabel dan efisien. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah silih berganti setiap tahunnya yang didorong oleh kebijakan pemerintah pusat serta berkembangnya tuntutan masyarakat sebagai dampak dari semakin meningkatnya literasi masyarakat. Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan tersebut maka diperlukan komponen pendanaan yang kuat. Namun demikian, pembiayaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung masih sangat bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang ditunjukkan dengan nilai kemandirian fiskal yang masih sangat rendah. Kondisi tersebut menjadikan penyelenggaraan pembangunan pada kondisi yang tidak pasti mengingat dana transfer nilainya sangat tidak pasti dan sangat memungkinkan untuk dikurangi setiap tahunnya. Dengan kondisi keterbatasan dan ketergantungan anggaran pembangunan Kabupaten Tulungagung Tersebut, maka sangat mutlak bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan Rasio PAD setiap tahunnya. Selain keterbatasan anggaran pembangunan, proses penyelenggaraan pembangunan khususnya dalam hal penyelenggaraan infrastruktur publik masih dirasa belum optimal jika dilihat dari usia infrastruktur yang dibangun. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat semakin menurun bahkan sedikit banyak semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah yang memberikan efek domino kepada efektivitas pembangunan kevdepan.

8. Optimalisasi Pengelolaan Aset Kekayaan Daerah untuk Menunjang Kemandirian Pembangunan

Komponen pendanaan memang salah satu hal yang penting dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan di suatu wilayah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah cara atau metode untuk mengelola seluruh sumber daya pemerintah dengan optimal, baik sumber daya manusia dan seluruh aset yang

dimiliki. Kapasitas SDM pemerintahan di Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan selalu meningkat setiap periodenya, namun demikian pemanfaatan aset masih belum dapat dilakukan secara optimal. Aset yang saat ini dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung jumlahnya cukup banyak, baik yang berbentuk tanah, bangunan, maupun kekayaan intelektual lain. Pemanfaatan aset secara optimal diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan pemerintah daerah khususnya dari pendapatan non pajak daerah. Selain itu, dengan skema yang tepat, pemanfaatan aset pemerintah juga dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga multiplier efeknya dapat semakin besar. Dengan demikian, pemanfaatan aset daerah menjadi salah satu faktor strategis dalam pembangunan jangka panjang kedepan.

9. Transparansi dan Digitalisasi untuk Mewujudkan Masyarakat Sadar Teknologi

Meningkatnya kapasitas atau pengetahuan masyarakat Kabupaten Tulungagung seiring dengan berkembangnya zaman memberikan dampak yang sangat signifikan dari segi sosial dan ekonomi yang secara umum disebut sebagai disrupsi teknologi informasi. Dari perspektif sosial, perkembangan teknologi informasi mampu menggeser dan mengubah cara manusia dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari. Berbagai norma sosial juga semakin terkikis seiring semakin dekatnya jarak ruang dan waktu. Sedangkan dari perspektif ekonomi, perkembangan teknologi memberikan dampak pada berubahnya pola konsumsi masyarakat, baik dari jenis dan jumlah komoditas yang dikonsumsi serta cara untuk memperoleh komoditas tersebut. Hal tersebut tentunya memberikan dampak pada tuntutan efisiensi pasar seperti tuntutan untuk memperpendek jalur distribusi, dan semakin kompetitifnya penentuan harga barang dan jasa. Jika kondisi tersebut tidak dapat direspons dengan baik oleh pelaku usaha khususnya UMKM maka dapat menjadi ancaman cukup serius yang dapat mengakibatkan tutupnya usaha.

Kemudahan memperoleh informasi melalui smart phone, di sisi lain memberikan tantangan bagi pemerintah untuk menjaga kemanan seluruh platform digital pemerintah dan menyadarkan masyarakat atas pentingnya melindungi informasi-informasi yang sensitif di dunia digital. Jika hal tersebut gagal dilakukan oleh pemerintah, maka dapat berpotensi meningkatkan peluang tindak kejahatan berbasis digital seperti penipuan, pencurian, dan pemerasan. Secara umum, kondisi tersebut sudah mulai muncul dengan ditunjukkan munculnya fenomena baru penipuan dan pencurian berbasis digital di Kabupaten Tulungagung.

Jika berbagai ancaman tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan dengan efisien, seperti upaya pemerintah untuk mendapatkan data monitoring yang secara *realtime* menggunakan

IoT. Kedewasaan masyarakat dalam era digital serta meningkatnya kepercayaan kepada pemerimtah turut mendukung optimalisasi teknologi ini sehingga data yang akurat dapat tersedia secara berkelanjutan. Daya yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan, baik yang dimanfaatkan secara publik, dihitung manual maupun dengan bantuan sistem seperti *Artificial intelegent*, dan *machine learning*.

10. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Berkualitas Bagi Masyarakat

Kesehatan merupakan hal dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Dengan memiliki tubuh yang sehat tentunya berbagai pengembangan diri baru dapat dilakukan secara optimal. Namun demikian, kesehatan masyarakat masih menjadi isu pembangunan di Kabupaten Tulungagung, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Padahal, kesehatan masyarakat yang terhambat akan berdampak pada banyak hal seperti pendidikan atau tumbuh kembang anak, dan serta masalah ekonomi. Bahkan, pada masyarakat yang tingkat ekonomi rendah atau rentan miskin, gangguan kesehatan atau kebutuhan tindakan medis dapat secara langsung mednorong mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Hal tersebut diakibatkan oleh biaya kesehatan yang secara cukup mahal bagi kemampuan ekonomi mereka. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, dampak yang ditimbulkan dapat sampai pada daya saing masyarakat.

11. Jaminan Pendidikan Menyeluruh dan Kesempatan dalam Menjangkau Pendidikan Tinggi

Tingkat pendidikan masyarakat dapat mencerminkan kapasitas setiap individu masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang mampu mengakses pendidikan hingga pendidikan tinggi cenderung lebih memiliki pemikiran yang terbuka dan dapat lebih mudah untuk menerima perubahan-perubahan lingkungan. Jika melihat kondisi existing, rasio masyarakat Kabupaten Tulungagung yang menempuh pendidikan tinggi khususnya pada jenjang mahister dan doktor, masih sangat kecil. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan stimulan melalui peningkatan pemahaman atas pentingnya pendidikan tinggi, dukungan ekonomi dan bantuan pendidikan langsung masih sangat diperlukan. Semakin banyak masyarakat dengan pendidikan tinggi, diharapkan masyarakat dapat memunculkan banyak gagasan dalam pembangunan, meningkatnya peran dalam pembangunan hingga peningkatan daya saing SDM.

12. Keberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan sehingga keberlanjutan pembangunan dapat dijaga dengan ketergantungan kepada pemerintah yang rendah. Upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat sebagai upaya

dalam mewujudkan kesejahteraan masih perlu dioptimalkan mengingat upaya upaya tersebut masih mengalami berbagai tantangan. Tantangan terbesar adalah pada upaya-upaya dalam perlindungan sosial masyarakat. Dalam 20 tahun ke depan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat sangat diperlukan, khususnya untuk menjamin hak hidup layak yang berkenaan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan jaminan sosial lainnya.

13. Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Kebencanaan menjadi faktor dominan dalam keberlangsungan suatu peradaban termasuk di Kabupaten Tulungagung. Dengan kondisi geografis dan topografi wilayah yang dimiliki, Kabupaten Tulungagung memiliki potensi bencana diantaranya banjir, banjir bandang, cuaca ektrim, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor serta tsunami. Namun demikian, meskipun bencana memiliki sifat yang cenderung tidak dapat diprediksi, dampak dari bencana dapat diminimalkan dengan menerapkan pengelolaan kebencanaan yang baik. Kualitas pengelolaan bencana dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas masyarakat dan dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, peran berbagai sektor sangat penting, baik dari masyarakat secara umum, pemerintah dan swasta.

14. Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi

Pembangunan SDM masyarakat akan berlangsung secara stagnan jika tidak diimbangi dengan regenerasi SDM yang baik. Upaya untuk menciptakan generasi unggul sangat bergantung pada tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak di kabupaten tulungagung dapat dilihat dari angka stunting di Kabupaten Tulungagung. Hingga saat ini, masih ditemukan masyarakat yang pertumbuhannya terganggu, dan jika tidak ditangani dengan baik, tren tersebut akan tetap berlanjut hingga 20 tahun ke depan. Fenomena stunting di Kabupaten Tulungagung sangat bekaitan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat, keterpenuhan gizi masyarakat dan kesiapan usia produktif dalam mengelola rumah tangga. Oleh karenanya perlu dilakukan penanganan yang terintegrasi khususnya pada aspek-aspek yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak tersebut.

15. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Isu gender atau kesetaraan gender menjadi isu internasional,sehingga turut menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Upaya untuk meningkatkan kesetaraan hak kepada perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Namun demikian, jika kondisi tersebut tercapai tentunya akan memberikan dampak sosial lain dimana jika tidak diberikan pemahaman dengan baik khususnya pada perempuan yang telah memiliki pasangan dapat meningkatkan angka perceraian dalam rumah tangga yang

nantinya dapat berdampak pada ekonomi keluarga tersebut dan tumbuh kembang anak korban dari perceraian. Fenomena tersebut sudah mulai muncul di kabupaten Tulungagung, khususnya pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah yang sumber pendapatanya berasal dari istri dan secara lebih spesifik yang bekerja di luar negeri atau TKW.

Lima Belas Isu Jangka Panjang Kabupaten Tulungagung merupakan kondisi yang memiliki potensi menjadi isu hingga dua puluh tahun mendatang. Isu strategis dihimpung dari pandangan-pandangan atas berbagai hal terkait dengan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan, isu-isu global, isu-isu kajian lingkungan serta menilai kebiasan di masa-masa mendatang yang dinilai dapat menjadi potensi permasalahan di daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan diri dalam rangka menentukan arah kebijakan atas isu yang muncul ataupun berupaya melakukan prevensi terhadap isu yang akan muncul.

2.6.1.5 Telaah RTRW Kabupaten Tulungagung

RPJMD memiliki keterkaitan erat dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Telaah terhadap RTRW Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tidak hanya selaras dengan visi dan misi kepala daerah, tetapi juga sejalan dengan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan secara legal dan teknokratis.RTRW Kabupaten Tulungagung merupakan pedoman dalam penataan ruang wilayah kabupaten yang mencerminkan potensi, permasalahan, serta kebutuhan pengembangan wilayah berdasarkan prinsip keberlanjutan, keterpaduan, dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, integrasi antara dokumen RTRW dan RPJMD penting untuk menjamin konsistensi antara kebijakan pembangunan sektoral dengan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Sinkronisasi RTRW dan RPJMD dapat dilihat melalui isu strategis RTRW Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan tujuh isu strategis RTRW Kabupaten Tulungagung.

1. Tidak terkendalinya perubahan penggunaan lahan di sekitar JLS (rawan alih fungsi kawasan hutan)
2. Kebijakan sistem perkotaan dimana perkotaan Tulungagung menjadi PKW
3. Pengembangan jalan tol Kediri-Tulungagung Trenggalek dan Kepanjen-Tulungagung
4. Sudah terdapat kajian-kajian pengelolaan kawasan (Geopark, RIPPDA, RISPAM, dll)
5. Meningkatnya investasi
6. Isu terkait program-program kebutuhan Kabupaten yang akan datang di antaranya:
   A. Pengembangan TPA di Kalidawir
   B. Pengembangan terminal tipe C di Boyolangu
   C. Pengembangan jalan lingkar Perkotaan Tulungagung

D. Pembangunan Pelataran Parkir/Tempat Bongkar Muat Angkutan Barang di Kedungwaru
E. Pengembangan Agropolitan (Sendang, Pagerwojo, dan Karangrejo)
F. Pengembangan minapolitan (Gondang)
G. Penetapan LP2B dan KP2B yang harus diakomodir dalam RTRW
H. Pengembangan perguruan tinggi di Kecamatan Rejotangan
I. Pengembangan TPA di Kalidawir
J. Pengembangan pasar hewan terpadu di Sumbergempol

7. Pemaduserasian RTRW Kabupaten Tulungagung dengan wilayah sekitar

2.6.1.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulungagung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefiniskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Isu Pembangunan Berkelanjutan pada kajian lingkungan hidup strategis ini adalah gambaran situasi yang dipandang penting untuk mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Secara praktis, yang dipandang sebagai isu dapat merupakan sebuah fenomena permasalahan yang saat ini sedang berlangsung atau belum berlangsung tetapi dipandang akan dapat mempengaruhi keseluruhan upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan baik secara social, ekonomi, lingkungan, maupun hukum dan tata Kelola administrasi daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program (KRP) dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan apakah strategi pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) telah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD.

Berdasarkan laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029, ada 8 isu paling strategis KLHS Kabupaten Tulungagung 2025-2029 yang merupakan hasil pembobotan dari 14 daftar isu pendek KLHS Kabupaten Tulungagung. Ke 8 isu paling strategis tersebut antara lain :

1. Kurang optimalnya pengelolaan dan pengembangan terhadap air minum layak, aman dan sanitasi yang aman bagi masyarakat
2. Upaya dalam peningkatan kapasitas kebencanaan yang masih rendah
3. Pemeliharaan lingkungan yang kurang optimal, dan ditemukan alih fungsi lahan
4. Sistem pengolahan persampahan yang belum optimal
5. Upaya dalam pengentasan kemiskinan yang belum merata dan optimal
6. Akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan yang masih terbatas
7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
8. Belum optimalnya pengelolaan potensi sektor unggul daerah

Mekanisme selanjutnya dalam penyelenggaraan KLHS adalah merumuskan scenario pembangunan berkelanjutan atau alternatif program baik yang merupakan perbaikan dari program yang disusun di dalam dokumen RPJMD ataupun yang belum tercantum di dalam dokumen RPJMD akan tetapi penting untuk dilaksanakan.

A. Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan

Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan dirumuskan sebagai alternatif skenario dan rekomendasi yang diperuntukkan bagi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung namun belum mencapai target, sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017, serta permasalahan yang terkait dengan muatan KLHS maupun permasalahan lainnya.

Dari hasil pengelompokan indikator prioritas terhadap isu paling strategis KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung 2024-2029, berikut disajikan Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan yang telah dirumuskan:

Tabel 2. 67 Alternatif skenario dan rekomendasi dalam KLHS RPJMD Kabupaten Tulungagung 2024-2029

Isu Strategis terkait TPB	Skenario	Alternatif Rekomendasi
1. Kurang optimalnya pengeloaan dan pengembangan terhadap air minum layak, air minum aman, dan sanitasi yang aman bagi masyarakat	Pemerataan Akses dan infrastruktur air minum dan sanitasi layak	Penyediaan infrastruktur berupa tampungan air bersih di setiap wilayah didaerah seperti tiap kecamatan untuk memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dan layak di Masyarakat
	Penguatan Fungsi Kendali perizinan atas pencemaran kualitas air	Percepatan pipanisasi untuk pemenuhan kebutuhan domestik
		Pengawasan dan monitoring aktivitas pengunaan air debit tinggi

Isu Strategis terkait TPB	Skenario	Alternatif Rekomendasi
		pada industri
		Menyadarkan Masyarakat dengan adanya sosialisasi pembuangan air limbah serta lumpur tinja secara tidak sembarangan
		Pemerintah membentuk pola Kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk membangun sistem pengelolaan limbah serta lumpur ttinja secara terpusat
		Pengenaan teknologi pengelolaan limbah air terpusat bagi perumahan
		Revitalisasi Infrastruktur Pengelolaan Limbah
2. Upaya dalam peningkatan kapasitas kebencanaan yang masih rendah	Meningkatkan upaya mitigasi risiko bencana dengan salah satunya pemerataan pendidikan layanan khusus bencana di daerah rawan bencana	Mengikutsertakan masyarakat terhadap kegiatan pencegahan dan penanganan bencana untuk meminimalisir jumlah korban
	Memanfaatkan teknologi guna memetakan daerah rawan bencana di Kabupaten Tulungagung	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan maupun penanganan bencana di lingkungan masyarakat daerah rawan bencana
	Merencanakan pelatihan terhadap keadaan darurat bagi masyarakat	Pemerintah melakukan sosialisasi dan juga simulasi bagi masyarakat di daerah rawan bencana dalam pertolongan pertama pada korban bencana
		Pembangunan sarana dan prasarana pencegahan bencana, khususnya di daerah rawan bencana
		Koordinasi secara intensif antar lembaga ataupun pihak terkait lainnya yang menangani kebencanaan
		Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap lokasi penguatan pengurangan risiko
		Melakukan pelatihan tanggap kondisi darurat kepada semua kalangan masyarakat
3. Pemeliharaan lingkungan yang kurang optimal, dan ditemukannya alih fungsi lahan	Konservasi sumber sumber pokok air, pangan dan biodiversitas	Melakukan kajian perencanaan pemanfaatan keanekaragaman hayati
	Penguatan kebijakan dan pemetaan data Lahan Dilindungi	Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang lingkungan dengan

Isu Strategis terkait TPB	Skenario	Alternatif Rekomendasi
		memberikan prosedur tertentu
4. Sistem pengolahan persampahan yang belum optimal	Peningkatan Prasarana Pengelolaan Sampah, metode dan teknologi pengurangan Sampah	Penambahan armada pengangkutan sampah serta petugas pengangkut sampah
	Merencanakan sosialisasi dalam mengolah sampah pada tingkat rumah tangga kepada masyarakat	Studi banding penerapan teknologi pengelolaan sampah
		Pengembangan TPS 3R Kerjasama pemerintah dan perusahaan berbasis lingkungan melalui CSR
		Pemerintah daerah melakukan sosialisasi secara rutin, terkait pengolahan sampah menjadi pupuk kompos di tingkat desa guna mengurangi timbulan sampah
5. Upaya dalam pengentasan kemiskinan yang belum merata dan optimal	Penguatan peran masyarakat dalam konservasi lingkungan dan ketahanan pangan	Memanfaatkan dan mengoptimalkan alokasi pendanaan guna meningkatkan kemiskinan yang terjadi di masyarakat
		Melakukan regionalisasi bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan secara rutin
		Pengembangan budaya usaha bagi masyarakat / UMKM yang potensial
6. Akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan yang masih terbatas	Pemenuhan kebutuhan dasar terhadap penanganan penyakit degeneratif serta layanan kesehatan	Program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah seperti mekanisme BPI
	Pemerataan tenaga Kesehatan terlatih Standar pelayanan minimum dan Edukasi pencegahan Penyakit mandiri	Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk persalinan yang aman. Subsidi persalinan bagi perempuan hamil kategori rentan
	Monitoring data penduduk penerima bantuan JKN yang wajib dan layak mendapatkan	Program penyuluhan kesadaran harus dilakukan secara teratur untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan pentingnya jaminan kesehatan serta perawatan kesehatan kehamilan dan persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih.
		Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dampak resiko dan bahayanya penyakit degeneratif;

Isu Strategis terkait TPB	Skenario	Alternatif Rekomendasi
7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pembangunan ekonomi inklusif dan berbasis sumber daya/ potensi lokal	Penguatan Kelembagaan dan fungsi Koperasi sebagai lembaga pinjaman berbasis kekeluargaan
	Penguatan peran kewirausahaan melalui hilirisas produk	Memfasilitasi masyarakt akan kebutuhan sarana dan prasarana oenunjang kegiatan perekonomian
	Penguatan peran koperasi sebagai lembaga pinjaman	Memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait peningkatan skill dalam lingkup bisnis
	Pembangunan infrastruktur konektivitas	
8. Belum optimalnya pengelolaan potensi sektor unggulan daerah	Pemerintah fokus membuat strategi guna meningkatkan pengolahan sektor unggulan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Memberikan bantuan fasilitas sarana dan prasarana kepada para petani, nelayan dalam pengolahan hasil panen
		Menyediakan pasar yang seduai agar, kegiatan jual beli hasil panen dapat berjalan secara lancar

Sumber: diolah dari RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045

B. Alternatif skenario dan rekomendasi tanpa upaya tambahan

Alternatif skenario dan rekomendasi tanpa upaya tambahan merupakan bentuk skenario yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator yang telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, dari keseluruhan jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten terdapat 112 indikator atau 57.73% indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target, sehingga tidak memerlukan upaya tambahan.

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator dimasa mendatang, berikut disampaikan beberapa alternatif skenario yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung.

- Skenario 1: Mempertahankan Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang Telah Memenuhi Target Skenario tersebut mengindikasikan bahwa di masa depan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu menjaga pencapaian yang sudah dicapai dengan melanjutkan program dan kegiatan secara berkelanjutan, memperkuat sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta memastikan tersedianya anggaran yang memadai. Hal ini diharapkan dapat mempertahankan pencapaian yang sudah berhasil dicapai.
- Skenario 2: Meningkatkan Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang Telah Memenuhi Target dengan Menggunakan Skala Prioritas Pemerintah

Kabupaten Tulungagung perlu meningkatkan pencapaian indicator indikator yang memerlukan usaha besar dan berdampak langsung pada pencapaian jangka panjang dengan melaksanakan program dan kegiatan yang berkelanjutan melalui inovasiinovasi baru, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pelaksanaannya. Penetapan indikator yang diutamakan dilakukan dengan mengevaluasi dan memetakan berbagai indikator yang telah mencapai target, berdasarkan beberapa kriteria tertentu, seperti:

- Sifat indikator yang rentan mengalami fluktuasi dan banyak dipengaruhi oleh variabel/faktor lain;
- Indikator memiliki tingkat kepentingan dan dampak yang besar bagi masyarakat secara luas.

2.6.1.7 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Tulungagung

Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis dapat berupa masalah, potensi, maupun isu sesuai konteks. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, capaian kinerja pemerintah, laporan KLHS RPJMD 2025-2029, maupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Secara teknis, perumusan isu strategis daerah mempertimbangkan beberapa hal berikut diantanyara: potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat, permasalahan pembangunan daerah, isu KLHS RPJMD, serta isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara lebih rinci, berikut tabel perumusan isu strategis daerah.

Tabel 2. 68 Perumusan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD Tulungagung
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Peningkatan aksesibilitas dan potensi ekonomi di kawasan Selingkar Wilis dan Jalur Lintas Selatan 2. Perdagangan, transportasi dan industri pengolahan berkembang cukup pesat 3. Potensi sumber daya alam yang cukup tinggi (pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan) 4. Optimalisasi bonus demografi 5. Stabilitas daerah yang cukup terjaga	1. Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah 2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur daerah 3. Belum optimalnya keberlanjutan upaya penurunan kemiskinan 4. Belum optimalnya daya saing SDM 5. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang berkualitas 6. Belum optimalnya resiliensi terhadap bencana dan ketahanan lingkungan	1. Upaya dalam pengentasan kemiskinan yang belum merata dan optimal 2. Akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan yang masih terbatas 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan 4. Belum optimalnya pengelolaan potensi sektor unggul daerah 5. Upaya dalam peningkatan kapasitas kebencanaan yang masih rendah 6. Pemeliharaan lingkungan yang kurang optimal, dan ditemukan alih fungsi lahan 7. Sistem pengolahan persampahan yang belum optimal 8. Kurang optimalnya pengelolaan dan pengembangan terhadap air minum layak, aman dan sanitasi yang aman bagi masyarakat	Megatren Global 2045: 1. Geopolitik dan geoekonomi 2. Pertumbuhan kelas menengah 3. Persaingan sumber daya alam 4. Perubahan ilim 5. Tata kelola keuangan global 6. Luar angkasa 7. Urbanisasi dunia 8. Konstelasi perdagangan global 9. Perkembangan teknologi 10. Demografi global	Tantangan pembangunan RPJMN: 1. Rendahnya produktivitas 2. Rendahnya kualitas SDM 3. Pergeseran struktur kelas masyarakat 4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif 5. Krisis lingkungan 6. Geopolitik dan geoekonomi 7. Tata kelola dan akubtabilitas pemerintah	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur: 1. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah 2. Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial 3. Pengembangan SDM berkualitas 4. Tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan 5. Lingkungan hidup dan ketahanan bencana 6. Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani	1. Peningkatan daya saing perekonomian melalui hilirasasi ekonomi berbasis desa. 2. Pengentasan kemiskinan terintegrasi 3. SDM berkualitas dan kohesivitas sosial 4. Pemerataan pembangunan infrastruktur 5. Ketahanan lingkungan dan bencana 6. Tata kelola berintegritas dan inklusif

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan pertimbangan berbagai aspek seperti potensi daerah, permasalahan pembangunan, isu KLHS RPJMD, serta isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional), maka dirumuskan 6 (enam) isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029. Adapun keenam isu strategis tersebut yakni hilirisasi sektor ekonomi berbasis desa, pengentasan kemiskinan terintegrasi, sdm berkualitas dan kohesivitas sosial, pemerataan pembangunan infrastruktur, ketahanan lingkungan dan bencana, tata kelola berintegritas dan inkluif.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029:

1. **Peningkatan daya saing perekonomian melalui hilirasasi ekonomi berbasis desa**

Pembangunan ekonomi berbasis desa menjadi salah satu isu krusial yang perlu direspons oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama lima tahun mendatang. Salah satu sektor ekonomi dominan di Kabupaten Tulungagung adalah aktivitas ekonomi dalam PDRB lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan yang memiliki distribusi terbesar ke-3 diantara sektor-sektor ekonomi daerah lainnya, dengan rata-rata distribusi sebesar 18,66 persen per tahun. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhan sektor ini merupakan salah satu yang terendah diantara sektor lain, dengan rata-rata sebesar 0,088 persen per tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang dominan di wilayah dengan karakteristik rural atau pedesaaan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah selama ini belum mampu didorong oleh aktivitas-aktivitas perekonomian yang ada di wilayah pedesaan.

Isu strategis ini menekankan pentingnya intervensi yang berkelanjutan (*continous improvement*) dalam upaya peningkatan keberdayaan desa dalam pembangunan ekonomi daerah melalui upaya hilirisasi. Upaya hilirisasi ini perlu dilakukan untuk memastikan produk-produk ekonomi desa, seperti penguatan akses pasar atas hasil panen sektor pertanian maupun produk UKM masyarakat lokal dengan tujuan untuk dapat menjangkau pasar dan kesempatan ekonomi yang lebih luas dari sebelumnya. Selain itu, upaya hilirisasi berbasis desa juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah secara umum melalui peningkatkan arus perdagangan barang dan jasa dalam daerah, dengan memastikan keterkaitan yang erat antara dunia industri dengan masyarakat lokal melalui rantai pasok produksi yang mengoptimalkan penggunaan produk-produk bahan mentah daerah.

2. **Pengentasan kemiskinan terintegrasi**

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Tulungagung mengalami tren positif yang konsisten terjadi sejak tahun 2021. Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan sebesar 1,23 persen dalam empat tahun terakhir dan menjadikan Kabupaten Tulungagung berada pada posisi dua terendah terkait kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Penurunan persentase penduduk sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang turut mengalami tren positif pada tahun 2024. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada sebesar 0,34 poin pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung semakin menjauhi Garis Kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan yang berkurang sebanyak 0,07 poin pada tahun 2024 juga mengindikasikan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung semakin kecil.

Tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung memang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung tetap perlu melakukan upaya pengentasan kemiskinan terintegrasi untuk mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera.

Upaya pengentasan kemiskinan terintegrasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya lintas-aktor, melainkan juga lintas-sektor. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya terbatas pada persoalan sumber penghidupan. Sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial dan ketenagakerjaan juga perlu dirumuskan strategi pembangunannya secara integratif dengan tujuan akhir pengentasan kemiskinan yang holistik. Akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah yang optimal, keberadaan jaminan sosial yang adaptif dan menyeluruh, serta perluasan kesempatan pekerjaan yang layak bagi wilayah-wilayah dengan kondisi kemiskinan yang tinggi perlu dilakukan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

3. SDM berkualitas dan kohesivitas sosial

Isu terkait sumber daya manusia (SDM) dan kohesivitas sosial menjadi aspek penting dalam upaya pembangunan di Kabupaten Tulungagung. SDM yang unggul merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing daerah, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan dengan memerhatikan beberapa aspek seperti akses pendidikan yang merata, pelatihan keterampilan berbasis industri, serta perbaikan layanan kesehatan. Selain itu, SDM yang berkualitas juga harus memiliki karakter yang kuat, memahami nilai-nilai budaya lokal, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Kabupaten Tulungagung dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

Selain peningkatan SDM, kohesivitas sosial juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.

Kohesivitas sosial merujuk pada hubungan yang erat antarindividu dan kelompok dalam masyarakat, yang didukung oleh semangat kebersamaan, gotong royong, dan toleransi. Dalam konteks pembangunan, memperkuat kohesivitas sosial dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan peran budaya dan kearifan lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan terciptanya hubungan sosial yang solid, Kabupaten Tulungagung dapat mencegah potensi konflik sosial dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4. Pemerataan pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu prioritas pembangunan sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur wilayah terutama di daerah pedesaan dan pesisir masih banyak ditemukan kerusakan terutama infrastruktur jalan serta penanganan persampahan termasuk sistem pengolahan sampah yang belum optimal. Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan terhadap air minum layak dan aman serta sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat belum optimal. Infrastruktur yang berkualitas mencakup jalan, jembatan, transportasi, listrik, air bersih, serta fasilitas telekomunikasi yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah berakibat pada terhambatnya mobilitas barang dan jasa, sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah perlu merancang strategi pembangunan yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal serta menggandeng investor untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Optimalisasi dana dari APBD, APBN, serta sumber pendanaan lainnya juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur. Selain aspek teknis, penguatan kebijakan dan tata kelola pembangunan infrastruktur sangat diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas. Dengan infrastruktur yang memadai dan merata dapat meningkatkan daya saing ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata di Kabupaten Tulungagung.

5. Ketahanan lingkungan dan bencana

Pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai upaya untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup agar tetap selalu terjaga dengan baik. Kualitas lingkungan hidup tidak hanya menjadi isu daerah, namun telah menjadi isu di level nasional bahkan global. Pada level global, telah dirumuskan tiga isu lingkungan

yang dikenal *tripple planetary crisis*, yang mencakup perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Ketiganya memiliki saling keterkaitan, yang artinya dalam pengelolaannya diperlukan sistem yang terpadu dan terintgrasi. Adapun di tingkat nasional, konsentrasi terhadap isu lingkungan telah tercermin dalam misi (Asta Cita) dan prioritas nasional RPJMN 2025-2029. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka urgensi terhadap pengelolaan lingkungan sangat tinggi dan harus direspon dengan tepat, termasuk di Kabupaten Tulungagung.

Lebih lanjut lagi, isu terkait perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan memiliki kaitan erat dengan potensi kebencanaan. Lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan bencana hidrometeorologi seperti, banjir, tanah longsor dan kekeringan. Kompleksnya keterhubungan antara kelestarian lingkungan dengan kebencanaan, menjadikan kedua isu ini memerlukan perhatian khusus dalam konteks pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di Kabupaten Tulungagung. Berbagai kondisi tersebut tentunya perlu mendapatkan intervensi secara tepat, seperti penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu berbasis masyarakat, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait kesesuaian tata ruang, mempertahankan wilayah imbuhan air, hingga peningkatan resiliensi penanggulangan bencana perlu untuk diintegrasikan dalam setiap agenda pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

6. Tata kelola berintegritas dan inkluif

Isu strategis ini menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan. Integritas berarti memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis pada prinsip kejujuran, profesionalisme, dan kepentingan publik. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan sistem pengawasan, optimalisasi pelayanan berbasis digital, serta penerapan kebijakan yang mampu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, pemerintah daerah akan mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mampu menciptakan sistem birokrasi yang efisien dan bersih.

Selain berintegritas, tata kelola yang inklusif menjadi aspek penting dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan memberikan akses yang setara kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kelompok ekonomi lemah, dan masyarakat rentan lainnya. Perwujudan kondisi ini melalui kebijakan yang mendukung partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan dasar yang lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan adanya pendekatan inklusif, diharapkan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan daerah.

Keberhasilan tata kelola yang berintegritas dan inklusif sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi. Partisipasi aktif dari

berbagai pemangku kepentingan akan memastikan kebijakan yang diambil lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, melalui inovasi dan sinergi antar-sektor, dapat mempercepat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, menjadikan Kabupaten Tulungagung lebih maju, sejahtera, dan berakhlak.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas daerah. Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang berisi penjabaran misi dan selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target, tujuan, serta sasaran RPJMD. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

3.1 RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjadi penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Secara strategis, RPJMD 2025-2029 juga berfungsi sebagai tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Sebagai tahap awal dari pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, RPJMD 2025–2029 memiliki peran penting dalam meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Visi jangka panjang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 yaitu "**Kabupaten Tulungagung Maju, Sejahtera, Berkarakter dan Berkelanjutan."** Visi tersebut selaras dengan visi jangka panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Timur yaitu "Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan", serta selaras dengan visi jangka panjang nasional (RPJPN) yaitu "Indonesia Emas 2045 sebagai NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan." Perwujudan visi jangka panjang Kabupaten Tulungagung didukung oleh lima sasaran visi yaitu perekonomian maju dan stabil, sumber daya manusia berdaya saing, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, daya saing daerah meningkat, dan intensitas emisi gas rumah kaca menuju *net zero emission*.

Tabel 3. 1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2045)
1. Perekonomian Maju dan Stabil	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,47	7,45
	PDRB Perkapita	Rp (Juta)	52,11	343,28
2. SDM Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,15	80,12
3. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Indeks Gini	Nilai	0,333	0,311
	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,93-5,39	0,45-0,13
4. Daya Saing Daerah Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3,53	4,68
5. Intensitas Emisi GRK Menuju *Net Zero Emission*	Penurunan Emisi GRK	Ton CO2 Eq.	114.312,68	159.673,56
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	71,90	73,62

Dalam sasaran visi jangka panjang Kabupaten Tulungagung disertai dengan indikator kinerja dan target 2045. Sasaran, indikator dan target tersebut perlu dikawal dalam setiap periode pelaksanaan RPJMD. Secara teknis, indikator kinerja sasaran visi dapat disesuaikan dengan memperhatikan pendistribusian target indikator makro dalam pembangunan.

Dalam mewujudkan visi jangka panjang daerah, dalam RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045 telah dirumuskan strategi yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 5 (lima) agenda transformasi dan arah kebijakan, serta keberhasilannya diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator Utama Pembangunan (IUP).

Tabel 3. 2 Arah Kebijakan Tahap I RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045

Agenda Transformasi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029
Transformasi Ekonomi	Mewujudkan tranformasi ekonomi yang inklusif	Penguatan modal dasar SDM tenaga kerja dan wirausaha
Transformasi Sosial	Transformasi sosial untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan	Hilirisasi modal dasar pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar sebagai landasan kemajuan SDM
Transformasi Tata Kelola	Transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi berkualitas	Efisiensi birokrasi, reorientasi pembangunan dan citra integritas
Ketahanan Sosial Budaya	Stabilitas keamanan serta ketahanan sosial budaya	Pembentukan karakter dan kearifan lokal masyarakat
Ketahanan Infrastruktur, Ekologi, dan Bencana	Mewujudkan infrastruktur berkualitas, ketahanan ekologi, dan bencana	Sinkronisasi kebijakan dan penataan tata ruang wilayah
		Infrastruktur konektivitas *leverage* ekonomi dan kebutuhan dasar sosial

Visi, misi, sasaran visi, serta arah kebijakan tahap pertama RPJPD 2025-2045 selanjutnya diintegasikan dalam visi, misi, startegi, arah kebijakan dan program prioritas RPJMD 2025-2029. Penyelarasan

tersebut pada akhirnya akan berkontribusi dalam pencapaian 45 indikator utama pembangunan (IUP).

3.2 RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Integral Pencapaian RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Makna dari visi ini menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam melanjutkan dan memperkuat pondasi pembangunan yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045. Pencapaian visi tersebut dijabarkan melalui **8 (delapan) misi utama pembangunan nasional**, yang dikenal sebagai **Asta Cita**, sebagai arah strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara bertahap dan menyeluruh.

Tabel 3. 3 Asta Cita RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Misi Pembangunan	Narasi 8 (delapan) Asta Cita
Asta Cita 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Asta Cita 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Asta Cita 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Asta Cita 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
Asta Cita 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Asta Cita 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Asta Cita 7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
Asta Cita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Asta Cita mencakup **17 program prioritas Presiden** yang meliputi agenda pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, terdapat pula langkah-langkah percepatan berupa **Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)** atau ***Quick Wins***. Seluruh inisiatif ini dirancang untuk merespons permasalahan dan tantangan utama secara cepat, tepat

sasaran, dan terukur, sehingga mampu membangun landasan yang kuat bagi keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan nasional.

Tabel 3. 4 Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/*Quick Wins* RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Program Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*
1. Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Pemberantasan Kemiskinan 6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif Karakteristik Mandiri Lainnya 15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, dan Perawatan Rumah Ibadah 17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), 8. dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 9. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Program prioritas dan *Quick Wins* dalam RPJM Nasional 2025–2029 menjadi rujukan utama dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025–2029. Selain itu, penyusunan RPJMD juga mengacu pada arah pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV RPJM Nasional, yang memuat target pembangunan, lokasi prioritas, serta indikasi intervensi kebijakan secara spasial.

3.3 Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2025-2029

3.3.1 Visi Pembangunan Daerah

Rumusan visi merupakan kondisi yang akan diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi RPJMD Kabupaten Tulungagung merupakan visi kepala daerah terpilih. Visi tersebut sebagai landasan

utama dalam merumuskan berbagai kondisi pendukung, baik pada level misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas daerah.

Visi RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

"Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa"

Dalam kallimat visi tersebut terdiri dari empat kata kunci yaitu sejahtera, maju, berakhlak mulia, dan sepanjang masa. Berikut penjelasan masing-masing dari kata kunci visi:

1. Sejahtera

Kata sejahtera bermakna sebagai perwujudan kondisi masyarakat yang hidup aman, tentram, makmur, dan tercukupi kebutuhannya baik secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Kesejahteraan ditandai dengan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang stabil, akses layanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya) yang berkualitas, lingkungan yang harmonis dan kondusif, serta berkurangnya kesenjangan antar masyarakat. Terwujudnya ekonomi yang stabil didukung dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor lainnya. Berkembangnya berbagai sektor lapangan usaha mendorong terciptanya lapangan kerja dan kewirausahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk mengotimalkan perkembangan berbagai sektor lapangan usaha membutuhkan ketersediaan layanan publik yang berkualitas. Ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat, ketersediaan infrastruktur (jalan, jembatan, transportasi, air bersih, dan fasilitas umum) yang memadai, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dengan mengurangi polusi dan dampak perubahan iklim. Di sisi lain, pembangunan kehidupan sosial yang harmonis harus terus dijaga melalui peningkatan kerukunan antar masyarakat, toleransi beragama, serta pelestarian budaya.

2. Maju

Kata maju menggambarkan perkembangan kondisi yang lebih baik dari periode sebelumnya. Kondisi tersebut meliputi berbagai aspek urusan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan umum. Berbagai urusan tersebut perlu mendapat perhatian lebih baik pemerintah daerah maupun perangkat daerah pengampu untuk mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. Berkembangnya berbagai urusan didukung kolaborasi pentahelix yakni pemerintah (baik pemerintah daerah, provinsi, dan pusat), akademisi, swasta, masyarakat dan media. Kolaborasi pentahelix menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inovatif dengan melibatkan berbagai pihak.

3. Berakhlak Mulia

Kata berakhlak mulia menunjukkan bahwa masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Terwujudnya Kabupaten Tulungagung yang berakhlak mulia mengindikasikan terjaganya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Kabupaten Tulungagung.

4. Sepanjang Masa

Kata sepanjang masa merupakan komitmen pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya untuk generasi saat ini namun sekaligus untuk generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan memiliki orientasi pada keselarasan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan hidup yang ditopang dengan tata kelola yang baik.

Tabel 3. 5 Keselarasan Visi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD

Visi RPJMD Tulungagung 2025-2029	Visi RPJPD Tulungagung 2025-2045	Visi RPJMD Jawa Timur 2025-2029	Visi RPJMN 2025-2029
"Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa"	"Tulungagung Maju, Sejahtera, Berkarakter dan Berkelanjutan"	"Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045"	"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi RPJMD Kabupaten Tulungagung merupakan bagian penting untuk mencapai Visi RPJPD Kabupaten Tulungagung dan Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN. Visi RPJMD Kabupaten Tulungagung mendukung pencapaian kondisi jangka panjang Kabupaten Tulungagung yang maju, sejahtera, berkarakter dan berkelanjutan. Visi RPJMD Kabupaten Tulungagung dalam konteks Provinsi Jawa Timur mendukung terwujudnya Jawa Timur yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks nasional, RPJMD Kabupaten Tulungagung mendukung pencapaian Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

3.3.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan guna mencapai visi. Berdasarkan visi yang telah dirumuskan yaitu "M*asyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa",* terdapat 5 (lima) Misi pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai berikut.

- Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun dari Desa

- Misi 2: Mewujudkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas
- Misi 3: Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban
- Misi 4: Menuntaskan Kemiskinan Secara Terpadu dan Kolaboratif
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif, dan Bersih dari Korupsi

Berikut penjelasan pada masing-masing Misi:

Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun dari Desa

Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan langkah dan upaya pemerintah daerah dalam rangka pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis hilirisasi sektor unggulan daerah serta upaya untuk melakukan pembangunan ekonomi dari desa. Dalam era perekonomian yang saling terkait, kemampuan daya saing menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Peningkatan daya saing ekonomi daerah dilakukan dengan memastikan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku ekonomi daerah yang nantinya akan meningkatkan produktivitas pelaku ekonomi secara umum.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan upaya hilirisasi sektor unggulan daerah. Hilirisasi merupakan langkah untuk meningkatkan nilai tambah produksi daerah dengan mendorong proses pengolahan bahan mentah (*raw material*) yang berasal dari daerah dan dapat diproses di daerah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi (*consumer goods*). Kabupaten Tulungagung memiliki potensi yang sangat besar dalam aspek hilirisasi, mengingat sektor industri pengolahan dan perdagangan merupakan salah dua dari sektor yang sangat dominan di daerah. Sektor pertanian sebagai salah satu sumber sektor bagi produk mentah juga merupakan salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten Tulungagung, dengan distribusi terbesar ketiga. Hal ini memberikan peluang bagi produk-produk bahan mentah untuk dapat terserap dalam sektor industri olahan daerah, dengan memastikan kualitas dan baku mutu produk mentah daerah dapat memenuhi standar perindustrian secara memadai.

Tidak hanya pertanian, sektor jasa khususnya perdagangan juga menjadi faktor yang penting dalam transformasi ekonomi Kabupaten Tulungagung. Perkembangan sektor perdagangan dapat didorong dengan munculnya pusat perekonomian baru yang lebih tersebar secara geografis, termasuk pusat pariwisata. Segala bentuk pembangunan dapat terlaksana dengan baik jika pembangunan dimulai dari unit terbawah, untuk itu menjadi penting bagi Kabupaten Tulungagung memulai pembangunan dari desa. Pembangunan dari desa dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Pembangunan dari desa diharapkan juga mampu untuk memenuhi fasilitas umum serta sarana dan prasarana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata.

Misi 2: Mewujudkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas

Misi ini diharapkan dapat mewujudkan ketahanan ekologi, yang diwujudkan dengan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, serta berwawasan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi, namun juga untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Pembangunan infrastruktur perlu disusun secara bijak dan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mempertahankan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Menjaga lingkungan hidup yang berkualitas merupakan pilar penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan, yang diwujudkan dengan berbagai skenario pembangunan dari kajian lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Tulungagung mencakup infrastruktur wilayah, infrastruktur pelayanan dasar, dan infrastruktur penunjang perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan dapat menciptakan kemudahan relasi antar daerah yang mendorong Kabupaten Tulungagung memiliki peran strategis bagi pembangunan kawasan di Provinsi Jawa Timur. Kualitas infrastruktur di Kabupaten Tulungagung pada masa depan diharapkan akan terus meningkat dan semakin memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah/desa, khususnya bagi wilayah pinggiran yang diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, diharapkan akan memberikan dampak bagi akselerasi ekonomi daerah, sehingga perlu optimalisasi dari sisi keberdayaan masyarakat dan sektor ekonomi pendukungnya.

Lingkungan dan Infrastruktur yang berkualitas memiliki orientasi pada ketahanan bencana, karena adanya potensi ancaman bencana di Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, untuk meningkatkan ketahanan bencana dibutuhkan upaya intervensi berupa peningkatan pengendalian bencana, peningkatan ekosistem mitigasi bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.

Misi 3: Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban

Misi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. SDM yang unggul diharapkan mampu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan ekonomi, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. Penguatan layanan pada sektor pendidikan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta pembangunan karakter berbasis budaya menjadi strategi utama dalam menjalankan misi ini. Pelaksanaan misi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas dan sehat tetapi juga memiliki kesadaran terhadap pentingnya pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Selain peningkatan kualitas SDM, misi ini juga menekankan pada pentingnya kehidupan masyarakat yang penuh keguyuban, yaitu semangat kebersamaan, gotong royong, dan keharmonisan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Keguyuban ini menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial yang harmonis melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis komunitas, serta penguatan nilai-nilai sosial melalui kegiatan budaya dan keagamaan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Tulungagung

Misi 4: Menuntaskan Kemiskinan Secara Terpadu dan Kolaboratif

Misi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan pendekatan yang sistematis dan terpadu dengan mengoptimalkan pelibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah memiliki tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan hingga mencapai tingkat yang minimal. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal. Fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut kemudian disandingkan dengan melakukan intervensi program yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik, seperti pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta kemudahan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Pendekatan terpadu mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh dan terorganisir dengan mengintegrasikan berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, data menjadi instrumen yang sangat penting. Dengan data yang akurat dalam perencanaan kebijakan, maka bantuan dan program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan tepat sasaran.

Sementara itu, pendekatan kolaboratif menekankan optimalisasi peran berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi inovatif dalam pengentasan kemiskinan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk menciptakan kemandirian. Sehingga, dengan misi ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung ingin memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berkelanjutan dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

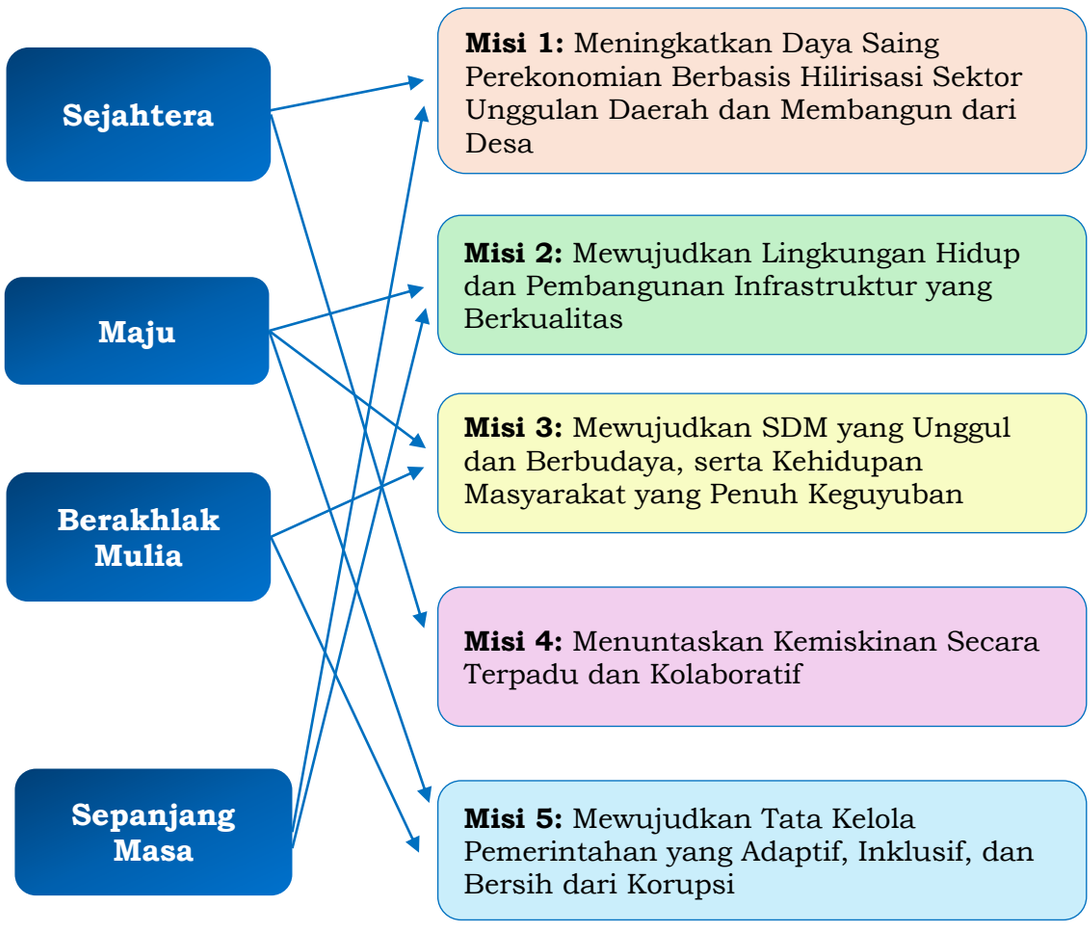
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif, dan Bersih dari Korupsi

Misi ini menekankan pada peningkatan pemerintahan yang responsif terhadap perubahan, mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, serta berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan yang adaptif memiliki kemampuan

untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Digitalisasi layanan publik, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur negara menjadi langkah utama dalam memastikan pemerintahan yang lebih fleksibel dan efisien dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Selain adaptif, tata kelola pemerintahan juga harus inklusif. Seluruh kelompok masyarakat memiliki akses yang sama dalam proses pembangunan dan layanan publik. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memastikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak tertinggal dalam proses pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan mereka secara langsung.

Komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dari KKN menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan sistem anti-korupsi dalam berbagai aspek birokrasi. Dengan menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Lima misi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan kata kunci yang tertuang dalam rumusan visi, sehingga dapat mendukung terwujudnya pencapaian dan target pembangunan pada akhir periode RPJMD. Keterkaitan antara visi dan misi dapat diilustrasikan sebagaimana berikut:



Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa setiap misi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan setiap kata kunci yang terdapat pada Visi RPJMD Kabupaten Tulungagung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya sinergitas antara kondisi yang ingin dicapai dengan cara yang akan dilakukan. Selain itu, visi dan misi RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 juga dirumuskan dengan memerhatikan misi RPJPD Kabupaten Tulungagung 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 6 Keselarasan Misi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD

Misi RPJMD Tulungagung 2025-2029	Misi RPJPD Tulungagung 2025-2045	Misi RPJMD Jawa Timur 2025-2029	Misi RPJMN 2025-2029
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun dari Desa	**Misi 1:** Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif	**Misi 2**: **Jatim Kerja** Memperluas lapangan kerja yang berkualitas	**Asta Cita 5**: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		Misi 4: **Jatim Agro** Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan	**Asta Cita 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada

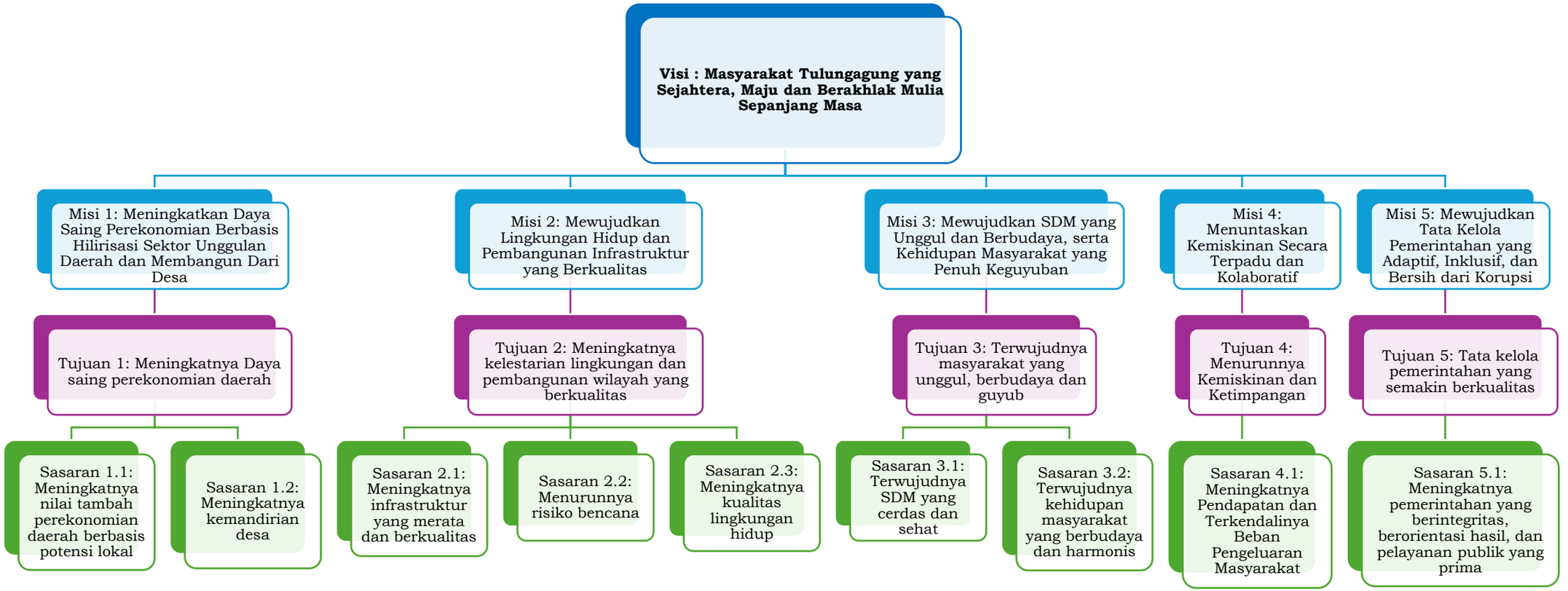
Misi RPJMD Tulungagung 2025-2029	Misi RPJPD Tulungagung 2025-2045	Misi RPJMD Jawa Timur 2025-2029	Misi RPJMN 2025-2029
			pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digial, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Misi 2: Mewujudkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	**Misi 5:** Mewujudkan infrastruktur berkualitas, ketahanan ekologi, dan bencana.	**Misi 3: Jatim Akses** Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu dan berkeadilan	**Asta Cita 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
		Misi 9: Jatim Lestari Menjaga kelestarian lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	
Misi 3: Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban	**Misi 2:** Transformasi sosial untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan	**Misi 5: Jatim Cerdas** Memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan	**Asta Cita 4**: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran serta perempuan, pemuda (generasi milenial, generasi Z) dan penyandang disabilitas
	Misi 4: Stabilitas keamanan serta ketahanan sosial budaya	**Misi 6: Jatim Sehat** Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	**Asta Cita 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, dan Hak Asasi Manusia
		Misi 8: Jatim Harmoni Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif	**Asta Cita 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
Misi 4: Menuntaskan Kemiskinan Secara	**Misi 1:** Mewujudkan transformasi	**Misi 1: Jatim Sejahtera**	**Asta Cita 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk

Misi RPJMD Tulungagung 2025-2029	Misi RPJPD Tulungagung 2025-2045	Misi RPJMD Jawa Timur 2025-2029	Misi RPJMN 2025-2029
Terpadu dan Kolaboratif	ekonomi yang inklusif	Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan	pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif, dan Bersih dari Korupsi	**Misi 3:** Transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi berkualitas	**Misi 7: Jatim Berkah Amanah** Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif	**Asta Cita 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Rumusan misi RPJMD Kabupaten Tulungagung dirumuskan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada dokumen lainnya, baik di level daerah, provinsi, maupun nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pembangunan antara perencanaan pembangunan di level nasional, perencanaan pembangunan di level Provinsi Jawa Timur, dan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tulungagung. Keselarasan tersebut untuk kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan, strategi, dan program prioritas pembangunan yang juga merujuk pada arah kebijakan RPJPD dan mendukung kegiatan prioritas utama RPJMN.

3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan, serta menjawab dari isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran RPJMD merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan Sasaran kemudian dijabarkan lebih detail dalam rumusan outcome. Masing-masing tujuan, sasaran, dan outcome memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur untuk memastikan kondisi yang diinginkan dapat terwujud.



Gambar 3. 2 Cascading Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tulungagung

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung diturunkan dalam rumusan kinerja tujuan dan sasaran. Secara operasional, terdapat 5 (lima) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran. Tujuan pertama yakni meningkatnya daya saing perekonomian daerah, didukung oleh dua sasaran yakni meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal dan meningkatnya kemandirian desa. Tujuan kedua yakni meningkatnya kelestarian lingkungan dan pembangunan wilayah yang berkualitas, didukung oleh tiga sasaran yakni meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas, menurunnya risiko bencana, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Tujuan ketiga yakni terwujudnya masyarakat yang unggul, berbudaya dan guyub, didukung oleh dua sasaran yakni terwujudnya SDM yang cerdas dan sehat, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan harmonis. Tujuan keempat yakni menurunnya kemiskinan dan ketimpangan, didukung satu sasaran yakni meningkatnya pendapatan dan terkendalinya beban pengeluaran masyarakat. Tujuan kelima yakni tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas, didukung satu sasaran yakni meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, berorientasi hasil dan pelayanan publik yang prima. Masing-masing tujuan dan sasaran diukur dengan indikator dan target.

Tabel 3. 7 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun Dari Desa	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,64	3,67	3,70	3,73	3,76	3,79	3,82
		Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,86	4,90	4,94	4,98	5,02	5,06	5,07
			PDRB per Kapita	Juta Rupiah	46,01	49,35	52,39	55,42	58,61	61,64	64,75
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	%	42,41	42,80	43,58	44,75	46,30	47,47	48,60
Misi 2: Mewujudkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya kelestarian lingkungan dan pembangunan wilayah yang berkualitas		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Eq	203.634, 8	207.707, 49	211.861, 64	216.098, 88	220.420, 85	224.829, 27	229.325, 86
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	77,50	78,27	79,05	79,84	80,64	81,45	82,26
		Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	0,681	0,684	0,687	0,690	0,693	0,696	0,699
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,98	144,54	141,10	137,82	134,69	131,69	127,74
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,48	71,90	71,98	72,06	72,14	72,22	72,30
Misi 3: Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban	Terwujudnya masyarakat yang unggul, berbudaya dan guyub		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,13	76,55	76,62	76,89	77,15	77,42	77,79
			Indeks Pembangunan Masyarakat (iPMAS)	Nilai	0,73	0,73	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terwujudnya SDM yang cerdas dan sehat	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	8,68	9,03	9,14	9,26	9,39	9,51	9,63
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,36	13,42	13,48	13,53	13,59	13,65	13,71
			Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,20	75,32	75,58	75,84	76,09	76,35	76,61
		Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	n/a	7,05	7,12	7,19	7,26	7,34	7,48
Misi 4: Menuntaskan Kemiskinan Secara Terpadu dan Kolaboratif	Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan		Tingkat Kemiskinan	%	6,28	5,93	5,74	5,49	5,30	4,98	4,35
			Jumlah Penduduk Miskin	Orang	66,42	66,391	64.575	62.043	60.149	56.740	49.741
			Indeks Gini	Nilai	0,321	0,319	0,317	0,315	0,306	0,298	0,289
		Meningkatnya Pendapatan dan Terkendalinya Beban Pengeluaran Masyarakat	Garis Kemiskinan	Rupiah	447.793	453.202	458.611	464.021	469.430	474.839	480.248
			Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan	Rupiah	11.966.000	12.044.714	12.123.429	12.202.143	12.280.857	12.359.571	12.438.286
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif, dan Bersih dari Korupsi	Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	85,45	87,60	91,15	94,93	97,76	101,42	104,73
		Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, berorientasi hasil, dan pelayanan publik yang prima	Nilai SAKIP	Nilai	77,07	77,65	78,37	79,23	79,88	80,67	81,43
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,29	4,30	4,32	4,33	4,34	4,36	4,37
			SPI KPK	Indeks	n/a	69,38	70,51	71,63	72,75	73,88	75,00

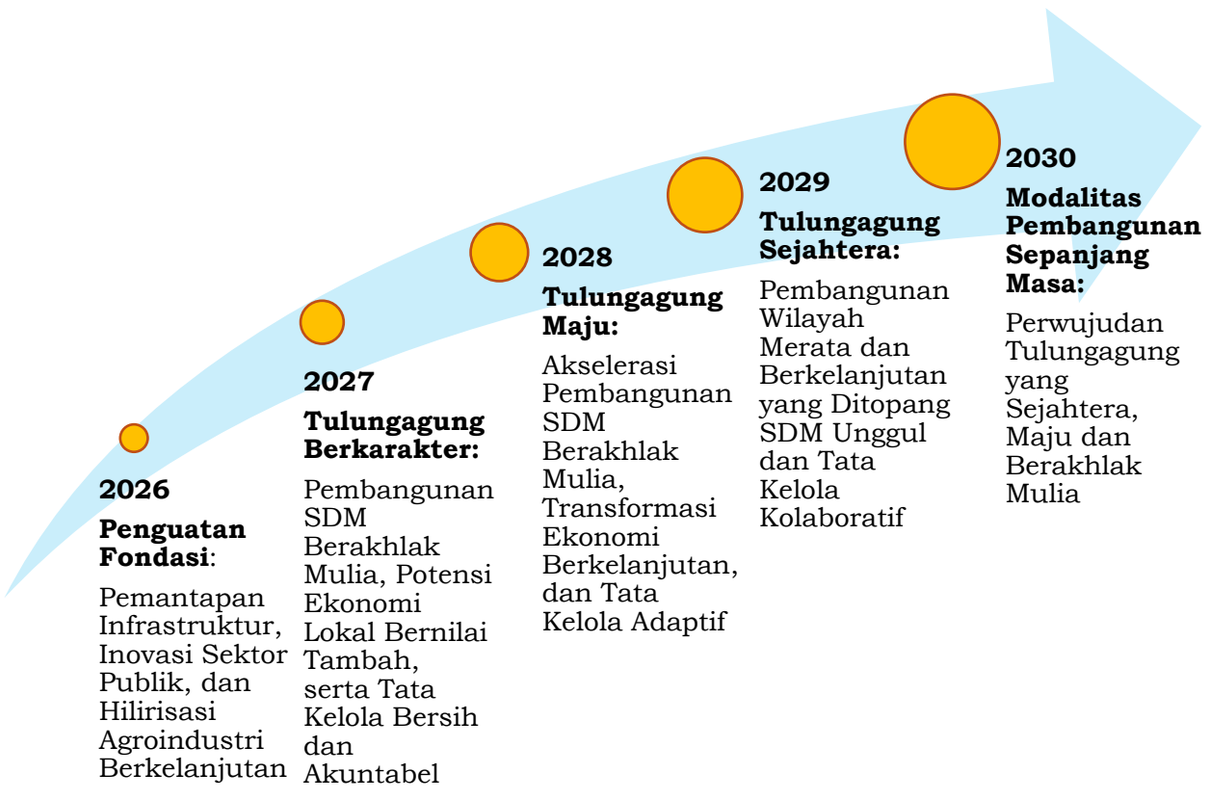
3.5 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rumusan kondisi dalam bentuk visi, tujuan, dan sasaran membutuhkan berbagai agenda pembangunan untuk mencapainya. Agenda pembangunan merupakan rangkaian kerja yang dirumuskan melalui strategi, arah kebijakan, dan program prioritas. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus, dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Sedangkan program prioritas dihasilkan dari *casacading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

3.5.1 Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan merupakan bagian dari strategi yang menggambarkan arah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Berikut tahapan pembangunan dan program prioritas pembangunan setiap tahun RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029.

3.5.1.1 Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030



Gambar 3. 3 Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030

Penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029 terbagi menjadi 5 (lima) tahap pembangunan, yaitu tahap 1 (tahun 2026) sebagai penguatan fondasi: pemantapan infrastruktur, inovasi sektor publik, dan hilirisasi agroindustri berkelanjutan; tahap 2 (tahap 2027) sebagai Tulungagung Berkarakter: pembangunan SDM berakhlak mulia, potensi ekonomi lokal bernilai tambah, serta tata kelola bersih dan akuntabel; tahap 3 (tahun 2028) sebagai Tulungagung Maju: akselerasi pembangunan SDM berakhlak mulia, transformasi ekonomi berkelanjutan, dan tata kelola adaptif; tahap 4 (tahun 2029) sebagai Tulungagung Sejahtera: pembangunan wilayah merata dan berkelanjutan yang ditopang SDM unggul dan tata kelola kolaboratif; dan tahap 5 (tahun 2030) sebagai Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: perwujudan Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia. Secara rinci penahapan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

A. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 1 (Tahun 2026)

Penahapan pembangunan daerah tahap pertama yaitu **penguatan fondasi: pemantapan infrastruktur, inovasi sektor publik, dan hilirisasi agroindustri berkelanjutan.** Pada tahap pertama, pembangunan difokuskan pada pemantapan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan konektivitas antarwilayah, termasuk peningkatan konektivitas di Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Selingkar Wilis. Pemenuhan akses kebutuhan dasar berupa pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi aman, dan rumah layak huni yang terjangkau dan berkelanjutan. Ekosistem inovasi pelayanan publik terus ditingkatkan melalui digitalisasi layanan, reformasi birokrasi,

pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah, serta peningkatan layanan dasar yang berkualitas. Upaya hilirisasi agroindustri juga menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya pengembangan teknologi tepat guna pada sektor agro, peningkatan sarana dan prasarana pertanian/perikanan, peningkatan kapasitas lembaga petani dan nelayan, serta pengembangan daya tarik pariwisata antara lain geopark dan seni budaya.

B. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 2 (Tahun 2027)

Penahapan pembangunan daerah tahap kedua yaitu **Tulungagung Berkarakter: pembangunan SDM berakhlak mulia, potensi ekonomi lokal bernilai tambah, serta tata kelola bersih dan akuntabel.** Pada tahap kedua, pembangunan diarahkan untuk memperkuat daya saing SDM yang berakhlak mulia melalui pendidikan karakter, pembinaan generasi muda dan keluarga berkualitas, serta peningkatan bina mental dan spiritual masyarakat untuk menjaga harmoni sosial. Pendampingan bagi keluarga migran perlu mendapat perhatian, terutama pendampingan pendidikan anak dan pola asuh keluarga pengasuh anak. Dalam hal potensi ekonomi lokal yang bernilai tambah perlu penguatan dalam pengembangan kawasan industri dan sentra UMKM, pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dan terintegrasi, peningkatan daya tarik wisata, serta peningkatan produktivitas BUMD/BUMDes. Dalam hal tata kelola pemerintahan, prinsip bersih dan akuntabel menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 3 (Tahun 2028)

Penahapan pembangunan daerah tahap ketiga yaitu **Tulungagung Maju: akselerasi pembangunan SDM berakhlak mulia, transformasi ekonomi berkelanjutan, dan tata kelola adaptif.** Pada tahap ketiga, pembangunan difokuskan untuk akselerasi pembangunan SDM yang berakhlak mulia. SDM sebagai penggerak pembangunan ditopang melalui penyediaan layanan dasar yang berkualitas, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Transformasi ekonomi diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan serta mendorong daya saing daerah. Tata kelola pemerintahan diperkuat menjadi lebih adaptif terhadap dinamika global dan tantangan lokal.

D. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 4 (Tahun 2029)

Penahapan pembangunan daerah tahap keempat yaitu **Tulungagung Sejahtera: pembangunan wilayah merata dan berkelanjutan yang ditopang SDM unggul dan tata kelola kolaboratif.** Pembangunan pada tahap keempat menekankan pada pemerataan hasil pembangunan ke seluruh wilayah. Masyarakat mendapatkan akses layanan dasar yang merata dan

berkualitas dan ekonomi lokal yang semakin berkembang. Prinsip berkelanjutan menjadi landasan dalam seluruh aspek pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Selain itu, kolaborasi antar *stakeholder* dari pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat menjadi penopang utama menuju kesejahteraan yang inklusif.

E. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 5 (Tahun 2030)

Penahapan pembangunan daerah tahap kelima yaitu **Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: perwujudan Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia.** Pada tahap kelima ini menjadi penanda perwujudan visi besar Kabupaten Tulungagung sebagai daerah yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia. Pembangunan yang telah dilakukan secara konsisten menjadi modal dasar untuk keberlanjutan di masa depan. Transformasi SDM, tata kelola, infrastruktur, dan struktur ekonomi telah menghasilkan daya saing yang kuat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang dinamis.

3.5.1.2 Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030

Tabel 3. 8 Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Tulungagung

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	Tulungagung Maju: Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	Tulungagung Sejahtera: Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Arah Kebijakan Tahunan				
Misi 1 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun Dari Desa	• Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan. • Peningkatan teknologi tepat guna untuk nilai tambah pertanian dan perikanan. • Peningkatan akses jaminan sosial bagi pekerja informal, termasuk petani, nelayan dan pelaku usaha mikro. • Peningkatan dukungan infrastruktur menuju dan di sekitar destinasi/kawasan pariwisata. • Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih. • Peningkatan akses permodalan usaha	• Peningkatan ketercukupan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan. • Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengolahan hasil pertanian dan perikanan. • Dukungan kebijakan untuk membuka investasi agroindustri. • Peningkatan daya tarik pariwisata, terutama geopark dan seni budaya, serta pemberdayaan desa wisata. • Pemberdayaan usaha mikro/IKM/wirausaha muda/ekonomi kreatif melalui peningkatan cakupan akses permodalan, pendampingan	• Peningkatan ketercukupan sarana dan prasarana pertanian. • Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan. • Peningkatan investasi agroindustri dan penguatan iklim investasi. • Peningkatan kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif. • Penguatan MICE dengan optimalisasi ketersediaan akomodasi yang memadai. • Peningkatan pendampingan usaha dan akses pemasaran produk usaha mikro dan IKM. • Peningkatan usaha koperasi. • Pengembangan kawasan pedesaan berbasis potensi tematik	• Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayanan dengan ketercukupan sarana dan prasarana pertanian. • Penguatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan. • Daya tarik investasi semakin merata dan investasi agroindustri semakin berkembang. • Penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. • Peningkatan fasilitasi akses pemasaran dan ekonomi digital produk IKM/usaha mikro/wirausaha/ekonomi kreatif. • Peningkatan diversifikasi usaha koperasi • Kawasan pertumbuhan dan pedesaan berbasis pertanian/agroindustri,	• Penguatan kesejahteraan petani dan nelayan berbasis sumber penghidupan yang berkelanjutan dan bernilai tambah. • Penguatan daya saing pariwisata daerah yang ditopang daya tarik geopark, seni budaya dan MICE. • Penguatan daya tarik investasi. • Ekonomi kerakyatan semakin berdaya melalui daya saing Koperasi, IKM, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif. • Kawasan industri dan kawasan industri kecil menengah yang terintegrasi. • Kawasan pesisir semakin berkembang melalui pemanfaatan konektivitas

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	Tulungagung Maju: Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	Tulungagung Sejahtera: Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Arah Kebijakan Tahunan				
	mikro/IKM/wirausaha muda/ekonomi kreatif. • Pemberdayaan dan revitalisasi BUMDes. • Pemberdayaan kampung migran produktif. • Penetapan kawasan pertumbuhan berbasis pertanian/agroindustri, perdagangan dan pariwisata.	manajemen usaha dan pemasaran. • Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah. • Peningkatan kelembagaan koperasi. • Pemberdayaan kampung migran produktif. • Penguatan lembaga ekonomi desa dan peningkatan kerjasama desa untuk pengelolaan potensi.	pertanian/agroindustri, perdagangan, IKM, pariwisata dan kampung migran produktif. • Pengelolaan kawasan pesisir terpadu.	perdagangan, dan pariwisata yang semakin berkembang. • Perwujudan pusat pertumbuhan baru di kawasan pesisir.	infrastruktur dan optimalisasi potensi ekonomi.
Misi 2 Mewujudkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	• Perlindungan daerah tangkapan air melalui penghijauan lahan berbasis Masyarakat • Penataan tanaman di wilayah tangkapan air berbasis karakteristik landscape wilayah • Peningkatan sinkronisasi kebijakan, rencana dan program terhadap RTRW • Peningkatan penanganan penanggulangan bencana	• Perlindungan daerah tangkapan air melalui penghijauan lahan berbasis Masyarakat • Penataan tanaman di wilayah tangkapan air berbasis karakteristik landscape wilayah • Penguatan sinkronisasi kebijakan, rencana dan program terhadap RTRW	• Perlindungan daerah tangkapan air melalui penghijauan lahan berbasis Masyarakat • Penataan tanaman di wilayah tangkapan air berbasis karakteristik landscape wilayah • Pemantapan inovasi pengelolaan sampah, dan limbah yang berkelanjutan	• Pemantapan pengelolaan lingkungan berbasis Daerah Aliran Sungai • Pemantapan pengelolaan lingkungan yang tanggap perubahan iklim dan Tangguh bencana • Pengelolaan sampah, dan limbah yang terintegratif dan berkelanjutan • Akselerasi peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar	• Kualitas lingkungan hidup yang terjaga • Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi • Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dan merata • Pemenuhan infrastruktur pendukung akselerasi perekonomian

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	Tulungagung Maju: Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	Tulungagung Sejahtera: Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Arah Kebijakan Tahunan				
	• Penguatan kapasistas pengembangan pengelolaan sampah, dan limbah yang berkelanjutan • Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar • Peningkatan akses terhadap jaringan irigasi • Peningkatan akses transportasi publik • Peningkatan konektivitas Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Selingkar Wilis. • Dukungan pembangunan jalan tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kertosono-Kediri-Tulungagung. • Dukungan preservasi jalan ruas Kediri-Tulungagung-Trenggalek dan Kediri-Blitar.	• Penguatan aksi kampung iklim dan desa tangguh bencana • Penguatan inovasi pengelolaan sampah, dan limbah yang berkelanjutan • Peningkatan akses terhadap jaringan irigasi • Penguatan akses transportasi publik • Peningkatan konektivitas Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Selingkar Wilis. • Dukungan pembangunan jalan tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kertosono-Kediri-Tulungagung. • Dukungan preservasi jalan ruas Kediri-Tulungagung-Trenggalek dan Kediri-Blitar. • Dukungan arah kebijakan Provinsi Jawa	• Memantapkan akses dan kualitas pelayanan dasar sebagai pendorong pembangunan ekonomi yang setara dan inklusif • Peningkatan akses terhadap jaringan irigasi • Pemantapan akses transportasi publik • Peningkatan konektivitas Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Selingkar Wilis. • Dukungan pembangunan jalan tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kertosono-Kediri-Tulungagung. • Dukungan preservasi jalan ruas Kediri-Tulungagung-Trenggalek dan Kediri-Blitar. • Dukungan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur untuk pemerataan pembangunan kawasan	yang menopang pembangunan ekonomi daerah • Peningkatan akses terhadap jaringan irigasi • Akselerasi akses transportasi publik • Peningkatan konektivitas Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Selingkar Wilis. • Dukungan pembangunan jalan tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kertosono-Kediri-Tulungagung. • Dukungan preservasi jalan ruas Kediri-Tulungagung-Trenggalek dan Kediri-Blitar. • Dukungan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur untuk pemerataan pembangunan kawasan afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur, terutama melalui percepatan pembangunan jalan lintas selatan dan preservasi jalan lintas selatan Wonogiri-Pacitan-Trenggalek-Tulungagung.	

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	Tulungagung Maju: Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	Tulungagung Sejahtera: Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Arah Kebijakan Tahunan				
	• Dukungan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur untuk pemerataan pembangunan kawasan afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur, terutama melalui percepatan pembangunan jalan lintas selatan dan preservasi jalan lintas selatan Wonogiri-Pacitan-Trenggalek-Tulungagung.	Timur untuk pemerataan pembangunan kawasan afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur, terutama melalui percepatan pembangunan jalan lintas selatan dan preservasi jalan lintas selatan Wonogiri-Pacitan-Trenggalek-Tulungagung.	afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur, terutama melalui percepatan pembangunan jalan lintas selatan dan preservasi jalan lintas selatan Wonogiri-Pacitan-Trenggalek-Tulungagung. • Peningkatan pemanfaatan infrastruktur wilayah sebagai perkembangan pusat - pusat pertumbuhan baru	• Penguatan infrastruktur pendukung Simpul-simpul ekonomi potensial yang berkembang dan terintegrasi	
Misi 3 Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban	• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, termasuk akses infrastruktur digital. • Peningkatan bantunan pendidikan/besiswa bagi siswa dari keluarga miskin. • Pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila, religius dan kearifan lokal.	• Penguatan infrastruktur digital pada satuan pendidikan. • Pengembangan sekolah model transformatif, Sekolah Rakyat dan Unggulan. • Peningkatan bantunan pendidikan/besiswa bagi siswa dari keluarga miskin. • Dukungan sekolah terbuka, pesantren dan berbasis asrama.	• Penguatan infrastruktur digital pada satuan pendidikan. • Pengembangan sekolah model transformatif, Sekolah Rakyat dan Unggulan. • Peningkatan bantunan pendidikan/besiswa bagi siswa dari keluarga miskin. • Dukungan sekolah terbuka, pesantren dan berbasis asrama.	• Pengembangan sekolah model transformatif, Sekolah Rakyat dan Unggulan. • Peningkatan bantunan pendidikan/besiswa bagi siswa dari keluarga miskin. • Dukungan sekolah terbuka, pesantren dan berbasis asrama. • Penguatan SDM berkarakter berbasis nilai Pancasila, religius dan kearifan lokal. • Penguatan literasi masyarakat, termasuk literasi digital.	• Penguatan SDM yang unggul ditopang akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. • Penguatan SDM berakhlak mulia berbasis nilai Pancasila, religius dan kearifan lokal. • Penguatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan inklusi sosial. • Penguatan pemajuan kebudayaan.

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	Tulungagung Maju: Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	Tulungagung Sejahtera: Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Arah Kebijakan Tahunan				
	• Dukungan sekolah terbuka, pesantren dan berbasis asrama. • Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan. • Peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan. • Peningkatan upaya pencegahan stunting. • Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan • Peningkatan akses jaminan kesehatan. • Peningkatan akses layanan perlindungan anak dan perempuan. • Peningkatan perlindungan keluarga pekerja migran. • Pelestarian obyek pemajuan kebudayaan. • Fasilitasi co-working space. • Peningkatan deteksi dini pencegahan konflik.	• Penguatan SDM berkarakter berbasis nilai Pancasila, religius dan kearifan lokal. • Peningkatan tingkat kegemaran membaca melalui perluasan perbaikan perpustakaan. • Peningkatan inovasi layanan kesehatan primer dan rujukan. • Peningkatan upaya pencegahan stunting dan eliminasi penyakit menular dan tropis terabaikan. • Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan • Peningkatan akses jaminan kesehatan. • Peningkatan kualitas layanan perlindungan anak dan perempuan. • Peningkatan inklusi sosial, termasuk	• Penguatan SDM berkarakter berbasis nilai Pancasila, religius dan kearifan lokal. • Peningkatan tingkat kegemaran membaca melalui perluasan perbaikan perpustakaan. • Peningkatan inovasi layanan kesehatan primer dan rujukan. • Peningkatan upaya pencegahan stunting dan eliminasi penyakit menular dan tropis terabaikan. • Peningkatan akses jaminan kesehatan. • Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. • Pemenuhan hak anak. • Peningkatan inklusi sosial, termasuk terhadap penyandang diasbilitas dan masyarakat rentan lainnya.	• Peningkatan inovasi layanan kesehatan primer dan rujukan. • Peningkatan upaya pencegahan stunting dan eliminasi penyakit menular dan tropis terabaikan. • Peningkatan akses jaminan kesehatan. • Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. • Pemenuhan hak anak. • Peningkatan inklusi sosial, termasuk terhadap penyandang diasbilitas dan masyarakat rentan lainnya. • Peningkatan kualitas keluarga pekerja migran, terutama terkait pola asuh dan pendidikan anak. • Peningkatan ruang apresiasi budaya dan pemberdayaan pelaku budaya. • Pelestarian cagar budaya yang berorientasi perlindungan dan mendukung daya tarik pariwisata.	• Penguatan kehidupan sosial yang penuh keguyuban.

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	Tulungagung Maju: Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	Tulungagung Sejahtera: Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Arah Kebijakan Tahunan				
		terhadap penyandang diasbilitas dan masyarakat rentan lainnya. • Peningkatan kualitas keluarga pekerja migran, terutama terkait pola asuh dan pendidikan anak. • Pelestarian budaya takbenda, antara lain kesenian, upacara adat dan sejarah lokal. • Pelestarian cagar budaya. • Fasilitasi co-working space. • Peningkatan deteksi dini pencegahan konflik.	• Peningkatan kualitas keluarga pekerja migran, terutama terkait pola asuh dan pendidikan anak. • Fasilitasi co-working space untuk memperkuat ruang interaksi dan produktif. • Peningkatan ruang apresiasi budaya dan pemberdayaan pelaku budaya. • Pelestarian cagar budaya yang berorientasi perlindungan dan mendukung daya tarik pariwisata. • Peningkatan fasilitasi ruang harmoni dan kontribusi organisasi masyarakat.	• Peningkatan fasilitasi ruang harmoni dan kontribusi organisasi masyarakat.	
Misi 4 Menuntaskan Kemiskinan Secara Terpadu dan Kolaboratif	• Peningkatan kualitas data terpadu kemiskinan. • Identifikasi penyebab kemiskinan dan kerentanan masyarakat.	• Penguatan kualitas data terpadu kemiskinan. • Penguatan kolaborasi lintas sektor	• Penguatan kualitas data terpadu kemiskinan berbasis pemutakhiran yang akuntabel.	• Penguatan kualitas data terpadu kemiskinan berbasis pemantauan kondisi kemiskinan masyarakat dan pemutakhiran yang akuntabel.	• Kemiskinan yang semakin menurun berbasis penanggulangan secara terpadu dan kolaboratif.

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	Tulungagung Maju: Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	Tulungagung Sejahtera: Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Arah Kebijakan Tahunan				
	• Penataan kolaborasi lintas sektor penanggulangan kemiskinan. • Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran. • Peningkatan akses rumah layak huni, bantuan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat miskin. • Peningkatan identifikasi kebutuhan kerja dunia usaha dan dunia industri. • Peningkatan akses pelatihan kerja berbasis kompetensi.	penanggulangan kemiskinan. • Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran. • Peningkatan integrasi antara perlindungan dan pemberdayaan sosial melalui bantuan sarpras produksi bagi masyarakat miskin dan rentan. • Peningkatan akses rumah layak huni, bantuan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat miskin dan rentan. • Peningkatan akses pelatihan kerja berbasis kompetensi. • Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri terkait pelatihan dan pemagangan.	• Penguatan kolaborasi lintas sektor penanggulangan kemiskinan. • Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran berbasis pemantauan kondisi kemiskinan masyarakat. • Peningkatan integrasi antara perlindungan dan pemberdayaan sosial melalui bantuan sarpras produksi bagi masyarakat miskin dan rentan. • Peningkatan akses rumah layak huni, bantuan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat miskin dan rentan. • Peningkatan akses pelatihan kerja berbasis kompetensi. • Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri terkait	• Penguatan kolaborasi lintas sektor penanggulangan kemiskinan. • Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran berbasis pemantauan kondisi kemiskinan masyarakat. • Peningkatan integrasi antara perlindungan dan pemberdayaan sosial melalui bantuan sarpras produksi bagi masyarakat miskin dan rentan. • Peningkatan akses rumah layak huni, bantuan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat miskin dan rentan. • Peningkatan akses pelatihan kerja berbasis kompetensi. • Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri terkait pelatihan dan pemagangan. • Peningkatan akses pelatihan dan fasilitasi pengembangan wirausaha.	• Penguatan ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. • Pengangguran semakin menurun berbasis peningkatan serapan lapangan kerja dan kewirausahaan masyarakat. • Data kemiskinan yang andal dan akuntabel sebagai basis pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	Tulungagung Maju: Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	Tulungagung Sejahtera: Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Arah Kebijakan Tahunan				
		• Peningkatan akses pelatihan kewirausahaan.	pelatihan dan pemagangan. • Peningkatan akses pelatihan dan fasilitasi pengembangan wirausaha.		
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif dan Bersih dari Korupsi	• Peningkatan kualitas perencanaan yang berorientasi kinerja serta pengendalian dan evaluasi. • Peningkatan manajemen kinerja. • Peningkatan kualitas penganggaran dan pelaporan keuangan. • Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah. • Peningkatan inovasi pelayanan publik • Peningkatan sistem pemerintahan digital. • Peningkatan partisipasi dan transparansi publik. • Peningkatan ekosistem riset dan inovasi	• Peningkatan akuntabilitas kineja dan dukungan penganggaran berbasis kinerja. • Peningkatan sumber-sumber PAD. • Peningkatan quality assurance kebijakan pembangunan daerah. • Peningkatan zona integritas. • Peningkatan inovasi pelayanan publik. • Digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi dan menguatkan tranparansi publik. • Peningkatan ruang partisipasi masyarakat bermakna.	• Integrasi akuntabilitas kinerja dan keuangan. • Optimalisasi PAD. • Penguatan kolaborasi antar OPD, dan antar stakeholder pembangunan. • Peningkatan quality assurance kebijakan pembangunan daerah. • Peningkatan zona integritas. • Penguatan inovasi pelayanan publik. • Digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi, inklusif dan tranparan. • Peningkatan kebijakan berbasis riset dan partisipatif.	• Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis cross-cutting kinerja dan penganggaran berbasis kinerja. • Penguatan kapasitas fiskal daerah. • Penguatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan, termasuk dalam perluasan sumber penganggaran non-APBD. • Penguatan sistem pencegahan korupsi dan pengawasan kinerja pembangunan. • Penguatan inovasi pelayanan publik. • Digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi, inklusif dan transparan.	• Reformasi birokrasi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. • Stabilitas fiskal daerah. • Penguatan sistem pencegahan korupsi dan pengawasan kinerja pembangunan. • Penguatan pelayanan publik yang inovatif. • Penguatan kebijakan publik berbasis riset, partisipatif dan adaptif. • Penguatan kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan. • Kesinambungan pembangunan menuju periode pembangunan

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	Tulungagung Maju: Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	Tulungagung Sejahtera: Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa: Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Arah Kebijakan Tahunan				
	• Peningkatan kompetensi aparatur. • Peningkatan kapasitas kecamatan. • Peningkatan kapasitas aparatur desa.	• Peningkatan tindak lanjut riset. • Penguatan kompetensi dan kinerja aparatur. • Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan. • Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran desa.	• Kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang semakin adaptif terhadap tuntutan aktual dan kerentanan. • Penguatan sistem merit. • Peningkatan inovasi pelayanan kecamatan. • Peningkatan kinerja dan integritas desa.	• Penguatan kebijakan berbasis riset dan partisipatif. • Kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang semakin adaptif terhadap tuntutan aktual dan kerentanan. • Manajemen ASN berbasis sistem merit. • Penguatan kapasitas kecamatan dalam pelayanan, pemerdayaan dan koordinasi kewilayahan. • Peningkatan inovasi tata kelola desa.	jangka menengah berikutnya. • Penguatan inovasi tata kelola desa.

3.5.1.3 Penahapan Program Prioritas Pembangunan Setiap Tahun RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2026-2030

Tabel 3. 9 Penahapan Program Prioritas Pembangunan Setiap Tahun RPJMD Kabupaten Tulungagung

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	**Tulungagung Berkarakter:** Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	**Tulungagung Maju:** Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	**Tulungagung Sejahtera:** Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	**Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa:** Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Program Prioritas Tahunan				
Misi 1 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun Dari Desa	**Pembangunan agro terintegrasi:** • Menjamin ketersediaan pupuk dan bibit. • Pembangunan sumur pertanian. • Pengembangan teknologi tepat guna pertanian, perikanan, peternakan dan Kesehatan hewan. • Mekanisasi pertanian • Pengembangan agroindustry • Penyusunan FS pembangunan pasar ikan.	**Pembangunan agro terintegrasi:** • Menjamin ketersediaan pupuk dan bibit • Pembangunan sumur pertanian • Pengembangan teknologi tepat guna pertanian, perikanan peternakan dan kesehatan hewan. • Mekanisasi pertanina • Pengembangan agroindustri • Peningkatan investasi agroindustri • Penyusunan DED dan pengadaan lahan untuk pasar ikan.	**Pembangunan agro terintegrasi:** • Menjamin ketersediaan pupuk dan bibit • Pembangunan sumur pertanian. • Pengembangan teknologi tepat guna pertanian, perikanan peternakan dan kesehatan hewan. • Mekanisasi pertanian • Pengembangan agroindustri. • Peningkatan investasi agroindustri • Pembangunan pasar ikan, penyusunan DED revitalisasi pasar Bandung dan sekaligus pelaksanaan revitatalisasi pasar Bandung.	**Pembangunan agro terintegrasi:** • Menjamin ketersediaan pupuk dan bibit • Pembangunan sumur pertanian. • Pengembangan teknologi tepat guna pertanian, perikanan peternakan dan kesehatan hewan. • Mekanisasi pertanian • Pengembangan agroindustri. • Peningkatan investasi agroindustri.	**Pembangunan agro terintegrasi:** • Menjamin ketersediaan pupuk dan bibit • Pembangunan sumur pertanian. • Pengembangan teknologi tepat guna pertanian, perikanan peternakan dan kesehatan hewan. • Mekanisasi pertanian • Pengembangan agroindustri. • Peningkatan investasi agroindustri.

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	**Tulungagung Berkarakter:** Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	**Tulungagung Maju:** Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	**Tulungagung Sejahtera:** Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	**Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa:** Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Program Prioritas Tahunan				
	Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan taman bumi (*geopark*): • Peningkatan sarana dan prasarana di pusat pariwisata. • Pengembangan pariwisata berbasis taman bumi (*geopark*). • Promosi pariwisata dan kebudayaan hingga level global.	**Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan taman bumi (*geopark*)**: • Peningkatan sarana dan prasarana di pusat pariwisata. • Pengembangan pariwisata berbasis taman bumi (*geopark*). • Promosi pariwisata dan kebudayaan hingga level global.	**Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan taman bumi (*geopark*)**: • Peningkatan sarana dan prasarana di pusat pariwisata. • Pengembangan pariwisata berbasis taman bumi (*geopark*). • Promosi pariwisata dan kebudayaan hingga level global.	**Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan taman bumi (*geopark*)**: • Peningkatan sarana dan prasarana di pusat pariwisata. • Pengembangan pariwisata berbasis taman bumi (*geopark*). • Promosi pariwisata dan kebudayaan hingga level global.	**Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan taman bumi (*geopark*)**: • Peningkatan sarana dan prasarana di pusat pariwisata. • Pengembangan pariwisata berbasis taman bumi (*geopark*). • Promosi pariwisata dan kebudayaan hingga level global.
	Peningkatan efisiensi investasi: • Kemudahan perizinan investasi. • Penetapan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, agroindustri, perdagangan dan pariwisata.	**Peningkatan efisiensi investasi:** • Kemudahan perizinan investasi. • Perencanaan detail pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, agroindustri, perdagangan dan pariwisata.	**Peningkatan efisiensi investasi:** • Kemudahan perizinan investasi. • Peningkatan investasi di pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, agroindustri, perdagangan dan pariwisata.	**Peningkatan efisiensi investasi:** • Kemudahan perizinan investasi. • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, agroindustri, perdagangan dan pariwisata.	**Peningkatan efisiensi investasi:** • Kemudahan perizinan investasi. • Pengembangan dan kesinambungan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, agroindustri, perdagangan dan pariwisata.
	Pemberdayaan desa: • Insiasi dan fondasi model pembangunan	**Pemberdayaan desa:** • Pengembangan model pembangunan	**Pemberdayaan desa:** • Akselerasi model pembangunan	**Pemberdayaan desa:** • Penguatan dampak model pembangunan kolaboratif desa-kabupaten.	**Pemberdayaan desa:** • Kesinambungan model pembangunan kolaboratif desa-kabupaten.

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	**Tulungagung Berkarakter:** Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	**Tulungagung Maju:** Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	**Tulungagung Sejahtera:** Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	**Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa:** Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Program Prioritas Tahunan				
	kolaboratif desa-kabupaten. • Peningkatan honor/insentif RT/RW. • Tali asih purna Kepala Desa.	kolaboratif desa-kabupaten. • Peningkatan honor/insentif RT/RW. • Tali asih purna Kepala Desa.	kolaboratif desa-kabupaten. • Peningkatan honor/insentif RT/RW. • Tali asih purna Kepala Desa	• Peningkatan honor/insentif RT/RW. • Tali asih purna Kepala Desa.	• Peningkatan honor/insentif RT/RW. • Tali asih purna Kepala Desa.
Misi 2 Mewujudkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	**Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur perekonomian** Pembangunan irigasi, Pembangunan infrastruktur air bersih untuk semua Masyarakat. Pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah rawan kekeringan. Infrastruktur perumahan dan permukiman di pusat pertumbuhan ekonomi, Pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin, Infrastruktur jalan ke pusat pertumbuhan ekonomi,	**Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur perekonomian dengan prioritas:** Pembangunan irigasi, Pembangunan infrastruktur air bersih untuk semua Masyarakat. Pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah rawan kekeringan. Infrastruktur perumahan dan permukiman di pusat pertumbuhan ekonomi, Pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin,	**Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur perekonomian** Pembangunan irigasi, Pembangunan infrastruktur air bersih untuk semua Masyarakat. Pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah rawan kekeringan. Infrastruktur perumahan dan permukiman di pusat pertumbuhan ekonomi, Pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin, Infrastruktur jalan ke pusat pertumbuhan ekonomi,	**Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur perekonomian** Pembangunan irigasi, Pembangunan infrastruktur air bersih untuk semua Masyarakat. Pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah rawan kekeringan. Infrastruktur perumahan dan permukiman di pusat pertumbuhan ekonomi, Pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin, Infrastruktur jalan ke pusat pertumbuhan ekonomi, Peningkatan konektivitas ke JLS dan Selingkar Wilis.	**Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur perekonomian** Pembangunan irigasi, Pembangunan infrastruktur air bersih untuk semua Masyarakat. Pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah rawan kekeringan. Infrastruktur perumahan dan permukiman di pusat pertumbuhan ekonomi, Pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin, Infrastruktur jalan ke pusat pertumbuhan ekonomi, Peningkatan konektivitas ke JLS dan Selingkar Wilis.

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	**Tulungagung Berkarakter:** Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	**Tulungagung Maju:** Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	**Tulungagung Sejahtera:** Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	**Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa:** Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Program Prioritas Tahunan				
	Peningkatan konektivitas ke JLS dan Selingkar Wilis, Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah	Infrastruktur jalan ke pusat pertumbuhan ekonomi, Peningkatan konektivitas ke JLS dan Selingkar Wilis, • Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah	Peningkatan konektivitas ke JLS dan Selingkar Wilis, Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah.	Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah.	Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah.
	Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana: • Kebijakan pengurangan risiko dan dampak bencana. • Konservasi mata air berbasis pemberdayaan Masyarakat. • Penghijauan berbasis komunitas. • Penanganan sampah kolaboratif desa-kabupaten. • Penambahan armada pengangkut sampah.	**Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana:** • Kebijakan pengurangan risiko dan dampak bencana. • Konservasi mata air berbasis pemberdayaan Masyarakat. • Penghijauan berbasis komunitas. • Penanganan sampah kolaboratif desa-kabupaten. Penambahan armada pengangkut sampah.	**Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana:** • Kebijakan pengurangan risiko dan dampak bencana. • Konservasi mata air berbasis pemberdayaan Masyarakat. • Penghijauan berbasis komunitas. • Penanganan sampah kolaboratif desa-kabupaten. • Penambahan armada pengangkut sampah.	**Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana:** • Kebijakan pengurangan risiko dan dampak bencana. • Konservasi mata air berbasis pemberdayaan Masyarakat. • Penghijauan berbasis komunitas. • Penanganan sampah kolaboratif desa-kabupaten. • Penambahan armada pengangkut sampah.	**Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana:** • Kebijakan pengurangan risiko dan dampak bencana. • Konservasi mata air berbasis pemberdayaan Masyarakat. • Penghijauan berbasis komunitas. • Penanganan sampah kolaboratif desa-kabupaten. • Penambahan armada pengangkut sampah.
Misi 3 Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta	**Pendidikan merata, berkualitas dan berkarakter dengan prioritas:**	**Pendidikan merata, berkualitas dan berkarakter dengan prioritas:**	**Pendidikan merata, berkualitas dan berkarakter dengan prioritas:**	**Pendidikan merata, berkualitas dan berkarakter dengan prioritas:**	**Pendidikan merata, berkualitas dan berkarakter dengan prioritas:**

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	**Tulungagung Berkarakter:** Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	**Tulungagung Maju:** Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	**Tulungagung Sejahtera:** Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	**Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa:** Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Program Prioritas Tahunan				
Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban	• Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 1 dan 7. • Tidak ada pungutan sekolah di SD dan SMP, • Layanan inteernet wifi di seluruh SD dan SMP. • Peningkatan sarpras semua sekolah. • Mendukung makan bergizi gratis di sekolah. • Peningkatan cakupan layanan bus sekolah gratis (31 bus). • Peningkatan kerjasama MPU sekolah gratis. • Meningkatkan tunjangan guru honorer. • Pelatihan guru. • Pendidikan karakter, • Honorarium guru TPQ/Madin. • Hibah kelompok keagamaan. • Peningkatan pembinaan mental dan spiritual di Masyarakat.	• Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 1 dan 7. • Tidak ada pungutan sekolah di SD dan SMP, • Layanan inteernet wifi di seluruh SD dan SMP. • Peningkatan sarpras semua sekolah. • Mendukung makan bergizi gratis di sekolah. • Peningkatan cakupan layanan bus sekolah gratis (31 bus). • Peningkatan kerjasama MPU sekolah gratis. • Meningkatkan tunjangan guru honorer. • Pelatihan guru. • Pendidikan karakter, • Honorarium guru TPQ/Madin. • Hibah kelompok keagamaan. • Peningkatan pembinaan mental dan spiritual di Masyarakat.	• Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 1 dan 7. • Tidak ada pungutan sekolah di SD dan SMP, • Layanan inteernet wifi di seluruh SD dan SMP. • Peningkatan sarpras semua sekolah. • Mendukung makan bergizi gratis di sekolah. • Peningkatan cakupan layanan bus sekolah gratis (31 bus). • Peningkatan kerjasama MPU sekolah gratis. • Meningkatkan tunjangan guru honorer. • Pelatihan guru. • Pendidikan karakter, • Honorarium guru TPQ/Madin. • Hibah kelompok keagamaan. • Peningkatan pembinaan mental dan spiritual di Masyarakat.	• Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 1 dan 7. • Tidak ada pungutan sekolah di SD dan SMP, • Layanan inteernet wifi di seluruh SD dan SMP. • Peningkatan sarpras semua sekolah. • Mendukung makan bergizi gratis di sekolah. • Peningkatan cakupan layanan bus sekolah gratis (31 bus). • Peningkatan kerjasama MPU sekolah gratis. • Meningkatkan tunjangan guru honorer. • Pelatihan guru. • Pendidikan karakter, • Honorarium guru TPQ/Madin. • Hibah kelompok keagamaan. • Peningkatan pembinaan mental dan spiritual di Masyarakat	• Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 1 dan 7. • Tidak ada pungutan sekolah di SD dan SMP, • Layanan inteernet wifi di seluruh SD dan SMP. • Peningkatan sarpras semua sekolah. • Mendukung makan bergizi gratis di sekolah. • Peningkatan cakupan layanan bus sekolah gratis (31 bus). • Peningkatan kerjasama MPU sekolah gratis. • Meningkatkan tunjangan guru honorer. • Pelatihan guru. • Pendidikan karakter, • Honorarium guru TPQ/Madin. • Hibah kelompok keagamaan. • Peningkatan pembinaan mental dan spiritual di Masyarakat.

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	**Tulungagung Berkarakter:** Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	**Tulungagung Maju:** Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	**Tulungagung Sejahtera:** Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	**Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa:** Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Program Prioritas Tahunan				
	Kesehatan untuk semua masyarakat: • *Universal health coverage* (UHC). • Memberikan makan bergizi ke ibu hamil. • Pelayanan kelas 3 gratis berkualitas. • Pencegahan dan penurunan prevelensi stunting.	**Kesehatan untuk semua masyarakat:** • *Universal health coverage* (UHC). • Memberikan makan bergizi ke ibu hamil. • Pelayanan kelas 3 gratis berkualitas. • Pencegahan dan penurunan prevelensi stunting.	**Kesehatan untuk semua masyarakat:** • *Universal health coverage* (UHC). • Memberikan makan bergizi ke ibu hamil. • Pelayanan kelas 3 gratis berkualitas. • Pencegahan dan penurunan prevelensi stunting.	**Kesehatan untuk semua masyarakat:** • *Universal health coverage* (UHC). • Memberikan makan bergizi ke ibu hamil. • Pelayanan kelas 3 gratis berkualitas. • Pencegahan dan penurunan prevelensi stunting.	**Kesehatan untuk semua masyarakat:** • *Universal health coverage* (UHC). • Memberikan makan bergizi ke ibu hamil. • Pelayanan kelas 3 gratis berkualitas. • Pencegahan dan penurunan prevelensi stunting.
	Pelestarian kebudayaan: • Penampilan kesenian lokal di ruang publik dan tempat wisata.	**Pelestarian kebudayaan:** • Penampilan kesenian lokal di ruang publik dan tempat wisata.	**Pelestarian kebudayaan:** • Penampilan kesenian lokal di ruang publik dan tempat wisata.	**Pelestarian kebudayaan:** • Penampilan kesenian lokal di ruang publik dan tempat wisata.	**Pelestarian kebudayaan:** • Penampilan kesenian lokal di ruang publik dan tempat wisata.
	Penguatan harmoni sosial: • Kader siaga keamanan dan ketertiban.	**Penguatan harmoni sosial:** • Kader siaga keamanan dan ketertiban.	**Penguatan harmoni sosial:** • Kader siaga keamanan dan ketertiban.	**Penguatan harmoni sosial:** • Kader siaga keamanan dan ketertiban.	**Penguatan harmoni sosial:** • Kader siaga keamanan dan ketertiban.
Misi 4 Menuntaskan Kemiskinan Secara Terpadu dan Kolaboratif	**Perlindungan dan jaminan sosial:** • Satu data kemiskinan. • Bantuan biaya pendidikan SD dan SMP untuk siswa miskin. • Beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi.	**Perlindungan dan jaminan sosial:** • Satu data kemiskinan. • Bantuan biaya pendidikan SD dan SMP untuk siswa miskin. • Bantuan biaya pendidikan SMA untuk siswa miskin.	**Perlindungan dan jaminan sosial:** • Satu data kemiskinan. • Bantuan biaya pendidikan SD dan SMP untuk siswa miskin. • Bantuan biaya pendidikan SMA untuk siswa miskin.	**Perlindungan dan jaminan sosial:** • Satu data kemiskinan. • Bantuan biaya pendidikan SD dan SMP untuk siswa miskin. • Bantuan biaya pendidikan SMA untuk siswa miskin.	**Perlindungan dan jaminan sosial:** • Satu data kemiskinan. • Bantuan biaya pendidikan SD dan SMP untuk siswa miskin. • Bantuan biaya pendidikan SMA untuk siswa miskin.

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	**Tulungagung Berkarakter:** Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	**Tulungagung Maju:** Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	**Tulungagung Sejahtera:** Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	**Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa:** Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Program Prioritas Tahunan				
	• Pelayanan kesehatan masyarakat miskin. • Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dengan prioritas lansia dan disabilitas.	• Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 10. • Beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi. • Pelayanan kesehatan masyarakat miskin. • Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dengan prioritas lansia dan disabilitas.	• Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 10. • Beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi. • Pelayanan kesehatan masyarakat miskin. • Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dengan prioritas lansia dan disabilitas.	• Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 10. • Beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi. • Pelayanan kesehatan masyarakat miskin. • Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dengan prioritas lansia dan disabilitas	• Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 10. • Beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi. • Pelayanan kesehatan masyarakat miskin. • Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dengan prioritas lansia dan disabilitas
	Peningkatan serapan kerja: • Peningkatan penyerapan tenaga kerja.	**Peningkatan serapan kerja:** • Peningkatan penyerapan tenaga kerja.	**Peningkatan serapan kerja:** • Peningkatan penyerapan tenaga kerja.	**Peningkatan serapan kerja:** • Peningkatan penyerapan tenaga kerja.	**Peningkatan serapan kerja:** • Peningkatan penyerapan tenaga kerja.
	Pemberdayaan wirausaha dan UMKM: • Sekolah wirausaha tangguh. • Subsidi bunga usaha mikro.	**Pemberdayaan wirausaha dan UMKM:** • Sekolah wirausaha tangguh. • Subsidi bunga usaha mikro.	**Pemberdayaan wirausaha dan UMKM:** • Sekolah wirausaha tangguh. • Subsidi bunga usaha mikro.	**Pemberdayaan wirausaha dan UMKM:** • Sekolah wirausaha tangguh. • Subsidi bunga usaha mikro.	**Pemberdayaan wirausaha dan UMKM:** • Sekolah wirausaha tangguh. • Subsidi bunga usaha mikro.
	Penguatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan berkelanjutan:	**Penguatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan berkelanjutan:**	**Penguatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan berkelanjutan:**	**Penguatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan berkelanjutan:**	**Penguatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan berkelanjutan:**

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	**Tulungagung Berkarakter:** Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	**Tulungagung Maju:** Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	**Tulungagung Sejahtera:** Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	**Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa:** Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Program Prioritas Tahunan				
	• Peningkaatan akses program ketahanan dan kemandirian pangan serta berorientasi pada keandalan terhadap perubahan iklim.	• Peningkaatan akses program ketahanan dan kemandirian pangan serta berorientasi pada keandalan terhadap perubahan iklim.	• Peningkaatan akses program ketahanan dan kemandirian pangan serta berorientasi pada keandalan terhadap perubahan iklim.	• Peningkaatan akses program ketahanan dan kemandirian pangan serta berorientasi pada keandalan terhadap perubahan iklim.	• Peningkaatan akses program ketahanan dan kemandirian pangan serta berorientasi pada keandalan terhadap perubahan iklim.
	Meningkatnya stabilisasi pasokan dan harga barang: • Pengembangan pasar di pusat pertumbuhan ekonomi.	**Meningkatnya stabilisasi pasokan dan harga barang:** • Pengembangan pasar di pusat pertumbuhan ekonomi.	**Meningkatnya stabilisasi pasokan dan harga barang:** • Pengembangan pasar di pusat pertumbuhan ekonomi.	**Meningkatnya stabilisasi pasokan dan harga barang:** • Pengembangan pasar di pusat pertumbuhan ekonomi.	**Meningkatnya stabilisasi pasokan dan harga barang:** • Pengembangan pasar di pusat pertumbuhan ekonomi.
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif dan Bersih dari Korupsi	**Peningkatan kualitas reformasi birokrasi:** • Perbaikan tata kelola kebijakan dan manajemen ASN berbasis sistem merit. • TPP berdasar capaian kinerja organisasi. • TPP P3K. • Pencegahan korupsi di semua lini. • Optimalisasi PAD. • Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah.	**Peningkatan kualitas reformasi birokrasi:** • Perbaikan tata kelola kebijakan dan manajemen ASN berbasis sistem merit. • TPP berdasar capaian kinerja organisasi. • TPP P3K. • Pencegahan korupsi di semua lini. • Optimalisasi PAD • Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah.	**Peningkatan kualitas reformasi birokrasi:** • Perbaikan tata kelola kebijakan dan manajemen ASN berbasis sistem merit. • TPP berdasar capaian kinerja organisasi. • TPP P3K. • Pencegahan korupsi di semua lini. • Optimalisasi PAD. • Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah.	**Peningkatan kualitas reformasi birokrasi:** • Perbaikan tata kelola kebijakan dan manajemen ASN berbasis sistem merit. • TPP berdasar capaian kinerja organisasi. • TPP P3K. • Pencegahan korupsi di semua lini. • Optimalisasi PAD. • Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah.	**Peningkatan kualitas reformasi birokrasi:** • Perbaikan tata kelola kebijakan dan manajemen ASN berbasis sistem merit. • TPP berdasar capaian kinerja organisasi. • TPP P3K. • Pencegahan korupsi di semua lini. • Optimalisasi PAD. • Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah.

Misi	Tema Pembangunan Tahunan				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Penguatan Fondasi: Pemantapan Infrastruktur, Inovasi Sektor Publik dan Hilirisasi Agroindustri Berkelanjutan	**Tulungagung Berkarakter:** Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel	**Tulungagung Maju:** Akselerasi Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan dan Tata Kelola Adaptif	**Tulungagung Sejahtera:** Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Kolaboratif	**Modalitas Pembangunan Sepanjang Masa:** Perwujudan Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia
	Program Prioritas Tahunan				
	Pengembangan *smart city* dan inovasi daerah: • Pelayanan publik prima. • Inisiasi pengembangan aplikasi Tulungagung *Smart City (Geo Smart)* • Satu Perangkat Daerah satu inovasi (1 PD 1 Inovasi) setiap tahun, • Inisiasi pengembangan *co-working space.*	**Pengembangan *smart city* dan inovasi daerah:** • Pelayanan publik prima. • Pengembangan aplikasi Tulungagung Smart City (Geo Smart). • Satu Perangkat Daerah satu inovasi (1 PD 1 Inovasi) setiap tahun. • Pengembangan *co-working space.*	**Pengembangan *smart city* dan inovasi daerah:** • Pelayanan publik prima. • Pengembangan aplikasi Tulungagung Smart City (Geo Smart). • Satu Perangkat Daerah satu inovasi (1 PD 1 Inovasi) setiap tahun. • Pengembangan *co-working space.*	**Pengembangan *smart city* dan inovasi daerah:** • Pelayanan publik prima. • Pengembangan aplikasi Tulungagung Smart City (Geo Smart). • Satu Perangkat Daerah satu inovasi (1 PD 1 Inovasi) setiap tahun. • Pengembangan *co-working space.*	**Pengembangan *smart city* dan inovasi daerah:** • Pelayanan publik prima. • Pengembangan aplikasi Tulungagung Smart City (Geo Smart). • Satu Perangkat Daerah satu inovasi (1 PD 1 Inovasi) setiap tahun. • Pengembangan *co-working space.*

3.5.2 Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan dalam PRJMD memiliki peran penting dalam perencanaan berbasis spasial. Pembangunan kewilayahan dapat merujuk pada pembangunan kewilayahan yang ada pada dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi, maupun dokumen sektoral lainnya. Berikut beberapa pembangunan kewilayahan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Tulungagung.

3.5.2.1 Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMN

Pembangunan kewilayahan dalam RPJMN tertuang dalam arah kebijakan kewilayahan yang ada pada lampiran IV RPJMN. Pada lampiran tersebut disajikan *highlight* indikasi intervensi pada masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kabupaten Tulungagung masuk sebagai lokasi prioritas untuk Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas dan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pacitan-Trenggalek-Tulungagung. Secara lebih rinci, berikut arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung dalam dokumen RPJMN.

Tabel 3. 10 Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas • Kab. Malang • Kab. Blitar • Kab. Kediri • Kab. Nganjuk • Kab. Jombang • Kab. Mojokerto • Kab. Sidoarjo • **Kab. Tulungagung** • Kab. Trenggalek	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Delta Brantas, D.I. Is Kedung Kandang, D.O. Menturus, D.I. Mrican, D.I. Padi Pomahan, D.I. Is Molek, dan D.I Waduk Bening • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area,* terutama pada Sub-DAS Brantas Hulu, Sub-DAS Lekso, Sub-DAS Konto, Sub-DAS Brangkal • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Brantas Hulu, Sub-DAS Lekso, Sub-DAS Konto, Sub-DAS Brangkal, Waduk Karangkates, Waduk Widas, Waduk Selorejo • Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS Brantas • Pembangunan infrastruktur PLTP Arjuno Welirang • Pembangunan Bendungan Bagong • Pengembangan kawasan perdesaan argowidata pertanian terpadu Kecamatan Gondang (Kab. Mojokerto)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengelolaan dan pengembangan lahan pertaian berkelanjutan antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian, reforma agrarian, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitaslisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organic • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi antara lain melalui penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas, mitigasi OPT dan kesehatan hewan, peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani, peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan krenik lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani, peningkatan infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan sistem resi Gudang, pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pembangunan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur
2	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pacitan-Trenggalek-Tulungagung • Kab. Pacitan • Kab. Trenggalek • **Kab. Tulungagung**	• Pengembangan Pelabuhan perikanan PPP Tamperan dan PPN Prigi • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kwasan pesisir di Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Penguatan jalan daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi bitu yang berkelanjutan • Peningkatan infrastruktur kepelabuhanan untuk mendukung penguatan industri transportasi dan logistic maritim

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari jalan tol, kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif (kawasan geopark) • Perencanaan dan penyiapan simpul dan layanan transportasi publik di internal kawasa perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas ke simpul transportasi lainnya (stasiun kereta api, pelabuhan, bandara), didukung dengan kajian mobilitas yang menganalisis pola perjalanan di kawasan perkotaan ke simpul transportasi terdekat seperti terminal, stasiun, bandara yang terdapat di pusat kegiatan yang lebih besar seperti perkotaan Kediri
3	Provinsi Jawa Timur	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan wajiba belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: 1. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini 2. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas 3. Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran 4. Pencegahan dan penangaan anak tidak sekolah 5. Revitalisasi pendidikan non formal 6. Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: 1. Penurunan kematian ibu dan anak 2. Pencegahan dan penurunan stunting 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan Kespro 4. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat antara lain melalui: 1. Penuntasan TBC 2. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa 3. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: 1. Penguatan kapasotas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan 2. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: 1. Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		2. Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: 1. Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan 2. Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi 3. Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik 4. Penerapan *internet of things (loT)* di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* 5. Perluasan penggunaan kendaran listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: 1. Perluasan infrastruktur digital 2. Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital 3. Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: 1. Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital 2. Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN 3. Digitalisasi layanan publik prioritas 4. Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jawa Timur, antara lain melalui: 1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) 2. Penanggulangan judi dan penyelundupan 3. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Timur, antara lain melalui: 1. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya 2. Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan 3. Jaminan hak kebudayaan , ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2025-2029

3.5.2.2 Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur

Dalam pembangunan kewilayahan RPJMD Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung masuk dalam Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan merupakan kawasan strategis yang menghubungkan wilayah selatan Jawa Timur dengan akses Jalan Nasional Lintas Selatan. Dikelilingi oleh pegunungan dan potensi alam yang belum banyak tereksplorasi, kawasan ini memiliki kekuatan dalam pengembangan pertanian, energi terbarukan, serta

pariwisata berbasis alam dan petualangan. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan ini membuka peluang besar bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kawasan agropolitan, minapolitan, dan agroindustri dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga memiliki keunggulan dalam pariwisata alam. Secara lebih rinci, berikut penekanan indikasi intervensi untuk Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Tabel 3. 11 Penekanan Indikasi Intervensi di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur

Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	Penekanan Indikasi Intervensi
• Kota Kediri (PKW) • Kabupaten Kediri (PKL) • Kota Madiun (PKW) • Kabupaten Madiun (PKL) • Kabupaten Nganjuk (PKL) • Kota Blitar (PKW) • Kabupaten Blitar (PKL) • **Kabupaten Tulungagung (PKW)** • Kabupaten Ngawi (PKL) • Kabupaten Trenggalek (PKW) • Kabupaten Pacitan (PKW) • Kabupaten Magetan (PKL) • Kabupaten Ponorogo (PKL)	• **Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi di Kawasan Karst Pacitan-Lawu-Kelud-Wilis dan Sekitarnya** 1. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan 2. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata 3. Perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan 4. Perkuatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif 5. Perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata 6. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata 7. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam perwujudan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat 8. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara 9. Peningkatan pemberian insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata 11. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata 12. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata provinsi dan dinamika pasar nasional dan global 13. Peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Jawa Timur

Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	Penekanan Indikasi Intervensi
	14. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan 15. Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Timur di dalam dan luar negeri 16. Penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata 17. Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata 18. Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata 19. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektvitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif 20. Pengembangan kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal 21. Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau 22. Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan 23. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia bidang pariwisata 24. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata
	• **Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Brantas (Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek)** 1. M Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah Pusat, antara lain pada D.I. Delta Brantas, D.I. Is Kedung Kandang, D I. Menturus, D.I. Mrican, D.I. Padi Pomahan, D.I. Is Molek, dan D.I. Waduk Bening 2. Pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah 3. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah 4. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) 5. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) 6. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura 7. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 8. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Brantas Hulu, Sub-DAS Lekso, Sub-DAS Konto, Sub-DAS Brangkal 9. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Brantas Hulu, Sub-DAS Lekso, Sub-DAS Konto,

Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	Penekanan Indikasi Intervensi
	Sub-DAS Brangkal, Waduk Karangkates, Waduk Widas, Waduk Selorejo 10. Pembangunan Bendungan Bagong 11. Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang (Kab. Mojokerto) dan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Kecamatan Wlingi (Kab. Blitar) 12. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik 13. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern, benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen 14. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/ gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama 15. Pengembangan kawasan perdesaan kecamatan kebonagung (Kab. Pacitan), dan 16. Penguatan pertanian pangan konservatif (KP2B, LP2B, LSD) melalui fasilitas prasarana-sarana hulu dan hilir.
	• **Kawasan Komoditas Unggulan (Ekonomi Biru Pacitan-Trenggalek-Tulungagung)** 1. Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Tamperan dan PPN Prigi 2. Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung 3. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap 4. Pengembangan input produksi sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya 5. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat 6. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan 7. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan 8. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produksi perikanan

Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	Penekanan Indikasi Intervensi
	9. Penguatan jalan daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan; dan 10. Peningkatan infrastruktur kepelabuhanan untuk mendukung penguatan industri transportasi dan logistik maritim.
	• **Kawasan Geopark Gunung Sewu di Kabupaten Pacitan, Geopark Tulungagung dan Geopark Kabupaten Ngawi** 1. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan warisan geologi bernilai tinggi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem 2. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi 3. Peningkatan pendidikan, penelitian, dan sosialisasi situs-situs geopark untuk mendukung konservasi alam 4. Pengembangan promosi situs-situs geopark yang sesuai dikembangkan untuk wisata (geowisata) 5. Pengembangan sarana penunjang pengembangan geopark 6. Pengembangan prasarana penunjang dan penunjang ketercapaian menuju situs geopark 7. Penguatan kemitraan dalam pengelolaan bersama potensi situs geopark di kawasan hutan, kawasan BBKSDA, kawasan Taman Nasional, dan asset pribadi/company 8. Penguatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju situs *geopark* 9. Pengembangan dan pemasaran geoproduk geopark (geohomestay, geo tour/geowisata), geo souvenir, geo kuliner 10. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi 11. Penguatan visibility (penanda) untuk memperkuat fungsi edukasi, sosialisasi, dan perlindungan 12. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana alam geologi dan bencana lainnya 13. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

3.5.2.3 Pembangunan Kewilayahan RTRW Kabupaten Tulungagung

Selain melihat indikasi intervensi RPJMN untuk wilayah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tulungagung, lokus pembangunan wilayah juga bisa merujuk program prioritas, dokumen RTRW, maupun dokumen lainnya yang relevan.

Tabel 3. 12 Strategi Pembangunan Kewilayahan

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
Perwujudan Sistem Pusat Permukiman			
Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Tulungagung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)			

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
1	Pengembangan pusat pemerintahan dan fasilitas pelayanan pendukungnya/ pusat pemerintahan terpadu/ *block office*	Perkotaan Tulungagung (Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu)	RTRW
2	Pengembangan pusat pendidikan skala regional.		RTRW
3	Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional.		RTRW
4	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa regional/ pasar induk/ grosir dan sejenisnya		RTRW
5	Review RDTRK Kawasan Perkotaan Tulungagung		RTRW
Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokasl (PKL) sebagai pusat distribusi			
1	Review RDTRK	Perkotaan Ngunut (Kecamatan Ngunut)	RTRW
2	Pengembangan Kawasan Perdagangan Regional		RTRW
3	Pengembangan fasilitas kesehatan rawat inap (skala regional kecamatan)		RTRW
4	Pengembangan Terminal tipe C		RTRW
Pengembangan perkotaan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK)			
1	Penyusunan/Review RDTRK	PPK Bandung di Kecamatan Bandung; PPK Pakel di Kecamatan Pakel; PPK Pucanglaban di Kecamatan Pucanglaban; PPK Kalidawir di Kecamatan Kalidawir; PPK Tanggunggunung di Kecamatan Tanggunggunung; PPK Besuki di Kecamatan Besuki; PPK Karangrejo di Kecamatan Karangrejo; PPK Campurdarat di Kecamatan Campurdarat; PPK Boyolangu di Kecamatan Boyolangu; PPK Rejotangan di Kecamatan Rejotangan; PPK Sumbergempol di Kecamatan Sumbergempol; PPK Gondang di Kecamatan Gondang; PPK Kauman di Kecamatan Kauman; PPK Ngantru di Kecamatan Ngantru; PPK Pagerwojo di Kecamatan Pagerwojo; dan PPK Sendang di Kecamatan Sendang	RTRW
2	Pengembangan Kawasan Perdagangan kecamatan		RTRW
Pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL)			
1	Kajian Pengembangan Ekonomi Desa	PPL Tanggulkundung di Kecamatan Besuki; PPL Gandong di Kecamatan Bandung; PPL Gebang di Kecamatan Pakel; PPL Ngentrong di Kecamatan Campurdarat; PPL Jengglungharjo di Kecamatan Tanggunggunung; PPL Kalibatur di Kecamatan Kalidawir; PPL Panjerejo di	RTRW
2	Kajian Pengembangan Infrastruktur Desa		RTRW
3	Pembangunan desa terpadu		RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
		Kecamatan Rejotangan; PPL Panggunguni di Kecamatan Pucanglaban; PPL Sumberingin Kidul di Kecamatan Ngunut; PPL Bendilwungu di Kecamatan Sumbergempol; PPL Sanggrahan di Kecamatan Boyolangu; PPL Bungur di Kecamatan Karangrejo; PPL Gondosuli di Kecamatan Gondang; PPL Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo; dan PPL Geger di Kecamatan Sendang	
Pengembangan RTH Perkotaan Pada PKW, PKL dan PPK			
1	Penyusunan Studi identifikasi RTH Perkotaan	Kawasan perkotaan di Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	pengembangan taman di tiap kecamatan		RTRW
3	Upaya pemenuhan RTH Publik tahap I		RTRW
4	Upaya pemenuhan RTH Publik tahap II		RTRW
5	Upaya pemenuhan RTH Publik tahap III		RTRW
6	Delineasi kawasan dan penetapan kawasan yang menjadi RTH (pemakaman, taman, dll)		RTRW
Sistem Jaringan Jalan			
1	Pengembangan jalan kolektor primer	54 ruas jalan kolektor primer di Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder	24 ruas jalan kolektor sekunder di Kabupaten Tulungagung	RTRW
3	pengembangan jalan pantai selatan	Jalan lintas selatan/ pantai selatan (ruas jalan Prigi - Pantai Sine - Sendang Biru) di Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Pucanglaban	RTRW
4	Penyusunan Rencana Induk Sistem Transportasi Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	RTRW
5	Penyusunan Rencana Induk Jalan dan Jembatan	Kabupaten Tulungagung	RTRW
6	Pengembangan jaringan jalan lokal primer	167 ruas jalan lokal primer	RTRW
7	Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder	20 ruas jalan lokal sekunde	RTRW
8	Pengembangan jalan strategis kabupaten	a. Jalan lingkar timur (Kecamatan Ngantru – Sumbergempol) b. Jalan lingkar barat (Kecamatan Ngantru, Kedungwaru, Karangrejo & Kauman) c. Jalan lingkar selatan (Kecamatan Gondang, Boyolangu dan Sumbergempol) d. Jalan lingkar wilis (Kecamatan Sendang dan Pagerwojo)	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
9	Pengembangan jaringan jalan lingkungan primer	885 ruas jalan lingkungan primer di Kabupaten	RTRW
10	Pengembangan jaringan jalan lingkungan sekunder	349 ruas jalan lingkungan sekunder di Kabupaten	RTRW
11	Peningkatan Jalan Poros Desa	Kabupaten Tulungagung	RTRW
12	Pengembangan Terminal Tipe C	a. Kecamatan Ngunut b. Kecamatan Boyolangu c. Kecamatan Bandung d. Kecamatan Ngantru e. Kecamatan Pagerwojo f. Kecamatan Sendang g. Kecaamtan Karangrejo, h. Kecamatan Rejotangan, i. Kecamatan Campurdarat j. Kecamatan Kalidawir	RTRW
13	Pengembangan dan pemeliharaan jembatan	Kabupaten Tulungagung	RTRW
14	pembangunan tempat pelataran parkir/bongkar muat kendaraan barang	Kecamatan Ngantru	RTRW
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
1	Pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan/lintas penyeberangan	2.6 Kecamatan Ngunut 2.7 Kecamatan Rejotangan	RTRW
2	Pengembangan sarana prasarana keselamatan penyeberangan		RTRW
Sistem Jaringan Transportasi Laut			
1	Pengembangan sarana prasarana pendukung Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh di Kecamatan Besuki	RTRW
2	Pengembangan sarana prasarana pendukung pangkalan pendaratan ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Sine terdapat di Kecamatan Kalidawir	RTRW
Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukungnya			
1	pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	2.7.1.1.1 Kecamatan Pucanglaban; 2.7.1.1.2 Kecamatan Pagerwojo; dan 2.7.1.1.3 Kecamatan Sendang.	RTRW
2	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	Kecamatan Kauman	RTRW
3	Kajian pengembangan energi alternatif lainnya	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Sistem Jaringan Telekomunikasi			
1	Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Pengembangan jaringan fiber optik	Kabupaten Tulungagung	RTRW
3	Kajian Pengembangan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu	Kabupaten Tulungagung	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
4	Pengembangan sarana prasarana telematika/internet (wifi bersama) di sarana pelayanan umum	Kabupaten Tulungagung	RTRW
5	Penyusunan Rencana Induk Telekomunikasi dan Pemanfaatan Menara Bersama	Kabupaten Tulungagung	RTRW
6	Penyediaan infrastruktur telematika berupa BTS Bersama	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Sistem Jaringan Irigasi			
1	Identifikasi potensi dan pemanfaatan air permukaan	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Identifikasi potensi dan pemanfaatan air tanah	Kabupaten Tulungagung	RTRW
3	Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air	Kabupaten Tulungagung	RTRW
4	Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kabupaten Tulungagung	RTRW
5	pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air	Kabupaten Tulungagung	RTRW
6	peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengairan	Kabupaten Tulungagung	RTRW
7	Pengembangan jaringan irigasi air tanah	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Sistem Pengendalian Banjir			
1	Penyusunan Rencana Induk Pengendalian Banjir Perkotaan	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Pengembangan dan pemeliharaan dam pengendali banjir	a. Dam Majan di Kecamatan Kedungwaru b. Dam Kleben dan Paingan di Kecamatan Gondang bendungan Wonorejo di Kecamatan pagerwojo	RTRW
3	Pengembangan embung atau waduk baru, bendungan, pintu air, dan DAM	Kabupaten Tulungagung	RTRW
4	Pembangunan embung – embung dan/atau bendungan	a. Kecamatan Kalidawir; b. Kecamatan Kauman; c. Kecamatan Tanggunggunung d. Kecamatan Pucanglaban; e. Kecamatan Boyolangu; dan f. Kecamatan Campurdarat	RTRW
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
1	Pengembangan unit air baku • Unit air baku jaringan PDAM • Unit air baku jaringan HIPPAM	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Pengembangan unit produksi	Kabupaten Tulungagung	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
	• Pengembanngan Unit produksi jaringan perpipaan PDAM berupa IPA, pompa dan broncaptering • Unit produksi jaringan peripaan HIPPAM berupa reservois dan jaringan transmisi		
3	Pengembangan unit distribusi PDAM dan HIPPAM	Kabupaten Tulungagung	RTRW
4	Pengembangan unit pelayanan PDAM dan HIPPAM	Kabupaten Tulungagung	RTRW
5	Pengembangan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM)	• kecamatan Rejotangan; • kecamatan Sendang; • kecamatan Karangrejo; • kecamatan Pagerwojo; • kecamatan Bandung; • kecamatan Besuki; • kecamatan Kalidawir; • kecamatan Pucanglaban; • kecamatan Pakel; dan • kecamatan Gondang.	RTRW
6	Pengembangan SPAM di desa rawan air, pesisir, dan terpencil	Kawasan pedesaan	RTRW
7	Pengembangan SPAM Regional Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo	• Mata air Kali Dengkung • Ngaresep II • Nglangkap	RTRW
8	Pemanfaatan potensi air tanah di wilayah selatan	Wilayah selatan Kabupaten Tulungagung (Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban)	RTRW
9	Pengembangan sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, pengolahan air payau, dan/atau bangunan penangkap air	Kabupaten Tulungagung	RTRW
10	Identifikasi sumber-sumber mata air dan kajian konservasi air tanah	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)			
1	Pengembangan sistem pengolahan air limbah pada kawasan peruntukan industri dan permukiman prioritas	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Pembangunan IPAL bersama bagi industri	Kabupaten Tulungagung	RTRW
3	Pembangunan dan pemeliharaan SPALD Skala komunal	Kabupaten Tulungagung	RTRW
4	Stimulus jamban sehat	Kabupaten Tulungagung	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
5	Pengoptimalan Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu	RTRW
6	pengembangan pengelolaan limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kabupaten pada rencana TPA di Kalidawir	Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung	RTRW
7	sosialisasi pengelolaan limbah B3	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Sistem Jaringan Persampahan			
1	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan pembangunan TPS3R	Kabupaten Tulungagung	RTRW
3	Pembangunan dan pengembangan TPS	Kabupaten Tulungagung	RTRW
4	Peningkatan Kinerja TPA Sampah	TPA Segawe di Kecamatan Pagerwojo	RTRW
5	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru di wilayah selatan	TPA Kalidawir di Kecamatan Kalidawir	RTRW
6	Pembangunan dan pengembangan TPST	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana			
1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Pengembangan jalur evakuasi bencana dan kelengkapannya	Kabupaten Tulungagung	RTRW
3	Pengembangan ruang evakuasi bencana dan kelengkapannya	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Sistem Drainase			
1	Penyusunan kajian masterplan drainase	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Normalisasi jaringan drainase primer	Kabupaten Tulungagung	RTRW
3	Pengembangan jaringan drainase sekunder	Ruas jalan arteri, kolektor dan lokal	RTRW
4	Pengembangan jaringan drainase tersier	Ruas jalan lingkungan	RTRW
5	Pengembangan bangunan pengendali banjir	Kabupaten Tulungagung	RTRW
6	Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru dan pembangunan bangunan-bangunan penunjang prasarana drainase	Kabupaten Tulungagung	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
Perwujudan Kawasan Lindung			
Badan Air			
1	Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Pengembangan tanggul	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Kawasan Perlindungan Setempat			
1	Pengendalian kegiatan di sekitar sempadan pantai	Kecamatan Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir dan Pucanglaban	RTRW
2	pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan		RTRW
3	Penetapan kawasan sempadan pantai		RTRW
4	Pelestarian, perlindungan, perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan kondisi/kualitas ekosistem mangrove		RTRW
5	Pencegahan dan pengendalian kegiatan budi daya, pengamanan aliran sungai, penanganan limbah industri, pengembangan Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Air Buangan	Kabupaten Tulungagung	RTRW
6	Penataan sempadan sungai		RTRW
7	Pengembangan sungai untuk pemanfaatan RTH		RTRW
8	Penetapan sempadan kawasan sekitar waduk/bendungan	Kecamatan Pagerwojo	RTRW
9	Perlindungan kawasan		RTRW
10	Penyusunan zonasi kawasan		RTRW
11	Kajian identifikasi dan pemanfaatan kawasan sekitar mata air	Kabupaten Tulungagung	RTRW
12	Penataan dan perlindungan kawasan sekitar mata air		RTRW
13	Pelestarian, perlindungan, perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan kondisi/kualitas wilayah sekitar kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	• Candi Ampel di Kecamatan Kalidawir • Candi Boyolangu di Kecamatan Boyolangu • Candi Dadi di Kecamatan Boyolangu • Candi Miri Gambar di Kecamatan Sumbergempol • Candi Penampihan di Kecamatan Sendang • Candi Sanggrahan di Kecamatan Boyolangu • Situs Goa Pasir di Kecamatan Sumbergempol • Situs Goa Selomangleng di Kecamatan Boyolangu	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
		• Situs Goa Tritis di Kecamatan Campurdarat	
Kawasan Cagar Budaya			
1	Register/penetapan bangunan cagar budaya	• Alun-Alun Tulungagung di Kecamatan Tulungagung • Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso di Kecamatan Tulungagung • Balai Rakyat di Kecamatan Tulungagung • Kantor DPRD di Kecamatan Tulungagung • Makam Bupati Tulungagung ke XX di Kecamatan Tulungagung • Dwarapala Tamanan di Kecamatan Tulungagung • Dwarapala Jepun di Kecamatan Tulungagung • Dwarapala Kutoanyar di Kecamatan Tulungagung • Klenteng Tjoe Tik Kiong di Kecamatan Tulungagung • Makam Surontani I di Kecamatan Boyolangu • Dwarapala Kedungwaru di Kecamatan Kedungwaru • Makam Kyai Mimbar Majan/ Hasan Mimbar di Kecamatan Kedungwaru • Makam Bupati Tulungagung ke XXI di Kecamatan Kedungwaru • Makam Srigading di Kecamatan Kauman • Situs Kuburan Wangi di Kecamatan Pagerwojo • Situs Mbah Bodho di Kecamatan Sendang • Goa Tan Tek Syu di Kecamatan Sendang • Makam Astonogedong di Kecamatan Karangrejo • Sumber Sirah di Kecamatan Karangrejo • Reco Guru di Kecamatan Karangrejo • Reco Manten di Kecamatan Karangrejo • Situs Makam Sunan Kuwung / Sunan Kuning di Kecamatan Gondang • Situs Makam Patih di Kecamatan Gondang • Makam Ngadirogo di Kecamatan Sumbergempol • Situs Mbah Bhodo di Kecamatan Sumbergempol • Makam Bupati Ke XI di Kecamatan Sumbergempol • Makam Mbah Sumber	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
		Banter di Kecamatan Ngunut • Punden Tulis di Kecamatan Ngunut • Makam Astonopuroloyo di Kecamatan Pucanglaban • Makam Ki Ageng Sengguruh di Kecamatan Rejotangan • Situs Aryojeding / Candi Nilosuwarno di Kecamatan Rejotangan • Situs Makam soka di Kecamatan Rejotangan • Situs Goa Tan Tyek Syu di Kecamatan Rejotangan • Situs Banyakbang di Kecamatan Kalidawir • Makam Mbah Wali Khasan Anom di Kecamatan Besuki • Situs Alas Kebutan di Kecamatan Besuki • Situs Watu Garit di Kecamatan Besuki • Situs Sang Gendong II di Kecamatan Besuki • Situs Sang Gendong I di Kecamatan Besuki • Situs Kanigoro di Kecamatan Campurdarat • Makam Surontani II di Kecamatan Campurdarat • Situs Wajakensis di Kecamatan Campurdarat • Situs Lemah Duwur di Kecamatan Bandung • Situs Makam Petung di Kecamatan Pakel • Situs Makam Mbah Mlinjo di Kecamatan Tanggunggunung	
Perwujudan Kawasan Budidaya			
Kawasan Hutan Produksi			
1	Usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.	• Kecamatan Bandung; • Kecamatan Besuki; • Kecamatan Boyolangu; • Kecamatan Campurdarat; • Kecamatan Gondang; • Kecamatan Kalidawir; • Kecamatan Karangrejo; • Kecamatan Kauman; • Kecamatan Ngunut; • Kecamatan Pagerwojo; • Kecamatan Pucanglaban; • Kecamatan Rejotangan; • Kecamatan Sendang; • Kecamatan Sumbergempol; • Kecamatan Tanggunggunung.	RTRW
2	koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan budi daya	• Kecamatan Besuki; • Kecamatan Kalidawir; • Kecamatan Pagerwojo; • Kecamatan Pucanglaban;	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
3	penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.	• Kecamatan Sendang; dan • Kecamatan Tanggunggunung	RTRW
Pertanian Tanaman Pangan			
1	Pengembangan strategi pemasaran produk unggulan	• Kecamatan Bandung; • Kecamatan Besuki; • Kecamatan Boyolangu; • Kecamatan Campurdarat; • Kecamatan Gondang; • Kecamatan Kalidawir; • Kecamatan Karangrejo; • Kecamatan Kauman; • Kecamatan Kedungwaru; • Kecamatan Ngantru; • Kecamatan Ngunut; • Kecamatan Pagerwojo; • Kecamatan Pakel; • Kecamatan Pucanglaban; • Kecamatan Rejotangan; • Kecamatan Sendang; • Kecamatan Sumbergempol; • Kecamatan Tulungagung	RTRW
2	Peningkatan peran/revitalisasi KUD dan KOPTAN		RTRW
3	Pengembangan Tanaman/ Komoditi unggulan untuk pertanian tanaman pangan		RTRW
4	Penetapan, sosialisasi dan pengembangan KP2B		RTRW
5	Mempertahankan irigasi teknis dan peningkatan irigasi sederhana		RTRW
Peruntukan Hortikultura			
1	Intensifikasi dan diversifikasi tanaman hortikultura;	• Kecamatan Bandung; • Kecamatan Besuki; • Kecamatan Boyolangu; • Kecamatan Campurdarat; • Kecamatan Gondang; • Kecamatan Kalidawir; • Kecamatan Karangrejo; • Kecamatan Kauman; • Kecamatan Kedungwaru; • Kecamatan Ngantru; • Kecamatan Ngunut; • Kecamatan Pagerwojo; • Kecamatan Pakel; • Kecamatan Pucanglaban; • Kecamatan Rejotangan; • Kecamatan Sendang; • Kecamatan Sumbergempol; • Kecamatan Tanggunggunung	RTRW
2	Pengembangan komoditas unggulan;		RTRW
3	Pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis komoditi hortikultura unggulan	Kecamatan Sendang, Karangrejo dan Kecamatan Pagerwojo	RTRW
Peruntukan Perkebunan			
1	Intensifikasi dan Pengembangan tanaman perkebunan/keras	• Kecamatan Sendang; • Kecamatan Pagerwojo; • Kecamatan Ngantru; • Kecamatan Besuki; • Kecamatan Bandung; • Kecamatan Karangrejo; • Kecamatan Sumbergempol; • Kecamatan Campurdarat; • Kecamatan Rejotangan; • Kecamatan Pakel; • Kecamatan Ngunut; • Kecamatan Kalidawir; • Kecamatan Boyolangu;	RTRW
2	Penyediaan bibit unggul		RTRW
3	intensifikasi tebu rakyat dan kelapa		RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
		• Kecamatan Gondang; • Kecamatan Kauman; • Kecamatan Kedungwaru; • Kecamatan Pucanglaban; • Kecamatan Tanggunggunung	
4	pemberdayaan dan pembinaan petani terkait pengetahuan pengolahan pasca panen dan pemasarannya	Kecamatan Sendang, Karangrejo dan Kecamatan Pagerwojo	RTRW
5	Pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis komoditi perkebunan unggulan		RTRW
Kawasan perikanan budi daya			
1	Pengembangan Budi daya Tambak dan kolam	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Pengembangan agribisnis perikanan/kawasan minapolitan	Kecamatan Gondang Kecamatan Besuki Kecamatan Kalidawir	RTRW
3	Pengembangan industri pengolahan ikan	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Kawasan pembangkitan tenaga listrik			
1	Penyusunan zonasi kawasan sekitar PLTA Wonorejo	Kecamatan Pagerwojo	RTRW
2	Penyusunan zonasi kawasan sekitar PLTA Tulungagung (Neyama)	Kecamatan Besuki	RTRW
3	Pengembangan pembangkit listrik alternatif lainnya	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Kawasan Peruntukan Industri			
1	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Penyusunan Rencana Induk pengembangan Sentra Industri Kecil/KIHT/dll	Kabupaten Tulungagung	RTRW
3	Pengembangan infrastruktur pendukung industri besar, menengah, serta sentra industri kecil	• Kecamatan Besuki; • Kecamatan Campurdarat; • Kecamatan Kedungwaru; • Kecamatan Ngantru; • Kecamatan Ngunut; • Kecamatan Pakel; dan • Kecamatan Sumbergempol.	RTRW
4	Identifikasi dan sosialisasi dampak industri	Kabupaten Tulungagung	RTRW
5	Penyusunan profil/ promosi investasi industri Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	RTRW
6	Pengembangan rumah promosi (*showroom*) potensi industri di Kabupaten Tulungagung	• Kecamatan Besuki; • Kecamatan Campurdarat; • Kecamatan Kedungwaru; • Kecamatan Ngantru; • Kecamatan Ngunut; • Kecamatan Pakel; dan	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
		• Kecamatan Sumbergempol	
Peruntukan Pariwisata			
1	Monev RIPPDA	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata	Obyek wisata unggulan tiap KSP	RTRW
3	Pengembangan Promosi Wisata	Kabupaten Tulungagung	RTRW
4	Pembuatan paket wisata operasional yang menarik dan terkait dengan wisata regional	Kabupaten Tulungagung	RTRW
5	Delineasi kawasan dan perlindungan bangunan cagar budaya yang menjadi obyek wisata	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Peruntukan Permukiman			
1	Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Kawasan perkotaan di Kabupaten	RTRW
2	Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Kawasan pedesaan di Kabupaten	RTRW
3	Rencana Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana Dasar	Kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan	RTRW
4	Legalisasi RP3KP	Kabupaten Tulungagung	RTRW
5	Penyusunan RP2KPKPK	Kabupaten Tulungagung	RTRW
6	Perbaikan permukiman melalui Program Peremajaan Kampung (PPK)	Kabupaten Tulungagung	RTRW
7	Delineasi kawasan dan perlindungan bangunan cagar budaya yang menjadi satu fungsi dengan permukiman (perkantoran, dll)	Kabupaten Tulungagung	RTRW
Kawasan Pertahanan Keamanan			
1	Identifikasi dan pemetaan detil Kawasan Pertahanan Keamanan Kabupaten beserta zona penyangga kawasan	Kabupaten Tulungagung	RTRW
2	Pemberian batas/penanda kawasan pertahanan keamanan	Kabupaten Tulungagung	RTRW
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS			
Kawasan Strategis sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi			
1	kawasan sekitar pantai selatan • identifikasi potensi wisata kawasan • penyusunan RIPOW kawasan wisata sekitar pantai selatan	• Kecamatan Besuki • Kecamatan Tanggunggunung • Kecamatan Kalidawir • Kecamatan Pucanglaban	RTRW

No	Strategi	Lokus Wilayah	Sumber Data
2	kawasan agropolitan • pengembangan agribisnis pariwisata • penyusunan masterplan agropolitan • pembangunan sarana prasarana pendukung agropolitan	• Kecamatan Sendang • Kecamatan Pagerwojo • Kecamatan Karangrejo	RTRW
3	kawasan minapolitan • identifikasi potensi minapolitan • penyusunan masterplan minapolitan	• Kecamatan Gondang • Kecamatan Sumbergempol • Kecamatan Boyolangu	RTRW
4	Kawasan peruntukan industri • Identifikasi potensi pengembangan industri • Penyusnan RIPI Kabupaten	• Kecamatan Besuki; • Kecamatan Campurdarat; • Kecamatan Kedungwaru; • Kecamatan Ngantru; • Kecamatan Ngunut; • Kecamatan Pakel; dan • Kecamatan Sumbergempol	RTRW
Kawasan Strategis Kepentingan Sosial dan Budaya			
1	Pemberian penanda/ rambu/ informasi terkait kawasan	• Candi Ampel di Kecamatan Kalidawir • Candi Boyolangu di Kecamatan Boyolangu • Candi Dadi di Kecamatan Boyolangu • Candi Miri Gambar di Kecamatan Sumbergempol • Candi Penampihan di Kecamatan Sendang • Candi Sanggrahan di Kecamatan Boyolangu • Situs Goa Pasir di Kecamatan Sumbergempol • Situs Goa Selomangleng di Kecamatan Boyolangu • Situs Goa Tritis di Kecamatan Campurdarat	RTRW
2	Pengembangan, pelestarian budaya dan pariwisata kawasan		RTRW
Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup			
1	Pengembangan/kajian terkait potensi geopark	• Kecamatan Besuki • Kecamatan Bandung • Kecamatan Kalidawir • Kecamatan Campurdarat • Kecamatan Pucanglaban • Kecamatan Tanggunggunung	RTRW
2	Kajian terkait kawasan Karst		RTRW

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043

3.5.3 Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang berisikan langkah-langkah atau upaya untuk merespon isu strategis, menghadapi lingkungan dinamis dan mencapai tujuan dan sasaran. Strategi RPJMD Kabupaten Tulungagung dirumuskan berbasis lima misi dan respons atas isu strategis pembangunan jangka menengah. Strategi pembangunan jangka menengah daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Perumusan Strategi Berbasis Respons Atas Isu Strategis

Isu Strategis	Strategi RPJMD
Hilirisasi sektor ekonomi berbasis desa	• Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor agro. • Peningkatan daya tarik pariwisata berbasis potensi daerah. • Penguatan keberdayaan usaha mikro dan kecil, serta koperasi. • Penguatan iklim investasi dan stabilitas perekonomian daerah. • Pengembangan perekonomian berbasis kawasan. • Penguatan kapasitas tata kelola desa dan pemberdayaan ekonomi desa.
Ketahanan lingkungan dan bencana	• Peningkatan kelestarian lingkungan hidup • Pembangunan yang berketahanan iklim dan tangguh bencana.
Pemerataan pembangunan infrastruktur	• Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas. • Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung akselerasi perekonomian.
SDM berkualitas dan kohesivitas sosial	• Peningkatan mutu layanan pendidikan. • Peningkatan mutu layanan kesehatan. • Peningkatan pemajuan kebudayaan. • Peningkatan kesetaraan gender, inklusi sosial dan kualitas keluarga. • Peningkatan harmoni sosial.
Pengentasan kemiskinan terintegrasi	• Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif. • Peningkatan pendapatan berbasis kompetensi angkatan kerja dan keberdayaan masyarakat.
Tata kelola berintegritas dan inklusif	• Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan adaptif transformasi digital. • Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. • Peningkatan profesionalitas dan integritas birokrasi.

3.5.4 Arah Kebijakan

Strategi pembangunan jangka menengah telah dirumuskan sebagai bentuk respons atas isu strategis. Isu strategis sendiri di dalamnya memuat peta masalah, potensi dan isu lingkungan dinamis. Rumusan strategi kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai upaya-upaya yang lebih operasional untuk merespon permasalahan pembangunan dan lingkungan dinamis, dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan diklasifikasikan berdasarkan misi RPJMD

Tabel 3. 14 Keselarasan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun Dari Desa	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor agro	• Pemenuhan kebutuhan pupuk, bibit, pestisida dan ketercukupan sumber daya air untuk pertanian. • Peningkatan kapasitas lembaga kelompok tani dan regenerasi petani muda. • Peningkatan akses asuransi pertanian. • Peningkatan perlindungan lahan pertanian untuk mencegah alih fungsi lahan • Peningkatan produksi pertanian untuk mendukung kebijakan Makan Bergizi Gratis. • Peningkatan stabilitas cadangan pangan dan penganekaragaman pangan. • Peningkatan produksi dan kualitas produk perkebunan dan hortikultura, termasuk pengelolaan pasca panen dan akses pemasaran. • Peningkatan kualitas sarana perdagangan melalui pengembangan pasar dan pasar ikan, serta adaptif terhadap ekonomi digital. • Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perikanan. • Peningkatan kapasitas lembaga petani ikan budidaya dan nelayan, antara lain dalam peningkatan produksi, keterjangkauan pakan, pemasaran dan olahan hasil perikanan. • Peningkatan upaya perlindungan pertanian terhadap serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). • Peningkatan upaya perlindungan kesehatan veteriner ternak. • Penguatan komoditas ekspor. • Pengembangan teknologi tepat guna di sektor agro (pertanian, peternakan dan perikanan). • Pengembangan hilirisasi sektor agro, antara lain melalui peningkatan investasi agroindustri. • Arah kebijakan sektor agro Tulungagung juga mendukung dan didukung oleh arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur berupa pengembangan kawasan swasembada pangan, air dan energi Brantas. • Pembangunan rumah potong hewan
	Peningkatan daya tarik pariwisata berbasis potensi daerah	• Peningkatan daya tarik wisata berbasis potensi daerah dan didukung pengembangan sarana dan prasarana. • Penguatan geopark dan seni budaya sebagai daya tarik pariwisata Tulungagung, termasukan memberikan dukungan dan didukung oleh arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur berupa pengembangan kawasan Geopark Gunung Sewu.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa wisata. • Penguatan pemasaran dan kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan media, DUDI dan pelaku pariwisata. • Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Tulunggung yang saling terintegrasi dan melengkapi, serta penguatan daya tarik masing destinasi. KSP berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten yaitu KSP Kaki Gunung Wilis, KSP Perkotaan, KSP Poros Kota-Pesisir Barat, Tulungagung, Perbukitan Selatan Tulungagung, KSP Pesisir Barat Tulungagung, KSP Pesisir Tengah Tulungagung, KSP Pesisir Timur Tulungagung.
	Penguatan keberdayaan usaha mikro dan kecil, serta koperasi.	• Pengembangan wirausaha dan usaha mikro kecil yang tangguh, antara lain melalui akses permodalan, pendampingan manajemen dan pemasaran. • Peningkatan fasilitasi pemberdayaan wirausaha muda. • Penguatan jaringan/kemitraan usaha mikro dan kecil dengan rantai produksi industri pengolahan. • Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas kelembagaan Koperasi Merah Putih.
	Penguatan iklim investasi dan stabilitas perekonomian daerah	• Peningkatan iklim investasi dengan dukungan kebijakan dan wilayah yang kondusif. • Peningkatan realisasi investasi padat karya. • Penguatan manajemen risiko investasi. • Pengendalian inflasi secara lintas sektor. • Iklim investasi dan stabilitas perekonomian didukung oleh riset dan inovasi sektor unggulan daerah berdasarkan dokumen RIPJPID Kabupaten Tulungagung, yaitu sektor pariwisata dan kebudayaan, sektor pertanian terpadu, dan sektor industri dan perdagangan.
	Pengembangan perekonomian berbasis kawasan	• Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan berupa pembentukan pusat pertumbuhan baru di Jalur Pansela. • Penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan berbasis pertanian/agroindustri, perdagangan dan pariwisata. • Pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan wilayah yang saling terkoneksi. • Pengembangan kawasan industri, kawasan industri kecil menengah dan sentra UMKM. • Peningkatan daya saing produk industri kecil dan menengah. • Peningkatan penggunaan bahan baku lokal dalam aktivitas industri daerah.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Integrasi arah kebijakan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) periode 2 berupa penguatan ketersediaan bahan baku industri, peningkatan sarana dan prasarana produksi, peningkatan jaringan pemasaran produk, pengembangan sarana dan prasarana pemasaran, penguatan kapasitas IKM dalam pengelolaan limbah industri, peningkatan kerjasama dan sistem informasi industri, peningkatan kompetensi pelaku industri, standarisasi kompetensi angkatan kerja, pembangunan sentra dan peruntukan kawasan industri, pembangunan infrastruktur penunjang sentra dan kawasan peruntukan industri, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang sentra dan kawasan peruntukan industri, serta pembangunan pengelolaan limbah sentra dan kawasan peruntukan industri. • Dukungan arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur berupa pengembangan kawasan komoditas unggulan ekonomi biru Pacitan-Trenggalek-Tulungagung.
	Penguatan kapasitas tata kelola desa dan pemberdayaan ekonomi desa	• Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pembangunan desa. • Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur desa dan rukun tetangga. • Peningkatan kolaborasi desa dan kabupaten, termasuk peningkatan peran kecamatan sebagai lembaga intermediary. • Pemberdayaan lembaga kemasyarakat desa dan pengembangan desa yang inklusif. • Penguatan kelembagaan dan kapasitas usaha dan diversifikasi produk usaha BUMDes dan BUMDesMa. • Fasilitasi pemberdayaan dan kerjasama antar lembaga ekonomi desa. • Peningkatan kapasitas desa dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi dan aset desa. • Pengembangan kawasan pedesaan berbasis potensi ekonomi tematik dan saling terkait. • Pengembangan kampung migran yang produktif. • Pembentukan dan pengembangan koperasi merah putih.
Misi 2 Mewujudkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berketahanan iklim dan bencana	• Pengembangan sistem pengolahan sampah terpadu meliputi penanganan dan pengelolaan sampah kolaboratif dan berbasis hulu-hilir. • Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. • Penghijauan lahan gundul/kiritis dan daerah tangkapan air, serta penghijauan berbasis masyarakat. • Pengurangan risiko dan dampak bencana meliputi peningkatan kapasitas masyarakat dan penanganan bencana.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Penguatan infrastruktur, pengelolaan risiko berbasis masyarakat, dan digitalisasi sistem pengelolaan bencana. • Pembangunan yang sesuai dengan peruntukkan ruang wilayah. • Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. • Sinkronisasi kebijakan tata ruang dengan pemantauan rutin perubahan tutupan lahan. • Penyusunan dan pelaporan standar penurunan emisi GRK. • Penguatan kebijakan dan pemetaan data lahan dilindungi.
	Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkualitas	• Pembangunan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata dan berkualitas. • Pembangunan infrastruktur air bersih untuk semua masyarakat. • Peningkatan akses dan kualitas layanan air minum jaringan perpipaan. • Peningkatan akses sanitasi aman. • Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. • Peningkatan akses transportasi publik yang mendukung aksesibilitas dari dan menuju kawasan strategis kabupaten.
	Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung akselerasi perekonomian	• Peningkatan akses terhadap jaringan irigasi. • Peningkatan kualitas infrastruktur di pusat pertumbuhan, termasuk infrastruktur penunjang aktivitas industri dan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan. • Peningkatan konektivitas di Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Selingkar Wilis. • Peningkatan kualitas layanan perhubungan dan keselamatan transportasi. • Dukungan pembangunan jalan tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kertosono-Kediri-Tulungagung. • Dukungan preservasi jalan ruas Kediri-Tulungagung-Trenggalek dan Kediri-Blitar. • Dukungan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur untuk pemerataan pembangunan kawasan afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur, terutama melalui percepatan pembangunan jalan lintas selatan dan preservasi jalan lintas selatan Wonogiri-Pacitan-Trenggalek-Tulungagung. • Peningkatan akses transportasi publik.
Misi 3	Peningkatan mutu layanan pendidikan	• Pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban		• Peningkatan akses beasiswa/bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin. • Peningkatan pendidikan inklusif, digitalisasi sekolah, pembelajaran mendalam, pengembangan sekolah model transformatif, dan penguatan bimbingan konseling di sekolah. • Identifikasi data dan penanganan anak putus sekolah. • Dukungan pendidikan pada sekolah terbuka, pesantren dan sekolah berbasis asrama. • Layanan sarana dan prasarana sekolah semakin berkualitas, termasuk akses internet. • Pengembangan sumber daya untuk mendukung makan bergizi gratis • Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. • Penguatan tata kelola pendidikan. • Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan fasilitasi pengembangan perpustakaan sekolah dan desa. • Peningkatan budaya literasi masyarakat, termasuk literasi digital.
	Peningkatan mutu layanan kesehatan	• Universal Health Coverage (UHC) berbasis jaminan kesehatan/BPJS yang merata • Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan yang inklusif dan berbasis digital. • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan. • Peningkatan peran posyandu dalam penerapan 6 bidang SPM • Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat • Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. • Pencegahan dan penanggulangan AIDS, tuberkulosis dan malaria. • Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, diantaranya emenuhan makan bergizi untuk ibu hamil, peningkatan kunjungan (K6) ibu hamil, imunisasi dasar lengkap. • Peningkatan upaya pencegahan stunting. • Pemenuhan dan perbaikan gizi masyarakat. • Pemenuhan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan. • Penguatan integrasi sistem informasi kesehatan antar fasilitas kesehatan. • Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan. • Penguatan fasilitas kesehatan primer di daerah terpencil.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan pemajuan kebudayaan	• Pelestarian budaya tak benda dan cagar budaya. • Fasilitasi ruang untuk apresiasi seni daerah. • Penguatan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal daerah dalam kehidupan sehari-hari • Penguatan dan pengembangan potensi wisata budaya dan sejarah lokal. • Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemajuan kebudayaan. • Peningkatan implementasi rekomendasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam aspek perlindungan (sosialisasi, dokumentasi, apresiasi, dan regenerasi); pemanfaatan (pendaftaran hak cipta karya dan penguatan ekosistem kebudayaan); pengembangan (fasilitasi kajian dan adaptasi transformasi digital untuk pengembangan OPK); pembinaan (pelatihan, fasilitasi forum kolaborasi, seleksi untuk penerimaan dana hibah, serta penetapan dan pemberdayaan desa budaya).
	Peningkatan kesetaraan gender, inklusi sosial dan kualitas keluarga	• Peningkatan akses layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. • Penyediaan fasilitas dan ruang publik yang inklusif, termasuk untuk difabel dan layak anak. • Pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik dan pembangunan, serta perumusan anggaran responsif gender. • Peningkatan kualitas keluarga pekerja migran, terutama pendampingan pendidikan anak dan pola asuh keluarga pengasuh anak. • Pengendalian pertumbuhan penduduk dan pencegahan pernikahan anak.
	Peningkatan harmoni sosial	• Pemberdayaan kader siaga keamanan dan ketertiban. • Peningkatan fasilitasi ruang harmoni dan kontribusi bagi kelompok/organisasi masyarakat. • Pembangunan co-working space sebagai ruang kerja dan interaksi yang produktif. • Peningkatan bina mental dan spiritual masyarakat untuk menjaga harmoni sosial. • Peningkatan deteksi dini potensi konflik sosial.
Misi 4 Menuntaskan Kemiskinan Secara Terpadu dan Kolaboratif	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif	• Pengembangan satu data kemiskinan, melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTSen) secara berkala dan pemetaan geospasial untuk mendeteksi daerah rawan kemiskinan/bencana • Identifikasi profil masyarakat miskin dan kerentanan sumber penghidupan. • Penguatan implementasi dan pengendalian kebijakan penurunan beban pengeluaran, antara lain akses bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan,

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		jaminan sosial ketenagakerjaan, rumah layak huni, dan bantuan sosial bagi prioritas lansia dan disabilitas. • Integrasi antara perlindungan dan pemberdayaan sosial, misalnya memberikan bantuan alat produksi bagi masyarakat miskin dan rentan.
	Peningkatan pendapatan berbasis kompetensi angkatan kerja dan keberdayaan masyarakat	• Penguatan peran balai Latihan kerja (BLK) dan pengembangan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. • Peningkatan kompetensi dan keahlian angkatan kerja melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pendampingan pasca pelatihan. • Peningkatan kerjasama antar lembaga untuk peningkatan serapan tenaga kerja. • Optimalisasi sumber pembiayaan alternatif untuk pengentasan kemiskinan, antara lain melalui CSR untuk pemberdayaan masyarakat. • Perbaikan metode pemberdayaan masyarakat yang dijalankan secara komprehensif mulai dari penyadaran, pelatihan, pendampingan intensif untuk penguatan aset dan akses pasar. • Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara kolaboratif. • Penguatan implementasi dan pengendalian kebijakan penurunan kantong kemiskinan melalui integrasi antara pembangunan wilayah dengan pemberdayaan masyarakat desa.
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif dan Bersih dari Korupsi	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan adaptif transformasi digital	• Peningkatan tata kelola kewilayahan dengan menempatkan kecamatan sebagai lembaga koordinasi kewilayahan, pemberdayaan dan pelayanan yang andal. • Peningkatan inovasi pelayanan publik yang berkesinambungan. • Penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelayanan publik, serta terdapat pengendalian dan evaluasi kualitas pelayanan secara berkala. • Penguatan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan inklusif, serta penguatan keamanan data. • Pengembangan aplikasi Tulungagung Smart City. • pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan gangguan trantibumlinmas.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	• Penguatan efektivitas reformasi birokrasi general dan tematik untuk menghasilkan birokrasi yang menghasilkan manfaat nyata kepada masyarakat. • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung kualitas data dan pembangunan satu data Indonesia. • Peningkatan kualitas pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Peningkatan transparansi pemerintah daerah dan keterbukaan informasi publik. • Peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti dan sinergis dengan kebijakan provinsi dan nasional. • Peningkatan kapasitas dan kinerja DPRD dalam perumusan kebijakan, penganggaran dan pengawasan. • Peningkatan ekosistem riset dan inovasi yang berkesinambungan dan kolaboratif. Eksositem riset dan inovasi terdiri dari kebijakan infrastruktur riset dan inovasi, kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, kemitraan riset dan inovasi, budaya riset dan inovasi, keterpaduan riset dan inovasi, serta penyelarasan dengan perkembangan global. • Peningkatan kualitas penggaran berbasis kinerja. • Peningkatan PAD berbasis optimalisasi pajak, retribusi dan kinerja BUMD. • Peningkatan pembiayaan alternatif antara lain melalui CSR dan KPBU • Peningkatan kualitas manajemen dan produktivitas BUMD.
	Peningkatan profesionalitas dan integritas birokrasi	• Perluasan implementasi zona integritas. • Peningkatan kualitas sistem pencegahan korupsi. • Peningkatan pengendalian intern yang berkualitas yang didukung kapasitas dan ketercukupan kebutuhan APIP. • Penguatan sistem merit dan manajemen talenta. • Penataan kelembagaan dan sistem kerja untuk menghasilkan postur birokrasi yang efisien, agile dan berkinerja.

3.6 Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik dan politik. Secara teknokratik, perumusan program prioritas berdasarkan rekomendasi dari hasil penyusunan rencana teknokratik RPJMD, serta menjawab permasalahan dan potensi yang dimiliki daerah secara lebih operasional. Dari sisi politik, program prioritas mengkerangkai program unggulan/janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

3.6.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

Pencapaian visi dan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 yang telah dioperasionalkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selanjutnya membutuhkan dukungan pelaksanaan program prioritas. Hasil dari pelaksanaan program prioritas ini dianggap dapat menjadi pengungkit utama upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi dimaksud. Pendefinisian program prioritas yang dimaksud bukan merupakan nomenklatur program yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun lebih kepada program-program kerja yang telah menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Terdapat 17 (Tujuh Belas) program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2025-2030. Ketujuh belas program prioritas tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa”. Pelaksanaan program prioritas tersebut direalisasikan melalui nomenklatur program yang diampu oleh perangkat daerah. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 15 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa	Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun Dari Desa	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah			**Indeks Daya Saing Daerah**						
			Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)						
					PDRB per Kapita						
				Meningkatnya produksi dan hilirisasi sektor agro	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Pembangunan agro terintegrasi	Pembangunan sumur pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	Urusan Pertanian
					Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota					Luas lahan sawah yang terairi oleh irigasi (%)	
					Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB				Meningkatnya prasarana peternakan dan Kesehatan hewan yang berfungsi optimal	Persentase Prasarana Peternakan Keswan yang berfungsi optimal (%)	
							Pengembangan teknologi tepat guna pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya budidaya peternakan yang sesuai standar	Persentase Budidaya Peternakan yang Memenuhi Standar (%)	Urusan Pertanian
							Mekanisasi pertanian		Meningkatnya optimalisasi sarana pertanian	Peningkatan Produksi tanaman Pangan (%)	
							Menjamin ketersediaan pupuk			Peningkatan Produksi Tanman Hortikultura (%)	
							Menjamin ketersediaan bibit			Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan (%)	
										Ratio pemanfaatan sarana pertanian terhadap luasan lahan pertanian (%)	
							Pengembangan teknologi tepat guna perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemanfaatan Benih Berkualitas,	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Urusan Kelautan Dan Perikanan
										Persentase Kematian Ikan (%)	
										Persentase Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Benih ikan berkualitas (%)	
										Persentase Pembudidaya Ikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pakannya (%)	
										Produksi Perikanan Budidaya (%)	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									dan Pengendalian Kematian Ikan		
							Pengembangan teknologi tepat guna peternakan dan kesehatan hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta berkembangnya unit usaha peternakan yang memenuhi standar higiene dan sanitasi	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%) Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan (%) Persentase Penigkatan Unit Usaha Peternakan yang Memenuhi Standar Higiene Sanitasi (%)	Urusan Pertanian
							Peningkatan investasi agroindustri	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Investasi (Miliar) (Angka)	Urusan Penanaman Modal
							Pengembangan agroindustri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (%) Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (%) Persentase produk IKM yang berkualitas (%) Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor (%)	Urusan Perindustrian
							Pembangunan pasar ikan Bandung, Rehabilitasi pasar Bandung	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) Presentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dalam kondisi layak (%)	Urusan Perdagangan
				Daya tarik wisata semakin meningkat	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Taman Bumi (Geopark)	Sarana dan Prasarana di pusat pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Nilai Survey Kepuasan Wisatawan (Nilai) Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	Urusan Pariwisata
							Pengembangan pariwisata berbasis taman bumi (geopark)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisata (Orang)	Urusan Pariwisata
							Pomosi pariwisata dan			Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							kebudayaan hingga level global			Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing [hotel Berbintang non Bintang] (%)	
				Meningkatnya efisiensi investasi	ICOR	Peningkatan efisiensi investasi	Kemudahan perizinan investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perizinan Berusaha (Indeks)	Urusan Penanaman Modal
										Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	
							Penetapan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, agroindustri, perdagangan dan pariwisata	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi/Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah dan Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rekomendasi Strategi/Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti (%)	Urusan Perencanaan
										Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Terverifikasi (%)	
			Meningkatnya kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri						
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Skor dimensi tata kelola Pemerintah desa	Pemberdayaan desa	Model pembangunan kolaboratif desa-kabupaten	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Skor Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa (Indeks)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
							Peningkatan honor/insentif RT/RW			Skor Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa (Indeks)	
							Tali asih purna kepala desa			Persentase BUMDesa dengan status Maju (%)	
	Misi 2: Mewujudkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya kelestarian lingkungan dan pembangunan wilayah yang berkualitas			**Penurunan Emisi GRK Kumulatif**						
					Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur						
			Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		Indeks Infrastruktur Daerah						
				Infrastruktur pendukung perekonomian yang semakin	Rata-rata luas baku sawah yang mendapat air irigasi setiap musim tanam	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur	Pembangunan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya kawasan sawah yang terfasilitasi jaringan irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
										Persentase Kondisi Irigasi Baik Kewenangan Kab/Kota (%)	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				merata dan berkualitas	Persentase luasan kawasan permukiman layak huni	perekonomian	Infrastruktur perkim di pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh di bawah 10 hektar di luar SK kawasan kumuh yang ditangani (%)	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
					Tingkat Kemantapan Jalan		Pembangunan infrastruktur air bersih untuk semua masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah rawan kekeringan				
							Infrastruktur jalan ke pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatkannya jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase jalan yang mendapat penanganan (%)	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	
							Pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh di bawah 10 hektar di luar SK kawasan kumuh yang ditangani (%)	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							peningkatan konektivitas ke JLS dan Selingkar Wilis	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan, Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi (%)	Urusan Perhubungan
				Meningkatnya kualitas tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Persentase pengajuan rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti (%)	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Menurunnya risiko bencana		Indeks Risiko Bencana						
				Meningkatnya ketahanan	Indeks Ketahanan Daerah	Pelestarian lingkungan	Kebijakan pengurangan			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	Urusan Ketenterama

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				bencana dan adaptasi perubahan iklim		dan mitigasi bencana	risiko dan dampak bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	n dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga n Masyarakat (BPBD)
										Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	
										Prosentase Pelayanan Penanggulangan dan Penanganan Bencana (%)	
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
								PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terselenggaranya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase aparatur pemadam kebakaran yang memiliki kompetensi (%)	Urusan Ketenterama n dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga n Masyarakat (Damkar)
										Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan (%)	
										Persentase bangunan gedung yang memiliki proteksi kebakaran sesuai standart (%)	
										Persentase tindak lanjut permintaan pemadaman,penyelamatan yang ditindaklanjuti (%)	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)						
				Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Timbulan Sampah yang Terolah di fasilitas pengolahan sampah		Konservasi mata air berbasis pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	Urusan Lingkungan Hidup
					Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		Penghijauan berbasis komunitas	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terselenggaranya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola (%)	Urusan Lingkungan Hidup
							Penanganan sampah kolaboratif desa-kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	Urusan Lingkungan Hidup
							Penambahan armada pengangkut sampah				

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Misi 3: Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban	Terwujudnya masyarakat yang unggul, berbudaya dan guyub			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**						
					Indeks Pembangunan Masyarakat (iPMAS)						
			Terwujudnya SDM yang cerdas dan sehat		Rata-rata Lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun						
					Harapan Lama Sekolah (HLS)						
					Usia Harapan Hidup (UHH)						
				Meningkatnya pendidikan yang merata dan berkualitas	Rata-rata Skor Kemampuan Literasi	Pendidikan merata, berkualitas dan berkarakter	Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 1 dan 7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peserta Didik Kurang Mampu yang Melanjutkan Pendidikan (%)	Urusan Pendidikan
					Rata-rata Skor Kemampuan Numerasi		Tidak ada pungutan sekolah di SD dan SMP			Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	
					Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas berkualifikasi pendidikan tinggi		Layanan internet wifi di seluruh SD dan SMP			Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	
					Angka Partisipasi Sekolah		Peningkatan sarpras semua sekolah			Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	
							Mendukung makan bergizi gratis di sekolah			Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	
							Pelatihan guru			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	
										Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	
										Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	
										Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 13 - 15 (%)	
										Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 12 (%)	
							Pendidikan karakter	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal (%)	Urusan Pendidikan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Peningkatan cakupan layanan bus sekolah gratis (31 bus)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan, Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi (%)	Urusan Perhubungan
							Peningkatan kerjasama mobil penumpang umum (MPU) sekolah gratis				
							Honorarium guru TPQ/Madin	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (%)	Sekretariat Daerah
							Hibah kelompok keagamaan				
							Peningkatan pembinaan mental spiritual di masyarakat				
							Meningkatkan tunjangan guru honorer	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	Urusan Pendidikan
				Meningkatnya kesehatan untuk semua	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Kesehatan untuk semua masyarakat	Universal health coverage (UHC)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka populasi bebas Penyakit Menular (%)	Urusan Kesehatan
					Prevalensi stunting		Pelayanan kelas 3 gratis berkualitas			Persentase Puskesmas mencapai target kekebalan kelompok (%)	
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna		Memberikan makan bergizi ke ibu hamil			Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular (%)	
					Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	
										Angka Kematian Ibu (Angka)	
										Angka Kematian Bayi (Angka)	
										Jumlah Kematian Ibu (Orang)	
										Jumlah Kematian Balita (Orang)	
										Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	
										Persentase cakupan penerima PKG (%)	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	
										Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	
										Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	
										Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
										Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	
							Memberikan makan bergizi ke ibu hamil	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	Urusan Kesehatan
							Pencegahan dan Penurunan Prevelensi Stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok Tribina Paripurna (%)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										Jumlah UPPKA yang Terbentuk (Kelompok)	
										Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	Urusan Kesehatan
										Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tatanan (%)	
			Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan harmonis		Indeks Harmoni Indonesia						
				Kebudayaan daerah yang lestari	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang termanfaatkan menjadi obyek wisata	Pelestarian kebudayaan	Penampilan kesenian lokal di ruang publik dan tempat wisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan pelaku Seni Budaya (%)	Urusan Kebudayaan
										Persentase warisan budaya yang dilestarikan (%)	
										Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	
								PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Nilai Survey Kepuasan Wisatawan (Nilai)	Urusan Pariwisata
										Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	
				Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap regulasi daerah	Indeks Persepsi Ketaaatan Masyarakat terhadap Regulasi Daerah	Penguatan harmoni sosial	Kader siaga keamanan dan ketertiban	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga
										Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (%)	n Masyarakat
										Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (%)	
										Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dapat Dicegah (%)	
										Persentase Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	
										Jumlah Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Berulang (%)	
	Misi 4: Menuntaskan Kemiskinan Secara Terpadu dan Kolaboratif	Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan			**Tingkat Kemiskinan**						
					Jumlah Penduduk Miskin						
					Indeks Gini						
			Meningkatnya Pendapatan dan Terkendalinya Beban Pengeluaran Masyarakat		Garis Kemiskinan						
					Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan						
				Bantuan sosial yang tepat sasaran	Persentase penerima bantuan sosial tepat sasaran	Perlindungan dan jaminan sosial	Satu data kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	Urusan Sosial
							Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dengan prioritas lansia dan disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan Rehabilitas Sosial dasar diluar panti (%)	Urusan Sosial
							Pelayanan kesehatan masyarakat miskin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka populasi bebas Penyakit Menular (%)	Urusan Kesehatan
										Persentase Puskesmas mencapai target kekebalan kelompok (%)	
										Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular (%)	
										Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	
										Angka Kematian Ibu (Angka)	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Angka Kematian Bayi (Angka)	
										Jumlah Kematian Ibu (Orang)	
										Jumlah Kematian Balita (Orang)	
										Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	
										Persentase cakupan penerima PKG (%)	
										Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	
										Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	
										Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	
										Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
										Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	
							Bantuan biaya pendidikan SD dan SMP untuk siswa miskin	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peserta Didik Kurang Mampu yang Melanjutkan Pendidikan (%)	Urusan Pendidikan
										Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	
										Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	
										Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	
										Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	
										Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	
										Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	
										Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	
										Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 13 - 15 (%)	
										Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 12 (%)	
							Bantuan biaya pendidikan SMA untuk siswa miskin	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (%)	Sekretariat Daerah
							Beasiswa bagi mahasiswa				

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							miskin berprestasi				
							Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 10				
				Meningkatnya serapan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan serapan tenaga kerja	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten (%)	Urusan Tenaga Kerja
										Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Informasi Lowongan Kerja (%)	
										Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%)	
								PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi (%)	Urusan Tenaga Kerja
										Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama pemagangan (Perusahaan)	
										Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	
										Jumlah Peserta Pemagangan (Orang)	
				Meningkatnya keberdayaan ekonomi mikro dan koperasi	Rasio Kewirausahaan	Pemberdayaan wirausaha dan UMKM	Sekolah wirausaha tangguh	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
					Nilai Survei Peningkatan Omset Usaha Mikro					Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kepeloporan dan kewirausahaan (Orang)	
										Persentase organisasi kepemudaan yang yang meningkat kapasitas kompetensinya (%)	
					Persentase Koperasi Sehat		Subsidi bunga Usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Membuat laporan keuangan usaha mikro sesuai ketentuan (%)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
										Persentase Peningkatan Klastersasi Usaha Mikro (%)	
										Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang memiliki legalitas (%)	
										Persentase usaha mikro yang meningkat kompetensinya (%)	
										Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	
										Rasio usaha mikro yang ber NIB pada level Kabupaten (Rasio)	
								PROGRAM PENDIDIKAN DAN		Persentase kompetensi SDM Koperasi yang meningkat (%)	Urusan Koperasi,

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	Usaha Kecil, dan Menengah
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Peningkatan Permodalan Koperasi (%)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Penguatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Pangan Berkelanjutan	Peningkaatan akses program ketahanan dan kemandirian pangan serta berorientasi pada keandalan terhadap perubahan iklim	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terkendalinya Harga Pangan Masyarakat	Rasio fluktuasi harga konsumen dengan harga acuan (%)	Urusan Pangan
								PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	Urusan Pangan
										Rasio desa tahan pangan (%)	
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Cadangan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	Urusan Pangan
										Rasio stok pangan dengan standard kebutuhan (%)	
				Terkendalinya inflasi	Tingkat Inflasi	Meningkatnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Barang	Pengembangan pasar di Pusat Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	Urusan Perdagangan
										Presentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dalam kondisi layak (%)	
								PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	Urusan Perdagangan
										rasio selisih harga di tingkat produsen dan konsumen (%)	
								PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Perekonomian dan Pembangunan (%)	Sekretariat Daerah

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif, dan Bersih dari Korupsi	Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas			**Indeks Reformasi Birokrasi**						
			Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, berorientasi hasil, dan pelayanan publik yang prima		Nilai SAKIP						
					Indeks Pelayanan Publik (IPP)						
					Survey Penilaian Integritas (SPI)						
				Terwujudnya birokrasi yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	Perbaikan tata kelola kebijakan dan manajemen ASN berbasis sistem merit	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	Urusan Kepegawaian
							TPP berdasar capaian kinerja organisasi			Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (Indeks)	
							TPP P3K			Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)	
										Persentase Pegawai dengan Nilai Kinerja Minimal Baik (%)	
					Persentase unit kerja yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM		Pencegahan korupsi di semua lini	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Persentase Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal (%)	Inspektorat
					Indeks Manajemen Risiko					Persentase Pengawasan yang Dilakukan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)	
					Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi					Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Nilai Komponen Dukungan Pengawasan (Nilai)	Inspektorat
										Jumlah Unit Kerja yang Ditetapkan sebagai Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas WBK/WBBM (Unit Kerja)	
										Nilai Komponen Peran dan Layanan Pengawasan (Nilai)	
				Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan dan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		Optimalisasi PAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	Urusan Keuangan
										Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	
										Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	
										Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	
								PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	Urusan Keuangan
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	Urusan Keuangan
										Jumlah Data Target Retribusi Daerah yang diriview (Data)	
										Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	
										Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	
										Rasio Kepatuhan Pajak (Rasio)	
										Tingkat Pertumbuhan Objek Pajak daerah (%)	
										Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah (%)	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi Komponen Perencanaan Kinerja		Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Tindak Lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Fasilitasi Gubernur (%)	Urusan Perencanaan
					Nilai Evaluasi Komponen Pengukuran Kinerja					Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	
										Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah Dengan Tingkat Capaian minimal 80% (%)	
				Menguatnya transformasi digital tata kelola pemerintahan	Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Pengembangan smart city dan inovasi daerah	Pengembangan aplikasi Tulungagung Smart City (Geo Smart)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan Audit Teknologi Digital (%)	Urusan Komunikasi Dan Informatika
							Pengembangan co-working space			Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Teknologi Digital (%)	
										Persentase Aplikasi Digital Pemerintah Daerah yang diaudit (%)	
										persentase infrastruktur digital pemerintah yang diaudit (%)	
										Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	
							Peningkatan inovasi			Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	Urusan Penelitian

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome Strategis Lintas Sektor	Indikator Tujuan, Sasaran, dan Outcome Strategis Lintas Sektor	Program Prioritas Daerah					
						Program Prioritas	Rincian Program Prioritas	Program Nomenklatur	Outcome Program Nomenklatur	Indikator outcome	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							perangkat daerah (Satu PD satu inovasi) setiap tahun	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	Dan Pengembangan
										Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	
										Jumlah Stakholder yang terlibat dalam jejaring inovasi daerah (Nilai)	
										Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	
										Rata-rata Kematangan Inovasi Daerah (Skor)	
								PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Penelitian dan Pengambangan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	Urusan Penelitian Dan Pengembangan
										Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	
										Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	
										Persentase Riset Yang Berkualitas (%)	
										Persentase Riset yang Didiseminasikan (%)	
							Payanan Publik Prima	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	Kecamatan
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terkelolanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai Standar	Persentase kendala sistem informasi Administrasi Kependudukan lokal yang tertangani (%)	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Administrasi Umum dan Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	Sekretariat Daerah
										Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum dan Pelayanan Publik (%)	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.6.2 Penyandingan Program Prioritas dengan Program Nomenklatur

Program prioritas daerah dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik dan politik. Program prioritas tersebut kemudian dikanalisasi sesuai nomenklatur program dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5/3406 Tahun 2024. Hal tersebut bertujuan untuk sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program pemerintah daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Berikut daftar program prioritas daerah dengan program nomenklatur RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029. Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab program prioritas memiliki peran sebagai koordinator dan tetap menjaga kolaborasi dengan perangkat daerah atau pemangku kepentingan lain.

Tabel 3. 16 Penyandingan Program Prioritas Daerah dengan Program Nomenklatur

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pembangunan agro terintegrasi	Pembangunan sumur pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	Urusan Pertanian
				Luas lahan sawah yang terairi oleh irigasi (%)	
			Meningkatnya prasarana peternakan dan Kesehatan hewan yang berfungsi optimal	Persentase Prasarana Peternakan Keswan yang berfungsi optimal (%)	
	Pengembangan teknologi tepat guna pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya budidaya peternakan yang sesuai standar	Persentase Budidaya Peternakan yang Memenuhi Standar (%)	Urusan Pertanian
	Mekanisasi pertanian		Meningkatnya optimalisasi sarana pertanian	Peningkatan Produksi tanaman Pangan (%)	
	Menjamin ketersediaan pupuk			Peningkatan Produksi Tanman Hortikultura (%)	
	Menjamin ketersediaan bibit			Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan (%)	
				Ratio pemanfaatan sarana pertanian terhadap luasan lahan pertanian (%)	
	Pengembangan teknologi tepat guna perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemanfaatan Benih Berkualitas, dan Pengendalian Kematian Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Urusan Kelautan Dan Perikanan
				Persentase Kematian Ikan (%)	
				Persentase Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Benih ikan berkualitas (%)	
				Persentase Pembudidaya Ikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pakannya (%)	
				Produksi Perikanan Budidaya (%)	
	Pengembangan teknologi tepat guna peternakan dan kesehatan hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta berkembangnya unit usaha peternakan yang memenuhi standar higiene dan sanitasi	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	Urusan Pertanian
				Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	
				Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan (%)	
				Persentase Penigkatan Unit Usaha Peternakan yang Memenuhi Standar Higiene Sanitasi (%)	
	Peningkatan investasi agroindustri	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Investasi (Miliar) (Angka)	Urusan Penanaman Modal
	Pengembangan agroindustri	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (%)	

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		PEMBANGUNAN INDUSTRI		Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (%)	Urusan Perindustrian
				Persentase produk IKM yang berkualitas (%)	
				Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor (%)	
	Pembangunan pasar ikan Bandung, Rehabilitasi pasar Bandung	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	Urusan Perdagangan
				Presentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dalam kondisi layak (%)	
Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Taman Bumi (Geopark)	Sarana dan Prasarana di pusat pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Nilai Survey Kepuasan Wisatawan (Nilai)	Urusan Pariwisata
				Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	
	Pengembangan pariwisata berbasis taman bumi (geopark)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisata (Orang)	Urusan Pariwisata
	Pomosi pariwisata dan kebudayaan hingga level global			Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	
				Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing [hotel Berbintang non Bintang] (%)	
Peningkatan efisiensi investasi	Kemudahan perizinan investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perizinan Berusaha (Indeks)	Urusan Penanaman Modal
				Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	
	Penetapan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, agroindustri, perdagangan dan pariwisata	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi/Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah dan Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rekomendasi Strategi/Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti (%)	Urusan Perencanaan
				Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Terverifikasi (%)	
Pemberdayaan desa	Model pembangunan kolaboratif desa-kabupaten	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Skor Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa (Indeks)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Peningkatan honor/insentif RT/RW			Skor Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa (Indeks)	
	Tali asih purna kepala desa			Persentase BUMDesa dengan status Maju (%)	

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur perekonomian	Pembangunan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya kawasan sawah yang terfasilitasi jaringan irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase) Persentase Kondisi Irigasi Baik Kewenangan Kab/Kota (%)	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Infrastruktur perkim di pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh di bawah 10 hektar di luar SK kawasan kumuh yang ditangani (%)	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan infrastruktur air bersih untuk semua masyarakat Pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah rawan kekeringan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Infrastruktur jalan ke pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatkannya jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase jalan yang mendapat penanganan (%)	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	
	Pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh di bawah 10 hektar di luar SK kawasan kumuh yang ditangani (%)	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	peningkatan konektivitas ke JLS dan Selingkar Wilis	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan, Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi (%)	Urusan Perhubungan

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Persentase pengajuan rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti (%)	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana	Kebijakan pengurangan risiko dan dampak bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
				Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	
				Prosentase Pelayanan Penanggulangan dan Penanganan Bencana (%)	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terselenggaranya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase aparatur pemadam kebakaran yang memiliki kompetensi (%)	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Damkar)
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan (%)	
				Persentase bangunan gedung yang memiliki proteksi kebakaran sesuai standart (%)	
				Persentase tindak lanjut permintaan pemadaman,penyelamatan yang ditindaklanjuti (%)	
	Konservasi mata air berbasis pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	Urusan Lingkungan Hidup
	Penghijauan berbasis komunitas	PROGRAM PENGELOLAAN	Terselenggaranya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola (%)	Urusan Lingkungan Hidup

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	Penanganan sampah kolaboratif desa-kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	Urusan Lingkungan Hidup
	Penambahan armada pengangkut sampah				
Pendidikan merata, berkualitas dan berkarakter	Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 1 dan 7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peserta Didik Kurang Mampu yang Melanjutkan Pendidikan (%)	Urusan Pendidikan
	Tidak ada pungutan sekolah di SD dan SMP			Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	
	Layanan internet wifi di seluruh SD dan SMP			Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	
	Peningkatan sarpras semua sekolah			Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	
	Mendukung makan bergizi gratis di sekolah			Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	
	Pelatihan guru			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	
				Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 13 - 15 (%)	
				Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 12 (%)	
	Pendidikan karakter	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal (%)	Urusan Pendidikan
	Peningkatan cakupan layanan bus sekolah gratis (31 bus)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan, Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi (%)	Urusan Perhubungan
	Peningkatan kerjasama mobil penumpang umum (MPU) sekolah gratis				
	Honorarium guru TPQ/Madin				

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Hibah kelompok keagamaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (%)	Sekretariat Daerah
	Peningkatan pembinaan mental spiritual di masyarakat				
	Meningkatkan tunjangan guru honorer	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	Urusan Pendidikan
Kesehatan untuk semua masyarakat	Universal health coverage (UHC)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka populasi bebas Penyakit Menular (%)	Urusan Kesehatan
	Pelayanan kelas 3 gratis berkualitas			Persentase Puskesmas mencapai target kekebalan kelompok (%)	
	Memberikan makan bergizi ke ibu hamil			Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular (%)	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	
				Angka Kematian Ibu (Angka)	
				Angka Kematian Bayi (Angka)	
				Jumlah Kematian Ibu (Orang)	
				Jumlah Kematian Balita (Orang)	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	
				Persentase cakupan penerima PKG (%)	
				Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	
				Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	
				Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
				Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	
	Memberikan makan bergizi ke ibu hamil	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	Urusan Kesehatan

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	kesehatan, dan makanan minuman		
	Pencegahan dan Penurunan Prevelensi Stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok Tribina Paripurna (%)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah UPPKA yang Terbentuk (Kelompok)	
				Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	Urusan Kesehatan
				Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tatanan (%)	
Pelestarian kebudayaan	Penampilan kesenian lokal di ruang publik dan tempat wisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan pelaku Seni Budaya (%)	Urusan Kebudayaan
				Persentase warisan budaya yang dilestarikan (%)	
				Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Nilai Survey Kepuasan Wisatawan (Nilai)	Urusan Pariwisata
				Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	
Penguatan harmoni sosial	Kader siaga keamanan dan ketertiban	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (%)	
				Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (%)	
				Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dapat Dicegah (%)	
				Persentase Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	
				Jumlah Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Berulang (%)	

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perlindungan dan jaminan sosial	Satu data kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	Urusan Sosial
	Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dengan prioritas lansia dan disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan Rehabilitas Sosial dasar diluar panti (%)	Urusan Sosial
	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka populasi bebas Penyakit Menular (%)	Urusan Kesehatan
				Persentase Puskesmas mencapai target kekebalan kelompok (%)	
				Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular (%)	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	
				Angka Kematian Ibu (Angka)	
				Angka Kematian Bayi (Angka)	
				Jumlah Kematian Ibu (Orang)	
				Jumlah Kematian Balita (Orang)	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	
				Persentase cakupan penerima PKG (%)	
				Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	
				Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	
				Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
				Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	
	Bantuan biaya pendidikan SD dan SMP untuk siswa miskin	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peserta Didik Kurang Mampu yang Melanjutkan Pendidikan (%)	Urusan Pendidikan
				Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	
				Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	
				Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 13 - 15 (%)	
				Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 12 (%)	
	Bantuan biaya pendidikan SMA untuk siswa miskin	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (%)	Sekretariat Daerah
	Beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi				
	Bantuan biaya masuk sekolah untuk siswa kelas 10				
Peningkatan serapan tenaga kerja	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten (%)	Urusan Tenaga Kerja
				Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Informasi Lowongan Kerja (%)	
				Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%)	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi (%)	Urusan Tenaga Kerja
				Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama pemagangan (Perusahaan)	
				Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	
				Jumlah Peserta Pemagangan (Orang)	

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pemberdayaan wirausaha dan UMKM	Sekolah wirausaha tangguh	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
				Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kepeloporan dan kewirausahaan (Orang)	
				Persentase organisasi kepemudaan yang yang meningkat kapasitas kompetensinya (%)	
	Subsidi bunga Usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Membuat laporan keuangan usaha mikro sesuai ketentuan (%)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Persentase Peningkatan Klastersasi Usaha Mikro (%)	
				Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang memiliki legalitas (%)	
				Persentase usaha mikro yang meningkat kompetensinya (%)	
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	
				Rasio usaha mikro yang ber NIB pada level Kabupaten (Rasio)	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase kompetensi SDM Koperasi yang meningkat (%)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Peningkatan Permodalan Koperasi (%)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Penguatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Pangan Berkelanjutan	Peningkaatan akses program ketahanan dan kemandirian pangan serta berorientasi pada keandalan terhadap perubahan iklim	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terkendalinya Harga Pangan Masyarakat	Rasio fluktuasi harga konsumen dengan harga acuan (%)	Urusan Pangan
		PROGRAM PENANGANAN	Menurunnya Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	Urusan Pangan

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		KERAWANAN PANGAN		Rasio desa tahan pangan (%)	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Cadangan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	Urusan Pangan
				Rasio stok pangan dengan standard kebutuhan (%)	
Meningkatnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Barang	Pengembangan pasar di Pusat Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	Urusan Perdagangan
				Presentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dalam kondisi layak (%)	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	Urusan Perdagangan
				rasio selisih harga di tingkat produsen dan konsumen (%)	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Perekonomian dan Pembangunan (%)	Sekretariat Daerah
Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	Perbaikan tata kelola kebijakan dan manajemen ASN berbasis sistem merit	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	Urusan Kepegawaian
	TPP berdasar capaian kinerja organisasi			Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (Indeks)	
	TPP P3K			Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)	
				Persentase Pegawai dengan Nilai Kinerja Minimal Baik (%)	
	Pencegahan korupsi di semua lini		Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau	Persentase Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal (%)	Inspektorat

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Persentase Pengawasan yang Dilakukan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)	
				Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Nilai Komponen Dukungan Pengawasan (Nilai)	Inspektorat
				Jumlah Unit Kerja yang Ditetapkan sebagai Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas WBK/WBBM (Unit Kerja)	
				Nilai Komponen Peran dan Layanan Pengawasan (Nilai)	
	Optimalisasi PAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	Urusan Keuangan
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	
				Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	Urusan Keuangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	Urusan Keuangan
				Jumlah Data Target Retribusi Daerah yang diriview (Data)	
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	
				Rasio Kepatuhan Pajak (Rasio)	
				Tingkat Pertumbuhan Objek Pajak daerah (%)	
				Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah (%)	

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Tindak Lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Fasilitasi Gubernur (%)	Urusan Perencanaan
				Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	
				Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah Dengan Tingkat Capaian minimal 80% (%)	
Pengembangan smart city dan inovasi daerah	Pengembangan aplikasi Tulungagung Smart City (Geo Smart)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan Audit Teknologi Digital (%)	Urusan Komunikasi Dan Informatika
	Pengembangan co-working space			Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Teknologi Digital (%)	
				Persentase Aplikasi Digital Pemerintah Daerah yang diaudit (%)	
				persentase infrastruktur digital pemerintah yang diaudit (%)	
				Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	
	Peningkatan inovasi perangkat daerah (Satu PD satu inovasi) setiap tahun	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	Urusan Penelitian Dan Pengembangan
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	
				Jumlah Stakholder yang terlibat dalam jejaring inovasi daerah (Nilai)	
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	
				Rata-rata Kematangan Inovasi Daerah (Skor)	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Penelitian dan Pengambangan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	Urusan Penelitian Dan

Program Prioritas Daerah					
Program Prioritas	**Rincian Program Prioritas**	**Program Nomenklatur**	**Outcome Program Nomenklatur**	**Indikator outcome**	**Urusan**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	Pengembangan
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	
				Persentase Riset Yang Berkualitas (%)	
				Persentase Riset yang Didiseminasikan (%)	
	Payanan Publik Prima	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	Kecamatan
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terkelolanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai Standar	Persentase kendala sistem informasi Administrasi Kependudukan lokal yang tertangani (%)	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Administrasi Umum dan Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	Sekretariat Daerah
				Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum dan Pelayanan Publik (%)	

3.7 Program Strategis Nasional

Program strategis nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah dan dilaporkan melalui laporan kinerja program strategis nasional setiap bulan Juni untuk kinerja semester pertama dan bulan Januari untuk kinerja semester kedua.

Berikut daftar program strategis nasional:

1. Penanggulangan kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
   a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
   b. Sekolah Rakyat; dan
   c. Pembangunan 3 juta rumah.
2. Ketahanan pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah
3. Kesehatan untuk semua dengan proyek/kegiatan:
   a. Jaminan kesehatan nasional, dan
   b. Makan bergizi gratis
4. Perluasan akses pendidikan dengan proyek/kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah
5. Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan:
   a. Pengendalian inflasi;
   b. Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, dan
   c. Kemudahan perizinan di daerah
6. Program strategis nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

3.8 Dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN 2025-2029

Program prioritas di Kabupaten Tulungagung juga turut serta dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tahun 2025-2029. Berikut merupakan rincian dukungan program terhadap proyek strategis nasional.

Tabel 3. 17 Dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN 2025-2029

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
Makan Bergizi Gratis				
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional (koordinator)	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat 3. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
				5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 6. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
Swasembada Pangan				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Nasional	Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7	Layanan Irigasi Pendukung Pangan Nasional	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	Kementerian Pertanian, Swasta	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Swasembada Energi				
9	Bioetanol (Berbasis Tebu)	Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan	Dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Digital				
10	Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash	Jawa Timur	BUMN, Swasta	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
11	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Perumahan dan Permukiman				
12	Pembangunan 3 juta rumah	nasional	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
			(koordinator)	

Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 12 program prioritas nasional (PSN) yang berlokasi secara nasional dan Provinsi Jawa Timur. Untuk mendukung program prioritas nasional (PSN), Kabupaten Tulungagung menyandingkan dengan program nomenklatur yang berkaitan. Adapun jumlah program yang mendukung sebanyak 20 program. Daftar program tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan program di level Renstra OPD.

3.9 Dukungan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional 2025–2029, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Adapun penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama dan program prioritas daerah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 18 Dukungan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	OPD Pengampu
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Pengambangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Prioritas Nasional 2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN
3	Pengembangan Pangan Hewani		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
5	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6	Peningkatan Penyediaan Energi		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	SEKRETARIAT DAERAH
7	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU ERBARUKAN	SEKRETARIAT DAERAH
8	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	SEKRETARIAT DAERAH
9	Konservasi Sumber Daya Air		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	OPD Pengampu
	Berketahanan Iklim Berbasis CWIS			
12	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
19	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
20	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
21	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
23	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
24	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
25	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
26	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
27	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g.pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	OPD Pengampu
	kesejahteraan berbasis kinerja			
28	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
29	Penurunan Kematian Ibu dan Anak		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
30	Pencegahan dan Penurunan Stunting		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
31	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
32	Penuntasan TBC		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
33	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
34	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
35	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
36	Investasi pelayanan kesehatan primer		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
37	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
38	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
39	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
40	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PENDIDIKAN
42	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Prioritas Nasional 5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
43	Pengembangan Hilirisasi Kelapa		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
44	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	OPD Pengampu
45	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
46	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
47	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
48	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa		PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
49	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prioritas Nasional 7	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
50	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
51	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
52	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
53	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
54	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
55	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
56	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan prioritas utama RPJMD 2025-2029 terdiri dari 56 prioritas, yang kemudian di klusterisasi menjadi 8 prioritas nasional. Untuk mendukung prioritas nasional tersebut, Kabupaten Tulungagung menyandingkan dengan program nomenklatur dan perangkat daerah pengampu. Adapun jumlah program yang mendukung sebanyak 56 program. Daftar program tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan program di level Renstra OPD.

3.10 Dukungan Program Prioritas RPJMD Jawa Timur 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara Provinsi Jawa Timur dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Adapun penyelarasan Program Kerja Prioritas Jawa Timur terhadap program unggulan daerah dituangkan sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Dukungan Program Program Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
Jatim Sejahtera	1	**PKH Plus**	Merupakan bantuan sosial dengan sasaran lanjut usia dengan umur 70 tahun ke atas dari keluarga peserta PKH dan memperluas cakupan PKH plus tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan uang tunai pada Lansia tetapi diperluas perempuan kepala rumah tangga. Tidak hanya bantuan uang tunai tetapi diperluas pada makanan bergizi dan vitamin (makan siang gratis bagi Lansia, difabel dan perempuan kepala rumah tangga)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	2	**Klinik BUMDESA**	Program peningkatan kapasitas manajerial, inovasi bisnis, dan pengembangan usaha BUMDesa, sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi desa.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
	3	**Desa Devisa**	Meningkatkan perekonomian pedesaan dengan memanfaatkan potensi lokal dan menghubungkannya dengan pasar internasional melalui penciptaan desa desa mandiri yang mampu menghasilkan produk unggulan bernilai ekspor, sehingga dapat berkontribusi langsung pada peningkatan devisa negara.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	4	**Jatim Puspa Plus (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan)**	Program pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian stimulus modal usaha . Sasaran program diperluas tidak hanya bagi Graduasi PKH saja, namun juga menyasar dua puluh persen penduduk berpendapatan terendah dengan berfokus pada sektor usaha yang mendukung ketahanan pangan.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	5	**Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)**	Merupakan program bantuan sosial non tunai dengan sasaran penyandang disabilitas dalam kategori berat yang tidak dapat melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari dan atau sepanjang	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
			hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri dan mengalami kesulitan mengakses pelayanan publik dan berakibat tidak terpenuhinya hak hidup penyandang disabilitas.	
	6	**Bantuan Sosial bagi Miskin Ekstrem**	Merupakan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif dengan sasaran penerima manfaat yang masuk dalam data P3KE yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	7	**Keluarga Penerima Manfaat Jawa Timur Wani Sejahtera (KPM JAWARA)**	Merupakan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif dengan sasaran Laki-Laki Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin yang sudah memiliki embrio usaha dan masuk dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau yang dalam proses pengusulan atau yang akan diusulkan.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	8	**Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Wani Sejahtera (PUTRI JAWARA)**	Merupakan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif dengan sasaran Perempuan Kepala Keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga atau membantu perekonomian keluarga Miskin.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	9	**Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Wani Sejahtera (PPKS JAWARA)**	Merupakan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif dengan sasaran klien UPT (yang telah menerima latihan kemandirian sosial di dalam panti) dan Eks Klient yang memiliki sertifikat kelulusan dari UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan masih aktif menjalankan usaha.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	10	**Elektrifikasi**	Merupakan intervensi strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur dasar listrik Masyarakat terutama bagi Rumah Tangga Miskin melalui sambungan listrik gratis	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	11	**Rutilahu (Rumah Tinggal Layak Huni)**	Merupakan program penyediaan Rumah Tinggal Layak Huni berupa perbaikan rumah tidak layak huni yang mendukung pengentasan kemiskinan dengan bekerja sama dengan Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V Surabaya. Sasaran Program Rutilahu adalah rumah tangga miskin yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	12	**Jambanisasi**	Merupakan program penyediaan jamban sehat keluarga yang mendukung pengentasan kemiskinan serta peningkatan akses sanitasi yang layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
			dengan bekerja sama dengan Kodam V/Brawijaya. Sasaran Program Jambanisasi adalah rumah tangga miskin diutamakan di daerah yang terdapat wabah diare atau termasuk di 18sset18t permukiman kumuh.	
	13	**Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh terhadap satu delineasi Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10 Ha – 15 Ha) yang dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan dan memperbaiki kualitas fungsi infrastruktur permukiman melalui peningkatan infrastruktur indikator kumuh berupa jalan, drainase, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), persampahan, air limbah, air minum dengan berkolaborasi multisektor.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	14	**Peti Koin Bermantra**	Peti Koin Bermantra merupakan program pemberdayaan ekonomi kolaboratif yang berfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat miskin produktif di sektor pertanian pedesaan. Melalui optimalisasi komoditas unggulan lokal yang memiliki potensi pasar, program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mendorong kemandirian ekonomi di pedesaan.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	15	**Pengurangan Beban 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meliputi : anak terlantar, Disabilitas, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan/Pengemis.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	16	**Pemberdayaan BUMDesa**	Fasilitasi pengembangan usaha bagi BUMDesa melalui pemberian stimulus permodalan untuk membangun ekosistem jejaring usaha sehingga mampu mendorong dan memberikan dampak secara langsung bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
			pengelolaan aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya	
	17	**Desa Berdaya**	Program yang dikhususkan untuk menemukan, meningkatkan dan memperkuat jejaring perekonomian desa dengan pengembangan desa tematik wisata dan ketahanan pangan melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif berbasis BUM Desa, dalam rangka mempertegas status desa mandiri	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	18	**Jatim Infinity**	Merupakan kegiatan untuk meningkatkan konektivitas internet dengan mengurangi area blankspot di Jawa Timur, melalui pemberian perangkat internet satelit bagi desa yang memiliki area blankspot.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Jatim Kerja	1	**Millenium Job Centre**	Memperluas cakupan dan sasaran Millenium Job Centre dengan menjangkau kelompok millennial dan GenZ dengan menjadi wadah bagi talenta-talenta dan berbagai mitra yang menyediakan kerja.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	2	**EkoTren-One Pesantren One Product**	Program pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pondok pesantren melalui pendekatan holistik dan terintegrasi. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem ekonomi pesantren yang inklusif dan berkelanjutan dengan tiga pilar utama: Santripreneur, yang mencetak santri sebagai wirausahawan muda inovatif; Pesantrenpreneur, yang mengembangkan pesantren sebagai pusat ekonomi produktif dengan manajemen profesional; serta Sosiopreneur, yang mendorong usaha berbasis lingkungan dan keberlanjutan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	3	**YC2 (Youth Creativepreneur Centre)**	Youth Creativepreneur Centre atau Pusat Wirausaha Kreatif Pemuda Jawa Timur merupakan lembaga yang fokus pada menciptakan dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda, khususnya dalam bidang UMKM pada sektor ekonomi kreatif, dengan menyediakan fasilitas seperti pelatihan, mentoring, permodalan dan akses ke jaringan bisnis yang dapat	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
			membantu para wirausaha muda mengembangkan ide-ide kreatif mereka menjadi usaha yang berkelanjutan.	
	4	**Job Market Fair**	Bursa kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mempertemukan perusahaanperusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pencari kerja di wilayah Provinsi Jawa Timur Job Fair atau bursa kerja yang dilaksanakan di ruang publik serta di 16 UPT BLK dalam bentuk Mini Job Fair.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	5	**Pelatihan Kerja dan Revitalisasi UPT BLK & MTU**	Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu pencari kerja yang bersertifikat kompetensi. Jenis pelatihan kerja yang dilaksanakan adalah Pelatihan kerja Institusional dan Non Institusional. Pelatihan kerja Institusional diselenggarakan di 16 UPT Balai Latihan Kerja Provinsi Jawa Timur dan dibagi menjadi Pelatihan kerja reguler serta pelatihan kerja intensif yang menambahkan materi softskill di dalamnya. Sedangkan pelatihan kerja non institusional menggunakan sarana Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau pencari kerja yang membutuhkan pelatihan kerja bersertifikasi kompetensi yang sulit menjangkau 16 UPT BLK Jawa Timur. Revitalisasi UPT BLK dan MTU merupakan program untuk menunjang pelatihan yang efektif dan berkualitas, dalam bentuk revitalisasi kurikulum, kerjasama pelaksanaan pelatihan kerja, keahlian instruktur serta sarana dan prasarana UPT BLK Jawa Timur sebagai upaya memberikan fasilitas pelatihan kerja yang sesuai dengan dunia industri, sehingga diharapkan lulusan pelatihan kerja dapat diterima di pasar kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	6	**Promosi Dagang dan Investasi**	Merupakan kegiatan promosi produk unggulan melalui Misi Dagang, Pameran Dagang serta kegiatan promosi lainnya dan promosi proyek investasi potensial baik di dalam maupun luar negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	7	**SALEHA (Sadar Legalitas Berusaha)**	Merupakan kegiatan sosialisasi perizinan, penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi dan Nomor lnduk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat secara Gratis	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL ROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
	8	**Stabilisasi Harga**	Merupakan kegiatan strategis dalam rangka mendukung pengendalian inflasi melalui pasar murah, pemantauan harga dan kegiatan strategis lainnya	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	9	**Koperasi Sektor Riil**	Guna menciptakan ekosistem koperasi yang adaptif dan kompetitif, fokus utama pengembangan koperasi mencakup beberapa aspek strategis diantaranya modernisasi koperasi melalui digitalisasi dan tata kelola yang profesional, pemberdayaan usaha koperasi agar lebih produktif dan berorientasi pasar, serta penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	10	**Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) dan Dana BErgulir (DAGULIR)**	Untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui skema pembiayaan yang lebih terjangkau, berkelanjutan, serta berorientasi pada penguatan kapasitas usaha, Prokesra berperan dalam penyediaan kredit bersubsidi dengan suku bunga yang cukup terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Demikian juga dengan Dagulir yang mengadopsi mekanisme perputaran dana dan memungkinkan keberlanjutan pembiayaan bagi lebih banyak para pelaku UKM. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis keberlanjutan, program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UKM, mempercepat pertumbuhan usaha, serta berkontribusi pada penciptaan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan resilien di Jawa Timur.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	11	**Klinik Investasi**	Merupakan kegiatan untuk mengakselerasi investasi melalui pendampingan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), percepatan penyelesaian penanaman modal serta penguatan iklim investasi	ROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	12	**Ekosistem Halal**	Program ini berfokus pada penguatan rantai nilai halal, mulai dari produksi, sertifikasi, distribusi, hingga pemasaran produk dan jasa halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Ekosistem Halal juga berperan dalam meningkatkan daya saing produk halal, memperluas akses pembiayaan syariah, serta memperkuat regulasi dan infrastruktur pendukung seperti kawasan industri halal dan laboratorium sertifikasi halal.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
Jatim Akses	1	**Trans Jatim Plus**	Penyediaan layanan transportasi publik yang efisien, terjangkau, nyaman bagi masyarakat, dan terintegrasi dengan simpul transportasi lainnya. Dalam pengembangannya akan dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan transportasi terpadu lintas batas wilayah.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	2	**Trans Laut Jatim**	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa terutama pada daerah kepulauan, serta pembangunan/peningkatan infrastruktur pelabuhan dalam mendukung rantai pasok dan logistik di Jawa Timur.	-
	3	**Dukungan Percepatan Pembangunan Pansela (Jalan Lintas Pantai Selatan)**	Dukungan Percepatan Pembangunan jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas wilayah salah satunya melalui mekanisme pemberian bantuan keuangan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	4	**Mudik Balik Gratis**	Penyediaan layanan angkutan lebaran bagi masyarakat pada saat momen mudik balik guna membantu kelancaran mobilitas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	5	**Pemenuhan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan**	Pemenuhan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas Jalan Provinsi untuk dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	6	**Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang**	Peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang melalui pembangunan palang pintu Kereta Api (KA) dan Pos Jaga, serta peningkatan kapasitas SDM bagi penjaga palan pintu KA	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	7	**Penanganan Jalan & Jembatan**	Penanganan jalan dan jembatan kewenangan provinsi untuk mewujudkan jalan aman dan berkeselamatan serta dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Jatim Agro	1	**Youth Agrifuture-Hub**	Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memfasilitasi dan mendorong petani muda (GenZ dan Milenial) melalui pemanfaatan teknologi guna menghasilkan produk pertanian berkualitas dan mampu berdaya saing, menumbuhkembangkan kewirausahaan muda pertanian, serta menciptakan pertanian maju, mandiri, modern, dan berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	2	**Hilirisasi dan Korporasi Pertanian (Agri-Industri Pedesaan)**	Meningkatkan potensi sektor pertanian, dari hulu hingga hilir, guna menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses hilirisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
			ini melibatkan transformasi produk pertanian mentah menjadi produk yang lebih bernilai melalui berbagai tahapan pengolahan, distribusi, dan pemasaran	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	3	**Jatim Agro-Hub (Lumbung Pangan)**	Memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat di Jawa Timur, khususnya bagi keluarga kurang mampu dan daerah-daerah yang mengalami kekurangan pangan. Program ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan mendukung petani serta produsen pangan di daerah.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4	**Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)**	Penyelenggaraan sistem irigasi berbasis peran serta masyarakat petani secara partisipatif mulai perencanaan hingga pelaksanaan dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	5	**Penanganan Banjir**	Pelaksanaan pengendalian banjir pada 5 (lima) wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Timur, yaitu Wilayah Sungai (WS) Madura-Bawean, Welang-Rejoso, Pekalen-Sampean, Bondoyudo-Bedadung, dan Baru-Bajulmati.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	6	**Asuransi Petani**	Membentengi usaha petani pangan dari kerugian besar dari risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan bencan pertanian lain. Program ini merupakan langkah mitigasi usaha pertanian pangan untuk melindungi petani dan menjaga kesejahteraan petani pangan.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	7	**Kemandirian Pangan**	Memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman bagi seluruh masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengendalikan harga pangan agar lebih terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan produksi pangan lokal, serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, komunitas, dan daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Jatim Cerdas	1	**Jatim World Class Education**	Menghadirkan talenta-talenta maupun Universitas berkelas dunia untuk memberikan pendidikan bertaraf internasional di Jawa Timur. Sekaligus meningkatkan jumlah beasiswa internasional yang berpotensi untuk dimanfaatkan pelajar unggul dan berprestasi di Jatim untuk sekolah ke luar negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	2	**Beasiswa Santri Unggul**	Beasiswa bagi santri unggul. dan berprestasi untuk bidang kedokteran, science, dan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
			entrepreneur dalam mendukung bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045	
	3	**East Java Centre of Literacy**	Merevitalisasi perpustakaan di Jawa Timur menjadi pusat Literasi yang dinamis dan multifungsi, tidak hanya sebagai tempat membaca buku, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	4	**BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan)**	Program penyediaan pendanaanbiaya penunjang operasional personalia dan non personalia bagi SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri dan Swasta	-
	5	**Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu/ Pengimbas**	Pembentukan sekolah pengampu dalam bentuk pembangunan laboratorium /studio praktek bersama	-
	6	**Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BOSDA MADIN)**	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dengan Memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi Santri/Warga Belajar/Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho, Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren, Ustadz/Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD /MI/Salafiyah Ula/SMP/MTs/Salafiyah Wustho Swasta dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	7	**Bantuan SMK Jurusan Prioritas**	Program bantuan sarana prasarana kepada SMK jurusan prioritas untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar	-
	8	**Pendidikan Kesetaraan vokasi (kejar paket)**	Program pendidikan nonformal yang setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA sebagai jalur alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal serta adanya tambahan keterampilan Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs, dan Program Paket C setara SMA/MA yang dapat diselenggarakan melalui SKB, PKBM, Kelompok Belajar, Majelis Taklim atau satuan pendidikan sejenis lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	9	**Double Track**	Program yang diberikan kepada sekolah yang menyelenggarakan dua program pendidikan, yaitu pendidikan formal dan program keterampilan kewirausahaan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan ketrampilan untuk memasuki dunia kerja bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.	-

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
	10	**(*Millennial Incubation for Entrepreneurs hip and Innovation)* MILEA**	MILEA (Millennial Incubation for Entrepreneurship and Innovation) Program ini untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda atau milenial dengan Tujuan untuk meningkatkan kompetensi, minat, dan bakat siswa SMK/SMA di Jawa Timur dalam bidang kewirausahaan	-
	11	**Sekolah Boarding**	Program bantuan operasional sekolah Taruna yang ada di Jawa Timur	-
	12	**Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan**	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	13	**Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap**	Pemberian tambahan Honor kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	14	**Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Guru Non ASN jenjang TK/SD/SMP**	Pemberian tambahan Honor kesejahteraan bagi Guru Non ASN jenjang TK/SD/SMP	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	15	**Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN**	Pemberian tambahan Honor kesejahteraan bagi Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN dan Honor Kinerja GuruNon ASN jenjang TK/SD/SMP	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	16	**Cerdas Digital (Cerdig)**	Kegiatan ini adalah upaya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat melalui Bimtek digital yang meliputi kemampuan digital, keamanan siber, pengelolaan website, pemanfaatan AI, pengelolaan konten, literasi keuangan digital, dan pemanfaatan data. Kegiatan ini bersifat: inklusi (menyentuh semua lapisan Masyarakat termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) serta dekat dengan masyarakat.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	17	**Bantuan Pendidikan Siswa Keluarga Prasejahtera**	Pemberian bantuan pendidikan bagi murid keluarga prasejahtera yang tidak diterima di sekolah negeri untuk dapat melanjutkan Pendidikan di sekolah swasta dengan syarat dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) dan tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang sekolah menengah Atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah luar biasa (SLB)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Jatim Sehat	1	**Jatim World Class Hospital Collaboration**	Melanjutkan modernisasi fasilitas dan layanan kesehatan di rumah sakit Provinsi Jawa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
			Timur dengan berkolaborasi bersama rumah sakit kelas dunia untuk menghadirkan teknologi canggih seperti electrophysiology lab, cathlab modern, genomic medicine dan roboticsurgery. Kolaborasi ini juga mencakup program International Sister Hospital yang akan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan ke level dunia, namun tetap dapat diakses oleh seluruh warga Jatim.	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	2	**Kesehatan Inklusif, Preventif dan Aksesibel (KIPA)**	Optimalisasi akses Layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Jatim melalui berbagai pendekatan dengan mengusahakan tercapainya UHC serta memastikan kemudahan akses Layanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan bagi kader kesehatan dan pos kesehatan desa. a. Pelayanan Kesehatan Gratis & berkualitas (TANTISTAS) b. Desa Sehat c. Pelayanan Kesehatan Bergerak d. Penugasan Dokter Spesialis di Koridor Madura dan Kepulauan e. Penugasan Dokter Umum di Puskesmas Kepualauan f. SAJADAH (Santri Jatim Sehat dan Berkah) g. KOPIPU (Konseling dari pintu ke pintu) h. Dukungan pemeriksaan kesehatan gratis (PKS)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	3	**Buaian (Bunda Anak Impian)**	BUAIAN telah sukses menurunkan angka kematian ibu dan anak di Jatim melalui pendampingan kepada ibu hamil risiko tinggi untuk menjaga kesehatan ibu hamil hingga melahirkan. Layanan ini tentunya akan ditingkatkan plus menjadi tambahan asupan gizi seimbang dan pemeriksaan kesehatan (Checkup Gratis) bagi anak, balita, dan ibu hamil yang beresiko tinggi.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	4	**Mental Wellness & Happiness Service**	Jatim Mental Wellnes & Happiness Service merupakan one stop service dan support system yang menyediakan sesi konseling, seminar dan workshop yang berhubungan dengan Kesehatan mental dan pengelolaan stress yang ditujukan kepada kelompok yang rentan megalami keguncangan mental (Siswa SMA-SMK, ASN) dalam koordinasi Pemprov Jatim.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
Jatim Berkah Amanah	1	**Birokrasi Transformatif 4.0**	a. Ekosistem Majapahit Digital (MAJADIGI) Ekosistem digital yang mengintegrasikan layanan publik dan layana administrasi pemerintahan secara aman dan berbasis satu data	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			b. Peningkatan Kapasitas ASN Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan pada saat ini perlu beradaptasi untuk memanfaatkan teknologi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Adapun upaya peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaran negara, antara lain layanan kepegawaian dan manajemen talenta ASN berbasis sistem merit berbasis teknologi digital, peningkatan Kapasitas dan Sistem manajemen Pengembangan Kompetensi ASN berbasis digital	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			c. Peningkatan Layanan dan Transparansi Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi digital. Adapun upaya peningkatan layanan dan transparasi pelayanan birokrasi pemerintahan antara lain: Sistem tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital, Sistem pelaksanaan reformasi birokrasi, Pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang sudah status inkrah	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
Jatim Harmoni	1	**SENIWARIS (Sentra Penguatan Seniman, budayawan & warisan adat)**	Memperkuat peran kelompok seniman, budayawan, dan masyarakat adat dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya Jawa Timur. Program ini berfokus pada pemberdayaan komunitas budaya melalui	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
			fasilitasi, peLatihan, akses ke sumberdaya, dan peningkatan jaringan kolaborasi untuk memastikan keberlanjutan seni, budaya, dan tradisi lokal.	
	2	**Kenduri Kebhinekaan**	Memperkuat hubungan antar umat beragama, mempromosikan toleransi, serta membangun komunitas yang harmonis dan inklusif melalui forum antar umat beragama serta sosialisasi untuk mengurangi potensi konflik.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	3	**Kopilaborasi (Ngopi dan Kolaborasi Serap Aspirasi)**	Forum yang informal dan santai untuk berdialog dengan Kepala Daerah sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dan saran secara langsung tanpa hambatan birokrasi yang sering ditemukan dalam forum formal.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	4	**Tunjangan Kehormatan Hafidz Hafidzoh dan Imam Masjid di Pesisir luar & terluar**	Bentuk kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Para Penghafal Al-Qur'an atau Hafidz dan Hafidzah serta imam masjid terutama yang yang berada di pesisir luar dan terluar	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
	5	**Tunjangan Kehormatan Juru Pelihara Cagar Budaya**	Sebagai garda terdepan dalam menjaga dan merawat cagar budaya, juru pelihara memegang peran krusial dalam mencegah kerusakan, vandalisme, serta degradasi lingkungan. Pemberian tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas konservasi secara optimal. Selain sebagai bentuk apresiasi, kebijakan ini juga berfungsi sebagai insentif yang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya. Lebih lanjut, keberlanjutan program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pelestarian budaya, mendukung sektor pendidikan dan pariwisata, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di sekitar cagar budaya.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	6	**Kualitas dan ketahanan keluarga, Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan Perempuan dan Anak**	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
	7	**Pemberdayaan Perempuan**	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	8	**Pelestarian Naskah Kuno**	Naskah kuno merupakan salah satu khazanah budaya bangsa yang merekam jejak sejarah, pengetahuan, imajinasi, dan kreativitas leluhur Nusantara dalam berbagai aksara dan bahasa. Sebagai aset intelektual berharga, naskah ini memuat nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang masih relevan bagi kehidupan modern. Guna menjaga keberlanjutan warisan budaya dan upaya pelestarian yang optimal, negara perlu hadir untuk merawat dan melestarikan. Upaya konservasi fisik, digitalisasi, alih aksara, dan edukasi publik menjadi langkah strategis dalam menghidupkan kembali kandungan intelektualnya. Selain sebagai sumber penelitian akademis, naskah kuno juga memiliki potensi untuk dikemas ulang secara kreatif agar dapat menjadi inspirasi dalam membentuk identitas nasional serta modal sosial dan budaya dalam membangun peradaban Nusantara yang berkelanjutan.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
	9	**Sistem Integrasi Penyelenggaraan Trantibumlinmas Jawa Timu**	Sistem aplikasi yang yang mendukung pengelolaan data dan informasi penanganan gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara real time, efektif dan efesien sehingga mempermudah peran para pihak dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	10	**JATIMPURA (Jawa Timur Pusat Arsip, Memori dan Peradaban)**	Untuk melestarikan dan menyelamatkan arsip bersejarah, serta menggambarkan identitas bangsa dan jati diri bangsa Indonesia sehingga harus dilindungi dan dilestarikan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	11	**Penghargaan Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi**	Memperkuat dan meningkatkan pembangunan prestasi olahraga, dalam rangka pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga, serta pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Jatim Lestari	1	**Bersih dengan Renewable Energi (BERSERI)**	Mewujudkan transformasi energi hijau Jawa Timur melalui pembangunan PLTS atap di kantor Instansi Pemerintah/	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
			Lembaga dan sekolah, pembentukan forum energi daerah, penunjukan auditor energi dan pembukaan jurusan baru energi baru terbarukan pada Level BLK dan SMK.	
	2	**Desa Wisata Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara)**	Memperluas pertumbuhan desa wisata di Jawa Timur berbasis sustainable tourism yang memperhatikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri,dan sejahtera.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	3	**Mangrove Lestari**	Penguatan program peLestarian Lingkungan melaLui pemuLihan ekosistem mangrove di wilayah pesisir dengan melibatkan berbagai elemen berbasis hexahelix	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	4	**Penanggulangan Bencana**	a. Pesantren Tangguh Bencana (PESTANA) Meningkatkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan risiko bencana di pesantren merupakan Langkah strategis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh penghuni pesantren	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			b. Destana (Desa Tangguh Bencana) Merupakan program pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). DESTANA merupakan desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Program ini difokuskan pada desa yang termasuk dalam daerah rawan bencana di Jawa Timur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Darurat Bencana Merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana pada saat masa tanggap darurat melalui distribusi logistik seperti sandang, pangan, air bersih serta sembako kebutuhan sehari-hari dan makanan siap saji. Sasaran program ini adalah masyarakat di daerah yang terdampak bencana di Jawa Timur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			d. Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana Merupakan upaya yang dilakukan untuk pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi akibat dampak bencana. Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
			Penanggulangan Bencana Daerah. Program ini difokuskan pada daerah terdampak bencana di Jawa Timur.	
	5	**Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim**	Program ini bertujuan untuk mewujudkan desa tanggap iklim melalui peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang meliputi, rehabilitasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana serta pembinaan pengelolaan lingkungan hidup pada lingkup desa	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	6	**Pelestarian Wilayah Pesisir**	Program ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan pemulihan ekosistem pesisir melalui kegiatan penanaman serta pelaksanaan aksi bersih sampah di wilayah pantai/pesisir. Melaui program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan capaian kualitas lingkungan hidup khususnya Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Lahan.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	7	**Pengendalian Pencemaran Air**	Progam difokuskan untuk meningkatkan kualitas air dan ekosistem sungai dengan turut melibatkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk turut menjaga kelestarian sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	8	**Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat**	Progam ini bertujuan untuk mewujudkan desa atau kelurahan yang bersih dan lestari dengan menitiberatkan pada peningkatan upaya pengelolaan persampahan. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa atau kelurahan dalam menjaga lingkungan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	9	**Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional**	Merupakan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui kerja sama antar daerah. Program ini dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan aman dengan memanfaatkan sumber air secara efisien dan berkelanjutan serta memastikan pengelolaan yang optimal. Program ini difokuskan pada Kabupaten/Kota yang melakukan kerja sama penyediaan air minum regional	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	10		Akses Sanitasi Aman adalah apabila rumah tangga memiliki	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Program Kerja Prioritas	No	Rincian Program Kerja Prioritas	Keterangan	Dukungan Program
		Penyediaan Akses Sanitasi Aman	fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Program Penyediaan Akses Sanitasi aman bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi aman melalui Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	11	**Penanganan Desa Rawan kekeringan**	Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum di wilayah yang rentan terhadap kekurangan air melalui pembangunan infrastruktur seperti sumur bor. program ini difokuskan pada daerah rawan kekeringan yang telah ditetapkan di masing masing/Kabupaten/Kota.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	12	**DAS Berkualitas**	Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama wilayah hulu, merupakan kawasan penyangga dari wilayah hilir dengan fungsi konservasi, ekologi, penyangga air, hingga penyuplai oksigen. Upaya pembangunan DAS berkualitas melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, ditujukan untuk memperbaiki kualitas DAS sehingga meningkatkan kualitas tutupan lahan dan menjaga stabilitas ekosistem makro regional Jawa Timur	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program prioritas provinsi dibedakan dipetakan berdasarkan 9 prioritas meliputi Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Akses, Jatim Agro, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Berkah Amanah, Jatim Harmoni, dan Jatim Lestari. Masing prioritas memiliki rincian program yang kemudian disandingan dengan program nomenklatur yang ada pada kewenanga kabupaten. Penyandingan dengan program nomenklatur tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan program di level Renstra OPD.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam bab VI Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat indikasi kerangka pendanaan yang berasal dari hasil analisis pada BAB III perihal gambaran keuangan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat terkait indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi. Sedangkan IKD merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025-2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					925.238.003.376,000		939.884.520.869,080		951.012.753.266,330		962.367.845.849,380		973.897.012.481,750	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					755.327.977.376,000		767.284.819.257,500		776.369.471.517,080		785.639.323.007,680		795.051.282.097,230	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	100	100	100	755.327.977.376,000	100	767.284.819.257,500	100	776.369.471.517,080	100	785.639.323.007,680	100	795.051.282.097,230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					169.300.026.000,000		171.980.045.411,580		174.016.289.149,250		176.094.043.641,700		178.203.650.284,520	
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peserta Didik Kurang Mampu yang Melanjutkan Pendidikan (%)	100	100	100	169.300.026.000,000	100	171.980.045.411,580	100	174.016.289.149,250	100	176.094.043.641,700	100	178.203.650.284,520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	91,67	93,21	94,74		96,28		97,82		99,36		100,00		
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	99,69	99,82	99,95		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	14,01	16,67	19,33		21,99		24,65		27,31		29,97		
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	66,13	68,63	71,13		73,63		76,13		78,63		81,13		
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	59,29	62,19	65,09		67,99		70,89		73,79		76,69		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	77,20	78,30	79,40		80,50		81,60		82,70		83,80		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	66,66	68,16	69,66		71,16		72,66		74,16		75,66		
	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 13 - 15 (%)	68,46	69,90	71,34		72,76		74,16		75,56		76,66		
	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 12 (%)	68,46	69,90	71,34		72,76		74,16		75,56		76,66		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					160.000.000,000		162.532.800,000		164.457.000,000		166.420.800,000		168.414.400,000	
Meningkatnya Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100	100	100	160.000.000,000	100	162.532.800,000	100	164.457.000,000	100	166.420.800,000	100	168.414.400,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					250.000.000,000		253.957.500,000		256.964.300,000		260.032.500,000		263.147.600,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	96	97	98	250.000.000,000	99	253.957.500,000	100	256.964.300,000	100	260.032.500,000	100	263.147.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					150.000.000,000		152.374.400,000		154.178.600,000		156.019.400,000		157.888.600,000	
Meningkatnya Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Ijin Pendirian dan Perpanjangan Ijin Operasional (Lembaga)	10	10	10	150.000.000,000	10	152.374.400,000	10	154.178.600,000	10	156.019.400,000	10	157.888.600,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					50.000.000,000		50.791.500,000		51.392.700,000		52.006.500,000		52.629.500,000	
Meningkatnya Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Program Unggulan Bahasa dan Sastra (%)	100	100	100	50.000.000,000	100	50.791.500,000	100	51.392.700,000	100	52.006.500,000	100	52.629.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					818.708.206.035,730		831.668.355.423,520		841.515.309.278,740		851.563.001.826,160		861.764.726.155,360	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					697.718.821.535,730		708.763.710.504,000		717.155.472.823,650		725.718.309.139,070		734.412.414.476,640	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	86,37	86,5	86,7	274.849.821.535,730	86,9	279.200.694.234,000	87,1	282.506.430.453,000	87,3	285.879.557.233,000	87,5	289.304.394.329,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Fasyankes BLUD yang berkategori baik (%)	23,53	26,47	29,41		32,35		35,29		38,24		41,18		
	Angka Kontak (Angka)	150	150	150		150		150		150		150		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Fasyankes BLUD yang berkategori baik (%)	23,53	26,47	29,41	380.845.000.000,000	32,35	386.873.776.350,000	35,29	391.454.361.850,000	38,24	396.128.326.900,000	41,18	400.873.944.250,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Fasyankes BLUD yang berkategori baik (%)	23,53	26,47	29,41	42.024.000.000,000	32,35	42.689.239.920,000	35,29	43.194.680.520,650	38,24	43.710.425.006,070	41,18	44.234.075.897,640	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					113.005.502.000,000		114.794.378.919,520		116.153.544.455,090		117.540.417.687,090		118.948.551.678,720	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Angka populasi bebas Penyakit Menular (%)	31,25	37,5	41	91.163.952.967,000	44	92.607.078.300,000	47	93.703.546.150,000	50	94.822.366.400,000	53	95.958.338.050,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas mencapai target kekebalan kelompok (%)	25	30	35		40		45		50		55		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular (%)	65,62	68,75	71,88		75		78,13		81,25		84,38		
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	90,63	90,63	90,63		90,63		93,94		97,06		100		
	Angka Kematian Ibu (Angka)	144,45	120.67-131.07	118.67-130.07		116.67-129.07		114.67-128.07		112.67-127.07		110.67-126.07		
	Angka Kematian Bayi (Angka)	6,58	6,3	6,3		5,9		5,7		5,5		5,3		
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	18	17	16		15		14		13		12		
	Jumlah Kematian Balita (Orang)	9	7	6		5		5		5		4		
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	13,7	13,04	12,37		11,71		11,05		10,38		9,72		
	Persentase cakupan penerima PKG (%)	n/a	30	36		41		46		51		56		
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	68	80	85		90		93		95		96		
	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	56,35	59	59,25		59,50		59,75		60		60,25		
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	83,20	84,56	85,92		87,28		88,64		90		90,50		
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	86,8	90	90		90		90		90		90		
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	87,8	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat (RSUD dr. Iskak)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	90,63	90,63	90,63	9.395.729.733,000	90,63	9.544.464.000,000	93,94	9.657.470.500,000	97,06	9.772.780.700,000	100	9.889.858.700,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat (RSUD Campurdarat)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	90,63	90,63	90,63	12.445.819.300,000	90,63	12.642.836.619,520	93,94	12.792.527.805,090	97,06	12.945.270.587,090	100	13.100.354.928,720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.962.470.000,000		4.025.195.000,000		4.072.854.000,000		4.121.484.000,000		4.170.859.000,000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Per 1000)	3,51	3,51	3,52	3.962.470.000,000	3,53	4.025.195.000,000	3,54	4.072.854.000,000	3,55	4.121.484.000,000	3,56	4.170.859.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					629.396.000,000		639.359.000,000		646.929.000,000		654.653.000,000		662.496.000,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	87,93	90	91	629.396.000,000	92	639.359.000,000	93	646.929.000,000	94	654.653.000,000	95	662.496.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.392.016.500,000		3.445.712.000,000		3.486.509.000,000		3.528.138.000,000		3.570.405.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	n/a	5	10	3.392.016.500,000	15	3.445.712.000,000	20	3.486.509.000,000	25	3.528.138.000,000	30	3.570.405.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Tatanan (%)	57	60	63		66		69		72		75		
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					173.004.515.602,390		175.728.739.287,410		177.809.367.560,560		179.932.411.409,240		182.088.001.697,900	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.696.675.510,360		8.834.343.883,690		8.938.942.515,270		9.045.673.488,900		9.154.040.657,300	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	85,25	85,50	85,75	8.696.675.510,360	86,00	8.834.343.883,690	86,25	8.938.942.515,270	86,50	9.045.673.488,900	86,75	9.154.040.657,300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.488.576.347,660		5.575.460.511,240		5.641.473.963,690		5.708.833.162,820		5.777.224.984,110	
Meningkatnya kawasan sawah yang terfasilitasi jaringan irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	43,71	44,11	44,51	5.488.576.347,660	44,91	5.575.460.511,240	45,31	5.641.473.963,690	45,71	5.708.833.162,820	46,11	5.777.224.984,110	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Kondisi Irigasi Baik Kewenangan Kab/Kota (%)	61,24	61,50	62,00		63,00		64,00		65,00		66,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.025.386.002,550		3.070.043.998,320		3.106.393.319,260		3.143.483.655,490		3.181.142.589,680	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	7,45	25,67	29,81	3.025.386.002,550	33,95	3.070.043.998,320	38,10	3.106.393.319,260	42,24	3.143.483.655,490	45	3.181.142.589,680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.431.644.607,950		9.570.865.965,030		9.684.185.018,060		9.799.814.187,180		9.917.215.961,120	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	0,004	6,86	7,63	9.431.644.607,950	8,41	9.570.865.965,030	9,19	9.684.185.018,060	9,96	9.799.814.187,180	10,74	9.917.215.961,120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.050.000.000,880		1.065.499.145,640		1.078.114.655,530		1.090.987.344,510		1.104.057.372,900	
Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	17,57	17,65	17,75	1.050.000.000,880	17,82	1.065.499.145,640	17,89	1.078.114.655,530	17,96	1.090.987.344,510	18,03	1.104.057.372,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					4.765.886.301,210		4.841.330.281,350		4.898.651.631,880		4.957.141.532,370		5.016.528.087,930	
Meningkatnya tertib administrasi dan kepatuhan PBG serta SLF di kabupaten/kota	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	4.765.886.301,210	100	4.841.330.281,350	100	4.898.651.631,880	100	4.957.141.532,370	100	5.016.528.087,930	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					140.135.498.154,000		142.353.843.089,780		144.039.312.591,960		145.759.141.984,310		147.505.336.505,280	
Meningkatkannya jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase jalan yang mendapat penanganan (%)	79,5	100	100	140.135.498.154,000	100	142.353.843.089,780	100	144.039.312.591,960	100	145.759.141.984,310	100	147.505.336.505,280	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					38.702.328,960		39.314.986,830		39.780.476,270		40.255.455,160		40.737.715,510	
Meningkatnya badan usaha jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan	Persentase Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan Pembinaan (%)	100	100	100	38.702.328,960	100	39.314.986,830	100	39.780.476,270	100	40.255.455,160	100	40.737.715,510	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					372.146.348,820		378.037.425,530		382.513.388,640		387.080.598,500		391.717.824,070	
Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Persentase pengajuan rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	372.146.348,820	100	378.037.425,530	100	382.513.388,640	100	387.080.598,500	100	391.717.824,070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					9.918.327.975,370		10.064.733.309,550		10.183.899.751,930		10.305.495.514,970		10.428.955.351,240	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.269.225.973,130		7.376.527.673,630		7.463.865.761,280		7.552.984.318,470		7.643.469.070,610	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	88,50	88,64	89,50	7.269.225.973,130	90,28	7.376.527.673,630	91,07	7.463.865.761,280	91,85	7.552.984.318,470	92,64	7.643.469.070,610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					505.000.000,430		512.454.351,000		518.521.810,510		524.712.960,930		530.999.022,200	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	505.000.000,430	100	512.454.351,000	100	518.521.810,510	100	524.712.960,930	100	530.999.022,200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					377.652.000,320		383.226.555,570		387.763.957,990		392.393.859,650		397.094.738,090	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani (%)	100	100	100	377.652.000,320	100	383.226.555,570	100	387.763.957,990	100	392.393.859,650	100	397.094.738,090	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.566.560.001,320		1.589.684.134,850		1.608.505.995,010		1.627.711.556,590		1.647.211.541,040	
Meningkatnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh di bawah 10 hektar di luar SK kawasan kumuh yang ditangani (%)	0,13	21,09	40,45	1.566.560.001,320	60,05	1.589.684.134,850	79,90	1.608.505.995,010	100	1.627.711.556,590	20,35	1.647.211.541,040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					199.890.000,170		202.840.594,500		205.242.227,140		207.692.819,330		210.180.979,300	
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Persentase PSU dalam kondisi baik (%)	73,02	75,00	75,19	199.890.000,170	75,37	202.840.594,500	75,56	205.242.227,140	75,74	207.692.819,330	75,91	210.180.979,300	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					28.799.567.547,000		29.255.464.752,060		29.601.849.454,730		29.955.295.537,210		30.314.159.977,750	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.796.954.147,000		23.157.829.973,200		23.432.018.680,090		23.711.796.983,130		23.995.864.310,990	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah (BPBD)	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	83,26	83,28	83,28	4.934.207.558,000	83,29	5.012.316.105,700	83,30	5.071.661.928,390	83,31	5.132.217.571,820	83,32	5.193.701.538,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah (Damkarmat)	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	87,66	88,58	88,62	5.887.606.865,000	88,75	5.980.807.681,670	88,88	6.051.620.444,630	88,99	6.123.876.792,730	89,11	6.197.240.836,710	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Satpol PP)	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	85,72	85,72	86,00	11.975.139.724,000	86,20	12.164.706.185,830	86,40	12.308.736.307,070	86,60	12.455.702.618,580	86,80	12.604.921.935,950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.090.000.000,000		3.138.914.700,000		3.176.079.450,050		3.214.001.838,680		3.252.505.580,710	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100	3.090.000.000,000	100	3.138.914.700,000	100	3.176.079.450,050	100	3.214.001.838,680	100	3.252.505.580,710	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (%)	80	80	82		84		86		88		90		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (%)	47,80	44,94	45		47		50		52		55		
	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dapat Dicegah (%)	77,2	77,2	77,5		77,5		76		76		76,5		
	Persentase Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	97,8	97,8	97,8		98		98		98,5		99		
	Jumlah Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Berulang (%)	22	22	22		21		21		20		20		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.024.473.400,000		1.040.690.822,660		1.053.012.602,000		1.065.585.572,460		1.078.351.287,620	
Terselenggaranya Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	1.024.473.400,000	100	1.040.690.822,660	100	1.053.012.602,000	100	1.065.585.572,460	100	1.078.351.287,620	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	77,01	84	84		84		84		84		84		
	Prosentase Pelayanan Penanggulangan dan Penanganan Bencana (%)	94	96	96		96		96		96		96		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.888.140.000,000		1.918.029.256,200		1.940.738.722,590		1.963.911.142,940		1.987.438.798,430	
Terselenggaranya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase aparatur pemadam kebakaran yang memiliki kompetensi (%)	35	37	37	1.888.140.000,000	39	1.918.029.256,200	39	1.940.738.722,590	40	1.963.911.142,940	41	1.987.438.798,430	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan (%)	66,3	69,9	70,11		72,7		73,31		75,72		77,5		
	Persentase bangunan gedung yang memiliki proteksi kebakaran sesuai standart (%)	75,00	75,00	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
	Persentase tindak lanjut permintaan pemadaman,penyelamatan yang ditindaklanjuti (%)	96,70	98,00	98,50		98,60		98,80		99,20		99,60		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					19.511.239.090,000		19.820.102.004,790		20.054.772.012,540		20.294.225.990,360		20.537.350.817,730	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.148.096.090,000		4.213.760.451,100		4.263.651.374,850		4.314.559.372,260		4.366.247.793,540	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	86,50	86,50	86,50	4.148.096.090,000	87,00	4.213.760.451,100	87,35	4.263.651.374,850	86,50	4.314.559.372,260	88,00	4.366.247.793,540	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					515.000.000,000		523.152.450,000		529.346.575,010		535.666.973,110		542.084.263,450	
Menigkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (%)	50	55	60	515.000.000,000	65	523.152.450,000	70	529.346.575,010	75	535.666.973,110	80	542.084.263,450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					600.000.000,000		609.498.000,000		616.714.456,320		624.078.026,930		631.554.481,690	
Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan Rehabilitas Sosial dasar diluar panti (%)	60	60	60	600.000.000,000	80	609.498.000,000	80	616.714.456,320	80	624.078.026,930	80	631.554.481,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					14.038.143.000,000		14.260.366.803,690		14.429.209.546,650		14.601.494.308,630		14.776.420.210,450	
Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	n/a	n/a	50	14.038.143.000,000	60	14.260.366.803,690	70	14.429.209.546,650	80	14.601.494.308,630	90	14.776.420.210,450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					190.000.000,000		193.007.700,000		195.292.911,170		197.624.708,530		199.992.252,540	
Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	n/a	n/a	70	190.000.000,000	75	193.007.700,000	75	195.292.911,170	75	197.624.708,530	75	199.992.252,540	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					20.000.000,000		20.316.600,000		20.557.148,540		20.802.600,900		21.051.816,060	
Menigkatnya Kualitas Layanan Makam Pahlawan	Persetase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	20.316.600,000	100	20.557.148,540	100	20.802.600,900	100	21.051.816,060	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					9.580.883.988,000		9.732.542.611,000		9.847.774.561,000		9.965.346.766,000		10.084.742.179,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.547.883.988,000		5.635.706.991,000		5.702.433.762,000		5.770.520.821,000		5.839.651.661,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	80,84	81	81	5.547.883.988,000	81	5.635.706.991,000	81	5.702.433.762,000	81	5.770.520.821,000	81	5.839.651.661,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.219.000.000,000		1.238.290.000,000		1.252.950.000,000		1.267.900.000,000		1.283.100.000,000	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi (%)	79,79	87	88	1.219.000.000,000	89	1.238.290.000,000	90	1.252.950.000,000	91	1.267.900.000,000	92	1.283.100.000,000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama pemagangan (Perusahaan)	12	4	4		5		5		5		5		Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	48,75	51,13	53,66		56,33		59,16		62,15		65,31		
	Jumlah Peserta Pemagangan (Orang)	71	10	10		12		12		12		12		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					724.000.000,000		735.460.920,000		744.168.777,000		753.054.152,000		762.075.741,000	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten (%)	19,25	86,50	88	724.000.000,000	89,50	735.460.920,000	91	744.168.777,000	92,50	753.054.152,000	94	762.075.741,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Informasi Lowongan Kerja (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%)	100	100	100		100		100		100		100		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.090.000.000,000		2.123.084.700,000		2.148.222.022,000		2.173.871.793,000		2.199.914.777,000	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	0,13	0,18	0,23	2.090.000.000,000	0,28	2.123.084.700,000	0,33	2.148.222.022,000	0,38	2.173.871.793,000	0,43	2.199.914.777,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	10,45	10,46	10,47		10,48		10,49		10,50		10,51		
	Persentase Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	4,51	4,51	5,3		6,08		6,87		7,66		8,44		
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)	17,67	30,08	31,53		33,91		35,36		37,73		39,44		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.667.735.644,000		7.789.115.899,250		7.881.339.031,490		7.975.442.219,520		8.070.988.017,330	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.391.972.044,000		6.493.156.961,460		6.570.035.939,880		6.648.482.169,000		6.728.130.985,390	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	83	85	85,2	6.391.972.044,000	85,4	6.493.156.961,460	85,6	6.570.035.939,880	85,8	6.648.482.169,000	86,0	6.728.130.985,390	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	83	85	85,2		85,4		85,6		85,8		86,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN					275.000.000,000		279.353.250,000		282.660.792,480		286.035.762,340		289.462.470,780	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	24	25	26	275.000.000,000	27	279.353.250,000	28	282.660.792,480	29	286.035.762,340	30	289.462.470,780	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	63,29	63,81	64,33		64,85		65,37		65,90		66,42		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					245.521.200,000		249.407.800,600		252.360.788,960		255.373.976,780		258.433.357,020	
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (Kasus)	14	14	14	245.521.200,000	14	249.407.800,600	14	252.360.788,960	14	255.373.976,780	14	258.433.357,020	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (Kasus)	14	14	14		14		14		14		14		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					50.000.000,000		50.791.500,000		51.392.871,360		52.006.502,240		52.629.540,140	
Meningkatnya Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaran gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	100	100	50.000.000,000	100	50.791.500,000	100	51.392.871,360	100	52.006.502,240	100	52.629.540,140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					50.000.000,000		50.791.500,000		51.392.871,360		52.006.502,240		52.629.540,140	
Meningkatnya Pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	50.000.000,000	100	50.791.500,000	100	51.392.871,360	100	52.006.502,240	100	52.629.540,140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					160.000.000,000		162.532.800,000		164.457.188,350		166.420.807,180		168.414.528,450	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	n/a	65,55	65,63	160.000.000,000	65,72	162.532.800,000	65,81	164.457.188,350	65,89	166.420.807,180	65,98	168.414.528,450	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					495.242.400,000		503.082.087,190		509.038.579,100		515.116.499,740		521.287.595,410	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Insidensi kasus kekerasan pada anak (%)	n/a	100	98	495.242.400,000	96	503.082.087,190	94	509.038.579,100	92	515.116.499,740	90	521.287.595,410	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan (Kasus)	32	30	30		30		30		30		30		
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	88,64	89,03	89,22		89,42		89,61		89,81		90,00		
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	n/a	89,03	89,22		89,42		89,61		89,81		90,00		
	Insidensi kasus kekerasan pada anak (%)	n/a	100	98		96		94		92		90		
	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan (Kasus)	32	30	30		30		30		30		30		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.201.027.193,000		7.315.019.453,470		7.401.629.283,780		7.490.004.735,860		7.579.734.992,540	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.893.027.193,000		5.986.313.813,470		6.050.007.301,780		6.122.244.388,850		6.164.841.652,540	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	93,62	93,70	93,80	5.893.027.193,000	93,90	5.986.313.813,470	94	6.050.007.301,780	94,10	6.122.244.388,850	94,20	6.164.841.652,540	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					52.000.000,000		52.823.160,000		53.448.586,000		54.086.762,000		54.734.721,000	
Meningkatnya Cadangan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	39,93	63	64	52.000.000,000	66	52.823.160,000	68	53.448.586,000	70	54.086.762,000	72	54.734.721,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Rasio stok pangan dengan standard kebutuhan (%)	65	70	71		73		75		77		79		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					995.000.000,000		1.010.750.850,000		1.029.902.608,000		1.042.199.645,010		1.085.432.423,000	
Terkendalinya Harga Pangan Masyarakat	Rasio fluktuasi harga konsumen dengan harga acuan (%)	14	13	12	995.000.000,000	11	1.010.750.850,000	10	1.029.902.608,000	9	1.042.199.645,010	8	1.085.432.423,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					194.000.000,000		197.071.020,000		199.404.340,000		201.785.228,000		204.202.614,000	
Menurunnya Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	10,06	10,06	9,79	194.000.000,000	9,70	197.071.020,000	9,60	199.404.340,000	9,50	201.785.228,000	9,40	204.202.614,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Rasio desa tahan pangan (%)	97,04	95,20	95,57		95,94		96,31		96,68		97,05		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					67.000.000,000		68.060.610,000		68.866.448,000		69.688.712,000		70.523.582,000	
Meningkatnya Pangan Segar aman dan bermutu	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	94	56	58	67.000.000,000	59,5	68.060.610,000	71	68.866.448,000	72,5	69.688.712,000	74	70.523.582,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					308.195.000,260		338.113.321,750		342.116.583,470		346.201.455,490		350.348.948,910	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					0,000		25.369.027,280		25.669.396,560		25.975.889,160		26.287.080,310	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase sengketa tanah yang difasilitasi (%)	100	100	0	0,000	100	25.369.027,280	100	25.669.396,560	100	25.975.889,160	100	26.287.080,310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					33.195.000,030		33.684.994,420		34.083.824,750		34.490.785,620		34.903.985,220	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Subjek dan Objek Redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang difasilitasi (%)	100	100	100	33.195.000,030	100	33.684.994,420	100	34.083.824,750	100	34.490.785,620	100	34.903.985,220	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					275.000.000,230		279.059.300,050		282.363.362,160		285.734.780,710		289.157.883,380	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase penatagunaan tanah yang difasilitasi (%)	100	100	100	275.000.000,230	100	279.059.300,050	100	282.363.362,160	100	285.734.780,710	100	289.157.883,380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					27.828.638.957,670		28.269.166.312,720		28.603.873.241,850		28.945.403.488,360		29.292.169.422,160	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.258.041.883,370		19.562.896.686,390		19.794.521.383,150		20.030.867.968,470		20.270.837.766,730	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	84	85	86	19.258.041.883,370	87	19.562.896.686,390	88	19.794.521.383,150	89	20.030.867.968,470	90	20.270.837.766,730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					637.825.536,040		647.922.314,270		655.593.714,470		663.421.503,430		671.369.293,040	
Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersususun (%)	100	100	100	637.825.536,040	100	647.922.314,270	100	655.593.714,470	100	663.421.503,430	100	671.369.293,040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.473.238.996,610		1.496.560.369,930		1.514.279.644,710		1.532.360.143,670		1.550.717.818,190	
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	1.473.238.996,610	100	1.496.560.369,930	100	1.514.279.644,710	100	1.532.360.143,670	100	1.550.717.818,190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.439.298.852,180		1.462.082.953,010		1.479.394.015,170		1.497.057.979,710		1.514.992.734,310	
Terselenggaranya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola (%)	100	100	100	1.439.298.852,180	100	1.462.082.953,010	100	1.479.394.015,170	100	1.497.057.979,710	100	1.514.992.734,310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					14.980.639,100		15.217.782,620		15.397.961,170		15.581.812,820		15.768.482,940	
Meningkatnya pengendalian B3 dan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	14.980.639,100	100	15.217.782,620	100	15.397.961,170	100	15.581.812,820	100	15.768.482,940	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN					59.413.299,220		60.353.812,090		61.068.401,220		61.797.557,930		62.537.892,680	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	59.413.299,220	100	60.353.812,090	100	61.068.401,220	100	61.797.557,930	100	62.537.892,680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					84.876.142,220		86.219.731,550		87.240.573,170		88.282.225,620		89.339.846,680	
Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	84.876.142,220	100	86.219.731,550	100	87.240.573,170	100	88.282.225,620	100	89.339.846,680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					106.095.177,780		107.774.664,440		109.050.716,470		110.352.782,020		111.674.808,350	
Terselenggaranya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	106.095.177,780	100	107.774.664,440	100	109.050.716,470	100	110.352.782,020	100	111.674.808,350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					42.438.071,110		43.109.865,780		43.620.286,590		44.141.112,810		44.669.923,340	
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	42.438.071,110	100	43.109.865,780	100	43.620.286,590	100	44.141.112,810	100	44.669.923,340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.712.430.360,040		4.787.028.132,640		4.843.706.545,730		4.901.540.401,880		4.960.260.855,900	
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	43,08	43,18	44,58	4.712.430.360,040	45,18	4.787.028.132,640	45,78	4.843.706.545,730	46,38	4.901.540.401,880	46,98	4.960.260.855,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.717.948.928,000		8.855.954.059,000		8.960.808.555,000		9.067.800.609,000		9.176.432.861,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.252.948.928,000		8.333.229.059,000		8.434.892.680,000		8.530.492.701,000		8.623.644.835,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	88,15	88,25	88,50	8.252.948.928,000	88,75	8.333.229.059,000	89,00	8.434.892.680,000	89,25	8.530.492.701,000	89,50	8.623.644.835,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					155.000.000,000		175.000.000,000		175.000.000,000		176.750.000,000		187.512.500,000	
Meningkatnya Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2,04	2,5	3	155.000.000,000	3,5	175.000.000,000	4	175.000.000,000	4,5	176.750.000,000	5	187.512.500,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	57,51	60	60,05		60,10		60,15		60,20		60,25		
	Prosentase penduduk yang memiliki KTP (%)	98,19	98,20	98,25		98,30		98,35		98,40		98,45		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					170.000.000,000		150.225.000,000		150.453.375,000		151.957.908,000		153.555.526,000	
Meningkatnya Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan (%)	98,87	98,90	99,00	170.000.000,000	99,10	150.225.000,000	99,20	150.453.375,000	99,30	151.957.908,000	99,40	153.555.526,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					120.000.000,000		177.200.000,000		179.858.000,000		187.600.000,000		190.405.000,000	
Terkelolanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai Standar	Persentase kendala sistem informasi Administrasi Kependudukan lokal yang tertangani (%)	100	100	100	120.000.000,000	100	177.200.000,000	100	179.858.000,000	100	187.600.000,000	100	190.405.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					20.000.000,000		20.300.000,000		20.604.500,000		21.000.000,000		21.315.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Sesuai Kondisi Aktual (%)	n/a	16,5	17	20.000.000,000	17,5	20.300.000,000	18	20.604.500,000	18,5	21.000.000,000	19	21.315.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase data profil kependudukan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					10.887.324.836,000		11.059.671.188,000		11.190.617.695,000		11.324.233.670,000		11.459.897.989,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.559.324.836,000		6.663.171.188,000		6.742.117.695,000		6.822.733.670,000		6.903.897.989,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	83,61	83,91	84,21	6.559.324.836,000	84,51	6.663.171.188,000	84,81	6.742.117.695,000	85,11	6.822.733.670,000	85,41	6.903.897.989,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					105.000.000,000		106.500.000,000		108.000.000,000		109.500.000,000		111.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Ruas Jalan Desa dalam Kondisi Sedang dan Baik (%)	64,56	65,56	66,56	105.000.000,000	67,56	106.500.000,000	68,56	108.000.000,000	69,56	109.500.000,000	70,56	111.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	78,21	78,60	78,99		79,38		79,77		80,16		80,55		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					100.000.000,000		101.500.000,000		103.000.000,000		104.500.000,000		106.000.000,000	
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Jumlah Kawasan Perdesaan yang berkembang (Kawasan)	2	2	3	100.000.000,000	3	101.500.000,000	4	103.000.000,000	4	104.500.000,000	4	106.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase BUMDes Ma dengan Status Maju (%)	33,33	33,33	38,46		46,15		46,15		53,85		53,85		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.958.000.000,000		3.005.000.000,000		3.040.500.000,000		3.074.500.000,000		3.111.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Skor Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa (Indeks)	27,21	27,71	28,21	2.958.000.000,000	28,71	3.005.000.000,000	29,21	3.040.500.000,000	29,71	3.074.500.000,000	30,21	3.111.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Skor Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa (Indeks)	31,88	32,38	32,88		33,38		33,88		34,38		34,88		
	Persentase BUMDesa dengan status Maju (%)	9.60%	9.60%	10.89%		12.06%		12.84%		13.61%		14.39%		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.165.000.000,000		1.183.500.000,000		1.197.000.000,000		1.213.000.000,000		1.228.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	22	22	24	1.165.000.000,000	26	1.183.500.000,000	28	1.197.000.000,000	30	1.213.000.000,000	32	1.228.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	23	23	24		25		26		27		28		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					13.709.236.400,000		13.926.253.612,210		14.091.140.454,990		14.259.388.672,010		14.430.216.148,310	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					848.000.000,000		861.423.840,000		871.623.098,270		882.030.278,060		892.597.000,790	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	11,1	10.9-11.1	10.8-11	848.000.000,000	10.7-10.9	861.423.840,000	10.6-10.8	871.623.098,270	10.5-10.7	882.030.278,060	10.4-10.6	892.597.000,790	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	67,6	69	70,50		71,95		73,40		74,85		76,30		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					7.357.655.400,000		7.474.127.084,980		7.562.620.749,670		7.652.918.441,420		7.744.600.404,350	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Peserta KB Aktif (Jiwa)	117.551	117.900	118.125	7.357.655.400,000	119.650	7.474.127.084,980	121.185	7.562.620.749,670	121.195	7.652.918.441,420	122.730	7.744.600.404,350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	61,9	62,65	63,4		64,15		64,9		65,65		66,4		
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	2,2	2,55	2,95		3,35		3,75		4,15		4,55		
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,5	9,378	9,256		9,134		9,012		8,890		8,768		
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	11,5	11	10,5		10		9,5		9		8,5		
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	86	86,1	86,2		86,3		86,4		86,5		86,6		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					5.503.581.000,000		5.590.702.687,230		5.656.896.607,050		5.724.439.952,530		5.793.018.743,170	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok Tribina Paripurna (%)	0,33	0,38	0,51	5.503.581.000,000	0,64	5.590.702.687,230	0,77	5.656.896.607,050	0,90	5.724.439.952,530	1,02	5.793.018.743,170	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Jumlah UPPKA yang Terbentuk (Kelompok)	56	81	83		85		87		89		91		
	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	11.70%	15.52%	15.61%		15.66%		15.75%		15.83%		15.91%		
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					37.611.971.512,000		38.207.369.021,040		38.659.744.270,240		39.121.341.616,830		39.590.015.289,400	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.137.390.409,460		15.377.015.299,640		15.559.079.160,790		15.744.854.565,970		15.933.477.923,670	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	86,00	86,10	86,20	15.137.390.409,460	86,30	15.377.015.299,640	86,40	15.559.079.160,790	86,50	15.744.854.565,970	86,60	15.933.477.923,670	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					20.670.008.400,390		20.997.214.633,370		21.245.821.654,630		21.499.496.765,180		21.757.060.736,430	
Meningkatnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan, Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi (%) (%)	88,81	90	92	20.670.008.400,390	93	20.997.214.633,370	94	21.245.821.654,630	95	21.499.496.765,180	96	21.757.060.736,430	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					46.067.923,570		46.797.178,800		47.351.257,390		47.916.631,410		48.490.672,650	
Terlaksananya pengelolaan pelayaran	Persentase Angkutan Sungai yang Aman/ Berkeselamatan (%) (%)	100	100	100	46.067.923,570	100	46.797.178,800	100	47.351.257,390	100	47.916.631,410	100	48.490.672,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					1.758.504.778,580		1.786.341.909,230		1.807.492.197,430		1.829.073.654,270		1.850.985.956,650	
Terlaksananya pengelolaan perkeretaapian	Persentase perlintasan sebidang yang terkelola (%)	50	61	67	1.758.504.778,580	72	1.786.341.909,230	78	1.807.492.197,430	83	1.829.073.654,270	89	1.850.985.956,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					10.674.583.853,300		10.843.562.515,700		10.971.950.295,890		11.102.955.382,420		11.235.968.787,900	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.947.183.853,300		6.041.327.773,700		6.112.857.094,540		6.185.844.608,250		6.259.951.026,650	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	89,1	89,5	90	5.947.183.853,300	90,5	6.041.327.773,700	91	6.112.857.094,540	91,5	6.185.844.608,250	92	6.259.951.026,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					425.000.000,000		431.727.750,000		436.839.406,560		442.055.269,070		447.351.091,200	
Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, serta responsif	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	n/a	77	80,5	425.000.000,000	84	431.727.750,000	87,5	436.839.406,560	91	442.055.269,070	94,5	447.351.091,200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disebarluaskan (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase layanan informasi yang ditindaklanjuti (%)	80	82	84		86		88		90		92		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.302.400.000,000		4.370.506.992,000		4.422.253.794,790		4.475.055.505,100		4.528.666.670,050	
Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan Audit Teknologi Digital (%)	0	5,66	7,55	4.302.400.000,000	9,43	4.370.506.992,000	11,32	4.422.253.794,790	13,21	4.475.055.505,100	15,09	4.528.666.670,050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Teknologi Digital (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Aplikasi Digital Pemerintah Daerah yang diaudit (%)	0	1,89	3,77		3,77		5,66		5,66		5,66		
	persentase infrastruktur digital pemerintah yang diaudit (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	1,89	1,89	3,77		3,77		5,66		5,66		5,66		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.778.289.306,000		7.901.419.625,720		7.994.972.434,080		8.090.432.404,920		8.187.355.785,150	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.298.289.306,000		7.386.419.625,720		7.452.472.434,080		7.534.932.404,920		7.622.355.785,150	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	83	84	85	7.298.289.306,000	87	7.386.419.625,720	90	7.452.472.434,080	93	7.534.932.404,920	96	7.622.355.785,150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN					105.000.000,000		110.000.000,000		112.500.000,000		114.000.000,000		115.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERIKSAAN KOPERASI														
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat kelembagannya (%)	22,17	23,67	23,94	105.000.000,000	24,52	110.000.000,000	25,29	112.500.000,000	26,26	114.000.000,000	27,42	115.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2,32	3,21	3,29		3,81		4,00		4,45		4,97		
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	-11.34%	1.57%	1.57%		2.14%		2.71%		3.28%		3.85%		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					50.000.000,000		55.000.000,000		60.000.000,000		62.000.000,000		65.000.000,000	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	52,93	53,07	53,23	50.000.000,000	53,35	55.000.000,000	53,61	60.000.000,000	54,00	62.000.000,000	54,52	65.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase koperasi yang meningkat kualitas manajemennya (%)	29,90	32,13	33,21		34,95		36,70		38,47		40,24		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					50.000.000,000		55.000.000,000		60.000.000,000		62.000.000,000		60.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase kompetensi SDM Koperasi yang meningkat (%)	7,09	7,20	7,27	50.000.000,000	7,38	55.000.000,000	7,46	60.000.000,000	7,53	62.000.000,000	7,57	60.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	22,04	23,14	24,24		25,39		26,47		27,48		28,40		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					75.000.000,000		80.000.000,000		85.000.000,000		87.000.000,000		90.000.000,000	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Peningkatan Permodalan Koperasi (%)	-0,8	0,14	0,15	75.000.000,000	0,16	80.000.000,000	0,17	85.000.000,000	0,18	87.000.000,000	0,19	90.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					50.000.000,000		60.000.000,000		65.000.000,000		68.000.000,000		70.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Membuat laporan keuangan usaha mikro sesuai ketentuan (%)	0,95	1,22	1,45	50.000.000,000	1,63	60.000.000,000	1,79	65.000.000,000	1,93	68.000.000,000	2,05	70.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Peningkatan Klastersasi Usaha Mikro (%)	4,88	5,38	5,88		6,38		6,88		7,38		7,88		
	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang memiliki legalitas (%)	-47,70	0,90	1,60		1,90		2,20		2,60		2,90		
	Persentase usaha mikro yang meningkat kompetensinya (%)	2,81	2,76	2,85		2,93		3,00		3,05		3,1		
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	-48,06	2,03	7,11		11,37		14,66		17,28		19,41		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rasio usaha mikro yang ber NIB pada levelÂ Kabupaten (Rasio)	17,69	17,69	18,51		19,33		20,14		20,96		21,78		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					150.000.000,000		155.000.000,000		160.000.000,000		162.500.000,000		165.000.000,000	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Peningkatan akses Promosi usaha mikro (%)	0,05	0,06	0,08	150.000.000,000	0,09	155.000.000,000	0,10	160.000.000,000	0,11	162.500.000,000	0,12	165.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang mengakses Kemitraan (%)	0,04	0,05	0,065		0,075		0,084		0,094		0,104		
	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,05	0,06	0,077		0,088		0,096		0,107		0,115		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.263.044.539,000		5.346.358.534,000		5.409.659.419,000		5.474.250.752,000		5.539.832.276,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.768.044.539,000		4.843.530.534,000		4.900.865.419,000		4.959.386.752,000		5.018.792.276,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	89,18	80	80	4.768.044.539,000	80	4.843.530.534,000	81	4.900.865.419,000	81	4.959.386.752,000	82	5.018.792.276,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					100.000.000,000		100.791.000,000		101.392.000,000		102.005.000,000		102.630.000,000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Investasi (Miliar) (Angka)	1.455	1.456	1.457	100.000.000,000	1.458	100.791.000,000	1.459	101.392.000,000	1.460	102.005.000,000	1.461	102.630.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					70.000.000,000		71.107.000,000		71.952.000,000		72.810.000,000		73.685.000,000	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-36	0,30	0,35	70.000.000,000	0,40	71.107.000,000	0,45	71.952.000,000	0,50	72.810.000,000	0,55	73.685.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	-38,40	0,059	0,060		0,061		0,062		0,063		0,064		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					140.000.000,000		141.737.000,000		143.060.000,000		144.409.000,000		145.785.000,000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perizinan Berusaha (Indeks)	89,18	80	80	140.000.000,000	81	141.737.000,000	82	143.060.000,000	83	144.409.000,000	84	145.785.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					115.000.000,000		116.819.000,000		118.210.000,000		119.620.000,000		121.050.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	115.000.000,000	100	116.819.000,000	100	118.210.000,000	100	119.620.000,000	100	121.050.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM sesuai standar (%)	54,60	70	70		71		72		73		74		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					70.000.000,000		72.374.000,000		74.180.000,000		76.020.000,000		77.890.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	70.000.000,000	100	72.374.000,000	100	74.180.000,000	100	76.020.000,000	100	77.890.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					13.811.779.622,000		14.030.420.093,420		14.196.540.267,320		14.366.046.958,110		14.538.152.200,670	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.038.389.622,000		4.102.317.329,720		4.150.888.766,900		4.200.450.378,780		4.250.771.774,310	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	86,15	86,30	86,45	4.038.389.622,000	86,60	4.102.317.329,720	86,75	4.150.888.766,900	86,90	4.200.450.378,780	87,05	4.250.771.774,310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					550.000.000,000		558.706.500,000		565.321.584,960		572.071.524,680		578.924.941,550	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,010	0,010	0,012	550.000.000,000	0,014	558.706.500,000	0,016	565.321.584,960	0,018	572.071.524,680	0,020	578.924.941,550	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kepeloporan dan kewirausahaan (Orang)	250	600	600		650		700		750		800		
	Persentase organisasi kepemudaan yang yang meningkat kapasitas kompetensinya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					8.865.960.000,000		9.006.308.146,800		9.112.942.835,260		9.221.751.372,710		9.332.227.954,160	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet berperstasi di kejuaraan tingkat Provinsi (Orang)	134	134	136	8.865.960.000,000	140	9.006.308.146,800	144	9.112.942.835,260	150	9.221.751.372,710	155	9.332.227.954,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Cabang Olahraga yang berpartisipasi dalam kejuaraan (Organisasi)	16	16	18		21		23		25		28		Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Cabang Organisasi Olahraga Masyarakatakat yang Aktif (%)	70	70	70		72		74		76		78		
	Persentase Penduduk Usia 10 tahun Keatas yang berolahraga dalam satu minggu (%)	n/a	27	28		28,10		28,20		28,30		28,40		
	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	0,31	0,21	0,26		0,31		0,36		0,41		0,46		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					357.430.000,000		363.088.116,900		367.387.080,200		371.773.681,940		376.227.530,650	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif (%)	100	100	100	357.430.000,000	100	363.088.116,900	100	367.387.080,200	100	371.773.681,940	100	376.227.530,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					220.000.000,000		223.482.600,000		226.128.633,980		228.828.609,870		231.569.976,620	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					220.000.000,000		223.482.600,000		226.128.633,980		228.828.609,870		231.569.976,620	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan pemanfaatan data statistik sektoral	Nilai Prinsip Satu Data Indonesia (Nilai)	2	2	2,25	220.000.000,000	2,5	223.482.600,000	2,75	226.128.633,980	3	228.828.609,870	3,25	231.569.976,620	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Nilai Kualitas Data Statistik Sektoral (Nilai)	2,69	2,69	2,71		2,72		2,73		2,74		2,75		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					130.132.200,000		132.192.192,730		133.757.348,290		135.354.411,030		136.975.956,870	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					130.132.200,000		132.192.192,730		133.757.348,290		135.354.411,030		136.975.956,870	
Meningkatnya tata kelola teknologi dan pengamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Teknologi dan Keamanan Informasi (Nilai)	64	65	66	130.132.200,000	67	132.192.192,730	68	133.757.348,290	69	135.354.411,030	70	136.975.956,870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	17,43	21,79	30,07		35,08		40,09		45,1		48,37		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					13.168.953.634,000		13.377.418.170,020		13.535.806.801,140		13.697.424.334,330		13.861.519.477,870	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.366.963.634,000		8.499.412.668,320		8.600.045.714,310		8.702.730.260,140		8.806.988.968,660	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	100	100	100	8.366.963.634,000	100	8.499.412.668,320	100	8.600.045.714,310	100	8.702.730.260,140	100	8.806.988.968,660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.983.990.000,000		4.047.056.561,700		4.094.973.711,390		4.143.867.697,500		4.193.511.232,520	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan pelaku Seni Budaya (%)	3	3,5	4	3.983.990.000,000	5	4.047.056.561,700	6	4.094.973.711,390	7	4.143.867.697,500	8	4.193.511.232,520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase warisan budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	32	35	40		42		44		46		48		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					35.000.000,000		35.554.050,000		35.975.009,950		36.404.551,570		36.840.678,090	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan (%)	0	0	0,05	35.000.000,000	0,1	35.554.050,000	0,2	35.975.009,950	0,2	36.404.551,570	0,3	36.840.678,090	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	10	10	10		10		10		10		10		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					8.000.000,000		8.126.640,000		8.222.859,410		8.321.040,350		8.420.726,420	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	20	20	20	8.000.000,000	20	8.126.640,000	20	8.222.859,410	20	8.321.040,350	20	8.420.726,420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					175.000.000,000		177.770.250,000		179.875.049,760		182.022.757,850		184.203.390,490	
Meningkatnya Warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah Kebudayaan yang di tetapkan (Nilai)	3	4	3	175.000.000,000	3	177.770.250,000	4	179.875.049,760	3	182.022.757,850	3	184.203.390,490	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	8	8	8		8		8		8		8		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					600.000.000,000		609.498.000,000		616.714.456,320		624.078.026,920		631.554.481,690	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	5	80	80	600.000.000,000	80	609.498.000,000	80	616.714.456,320	80	624.078.026,920	80	631.554.481,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.519.015.589,000		5.606.381.605,770		5.672.761.163,990		5.740.493.932,280		5.809.265.049,600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.194.015.589,000		5.276.236.855,770		5.338.707.500,150		5.402.451.667,700		5.467.173.038,680	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	82,65	82,85	82,95	5.194.015.589,000	83,05	5.276.236.855,770	83,15	5.338.707.500,150	83,25	5.402.451.667,700	83,35	5.467.173.038,680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					275.000.000,000		279.353.250,000		282.660.792,480		286.035.762,340		289.462.470,780	
Meningkatnya Perpustakaan yang Memenuhi Standar Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar (Perpustakaan)	38	38	48	275.000.000,000	53	279.353.250,000	58	282.660.792,480	63	286.035.762,340	68	289.462.470,780	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Literasi (%)	8,98	8,98	8,98		8,99		8,99		9,00		9,00		
	Rata-Rata Ketersediaan Perpustakaan di Setiap Wilayah (Perpustakaan)	18,42	19,42	20,42		21,42		22,42		23,42		24,42		
	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Jumlah Penduduk (Buku)	0,73	0,75	0,76		0,77		0,78		0,80		0,81		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					50.000.000,000		50.791.500,000		51.392.871,360		52.006.502,240		52.629.540,140	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	20	20	50.000.000,000	20	50.791.500,000	20	51.392.871,360	20	52.006.502,240	20	52.629.540,140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					255.000.000,000		259.036.650,000		262.103.643,940		265.233.161,440		268.410.654,720	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					230.000.000,000		233.640.900,000		236.407.208,260		239.229.910,320		242.095.884,650	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (Nilai)	90,84	90,86	90,87	230.000.000,000	90,88	233.640.900,000	90,89	236.407.208,260	90,90	239.229.910,320	90,91	242.095.884,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Digitalisasi Arsip (%)	54,72	54,72	100		100		100		100		100		
	Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif (Nilai)	8,88	8,88	8,89		9,08		9,18		9,28		9,38		
	Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Statis (Nilai)	23,32	23,32	23,42		23,52		23,62		23,72		23,82		
	Nilai Komponen Penyusutan Arsip (Nilai)	25,00	25,00	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					25.000.000,000		25.395.750,000		25.696.435,680		26.003.251,120		26.314.770,070	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dimusnahkan (%)	3,77	5,65	7,54	25.000.000,000	9,43	25.395.750,000	11,32	25.696.435,680	13,20	26.003.251,120	15,09	26.314.770,070	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					8.720.400.075,000		8.858.444.008,000		8.963.327.982,000		9.070.350.118,000		9.179.012.913,000	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.873.600.075,000		5.966.579.164,000		6.037.223.461,000		6.109.307.909,000		6.182.497.417,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	92,50	92,50	93,50	5.873.600.075,000	94,50	5.966.579.164,000	95,50	6.037.223.461,000	96,50	6.109.307.909,000	97,50	6.182.497.417,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					285.000.000,000		289.511.550,000		292.939.365,000		296.437.062,000		299.988.378,000	
Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui Peningkatan Produktivitas Nelayan dan Pengelolaan Perairan Darat	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	9.191,08	9.788,50	10.456,08	285.000.000,000	10.615,52	289.511.550,000	11.137,81	292.939.365,000	11.685,79	296.437.062,000	12.260,73	299.988.378,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Produksi Perikanan Tangkap (%)	81,67	100	100		100		100		100		100		
	Persentase produktifitas nelayan tangkap (%)	-27,87	3,80	5,74		6,10		6,45		6,81		7,19		
	Persentase PUD yang dikelola oleh Kelompok (%)	75,00	77,50	80,00		82,50		85,00		87,50		90,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.126.600.000,000		2.160.264.078,000		2.185.841.604,000		2.211.940.552,000		2.238.439.601,000	
Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Budidaya melalui Ketersediaan Pakan, Pemanfaatan Benih Berkualitas, dan Pengendalian Kematian Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	49.221	53.552,45	58.522,12	2.126.600.000,000	57.780,90	2.160.264.078,000	60.953,07	2.185.841.604,000	64.299,40	2.211.940.552,000	67.829,43	2.238.439.601,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Kematian Ikan (%)	10,00	9,50	9,00		8,50		8,00		7,50		7,00		
	Persentase Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Benih ikan berkualitas (%)	4,15	4,36	4,58		4,80		5,04		5,30		5,56		
	Persentase Pembudidaya Ikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pakannya (%)	90,34	90,92	91,27		91,84		92,41		92,98		93,52		
	Produksi Perikanan Budidaya (%)	117,12	100	100		100		100		100		100		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					435.200.000,000		442.089.216,000		447.323.552,000		452.664.595,000		458.087.517,000	
Menguatnya Rantai Nilai Perikanan melalui	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	40,03	23,50	25,05	435.200.000,000	26,02	442.089.216,000	27,38	447.323.552,000	28,81	452.664.595,000	30,32	458.087.517,000	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Peningkatan Konsumsi, Kapasitas Kelompok Usaha, dan Ketersediaan Bahan Baku														menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Kelompok yang Meningkat kelasnya (Kelompok)	1,00	2,00	3,00		4,00		5,00		6,00		7,00		
	Prosentase ketersediaan bahan baku untuk usaha pengolahan hasil perikanan (%)	88,90	89,79	90,46		90,69		91,59		92,51		93,43		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.100.000.000,000		1.117.413.000,000		1.130.643.169,910		1.144.143.049,350		1.157.849.883,090	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					320.000.000,000		325.065.600,000		328.914.376,700		332.841.614,360		336.829.056,900	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Nilai Survey Kepuasan Wisatawan (Nilai)	80	81	83	320.000.000,000	84	325.065.600,000	85	328.914.376,700	86	332.841.614,360	87	336.829.056,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	10	10	10		10		10		10		10		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					160.000.000,000		162.532.800,000		164.457.188,350		166.420.807,180		168.414.528,450	
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisata (Orang)	1.000.000	1.200.000	1.800.000	160.000.000,000	1.800.000	162.532.800,000	1.800.000	164.457.188,350	1.800.000	166.420.807,180	1.800.000	168.414.528,450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	5	5	5		5		5		5		5		
	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing [hotel Berbintang non Bintang] (%)	5	5	5		5		5		5		5		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					20.000.000,000		20.316.600,000		20.557.148,540		20.802.600,890		21.051.816,050	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3,5	4,7	5,9	20.000.000,000	7,1	20.316.600,000	7,2	20.557.148,540	8,2	20.802.600,890	9,4	21.051.816,050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Peningkatan ruang Kreatif Sub Ekonomi Kreatif (%)	1	1	1		1		1		1		1		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					600.000.000,000		609.498.000,000		616.714.456,320		624.078.026,920		631.554.481,690	
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif (Nilai)	170	170	170	600.000.000,000	170	609.498.000,000	170	616.714.456,320	170	624.078.026,920	170	631.554.481,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	5	5	5		5		5		5		5		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					45.778.574.451,000		46.503.249.294,950		47.053.847.766,840		47.615.670.708,030		48.186.106.443,350	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.309.909.451,000		19.623.500.327,950		19.861.762.571,840		20.104.882.017,030		20.351.728.504,350	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah (Dinas Peternakan)	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	82,50	82,45	82,50	8.841.104.030,000	82,55	8.988.973.716,950	82,60	9.101.323.165,840	82,65	9.215.962.965,030	82,70	9.332.360.201,350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah (Dinas Pertanian)	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	84,34	84,52	84,70	10.468.805.421,000	85,50	10.634.526.611,000	86,30	10.760.439.406,000	87,00	10.888.919.052,000	88,05	11.019.368.303,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					8.593.600.000,000		8.712.286.902,000		8.806.970.079,000		8.902.929.424,000		9.003.569.740,000	
Meningkatnya budidaya peternakan yang sesuai standar	Persentase Budidaya Peternakan yang Memenuhi Standar (%)	16	17	18	1.785.000.000,000	19	1.795.906.764,000	20	1.808.700.000,000	21	1.821.100.000,000	22	1.836.900.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya optimalisasi sarana pertanian	Peningkatan Produksi tanaman Pangan (%)	-8,864	0,21	0,23	6.808.600.000,000	0,25	6.916.380.138,000	0,27	6.998.270.079,000	0,29	7.081.829.424,000	0,31	7.166.669.740,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanman Hortikultura (%)	6,207	0,24	0,26		0,28		0,30		0,31		0,33		
	Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan (%)	21,084	1,08	1,10		1,11		1,16		1,21		1,26		
	Ratio pemanfaatan sarana pertanian terhadap luasan lahan pertanian (%)	9,5	11,1	17,83		18,68		19,56		20,31		21,12		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					6.000.000.000,000		6.082.522.500,000		6.119.380.206,000		6.186.497.758,000		6.298.897.116,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	15.296	15.296	15.296	5.750.000.000,000	15.296	5.841.022.500,000	15.296	5.910.180.206,000	15.296	5.980.747.758,000	15.296	6.052.397.116,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Luas lahan sawah yang terairi oleh irigasi (%)	60,731	60,740	60,952		61,173		61,408		61,659		61,924		
Meningkatnya prasarana peternakan dan Kesehatan hewan yang berfungsi optimal	Persentase Prasarana Peternakan Keswan yang berfungsi optimal (%)	n/a	58,33	64,17	250.000.000,000	66,66	241.500.000,000	70,00	209.200.000,000	72,00	205.750.000,000	75,00	246.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					2.655.800.000,000		2.678.000.000,000		2.704.373.500,000		2.730.837.395,000		2.748.504.800,000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta berkembangnya unit	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	85	87	90	2.655.800.000,000	91	2.678.000.000,000	93	2.704.373.500,000	94	2.730.837.395,000	95	2.748.504.800,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
usaha peternakan yang memenuhi standar higiene dan sanitasi														
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	n/a	n/a	82		84		86		90		95		
	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan (%)	n/a	2,90	6,25		8,00		8,70		9,50		12,30		
	Persentase Penigkatan Unit Usaha Peternakan yang Memenuhi Standar Higiene Sanitasi (%)	n/a	n/a	0,56		0,84		1,27		1,55		1,83		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					2.325.000.000,000		2.361.909.000,000		2.391.072.083,000		2.420.299.103,000		2.449.958.846,000	
Meningkatnya penanganan dan pengendalian akibat bencana di bidang peternakan	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	80	20	25	25.000.000,000	30	25.500.000,000	35	27.000.000,000	40	28.000.000,000	45	29.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	25,77	31,79	52,06	2.300.000.000,000	53,48	2.336.409.000,000	54,18	2.364.072.083,000	54,87	2.392.299.103,000	55,39	2.420.958.846,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (%)	7,43	7,94	20,96		22,31		22,72		23,12		23,23		
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	7,43	7,94	20,96		22,31		22,72		23,12		23,23		
	Ratio luas tanam yang rusak dibandingkan luas tanam keseluruhan pada komoditas unggulan (%)	n/a	11	4,51		4,57		4,63		4,68		4,73		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					20.000.000,000		40.500.000,000		41.500.000,000		42.500.000,000		43.500.000,000	
Meningkatnya Status Usaha dari Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Legalitas (%)	n/a	19	20	20.000.000,000	20,30	40.500.000,000	20,60	41.500.000,000	20,80	42.500.000,000	21	43.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					6.874.265.000,000		7.004.530.565,000		7.128.789.327,000		7.227.725.011,000		7.289.947.437,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	4,72	5,56	7,1	6.839.265.000,000	9,2	6.947.530.565,000	11,1	7.029.789.327,000	13,8	7.113.725.011,000	15,7	7.198.947.437,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi (%)	n/a	0,4	1,8		3,6		5,4		7,6		9,2		
	Persentase kelompok tani yang naik kelas (%)	3,7	3,7	4,50		4,75		4,9		5,1		5,4		
Meningkatnya Pengembangan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Pelaku Usaha Peternakan (%)	n/a	1,00	1,00	35.000.000,000	1,50	57.000.000,000	2,00	99.000.000,000	2,50	114.000.000,000	3,00	91.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.040.000.000,000		2.290.000.000,000		2.482.000.000,000		2.643.000.000,000		2.785.000.000,000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					10.000.000,000		10.000.000,000		12.000.000,000		18.000.000,000		20.000.000,000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	55,07	60,18	63,33	10.000.000,000	64,53	10.000.000,000	64,60	12.000.000,000	65,60	18.000.000,000	66,50	20.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Presentase kepatuhan perizinan berusaha perdagangan (%)	5,23	5,81	5,84		10,6		10,70		12,10		14,20		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.150.000.000,000		1.370.000.000,000		1.510.000.000,000		1.610.000.000,000		1.680.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	64,51	35,48	12,9	1.150.000.000,000	16,12	1.370.000.000,000	19,35	1.510.000.000,000	22,58	1.610.000.000,000	25,8	1.680.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Presentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dalam kondisi layak (%)	83,87	84,38	87,09		87,09		90,32		90,32		90,32		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					165.000.000,000		235.000.000,000		265.000.000,000		290.000.000,000		310.000.000,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	74,57	75,52	77,08	165.000.000,000	78,64	235.000.000,000	80,20	265.000.000,000	81,76	290.000.000,000	83,32	310.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	rasio selisih harga di tingkat produsen dan konsumen (%)	33,29	32,95	32,65		32,29		31,95		31,61		31,27		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					265.000.000,000		255.000.000,000		270.000.000,000		270.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya produk berorientasi ekspor	jumlah negara/kabupaten tujuan ekspor (Angka)	n/a	3	4	265.000.000,000	5	255.000.000,000	6	270.000.000,000	7	270.000.000,000	8	300.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	jumlah produk yang berpotensi ekspor (Angka)	n/a	2	3		4		5		6		7		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					275.000.000,000		275.000.000,000		275.000.000,000		275.000.000,000		280.000.000,000	
Meningkatnaya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	n/a	n/a	100	275.000.000,000	100	275.000.000,000	100	275.000.000,000	100	275.000.000,000	100	280.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	presentase peningkatan metrologi legal dalam bidang perdagangan (%)	4	4,10	4,25		4,55		4,75		5,00		5,10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					175.000.000,000		145.000.000,000		150.000.000,000		180.000.000,000		195.000.000,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Prosentase peningkatan pemasaran produk dalam negeri (%)	n/a	n/a	0,2	175.000.000,000	0,3	145.000.000,000	0,3	150.000.000,000	0,3	180.000.000,000	0,3	195.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					17.631.680.008,000		17.693.082.702,530		17.737.682.401,720		17.818.105.409,600		17.921.229.452,410	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.345.680.008,000		16.389.082.702,530		16.398.682.401,720		16.451.105.409,600		16.512.229.452,410	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	82,25	82,50	82,75	16.345.680.008,000	90,00	16.389.082.702,530	91,00	16.398.682.401,720	92,00	16.451.105.409,600	92	16.512.229.452,410	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.254.000.000,000		1.270.000.000,000		1.300.000.000,000		1.320.000.000,000		1.350.000.000,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (%)	14,42	14,50	14,60	1.254.000.000,000	14,70	1.270.000.000,000	14,80	1.300.000.000,000	14,90	1.320.000.000,000	15,00	1.350.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (%)	20	20	20		20		20		20		20		
	Persentase produk IKM yang berkualitas (%)	95,97	96	96,1		96,2		96,3		96,4		96,5		
	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor (%)	10,9	11	11,1		11,2		11,3		11,4		11,5		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					22.000.000,000		22.000.000,000		27.000.000,000		30.000.000,000		35.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	22.000.000,000	100	22.000.000,000	100	27.000.000,000	100	30.000.000,000	100	35.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	-Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan. (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	-Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Industri yang telah dilakukan pengawasan. (%)													
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					10.000.000,000		12.000.000,000		12.000.000,000		17.000.000,000		24.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Prosentase IKM yang melakukan pelaporan tepat waktu (%)	10	10,5	11	10.000.000,000	11,5	12.000.000,000	12	12.000.000,000	12,5	17.000.000,000	13	24.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					100.000.000,000		101.583.000,000		102.785.742,000		104.013.004,000		105.259.080,000	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					100.000.000,000		101.583.000,000		102.785.742,000		104.013.004,000		105.259.080,000	
Meningkatnya kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang di fasilitasi (%)	100	100	100	100.000.000,000	100	101.583.000,000	100	102.785.742,000	100	104.013.004,000	100	105.259.080,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					80.424.264.437,000		81.697.380.543,040		82.664.677.528,660		83.651.693.778,350		84.653.841.069,820	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					50.992.122.037,000		51.799.327.328,850		52.412.631.364,420		53.038.438.182,910		53.673.838.672,340	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Administrasi Umum dan Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	89,83	85,5	86	50.992.122.037,000	86,5	51.799.327.328,850	87	52.412.631.364,420	87,5	53.038.438.182,910	88	53.673.838.672,340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Administrasi Umum dan Pelayanan Publik (%)	n/a	82,55	83,26		83,94		84,56		85,29		85,94		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					27.741.401.000,000		28.180.547.377,830		28.514.205.058,780		28.854.664.667,190		29.200.343.549,900	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (%)	n/a	84,29	77,58	27.741.401.000,000	78,20	28.180.547.377,830	78,75	28.514.205.058,780	79,37	28.854.664.667,190	79,92	29.200.343.549,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.690.741.400,000		1.717.505.836,360		1.737.841.105,460		1.758.590.928,250		1.779.658.847,580	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Reformasi Birokrasi Perekonomian dan Pembangunan (%)	n/a	63,5	65,33	1.690.741.400,000	68,17	1.717.505.836,360	68,50	1.737.841.105,460	70,83	1.758.590.928,250	71,33	1.779.658.847,580	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					77.657.616.528,000		78.886.936.595,000		79.820.957.924,000		80.774.020.161,000		81.741.692.823,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					47.184.397.381,000		47.931.326.390,000		48.498.833.295,000		49.077.909.364,000		49.665.862.719,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Atas Layanan Umum Sekretariat DPRD (Indeks)	n/a	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	88,33	88,83	89,33		89,83		90,33		90,83		91,33		
	Persentase Pengaduan bagian layanan umum yang diselesaikan (%)	n/a	80	81		82		83		84		85		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					30.473.219.147,000		30.955.610.205,000		31.322.124.629,000		31.696.110.797,000		32.075.830.104,000	
Meningaktnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah APBD Tahun N (Tepat Waktu)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	41	100	100		100		100		100		100		
5.01 - PERENCANAAN					14.009.890.430,770		14.231.678.170,820		14.400.241.356,680		14.572.126.654,480		14.746.690.860,010	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.128.420.430,770		11.333.578.170,820		11.476.771.356,680		11.603.296.654,480		11.648.290.860,010	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	85,69	85,69	85,98	11.128.420.430,770	86,27	11.333.578.170,820	86,55	11.476.771.356,680	86,84	11.603.296.654,480	86,98	11.648.290.860,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					622.270.000,000		625.600.000,000		631.240.000,000		656.400.000,000		773.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Tindak Lanjut Berdasarkan Rekomendasi Hasil Fasilitasi Gubernur (%)	100	100	100	622.270.000,000	100	625.600.000,000	100	631.240.000,000	100	656.400.000,000	100	773.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah Dengan Tingkat Capaian minimal 80% (%)	96,7	97,05	97,38		97,7		98,03		98,36		98,69		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.259.200.000,000		2.272.500.000,000		2.292.230.000,000		2.312.430.000,000		2.325.400.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi/Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah dan Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rekomendasi Strategi/Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	2.259.200.000,000	100	2.272.500.000,000	100	2.292.230.000,000	100	2.312.430.000,000	100	2.325.400.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Terverifikasi (%)	45	80	82		84		86		88		90		
5.02 - KEUANGAN					507.898.852.651,000		515.938.891.487,710		522.047.607.963,650		528.280.856.402,750		534.609.661.062,470	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.849.307.011,000		40.480.121.540,970		40.959.406.180,000		41.448.461.489,810		41.945.014.058,460	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah (BPKAD)	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	84,2	84,5	85	16.089.733.431,000	86	16.344.433.911,200	86,5	16.537.952.008,700	87	16.735.415.155,700	88,31	16.935.905.429,270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah (BAPENDA)	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	84,61	84,70	84,90	23.759.573.580,000	85,10	24.135.687.629,770	85,25	24.421.454.171,300	85,50	24.713.046.334,110	85,75	25.009.108.629,190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					453.854.545.640,000		461.039.063.096,740		466.497.765.604,550		472.067.748.925,870		477.723.120.558,010	
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	32,08	25,91	29,43	453.854.545.640,000	32	461.039.063.096,740	33,18	466.497.765.604,550	34,82	472.067.748.925,870	35	477.723.120.558,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	38,38	40,14	39,40		39		38		37		37		
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	14,14	2,49	2,49		2,49		2,49		2,49		2,49		
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	92,21	92	93,71		93,65		94,12		94,60		95,70		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.100.000.000,000		1.117.413.000,000		1.130.643.169,920		1.144.143.049,360		1.157.849.883,100	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	3,77	1,91	2,23	1.100.000.000,000	2,46	1.117.413.000,000	2,67	1.130.643.169,920	2,78	1.144.143.049,360	3,24	1.157.849.883,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					13.095.000.000,000		13.302.293.850,000		13.459.793.009,180		13.620.502.937,710		13.783.676.562,900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	18	19	20	13.095.000.000,000	21	13.302.293.850,000	22	13.459.793.009,180	23	13.620.502.937,710	24	13.783.676.562,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Jumlah Data Target Retribusi Daerah yang diriview (Data)	17	17	17		17		17		17		17		
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
	Rasio Kepatuhan Pajak (Rasio)	90,0	91,0	91,0		91,5		92,0		92,5		93,0		
	Tingkat Pertumbuhan Objek Pajak daerah (%)	5.462 %	5.468 %	5.476%		5.484%		5.490 %		5.495%		5.502 %		
	Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah (%)	5.070%	5.080 %	5.090 %		5.100 %		5.109 %		5.116%		5.126 %		
5.03 - KEPEGAWAIAN					9.763.683.313,000		9.918.242.419,840		10.035.674.410,090		10.155.500.362,550		10.277.163.256,890	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.567.683.313,000		8.703.309.739,840		8.806.356.927,160		8.911.504.828,870		9.018.264.656,720	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	85,25	85,5	86	8.567.683.313,000	86,5	8.703.309.739,840	87	8.806.356.927,160	87,5	8.911.504.828,870	88	9.018.264.656,720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.196.000.000,000		1.214.932.680,000		1.229.317.482,930		1.243.995.533,680		1.258.898.600,170	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	n/a	22,9	22,29	1.196.000.000,000	18,62	1.214.932.680,000	18,76	1.229.317.482,930	17,43	1.243.995.533,680	17,43	1.258.898.600,170	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (Indeks)	93,12	94,00	94,5		95,00		95,5		96,00		96,50		
	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)	8,53	10	10		10		10		10		10		
	Persentase Pegawai dengan Nilai Kinerja Minimal Baik (%)	99,74	99,5	99,5		99,5		99,5		99,5		99,5		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					835.000.000,000		848.218.050,000		858.260.951,710		868.508.587,480		878.913.320,350	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					835.000.000,000		848.218.050,000		858.260.951,710		868.508.587,480		878.913.320,350	
Meningkatnya Dukungan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	8,53	10	10,1	835.000.000,000	10,2	848.218.050,000	10,3	858.260.951,710	10,4	868.508.587,480	10,5	878.913.320,350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.767.851.531,000		3.827.496.620,730		3.872.814.180,280		3.919.055.582,030		3.966.005.867,900	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					2.892.851.531,000		2.938.645.370,730		2.973.438.931,920		3.008.941.792,770		3.044.988.915,440	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	84,25	84,4	84,5	2.892.851.531,000	85	2.938.645.370,730	85,5	2.973.438.931,920	86	3.008.941.792,770	86,5	3.044.988.915,440	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					675.000.000,000		685.685.250,000		693.803.763,360		702.087.780,290		710.498.791,900	
Meningkatnya Penelitian dan Pengambangan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	0	100	675.000.000,000	100	685.685.250,000	100	693.803.763,360	100	702.087.780,290	100	710.498.791,900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Riset Yang Berkualitas (%)	65	65	100		100		100		100		100		
	Persentase Riset yang Didiseminasikan (%)	67	67	100		100		100		100		100		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					200.000.000,000		203.166.000,000		205.571.485,000		208.026.008,970		210.518.160,560	
Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	72	200.000.000,000	73	203.166.000,000	74	205.571.485,000	75	208.026.008,970	76	210.518.160,560	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	0	0	50		51		52		53		54		
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	0	50		51		53		54		55		
	Jumlah Stakholder yang terlibat dalam jejaring inovasi daerah (Nilai)	1	1	1		1		1		1		1		
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Rata-rata Kematangan Inovasi Daerah (Skor)	65,185	66	67		68		69		70		71		
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					13.178.078.702,000		13.386.687.687,850		13.545.186.070,080		13.706.915.591,760		13.871.124.440,540	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.053.078.702,000		11.228.048.937,850		11.360.989.037,280		11.496.639.246,380		11.634.368.984,550	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	86,75	87	87,50	11.053.078.702,000	88	11.228.048.937,850	88,50	11.360.989.037,280	89	11.496.639.246,380	89,50	11.634.368.984,550	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.300.000.000,000		1.320.579.000,000		1.336.214.655,360		1.352.169.058,350		1.368.368.043,660	
Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Persentase Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal (%)	90	90	90	1.300.000.000,000	90	1.320.579.000,000	90	1.336.214.655,360	90	1.352.169.058,350	90	1.368.368.043,660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Pengawasan yang Dilakukan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					825.000.000,000		838.059.750,000		847.982.377,440		858.107.287,030		868.387.412,330	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Nilai Komponen Dukungan Pengawasan (Nilai)	1,8	1,8	1,825	825.000.000,000	1,85	838.059.750,000	1,85	847.982.377,440	1,875	858.107.287,030	1,875	868.387.412,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Jumlah Unit Kerja yang Ditetapkan sebagai Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas WBK/WBBM (Unit Kerja)	3	3	3		3		3		3		3		
	Nilai Komponen Peran dan Layanan Pengawasan (Nilai)	1,2	1,2	1,225		1,225		1,25		1,25		1,275		
7.01 - KECAMATAN					84.397.642.255,000		85.733.654.078,690		86.748.681.587,610		87.784.524.593,050		88.836.183.202,450	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					74.126.472.655,000		75.299.895.863,930		76.191.446.630,770		77.101.172.502,520		78.024.844.550,920	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Bandung)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	92,31	93,84	94	3.565.438.418,000	94,05	3.621.879.308,160	94,10	3.664.762.359,170	94,15	3.708.519.621,730	94,20	3.752.947.686,800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	70	72	73		75		77		79		80		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Besuki)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	84,70	86,84	87,10	2.942.986.275,000	87,37	2.989.573.747,730	87,63	3.024.970.300,910	87,69	3.061.088.446,300	88,16	3.097.760.285,890	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	n/a	n/a	76		78		80		83		85		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Boyolangu)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	100	94,17	95,05	2.713.291.998,000	96,50	2.756.243.410,330	97,00	2.788.877.332,310	97,00	2.822.176.527,650	98,00	2.855.986.202,460	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Campurdarat)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	84	85	85,75	2.534.473.480,000	86,5	2.574.595.068,000	87	2.605.078.274,000	87,5	2.636.182.909,000	88	2.667.764.380,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Gondang)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	89,67	89,75	89,85	3.827.326.536,000	89,95	3.887.913.115,060	90	3.933.946.006,350	90,05	3.980.917.321,660	90,10	4.028.608.711,180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	n/a	n/a	86		87		88		89		90		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Kalidawir)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	91,43	92	92,1	3.076.440.397,000	92,2	3.125.140.448,480	92,3	3.162.142.111,390	92,4	3.199.898.088,200	92,5	3.238.232.867,300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	84	85	86		87		88		89		90		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Karangrejo)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	n/a	84,75	85,87	3.109.226.933,000	86,35	3.158.445.995,350	87,12	3.195.841.995,930	88	3.234.000.349,370	88,45	3.272.743.673,550	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	70	70	75		78		80		83		85		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Kauman)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	n/a	75	78	3.419.140.796,000	81	3.473.265.794,800	85	3.514.389.261,810	88	3.556.351.069,600	90	3.598.956.155,410	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	89	90	91		91,2		91,4		91,6		91,8		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Kedungwaru)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	n/a	81,17	81,20	3.014.321.055,000	81,22	3.062.038.031,570	81,24	3.098.292.561,870	81,26	3.135.286.175,060	81,28	3.172.846.903,430	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	100	95	95		95		95		95		95		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Ngantru)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	n/a	85	85,50	2.880.518.515,000	86	2.926.117.123,000	86,05	2.960.762.349,000	87	2.996.113.850,000	87,05	3.032.007.296,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	n/a	70	72		74		76		78		80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Ngunut)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	87,50	91,62	92,00	3.149.831.876,000	92,50	3.199.693.714,600	93,00	3.237.578.088,180	93,50	3.276.234.770,550	94,00	3.315.484.063,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	89,50	90,00	90,20		90,40		90,60		90,80		91,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Pagerwojo)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	87,00	88,16	89,00	3.052.785.364,000	89,50	3.101.110.956,310	90,00	3.137.828.110,030	90,50	3.175.293.777,670	91,00	3.213.333.797,130	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	74	75	76		78		80		83		85		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Pakel)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	n/a	86,46	87,75	3.346.923.394,000	88	3.399.905.191,330	88,25	3.440.160.068,790	88,50	3.481.235.580,010	88,75	3.522.940.782,260	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	n/a	n/a	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Pucanglaban)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	90	100	100	2.574.971.010,000	100	2.615.732.801,090	100	2.646.703.077,450	100	2.678.304.712,200	100	2.710.390.802,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	87,85	88,75	88,85		88,95		89,05		89,15		89,25		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Rejotangan)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	85	85,22	85,50	2.892.549.289,000	85,75	2.938.338.344,240	86,00	2.973.128.270,240	86,25	3.008.627.421,790	86,50	3.044.670.778,300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	80	80	80		80		80		80		80		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Sendang)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	77,85	78,95	84,27	2.435.713.022,000	85,58	2.474.270.359,140	87,03	2.503.565.720,190	88,42	2.533.458.294,890	89,8	2.563.809.125,260	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	78	79	80		81		82		83		84		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Sumbergempol)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	n/a	80,54	81,00	2.861.570.210,000	81,50	2.906.868.866,420	82,00	2.941.286.193,800	82,50	2.976.405.150,960	83,00	3.012.062.484,670	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	80	82	84		86		88		90		92		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Tanggunggunung)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	87,02	89,23	91,35	3.220.358.336,000	91,46	3.271.336.608,460	91,54	3.310.069.233,900	91,91	3.349.591.460,560	92,88	3.389.719.566,250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah (Kecamatan Tulungagung)	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan (Indeks)	89	90	91	19.508.605.751,000	92	19.817.426.979,860	93	20.052.065.315,450	94	20.291.486.975,320	95	20.534.578.989,280	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan (%)	n/a	85	86		87		88		89		90		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					109.200.000,000		110.928.636,000		112.242.030,640		113.582.200,200		114.942.915,210	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Bandung)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Besuki)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Boyolangu)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Campurdarat)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	9.200.000,000	100	9.345.636,000	100	9.456.288,000	100	9.569.196,000	100	9.683.835,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Gondang)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Kalidawir)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Karangrejo)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Kauman)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.158.300,000	100	10.278.574,270	100	10.401.300,450	100	10.525.908,030	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
(Kecamatan Kedungwaru)														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Ngantru)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,000	100	5.200.650,000	100	5.262.954,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Ngunut)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Pagerwojo)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Pakel)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Pucanglaban)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Rejotangan)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Sendang)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.158.300,000	100	10.278.574,270	100	10.401.300,450	100	10.525.908,030	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Sumbergempol)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Tanggunggunung)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Tulungagung)	Persentase Penanganan Aduan Pelayanan Publik Tepat Waktu (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.079.150,000	100	5.139.287,140	100	5.200.650,220	100	5.262.954,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7.988.291.600,000		8.114.746.256,020		8.210.761.851,050		8.308.862.098,740		8.408.402.266,820	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Bandung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	88.000.000,000	100	89.393.040,000	100	90.451.453,590	100	91.531.443,950	100	92.627.990,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Besuki)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	84.919.800,000	100	86.264.080,430	100	87.285.447,150	100	88.327.635,390	100	89.385.800,460	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Boyolangu)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	88.000.000,000	100	89.393.040,000	100	90.451.453,590	100	91.531.443,950	100	92.627.990,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Campurdarat)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	86.345.550,000	100	87.367.881,000	100	88.411.053,000	100	89.470.218,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Gondang)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	88.000.000,000	100	89.393.040,000	100	90.451.453,590	100	91.531.443,950	100	92.627.990,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Kalidawir)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	88.000.000,000	100	89.393.040,000	100	90.451.453,590	100	91.531.443,950	100	92.627.990,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Karangrejo)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	86.345.550,000	100	87.367.881,310	100	88.411.053,810	100	89.470.218,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Kauman)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	86.345.550,000	100	87.367.881,310	100	88.411.053,810	100	89.470.218,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Kedungwaru)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	88.000.000,000	100	89.393.040,000	100	90.451.453,590	100	91.531.443,950	100	92.627.990,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Ngantru)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	86.345.550,000	100	87.367.881,000	100	88.411.053,000	100	89.470.218,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	88.000.000,000	100	89.393.040,000	100	90.451.453,590	100	91.531.443,950	100	92.627.990,650	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kelurahan (Kecamatan Ngunut)														Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Pagerwojo)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	82.621.800,000	100	83.929.703,090	100	84.923.430,780	100	85.937.416,540	100	86.966.946,790	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Kecamatan Pakel)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	86.345.550,000	100	87.367.881,310	100	88.411.053,810	100	89.470.218,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Pucanglaban)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	86.345.550,000	100	87.304.881,310	100	88.411.053,810	100	89.470.218,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Rejotangan)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	86.345.550,000	100	87.367.881,310	100	88.411.053,810	100	89.470.218,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Sendang)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	86.345.550,000	100	87.367.881,310	100	88.411.053,810	100	89.470.218,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Sumbergempol)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	86.750.000,000	100	88.123.252,500	100	89.166.631,810	100	90.231.281,390	100	91.312.252,140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Tanggunggunung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	85.000.000,000	100	86.345.550,000	100	87.367.881,310	100	88.411.053,810	100	89.470.217,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Tulungagung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	6.441.000.000,000	100	6.542.961.030,000	100	6.620.429.688,600	100	6.699.477.619,050	100	6.779.737.360,850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.100.000.000,000		1.117.409.000,000		1.130.643.169,480		1.144.143.048,010		1.157.849.882,810	
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Bandung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Besuki)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	65.000.000,000	100	66.028.950,000	100	66.810.732,770	100	67.608.452,920	100	68.418.402,180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Boyolangu)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Campurdarat)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	65.000.000,000	100	66.028.950,000	100	66.810.732,770	100	67.608.452,000	100	68.418.402,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Gondang)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Kalidawir)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Karangrejo)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Kauman)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	65.000.000,000	100	66.028.950,000	100	66.810.732,770	100	67.608.452,920	100	68.418.402,180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Kedungwaru)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	65.000.000,000	100	66.028.950,000	100	66.810.732,770	100	67.608.452,920	100	68.418.402,180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Ngantru)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,000	100	57.207.152,000	100	57.892.494,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Ngunut)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Pagerwojo)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	65.000.000,000	100	66.028.950,000	100	66.810.732,770	100	67.608.452,920	100	68.418.402,180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Pakel)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Pucanglaban)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Rejotangan)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Sendang)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	60.000.000,000	100	60.945.800,000	100	61.671.445,630	100	62.407.802,690	100	63.155.448,170	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Sumbergempol)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Tanggunggunung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Tulungagung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000,000	100	55.870.650,000	100	56.532.158,500	100	57.207.152,470	100	57.892.494,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					659.678.000,000		670.120.702,740		678.054.931,610		686.150.906,690		694.370.995,040	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Bandung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Besuki)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	34.726.000,000	100	35.275.712,580	100	35.693.377,020	100	36.119.555,940	100	36.552.268,220	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Campurdarat)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,820	100	36.404.551,000	100	36.840.678,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Gondang)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Kalidawir)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Karangrejo)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Kauman)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	40.000.000,000	100	40.633.200,000	100	41.114.297,090	100	41.605.201,800	100	42.103.632,110	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Kedungwaru)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	45.000.000,000	100	45.712.350,000	100	46.253.584,220	100	46.805.852,020	100	47.366.586,130	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Ngantru)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	33.000.000,000	100	33.522.390,000	100	33.919.295,000	100	34.324.291,000	100	34.735.496,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Ngunut)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Pagerwojo)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	28.952.000,000	100	29.410.310,160	100	29.758.528,230	100	30.113.845,060	100	30.474.608,920	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Pakel)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Pucanglaban)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	33.000.000,000	100	33.522.390,000	100	33.919.295,100	100	34.324.291,480	100	34.735.496,490	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Rejotangan)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Sendang)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
(Kecamatan Sumbergempol)														Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Tanggunggunung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Tulungagung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	25.000.000,000	100	25.395.750,000	100	25.696.435,680	100	26.003.251,120	100	26.314.770,070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Boyolangu)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.554.050,000	100	35.975.009,950	100	36.404.551,570	100	36.840.678,100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					414.000.000,000		420.553.620,000		425.532.974,060		430.613.836,890		435.772.591,650	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Desa (Kecamatan Kauman)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	45.000.000,000	100	45.712.350,000	100	46.253.584,220	100	46.805.852,020	100	47.366.586,130	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Bandung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	32.000.000,000	100	32.506.560,000	100	32.891.437,670	100	33.284.161,440	100	33.682.905,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Besuki)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.237.450,000	100	15.417.861,410	100	15.601.950,670	100	15.788.862,040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Gondang)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	20.316.600,000	100	20.557.148,540	100	20.802.600,900	100	21.051.816,060	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Kalidawir)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	32.000.000,000	100	32.506.560,000	100	32.891.437,670	100	33.284.161,440	100	33.682.905,690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Kedungwaru)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	47.000.000,000	100	47.744.010,000	100	48.309.299,080	100	48.886.112,100	100	49.471.767,730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Ngantru)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.237.450,000	100	15.417.861,000	100	15.601.950,000	100	15.788.862,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Ngunut)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	37.000.000,000	100	37.585.710,000	100	38.030.724,810	100	38.484.811,660	100	38.945.859,700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Pagerwojo)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.237.450,000	100	15.417.861,410	100	15.601.950,670	100	15.788.862,040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Pakel)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.237.450,000	100	15.417.861,410	100	15.601.950,670	100	15.788.862,040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Pucanglaban)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.237.450,000	100	15.417.861,410	100	15.601.950,670	100	15.788.862,040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Rejotangan)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.237.450,000	100	15.417.861,410	100	15.601.950,670	100	15.788.862,040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Sendang)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	25.000.000,000	100	25.395.750,000	100	25.696.435,680	100	26.003.251,120	100	26.314.770,070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Sumbergempol)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	17.000.000,000	100	17.269.110,000	100	17.473.576,260	100	17.682.210,760	100	17.894.043,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Tanggunggunung)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.237.450,000	100	15.417.861,410	100	15.601.950,670	100	15.788.862,040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Boyolangu)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	17.000.000,000	100	17.269.110,000	100	17.473.576,260	100	17.682.210,760	100	17.894.043,650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Campurdarat)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	22.000.000,000	100	22.348.260,000	100	22.612.863,000	100	22.882.860,000	100	23.156.997,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.237.450,000	100	15.417.861,410	100	15.601.950,670	100	15.788.862,040	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemerintahan Desa (Kecamatan Karangrejo)														Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.287.766.276,000		16.545.601.616,150		16.741.501.539,280		16.941.395.067,650		17.144.352.980,570	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.793.177.276,000		3.853.223.272,280		3.898.845.435,820		3.945.397.650,330		3.992.663.514,180	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	87,49	87,50	87,55	3.793.177.276,000	87,60	3.853.223.272,280	87,65	3.898.845.435,820	87,70	3.945.397.650,330	87,75	3.992.663.514,180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					861.000.000,000		874.629.630,000		884.985.244,820		895.551.968,630		906.280.681,230	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Skor Wawasan Kebangsaan (Skor)	0	92,33	92,42	861.000.000,000	92,51	874.629.630,000	92,61	884.985.244,820	92,70	895.551.968,630	92,79	906.280.681,230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					4.676.454.000,000		4.750.482.266,820		4.806.727.976,860		4.864.120.308,900		4.922.392.470,200	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (%)	100	100	100	4.676.454.000,000	100	4.750.482.266,820	100	4.806.727.976,860	100	4.864.120.308,900	100	4.922.392.470,200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					4.469.615.000,000		4.540.369.005,450		4.594.126.974,470		4.648.980.850,550		4.704.675.641,140	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	75	75,75	4.469.615.000,000	76,51	4.540.369.005,450	77,27	4.594.126.974,470	78,05	4.648.980.850,550	78,83	4.704.675.641,140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE-LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG-GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					93.000.000,000		94.472.190,000		95.590.740,730		96.732.094,170		97.890.944,660	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Masyarakat (Indeks)	100	78,55	79,34	93.000.000,000	80,13	94.472.190,000	80,93	95.590.740,730	81,74	96.732.094,170	82,56	97.890.944,660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					2.394.520.000,000		2.432.425.251,600		2.461.225.166,580		2.490.612.195,070		2.520.449.729,160	
Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Masyakarakat	Peta Potensi Konflik (Peta)	1	1	1	2.394.520.000,000	1	2.432.425.251,600	1	2.461.225.166,580	1	2.490.612.195,070	1	2.520.449.729,160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					3.039.104.921.486,490		3.087.213.952.387,520		3.123.766.565.583,790		3.161.064.338.376,870		3.198.933.889.150,630	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. IKU Daerah bersumber dari indikator tujuan RPJMD berjumlah 9 indikator yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tulungagung 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,64	3,67	3,70	3,73	3,76	3,79	3,82
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,86	4,90	4,94	4,98	5,02	5,06	5,07
3	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	46,01	49,35	52,39	55,42	58,61	61,64	64,75
4	Persentase Desa Mandiri	%	42,41	42,80	43,58	44,75	46,30	47,47	48,60
5	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	203.634,80	207.707,49	211.861,64	216.098,88	220.420,85	224.829,27	229.325,86
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	77,50	78,27	79,05	79,84	80,64	81,45	82,26
7	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	0,681	0,684	0,687	0,690	0,693	0,696	0,699
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,98	144,54	141,10	137,82	134,69	131,69	127,74
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,48	71,90	71,98	72,06	72,14	72,22	72,30
10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,13	76,55	76,62	76,89	77,15	77,42	77,79
11	Indeks Pembangunan Masyarakat (iPMAS)	Nilai	0,73	0,73	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75
12	Rata-rata Lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,68	9,03	9,14	9,26	9,39	9,51	9,63
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	13,42	13,48	13,53	13,59	13,65	13,71
14	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,20	75,32	75,58	75,84	76,09	76,35	76,61
15	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	n/a	7,05	7,12	7,19	7,26	7,34	7,48
16	Tingkat Kemiskinan	%	6,28	5,93	5,74	5,49	5,30	4,98	4,35

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
17	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	66,42	66,391	64.575	62.043	60.149	56.740	49.741
18	Indeks Gini	Nilai	0,321	0,319	0,317	0,315	0,306	0,298	0,289
19	Garis Kemiskinan	Rupiah	447.793	453.202	458.611	464.021	469.430	474.839	480.248
20	Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan	Rupiah	11.966.000	12.044.714	12.123.429	12.202.143	12.280.857	12.359.571	12.438.286
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	85,45	87,60	91,15	94,93	97,76	101,42	104,73
22	Nilai SAKIP	Nilai	77,07	77,65	78,37	79,23	79,88	80,67	81,43
23	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,29	4,30	4,32	4,33	4,34	4,36	4,37
24	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	n/a	69,38	70,51	71,63	72,75	73,88	75,00

Sumber: Analisis Data, 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator Kinerja Daerah (IKD) diambil dari lampiran Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan kebutuhan, tambahan beberapa indikator yang relevan, serta menampilkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen indikator untuk mengevaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah dalam periode 20 tahun. RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2045 memasuki periode pertama pembangunan pertama tahun 2025-2030. Secara detail, berikut Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Tulungagung.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Tulungagung 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Persentase luasan kawasan permukiman layak huni	%	95,33	95,40	95,54	95,73	95,93	96,04	96,18	Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	87,35	74,82	75,32	75,82	76,32	76,82	77,32	Pangan
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,550	0,542	0,535	0,529	0,524	0,520	0,500	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	15,30	29,87	31,02	32,16	33,31	34,45	35,60	Lingkungan Hidup
5	Rata-rata luas baku sawah yang mendapat air irigasi setiap musim tanam	Ha	10.909	11.146	11.246	11.346	11.446	11.456	11.556	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,66	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	86,86	86,90	87,00	87,10	87,20	87,30	87,40	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	91,85	91,48	92,45	93,35	94,24	95,08	95,90	Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	2,80	29,18	29,38	29,58	29,78	29,98	30,18	Lingkungan Hidup
10	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	0,004	6,86	7,63	8,41	9,19	9,96	10,74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	7,45	25,67	29,81	33,95	38,10	42,24	45	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Rasa Aman	Indeks	0,710	0,732	0,738	0,743	0,749	0,755	0,761	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	Sekretariat Daerah
3	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis (Treatment Coverage)	%	57	90	90	90	90	90	90	Kesehatan
4	Persentase Peningkatan Garis Kemiskinan	%	4	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
5	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,97	8,98	9,07	9,16	9,25	9,34	9,43	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,12	4,03	3,94	3,86	3,77	3,68	3,59	Tenaga Kerja
7	Angka Partisipasi Sekolah	%	68,46	69,90	71,34	72,76	74,16	75,56	76,66	Pendidikan
8	Persentase Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran	%	-	25	26	27	28	29	30	Sosial
9	Rata - Rata Skor Kemampuan Literasi	Skor	68,14	73,47	75,27	77,07	78,87	80,67	82,47	Pendidikan
10	Indeks Presepsi Ketaatan Masyarakat terhadap Regulasi Daerah	Indeks	-	70	71	72	73	74	75	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
11	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Angka	85,39	86,25	86,68	87,11	87,55	87,98	88,43	Kesehatan
12	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks	0,6885	0,6934	0,6981	0,7028	0,7075	0,7122	0,7169	Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
13	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	%	91,18	91,18	91,18	91,18	94,12	91,43	91,67	Kesehatan
14	Rata - Rata Skor Kemampuan Numerasi	Skor	62,05	65,18	67,38	69,58	71,78	73,98	76,18	Pendidikan
15	Indeks Toleransi	Indeks	0,770	0,773	0,777	0,780	0,783	0,787	0,790	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	63,29	63,81	64,33	64,85	65,37	65,90	66,42	Tenaga Kerja
17	Persentase Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	4,51	4,51	5,3	6,08	6,87	7,66	8,44	Sosial
18	Angka Kematian Ibu	Angka	144,45	120.67-131.07	118.67-130.07	116.67-129.07	114.67-128.07	112.67-127.07	110.67-126.07	Kesehatan
19	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	83,20	84,56	85,92	87,28	88,64	90	90,50	Kesehatan
20	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	86,8	90	90	90	90	90	90	Kesehatan
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	17,67	30,08	31,53	33,91	35,36	37,73	39,44	Tenaga Kerja
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,18	2,20	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	Pariwisata
2	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,27	4,32	4,34	4,37	4,39	4,41	4,43	Keuangan
3	Persentase Peningkatan Pelaku Seni (Usia Sekolah)	%	0,8	0,8	0,92	1,04	1,16	1,28	1,4	Kebudayaan
4	ICOR	Indeks	5,77	5,28	5,62	5,57	5,52	5,47	5,42	Penanaman Modal

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72,50	72,95	73,40	73,85	74,30	74,75	75,20	Keuangan
6	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	54,33	63	64	64,25	64,50	64,75	65	Kepemudaan dan Olahraga
7	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	20,84	21,31	21,60	21,88	22,16	22,44	22,72	Perdagangan
8	Nilai Survey Peningkatan Omset Usaha Mikro	%	1,67	2,01	2,41	2,75	3,15	3,49	3,89	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
9	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,77	6,61	6,71	6,81	6,91	7,01	7,11	Perdagangan
10	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang termanfaatkan menjadi obyek wisata	%	66	68	70	70,05	70,10	70,15	70,20	Kebudayaan
11	Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	544	545	546	547	548	549	550	Penanaman Modal
12	Persentase Koperasi Sehat	%	1,13	1,50	1,88	2,26	2,63	3,01	3,38	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
13	Skor Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	Indeks	59,09	60,09	61,09	62,09	63,09	64,09	65,09	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Persentase industri kecil dan menengah di level kabupaten	%	14,68	14,69	15,31	16,49	18,15	20,25	22,73	Perindustrian
15	Rasio usaha mikro yang ber NIB pada level Kabupaten	Rasio	17,69	17,69	18,51	19,33	20,14	20,96	21,78	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
16	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-1,95	0,5	0,52	0,55	0,57	1	1,2	Pertanian Kelautan dan Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
17	Rasio Kewirausahaan	Rasio	2,87	2,9	2,92	2,95	2,98	3,01	3,04	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	28,15	28,5	28,7	28,9	29,1	29,3	29,5	Penanaman Modal
19	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	10,06	7,16	6,87	6,59	6,30	6,02	5,73	Pangan
20	Tingkat Inflasi	%	2,32	2,30	2,28	2,25	2,23	2,21	2,19	Perdagangan
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Nilai Evaluasi Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	26,09	26,12	26,19	26,32	26,40	26,45	26,54	Perencanaan
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,78	3,78	-	-	-	-	-	Komunikasi dan Informatika
3	Nilai Evaluasi Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	22,47	22,98	23,27	23,84	24,19	25,22	25,30	Perencanaan
4	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	-	-	1.64-1.97	1.74-2.11	1.84-2.26	1.94-2.4	2.04-2.55	Komunikasi dan Informatika
5	Indeks Sistem Merit	Skor	280,00	280,00	285,00	290,00	295,00	300,00	305,00	Kepegawaian
6	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2.200	2.220	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500	Inspektorat Daerah
7	Persentase unit kerja yang diusulkan utk mendapatkan predikat WBK/WBBM	%	33	33	33	33	33	33	33	Inspektorat Daerah
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	91,67	93,21	94,74	96,28	97,82	99,36	100,00	Pendidikan
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang	%	99,69	99,82	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)									
3	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	77,20	78,30	79,40	80,50	81,60	82,70	83,80	Pendidikan
4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,66	68,16	69,66	71,16	72,66	74,16	75,66	Pendidikan
5	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	14,01	16,67	19,33	21,99	24,65	27,31	29,97	Pendidikan
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,29	62,19	65,09	67,99	70,89	73,79	76,69	Pendidikan
7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	66,13	68,63	71,13	73,63	76,13	78,63	81,13	Pendidikan
8	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasiÂ S1/DÂ IV	%	88,61	90,98	91,48	91,98	92,48	92,98	93,48	Pendidikan
9	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	59,85	62,35	64,85	67,35	69,85	72,35	74,85	Pendidikan
10	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimalÂ akreditasiÂ B	%	87,51	87,93	88,34	88,75	89,16	89,57	89,98	Pendidikan
11	Iklim Keamanan SMP	Nilai	71,40	72,90	74,40	75,90	77,40	78,90	80,40	Pendidikan
12	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	58,64	61,04	63,44	65,84	68,24	70,64	73,04	Pendidikan
13	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	70,36	71,36	72,36	73,36	74,36	75,36	76,36	Pendidikan
14	Iklim Keamanan SD	Nilai	76,89	77,79	78,69	79,59	80,49	81,39	82,29	Pendidikan
15	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	73,07	74,07	75,07	76,07	77,07	78,07	79,07	Pendidikan
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	18	17	16	15	14	13	12	Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,7	13,04	12,37	11,71	11,05	10,38	9,72	Kesehatan
3	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
4	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	97,45	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
5	Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan	%	11,28	11,40	11,50	11,60	11,70	11,80	11,90	Kesehatan
6	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
7	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
8	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
9	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
10	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	%	11,28	11,40	11,50	11,60	11,70	11,80	11,90	Kesehatan
11	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,52	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
12	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
13	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti Pemerintah Daerah	%	38,80	38,90	39,00	39,10	39,20	39,30	39,40	Kesehatan
14	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	90,04	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
15	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
16	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
17	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	99,97	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	73,26	73,40	73,60	74,10	74,50	75,00	75,30	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase Kondisi Irigasi Baik Kewenangan Kab/Kota	%	61,24	61,50	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan)	Hari	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah									
4	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	43,71	44,11	44,51	44,91	45,31	45,71	46,11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten / kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	41,00	41,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	79,16	79,12	79,04	78,97	78,89	78,80	78,71	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
11	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab / kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	97,76	97,91	98,06	98,21	98,36	98,51	98,66	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase luasan kawasan kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	10,82	6,20	6,07	6,55	6,93	7,73	8,48	Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100	Perumahan dan Kawasan Permukiman
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	80	80	82	84	86	88	90	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
3	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	47,80	44,94	45	47	50	52	55	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
5	Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	%	36,60	35,60	40,00	44,40	48,90	53,30	57,80	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6	Jumlah PPNS pada satpol PP	Orang	2	2	2	2	2	3	4	Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
										serta Perlindungan Masyarakat
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	77,01	84	84	84	84	84	85	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
8	Persentase dokumen layanan pencegahan kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
9	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standart	%	59,03	69,90	72,29	75,90	78,31	80,72	81,93	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
10	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
11	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana revisi	%	19,19	19,56	19,93	20,29	20,66	21,03	21,40	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
12	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	19,26	19,60	19,96	20,34	20,71	20,80	21,45	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
13	Persentase dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPK) yang sah dan legal	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
14	Persentase Aparatur pemadam kebakaran	%	14,50	11,70	20,97	24,20	27,42	30,64	33,87	Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional									serta Perlindungan Masyarakat
15	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	80	100	100	100	100	100	100	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
16	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
17	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
18	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	18,88	18,88	19	19,3	19,5	19,8	20	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
19	Persentase Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	50	50	60	65	70	75	80	Sosial
2	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Sosial
4	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	Sosial
5	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Sosial
6	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Sosial
7	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	50	50	60	65	70	75	80	Sosial
8	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	60	60	60	65	70	75	80	Sosial
9	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di	%	50	50	50	60	70	80	90	Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti									
10	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	0,10	0,15	0,15	0,17	0,18	0,20	0,23	Sosial
11	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnyaÂ diÂ luarÂ pant i	%	100	100	100	100	100	100	100	Sosial
12	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Sosial
13	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Sosial
14	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	50	50	50	60	70	80	90	Sosial
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,13	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,43	Tenaga Kerja
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	10,45	10,46	10,47	10,48	10,49	10,50	10,51	Tenaga Kerja
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam	%	19,25	86,50	88	89,50	91	92,50	94	Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten									
4	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	48,75	51,13	53,66	56,33	59,16	62,15	65,31	Tenaga Kerja
5	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	Tenaga Kerja
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,99	96,09	96,16	96,30	96,40	96,50	96,61	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,345	0,240	0,227	0,220	0,214	0,207	0,200	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	24	25	26	27	28	29	30	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,53	94,55	94,60	94,63	94,65	94,68	94,70	Pangan
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	39,93	63	64	66	68	70	72	Pangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	94	56	58	59,5	71	72,5	74	Pangan
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2,95	5	4,43	4,06	3,69	3,32	2,95	Pangan
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
1	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	52,40	74,91	74,91	74,91	83,03	92,25	100	Pertanahan
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	0	20,09	29,91	39,96	50,00	75,00	100,00	Pertanahan
3	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Pertanahan
4	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	8,70	20	30	50	75	78,26	100	Pertanahan
5	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan	%	0	24,85	34,97	45,09	67,48	75,15	100	Pertanahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran									
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	66,48	71,90	71,98	72,06	72,14	72,22	72,30	Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,42	79,57	79,67	79,77	79,87	79,97	80,07	Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	70,99	71,09	71,19	71,29	71,39	71,49	Lingkungan Hidup
4	Sosialisasi dan pemahaman pengelolaan sampah	Kelompok	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Lingkungan Hidup
5	Anggaran Pengelolaan Sampah	Rupiah	2.530.000.000	4.032.166.000	5.482.126.000	6.030.338.600	6.633.372.460	7.296.709.706	8.026.380.677	Lingkungan Hidup
6	Kebijakan Pengelolaan Sampah	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Lingkungan Hidup
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Lingkungan Hidup
8	Sarana dan prasarana Pengelolan Sampah	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Lingkungan Hidup
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	98,87	98,90	99,00	99,10	99,20	99,30	99,40	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	2,04	2,5	3	3,5	4	4,5	5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	57,51	60	60,05	60,10	60,15	60,20	60,25	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	6,52	0,92	1,82	2,68	3,48	2,52	2,46	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	22	22	24	26	28	30	32	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	78,21	78,60	78,99	79,38	79,77	80,16	80,55	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	23	23	24	25	26	27	28	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Indeks Pembangunan KeluargaÂ	Indeks	62,82	63,7	64,58	65,46	66,34	67,22	68,10	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	11,1	10.9-11.1	10.8-11	10.7-10.9	10.6-10.8	10.5-10.7	10.4-10.6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	61,9	62,65	63,4	64,15	64,9	65,65	66,4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,5	9,378	9,256	9,134	9,012	8,890	8,768	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Perhubungan
2	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	94,16	94,18	94,24	94,3	94,39	94,51	94,64	Perhubungan
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemenÂ keselamatan	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	Perhubungan
4	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	Perhubungan
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	1,89	1,89	3,77	3,77	5,66	5,66	5,66	Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Komunikasi dan Informatika
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	-48,06	2,03	7,11	11,37	14,66	17,28	19,41	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-11.34%	1.57%	1.57%	2.14%	2.71%	3.28%	3.85%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
3	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	4,88	5,38	5,88	6,38	6,88	7,38	7,88	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	Penanaman Modal
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-38,40	0,059	0,060	0,061	0,062	0,063	0,064	Penanaman Modal
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	0,31	0,21	0,26	0,31	0,36	0,41	0,46	Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	22	22	22,05	22,10	22,15	22,20	22,25	Kepemudaan dan Olahraga
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,24	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,60	Statistik
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	17,43	21,79	30,07	35,08	40,09	45,1	48,37	Persandian
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	0	0	0,05	0,1	0,2	0,2	0,3	Kebudayaan
2	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Kebudayaan
3	Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Didaftarkan	%	n/a	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	1	Kebudayaan
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	68,10	68,40	68,70	69,00	69,30	69,60	69,90	Perpustakaan
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	67,32	67,50	67,60	67,90	68,10	68,30	68,50	Perpustakaan
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	84,75	84,85	84,95	85,05	85,15	85,25	85,35	Kearsiapan
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	81,67	100	100	100	100	100	100	Kelautan dan Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Produksi Perikanan Budidaya	%	117,12	100	100	100	100	100	100	Kelautan dan Perikanan
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	3,5	4,7	5,9	7,1	7,2	8,2	9,4	Pariwisata
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing [hotel Berbintang non Bintang]	%	5	5	5	5	5	5	5	Pariwisata
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	1,28	1,30	1,87	2,24	2,45	2,81	3,22	Pertanian
2	Peningkatan Produksi tanaman Pangan	%	-8,864	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	Pertanian
3	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	7,43	7,94	20,96	22,31	22,72	23,12	23,23	Pertanian
4	Peningkatan Produksi Tanman Hortikultura	%	6,207	0,24	0,26	0,28	0,30	0,31	0,33	Pertanian
5	Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan	%	21,084	1,08	1,10	1,11	1,16	1,21	1,26	Pertanian
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	95,00	Pertanian
BB	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Milyar Rupiah	440	457	480	500	520	540	560	Perdagangan
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP)	%	100	100	100	100	100	100	100	Perdagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	bertanda tera sah yang berlaku									
BC	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	24,16	24,20	24,45	24,81	25,16	25,52	25,87	Perindustrian
2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	7,11	7,16	7,21	7,26	7,31	7,36	7,41	Perindustrian
3	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Milyar Rupiah	59,72	63	65	67	69	71	73	Perindustrian
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	14,42	14,50	14,60	14,70	14,80	14,90	15,00	Perindustrian
5	-Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	100	100	100	100	100	100	100	Perindustrian
6	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Perindustrian
7	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	20	20	20	20	20	20	20	Perindustrian

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	10,9	11	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	Perindustrian
9	-Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal ''Baik'' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	100	100	100	100	100	100	100	Perindustrian
BD	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	23,66	24,00	24,00	25,00	25,00	26,00	26,50	Sekretariat Daerah
2	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	35,56	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Sekretariat Daerah
3	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	98,73	98,74	98,75	98,76	98,77	98,78	98,79	Sekretariat Daerah
4	Kualifikasi dan Kopetensi SDM PBJ	Poin	18,00	19,50	21,00	22,50	22,50	22,50	22,50	Sekretariat Daerah
BE	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**									
1	Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah APBD Tahun N	Tepat Waktu	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat DPRD
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	41	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
BF	**5.01 - PERENCANAAN**									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang	%	100	100	100	100	100	100	100	Perencanaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	didukung Program Daerah									
BG	**5.02 - KEUANGAN**									
1	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	3,77	1,91	2,23	2,46	2,67	2,78	3,24	Keuangan
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	32,08	25,91	29,43	32	33,18	34,82	35	Keuangan
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	23,464	24,871	25,27	25,664	26,094	26,463	26,824	Keuangan
4	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	38,38	40,14	39,40	39	38	37	37	Keuangan
5	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	92,21	92	93,71	93,65	94,12	94,60	95,70	Keuangan
6	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Keuangan
7	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	14,14	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	Keuangan
BH	**5.03 - KEPEGAWAIAN**									
1	Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	93,12	94,00	94,5	95,00	95,5	96,00	96,50	Kepegawaian
BI	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	70	75	76	77	78	79	80	Penelitian dan Pengembangan
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam	%	66,67	75	76	77	78	79	80	Penelitian dan Pengembangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	implementasi pembangunan daerah									
BJ	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,118	3,126	3,133	3,141	3,148	3,156	3,163	Inspektorat Daerah
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,000	3,025	3,050	3,075	3,100	3,125	3,150	Inspektorat Daerah
3	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	2.394	2.400	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750	Inspektorat Daerah
4	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Inspektorat Daerah
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah

Sumber: Analisis Data, 2025

BAB V
PENUTUP

Bab penutup memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

5.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun yang memuat visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dari hasil Pilkada Serentak tahun 2024. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029 adalah "Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa". Visi ini diwujudkan melalui:

- **Misi 1:** Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah dan Membangun dari Desa
- **Misi 2:** Mewujudkan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas
- **Misi 3:** Mewujudkan SDM yang Unggul dan Berbudaya, serta Kehidupan Masyarakat yang Penuh Keguyuban
- **Misi 4:** Menuntaskan Kemiskinan Secara Terpadu dan Kolaboratif
- **Misi 5:** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inklusif, dan Bersih dari Korupsi

Penyusunan dokumen ini didasarkan pada potensi, permasalahan, dan kebijakan dalam dokumen sektoral lainnya seperti RTRW, KLHS RPJMD, dan RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2045 yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui agenda pembangunan ke depan. Untuk memperkuat keselarasan pembangunan daerah, dokumen ini juga telah mempertimbangkan kebijakan nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029, seperti visi, Asta Cita, program prioritas Presiden dan Wakil Presiden serta arah kebijakan kewilayahan. Selain RPJMN, dokumen ini juga mempertimbangkan kebijakan provinsi yang termuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini, yaitu komitmen yang tinggi para stakeholders, kolaborasi, dan partisipasi seluruh stakeholders pembangunan serta pemanfaatan TIK. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, diharapkan Masyarakat Tulungagung

yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa dapat terwujud.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Visi RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 bisa terwujud ketika adanya komitmen, kolaborasi, dan partisipasi seluruh stakeholders pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah pelaksanaan sebagai ketentuan umum yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJMD. Berikut kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen pembangunan 5 tahun yang harus dipedomani bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta wajib memedomani dan mendukung seluruh kebijakan yang termuat dalam dokumen tersebut, seperti visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;
2. Setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung wajib memedomani dalam setiap perumusan kebijakan, seperti Renstra, Renja, dan kebijakan lainnya.;
3. Peningkatan sinkronisasi substansi antara RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029, RPJMN 2025-2029, dan dokumen lainnya.
4. Peningkatan konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen RPJMD dengan kebijakan pendanaan harus dilakukan dalam rangka meningkatkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran;
5. Pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD semata, namun dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan pembiayaan alternatif-inovatif melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pembiayaan yang baru, peningkatan kelembagaan pembiayaan yang adaptif, pemanfaatan TIK dalam proses bisnis, dan optimalisasi peran sektor keuangan daerah;
6. Penerapan kaidah pelaksanaan ini harus didukung oleh pemanfaatan TIK melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh siklus pembangunan.
7. Dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 didesain secara adaptif. Oleh karena itu, memuat mekanisme perubahan yang memastikan adanya ruang penyesuaian terhadap berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan. Mekanisme perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan

force majeure, yaitu perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Setiap penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 harus dengan prinsip, yaitu akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi;

8. Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 dapat berjalan baik, maka dibutuhkan penerapan manajemen risiko pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Ruang lingkung pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah; dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
2. Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029;
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan setiap tahun; dan
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan tingkat Perangkat Daerah, dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh unit kerja bidang perencanaan.

BUPATI TULUNGAGUNG,

GATUT SUNU WIBOWO



Pemerintah
Kabupaten Tulungagung

Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2025 - 2029